



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2010**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 27a/LHP/XV/05/2011
Tanggal : 24 Mei 2011

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp / Fax (021) 25549000

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
SISTEMATIKA HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010.....	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010.....	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.....	4

SISTEMATIKA HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010 terdiri dari lima laporan pokok dan satu laporan tambahan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif berisi lingkup pemeriksaan, opini BPK atas LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2010 dan 2009, temuan-temuan signifikan berupa kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan, serta rekomendasi.

2. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010

Laporan I berisi (a) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini BPK, (b) Gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, waktu pemeriksaan, obyek pemeriksaan, batasan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan atas LKKL, dan (c) LKPP Tahun 2010.

3. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Laporan II berisi (a) Resume Laporan atas Pengendalian Intern dan (b) Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern.

4. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Laporan III berisi (a) Resume Laporan atas Kepatuhan dan (b) Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan.

5. Laporan IV: Laporan Pemantauan Tindak Lanjut

Laporan IV berisi (a) Resume Pemantauan Tindak Lanjut dan (b) Pemantauan Tindak Lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2005 - 2009.

6. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Laporan tambahan tersebut berisi hasil reviu mengenai pemenuhan kriteria-kriteria terkait (a) kejelasan aturan mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah, (b) keterbukaan proses penganggaran, (c) ketersediaan informasi bagi publik, dan (d) integritas data yang dilaporkan.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010**

- 01 Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.
- 02 Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf 04 – 07 berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Prinsip Akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.
- 03 Dalam Laporan BPK Nomor 034/01/LHP/XV/05/2010 Tanggal 27 Mei 2010, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP Tahun 2009 karena permasalahan yang berkaitan dengan (1) kesalahan klasifikasi belanja, (2) permasalahan pencatatan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) atas Aset Tetap, dan (3) pengakuan kewajiban atas program Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada PT Taspen (Persero).
- Dalam tahun 2010, Pemerintah telah melakukan upaya perbaikan dengan menetapkan peraturan tata cara realokasi anggaran dari Bagian Anggaran (BA) Belanja Lainnya ke BA kementerian negara/lembaga (KL) dan mencatat kewajiban kepada PT Taspen (Persero) atas program THT PNS dalam Neraca.
- 04 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan B.2.1.1 atas Laporan Keuangan, realisasi Penerimaan Perpajakan untuk Tahun 2010 adalah sebesar Rp723,31 triliun. Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar Rp11,28 triliun dan Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas (PBB

Migas) sebesar Rp19,30 triliun. Pengakuan, penagihan, dan pencatatan penerimaan perpajakan tersebut bermasalah sebagai berikut. **Pertama**, sistem pencatatan penerimaan perpajakan tersebut lemah sehingga terdapat transaksi pembatalan penerimaan (*reversal*) yang tidak dapat diyakini data penggantinya. Transaksi yang disebutkan sebagai pengganti transaksi yang dibatalkan senilai Rp3,39 triliun memiliki perbedaan data yang signifikan dengan transaksi yang dibatalkan. **Kedua**, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak menggunakan dokumen yang sah sesuai UU PBB untuk menagih PBB Migas tahun 2010 sebesar Rp19,30 triliun. DJP juga menggunakan data dasar pengenaan pajak yang tidak valid sebagai berikut: (1) data hasil produksi yang digunakan berbeda sebesar 56,78 juta barel dan 1.244,82 juta mscf dengan hasil produksi yang dilaporkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), (2) luas 51 kabupaten/kota lebih besar 46.682 km² dibanding luas wilayah administrasi kabupaten/kota yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, dan (3) data wilayah kerja tidak mengecualikan wilayah yang bukan hak wilayah kerja pertambangan sesuai UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi. Data yang ada tidak memungkinkan BPK untuk meyakini kewajaran dasar pengenaan PBB Migas. **Ketiga**, Pemerintah melaporkan PPN DTP Tahun 2010 sebesar Rp11,28 triliun sebagai penerimaan perpajakan sekaligus belanja subsidi dalam LRA. Pengakuan pajak DTP tersebut berdasarkan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun 2010. BPK berpendapat, penyelesaian PPN melalui Pajak Ditanggung Pemerintah tidak sesuai dengan UU PPN pasal 16B yang menyatakan penyelesaian PPN melalui dibebaskan atau tidak dipungut sebagian/seluruhnya.

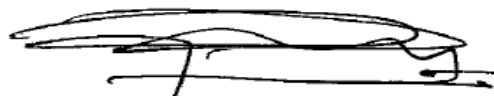
- 05 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.8 atas Laporan Keuangan, Pemerintah mengungkapkan saldo Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp1,88 triliun yang merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dari BUN dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri yang belum ada penggantian dari pemberi pinjaman. Uang Muka yang dilaporkan tersebut tidak didukung rincian baik per jenis pinjaman, per dokumen pencairan pembiayaan pendahuluan (talangan) maupun dokumen usulan penggantianannya (*reimbursement*). Selain itu, transaksi talangan dan penggantian tahun 2009-2010 masing-masing sebesar Rp1,14 triliun dan Rp1,43 triliun tidak dapat diidentifikasi dan terdapat penggantian yang lebih tinggi sebesar Rp2,92 triliun dibandingkan dokumen usulan penggantianannya. Transaksi talangan dan penggantian Uang Muka dari Rekening BUN juga diperhitungkan sebagai koreksi pencatatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Neraca. Catatan yang ada tidak memungkinkan BPK menguji kewajaran Uang Muka BUN dan pengaruhnya terhadap catatan SAL.
- 06 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.9 atas Laporan Keuangan, Pemerintah mengungkapkan Piutang Pajak sebesar Rp70,95 triliun, diantaranya sebesar Rp54,01 triliun merupakan Piutang Pajak yang dikelola DJP. Sistem pencatatan Piutang Pajak di DJP masih menunjukkan kelemahan, yaitu (1) penambahan piutang menurut data aplikasi piutang berbeda sebesar Rp2,51 triliun dengan dokumen sumbernya yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Tagihan Pajak (STP) dan (2) pengurangan Piutang PBB berbeda sebesar Rp1,03 triliun dengan penerimaannya. Data dan catatan yang ada tidak

memungkinkan BPK untuk menguji kewajaran Piutang Pajak.

- 07 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.25 atas Laporan Keuangan, Pemerintah mengungkapkan Aset Tetap sebesar Rp1.184,30 triliun yang merupakan nilai Aset Tetap berdasar Neraca Kementerian Negara/Lembaga (KL) dan Neraca BUN. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan dan belum memperhitungkan penyusutan. Pemerintah telah melakukan IP atas Aset Tetap yang diperoleh sebelum Neraca Awal per 31 Desember 2004. IP dinyatakan selesai per 31 Maret 2010, tetapi masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatan hasil IP sebagai berikut (1) nilai koreksi hasil IP berbeda dengan hasil koreksi pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sebesar Rp12,95 triliun, (2) Aset Tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp5,34 triliun pada delapan KL belum dilakukan IP, (3) hasil IP pada empat KL senilai Rp56,42 triliun belum dibukukan, dan (4) IP tidak mencakup penilaian mengenai umur manfaat sehingga Pemerintah belum dapat melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap. Nilai Aset Tetap yang dilaporkan bisa berbeda secara signifikan jika Pemerintah menyelesaikan IP, mencatat seluruh hasil IP, serta memberlakukan penyusutan.
- 08 Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah menyelesaikan PPN sesuai UU PPN, memastikan keakuratan pembatalan penerimaan, menghitung PBB Migas dengan data yang valid, menyempurnakan pencatatan Uang Muka dari Rekening BUN, mencatat piutang pajak sesuai dokumen sumber, serta menyelesaikan dan mencatat seluruh hasil IP, laporan keuangan yang kami sebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2010 dan 2009 serta realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 09 Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran LKPP Tahun 2010, BPK melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam laporan Nomor 27b/LHP/XV/05/2011 Tanggal 24 Mei 2011 dan Nomor 27c/LHP/XV/05/2011 tanggal 24 Mei 2011, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 24 Mei 2011

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Ketua,**



**Drs. Hadi Poernomo, Ak
Akuntan Register Negara No. D-786**

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

A. Dasar Hukum Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010 didasarkan pada peraturan sebagai berikut.

- 1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 2) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
- 4) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

B. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan pendapat atas kewajaran penyajian angka dalam laporan keuangan dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu:

- 1) Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
- 2) Entitas yang diaudit telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu;
- 3) Sistem pengendalian intern instansi tersebut baik terhadap informasi keuangan yang dihasilkan maupun terhadap pengamanan atas kekayaannya, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
- 4) Pengungkapan yang memadai atas informasi laporan keuangan.

C. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2010 meliputi pengujian atas akun-akun dan saldo yang disajikan dalam neraca serta transaksi-transaksi pada laporan realisasi anggaran. Pengujian atas laporan keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan (asersi) dalam informasi keuangan tersebut yang meliputi:

- 1) Keberadaan dan Keterjadian
Bahwa seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2010 dan seluruh penerimaan, belanja dan pembiayaan yang terjadi selama periode anggaran Tahun 2010 yang diaudit telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai.
- 2) Kelengkapan
Bahwa semua transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang terjadi selama periode tersebut dan aset serta kewajiban pemerintah telah dicatat seluruhnya dalam laporan keuangan.

- 3) **Hak dan Kewajiban**
Bahwa seluruh Aset dan Kewajiban yang tercatat merupakan milik dan kewajiban Pemerintah Pusat dan realisasi Penerimaan dan Belanja yang tercatat merupakan penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Pusat.
- 4) **Penilaian dan Alokasi**
Bahwa seluruh aset, kewajiban, pendapatan, belanja dan pembiayaan telah dinilai secara memadai dan diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan.
- 5) **Penyajian dan Pengungkapan**
Bahwa penyajian laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan catatan-catatan atas laporan keuangan telah mengungkapkan informasi keuangan yang memadai.
- 6) **Ketaatan dan Kepatuhan**
Bahwa seluruh transaksi yang diungkapkan dalam LKPP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan APBN.

D. Standar Pemeriksaan

BPK melaksanakan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK Tahun 2007.

E. Metodologi Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan dengan pendekatan berdasarkan risiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan sistem pengendalian intern untuk menentukan area risiko penting yang menjadi fokus pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Dalam menganalisis dan menguji proses penyusunan dan penyajian LKPP, BPK telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini.

- 1) Menguji sistem akuntansi yang ditetapkan Pemerintah apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- 2) Menguji proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan apakah telah mengikuti sistem akuntansi yang telah ditetapkan Menteri Keuangan;

Pemeriksaan BPK juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan pengujian substantif untuk menilai efektivitas pengendalian dan kewajaran LKPP.

Selain itu BPK juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut dari setiap permasalahan yang ditemui dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2005- 2009.

F. Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan lapangan dilakukan mulai tanggal 1 Maret 2011 s.d. 24 Mei 2011 berdasarkan Surat Tugas Anggota/Pembina AKN II No. 49./ST/IV-XV.2/02/2011 tanggal 17 Februari 2011.

G. Obyek Pemeriksaan

Obyek pemeriksaan BPK adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2010, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas Tahun 2010, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

H. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan tanggung jawab Pemerintah. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh Pemerintah.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila terdapat perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

I. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)

BPK juga melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2010 yang hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010.

Hasil pemeriksaan atas 76 LKKL Tahun 2010 (termasuk BPK yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik), LK Bendahara Umum Negara (BUN), dan 7 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) menunjukkan terdapat 53 KL yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, 29 KL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 2 KL mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Rincian Hasil pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2008 s.d. 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Tahun 2008, 2009 dan 2010**

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL		
			2008	2009	2010
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WDP	WTP	WTP
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP – DPP	WTP	WTP
4	005	Mahkamah Agung	TMP	TMP	WDP
5	006	Kejaksaan Agung	TMP	WDP	WDP
6	007	Sekretariat Negara	WDP	WDP	WTP
7	010	Kementerian Dalam Negeri	TMP	WDP	WTP-DPP
8	011	Kementerian Luar Negeri	WDP	TMP	WDP
9	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WDP
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP
11	015	Kementerian Keuangan	WDP	WDP	WDP
12	018	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WDP
13	019	Kementerian Perindustrian	WTP-DPP	WTP	WTP
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WDP	WTP-DPP
15	022	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WDP
16	023	Kementerian Pendidikan Nasional	WDP	WDP	TMP
17	024	Kementerian Kesehatan	WDP	TMP	TMP
18	025	Kementerian Agama	TMP	WDP	WDP
19	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP	WDP
20	027	Kementerian Sosial	WDP	WDP	WDP
21	029	Kementerian Kehutanan	TMP	WDP	WDP
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	TMP	WDP	WTP-DPP
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum	TMP	WDP	WDP
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	WTP-DPP	WTP	WTP
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP
26	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WDP	WTP	WTP
27	040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	TMP	WDP	WDP
28	041	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP
29	042	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	WTP	WTP	WTP
30	043	Kementrian Lingkungan Hidup	TMP	TMP	WDP
31	044	Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	WDP	WDP	WTP
32	047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	WTP	WTP	WTP
33	048	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	WTP	WTP	WTP
34	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL		
			2008	2009	2010
35	051	Lembaga Sandi Negara	WDP	WDP	WTP-DPP
36	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP
37	054	Badan Pusat Statistik	TMP	WDP	WDP
38	055	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP
39	056	Badan Pertanahan Nasional	TMP	TMP	WDP
40	057	Perpustakaan Nasional	WDP	WDP	WTP
41	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP
42	060	Kepolisian RI	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP
43	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WDP	WDP	WTP-DPP
44	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP
45	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP
46	066	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
47	067	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP	WDP
48	068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	WDP	WTP	WDP
49	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
50	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
51	076	Komisi Pemilihan Umum	TMP	TMP	WDP
52	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP
53	078	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP
54	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WDP	WTP
55	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WDP	WTP	WTP
56	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WTP	WTP
57	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WTP	WTP
58	083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	WTP	WTP	WDP
59	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP
60	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP-DPP
61	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP
62	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP
63	088	Badan Kepegawaian Negara	WDP	WTP	WTP
64	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP-DPP	WTP	WTP
65	090	Kementerian Perdagangan	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
66	091	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP
67	092	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	WDP	WTP	WDP
68	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL		
			2008	2009	2010
69	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP
70	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP
71	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	TMP	TMP	WDP
72	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP
73	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
74	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	*	*	WTP
75	107	Basarnas	*	*	WDP
76	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	*	*	WTP
77	999.01	Pengelolaan Utang	WTP ****	WTP	WTP
78	999.02	Hibah	TMP	WDP	WDP
79	999.03	Penyertaan Modal Negara	WDP	WTP	WTP-DPP
80	999.04	Penerusan Pinjaman	TMP	TMP	WDP
81	999.05	Transfer ke Daerah	WDP untuk Dana Perimbangan dan WTP untuk Otonomi Khusus	WTP-DPP	WTP-DPP
82	999.06	Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain	TMP untuk Belanja Lain-lain; WTP-DPP untuk Belanja Subsidi	WDP	**
83	999.07	Belanja Subsidi	*	*	WDP
84	999.08	Belanja Lain-lain	*	*	WDP
85		Bendahara Umum Negara	****	****	WDP

Keterangan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

*

** : BA 999.06 pada Tahun 2010 dipecah menjadi BA 999.07 dan BA 999.08

*** : Diberikan Opini mulai Tahun 2010

**** : Mencakup tiga BA



REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2010**
(Audited)

Mei 2011

INDEKS ISI	iii
INDEKS TABEL	iv
INDEKS GRAFIK	v
INDEKS DAFTAR	vii
INDEKS SINGKATAN	ix
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	xii
RINGKASAN	1
I. LAPORAN REALISASI APBN	10
II. NERACA	13
III. LAPORAN ARUS KAS	16
IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	19
A. PENJELASAN UMUM	19
A.1. DASAR HUKUM	19
A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO	19
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	53
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI	57
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN	70
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN	70
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN	71
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA	91
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	96
C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM	96
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA	97
C.3. CATATAN PENTING LAINNYA	144
C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN	164
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	165
D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	165
D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS	167
DAFTAR	186

1.	Asumsi Dasar APBN dan Realisasi APBN TA 2010	27
2.	Fiscal Space terhadap PDB Tahun 2006 – 2010	29
3.	Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2006 – 2010	32
4.	Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun 2010	38
5.	Perkembangan Belanja Negara Tahun 2006 – 2010	45
6.	Kontribusi Belanja Modal terhadap PDB	45
7.	Dampak APBN terhadap Sektor Riil	51
8.	Presentase Anggaran dan Realisasi APBN terhadap PDB TA 2010	51
9.	Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2006 – 2010	52
10.	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2010 dan TA 2009	77
11.	Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak	101
12.	Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai	103
13.	Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan <i>Promissory Notes</i>	137
14.	Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing	137
15.	Saldo Anggaran Lebih TA 2010 dan 2009	138
16.	Mutasi Rekening Nomor 600.000.411 Tahun 2010 dan 2009	144
17.	Jenis dan Outstanding SPN Tahun 2010	403
18.	Debtswitch Tahun 2010	404
19.	Transaksi Buyback Tahun 2010	405
20.	Rekapitulasi Hasil Lelang SBSN Tahun 2010	407
21.	Nilai Outstanding SBN Seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2010	408
22.	Jatuh Tempo SBN Seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2010	409
23.	Kupon SBN Seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2010	410
24.	Nilai dan Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2010	411
25.	Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBN seri Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2010	412
26.	Nilai dan Jatuh Tempo SBN Seri Variable Rate (VR) per 31 Desember 2010	414
27.	Nilai dan Outstanding Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia per 31 Desember 2010	415
28.	Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBSN Rupiah per 31 Desember 2010	416
29.	Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBN Valas dalam Rupiah per 31 Desember 2010	418
30.	Mutasi Principle Outstanding SBN Tahun 2010	420

1. Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun Terakhir	20
2. Tren PDB Selama 5 Tahun Terakhir	21
3. Struktur PDB menurut Komponen Penggunaan Tahun 2010 dan 2009	21
4. Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha	22
5. Perbandingan Struktur PDB menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 dan 2010	22
6. Perbandingan PDB Per Kapita Selama 5 Tahun	22
7. Laju Inflasi Sepanjang Tahun 2010	23
8. Perbandingan Ekspor Tahun 2010 dan 2009	24
9. Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Tahun 2010T	24
10. Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2010	25
11. Tren CAR, LDR dan NPL Bulanan Tahun 2010	26
12. Realisasi Belanja Tidak Terikat dan Belanja Terikat Tahun 2010	30
13. Tren <i>Tax Ratio</i> Tahun 2006 – 2010	33
14. Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2006 – 2010	33
15. Target dan Realisasi Penerimaan PNBPN Tahun 2006 – 2010	34
16. Realisasi PNBPN Lainnya Tahun 2006 – 2010	35
17. Kementerian Negara/Lembaga Penerima Alokasi Anggaran Terbesar	37
18. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2009 Berdasarkan Alokasi Ekonomi	39
19. Tren Belanja Negara Bulanan TA 2010 dan TA 2009	40
20. Tren Belanja Pegawai Bulanan TA 2010	40
21. Tren Belanja Barang TA 2010	41
22. Tren Belanja Modal TA 2010	41
23. Tren Belanja Subsidi Bulanan TA 2010	42
24. Tren Belanja Bantuan Sosial Bulanan TA 2010	42
25. Tren Belanja Pembayaran Bunga Utang Bulanan TA 2010	43
26. Tren Belanja Lain-lain Bulanan TA 2010	44
27. Tren Serapan Dana Perimbangan TA 2010	46
28. Tren Serapan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2010	46
29. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB Tahun 2006 - 2010	48
30. Defisit dan Keseimbangan Primer Tahun 2006 – 2010	48
31. Perkembangan Surplus/Defisit, Pembiayaan, serta SiKPA/SiLPA Tahun 2006 - 2010	49
32. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBPN TA 2006 - 2010	70
33. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2006 – 2010	71
34. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010	72

35. Komposisi Lima Terbesar K/L Pengguna Anggaran Pemerintah Pusat TA 2010	76
36. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2010	77
37. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2010	78
38. Komposisi Realisasi Transfer Daerah TA 2010	83
39. Komposisi Pendapatan BLU TA 2010	94
40. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2010	94
41. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2006 s.d. 2010	96
42. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas	166
43. Struktur Utang Pemerintah	402
44. Struktur Outstanding ON Rupiah Seri FR	409
45. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah Seri FR	410
46. Tingkat kupon Seri FR per 31 Desember 2010	411
47. Struktur Outstanding ORI	412
48. Struktur Jatuh Tempo ORI	412
49. Struktur Outstanding Zero Coupon (ZC)	413
50. Struktur Jatuh Tempo Zero Coupon (ZC)	413
51. Struktur Outstanding VR	414
52. Struktur Jatuh Tempo VR	414
53. Struktur Outstanding SPN	415
54. Struktur Outstanding SUP	415
55. Struktur Jatuh Tempo SUP	416
56. Struktur Outstanding SBSN	417
57. Imbalan SBSN per 31 Desember 2010	417
58. Struktur Jatuh Tempo SBSN per 31 Desember 2010	417
59. Struktur <i>Outstanding</i> SBN Valas per 31 Desember 2010	418
60. Struktur Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2010	419
61. Tingkat Kupon/Imbalan SBN Valas per 31 desember 2010	419
62. Struktur Outstanding SUN dan SBSN Rupiah per 31 desember 2010	419

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2010	187
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2010	202
3. Laporan Realisasi Dana Perimbangan TA 2010	223
4. Daftar Rekening Khusus per 31 Desember 2010	278
5. Daftar Saldo Kas di KPPN per 31 Desember 2010	284
6. Saldo Rekening Pemerintah Lainnya di BI per 31 Desember 2010	289
7. Laporan Penerimaan Pemerintah Sektor Migas	290
8. Rekening Pemerintah Lainnya Tahun 2010	297
9. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010	298
10. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2010	300
11. Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2010	301
12. Piutang Pajak per 31 Desember 2010	303
13. Piutang PNBPN per 31 Desember 2010	305
14. Piutang PNBPN Minyak Bumi dan Gas Alam per 31 Desember 2010	306
15. Bagian Lancar Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2010	309
16. Piutang yang Berasal dari Kewajiban Bank Dalam Likuidasi	311
17. Persediaan pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2010	312
18. Piutang RDI/RPD/SLA	314
19. Penyertaan Modal Negara Pada BUMN	315
20. Penyertaan Modal Negara Pada Non BUMN	320
21. Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional	321
22. Aset Tetap pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2010	322
23. Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2010	334
24. Aset Tak Berwujud pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2010	335
25. Rekening Dana Cadangan per 31 Desember 2010	337
26. Aset Lain-lain pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2010	339
27. Ringkasan Aset Negara yang Dikelola PPA per 31 Desember 2010	341
28. Aset Eks BPPN yang Dikelola Tim Koordinasi	342
29. Aset KKKS per 31 Desember 2010	344
30. Utang Kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2010	346
31. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Surat Berharga Negara per 31 Desember 2010	348
32. Utang Bunga Obligasi Negara per 31 Desember 2010	349
33. Surat Berharga Negara Jangka Pendek Dalam Negeri per 31 Desember 2010	352
34. Pendapatan Diterima di Muka pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2010	353
35. Surat Berharga Negara Jangka Panjang Dalam Negeri per 31 Desember 2010	355

36. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara per 31 Desember 2010	358
37. Ikhtisar Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya per 31 Desember 2010	365
38. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU per 31 Desember 2010	375
39. Ikhtisar laporan Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2010	381
40. Rekapitulasi Hasil Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina s.d. 31 Desember 2010	383
41. Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2009	388
42. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2010	402

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BDL	: Bank Dalam Likuidasi
BEJ	: Bursa Efek Jakarta
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BI	: Bank Indonesia
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	: Badan Layanan Umum
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	: Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CBN	: Cadangan Benih Nasional
CBP	: Cadangan Beras Pemerintah
CFO	: <i>Chief Financial Officer</i>
CGI	: <i>Consultative Group on Indonesia</i>
COO	: <i>Chief Operating Officer</i>
CPI	: <i>Consumer Price Index</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAU	: Dana Abadi Umat
DBH	: Dana Bagi Hasil
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DTP	: Ditanggung Pemerintah
EDI	: <i>Electronic Data Exchange</i>
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
HTI	: Hutan Tanaman Industri
INDRA	: <i>Indonesian Debt Restructuring Agency</i>
KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan

KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	: Kiriman Uang
KUHR	: Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	: Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	: Kas Umum Negara
KUTPA	: Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam
LAK	: Laporan Arus Kas
LBMN	: Laporan Barang Milik Negara
LDKP	: Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	: <i>Loan to Deposit Ratio</i>
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	: Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	: Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MPN	: Modul Penerimaan Negara
MP3	: Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	: <i>Non-Performing Loan</i>
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
PFK	: Perhitungan Pihak Ketiga
PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	: <i>Past Service Liability</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PT PPA	: PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	: <i>Recovery of Aceh Nias Trust Fund</i>
RDI	: Rekening Dana Investasi
RPD	: Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	: Rekening Pemerintah Lainnya
SA-BUN	: Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	: Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	: Sistem Akuntansi Umum
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
SiAP	: Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	: <i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SiKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran

SILPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	:	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	:	<i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SP3	:	Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SUN	:	Surat Utang Negara
TA	:	Tahun Anggaran
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THT	:	Tabungan Hari Tua
TP	:	Tim Pembersihan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	:	<i>Treasury Single Account</i>
TSP	:	Tempat Simpan Pinjam
USD	:	<i>United State Dollar</i>
USP	:	Usaha Simpan Pinjam
UP	:	Uang Persediaan

LAPORAN REALISASI APBN**Pendapatan Negara dan Hibah**

Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah	71
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Perpajakan	72
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	72
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	73
Catatan	B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	73
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	73
Catatan	B.2.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	74
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	74
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan BLU	74
Catatan	B.2.1.3	Penerimaan Hibah	75

Belanja Negara

Catatan	B.2.2	Belanja Negara	75
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat	75
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	78
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	78
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	79
Catatan	B.2.2.1.4	Pembayaran Bunga Utang	79
Catatan	B.2.2.1.5	Subsidi	80
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah	81
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial	81
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain	82
Catatan	B.2.2.2	Transfer ke Daerah	82
Catatan	B.2.2.2.1	Dana Perimbangan	83
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Bagi Hasil	83
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Alokasi Umum	83
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	84
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	84
Catatan	B.2.2.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	84
Catatan	B.2.2.2.2.2	Dana Penyesuaian	84
Catatan	B.2.2.3	Suspen	85

Surplus (Defisit) Anggaran

Catatan	B.2.3	Surplus (Defisit) Anggaran	85

Pembiayaan

Catatan	B.2.4	Pembiayaan	85
Catatan	B.2.4.1	Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	86
Catatan	B.2.4.1.1	Rekening Pemerintah	86
Catatan	B.2.4.1.2	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	86
Catatan	B.2.4.1.3	Surat Berharga Negara (Neto)	86
Catatan	B.2.4.1.4	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	87
Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri	88
Catatan	B.2.4.1.6	Kewajiban Penjaminan	88

Catatan	B.2.4.1.7	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	88
Catatan	B.2.4.1.8	Pembiayaan Lain-lain	88
Catatan	B.2.4.2	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	88
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	88
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Program	89
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek	89
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	90
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	90

SiLPA (SiKPA)

Catatan	B.2.5	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)	91

CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	91

NERACA

ASET

		Aset Lancar	
Catatan	C.2.1	Rekening Kas BUN di BI	97
Catatan	C.2.2	Rekening Kas di KPPN	97
Catatan	C.2.3	Rekening Pemerintah Lainnya	97
Catatan	C.2.4	Kas di Bendahara Pengeluaran	98
Catatan	C.2.5	Kas di Bendahara Penerimaan	99
Catatan	C.2.6	Kas Lainnya dan Setara Kas	99
Catatan	C.2.7	Kas Pada BLU	99
Catatan	C.2.8	Uang Muka dari Rekening BUN	100
Catatan	C.2.9	Piutang Pajak	101
Catatan	C.2.10	Piutang Bukan Pajak	103
Catatan	C.2.11	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	106
Catatan	C.2.12	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	106
Catatan	C.2.13	Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang	106
Catatan	C.2.14	Uang Muka Belanja	106
Catatan	C.2.15	Piutang dari Kegiatan BLU	107
Catatan	C.2.16	Piutang Lain-lain	108
Catatan	C.2.17	Investasi Jangka Pendek BLU	110
Catatan	C.2.18	Persediaan	110
		Investasi Jangka Panjang	
Catatan	C.2.19	Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah	111
Catatan	C.2.20	Dana Bergulir	111
Catatan	C.2.21	Investasi Non Permanen Lainnya	113
Catatan	C.2.22	Investasi Permanen PMN	113
Catatan	C.2.23	Investasi Permanen BLU	116
Catatan	C.2.24	Investasi Permanen Lainnya	117
Catatan	C.2.25	Aset Tetap	117
Catatan	C.2.26	Aset Lainnya	118

KEWAJIBAN

		Kewajiban Jangka Pendek	
Catatan	C.2.27	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	128
Catatan	C.2.28	Utang Kepada Pihak Ketiga	128
Catatan	C.2.29	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	129

Catatan	C.2.30	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	130
Catatan	C.2.31	Utang Biaya Pinjaman	131
Catatan	C.2.32	Utang Subsidi	132
Catatan	C.2.33	Utang Surat Perbendaharaan Negara	132
Catatan	C.2.34	Pendapatan Diterima Dimuka	132
Catatan	C.2.35	Utang Jangka Pendek Lainnya	132

Kewajiban Jangka Panjang

Catatan	C.2.36	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan	133
Catatan	C.2.37	Utang Kepada Dana Pensiun dan Program THT	135
Catatan	C.2.38	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	135
Catatan	C.2.39	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	135
Catatan	C.2.40	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	136
Catatan	C.2.41	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	136

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar

Catatan	C.2.42	SAL Setelah Penyesuaian	138
Catatan	C.2.43	SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	139
Catatan	C.2.44	Dana Lancar Lainnya	139
Catatan	C.2.45	Cadangan Piutang	139
Catatan	C.2.46	Cadangan Persediaan	140
Catatan	C.2.47	Pendapatan yang Ditangguhkan	140
Catatan	C.2.48	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	140
Catatan	C.2.49	Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	141
Catatan	C.2.50	Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	141
Catatan	C.2.51	Selisih Kurs Bagian Lancar	141

Ekuitas Dana Investasi

Catatan	C.2.52	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	142
Catatan	C.2.53	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	142
Catatan	C.2.54	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	142
Catatan	C.2.55	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	142
Catatan	C.2.56	Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang	142

CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan	C.3	Catatan Penting Lainnya	144

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN ORAN

Catatan	C.4	Kejadian Penting Setelah Tanggal Pelaporan	164

LAPORAN ARUS KAS

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Catatan	D.2.1	Penerimaan Perpajakan	167
Catatan	D.2.2	PNBP	170
Catatan	D.2.3	Penerimaan Hibah	172
Catatan	D.2.4	Belanja Pegawai	172
Catatan	D.2.5	Belanja Barang	173
Catatan	D.2.6	Belanja Pembayaran Bunga Utang	173
Catatan	D.2.7	Subsidi	174
Catatan	D.2.8	Belanja Hibah	175
Catatan	D.2.9	Bantuan Sosial	175

Catatan	D.2.10	Belanja Lain-Lain	175
Catatan	D.2.11	Dana Bagi Hasil Pajak	176
Catatan	D.2.12	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	176
Catatan	D.2.13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	176
Catatan	D.2.14	Dana Alokasi Umum	176
Catatan	D.2.15	Dana Alokasi Khusus	177
Catatan	D.2.16	Dana Otonomi Khusus	177
Catatan	D.2.17	Dana Penyesuaian	177

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Catatan	D.2.18	Penjualan Aset	177
Catatan	D.2.19	Belanja Aset Tetap	178

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Catatan	D.2.20	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	179
Catatan	D.2.21	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	180
Catatan	D.2.22	Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	181
Catatan	D.2.23	Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	181
Catatan	D.2.24	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	181
Catatan	D.2.25	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	182
Catatan	D.2.26	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	182
Catatan	D.2.27	Penerusan Pinjaman	182
Catatan	D.2.28	Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	182

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Catatan	D.2.29	Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	183
Catatan	D.2.30	PFK Prefinancing dan PFK Lainnya (Neto)	184
Catatan	D.2.31	Kiriman Uang (Neto)	184
Catatan	D.2.32	Transito (Neto)	185



REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2010, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2010 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrua).

LKPP Tahun 2010 ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2010 - 31 Desember 2010.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 adalah sebesar Rp995,27 triliun atau 100,29 persen dari APBN-P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2010 adalah sebesar Rp1.042,12 triliun atau 92,54 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp697,41 triliun atau 89,24 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp344,73 triliun atau 100,03 persen dari APBN-P. Selain itu, pada TA 2010 terdapat Suspend Belanja sebesar minus Rp17,41 miliar.

Realisasi Defisit Anggaran TA 2010 adalah sebesar Rp46,85 triliun atau 35,03 persen dari APBN-P. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2010 adalah sebesar Rp91,55 triliun atau 68,45 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp44,71 triliun.

Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)			TA 2009 (<i>Audited</i>)
	APBN	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	992,40	995,27	100,29%	848,76
Belanja Negara	1.126,15	1.042,12	92,54%	937,38
Belanja Pemerintah Pusat	781,53	697,41	89,24%	628,81
Transfer ke Daerah	344,61	344,73	100,03%	308,59
Suspend Belanja Negara	-	(0,02)	-	(0,02)
Surplus (Defisit) Anggaran	(133,75)	(46,85)	35,03%	88,62
Pembiayaan Neto	133,75	91,55	68,45%	112,58
SiLPA (SiKPA)		44,71	-	23,96

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2010.

Jumlah Aset per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp2.423,69 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp254,78 triliun; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp706,41 triliun; Aset Tetap sebesar Rp1.184,30 triliun; dan Aset Lainnya sebesar Rp278,20 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.796,08 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp201,34 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.594,74 triliun.

Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp627,61 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp83,46 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp544,15 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)
Aset	2.423,69	2.122,90
Aset Lancar	254,78	231,39
Investasi Jangka Panjang	706,41	737,04
Aset Tetap	1.184,30	979,00
Aset Lainnya	278,20	175,47
Kewajiban	1.796,08	1.681,71
Kewajiban Jangka Pendek	201,34	187,84
Kewajiban Jangka Panjang	1.594,74	1.493,87
Ekuitas Dana Neto	627,61	441,19
Ekuitas Dana Lancar	83,46	43,55
Ekuitas Dana Investasi	544,15	397,64

3. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2010 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2010.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN) & Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kas Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp46,06 triliun, sedangkan pada awal tahun 2010 terjadi penyesuaian tambah sebesar Rp20,99 triliun, sehingga saldo awal Kas BUN & KPPN, dan Kas BLU tahun 2010 menjadi Rp67,05 triliun. Penyesuaian saldo awal tahun 2010 tersebut berasal dari penambahan saldo rekening SAL Rp5,87 triliun, saldo rekening penempatan di Bank Umum Rp15 triliun, saldo Kas pada BLU Rp0,11 triliun, dan saldo kas KPPN Rp0,007 triliun.

Selama TA 2010 terjadi kenaikan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp33,20 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp80,04 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp91,55 triliun, kenaikan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp2,93 triliun, dan penyesuaian pembukuan sebesar minus Rp1,18 triliun. Dengan demikian, saldo Kas BUN & KPPN, dan Kas BLU per 31 Desember 2010 adalah Rp96,16 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Kas di Rekening Khusus sebesar Rp2,82 triliun, Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp8,54 triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,52 triliun, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,63 triliun, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp8,60 triliun, dan Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp0,053 triliun, sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat sebesar Rp117,31 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2010 dan TA 2009 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Kas BUN, KPPN, dan BLU	46,06	75,83
Koreksi Saldo Awal	20,99	1,75
Saldo Awal Kas BUN, KPPN, dan BLU setelah Koreksi	67,05	77,58
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	33,20	(12,88)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(80,04)	(75,74)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	91,55	112,58
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	2,93	(2,84)
Pengunaan SAL	(17,35)	(51,86)
Penyesuaian Pembukuan	(1,18)	(0,79)
Kenaikan (Penurunan) Kas	29,11	(31,52)
Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU	96,16	46,06

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.



REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Jl. Pramuka No.33, Jakarta Timur 13120

Telp.021-5910031 (hunting), fax 021-85903713

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010 (AUDITED)

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk tahun anggaran 2010 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah Pusat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Kami memberikan catatan atas masih terdapatnya selisih catatan dengan nilai rekening Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Berdasarkan reviu kami, kecuali terhadap catatan pada paragraf ketiga di atas, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 24 Mei 2011



Kepala

Mardiasmo

Register Negara D-2950



REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN REALISASI APBN
(AUDITED)**

I. LAPORAN REALISASI APBN (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2010 (Audited)			TA 2009 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	B.2.1.1	743.325.906.000.000	723.306.668.621.739	97,31%	619.922.172.626.415
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	720.764.533.000.000	694.392.134.931.291	96,34%	601.251.757.069.894
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	22.561.373.000.000	28.914.533.690.448	128,16%	18.670.415.556.521
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	247.176.367.998.000	268.941.856.208.841	108,81%	227.174.419.064.671
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	164.726.732.000.000	168.825.442.320.286	102,49%	138.959.235.946.131
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	B.2.1.2.2	29.500.000.000.000	30.096.932.694.265	102,02%	26.049.543.069.440
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	43.462.758.949.000	59.428.639.159.020	136,73%	53.796.110.943.059
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	9.486.877.049.000	10.590.842.035.270	111,64%	8.369.529.106.041
III. Penerimaan Hibah	B.2.1.3	1.896.516.000.000	3.022.986.560.763	159,40%	1.666.643.504.397
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		992.398.789.998.000	995.271.511.391.343	100,29%	848.763.235.195.483
B. Belanja Negara	B.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	781.533.546.832.000	697.406.380.187.177	89,24%	628.812.419.834.203
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	162.659.024.805.169	148.078.084.098.609	91,04%	127.669.748.683.930
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	112.594.055.275.000	97.596.838.399.825	86,68%	80.667.925.311.049
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	95.024.557.888.000	80.287.065.685.665	84,49%	75.870.754.036.420
4. Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	105.650.244.000.000	88.383.233.764.097	83,66%	93.782.062.890.134
5. Subsidi	B.2.2.1.5	201.262.981.330.778	192.707.049.527.199	95,75%	138.082.160.271.329
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	243.218.000.000	70.008.777.575	28,78%	-
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	71.172.785.592.785	68.611.111.986.287	96,40%	73.813.555.200.705
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	32.926.679.940.269	21.672.987.947.920	65,82%	38.926.213.440.636
II. Transfer ke Daerah	B.2.2.2	344.612.929.480.000	344.727.611.830.379	100,03%	308.585.231.982.937
1. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1	314.363.315.800.000	316.711.293.029.068	100,75%	287.251.462.978.937
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1	89.618.446.100.000	92.183.491.233.868	102,86%	76.129.947.578.937
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.2	203.606.484.500.000	203.571.490.627.200	99,98%	186.414.100.000.000
c. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.1.3	21.138.385.200.000	20.956.311.168.000	99,14%	24.707.415.400.000

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -10-

Uraian	Catatan	TA 2010 (Audited)			TA 2009 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	B.2.2.2.2	30.249.613.680.000	28.016.318.801.311	92,62%	21.333.769.004.000
a. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.2.1	9.099.613.680.000	9.099.613.680.000	100,00%	9.526.564.000.000
b. Dana Penyesuaian	B.2.2.2.2.2	21.150.000.000.000	18.916.705.121.311	89,44%	11.807.205.004.000
III. Suspen Belanja Negara	B.2.2.3	-	(16.772.272.739)		(15.632.247.373)
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		1.126.146.476.312.000	1.042.117.219.744.817	92,54%	937.382.019.569.767
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	(133.747.686.314.000)	(46.845.708.353.474)	35,03%	(88.618.784.374.284)
D. Pembiayaan	B.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1	133.903.232.818.000	96.118.516.369.932	71,78%	124.999.182.482.469
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	45.477.096.818.000	22.189.312.607.078	48,79%	53.049.247.755.837
2. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.2	2.400.000.000.000	3.232.148.153.135	134,67%	690.333.091.255
3. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.3	107.500.385.000.000	91.102.598.250.248	84,75%	99.470.897.644.002
Penerimaan Surat Berharga Negara			167.634.217.942.000		
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(76.531.619.691.752)		
4. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	B.2.4.1.4	(20.424.249.000.000)	(19.799.149.000.000)	96,94%	(13.084.949.775.291)
5. Pinjaman Dalam Negeri	B.2.4.1.5	1.000.000.000.000	393.606.359.471	39,36%	-
6. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.6	(1.050.000.000.000)		0,00%	-
7. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.7	(1.000.000.000.000)	(1.000.000.000.000)	100,00%	-
8. Pembiayaan Lain-lain	B.2.4.1.8	-	-	-	(15.126.346.233.334)
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	B.2.4.2	(155.546.504.000)	(4.566.504.969.317)	2935,78%	(12.415.871.067.054)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	70.777.081.102.000	54.794.790.200.207	77,42%	58.662.045.806.549
a. Penarikan Pinjaman Program	B.2.4.2.1.1	29.421.800.000.000	28.974.644.489.116	98,48%	28.937.702.908.655
b. Penarikan Pinjaman Proyek	B.2.4.2.1.2	41.355.281.102.000	25.820.145.711.091	62,43%	29.724.342.897.894
2. Penerusan Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	(16.796.614.046.000)	(8.728.763.587.688)	51,97%	(3.046.803.016.526)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(54.136.013.560.000)	(50.632.531.581.836)	93,53%	(68.031.113.857.077)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		133.747.686.314.000	91.552.011.400.615	68,45%	112.583.311.415.415
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D+C)	B.2.5	-	44.706.303.047.141	-	23.964.527.041.131



REPUBLIK INDONESIA

NERACA
(AUDITED)

II. NERACA (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2010 (Audited)	31 Des 2009 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank			
Rekening Kas BUN di BI	C.2.1	82.430.710.192.763	32.185.520.242.213
Rekening Kas di KPPN	C.2.2	9.218.612.887.732	8.309.379.301.258
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.3	8.539.601.162.593	32.218.505.711.694
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4	518.919.028.152	1.036.241.894.537
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.5	632.344.354.246	1.040.200.195.970
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.6	8.652.179.999.211	901.887.427.630
Kas pada BLU	C.2.7	7.340.595.820.681	5.676.975.379.101
Jumlah Kas dan Bank		117.332.963.445.378	81.368.710.152.403
Uang Muka dari Rekening BUN	C.2.8	1.876.259.417.429	5.560.724.882.615
Piutang			
Piutang Pajak	C.2.9	70.945.271.446.620	63.658.918.330.257
Piutang Bukan Pajak	C.2.10	9.020.978.486.579	21.859.930.458.886
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.2.11	65.404.443	107.946.353
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.2.12	38.591.410.963	30.620.839.227
Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang	C.2.13	4.842.752.393.007	5.067.629.170.009
Uang Muka Belanja	C.2.14	614.122.632.355	210.222.609.348
Piutang dari Kegiatan BLU	C.2.15	1.121.930.274.893	1.520.445.115.328
Piutang Lain-lain	C.2.16	12.589.882.121.588	15.492.809.289.778
Jumlah Piutang		99.173.594.170.448	107.840.683.759.186
Investasi Jangka Pendek BLU	C.2.17	30.750.000.000	11.770.000.000
Persediaan	C.2.18	36.366.060.681.005	36.606.824.405.660
Jumlah Aset Lancar		254.779.627.714.260	231.388.713.199.864
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen			
Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah	C.2.19	43.367.037.927.876	56.829.949.663.857
Dana Bergulir	C.2.20	3.891.209.869.656	5.447.163.620.088
Investasi Non Permanen Lainnya	C.2.21	98.464.787.895	1.297.107.854.426
Jumlah Investasi Non Permanen		47.356.712.585.427	63.574.221.138.371
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN	C.2.22	564.087.107.302.153	555.416.111.508.201
Investasi Permanen BLU	C.2.23	6.637.194.500	6.637.194.500
Investasi Permanen Lainnya	C.2.24	94.959.618.306.997	118.042.412.825.796
Jumlah Investasi Permanen		659.053.362.803.650	673.465.161.528.497
Jumlah Investasi Jangka Panjang		706.410.075.389.077	737.039.382.666.868
Aset Tetap	C.2.25		
Tanah		565.920.545.473.098	468.627.411.873.568
Peralatan dan Mesin		150.868.673.195.411	145.762.742.351.120
Gedung dan Bangunan		137.042.921.053.205	123.197.516.471.880
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		276.682.171.786.874	186.921.467.820.342
Aset Tetap Lainnya		7.748.128.178.913	5.885.891.367.838
Konstruksi Dalam Pengerjaan		46.038.727.718.084	48.605.227.226.076
Jumlah Aset Tetap		1.184.301.167.405.585	979.000.257.110.824
Aset Lainnya	C.2.26		
Tagihan Penjualan Angsuran		1.377.994.323	217.273.759
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		38.234.179.361	47.520.521.456
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		212.609.665.200	83.647.500.000
Penerusan Pinjaman		2.070.158.163.656	78.561.103.000

Uraian	Catatan	31 Des 2010 (Audited)	31 Des 2009 (Audited)
Aset Tak Berwujud		9.351.448.050.646	7.033.044.402.391
Dana yang Dibatasi Penggunaannya		40.987.103.326.394	34.471.434.956.330
Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan		18.459.000.085.715	5.565.054.549.000
Dana Penjaminan		71.135.792.697	172.808.669.214
Aset Lain-lain		207.006.414.771.100	128.016.836.416.607
Jumlah Aset Lainnya		278.197.482.029.092	175.469.125.391.757
JUMLAH ASET		2.423.688.352.538.014	2.122.897.478.369.313
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	C.2.27	1.575.434.547.871	906.088.090.285
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.28	31.370.392.714.561	22.310.440.584.286
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.29	3.547.727.872.825	1.943.343.103.544
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.2.30	88.286.391.827.798	92.505.447.212.104
Utang Biaya Pinjaman	C.2.31	20.261.543.289.213	18.526.547.819.139
Utang Subsidi	C.2.32	22.161.795.155.886	15.717.145.891.103
Utang Surat Perbendaharaan Negara	C.2.33	29.235.009.035.000	26.515.739.064.000
Pendapatan Diterima di Muka	C.2.34	119.116.551.668	4.763.707.423
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.35	4.786.549.847.266	9.409.771.849.034
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		201.343.960.842.088	187.839.287.320.918
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan	C.2.36	987.172.961.936.007	901.496.354.102.092
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	C.2.37	8.389.364.871.001	-
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	C.2.38	367.365.935.506	-
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	C.2.39	3.095.222.852.622	2.826.956.396.635
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		999.024.915.595.136	904.323.310.498.727
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	C.2.40	569.983.008.549.466	559.498.473.496.215
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	C.2.41	25.726.322.825.757	30.047.323.267.503
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		595.709.331.375.223	589.545.796.763.718
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		1.594.734.246.970.359	1.493.869.107.262.445
JUMLAH KEWAJIBAN		1.796.078.207.812.447	1.681.708.394.583.363
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar			
SAL Awal Setelah Penyesuaian	C.2.42	52.382.103.135.529	43.347.021.844.114
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	C.2.43	46.527.600.199.917	23.176.900.581.685
Dana Lancar Lainnya	C.2.44	1.540.934.451.110	2.821.340.491.184
Cadangan Piutang	C.2.45	100.141.379.244.383	113.401.408.641.800
Cadangan Persediaan	C.2.46	36.366.060.681.005	36.606.824.405.660
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.2.47	4.210.269.507.402	7.522.179.004.649
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.2.48	(149.918.772.353.919)	(175.176.238.495.688)
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.2.49	(119.116.551.668)	(4.763.707.423)
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.2.50	614.122.632.355	-
Selisih Kurs Bagian Lancar	C.2.51	(8.282.009.832.937)	(8.145.246.887.035)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		83.462.571.113.177	43.549.425.878.946
Ekuitas Dana Investasi			
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	C.2.52	702.836.007.101.463	737.039.382.666.868
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.2.53	1.184.301.167.405.585	979.000.257.110.824
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.2.54	246.554.471.882.238	175.469.125.391.757
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	C.2.55	(1.498.908.975.231.840)	(1.397.804.839.153.173)
Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang	C.2.56	(90.635.097.545.054)	(96.064.268.109.272)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		544.147.573.612.392	397.639.657.907.004
EKUITAS DANA NETO		627.610.144.725.567	441.189.083.785.950
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.423.688.352.538.014	2.122.897.478.369.313



REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS
(AUDITED)

III. LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Perpajakan	D.2.1		
a. Pajak Penghasilan		354.152.324.675.100	317.614.988.311.624
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		219.538.218.197.355	193.067.541.998.775
c. Pajak Bumi dan Bangunan		28.580.589.978.740	24.270.191.705.513
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		8.026.429.073.342	6.464.517.415.416
e. Cukai		66.165.922.512.567	56.718.468.581.956
f. Pajak Lainnya		3.371.209.407.180	3.116.049.056.610
g. Pajak Perdagangan Internasional		28.656.900.712.960	18.663.227.993.605
Total Penerimaan Perpajakan		708.491.594.557.244	619.914.985.063.499
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	D.2.2		
a. Penerimaan Sumber Daya Alam		168.825.442.320.286	138.959.235.946.131
b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN		30.096.932.694.265	26.049.543.069.440
c. Penerimaan PNBP Lainnya		59.164.762.520.535	53.686.673.275.394
d. Penerimaan BLU		10.590.842.035.270	8.369.529.106.041
Total PNBP		268.677.979.570.356	227.064.981.397.006
3. Penerimaan Hibah	D.2.3	3.022.986.560.763	1.666.643.504.397
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		980.192.560.688.363	848.646.609.964.902
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Pegawai	D.2.4	148.072.602.131.332	127.663.323.688.725
2. Belanja Barang	D.2.5	97.587.913.734.089	80.664.398.161.767
3. Bunga Utang	D.2.6	88.381.042.974.663	93.781.932.422.813
4. Subsidi	D.2.7	177.891.975.462.704	138.074.972.708.413
5. Belanja Hibah	D.2.8	70.008.777.575	-
6. Bantuan Sosial	D.2.9	68.595.466.637.272	73.796.894.379.034
7. Belanja Lain-Lain	D.2.10	21.666.884.908.929	38.955.711.251.756
8. Bagi Hasil Pajak	D.2.11	45.815.708.635.828	39.269.126.575.424
9. Bagi Hasil Cukai	D.2.12	1.202.111.025.283	1.065.069.180.000
10. Bagi Hasil Sumber Daya Alam	D.2.13	45.165.743.030.463	35.795.751.823.513
11. Dana Alokasi Umum	D.2.14	203.570.976.808.500	186.414.100.000.000
12. Dana Alokasi Khusus	D.2.15	20.956.311.168.000	24.707.415.400.000
13. Dana Otonomi Khusus	D.2.16	9.099.613.680.000	9.526.564.000.000
14. Dana Penyesuaian	D.2.17	18.918.610.308.811	11.807.205.004.000
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		946.994.969.283.449	861.522.464.595.445
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		33.197.591.404.914	(12.875.854.630.543)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
I. Arus Kas Masuk			
Penjualan Aset	D.2.18	263.876.638.486	109.437.667.665
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		263.876.638.486	109.437.667.665
II. Arus Kas Keluar			
Belanja Aset Tetap	D.2.19	80.307.176.396.873	75.852.367.411.406
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		80.307.176.396.873	75.852.367.411.406
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)		(80.043.299.758.387)	(75.742.929.743.741)

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.20	193.449.285.061.684	202.277.266.498.995
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	D.2.21	54.794.790.200.206	58.662.045.806.549
3. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.22	57.631.763.320	3.133.897.417.553
4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	D.2.23	-	38.352.484.545.170
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		248.301.707.025.210	302.425.694.268.267
II. Arus Kas Keluar			
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.24	77.531.619.691.752	49.066.788.007.901
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	D.2.25	50.632.531.581.836	68.031.113.857.077
3. Penyertaan Modal Negara/ Investasi Pemerintah	D.2.26	19.799.149.000.000	13.084.949.775.291
4. Penerusan Pinjaman	D.2.27	8.786.395.351.008	6.180.700.434.079
5. Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	D.2.28	-	53.478.830.778.504
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		156.749.695.624.596	189.842.382.852.852
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.I – C.II)		91.552.011.400.614	112.583.311.415.415
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	D.2.29	619.814.108.170	956.696.291.231
2. PFK <i>Prefinancing</i> dan PFK Lainnya (Neto)	D.2.30	(34.367.584.001)	(2.500.000.000.000)
3. Kiriman Uang (Neto)	D.2.31	2.110.479.145.563	(1.545.543.155.898)
4. Transito (Neto)	D.2.32	231.461.078.546	249.015.454.434
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (D)		2.927.386.748.278	(2.839.831.410.233)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN (A + B + C + D)		47.633.689.795.419	21.124.695.630.898
Penggunaan SAL		(17.347.946.818.000)	(51.857.136.912.000)
Akumulasi Koreksi Pembukuan		(1.178.259.859.686)	(787.626.459.446)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN		29.107.483.117.733	(31.520.067.740.548)
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU		46.062.746.044.414	75.830.197.373.908
Penambahan Saldo Awal		20.990.525.740.042	1.752.616.411.054
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU setelah Koreksi		67.053.271.784.456	77.582.813.784.962
SALDO AKHIR KAS BUN, KPPN, DAN BLU		96.160.754.902.189	46.062.746.044.414
Rekening Khusus	C.2.4	2.824.334.833.970	-
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.5	8.539.601.162.593	32.218.505.711.694
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.6	518.919.028.152	1.036.241.894.537
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.7	632.344.354.246	1.040.200.195.970
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.8/D.1	8.603.994.085.726	901.887.427.630
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	D.1	53.015.078.502	109.128.878.158
SALDO AKHIR KAS DAN BANK		117.332.963.445.378	81.368.710.152.403



REPUBLIK INDONESIA

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(AUDITED)**

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*AUDITED*)

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

Akselerasi perekonomian domestik akibat pengaruh positif perekonomian global

Kondisi perekonomian domestik tahun 2010 cukup menggembirakan yang antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang positif, investasi yang meningkat, dan nilai tukar yang relatif stabil. Terjaganya stabilitas berbagai indikator makro ekonomi ditengarai oleh berbagai perkembangan positif yang terjadi pada perekonomian global. Salah satu perkembangan tersebut adalah adanya penguatan ekonomi negara-negara pilar perekonomian dunia, baik negara maju maupun *emerging market* seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Cina. Di samping itu, langkah Uni Eropa dalam mengucurkan paket penyelamatan krisis fiskal di kawasan PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greek, Spain) berkontribusi pada membaiknya perekonomian global. Penguatan ekonomi domestik ditopang juga oleh berbagai upaya Pemerintah sebagai salah satu *internal driver* perekonomian dalam mendorong proyek infrastruktur, yang antara lain dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2010 tentang Pembiayaan melalui *Public Private Partnership* (PPP) sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 yang mengatur kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, dan alokasi belanja modal yang semakin meningkat di APBN-P 2010. Namun demikian, kewaspadaan dan langkah antisipatif terus dilakukan Pemerintah guna menghadapi tantangan pada masa mendatang diantaranya terkait dengan adanya imbas ketimpangan ekonomi global dan tren harga minyak dunia yang meningkat yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal nasional, serta menjamin

Pertumbuhan ekonomi 6,1 persen akibat meningkatnya konsumsi, ekspor dan investasi

Tren pertumbuhan ekonomi selama tahun 2006-2010

ketersediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat dan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi.

Pertumbuhan PDB tahun 2010 sebesar 6,1 persen yang berarti lebih tinggi dibanding asumsi APBN-P tahun 2010 sebesar 5,8 persen. Angka pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan PDB tahun 2009 yang hanya mencapai nilai 4,5 persen. Pertumbuhan tersebut antara lain bersumber dari meningkatnya konsumsi, tingginya permintaan ekspor dan investasi. Faktor daya beli masyarakat yang memadai dan kecenderungan nilai Rupiah yang terapresiasi telah mendorong tingginya nilai konsumsi. Adapun nilai ekspor banyak dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi global. Sedangkan investasi yang membaik tidak lain merupakan pengaruh iklim investasi yang baik, perbaikan infrastruktur dan aliran masuk modal luar negeri.

Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan seiring dengan tercapainya program pertumbuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata senilai 5,7 persen (lihat Grafik 1). Pada tahun 2006, perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,5 persen, yang selanjutnya terakselerasi sebesar 6,3 persen pada tahun 2007, karena adanya krisis global mengalami perlambatan pada tahun 2008 menjadi 6,1 persen. Di tahun 2009, perekonomian nasional kembali mengalami perlambatan sebesar 4,5 persen yang kemudian meningkat menjadi 6,1 persen pada tahun 2010.



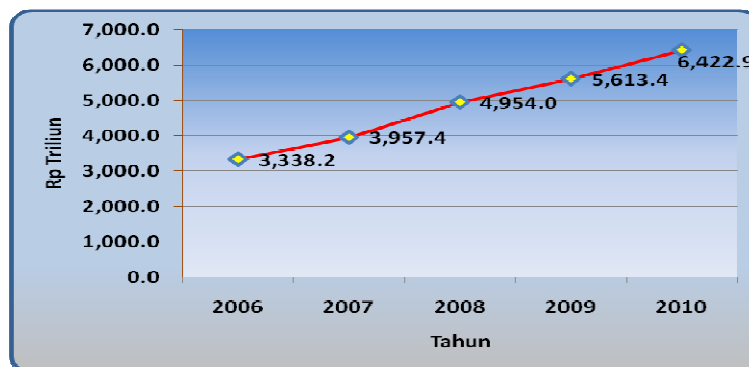
Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 1: Pertumbuhan Ekonomi Selama Tahun 2006 – 2010

PDB atas dasar harga berlaku tahun 2010

Nilai PDB atas harga berlaku tahun 2010 mencapai nilai Rp6.422,9 triliun, sedangkan nilai PDB atas dasar harga konstan periode yang sama senilai Rp2.310,7 triliun. Nilai PDB harga berlaku tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 14,42 persen dibandingkan dengan nominal PDB atas dasar harga berlaku tahun 2009 yang mencapai nilai sebesar Rp5.613,4 triliun, sedangkan PDB atas harga konstan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 6,14 persen dibandingkan dengan nominal PDB atas dasar harga konstan tahun 2009 sebesar Rp2.177,0 triliun. PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan tersebut dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) lapangan usaha/sector. Barang dan jasa yang diproduksi ini akan digunakan oleh 4 (empat) komponen pengguna yang dikenal sebagai komponen penggunaan. PDB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Kedua jenis PDB ini menjadi indikator yang digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi (PDB atas dasar harga berlaku), dan mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (PDB atas dasar harga konstan). Apabila dilihat dari trennya mulai dari tahun 2006-2010, nilai PDB atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan mulai dari Rp3.338,2 triliun pada tahun 2006, Rp3.957,4 triliun pada tahun 2007, Rp4.954,0 triliun pada tahun 2008, Rp5.613,4 triliun pada tahun 2009 dan Rp6.422,9 triliun pada tahun 2010 (lihat

Grafik 2).

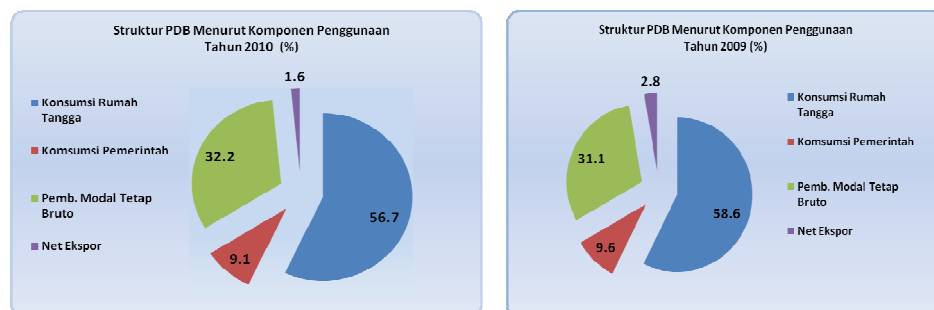


Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 2. Tren PDB Selama Tahun 2006-2010

Struktur PDB menurut komponen penggunaan

Struktur PDB sebesar Rp6.422,9 triliun menurut komponen penggunaan pada tahun 2010 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 56,7 persen atau Rp3.642,0 triliun, pengeluaran konsumsi Pemerintah sebesar 9,1 persen atau Rp581,9 triliun, pembentukan modal tetap bruto sebesar 32,2 persen atau Rp2.065,2 triliun, transaksi ekspor sebesar 24,6 persen atau Rp1.580,8 triliun, transaksi impor sebesar 23,0 persen atau Rp1.475,8 dan sisanya adalah perubahan inventori dan diskrepansi statistik. Struktur PDB tersebut dapat dilihat di Grafik 3. Konsumsi rumah tangga didukung oleh daya beli masyarakat yang menguat, ekspektasi harga yang menurun, nilai tukar rupiah yang kuat dan keyakinan konsumen yang positif terhadap perekonomian domestik.

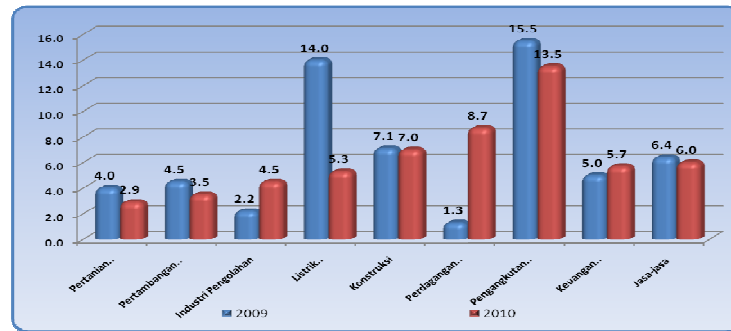


Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 3. Struktur PDB Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2010 dan 2009

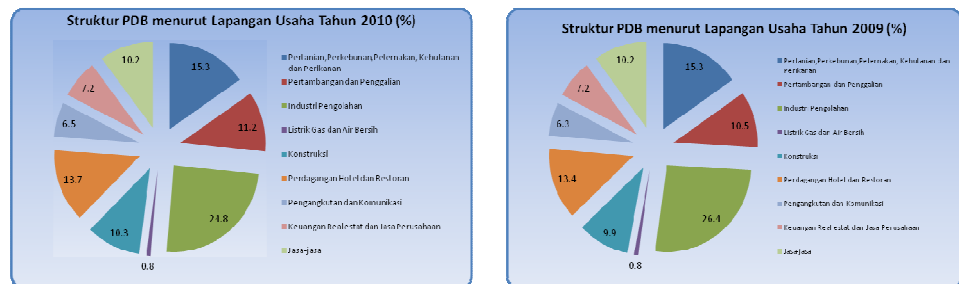
Struktur PDB menurut lapangan usaha

Pada tahun 2010, tiga sektor utama yang berperan membentuk komponen PDB menurut lapangan usaha adalah sektor industri pengolahan sebesar 24,8 persen atau Rp1.594,3 triliun, sektor pertanian 15,3 persen atau Rp985,1 triliun dan sektor perdagangan, hotel dan restoran 13,7 persen atau Rp881,1 triliun. Ketiga sektor perekonomian ini mempunyai peranan sebesar 53,8 persen. Semua sektor ekonomi mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 13,5 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran 8,7 persen, sektor konstruksi 7,0 persen, sektor jasa-jasa 6,0 persen. Laju pertumbuhan masing-masing sektor dalam membentuk PDB menurut lapangan usaha terlihat pada Grafik 4. Rincian kontribusi masing-masing sektor pada perekonomian atau struktur PDB menurut lapangan usaha pada tahun 2009 dan 2010 terlihat pada Grafik 5. Dilihat dari besaran kontribusinya, tiga sektor utama yang mempunyai peran terbesar pada tahun 2010 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2009.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 4. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 dan 2010

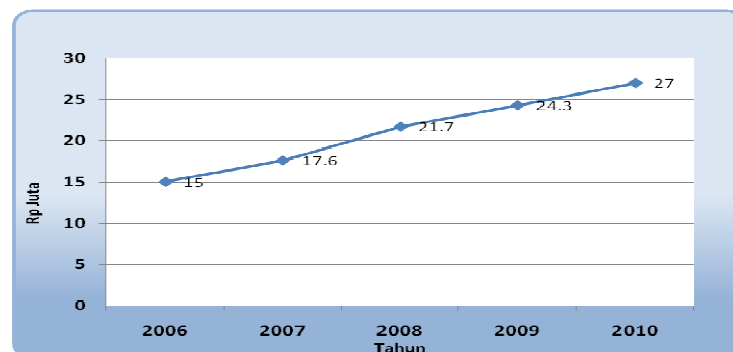


Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 5. Perbandingan Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha 2010 dan 2009

PDB per kapita tahun 2010

Seiring dengan tren peningkatan PDB dibandingkan tahun sebelumnya, maka PDB per kapita tahun 2010 yang merupakan PDB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2010 juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Peningkatan tersebut mencapai nilai sebesar Rp27,0 juta atau USD3.004,9 dibandingkan dengan PDB per kapita tahun 2009 sebesar Rp 24,3 juta atau USD 2.590,1 (lihat Grafik 6)

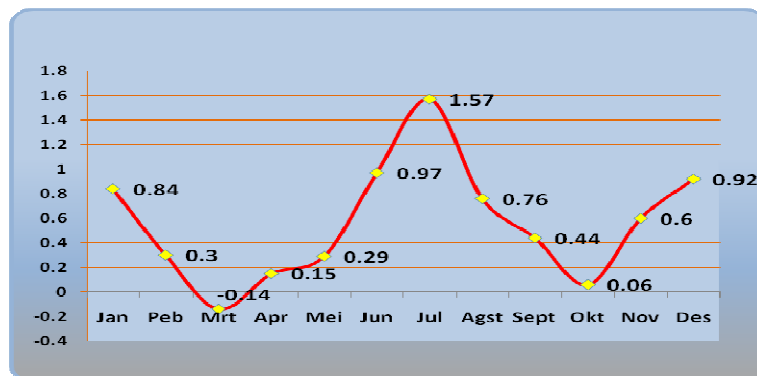


Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 6. Perkembangan PDB Per Kapita Tahun 2006 – 2010

Inflasi

Laju inflasi tahun kalender yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks harga pada Januari-Desember 2010 sebesar 6,96 persen yakni lebih tinggi dari asumsi APBN-P tahun 2010 sebesar 5,3 persen (lihat Grafik 7). Sedangkan laju inflasi komponen inti *year on year* (Desember 2010 terhadap Desember 2009) sebesar 4,28 persen. Inflasi yang meningkat bersumber dari kelompok *volatile food* bahan-bahan kebutuhan pokok yang disebabkan oleh anomali cuaca, sehingga berakibat menurunnya produksi dan gangguan distribusi. Di samping itu inflasi juga bersumber dari kebijakan harga yang dilakukan oleh Pemerintah (*administered prices*). Namun demikian, tekanan inflasi tersebut masih terkendali seiring dengan nilai tukar Rupiah yang menguat.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 7. Laju Inflasi Sepanjang Tahun 2010

Andil inflasi tahun 2010

Kelompok komoditi yang memberikan sumbangan inflasi sebesar 6,96 persen selama tahun 2010 antara lain berasal dari kelompok bahan makanan sebesar 3,50 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 1,23 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 1,01 persen; kelompok sandang 0,45 persen; kelompok kesehatan 0,09 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,23 persen; sementara kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan memberikan kontribusi inflasi sebesar 0,45 persen. Jenis barang dan jasa yang berkontribusi utama terhadap inflasi selama tahun 2010 di antaranya adalah beras, tarif listrik, cabai merah, emas perhiasan, bawang merah, nasi dengan lauk, cabai rawit dan jasa perpanjangan STNK.

65 kota mengalami inflasi dan 1 kota mengalami deflasi

Dari survei yang dilakukan oleh BPS terhadap 66 kota, pada bulan Desember 2010 terdapat 65 kota yang mengalami inflasi dan 1 kota yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Lhokseumawe 2,97 persen dengan IHK 128,44 dan terendah terjadi di Singkawang 0,11 persen dengan IHK 126,26. Sedangkan deflasi terjadi di Sorong 1,30 persen dengan IHK 144,73.

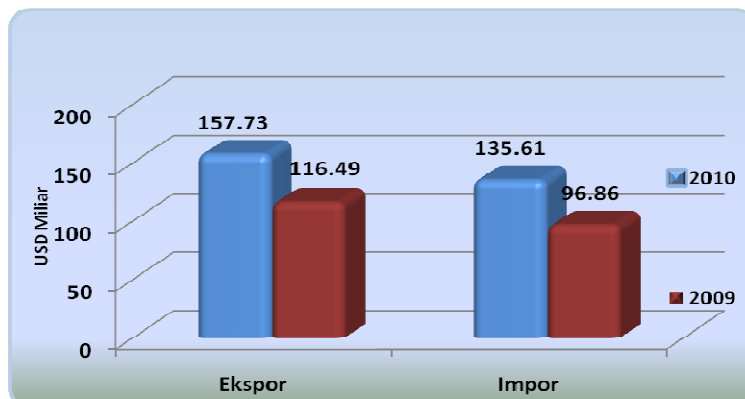
SBI 3 bulan

Dalam rangka menjaga stabilitas keuangan serta mendorong optimalnya fungsi intermediasi perbankan, maka sepanjang tahun 2010 BI *rate* ditetapkan sebesar 6,50 persen. Keputusan ini dipandang masih sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi, namun potensi kenaikan inflasi ke depan masih tetap diwaspadai. Dengan demikian, transmisi kebijakan moneter yang salah satunya tercermin melalui tingkat suku bunga dapat direspons oleh pasar dan pada akhirnya dapat mengendalikan laju inflasi. Sampai dengan bulan Oktober 2010, rata-rata SBI 3 bulan berada pada posisi 6,57 persen dengan tingkat suku bunga tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 6,64 persen dan terendah pada bulan Oktober sebesar 6,37 persen.

Kinerja ekspor impor yang membaik

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor selama tahun 2010 mencapai USD157,73 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 35,40 persen dibanding dengan tahun 2009 sebesar USD116,49 miliar. Peningkatan nilai ekspor merupakan pengaruh permintaan eksternal yang meningkat seiring dengan mulai pulihnya perekonomian global dan juga peningkatan harga komoditas global. Komposisi ekspor tersebut berasal dari ekspor nonmigas yang mencapai USD129,68 miliar dan ekspor migas sebesar USD28,05 miliar. Sedangkan impor nasional selama tahun 2010 mencapai USD135,61 miliar yang merupakan kontribusi impor nonmigas

USD108,24 miliar dan impor migas USD27,36 miliar. Realisasi impor tahun 2010 terakselerasi sebesar 40 persen dibandingkan realisasi impor tahun sebelumnya yakni USD96,86 miliar. Peningkatan kondisi makroekonomi domestik dan apresiasi nilai tukar merupakan faktor pendorong peningkatan nilai impor.

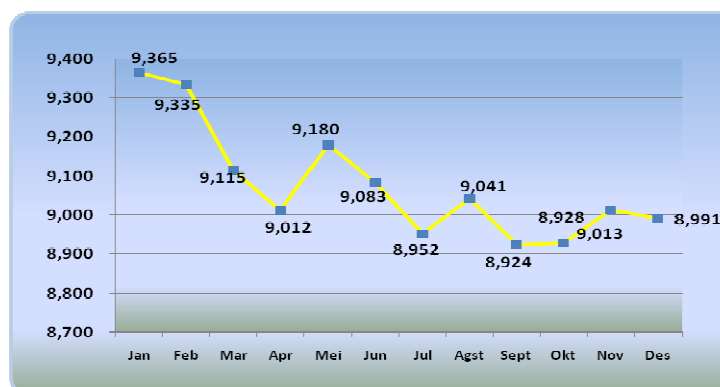


Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 8. Perbandingan Ekspor Impor Tahun 2010 dan 2009

Nilai tukar Rupiah yang menguat

Nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2010 terus menguat. Pada akhir tahun, nilai tukar rupiah ditutup pada posisi Rp8.991/USD atau terapresiasi sebesar 4,35 persen dibanding tahun 2009 yang mencapai Rp9.400/USD. Rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2010 berada pada level Rp9.078/USD, yang berarti terapresiasi apabila dibandingkan dengan nilai Rupiah tahun 2009 yang rata-rata berada di level Rp10.408/USD. Penguatan tersebut antara lain bersumber dari surplus neraca transaksi berjalan, tingginya arus modal masuk dan membaiknya ekspektasi kebijakan suku bunga rendah di negara-negara maju. Tren perkembangan nilai Rupiah dapat dilihat di Grafik 9.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 9. Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Tahun 2010

Realisasi PMDN dan PMA tahun 2010

Investasi sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi domestik tumbuh secara positif sepanjang tahun yang terlihat dari realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2010 yang mencapai Rp60,63 triliun dengan jumlah proyek sebanyak 875 proyek. Angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp22,83 triliun atau 60,04 persen dari realisasi PMDN tahun sebelumnya yang mencapai nilai Rp37,80 triliun dengan 248 proyek. Sedangkan Penanaman Moda Asing (PMA) tahun 2010 terealisasi sebesar USD16,21 miliar dengan jumlah proyek 3.081 proyek yang berarti secara nominal mengalami peningkatan sebesar 49,82 persen dari realisasi sebelumnya sebesar USD10,82 miliar dengan 1.138 proyek. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan iklim investasi serta hasil dari kebijakan yang ditempuh

Pemerintah.

Prospek investasi Indonesia semakin cerah di tahun 2010

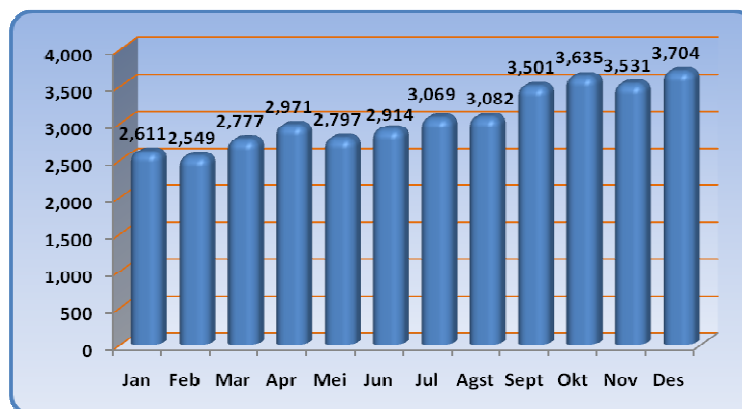
Prospek investasi Indonesia tahun 2010 menunjukkan optimisme yang semakin cerah seiring dengan meningkatnya keyakinan investor. Keyakinan investor ini selanjutnya sangat dipengaruhi oleh kondisi institusi, infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, kemampuan SDM, dan efisiensi pasar, termasuk pasar tenaga kerja, sektor keuangan, teknologi, serta ukuran pasar. Tumbuhnya investasi didorong oleh akselerasi pertumbuhan konsumsi masyarakat yang meningkat seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat dan tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Dari sisi perbankan, turunnya suku bunga kredit ikut menopang investasi bangunan dan non-bangunan. Membaiknya prospek perekonomian Indonesia dapat dilihat dari membaiknya iklim investasi pada tahun 2010 yang didukung oleh penerapan berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan kegiatan investasi dan akselerasi proyek infrastruktur serta relatif stabilnya masalah sosial politik.

Beberapa indikator iklim investasi yang semakin kondusif

Sepanjang tahun 2010, seiring dengan membaiknya perekonomian global dan stabilnya ekonomi domestik, iklim investasi relatif cukup kondusif yang diakibatkan oleh meningkatnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Laporan *Doing Business* 2011 mencatat adanya peningkatan dalam kemudahan berbisnis di Indonesia dalam hal memulai kegiatan usaha dan perdagangan lintas batas. Hal ini sejalan dengan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) yang diperoleh melalui Survei Tendensi Bisnis (STB) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). ITB adalah indikator perkembangan ekonomi terkini dan indeks komposit persepsi pengusaha mengenai kondisi bisnis dan perekonomian secara umum pada triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan mendatang. Nilai ITB pada triwulan IV-2010 sebesar 106,63 yang berarti sedikit menurun bila dibandingkan triwulan III-2010 dengan nilai ITB sebesar 107,29. Angka tersebut menggambarkan bahwa optimisme pelaku usaha sedikit menurun, namun secara umum kondisi bisnis di Indonesia mengalami peningkatan yang tercermin dari peningkatan semua sektor kecuali sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan pendapatan usaha, kapasitas produksi, dan rata-rata jam kerja.

Indeks Harga Saham Gabungan

IHSG pada penutupan bulan Desember 2010 meningkat dan mencapai level 3.704 yang menjadikan Bursa Efek Indonesia sebagai bursa saham terbaik di negara kawasan. IHSG tahun 2010 bergerak positif dibandingkan realisasi IHSG tahun 2009 yang hanya mencapai level 2.534. Membaiknya kondisi makroekonomi secara agregat memberikan kontribusi bagi meningkatnya kepercayaan investor asing dalam menempatkan dananya di pasar saham.

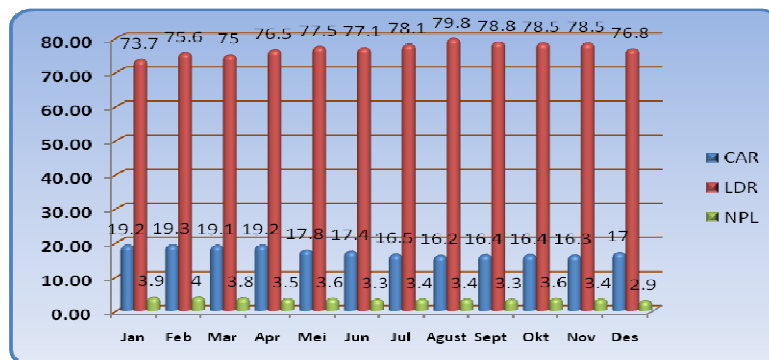


Sumber : BAPEPAM dalam Tinjauan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia

Grafik 10. Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2010

Kinerja perbankan yang stabil

Kinerja perbankan yang stabil sepanjang tahun 2010 antara lain tercermin dari tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) perbankan yang mencapai 17 persen pada Desember 2010 dengan rata-rata sebesar 17,57 persen. Sedangkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) per Desember 2010 mencapai 76,8 persen dengan rata-rata sebesar 77,16 persen, angka ini lebih baik apabila dibandingkan pencapaian tahun 2009 sebesar 74,5 persen. Kemudian untuk rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) terkendali di bawah 5,0 persen yakni berada di kisaran 2,9 persen sampai dengan 4,0 persen dan pada Desember 2010 berada pada level 2,9 persen dengan rata-rata 3,51 persen. Angka ini lebih baik apabila dibandingkan dengan NPL tahun 2009 yang berada di kisaran 3,8 persen - 4,7 persen. Sampai dengan akhir Desember 2010, angka pertumbuhan kredit berada pada level 22,8 persen (yoy) yang mencerminkan adanya peningkatan fungsi intermediasi perbankan.



Sumber : Tinjauan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia

Grafik 11. Tren CAR, LDR, dan NPL Bulanan Tahun 2010

Neraca Pembayaran Indonesia

Masih kuatnya ekspor serta aliran investasi yakni PMA memberi dampak pada surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang meningkat. Pertumbuhan ekspor itu sendiri tidak lain merupakan implikasi dari pemulihan ekonomi di negara-negara berkembang dan peningkatan harga komoditas global. Sedangkan peningkatan impor didorong oleh peningkatan ekonomi domestik dan apresiasi nilai tukar.

Cadangan devisa setara dengan 7,1 bulan impor

Cadangan Devisa sampai dengan akhir Desember 2010 mencapai USD 96,2 miliar atau setara dengan 7,1 bulan impor dan pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah. Nilai cadangan devisa yang meningkat seiring dengan kinerja NPI yang membaik. Cadangan devisa yang dimiliki tersebut sebagian besar berbentuk surat-surat berharga (*securities*). Sedangkan sisa dari cadangan tersebut adalah penempatan dalam bentuk *currency and deposits, monetary gold* dan *special drawing rights*.

Lifting minyak

Lifting minyak tahun 2010 hanya dapat mencapai 954 ribu barel per hari, yakni lebih rendah dari target APBN-P tahun 2010 di level 965 ribu barel per hari dan lebih tinggi dari realisasi lifting minyak mentah tahun sebelumnya sebesar 952 ribu barel per hari. Penyebab utama tidak tercapainya target lifting dikarenakan adanya kebocoran pipa minyak milik PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI) ke Conoco Philips di Riau pada bulan Oktober 2010 yang menyebabkan hilangnya lifting minyak sebanyak 6.000 barel per hari, selain itu terjadi pula tabrakan yang menimpa anjungan minyak milik Kodeco di Gresik, Jawa Timur dan disusul terbakarnya KM Gagasan Perak di Perairan Sepanjang, Sumenep, Jawa Timur.

Harga Minyak Mentah Indonesia

Harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2010 mengalami peningkatan yakni rata-rata sebesar USD79,4 per barel, lebih tinggi dari rata-rata harga minyak mentah Indonesia tahun 2009 yang sebesar USD61,5 per barel. Realisasi harga ini lebih rendah dibanding yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar USD80,0 per barel.

Kinerja SBN

Kinerja SBN cukup menggembirakan selama tahun 2010 ditunjukkan oleh *yield* jangka pendek (1 tahun), menengah (5 tahun) dan panjang (10 tahun) yang masing-masing turun sebesar 175

bps, 217 bps, dan 153 bps. Menurunnya *yield* berarti kewajiban Pemerintah untuk membayar biaya bunga akan menjadi lebih rendah dalam penerbitan surat utang yang baru, sehingga mengurangi beban pembayaran bunga pada APBN. Penguatan kinerja SBN merupakan hasil dari penguatan ekonomi dan kesinambungan fiskal yg masih terjaga.

Rasio utang terhadap PDB

Indikator penguatan perekonomian domestik yang lain juga ditunjukkan oleh pengendalian rasio utang terhadap PDB yang pada tahun 2010 sebesar 26 persen. Rasio ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 senilai 28 persen. Angka rasio utang terhadap PDB selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun yang menopang kesinambungan fiskal.

Tabel 1. Asumsi Dasar APBN dan Realisasi APBN TA 2010

Indikator	Asumsi Dasar APBN TA 2010	APBN-P 2010	Realisasi TA 2010
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5	5,8	6,1
Tingkat inflasi (%)	5,0	5,3	6,96
Nilai tukar Rupiah (Rp/USD)	10.000	9.200	9.078
Suku Bunga (SBI) 3 bulan (%)	6,5	6,5	6,57
Harga Minyak (USD/Barrel)	65,0	80,0	79,4
Lifting Minyak (Juta Barrel/hari)	0,965	0,965	0,954

Sumber Kementerian Keuangan

Tema RKP 2010 "Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan

Kesejahteraan Rakyat"

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 disusun untuk menjawab berbagai permasalahan yang belum dapat diselesaikan di tahun 2009. Sebagai bagian dari RAPBN transisi yang disusun oleh pemerintahan lama, berbeda dengan RKP tahun-tahun sebelumnya yang disusun berdasarkan RPJMN 2010-2014, RKP tahun 2010 disusun berdasarkan Arah Pembangunan Jangka Menengah ke-2 (RPJMN ke-2) dari RPJPN 2005-2025. RKP tahun 2010 pada khususnya disusun dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat.

Tingkat kemiskinan dan pengangguran

Dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan, Pemerintah terus berupaya melakukan akselerasi perekonomian melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan program-program perbaikan kesejahteraan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa untuk bulan Maret 2010 jumlah penduduk miskin sebanyak 31,02 juta orang (13,33 persen dari total penduduk). Angka ini menurun dibandingkan dengan bulan Maret 2009 dimana penduduk miskin mencapai 32,53 juta orang (14,15 persen). Sedangkan jumlah pengangguran pada bulan Agustus 2010 berdasarkan data BPS adalah sebanyak 8,32 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,14 persen.

Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional

Pada tahun 2010, Pemerintah mengeluarkan Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010 yang ditujukan kepada kementerian negara/lembaga dan para kepala daerah. Tujuan dikeluarkannya Inpres ini adalah dalam rangka mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing dalam rangka percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010. Inpres tersebut memiliki 14 program prioritas antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan iklim usaha; energi; lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik; kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi; prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan; prioritas lainnya di bidang perekonomian; dan prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

Boks 1. *Fiscal Space*

Fiscal space secara umum merupakan ketersediaan ruang dalam anggaran yang memungkinkan Pemerintah menyediakan dana untuk tujuan tertentu tanpa menciptakan permasalahan dalam kesinambungan posisi keuangan Pemerintah. Dalam konteks APBN, *fiscal space* adalah total pengeluaran dikurangi dengan belanja non diskresioner/terikat seperti belanja pegawai, pembayaran bunga, subsidi, dan pengeluaran yang dialokasikan untuk daerah.

Secara eksplisit, definisi *fiscal space* terkait erat dengan konsep *sustainability*, yakni kapasitas Pemerintah untuk mendanai kewajiban dan menjamin *solvency*. *Fiscal space* perlu diciptakan karena *fiscal space* adalah indikator kemampuan Pemerintah untuk mengalokasikan pengeluaran negara pada belanja-belanja yang bersifat diskresioner/tidak terikat seperti peningkatan alokasi belanja untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Penciptaan *fiscal space* antara lain dapat ditempuh dengan: (1) meningkatkan pendapatan negara; (2) penajaman prioritas belanja negara melalui pemotongan belanja negara yang bukan prioritas, penurunan belanja subsidi dan penurunan berkala pembayaran bunga utang; dan (3) meningkatkan efisiensi melalui peningkatan *good governance* dan pemberantasan korupsi.

Upaya peningkatan pendapatan negara dilakukan melalui penerapan kebijakan di bidang perpajakan yang memiliki peran signifikan dalam penciptaan *fiscal space*. Pada tahun 2010 penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp723,31 triliun, sehingga rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*) sebesar 11,26 persen. Besaran ini menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 11,04 persen dan lebih rendah dari target APBN-P sebesar 11,90 persen.

Kebijakan yang ditempuh Pemerintah di bidang perpajakan diantaranya terkait dengan reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan, disamping itu juga terkait dengan program percepatan pertumbuhan ekonomi dan insentif perpajakan bagi dunia usaha. Sedangkan di bidang kepabeanan di antaranya adalah peningkatan efisiensi pemeriksaan dan penagihan serta peningkatan pengawasan atas peredaran barang kena cukai ilegal.

Kebijakan di bidang PNBPN meliputi optimalisasi penerimaan SDA non migas, perbaikan sistem prosedur dan tata kelola PNBPN serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyerahan PNBPN ke kas negara.

Selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar realisasi belanja Pemerintah Pusat berasal dari realisasi belanja terikat (*non-discretionary expenditures*). Anggaran belanja terikat selama kurun waktu 2006–2010 menunjukkan tren fluktuatif, yang berturut-berturut mulai dari tahun 2006 adalah Rp489,87 triliun (14,67 persen terhadap PDB), Rp535,66 triliun (13,54 persen terhadap PDB), Rp745,15 triliun (15,04 persen terhadap PDB), Rp710,73 triliun (12,66 persen terhadap PDB), dan Rp814,18 triliun (12,68 persen terhadap PDB). Secara nominal, anggaran belanja terikat pada tahun 2008 meningkat tajam sebesar Rp209,49 triliun atau 39,11 persen dibanding tahun 2007. Peningkatan ini antara lain terkait dengan melonjaknya anggaran belanja subsidi tahun 2008 sebesar 123,09 persen dibanding tahun 2007 yang salah satu diantaranya diakibatkan oleh tingginya harga minyak dunia sepanjang tahun 2008 yang pada bulan Juli mencapai puncaknya di level USD140/barel serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai USD96,8/barel. Sedangkan anggaran belanja terikat pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar Rp34,42 triliun atau 4,62 persen dibanding tahun 2008 yang antara lain dipengaruhi oleh menurunnya alokasi anggaran belanja subsidi pada tahun 2009 sebesar 32,55 persen dibanding tahun 2008 yang diantaranya diakibatkan oleh rendahnya harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang berada pada posisi USD61,5/barel. Selanjutnya untuk tahun 2010 anggaran belanja terikat mengalami peningkatan sebesar Rp103,45 triliun atau 14,56 persen bila dibandingkan dengan belanja terikat tahun 2009. Peningkatan ini antara lain terkait dengan meningkatnya alokasi anggaran belanja subsidi pada tahun 2010 sebesar 27,29 persen atau

Rp43,14 triliun dibanding tahun 2009 yang antara lain disebabkan tingginya beban subsidi listrik, dan subsidi non-energi. Namun secara persentase, pada tahun 2008 belanja terikat terhadap PDB menunjukkan posisi tertinggi yakni sebesar 15,04 persen dan pada tahun 2009 menunjukkan posisi terendah pada level 12,66 persen, sementara pada tahun 2010 berada pada level 12,68 persen.

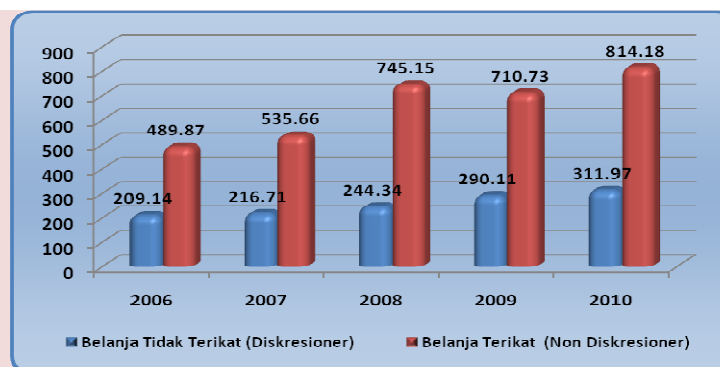
Dengan demikian, secara nominal *fiscal space* selama kurun waktu 2006-2010 mengalami peningkatan berturut-turut adalah pada tahun 2006 anggaran belanja tidak terikat sebesar Rp209,14 triliun, selanjutnya pada tahun 2007 meningkat menjadi sebesar Rp216,71 triliun, dan pada tahun 2008 menjadi Rp244,34 triliun, pada tahun 2009 sebesar Rp290,11 triliun, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp311,97 triliun. Angka ini mengindikasikan bahwa tren *fiscal space* yang dimiliki Pemerintah dari tahun 2006-2010 semakin meningkat. Sejalan dengan meningkatnya *fiscal space* fleksibilitas yang dimiliki Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja pada kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional juga semakin meningkat.

Apabila dilihat dari rasio *fiscal space* terhadap PDB, sepanjang periode 2006-2010 cenderung menurun. Penurunan terjadi pada tahun 2006-2008 dari posisi 6,27 persen menjadi 4,93 persen di tahun 2008, kemudian meningkat menjadi 5,17 persen di tahun 2009 yang untuk selanjutnya mengalami penurunan menjadi sebesar 4,86 persen di tahun 2010. Mencermati hal tersebut Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas belanja negara (*quality of spending*). Diharapkan melalui kualitas belanja negara yang memadai, maka instrumen fiskal menjadi efektif yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan penurunan tingkat kemiskinan.

Tabel 2. *Fiscal Space* terhadap PDB Tahun 2006-2010

No	Uraian	Pagu TA 2006 (Rp triliun)	Pagu TA 2007 (Rp triliun)	Pagu TA 2008 (Rp triliun)	Pagu TA 2009 (Rp triliun)	Pagu TA 2010 (Rp triliun)
1.	Total Belanja Negara	699,10	752,37	989,49	1.000,84	1.126,15
2.	Total Belanja Terikat (<i>Non-discretionary spending</i>)	489,87	535,66	745,15	710,73	814,18
	a. Belanja Pegawai	78,90	92,84	123,54	133,71	162,66
	b. Belanja Pembayaran Bunga	82,49	83,55	94,79	109,59	105,65
	c. Belanja Subsidi	107,63	105,07	234,40	158,12	201,26
	d. Transfer ke Daerah	220,85	254,20	292,42	309,31	344,61
3.	Total Belanja Negara – Total Belanja Terikat	209,14	216,71	244,34	290,11	311,97
4.	Rasio Belanja Terikat terhadap Total Belanja Negara	70,08	71,20	75,31	71,01	72,30
5.	Rasio Belanja Tidak Terikat terhadap Total Belanja Negara	29,92	28,80	24,69	28,99	27,70
6.	Pendapatan Domestik Bruto/PDB (triliun Rupiah)	3.338,2	3.957,4	4.954,0	5.613,4	6.422,9
7.	Rasio Belanja Terikat terhadap PDB (%)	14,67	13,54	15,04	12,66	12,68
8.	Rasio Belanja Tidak Terikat (<i>Fiscal Space</i>) terhadap PDB (%)	6,27	5,48	4,93	5,17	4,86

Sumber : Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik



Sumber : Kementerian Keuangan

Grafik 12. Grafik Belanja Tidak Terikat (Diskresioner) dan Belanja Terikat (Non Diskresioner) Tahun 2010

Boks 2. Perbaikan Opini LKPP tahun 2009

Reformasi manajemen keuangan negara yang dimulai tahun 2003/2004 telah menunjukkan hasil yang positif. Manajemen keuangan negara yang semakin rapi dan teratur melalui introduksi berbagai prosedur pengelolaan keuangan negara yang menganut *best practice* manajemen keuangan publik dapat dijustifikasi antara lain dengan membaiknya opini BPK terhadap LKPP tahun 2009 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*qualified*).

Perbaikan opini tersebut yakni dari *disclaimer* atas LKPP tahun 2004-2008 menjadi *qualified* untuk LKPP tahun 2009 yang antara lain dikarenakan semakin berkurangnya temuan BPK atas LKPP, perbaikan sistem pengendalian internal Pemerintah dan usaha Pemerintah dalam mencapai persamaan persepsi antar unsur-unsur penyusun LKPP (kementerian negara/lembaga dengan Bendahara Umum Negara/BUN).

Kualitas LKPP yang membaik dapat dikaji antara lain melalui berbagai fakta sebagai berikut:

- Bertambah luasnya cakupan entitas pelaporan dan meningkatnya nilai-nilai yang tersaji dalam laporan keuangan antara lain data kas yang lebih terpercaya dan nilai aset yang makin mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- Meluasnya Penyajian Komponen-komponen Laporan Keuangan antara lain pada belanja dan pendapatan, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK/TP), rekening kas di BUN, Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) di BI, kas pada Badan Layanan Umum (BLU), piutang pajak, bagian lancar Rekening Dana Investasi Pemerintah Daerah (RDI/RPD), piutang lain-lain, dana bergulir, investasi, aset tetap, aset lainnya, utang pada pihak ketiga, dan ekuitas dana Incar lainnya.
- Meningkatnya nilai nominal yang tersaji dalam LKPP, antara lain pada aset lancar, investasi jangka panjang, aset lainnya, dan aset tetap.
- Adanya tambahan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain mengenai dana masyarakat yang dikelola oleh BAZNAS, aset bersejarah, laporan keuangan BLU, penertiban rekening Pemerintah, aset eks BPPN dan eks Cina, kewajiban Pemerintah terkait subsidi beras, serta *past service liabilities* kepada PT. TASPEN dan PT. ASABRI, langkah-langkah penertiban Barang Milik Negara, perkembangan pembayaran rekaptalisasi Bank Danamon, unit bisnis di lingkungan TNI, dan *disclosure* sumber dana dan realisasi belanja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Perbaikan kualitas opini BPK terhadap LKPP tahun 2009 yang adalah hasil kerja keras

Pemerintah dalam rangka memperbaiki akuntabilitas keuangan negara tidak lain buah kerja sama yang dibangun antara para kementerian negara/lembaga (K/L). Hal ini utamanya terbukti dari peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), yang tercermin dari semakin bertambahnya K/L yang memperoleh opini WTP, dari 7 pada tahun 2006, menjadi 16 pada 2007, kemudian 35 pada 2008, dan terakhir menjadi 45 pada tahun 2009. Pesatnya peningkatan opini LKKL pada gilirannya telah berdampak pada membaiknya opini untuk LKPP tahun 2009.

Komposisi Realisasi APBN Tahun Anggaran 2010

1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2010 sebesar Rp995,27 triliun atau mencapai 100,29 persen dari APBN-P 2010 yang ditargetkan sebesar Rp992,40 triliun. Realisasi tersebut meningkat 17,26 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 yang hanya mencapai Rp848,76 triliun. Peningkatan realisasi pendapatan negara terutama didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, pulihnya kondisi perekonomian global, serta didukung oleh pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang pendapatan negara. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sebagai penyumbang pendapatan terbesar. Pulihnya perekonomian global menyebabkan kegiatan perdagangan internasional meningkat sehingga penerimaan bea masuk dan bea keluar juga mengalami peningkatan. Meningkatnya bea masuk sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan impor, baik dari sisi volume maupun nilai. Sementara itu meningkatnya pendapatan bea keluar terutama dipengaruhi oleh tingginya harga CPO di pasar internasional. Selain itu, meningkatnya harga minyak mentah dari USD61,5 per barel pada tahun 2009 menjadi USD79,4 per barel pada tahun 2010 mendorong peningkatan pendapatan pajak penghasilan migas.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2006-2010) pendapatan negara dan hibah cenderung mengalami peningkatan (lihat tabel 3). Peningkatan tersebut disebabkan oleh kondisi ekonomi yang baik selama 5 tahun terakhir, kecuali tahun 2009 yang mengalami perlambatan, dan didukung oleh pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang pendapatan negara. Realisasi pendapatan negara dan hibah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,44 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 38,68 persen. Faktor utama yang menyebabkan peningkatan pendapatan negara tahun 2008 adalah tingginya kenaikan harga minyak mentah dari USD69,7 per barel menjadi USD96,8 per barel, sehingga pendapatan pajak migas meningkat sebesar 75,05 persen apabila dibanding tahun 2007. Kenaikan harga minyak tersebut juga diikuti oleh kenaikan harga CPO di pasar internasional sehingga pendapatan bea keluar dari ekspor CPO meningkat tajam, dari Rp4,24 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp13,58 triliun pada tahun 2008. Kondisi perekonomian yang baik tersebut didukung oleh implementasi kebijakan di bidang perpajakan antara lain kegiatan intensifikasi perpajakan melalui *mapping*, *profiling*, dan *benchmarking*, serta kegiatan ekstensifikasi perpajakan melalui perluasan *taxbase*. Sementara itu, pendapatan negara tahun 2009 mengalami pertumbuhan negatif karena pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan terpengaruh oleh krisis ekonomi global serta harga minyak mentah dan harga CPO mengalami penurunan. Kondisi ekonomi yang melemah mengakibatkan pendapatan pajak non migas hanya meningkat sedikit dibanding tahun 2008. Menurunnya harga minyak menyebabkan pendapatan pajak migas mengalami penurunan. Di sisi lain, menurunnya harga minyak juga memicu turunnya harga CPO di pasar internasional, sehingga pendapatan bea keluar dari ekspor CPO pada tahun 2009 jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2008.

Tabel 3. Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2006 – 2010
(triliun Rupiah)

Uraian	2006		2007		2008		2009		2010	
	APBN-P	Real	APBN-P	Real	APBN-P	Real	APBN-P	Real	APBN-P	Real
Pendapatan Negara Dan Hibah	659,11	637,98	694,08	707,81	894,99	981,60	871,00	848,76	992,40	995,27
1. Penerimaan Perpajakan	425,05	409,20	492,01	490,99	609,23	658,70	651,95	619,92	743,33	723,31
a. Pajak Dalam Negeri	410,22	395,97	474,55	470,05	580,25	622,36	631,93	601,25	720,76	694,39
b. Pajak Perdagangan Internasional	14,83	13,23	17,46	20,94	28,98	36,34	20,02	18,67	22,56	28,91
2. PNB	229,83	226,95	198,25	215,12	282,81	320,60	218,04	227,17	247,18	268,94
a. Penerimaan SDA	165,69	167,47	115,05	132,89	192,79	224,46	138,65	138,96	164,73	168,83
b. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	22,32	22,97	21,80	23,22	31,24	29,09	28,61	26,05	29,50	30,10
c. PNB Lainnya	41,81	36,50	47,71	42,86	58,78	63,32	44,88	53,80	43,46	59,43
d. Pendapatan BLU	-	-	-	2,13	-	3,73	5,89	8,37	9,49	10,59
3. Hibah	4,23	1,83	3,82	1,70	2,95	2,30	1,01	1,67	1,90	3,02

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

*Realisasi penerimaan
perpajakan tahun 2010*

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2010 yang terealisasi sebesar Rp723,31 triliun adalah 97,31 persen dari target APBN-P tahun 2010 sebesar Rp743,33 triliun. Angka tersebut lebih besar dari realisasi penerimaan perpajakan tahun 2009 yang mencapai nilai Rp619,92 triliun. Realisasi perpajakan yang selama ini masih sebagai kontributor utama realisasi pendapatan negara dan hibah tercapai melalui berbagai kebijakan atau reformasi di bidang perpajakan yang pada tahun 2010 mencakup program ekstensifikasi perpajakan, program intensifikasi perpajakan, dan program kegiatan pasca *sunset policy*. Program ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan melalui dua kegiatan utama yaitu pengenaan pajak atas surplus Bank Indonesia dan penambahan subyek pajak orang pribadi. Program intensifikasi perpajakan dilaksanakan melalui kegiatan *mapping* dan *benchmarking*, pemantapan profil seluruh wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, KPP *Large Tax Office* (LTO) dan pemantapan 500 wajib pajak KPP Pratama, pembuatan profil *high rise building*, pengawasan intensif dari PPh pasal 25 *retailer*, dan pengawasan intensif wajib pajak orang pribadi potensial. Sedangkan kegiatan pasca *sunset policy* difokuskan pada dua kegiatan utama yaitu *law enforcement* dan pembinaan kepada wajib pajak.

*Kebijakan umum di bidang
perpajakan*

Kebijakan umum di bidang perpajakan utamanya terkait dengan reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan juga turut mendukung peningkatan realisasi penerimaan perpajakan dimaksud antara lain melalui: (1) perubahan paket undang-undang perpajakan, kepabeanan dan cukai; (2) peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak dan pengawasan internal terhadap petugas pajak; (3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia; (4) perbaikan sistem informasi dan teknologi; dan (5) modernisasi perpajakan. Reformasi tersebut pada dasarnya berbuah peningkatan *tax compliance* sejalan dengan kebijakan mempermudah wajib pajak menyelesaikan kewajibannya. Di samping itu, kebijakan perpajakan tahun 2010 yang dilakukan Pemerintah antara lain terkait dengan program percepatan pertumbuhan ekonomi, insentif perpajakan bagi dunia usaha diberikan oleh Pemerintah dalam bentuk: (1) penurunan tarif PPh Badan dari 28 persen menjadi 25 persen; (2) pemberian fasilitas penurunan tarif PPh Badan sebesar 5 persen dari tarif normal bagi perusahaan masuk bursa yang minimal 40 persen sahamnya dimiliki oleh publik; dan (3) pemberian subsidi pajak dalam bentuk pajak ditanggung Pemerintah (DTP) yaitu PPN DTP, PPh DTP, dan bea masuk DTP. Khusus di bidang kepabeanan, dukungan fiskal juga diberikan dalam bentuk pemberian insentif untuk sektor perdagangan dan industri dan perbaikan fasilitas kepabeanan.

Tax ratio

Tax ratio adalah salah satu indikator ketahanan fiskal. Apabila dibandingkan dengan tax ratio tahun sebelumnya yang berada pada posisi 11,04 persen, maka tax ratio tahun 2010 mengalami peningkatan yang terealisasi sebesar 11,26 persen, namun masih di bawah target APBN-P 2010 yang ditetapkan sebesar 11,90 persen.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan & BPS

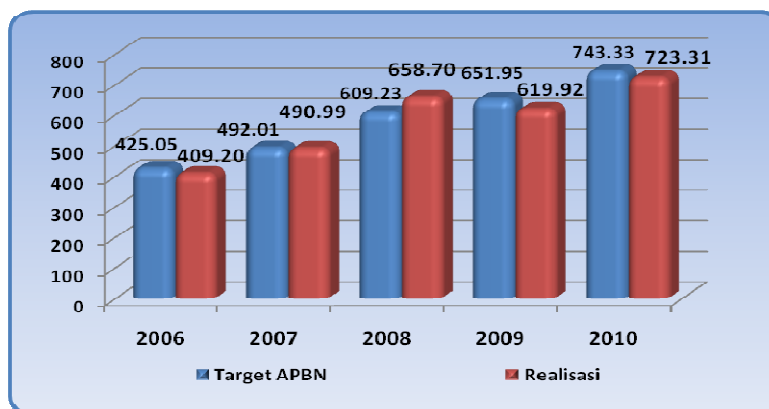
Grafik 13. Tren Tax Ratio Tahun 2006-2010

Tren realisasi penerimaan perpajakan selama 5 tahun terakhir

Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pendapatan negara. Dalam 5 tahun terakhir, penerimaan perpajakan sangat mendominasi penerimaan negara dan secara umum terus menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp723,31 triliun atau meningkat sebesar 76,76 persen dari realisasi penerimaan perpajakan tahun 2006 yang sebesar Rp409,20 triliun. Pada tahun 2009, penerimaan perpajakan mengalami penurunan sebesar 5,89 persen dibanding tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh penurunan penerimaan perpajakan dalam negeri sebesar 3,39 persen dan penurunan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar 48,62 persen.

Tren persentase realisasi penerimaan perpajakan selama 5 tahun terakhir

Jika dilihat dari tingkat pencapaian target penerimaan perpajakan, kinerja APBN selama tahun 2006-2010 sedikit mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006, tingkat realisasi penerimaan perpajakan adalah sebesar 96,27 persen, sedangkan pada tahun 2007 realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2006 menjadi 99,79 persen. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2008 yaitu sebesar 108,12 persen. Pada tahun 2009 terjadi penurunan tingkat realisasi pendapatan negara menjadi sebesar 95,09 persen dan pada tahun 2010 terjadi peningkatan realisasi pendapatan negara menjadi 97,31 persen dari target APBN-P 2010. Target dan realisasi Penerimaan Perpajakan tahun 2006-2010 dapat dilihat pada grafik 14.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

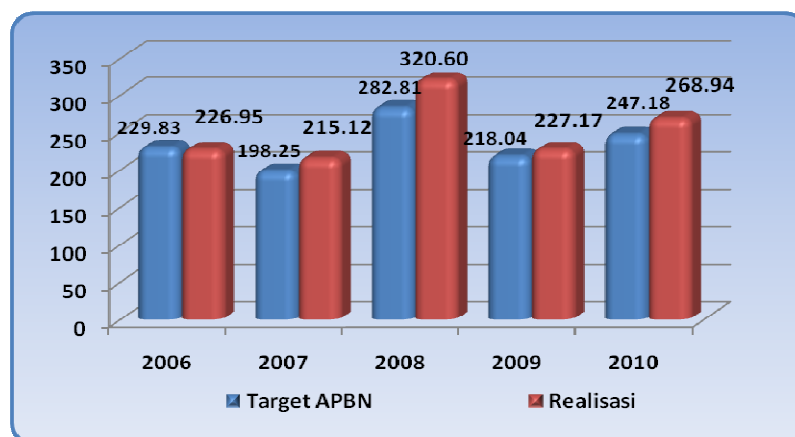
Grafik 14. Target Dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2006-2010

Realisasi PNBП tahun 2010

Sumber pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2010 terealisasi sebesar Rp268,94 triliun yang lebih besar dari target APBN-P tahun 2010 yakni Rp247,18 triliun (lihat tabel 3). Nilai realisasi PNBП tahun 2010 tersebut berasal dari realisasi penerimaan SDA sebesar Rp168,83 triliun yang adalah sebagai sumber utama penerimaan PNBП, realisasi penerimaan laba BUMN senilai Rp30,10 triliun, realisasi PNBП lainnya sebesar Rp59,43 triliun dan realisasi pendapatan BLU sebesar Rp10,59 triliun. Realisasi PNBП tersebut adalah hasil dari berbagai kebijakan Pemerintah di bidang PNBП tahun 2010 diantaranya (1) peningkatan sumber daya alam yang didukung insentif fiskal; (2) pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai energi alternatif; (3) meningkatkan fungsi pelayanan pada PNBП K/L; (4) melakukan penyempurnaan peraturan mengenai tarif PNBП pada K/L; serta (5) menerapkan kebijakan *pay out ratio* penarikan dividen BUMN sebesar 5,0 persen hingga 55,0 persen, terkecuali untuk BUMN dengan akumulasi rugi, sektor asuransi, kehutanan, dan perkebunan (lihat tabel 3).

Tren realisasi PNBП selama 5 tahun terakhir

Dilihat dari tingkat pencapaian target penerimaan PNBП, selama tahun 2006-2010 secara umum realisasi penerimaan PNBП melebihi target yang ditetapkan dalam APBN-P. Pada tahun 2006, tingkat realisasi penerimaan PNBП adalah sebesar 98,75 persen dari pagu sebesar Rp229,83 triliun. Kemudian pada tahun 2007 realisasi penerimaan PNBП meningkat menjadi 108,51 persen dari pagu sebesar Rp198,25 triliun. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2008 yaitu sebesar 113,36 persen dari pagu sebesar Rp282,81 triliun, sedangkan pada tahun 2009 terjadi penurunan tingkat realisasi penerimaan PNBП menjadi sebesar 104,19 persen dari pagu sebesar Rp218,04 triliun. Kemudian untuk tahun 2010 realisasi penerimaan PNBП kembali meningkat menjadi 108,80 persen dari pagu sebesar Rp247,18 triliun. Sebagai kontributor terbesar untuk penerimaan PNBП, SDA migas menjadi faktor penting yang menentukan naik turunnya penerimaan PNBП. Tren peningkatan tersebut dipengaruhi oleh *lifting*, ICP, nilai tukar rupiah dan *cost recovery*. Selama kurun waktu tersebut, realisasi PNBП yang cenderung lebih tinggi dari targetnya banyak dipengaruhi oleh kebijakan jangka menengah di bidang PNBП meliputi upaya mendorong iklim investasi kegiatan hulu migas, perbaikan ketentuan *cost recovery*, optimalisasi penerimaan SDA non migas, evaluasi dan perbaikan sistem, prosedur dan tata kelola PNBП K/L, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PNBП ke kas Negara, dan pemanfaatan hibah guna memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran.

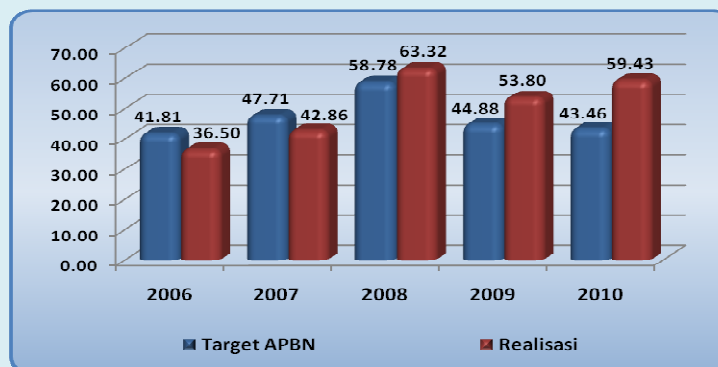


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 15. Target Dan Realisasi Penerimaan PNBП Tahun 2006-2010

Boks 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya

Dilihat dari realisasinya sejak tahun 2006, PNBP lainnya pada umumnya cenderung meningkat (lihat Grafik 16). Peningkatan tersebut selain merupakan kontribusi Pemerintah dalam kebijakan yang menyangkut PNBP, juga mengindikasikan masih terdapatnya potensi PNBP lainnya yang dapat terus ditingkatkan.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 16. Realisasi PNBP Lainnya tahun 2006-2010

PNBP lainnya terdiri atas: (1) pendapatan penjualan dan sewa; (2) pendapatan jasa; (3) pendapatan bunga; (4) pendapatan eksekusi dan peradilan; (5) pendapatan pendidikan; (6) pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi; (7) pendapatan iuran dan denda; dan (8) pendapatan lain-lain. Pengelolaan atas sumber PNBP lainnya tersebut dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga terkait, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi PNBP lainnya dari K/L antara lain: (1) jumlah objek pengenaan PNBP; (2) tarif atas kegiatan pelayanan yang dilaksanakan dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah; (3) kualitas pelayanan yang diberikan dan administrasi pengelolaan PNBP yang secara tidak langsung meningkatkan jumlah objek pengenaan; dan (4) upaya optimalisasi yang dapat dilakukan, melalui peningkatan pengelolaan dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Selama tahun 2006–2010, PNBP lainnya, yang sebagian besar merupakan bagian dari kelompok penerimaan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 23,06 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu 54,73 persen. Selama kurun waktu tersebut, Pemerintah melakukan optimalisasi PNBP lainnya melalui (1) optimalisasi PNBP pada K/L; (2) peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP pada masing-masing K/L; (3) monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan PNBP pada K/L; dan (4) peningkatan akurasi target dan penyusunan pagu penggunaan PNBP dan K/L yang realistis serta pelaporannya. Pemerintah telah menerbitkan 43 Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif PNBP pada K/L. Secara umum, Pemerintah terus melakukan upaya inventarisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBP serta perbaikan administrasi PNBP pada seluruh K/L.

Di tahun 2010 target PNBP lainnya yang tercantum dalam APBN-P tahun 2010 sejumlah Rp43,46 triliun telah terealisasi senilai Rp59,43 triliun. Realisasi PNBP lainnya pada tahun 2010 ini didominasi oleh realisasi pendapatan jasa yang mencapai Rp25,42 triliun, pendapatan penjualan dan sewa yang mencapai Rp16,50 triliun, pendapatan bunga sebesar Rp7,35 triliun, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp6,09 triliun. Keempat sumber penerimaan PNBP lainnya ini berkontribusi sebesar 93,15 persen dari total penerimaan PNBP lainnya.

Sumber : NK dan RAPBN 2011

Realisasi hibah tahun 2010

Penerimaan hibah tahun 2010 terealisasi sebesar Rp3,02 triliun yakni 158,95 persen dari target APBN-P tahun 2010 sejumlah Rp1,90 triliun. Angka realisasi tersebut meningkat

dibandingkan realisasi hibah tahun 2009 yang hanya mencapai Rp1,67 triliun. Komitmen akan kesediaan negara atau lembaga donor dalam memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia adalah penentu besarnya penerimaan hibah. Di samping itu penerimaan hibah harus sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) antara Pemerintah Indonesia dengan pihak donor.

Tren realisasi penerimaan hibah 2006-2010

Realisasi penerimaan hibah secara nominal dan tingkat pencapaian targetnya selama tahun 2006-2010 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 terealisasi Rp1,83 triliun (43,26 persen dari yang ditargetkan pada APBN tahun 2006), dan pada tahun 2007 turun menjadi Rp1,70 triliun (44,50 persen), kemudian meningkat menjadi Rp2,30 triliun (77,97 persen) pada tahun 2008. Pada tahun 2009 realisasi penerimaan hibah mengalami penurunan menjadi Rp1,67 triliun (165,35 persen) dan selanjutnya naik kembali pada 2010 menjadi sebesar Rp3,02 triliun (158,95 persen). Di samping tergantung komitmen dari pemberi bantuan, faktor yang mendorong meningkatnya realisasi penerimaan hibah antara lain bersumber dari penerapan kebijakan Pemerintah tentang sistem akuntansi hibah yang mewajibkan semua penerimaan hibah dicatat dalam APBN dan meningkatnya komitmen negara donor dan lembaga internasional membantu Indonesia terkait perubahan iklim.

2. Belanja Negara

Volume belanja yang dipengaruhi faktor eksternal dan internal

Target maupun realisasi belanja negara memiliki kecenderungan yang meningkat. Kecenderungan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang terkait dengan ekonomi makro seperti harga minyak mentah (ICP), nilai tukar Rupiah, dan perkembangan tingkat suku bunga (SBI), juga banyak ditentukan oleh kebijakan di bidang pembelanjaan yang diambil oleh Pemerintah. Di samping itu, kebijakan belanja negara banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, Pemerintah melakukan kebijakan yang bersifat ekspansif dengan meningkatkan volume belanja khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, yang dapat memberi stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam kondisi ekonomi yang memanas akibat tingginya permintaan agregat, Pemerintah akan meluncurkan kebijakan kontraktif yang berfungsi untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian.

Realisasi belanja negara tahun 2010

Di tahun 2010, realisasi belanja negara mencapai nilai Rp1.042,12 triliun atau mencapai 92,54 persen dari alokasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp1.126,15 triliun serta lebih besar dari volume belanja negara tahun 2009 senilai Rp937,38 triliun. Realisasi belanja negara tahun 2010 tersebut berasal dari realisasi belanja Pemerintah pusat sebesar Rp697,41 triliun dan realisasi transfer ke daerah sebesar Rp344,73 triliun.

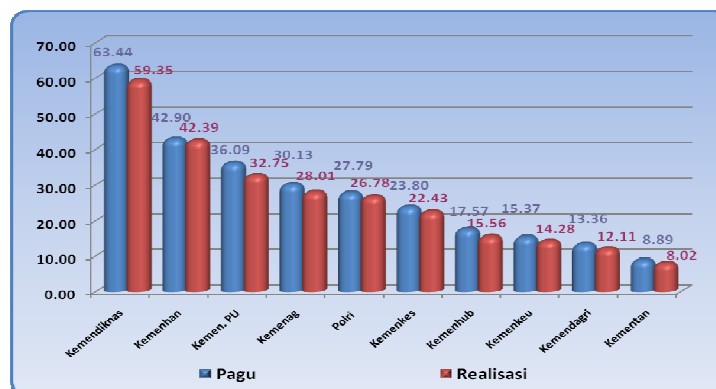
Belanja Pemerintah menurut organisasi yang mengalami kecenderungan meningkat

Belanja Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang merupakan *business unit* pengelola anggaran Pemerintah. Eksekusi belanja Pemerintah pusat menurut organisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L. Sesuai dengan prinsip *let the managers manage*, setelah reformasi manajemen keuangan negara, setiap K/L bertanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan realisasi anggaran belanja yang dikelolanya.

10 K/L yang memiliki alokasi anggaran belanja terbesar dalam APBN-P tahun 2010

Dalam konteks menciptakan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang, terdapat sepuluh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang memiliki alokasi dan realisasi belanja terbesar dalam APBN-P tahun 2010. Kesepuluh K/L tersebut adalah Kementerian Pendidikan Nasional (alokasi anggaran pada APBN-P 2010 sebesar Rp63,44 triliun dengan tingkat realisasi 93,55 persen atau Rp59,35 triliun), Kementerian Pertahanan (alokasi anggaran pada APBN-P 2010 sebesar Rp42,90 triliun dengan tingkat realisasi 98,81 persen atau Rp42,39 triliun), Kementerian Pekerjaan Umum (alokasi anggaran pada APBN-P 2010 sebesar Rp36,09 triliun dengan tingkat realisasi 90,75 persen atau

Rp32,75 triliun), Kementerian Agama (alokasi anggaran pada APBN-P 2010 sebesar Rp30,13 triliun dengan tingkat realisasi 92,96 persen atau Rp28,01 triliun), Kepolisian RI (alokasi anggaran pada APBN-P 2010 sebesar Rp27,79 triliun dengan tingkat realisasi 96,37 persen atau Rp26,78 triliun), Kementerian Kesehatan (alokasi anggaran pada APBN-P 2010 sebesar Rp23,80 triliun dengan tingkat realisasi 94,24 persen atau Rp22,43 triliun), Kementerian Perhubungan (alokasi anggaran pada APBN-P 2010 sebesar Rp17,57 triliun dengan tingkat realisasi 88,56 persen atau Rp15,56 triliun), Kementerian Keuangan (alokasi anggaran pada APBN-P 2010 sebesar Rp15,37 triliun dengan tingkat realisasi 92,91 persen atau Rp14,28 triliun), Kementerian Dalam Negeri (alokasi anggaran pada APBN-P 2010 sebesar Rp13,36 triliun dengan tingkat realisasi 90,64 persen atau Rp12,11 triliun), dan Kementerian Pertanian (alokasi anggaran pada APBN-P 2010 sebesar Rp8,89 triliun dengan tingkat realisasi 90,21 persen atau Rp8,02 triliun). Grafik K/L yang menerima alokasi anggaran belanja terbesar menurut organisasi dapat dilihat di Grafik 17.



Sumber: Kemenkeu

Grafik 17. K/L Penerima Alokasi Anggaran Belanja Terbesar

Belanja Pemerintah pusat menurut fungsi

Karakteristik belanja Pemerintah banyak dipengaruhi oleh kebijakan dan prioritas Pemerintah yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Di samping dialokasikan per organisasi dalam rangka pertanggungjawaban dan akuntabilitas, belanja pemerintah pusat juga dialokasikan berdasarkan fungsi. Alokasi ini menggambarkan aspek penyelenggaraan Pemerintahan yang sejalan dengan prioritas Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja Pemerintah dilihat dari fungsinya, secara umum terdapat tiga fungsi yang mendapat prioritas tertinggi yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pendidikan dan fungsi ekonomi dengan alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp528,77 triliun, Rp97,24 triliun dan Rp61,20 triliun. Dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, terdapat pengeluaran yang berdampak tidak langsung dengan kemiskinan, seperti pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perumahan, dan pengeluaran yang berdampak langsung terhadap kemiskinan seperti subsidi dan transfer dana tunai.

Meningkatnya alokasi anggaran pendidikan

Terhadap sektor pendidikan yang diharapkan secara tidak langsung dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memutus rantai kemiskinan, diupayakan memperoleh alokasi anggaran yang terus meningkat, di samping itu juga untuk memenuhi amanat konstitusi yang mensyaratkan alokasi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Pada APBN-P tahun 2010, total anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp225,23 triliun atau 20 persen dari total belanja negara, yang terdiri dari anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, melalui transfer ke daerah dan melalui pengeluaran pembiayaan. Total anggaran pendidikan mengalami peningkatan sebesar Rp16,94 triliun atau 8,13 persen dibanding anggaran pendidikan tahun 2009 yang mencapai Rp208,29 triliun.

Realisasi belanja Pemerintah

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan dalam 11 fungsi yang menggambarkan aspek penyelenggaraan Pemerintah yakni (1) fungsi pelayanan umum, (2) fungsi pertahanan, (3) fungsi

berdasarkan 11 fungsi

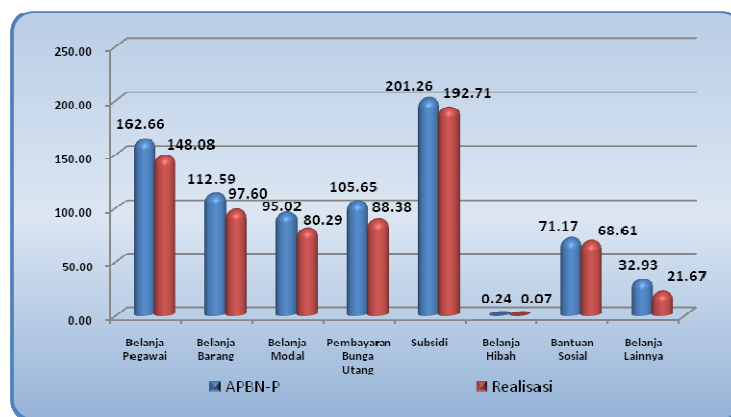
ketertiban dan keamanan, (4) fungsi ekonomi, (5) fungsi lingkungan hidup, (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum, (7) fungsi kesehatan, (8) fungsi pariwisata dan budaya, (9) fungsi agama, (10) fungsi pendidikan dan (11) fungsi perlindungan sosial. Selama tahun 2010, fungsi pelayanan umum mendapatkan alokasi anggaran yang mencapai 67,66 persen dari total belanja Pemerintah Pusat, selanjutnya diikuti oleh fungsi pendidikan yang memperoleh alokasi anggaran sebesar 12,44 persen dan fungsi ekonomi yang memperoleh alokasi anggaran sebesar 7,83 persen. (lihat Tabel 4). Adapun realisasi belanja pada fungsi pelayanan umum juga mendominasi belanja Pemerintah menurut fungsi tahun-tahun sebelumnya yang mencapai rata-rata 67,2 persen dari total belanja Pemerintah pusat setiap tahunnya.

Tabel 4. Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun 2010 (Rp Triliun)

Fungsi	Pagu	Realisasi
Pelayanan Umum	528,77	471,56
Pertahanan	21,43	17,08
Ketertiban dan Keamanan	16,91	13,84
Ekonomi	61,20	52,18
Lingkungan Hidup	8,59	6,55
Perumahan dan Fasilitas Umum	21,51	20,05
Kesehatan	19,80	18,79
Pariwisata dan Budaya	1,53	1,41
Agama	0,94	0,88
Pendidikan	97,24	90,82
Perlindungan Sosial	3,61	3,34

Realisasi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi

Rincian kontribusi per jenis belanja/klasifikasi ekonomi belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: realisasi belanja pegawai senilai Rp148,08 triliun atau 91,04 persen dari target APBN-P, realisasi belanja barang sebesar Rp97,60 triliun atau 86,69 persen dari anggaran APBN-P, realisasi belanja modal sebesar Rp80,29 triliun atau 84,50 persen dari target APBN-P, realisasi pembayaran bunga utang sebesar Rp88,38 triliun atau 83,65 persen dari target APBN-P, realisasi belanja subsidi senilai Rp192,71 triliun atau 95,75 persen dari target APBN-P, realisasi belanja hibah sebesar Rp0,07 triliun atau 29,17 persen dari target APBN-P, realisasi belanja bantuan sosial senilai Rp68,61 triliun atau 96,40 persen dari target APBN-P, dan realisasi belanja lain-lain sebesar Rp21,67 triliun atau 65,81 persen dari target APBN-P. Secara persentase, kontribusi belanja Pemerintah Pusat terbesar berdasarkan klasifikasi ekonomi selama tahun 2010 adalah realisasi belanja subsidi sebesar 27,63 persen diikuti oleh realisasi belanja pegawai sebesar 21,23 persen, diikuti dengan belanja barang sebesar 13,99 persen, belanja pembayaran bunga utang sebesar 12,67 persen, belanja modal sebesar 11,51 persen, belanja bantuan sosial sebesar 9,84 persen, belanja lain-lain sebesar 3,11 persen dan belanja hibah 0,01 persen dari total belanja (lihat Grafik 18).



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 18. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010
Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

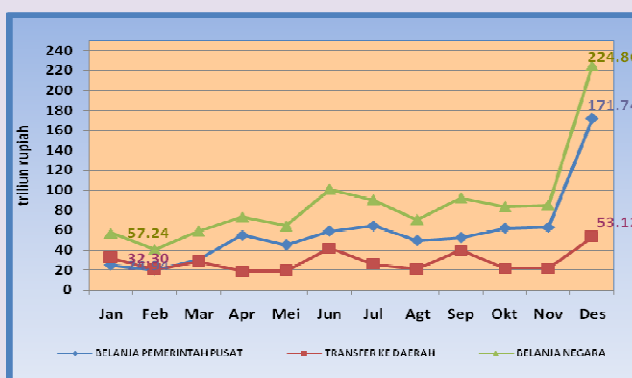
Tren realisasi belanja berdasarkan jenis belanja selama 5 tahun terakhir

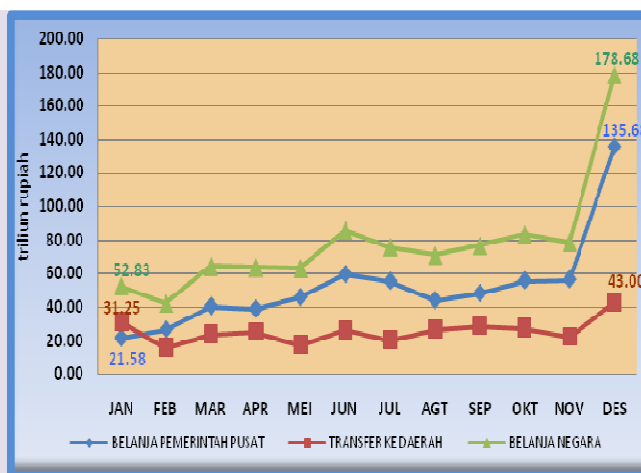
Sejak tahun 2006, realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat didominasi oleh belanja operasional, yakni belanja pegawai, belanja barang, subsidi, dan pembayaran bunga, rata-rata mencapai 74,5 persen dari total belanja Pemerintah Pusat. Di tahun 2010 khususnya belanja operasional tersebut mencapai 75,53 persen dari total belanja Pemerintah Pusat, sedangkan sisanya merupakan realisasi belanja modal, bantuan sosial, belanja hibah dan belanja lain-lain. Besarnya kontribusi realisasi belanja operasional menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, Pemerintah membelanjakan APBN untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat mengikat. Dengan demikian Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan *quality of spending* agar dapat memperluas ruang gerak Pemerintah dalam melakukan intervensi fiskal yang antara lain dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara.

Boks 4. Tren Penyerapan Anggaran Belanja TA 2010

Kecenderungan peningkatan belanja Pemerintah dari tahun ke tahun memiliki implikasi terhadap makro ekonomi yakni pada sektor riil yang berpengaruh pada konsumsi, investasi dan pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini seharusnya dibarengi dengan pola pencairan dana yang responsif terhadap peran APBN sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Fenomena yang selama ini terjadi menunjukkan kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja dan cenderung tereskalasi pada akhir tahun. Mencermati hal tersebut Pemerintah berupaya terus memperbaiki tren pencairan dana yang antara lain dilakukan melalui penerapan proses kerja dalam area pencairan belanja negara serta memperkenalkan manajemen kas yang efisien.

Salah satu kendala yang ditengarai menjadi penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja negara adalah kesiapan kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan prosedur pengadaan barang dan jasa serta kesiapan dalam menyediakan berbagai dokumen pencairan.



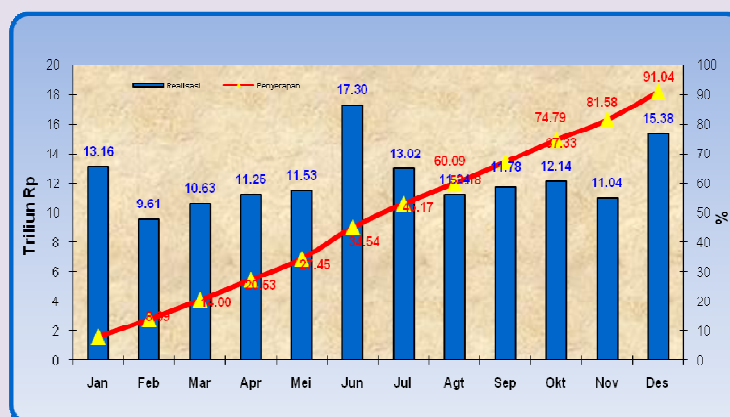


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 19. Tren Belanja Negara Bulanan TA 2010 dan TA 2009

Belanja negara terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah. Dari grafik di atas menunjukkan bahwa tren realisasi belanja negara mengalami pergerakan secara perlahan dimulai pada awal tahun hingga mencapai puncaknya pada bulan Juni, selanjutnya mengalami penurunan hingga bulan Nopember dan meningkat tajam pada bulan Desember dengan nilai realisasi tertinggi sebesar Rp224,86 triliun dengan rata-rata nilai serapan per bulan sebesar Rp86,85 triliun.

Realisasi belanja Pemerintah pusat pada tahun 2010 sebesar Rp697,41 triliun atau 89,24 persen dari target APBN-P 2010 sebesar Rp781,53 triliun. Tren realisasinya menunjukkan pergerakan secara perlahan dimulai pada awal tahun hingga mencapai puncaknya pada bulan Juni, selanjutnya mengalami penurunan pada bulan Juli dan berfluktuasi hingga bulan Nopember dan meningkat tajam pada bulan Desember dengan nilai realisasi tertinggi sebesar Rp171,74 triliun dan rata-rata nilai serapan per bulan untuk belanja Pemerintah pusat di atas Rp58,12 triliun.

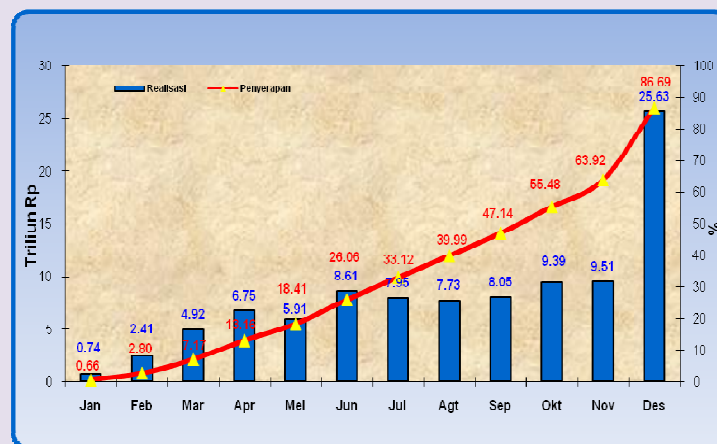


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 20. Tren Belanja Pegawai Bulanan TA 2010

Belanja pegawai pada tahun 2010 terealisasi sebesar Rp148,08 triliun atau 91,04 persen dari pagu APBN-P sebesar Rp162,66 triliun, secara nominal meningkat sebesar Rp20,41 triliun atau 15,99 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp127,67 triliun. Hal yang mempengaruhi rendahnya realisasi belanja pegawai tahun 2010 di antaranya adalah adanya penghematan cadangan anggaran pegawai baru, honorarium dan vakasi, serta belum terserapnya anggaran remunerasi K/L. Dari bulan Januari sampai dengan Mei 2010 tren belanja

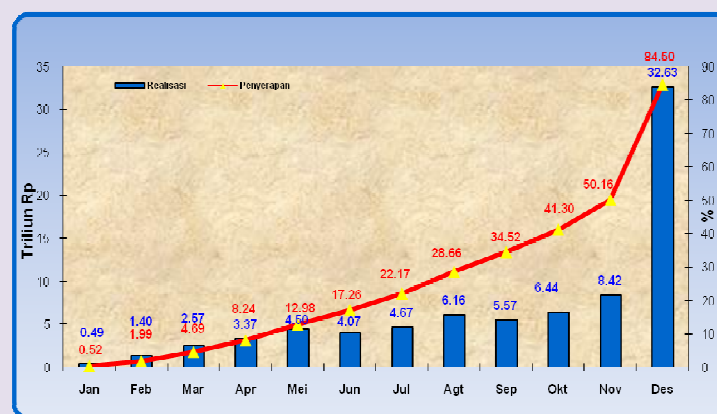
pegawai berfluktuasi tipis dengan nominal yang hampir sama, dan pada bulan Juni 2010 mengalami peningkatan cukup tajam yang tidak lain dipengaruhi pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur negara dengan nilai realisasi tertinggi sebesar Rp17,30 triliun. Selanjutnya pada bulan Juli sampai Desember tingkat serapan cenderung mendatar atau meningkat tipis. Tren ini tidak jauh berbeda dengan tren tahun sebelumnya.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 21. Tren Belanja Barang Bulanan TA 2010

Pagu belanja barang pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp112,59 triliun atau meningkat sebesar Rp27,13 triliun atau 31,75 persen dibanding pagu tahun sebelumnya sebesar Rp85,46 triliun. Belanja barang terealisasi sebesar Rp97,60 triliun atau 86,69 persen dari pagu, yang berarti mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2009 yang terealisasi sebesar Rp80,67 triliun. Adapun tren belanja barang pada tahun 2010 tidak banyak berbeda dengan tren tahun sebelumnya. Tren tersebut terus berfluktuasi dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada akhir tahun anggaran. Secara nominal, realisasi terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0,74 triliun dan realisasi tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp25,63 triliun. Rendahnya tingkat serapan belanja barang ditengarai terkait dengan kesiapan kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan prosedur pengadaan barang dan jasa serta tingginya tingkat kehati-hatian pejabat pengadaan dalam mengambil keputusan.

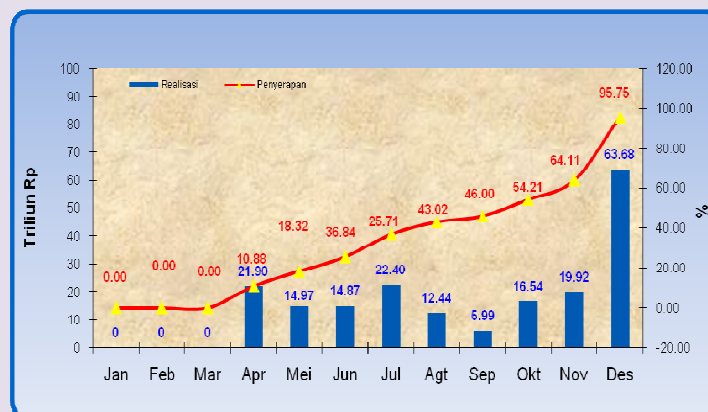


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 22. Tren Belanja Modal Bulanan TA 2010

Alokasi anggaran belanja modal pada tahun 2010 sebesar Rp95,02 triliun yang berarti naik sebesar Rp21,64 triliun atau 29,49 persen dibanding pagu tahun 2009 sebesar Rp73,38 triliun. Adapun realisasi belanja modal tahun 2010 sebesar Rp80,29 triliun atau 84,50 persen dari

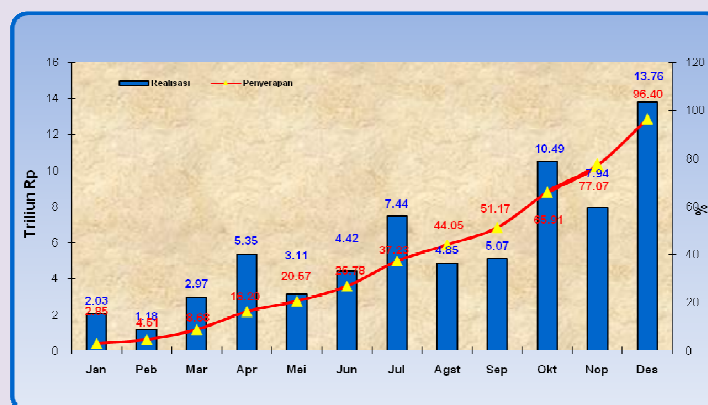
pagunya. Belanja modal memiliki tren yang tidak jauh berbeda dengan tren realisasi belanja barang yakni sepanjang tahun mengalami fluktuasi dan meningkat secara signifikan pada bulan Oktober, Nopember dan Desember. Realisasi terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0,49 triliun dan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp32,63 triliun dengan rata-rata realisasi sebesar Rp6,69 triliun. Rendahnya tingkat realisasi belanja modal pada tahun 2010 ditengarai terjadi karena adanya penundaan pelaksanaan kegiatan/proyek yang terkendala iklim/cuaca, bencana alam dan masalah dalam pengadaan/pembebasan lahan, serta penghematan anggaran dari pelaksanaan tender.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 23. Tren Belanja Subsidi Bulanan TA 2010

Pagu belanja subsidi pada tahun 2010 senilai Rp201,26 triliun atau meningkat sebesar Rp43,14 triliun (27,28 persen) dibanding yang dialokasikan pada tahun 2009 sebesar Rp158,12 triliun. Realisasi belanja subsidi mencapai Rp192,71 triliun atau 95,75 persen dari yang pagu APBN-P 2010 yang berarti mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp54,63 triliun atau 39,56 persen dibanding realisasi tahun lalu yang berada pada level Rp138,08 triliun. Adapun tren penyerapan belanja subsidi sepanjang tahun 2010 berfluktuasi. Penyerapan baru terjadi pada bulan April dan kemudian turun sampai bulan Juni serta meningkat secara tajam pada bulan Desember sebesar Rp63,68 triliun atau 33,04 persen dari total pagu. Penyerapan terendah terjadi pada bulan September sebesar Rp5,99 triliun dan penyerapan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp63,68 triliun. Secara umum, nilai serapan per bulan untuk belanja subsidi rata-rata Rp16,06 triliun. Realisasi subsidi melampaui pagu terutama terkait dengan lebih tingginya beban subsidi listrik, dan subsidi non-energi yang diakibatkan oleh adanya subsidi pangan dan tambahan subsidi pajak.

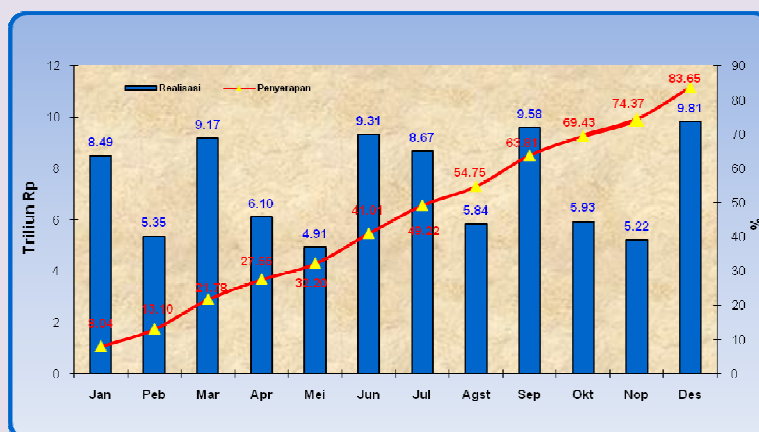


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 24. Tren Belanja Bantuan Sosial Bulanan TA 2010

Pada tahun 2010 belanja bantuan sosial menerima alokasi anggaran sebesar Rp71,17 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp6,76 triliun atau 8,67 persen bila dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2009 sebesar Rp77,93 triliun. Belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp68,61 triliun atau 95,40 persen dari pagu APBN-P 2010 atau mengalami penurunan sebesar Rp5,20 triliun atau 7,05 persen dibanding realisasi tahun 2009 sebesar Rp73,81 triliun. Tren belanja bantuan sosial berfluktuasi sepanjang tahun 2010, penyerapan terendah terjadi pada bulan Februari sebesar Rp1,18 triliun dan penyerapan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp13,76 triliun dan secara rata-rata penyerapan belanja bantuan sosial per bulan Rp5,72 triliun.

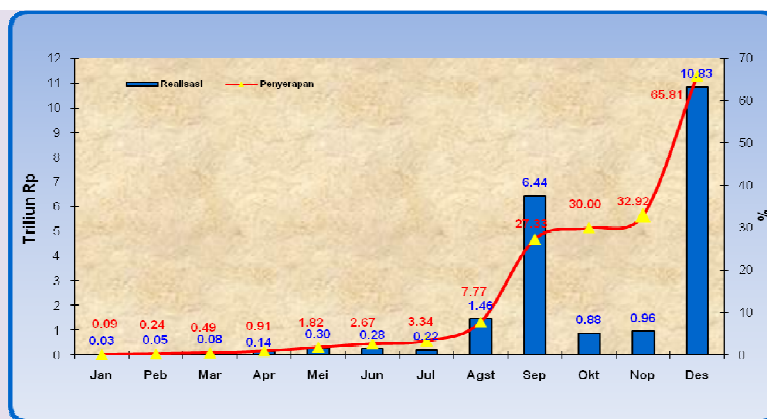
Realisasi bantuan sosial pada tahun 2010 dipengaruhi oleh adanya luncuran program kegiatan PNPM Mandiri 2009 ke tahun 2010, dan meningkatnya bencana alam, termasuk banjir Wasior, Tsunami Mentawai, dan Erupsi Gunung Merapi.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 25. Tren Belanja Pembayaran Bunga Utang Bulanan TA 2010

Alokasi anggaran belanja pembayaran bunga utang pada tahun 2010 mencapai Rp105,65 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp3,94 triliun atau 3,60 persen bila dibandingkan alokasi tahun lalu sebesar Rp109,59 triliun. Realisasi belanja pembayaran bunga utang sebesar Rp88,38 triliun atau 83,65 persen dari yang dialokasikan dalam APBN-P 2010 atau mengalami penurunan sebesar Rp5,40 triliun atau 5,76 persen dibanding realisasi tahun 2009 yang mencapai Rp93,78 triliun. Penurunan besaran pembayaran bunga utang seiring dengan penurunan tingkat imbal hasil (yield) obligasi negara dan pengalihan sebagian target penerbitan SBN dari Rupiah ke valuta asing serta menguatnya nilai tukar Rupiah. Pada awal tahun 2010 belanja pembayaran bunga utang terserap sebesar Rp8,49 triliun atau sebesar 9,60 persen dari total realisasi dan pada akhir tahun terserap sebesar Rp9,81 triliun atau 11,10 persen dari total realisasi belanja pembayaran bunga utang tahun 2010.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 26. Tren Belanja Lain-lain Bulanan TA 2010

Pada tahun 2010 belanja lain-lain mendapatkan alokasi sebesar Rp32,93 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp20,38 triliun atau 38,23 persen dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp53,31 triliun. Belanja lain-lain terealisasi sebesar Rp21,67 triliun atau 65,81 persen dari yang dialokasikan dalam APBN-P 2010 atau mengalami penurunan sebesar Rp17,26 triliun atau 38,23 persen dibanding realisasi tahun 2009 sebesar Rp38,93 triliun. Tren penyerapan belanja lain-lain sepanjang tahun 2010 berfluktuasi dan realisasi terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0,03 triliun, sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp10,83 triliun. Secara rata-rata penyerapan belanja lain-lain per bulan selama tahun 2010 adalah sebesar Rp1,81 triliun. Secara nominal rendahnya realisasi anggaran belanja lain-lain tahun 2010 dibanding realisasi tahun 2009 disebabkan karena tidak adanya realisasi belanja pemilu dan bantuan langsung tunai, serta rendahnya realisasi belanja penunjang.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RKP 2010

Dalam RKP tahun 2010 Pemerintah menetapkan arah kebijakan pembangunan nasional dengan mengutamakan lima prioritas yakni (1) pemeliharaan kesejahteraan rakyat rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial; (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia; (3) pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional; (4) pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi; dan (5) peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim, termasuk dalam pengurangan risiko bencana.

Perkembangan realisasi belanja menurut fungsi selama 5 tahun terakhir

Sejalan dengan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan RPJMN tahun 2010-2014 yang menetapkan 3 (tiga) agenda yang menjadi misi pembangunan yaitu (1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, (2) memperkuat pilar-pilar demokrasi, dan (3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Agenda yang dituangkan dalam besaran dan kebijakan alokasi belanja negara memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan. Sejalan dengan itu, maka baik pagu maupun realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2010 diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pencapaian misi tersebut (lihat tabel 4). Peran APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting untuk melakukan stimulus bagi perekonomian terutama melalui belanja negara. Kebijakan fiskal yang ekspansif bagi perekonomian terlihat dari perkembangan realisasi belanja negara dan defisit (lihat tabel 5).

Realisasi belanja negara tahun 2006 sebesar Rp667,13 triliun atau sekitar 19,98 persen PDB yang terdiri dari belanja Pemerintah pusat Rp440,03 triliun (13,18 persen PDB), dan transfer ke daerah mencapai Rp226,18 triliun (6,78 persen PDB). Sementara itu, pada tahun 2007, realisasi belanja negara meningkat sebesar 13,57 persen jika dibandingkan dengan realisasi

belanja negara tahun 2006 yang antara lain dipengaruhi oleh kenaikan subsidi BBM serta pemberian subsidi pupuk sebagai insentif untuk mendorong investasi dalam negeri. Realisasi belanja negara tahun 2008 juga meningkat cukup signifikan sebesar 30,10 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian belanja negara tahun 2009 turun sebesar 4,90 persen dibanding tahun sebelumnya dan meningkat di tahun 2010 sebesar 11,17 persen.

Tabel 5. Perkembangan Belanja Negara Tahun 2006-2010
(Triliun Rupiah)

Uraian	2006		2007		2008		2009		2010	
	APBN-P	Real	APBN-P	Real	APBN-P	Real	APBN-P	Real	APBN-P	Real
Belanja Negara	699,10	667,13	752,37	757,65	989,49	985,73	1.000,84	937,38	1.126,15	1.042,12
Belanja Pemerintah Pusat	478,25	440,03	498,17	504,62	697,07	693,36	691,54	628,81	781,53	697,41
Transfer ke Daerah	220,85	226,18	254,20	253,26	292,42	292,43	309,31	308,59	344,61	344,73
Suspen		0,92		(0,24)		(0,06)		(0,02)		(0,02)
Surplus/Defisit	(39,98)	(29,14)	(58,29)	(49,84)	(94,50)	(4,12)	(129,84)	(88,62)	(133,75)	(46,85)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Kontribusi belanja modal terhadap perekonomian

Secara nominal realisasi belanja modal tahun 2006-2010 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi rasio belanja modal terhadap PDB mengalami penurunan. Keterbatasan Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal seiring dengan semakin sempitnya ruang gerak yang dimiliki Pemerintah terkait dengan *fiscal space*. *Fiscal space* terhadap PDB selama periode 2006-2010 berturut-turut adalah 6,27 persen, 5,48 persen, 4,93 persen, 5,17 persen, dan 4,86 persen. Sedangkan rasio realisasi belanja modal terhadap PDB dalam kurun waktu 2006-2010 adalah 1,65 persen, 1,62 persen, 1,47 persen, 1,35 persen, dan 1,25 persen. Pos belanja modal dalam APBN memiliki dampak yang cukup besar terhadap sektor riil terutama melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Walaupun secara nominal realisasi belanja modal meningkat dari tahun ke tahun, namun rasio belanja modal terhadap PDB cenderung menurun akibat peningkatan nilai PDB yang cukup signifikan.

Tabel 6. Kontribusi Belanja Modal terhadap PDB
(triliun Rupiah)

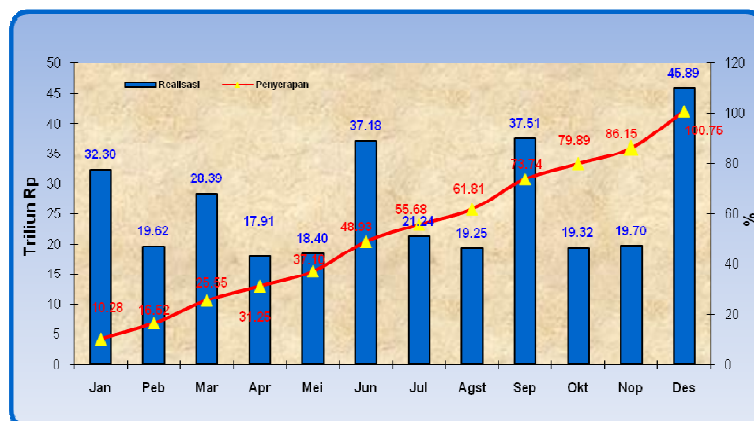
Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
Realisasi Belanja Modal	54,95	64,29	72,77	75,87	80,29
PDB	3.338,2	3.957,4	4.954	5.613,4	6.422,9
Rasio Belanja Modal Terhadap PDB	1,65	1,62	1,47	1,35	1,25

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Realisasi transfer ke daerah

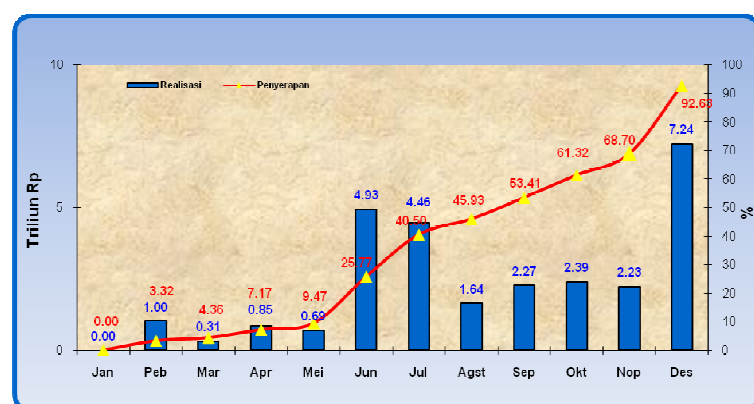
Transfer ke daerah terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Alokasi anggaran transfer ke daerah pada tahun 2010 sebesar Rp344,61 triliun atau meningkat sebesar Rp35,30 triliun atau 11,41 persen dibanding tahun lalu yang mencapai Rp309,31 triliun. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Transfer ke daerah tahun 2010 terealisasi sebesar Rp344,73 triliun atau meningkat Rp36,14 triliun atau 11,71 persen dari realisasi di tahun sebelumnya yang hanya mencapai nilai Rp308,59 triliun. Transfer ke daerah sejalan dengan kebijakan desentralisasi yang implementasinya akan memasuki dasawarsa kedua. Alokasi transfer ke daerah yang merupakan salah satu sumber pendanaan daerah meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan negara, dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Prinsip dan tujuan desentralisasi fiskal yang dianut Pemerintah antara lain untuk mengurangi *vertical fiscal imbalance* dan *horizontal fiscal imbalance*, meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, meningkatkan efisiensi sumber daya nasional, membangun tata kelola pelaksanaan transfer ke daerah yang tepat sasaran dan tepat waktu, serta mendukung *fiscal sustainability* dalam kebijakan ekonomi

makro.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 27. Tren Serapan Dana Perimbangan Bulanan TA 2010



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 28. Tren Serapan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Bulanan TA 2010

Tren serapan transfer ke daerah tersebut tidak berbeda jauh dengan tren belanja Pemerintah Pusat yakni berfluktuasi sepanjang tahun 2010 (lihat boks 4). Untuk dana perimbangan, pada awal tahun terjadi penyerapan sebesar Rp32,30 triliun atau 10,20 persen terhadap total realisasi dana perimbangan, selanjutnya berfluktuasi sampai dengan bulan Juni yang terserap sebesar Rp37,18 triliun dan pada akhir tahun terjadi penyerapan tertinggi sebesar Rp45,89 triliun atau 14,49 persen dari total realisasi dana perimbangan. Secara nominal, dana perimbangan terserap sebesar Rp316,71 triliun dengan rata-rata serapan per bulan sebesar di atas Rp26,39 triliun. Penyerapan dana otonomi khusus dan penyesuaian dimulai pada bulan Pebruari sebesar Rp1,00 triliun untuk selanjutnya turun sampai dengan bulan Mei dengan serapan sebesar Rp0,69 triliun dan naik kembali pada bulan Juni di angka Rp4,93 triliun. Pada akhir tahun serapan meningkat secara signifikan dengan nilai nominal sebesar Rp7,24 triliun. Secara nominal, dana otonomi khusus dan penyesuaian terserap sebesar Rp28,02 triliun dengan rata-rata serapan per bulan sebesar di atas Rp2,34 triliun.

Boks 4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Secara umum, tujuan dari PNPM adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 yang antara lain bertujuan untuk memitigasi tingkat kemiskinan, alokasi PNPM yang berasal dari APBN cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Komponen program PNPM Mandiri terdiri dari:

- a. Pengembangan masyarakat yang merupakan serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.
- b. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin
- c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas Pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak
- d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung Pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.

Di tahun 2010 alokasi BLM yang digunakan untuk Program PNPM perdesaan, PNPM perkotaan, PNPM daerah tertinggal dan khusus, PNPM infrastruktur perdesaan dan PNPM infrastruktur sosial ekonomi wilayah sebesar Rp 11.834.550 juta. Alokasi ini meningkat dibandingkan alokasi tahun 2009 yakni senilai Rp9.484.004 juta.

Sumber : <http://www.pnpm-mandiri.org/>

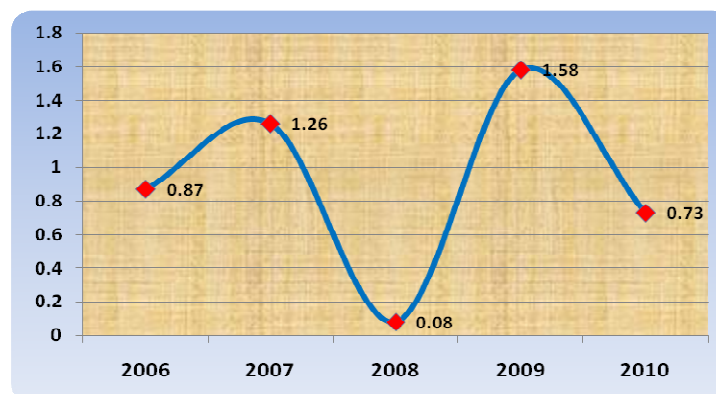
3. Pembiayaan

Realisasi defisit APBN

Defisit anggaran tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp133,75 triliun pada APBN-P tahun 2010. Target tersebut terealisasi 35,03 persen dimana defisit anggaran tahun 2010 mencapai nilai Rp46,85 triliun. Kebijakan untuk meningkatkan target defisit anggaran di tahun 2010 dipengaruhi antara lain oleh kenaikan harga minyak dunia, meningkatnya kebutuhan dana investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dana bergulir pengadaan tanah untuk jalan tol (BPJT), dibentuknya dana pengembangan pendidikan nasional dan adanya pemberian pinjaman kepada PT PLN (Persero) dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Rasio defisit terhadap PDB

Indikator kesinambungan fiskal yang lain adalah rasio defisit terhadap PDB. Rasio tersebut berada di bawah level 3 persen selama tahun 2006-2010. Rasio defisit terhadap PDB berfluktuatif dari 0,87 persen pada tahun 2006 menjadi 0,73 persen pada tahun 2010. Defisit terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar Rp4,12 triliun atau 0,08 persen terhadap PDB atau 4,36 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp94,50 triliun, sedangkan defisit tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp88,62 triliun atau 1,58 persen terhadap PDB atau 68,25 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P 2009 sebesar Rp129,84 triliun.

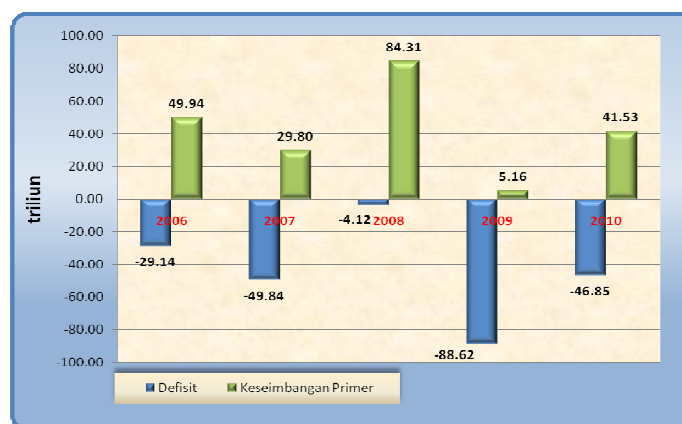


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 29. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB Tahun 2006-2010

Keseimbangan primer

Keseimbangan primer diperoleh dari pendapatan termasuk hibah dikurangi dengan pengeluaran yang tidak memiliki komponen bunga (pinjaman neto). Pada tahun 2010, keseimbangan primer terealisasi sebesar Rp41,53 triliun yang berarti mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang berada pada posisi Rp5,16 triliun. Peningkatan ini dipengaruhi antara lain oleh menurunnya pembayaran kewajiban bunga utang dan menurunnya defisit anggaran sebagai akibat meningkatnya realisasi pendapatan yang lebih besar daripada belanja negara dibandingkan tahun yang lalu. Pembayaran bunga utang pada tahun 2010 sebesar Rp88,38 triliun yang berarti mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang mencapai Rp93,78 triliun. Sementara itu, defisit anggaran pada tahun 2010 berada pada level Rp46,85 triliun yang lebih rendah dibanding tahun 2009 yang mencapai Rp88,62 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 30. Defisit dan Keseimbangan Primer Tahun 2006-2010

Dampak stimulus fiskal terhadap defisit APBN

Peningkatan defisit fiskal merupakan implikasi dari kebijakan stimulus fiskal dalam beberapa tahun terakhir terutama sejak tahun 2005, setelah dalam periode sebelumnya yakni tahun 2000-2004 lebih menekankan pada strategi konsolidasi fiskal. Defisit anggaran meningkat secara tajam di tahun 2007 antara lain terkait erat dengan meningkatnya harga-harga komoditas internasional terutama harga minyak dunia yang mengakibatkan meningkatnya beban subsidi Pemerintah. Stimulus fiskal Pemerintah diberikan dalam bentuk (1) insentif perpajakan; (2) optimalisasi belanja negara untuk pembangunan; (3) pengalokasian belanja negara dalam rangka meningkatkan *purchasing power* dari masyarakat yang berpenghasilan rendah; dan (4) dukungan Pemerintah kepada swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui *Public-Private Partnership* (PPP).

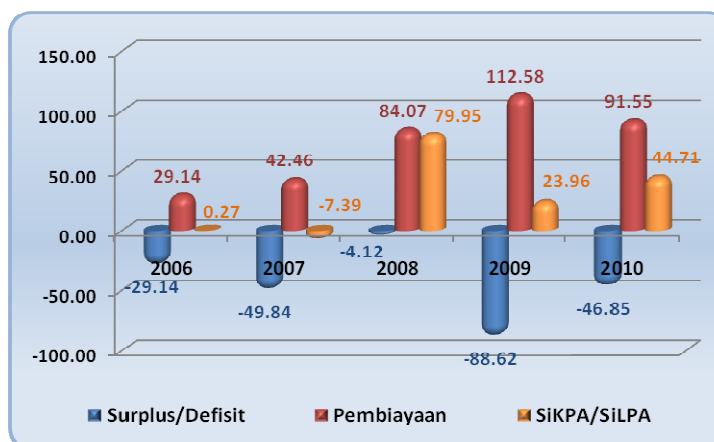
Walaupun kebijakan fiskal ekspansif memiliki kecenderungan terjadinya defisit, Pemerintah terus berupaya menjaga defisit fiskal pada tingkat yang relatif rendah. Di samping itu, upaya perhitungan besaran dan realisasi defisit ini dilakukan dengan memperhatikan kemampuan pembiayaan tanpa merusak indikator makroekonomi seperti inflasi. Defisit yang meningkat juga diseimbangkan dengan kebijakan di bidang pendapatan yang mengupayakan peningkatan pendapatan negara terutama yang berasal dari dalam negeri.

Sumber-sumber pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan terus digali untuk menutup defisit anggaran. Sumber pembiayaan itu sendiri berasal dari sumber pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian, Pemerintah menekankan sumber pembiayaan dalam negeri sebagai sumber pembiayaan APBN. Adapun sumber pembiayaan luar negeri juga digali dengan memperhatikan dan mempertahankan penurunan rasio utang terhadap PDB secara berkesinambungan (*debt sustainability*). Seperti tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan pembiayaan dipenuhi dari sumber-sumber pembiayaan utang dan non utang. Pada tahun 2010 sumber pembiayaan didominasi oleh sumber pembiayaan utang yang diakibatkan oleh terbatasnya sumber pembiayaan non utang yang antara lain dipengaruhi oleh kebijakan penerimaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk sumber yang berasal dari utang, Pemerintah menggunakan Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Utang Negara (SUN), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen utama. Realisasi pembiayaan tahun 2010 adalah Rp91,55 triliun atau sebesar 68,45 persen dari pembiayaan yang ditargetkan dalam APBN-P 2010 sebesar Rp133,75 triliun yang terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp96,12 triliun dan pembiayaan luar negeri sebesar minus Rp4,57 triliun.

Perkembangan surplus/defisit, pembiayaan, SIKPA/SILPA

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih atau selisih kurang setelah pembiayaan atau selisih seluruh penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran. Secara umum, SiLPA menimbulkan saldo lebih bagi Pemerintah yang dapat digunakan untuk pengeluaran pada periode anggaran berikutnya. Namun demikian, adanya SiLPA yang notabene dipengaruhi oleh banyak hal, baik eksternal maupun internal memiliki dampak yang kurang menguntungkan ditinjau dari stimulasi perekonomian yang dilakukan Pemerintah melalui anggaran itu sendiri. Penambahan SiLPA tahun anggaran berjalan dengan saldo SiLPA tahun sebelumnya menghasilkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah. SiKPA yakni selisih kurang menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam membiayai kekurangan anggaran. Pada tahun 2007 realisasi APBN mengalami SiKPA sebesar Rp 7,39 triliun, sedangkan SiLPA tahun 2008 sebesar Rp 79,95 triliun. SiLPA tersebut menjadi SAL tahun 2008 yang digunakan untuk kegiatan tahun 2009 yakni terutama terkait dengan PNPM. Pada tahun 2009, realisasi pembiayaan lebih tinggi dibanding realisasi defisit sehingga terjadi SiLPA sebesar Rp23,96 triliun dan pada tahun 2010 realisasi APBN mengalami SiLPA sebesar Rp44,71 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 31. Perkembangan Surplus/Defisit, Pembiayaan serta SIKPA/SILPA Tahun 2006-2010

Suspen

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah, diperlukan keandalan data dan informasi yang antara lain tercermin dari besaran nilai suspen. Suspen yang diperoleh dari hasil mekanisme saling uji (*check and balance*) merupakan selisih pencatatan transaksi keuangan antara Kementerian Teknis dan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Pada tahun 2010 nilai suspen berada pada posisi negatif Rp17,41 miliar atau sebesar 0,002 persen dari total realisasi belanja negara. Nilai suspen ini menurun sebesar 98,10 persen bila dibandingkan dengan nilai suspen tahun 2006 yang berada pada posisi positif Rp916,77 miliar atau 0,137 persen dari total realisasi belanja negara tahun 2006.

Boks 5. Dampak APBN Terhadap Sektor Riil Tahun 2006-2010

APBN sebagai salah satu perangkat kebijakan fiskal, dipergunakan Pemerintah guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan APBN dapat mempengaruhi kondisi perekonomian melalui peran strategis yang dimiliki berupa kebijakan yang bersifat ekspansif pada saat ekonomi lesu ataupun kontraktif pada saat ekonomi sedang *overheating*. Besaran dan alokasi pada APBN berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap sektor riil, sektor moneter, dan sektor lainnya. Kebijakan anggaran pada sisi penerimaan bertujuan untuk mendorong aktivitas perekonomian melalui kebijakan perpajakan, sedangkan yang dilakukan dari sisi belanja diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Implikasi besaran APBN terutama terhadap sektor riil dapat diketahui dari dua komponen yakni dengan konsumsi Pemerintah dan pembentukan modal domestik bruto. Pada tahun 2010, komponen konsumsi Pemerintah berada di level Rp506,40 triliun atau 7,9 persen terhadap PDB. Jumlah ini mengalami peningkatan 9,36 persen dari realisasi konsumsi Pemerintah tahun 2009. Realisasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar Rp150,96 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB yang bersumber dari realisasi belanja modal Pemerintah Pusat yang mencapai Rp80,29 triliun (1,2 persen PDB) dan realisasi belanja modal dari anggaran yang ditransfer ke daerah sebesar Rp70,67 triliun (1,1 persen PDB). Dengan demikian, dampak APBN TA 2010 terhadap sektor riil mencapai Rp657,36 triliun atau sebesar 10,2 persen dari PDB.

Dampak APBN yakni intervensi Pemerintah melalui pembelanjaan publik dan perpajakan terhadap sektor riil pada tahun 2010 meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya yakni mencapai Rp657,36 triliun, meningkat dari senilai Rp600,64 triliun pada tahun 2009.

Total Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDB pada tahun 2010 sebesar 32,2 persen atau Rp2.065,2 triliun, hal ini berarti kontribusi Pemerintah dalam membentuk PDB adalah sebesar 2,3 persen atau sebesar Rp150,96 triliun dan selebihnya sebesar Rp1.914,24 triliun disumbang oleh sektor swasta.

Tabel 7. Dampak APBN Terhadap Sektor Riil Tahun 2006-2010

Rincian	Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010	
	Real (Rp triliun)	% thd PDB	Real (Rp triliun)	% thd PDB	Real (Rp triliun)	% thd PDB	Real (Rp triliun)	% thd PDB	Real (Rp triliun)	% thd PDB
1. Konsumsi Pemerintah (a-b)	288,08	8,6	306,22	7,7	362,99	7,3	463,05	8,2	506,40	7,9
a Belanja Barang dan Jasa	310,90	9,3	327,62	8,3	396,51	8,0	494,13	8,8	541,41	8,4
Belanja Pegawai	72,87	2,2	90,31	2,3	112,83	2,3	127,67	2,3	148,08	2,3
Belanja Barang	47,06	1,4	52,93	1,3	55,96	1,1	80,67	1,4	97,60	1,5
Belanja Rutin Daerah	152,81	4,6	169,01	4,3	197,39	4,0	246,86	4,4	274,06	4,3
Belanja Lainnya	38,15	1,1	15,58	0,4	30,33	0,6	38,93	0,7	21,67	0,3
b Pendapatan Barang dan Jasa	22,82	0,7	21,40	0,5	33,53	0,7	31,09	0,6	35,01	0,5
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto	132,50	4,0	145,85	3,7	167,81	3,4	137,59	2,5	150,96	2,4
Pemerintah Pusat	58,93	1,8	64,13	1,6	72,77	1,5	75,87	1,4	80,29	1,3
Pemerintah Daerah	73,57	2,2	81,37	2,1	95,04	1,9	61,72	1,1	70,67	1,1
Jumlah 1 dan 2	420,58	12,6	452,07	11,4	530,80	10,7	600,64	10,7	657,36	10,2

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Tabel 8. Presentase Anggaran Dan Realisasi APBN Terhadap PDB Tahun 2010

Uraian	2010			
	APBN-P	% thd PDB	Realisasi	% thd PDB
Pendapatan Negara dan Hibah	992,4	15,45	1.016,73	15,83
1. Penerimaan Perpajakan	743,33	11,57	744,77	11,60
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	720,76	11,22	715,85	11,15
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	22,56	0,35	28,91	0,45
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	247,18	3,85	268,94	4,19
a. Penerimaan SDA	164,73	2,56	168,83	2,63
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN	29,5	0,46	30,10	0,47
c. Pendapatan PNB lainya	43,46	0,68	59,43	0,93
d. Pendapatan BLU	9,49	0,15	10,59	0,16
3. Penerimaan Hibah	1,9	0,03	3,02	0,05
Belanja Negara	1.126,2	17,53	1.063,58	16,56
1. Belanja Pemerintah Pusat	781,53	12,17	718,87	11,19
a. Belanja Pegawai	162,66	2,53	148,08	2,31
b. Belanja Barang	112,59	1,75	97,60	1,52
c. Belanja Modal	95,02	1,48	80,29	1,25
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	105,65	1,64	88,38	1,38
e. Belanja Subsidi	201,26	3,13	214,17	3,33
f. Belanja Hibah	0,24	0	0,07	0,00
g. Belanja Bantuan Sosial	71,17	1,11	68,61	1,07
h. Belanja Lain-lain	32,93	0,51	21,67	0,34
2. Transfer ke Daerah	344,61	5,37	344,73	5,37
a. Dana Perimbangan	314,36	4,89	316,71	4,93
i. Dana Bagi Hasil	89,62	1,4	92,18	1,44
ii. Dana Alokasi Umum	203,61	3,17	203,57	3,17
iii. Dana Alokasi Khusus	21,14	0,33	20,96	0,33
b. Otonomi Khusus dan Penyesuaian	30,25	0,47	28,02	0,44
i. Dana Otonomi Khusus	9,1	0,14	9,10	0,14
ii. Dana Penyesuaian	21,15	0,33	18,92	0,29
Défisit Anggaran	(133,75)	(2,08)	-46,85	-0,73
Pembiayaan	133,75	2,08	91,55	1,43

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Tabel 9. Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2006-2010

No	Indikator	2006	2007	2008	2009	2010	Ket
1	Nilai PDB Harga Konstan (Rp Triliun)	1.846,70	1.964,0	2.082,1	2.177,0	2.310,7	(1)
2	Nilai PDB Harga yang Berlaku (Rp Triliun)	3.338,20	3.957,4	4.954,0	5.613,4	6.422,9	(1)
3	PDB per kapita (Rp Juta)	15,00	16,4	21,7	24,3	27,0	(1)
4	Pertumbuhan PDB (%)	5,50	6,3	6,1	4,5	6,1	(1)
5	Inflasi (%)	6,60	6,6	11,1	2,78	6,96	(1)
6	Total ekspor (USD miliar)	100,69	113,9	136,8	116,49	157,73	(1)
7	Ekspor Non Migas (USD miliar)	79,50	91,9	107,8	97,47	129,68	(1)
8	Total Impor (USD miliar)	61,08	74,4	128,8	96,86	135,61	(1)
9	Impor Non Migas (USD miliar)	42,10	52,5	98,3	77,87	108,24	(1)
10	Cadangan Devisa (USD Miliar, akhir tahun)	42,00	56,9	51,6	66,1	96,2	(2)
11	Rupiah/USD	9.020,00	9.419,0	10.950	10.408	9.078	(2)
12	Total Pendapatan Negara (Rp Triliun)	637,98	707,81	981,60	848,76	995,27	(4)
13	Total Belanja Negara (Rp Triliun)	667,13	757,65	985,73	937,38	1.042,12	(4)
14	Défisit Anggaran (Rp Triliun)	(29,14)	(49,84)	(4,12)	(88,62)	(46,85)	(4)
15	Uang Beredar (Rp Triliun)						
	a, Arti Sempit (M1)	342,60	460,8	466,4	506,06	518,45	(2)
	b, Arti Luas (M2)	1.338,50	1.888,1	1.883,9	1.865,06	2.206,02	(2)
16	Kredit Perbankan (Rp Triliun)	761,60	787,1	1.315,7	1.408,67	1.796,0	(2)
17	Suku Bunga (% per tahun)						
	a, SBI 1 bulan	9,50	9,75	9,2	6,46	6,32	(2)
	b, SBI 3 bulan			10,75	6,59	6,57	(2)
	c, Deposito 1 bulan	9,75	8,96	8,2	6,87	6,78	(2)
	d, Kredit Modal Kerja	15,35	15,1	15,2	13,69	12,83	(2)
	e, Kredit Investasi	15,38	15,1	14,4	12,96	12,28	(2)
18	Realisasi Investasi						
	a, Domestik (Rp Triliun)	143,70	162,8	20,36	37,80	60,5	(5)
	b, Asing (USD Miliar)	13,20	15,7	14,87	10,82	16,21	(5)
19	IHSG BEJ	1.805,00	1.805,5	1.355,0	2.534,0	3.704	(2)
20	Rasio Utang terhadap PDB (DSR, %)	42,09	36,0	33	28	26	(3)

Keterangan:

Sumber :

(1) Badan Pusat Statistik

(2) Bank Indonesia

(3) Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

(4) Laporan Realisasi APBN, Kementerian Keuangan

(5) Badan Koordinasi Penanaman Modal

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan kementerian negara/lembaga (K/L), beserta jenjang struktural di bawahnya seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. LKPP disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL), laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan data lainnya dari unit-unit yang terkait.

Untuk LKPP Tahun 2010, entitas pelaporan keuangan tingkat K/L dan BUN, serta entitas akuntansi tingkat satuan kerja (satker) di bawahnya yang dicakup, meliputi:

*Daftar entitas pelaporan
keuangan tingkat
kementerian
negara/lembaga*

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	36
4	BA 005	Mahkamah Agung	802
5	BA 006	Kejaksaan Agung	517
6	BA 007	Sekretariat Negara	17
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	750
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	142
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	244
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	756
11	BA 015	Kementerian Keuangan	1.069
12	BA 018	Kementerian Pertanian	1.967
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	176
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	92
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	676
16	BA 023	Kementerian Pendidikan Nasional	377
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	448
18	BA 025	Kementerian Agama	4.381
19	BA 026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	802
20	BA 027	Kementerian Sosial	206
21	BA 029	Kementerian Kehutanan	358
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	698
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum	1.072
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1
27	BA 040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	88
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1
29	BA 042	Kementerian Riset dan Teknologi	11
30	BA 043	Kementerian Lingkungan Hidup	48
31	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	44
32	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7
33	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1
34	BA 050	Badan Intelijen Negara	1
35	BA 051	Lembaga Sandi Negara	1
36	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1
37	BA 054	Badan Pusat Statistik	484

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker
38	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	1
39	BA 056	Badan Pertanahan Nasional	460
40	BA 057	Perpustakaan Nasional	34
41	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	59
42	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.072
43	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	39
44	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1
45	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	39
46	BA 066	Badan Narkotika Nasional	11
47	BA 067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	175
48	BA 068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	42
49	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1
50	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	187
51	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	532
52	BA 077	Mahkamah Konstitusi	1
53	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1
54	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	50
55	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	22
56	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	19
57	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	19
58	BA 083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	4
59	BA 084	Badan Standarisasi Nasional	1
60	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3
61	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	13
62	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	33
63	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	13
64	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	31
65	BA 090	Kementerian Perdagangan	165
66	BA 091	Kementerian Perumahan Rakyat	40
67	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	34
68	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1
69	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	2
70	BA 100	Komisi Yudisial	1
71	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1
72	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	24
73	BA 105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1
74	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1
75	BA 107	Badan SAR Nasional	25
76	BA 108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1
77	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:	
	BA 999.01	Pengelolaan Utang *)	1
	BA 999.02	Hibah *)	2
	BA 999.03	Investasi Pemerintah *)	1
	BA 999.04	Penerusan Pinjaman *)	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah *)	3
	BA 999.06	Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain *)	127
	BA 999.07	Belanja Subsidi *)	7
	BA 999.08	Belanja Lain-lain *)	664
		Jumlah Satker	20.246

*) BA tersebut merupakan entitas pelaporan, dan laporan keuangan BA tersebut dikonsolidasikan menjadi LKBUN.

LKPP Tahun 2010 ini mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut:

- ❖ transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
- ❖ transaksi pelaksanaan APBN pada beberapa unit-unit fiskal register/kuasi organisasi Pemerintah, seperti pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam), Otorita Asahan, LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan LPP Radio Republik Indonesia (RRI); dan
- ❖ transaksi keuangan terbatas dari unit-unit fiskal register yang tidak menggunakan dana APBN, namun mengelola aset Pemerintah, seperti Badan Pengelola Minyak dan Gas (BPMIGAS), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BP3 Taman Mini Indonesia.

LKPP Tahun 2010 ini tidak mencakup entitas:

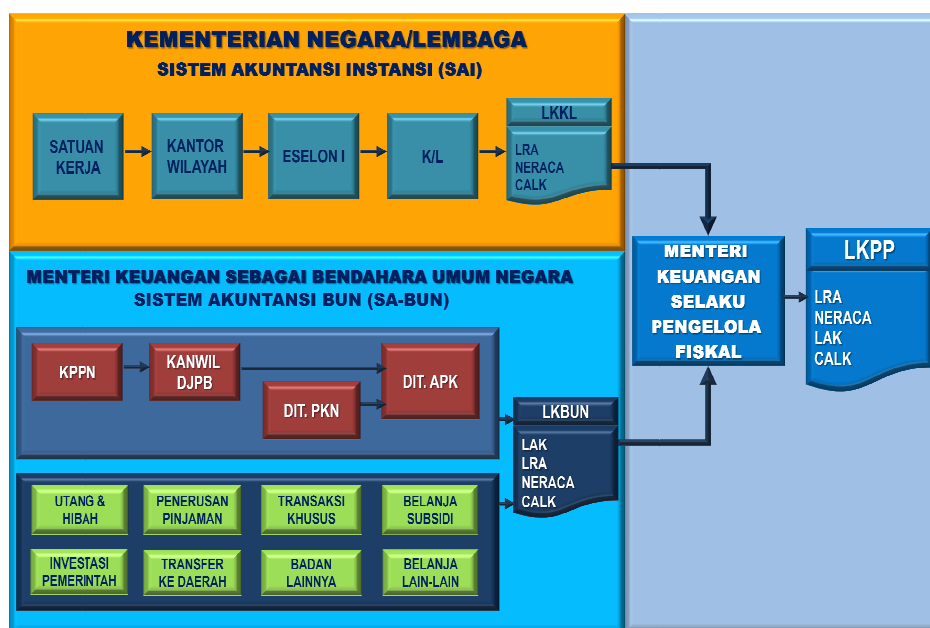
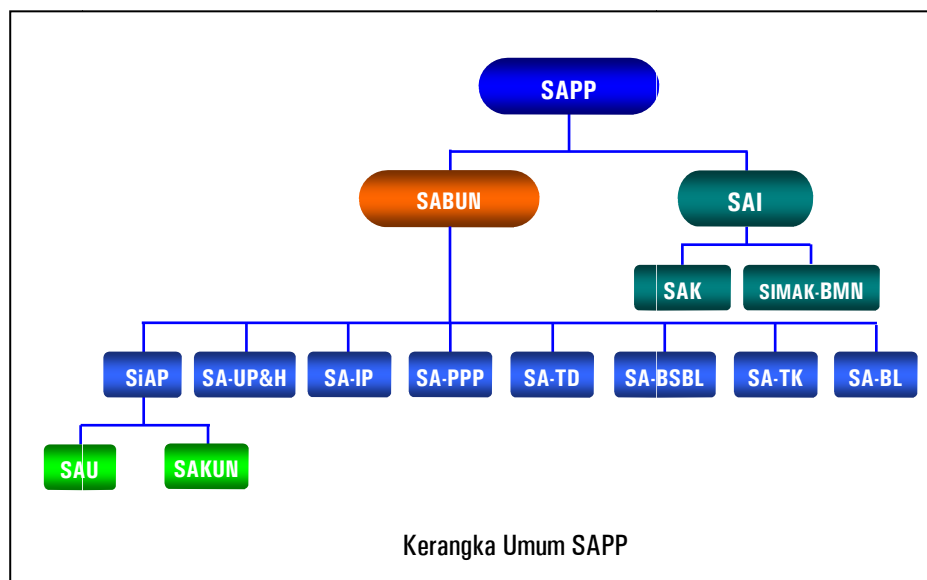
- ❖ Pemerintahan Daerah;
- ❖ Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- ❖ Badan Hukum Milik Negara (BHMN); dan
- ❖ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun, penyertaan modal (investasi) pemerintah pada perusahaan negara (BUMN dan Non BUMN), dan BHMN, nilainya disajikan sebagai investasi pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Badan Lainnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat K/L (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara dalam rangka menghasilkan neraca.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H), Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP), Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD), Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL), Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). SiAP terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang akan direkonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI. Selain Laporan Arus Kas, Menteri Keuangan selaku BUN juga menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca atas transaksi Utang Pemerintah, Hibah, Penerusan Pinjaman, Investasi/Penyertaan Modal, Transfer ke Daerah, Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain, dan Pembiayaan yang dikonsolidasikan ke dalam LKPP.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.



Alur Penyusunan LKPP

SAPP dirancang untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

- ❖ Angka realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2010 berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri

Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negara atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) data BUN.

Khusus untuk data Pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah berdasarkan data dari K/L.

- ❖ Angka realisasi Belanja Negara yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2010 berdasarkan kompilasi realisasi belanja negara seluruh entitas K/L, di mana pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh BUN (data SAU) berfungsi sebagai penguji (kontrol) data belanja K/L.
- ❖ Angka realisasi Pembiayaan yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2010 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang yang riil masuk ke atau keluar dari Kas Negara.

2. Neraca

Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh K/L dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Bagian Anggaran – Bagian Anggaran BUN. Data Kas Umum Negara (KUN) dan Non Anggaran, aset Bank Dalam Likuidasi, aset Eks BPPN, aset Tim Koordinasi, piutang migas, piutang dividen, aset KKKS, dan investasi permanen lainnya disajikan secara langsung pada Neraca LKBUN tanpa melalui Neraca Bagian Anggaran yang bersangkutan. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan Arus Kas TA 2010 mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN (rekening 502.000000, rekening 600.502411, rekening 600.502111, rekening 519.000122, rekening 608.001411, rekening 608.000111, rekening SAL, dan rekening Penempatan Uang Negara), termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah, serta pendapatan dan belanja operasional pada BLU. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan SAKUN yang merupakan subsistem dari SiAP.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2010 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II (Pernyataan SAP (PSAP) Berbasis Kas Menuju Akrual). Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat tahun anggaran 2015.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

(1) Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap azas bruto pada penyusunan LKPP Tahun 2010 adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi (600.000.411) dan Rekening Panas Bumi (508.000.084). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan migas pada rekening 600.000.411 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *under/over lifting*, *Domestic Market Obligation (DMO) fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerimaan migas pada rekening 600.000.411 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084 setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan". Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

(2) Belanja

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK), belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Pembiayaan

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Utang. Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku BUN dan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

(4) Aset

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas serta diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, investasi jangka pendek, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal neraca.

Kas yang disimpan sebagai rekening khusus dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri disajikan sebagai Aset Lancar. Pada LKPP tahun sebelumnya rekening khusus tersebut disajikan sebagai bagian dari aset lainnya.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang belum disetorkan ke kas negara atau belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan.

Kas dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke kas negara

disajikan sebagai Kas di Bendahara Penerimaan. Bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Penerimaan disajikan sebagai bagian dari Kas di Bendahara Penerimaan.

Bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, serta kas penerimaan hibah dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga disajikan sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas.

Kas pada BLU yang disajikan pada Neraca adalah baik Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN maupun yang belum disahkan. Kas di BLU yang merupakan dana kelolaan yang belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Aset Lainnya.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang PNB, Piutang Pajak, Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan piutang lainnya yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam piutang lainnya adalah piutang bunga atas penerusan pinjaman Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD). Pada LKPP Tahun 2010 ini, penyisihan atas piutang tidak tertagih baru diterapkan atas piutang yang dilaporkan oleh Bagian Anggaran 999.04 (Penerusan Pinjaman). Piutang selain piutang pada BA 999.04 belum diterapkan penyisihan piutang tak tertagih karena masih diperlukan pengaturan teknis dan sosialisasi kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga.

Termasuk dalam persediaan adalah barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan didasarkan pada perhitungan fisik pada tanggal pelaporan, kecuali untuk persediaan dalam bentuk beras.

Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2010 meliputi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek yang disajikan pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2010 adalah investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang ada di BLU.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruskanpinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA), dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD, dan Pemda. Saldo penerusan pinjaman yang berasal dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) sebelum tahun 2009, masih disajikan sebagai Investasi Non Permanen. Namun, saldo penerusan pinjaman yang berasal dari NPPP tahun 2009 dan setelah tahun 2009 disajikan sebagai Aset Lainnya.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

Dana kelolaan BLU yang masih berupa kas dan belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan pada pos Aset Lainnya.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Milik Negara (BUMN/BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. Termasuk dalam investasi permanen adalah nilai ekuitas (kekayaan bersih) Bank Indonesia (BI).

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. Aset-aset yang berstatus BPYBDS yang telah dikeluarkan dari neraca LKKL.

Penyertaan Pemerintah pada lembaga internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut

disajikan sebagai kewajiban.

Investasi Permanen Lainnya yang disajikan pada LKPP Tahun 2010 adalah investasi Pemerintah pada badan-badan lainnya yang tidak termasuk perusahaan negara, seperti BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otorita Asahan, Otorita Batam, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran. Nilai investasi permanen lainnya tersebut disajikan berdasarkan metode ekuitas, yaitu sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), seperti Otorita Batam, maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

Nilai PMN pada BUMN/BHMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya (*cost method*).

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

c. Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L per 31 Desember 2010 dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2010.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di

atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran.

Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambah nilai Aset Tetap.

Menurut PSAP Berbasis Kas Menuju Akrua! Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, Pemerintah menetapkan bahwa dalam penyusunan LKPP Tahun 2010, seluruh aset tetap yang dikelola oleh K/L selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi. Hal ini disebabkan antara lain peraturan dan kebijakan penerapan penyusutan, serta umur manfaat dari masing-masing kelompok aset tetap belum ditetapkan.

SAP telah mengatur mengenai depresiasi, tapi aset tetap dalam LKPP ini belum didepresiasi.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Penjaminan, dan Aset Lain-lain.

Aset lainnya terdiri dari TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Penjaminan, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti yang disimpan pada rekening cadangan subsidi/PSO, rekening cadangan Dana Bagi Hasil, rekening dana reboisasi, rekening penjaminan, Dana Abadi Umat, dan kas besi perwakilan RI di luar negeri, serta dana lain yang sejenis.

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka

panjang, serta hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset pemerintah yang digunakan oleh KKKS minyak dan gas bumi (aset KKKS). Di samping itu, piutang macet K/L yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Aset KKKS yang disajikan sebagai Aset Lain-lain pada LKPP Tahun 2010 adalah aset KKKS yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian yang belum diserahkan kepada Pemerintah, dan dapat diyakini keberadaan dan keandalan nilainya. Aset KKKS yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, serta yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian namun belum dapat diyakini, tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK. Aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q Kementerian ESDM dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau persediaan.

Terhadap pengakuan Aset KKKS sebagai Aset Lain-lain, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan aset tersebut. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara. Dengan demikian, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan Aset KKKS.

Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan, dan piutang penerusan pinjaman yang berasal dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) tahun 2009 dan setelah tahun 2009.

Seluruh pencairan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) eks dana Surat Utang (SU) 005 pada LKPP tahun sebelumnya disajikan sebagai Dana Bergulir, dan pada LKPP Tahun 2010 disajikan sebagai Aset Lainnya.

(5) Kewajiban

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan

Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga/Biaya Pinjaman (*accrued interest*), Utang Subsidi, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan Utang Jangka Pendek Lainnya. SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2010 disajikan sebagai bagian lancar.

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000.411 dan 508.000.084, seperti *under lifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada kontraktor kontrak kerjasama berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama BPMIGAS.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rates bonds*, *variable rates bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Fixed Rate (FR) Bonds adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Obligasi Negara Ritel (ORI) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Variable Rate (VR) Bonds adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka 3 (tiga) bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Zero Coupon (ZC) Bonds adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. Berdasarkan posisi 31 Desember 2010, terdapat 2 seri ZC dengan *outstanding* berkisar dari Rp1,25 triliun dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Zero Coupon dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI) merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU002, SU004, SU007, dan SRBI01

SU-002 dan SU-004 adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia

berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).

SU-007 adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. angsuran pokok SU007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).

SRBI-01 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI01 adalah tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik 2 (dua) kali setahun.

International Bonds adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya aqad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pada akhir tahun 2010, terdapat 10 seri *fixed rate* SBSN dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2030 dengan tingkat imbalan antara 8,70% sampai dengan 12%. Selain itu terdapat 5 seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2014 dan tingkat imbalan antara 7,13 % sampai dengan 7,55%

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak

perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs rupiah terhadap USD yang terakhir.

SAP telah mengatur penyajian utang kepada pegawai (*past service liability*). Namun demikian, penyajian utang Pemerintah di neraca belum mencakup utang kepada pegawai terkait kompensasi Pemerintah sebagai pemberi kerja, kepada pegawai sebagai pekerja atas jasa yang telah diberikan. *Past service liability (unfunded liability)* berupa pensiun dan tunjangan hari tua (THT) diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada LKPP ini.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

(6) Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi diungkapkan dalam catatan penting lainnya

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

Utang kontinjensi pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan pembangunan Proyek Monorail Jakarta, tanggungan kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan pada proyek pembangunan jalan tol, dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan utang kontinjensi Pemerintah yang bersifat implisit seperti intervensi Pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan belum diungkapkan dalam LKPP.

(7) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

(8) Kurs Valuta Asing

Kurs Valuta Asing

Menurut PSAP Berbasis Kas Menuju Akrua Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 62, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
 - b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Dalam penyusunan LKPP Tahun 2010, transaksi dalam mata uang USD dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang USD tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Hal ini disebabkan Pemerintah memiliki rekening dalam mata uang USD di BI, sehingga dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Namun, transaksi dalam mata uang asing selain USD dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tunai (*spot rate*) pada tanggal transaksi. Hal ini disebabkan Pemerintah tidak memiliki rekening dalam mata uang asing selain USD di BI, sehingga dalam melakukan transaksi, Pemerintah harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kurs tengah BI (Rupiah terhadap 1 USD) pada 30 Desember 2009 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp9.400 dan Rp8.991.

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. LKPP Tahun 2010 ini menyajikan selisih kurs atas kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan dalam Neraca.

Selisih kurs terkait dengan kas dalam valas, bagian lancar penerusan pinjaman dan utang luar negeri disajikan pada ekuitas dana lancar, sedangkan selisih kurs yang terkait dengan penerusan pinjaman, utang jangka panjang luar negeri dan SBN Valas disajikan pada ekuitas dana investasi. Penyajian selisih kurs pada ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi atas penerusan pinjaman dan utang dihitung berdasarkan rata-rata bagian lancar dan panjang setiap penerusan pinjaman dan utang.

(9) Transaksi Pajak Ditanggung Pemerintah (Pajak DTP) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP)

Pajak DTP adalah pajak terutang yang dibayar oleh Pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Sedangkan BM-DTP adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh Pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Pendapatan Pajak DTP, Pendapatan BM-DTP, Belanja Subsidi Pajak DTP, dan Belanja

Subsidi BM-DTP hanya dicatat dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran dan tidak dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. LKPP Tahun 2010 tidak menyajikan Pajak DTP atas tahun-tahun sebelumnya.

(10) Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

*Aset/Kewajiban Eks
BRR NAD-Nias*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah 4 (empat) tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR-NAD Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

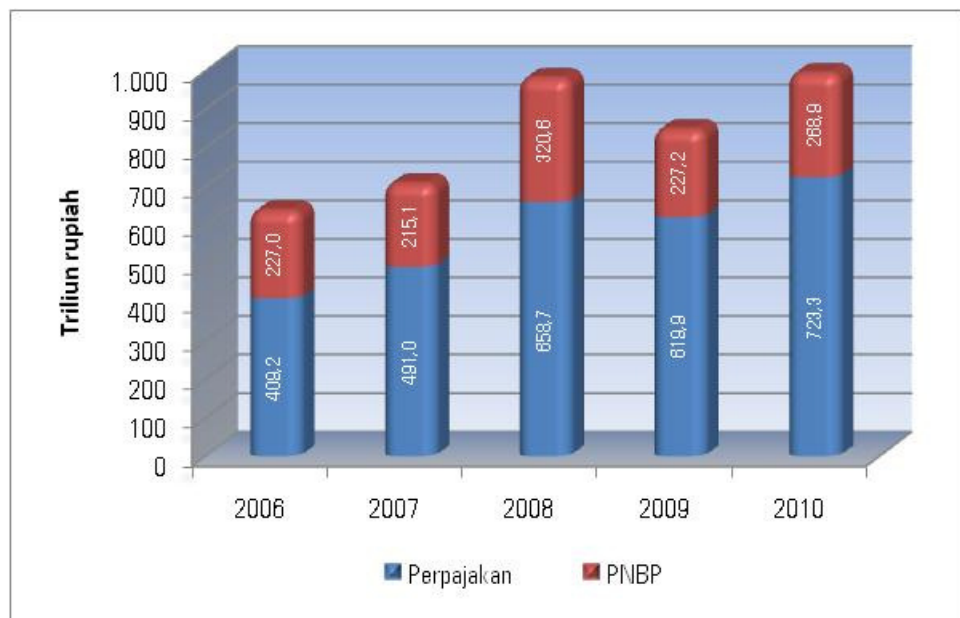
Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2010, Neraca Likuidasi BRR NAD-Nias belum selesai disusun, sehingga aset/kewajiban eks BRR NAD-Nias yang disajikan pada LKPP Tahun 2010 ini adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK dikurangi dengan aset/kewajiban yang telah diserahkan kepada pihak lain.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

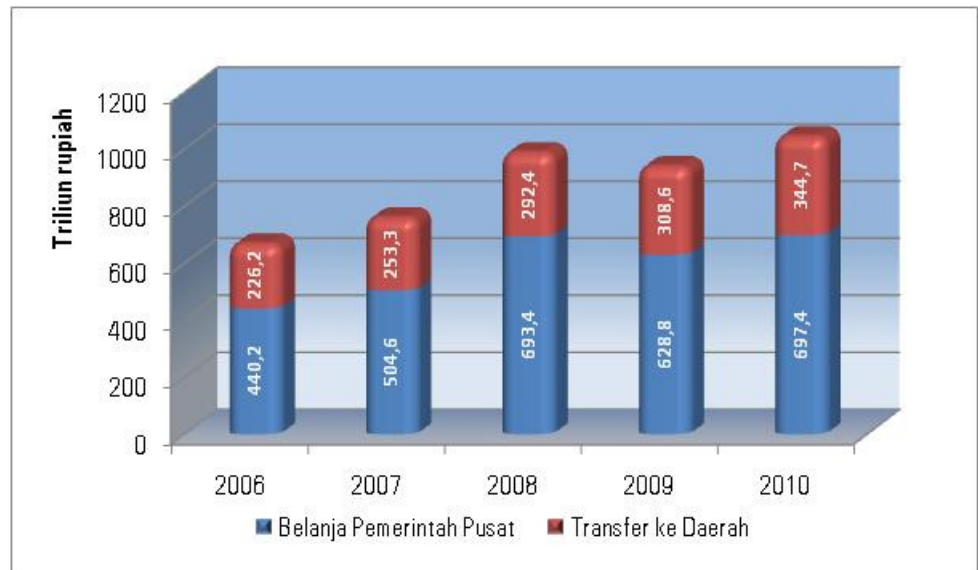
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2010 adalah sebesar Rp995.271.511.391.343 atau mencapai 100,29 persen dari target APBN-P TA 2010 sebesar Rp992.398.789.998.000. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp723.306.668.621.739, PNBPNP sebesar Rp268.941.856.208.841, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp3.022.986.560.763. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut tidak termasuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atas PPN tahun 2003 – 2009 sebesar Rp21.459.321.275.474.

Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 mengalami kenaikan Rp146.508.276.195.859 atau 17,26 persen jika dibandingkan dengan TA 2009. Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBPNP sejak TA 2006 terlihat pada Grafik 32.



**Grafik 32: Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBPNP
TA 2006 - 2010**

Realisasi Belanja Negara pada TA 2010 adalah sebesar Rp1.042.117.219.744.817 atau 92,54 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2010 sebesar Rp1.126.146.476.312.000. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2009 adalah sebesar Rp937.382.019.569.767. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp697.406.380.187.177, Transfer ke Daerah sebesar Rp344.727.611.830.379, dan terdapat Suspen sebesar minus Rp16.772.272.739. Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2006 terlihat pada Grafik 33.



**Grafik 33: Perkembangan Realisasi Belanja Negara
TA 2006 - 2010**

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp995.271.511.391.343 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp1.042.117.219.744.817, maka terjadi Defisit Anggaran pada TA 2010 sebesar Rp46.845.708.353.474.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2010 adalah sebesar Rp91.552.011.400.615, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp96.118.516.369.932, dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp4.566.504.969.317.

Terjadinya Defisit Anggaran dan adanya Realisasi Pembiayaan Neto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2010 sebesar Rp44.706.303.047.141.

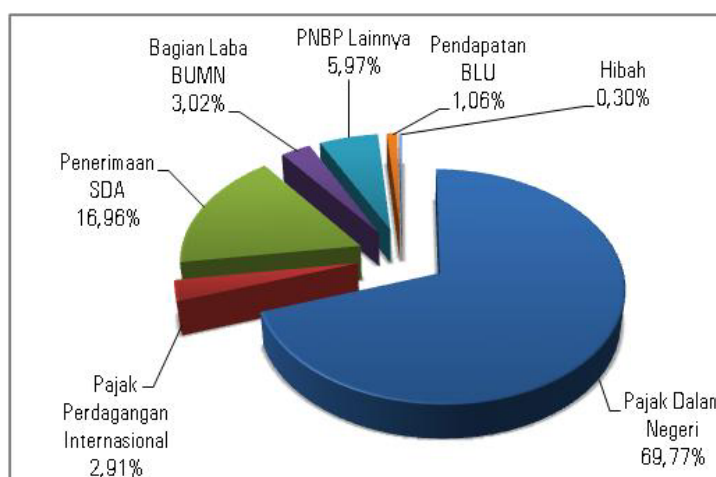
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Rp995,27 triliun

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 adalah sebesar Rp995.271.511.391.343, berarti mencapai 100,29 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp992.398.789.998.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2010 dapat dilihat pada Grafik 34.



Grafik 34: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010

B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan

*Penerimaan perpajakan
Rp723,31 triliun*

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2010 adalah sebesar Rp723.306.668.621.739 atau mencapai 97,31 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp743.325.906.000.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2010 lebih besar Rp103.384.495.995.324 atau 16,68 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2009. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut tidak termasuk Pajak DTP atas PPN tahun 2003 – 2009 sebesar Rp21.459.321.275.474.

B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

*Penerimaan pajak dalam negeri
Rp694,39 triliun*

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2010 adalah sebesar Rp694.392.134.931.291 atau mencapai 96,34 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp720.764.533.000.000. Hal ini berarti realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2010 lebih besar Rp93.140.377.861.397 atau 15,49 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2009. Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
PPh	354.152.324.675.100	314.778.692.856.257
PPh Ditanggung Pemerintah *)	2.893.212.477.088	2.836.295.455.367
PPN	207.134.899.640.327	179.323.796.969.194
PPnBM	12.403.318.557.028	8.908.762.358.934
PPN Ditanggung Pemerintah *)	11.066.646.770.468	4.834.982.670.647
PBB	28.580.589.978.740	24.270.191.705.513
BPHTB	8.026.429.073.342	5.969.377.652.310
BPHTB Ditanggung Pemerintah	-	495.139.763.106
Cukai	66.165.922.512.567	56.718.468.581.956
Pajak Lainnya	3.371.209.407.180	3.116.049.056.610
Pajak Lainnya Ditanggung Pemerintah *)	597.581.839.451	-
Jumlah	694.392.134.931.291	601.251.757.069.894

*) Total jumlah Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) TA 2010 adalah sebesar Rp14.557.441.087.007. Jumlah yang sama juga diakui sebagai Belanja Subsidi Pajak.

Dalam realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2010, tidak termasuk Pajak DTP atas PPN tahun 2003 – 2009 sebesar Rp21.459.321.275.474, dengan rincian (dalam Rp):

Kelebihan Pagu APBN-P TA 2009	1.552.800.000.000
PPN Subsidi BBM & <i>Marketing Fee</i> Tahun 2005	10.756.581.796.426
PPN Subsidi BBM & <i>Marketing Fee</i> Tahun 2004	7.864.054.879.048
PPN Subsidi BBM & <i>Marketing Fee</i> Tahun 2003	1.285.884.600.000
Jumlah	21.459.321.275.474

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

*Pajak Perdagangan
Internasional Rp28,91
triliun*

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2010 adalah sebesar Rp28.914.533.690.448, atau mencapai 128,16 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp22.561.373.000.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional TA 2010 lebih besar Rp10.244.118.133.927 atau naik 54,87 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2009. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Bea Masuk	20.016.826.394.532	18.105.460.808.196
Bea Keluar	8.897.707.295.916	564.954.748.325
Jumlah	28.914.533.690.448	18.670.415.556.521

Dalam realisasi Penerimaan Bea Masuk TA 2010, termasuk Penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp257.632.977.488.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP Rp268,94 triliun

Realisasi PNBP TA 2010 adalah sebesar Rp268.941.856.208.841 atau mencapai 108,81 persen dari APBN-P sebesar Rp247.176.367.998.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2010 lebih besar Rp41.767.437.144.170 atau 18,39 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2009. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; (iii) PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

*Penerimaan
SDA Rp168,83 triliun*

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2010 adalah sebesar Rp168.825.442.320.286, atau mencapai 102,49 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp164.726.732.000.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2010 lebih besar Rp29.866.206.374.155 atau 21,49 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2009. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Minyak Bumi	111.814.923.202.135	90.055.956.098.738
Pendapatan Gas Alam	40.918.314.502.416	35.696.003.511.600
Pendapatan Pertambangan Umum	12.646.750.881.580	10.369.410.930.584
Pendapatan Kehutanan	3.009.672.120.638	2.345.432.302.758
Pendapatan Perikanan	91.995.180.732	92.039.435.895
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	343.786.432.785	400.393.666.556
Jumlah	168.825.442.320.286	138.959.235.946.131

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

*Bagian Pemerintah atas
Laba BUMN Rp30,10
triliun*

B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2010 adalah sebesar Rp30.096.932.694.265 atau mencapai 102,02 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp29.500.000.000.000. Hal ini berarti Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2010 lebih besar Rp4.047.389.624.825 atau naik 15,54 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2009.

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Laba BUMN Perbankan	3.622.669.340.835	3.309.326.563.398
Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	26.474.263.353.430	22.740.216.506.042
Jumlah	30.096.932.694.265	26.049.543.069.440

Daftar 10 besar BUMN penghasil dividen TA 2010 adalah sebagai berikut:

	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PT Pertamina	9.508.899.687.824
2	PT Perusahaan Listrik Negara	4.000.000.000.000
3	PT Telkom	2.973.997.410.676
4	PT Perusahaan Gas Negara	2.132.115.583.926
5	PT Bank Mandiri	1.676.517.780.000
6	PT Freeport Indonesia	1.513.926.787.500
7	PT Bank Rakyat Indonesia	1.246.070.000.000
8	PT Semen Gresik	933.186.480.700
9	PT Tambang Batubara Bukit Asam	799.079.872.500
10	PT Pupuk Sriwidjaya	617.939.000.000
	Total 10 BUMN	25.401.732.603.126

*PNBP Lainnya Rp59,43
triliun*

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBP Lainnya TA 2010 adalah sebesar Rp59.428.639.159.020 atau 136,73 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp43.462.758.949.000. Hal ini berarti realisasi PNBP Lainnya TA 2010 lebih besar Rp5.632.528.215.961 atau naik 10,47 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2009. Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Penjualan dan Sewa	16.498.911.495.199	16.486.605.692.279
Pendapatan Jasa	25.416.545.489.101	20.373.389.201.155
Pendapatan Bunga	7.352.406.187.064	2.739.388.420.831
Pendapatan Kejaksan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	166.607.987.382	163.745.970.532
Pendapatan Pendidikan	2.983.449.553.759	3.257.742.968.625
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	213.767.299.728	635.620.302.960
Pendapatan Iuran dan Denda	704.797.429.654	605.357.951.326
Pendapatan Lain-lain	6.092.153.717.133	9.534.260.435.351
Jumlah	59.428.639.159.020	53.796.110.943.059

*Pendapatan BLU
Rp10,59 triliun*

B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Realisasi Pendapatan BLU TA 2010 adalah sebesar Rp10.590.842.035.270 atau 111,64 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp9.486.877.049.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan BLU TA 2010 lebih besar Rp2.221.312.929.229 atau naik 26,54 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2009. Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	9.509.402.889.281	7.369.173.284.832
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	85.209.252.626	100.744.832.370
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	312.384.162.758	199.499.808.926
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	9.906.996.304.665	7.669.417.926.128
Pendapatan Hibah BLU	34.976.353.539	46.050.792.391
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	172.630.678.219	206.485.914.133
Pendapatan BLU Lainnya	476.238.698.847	447.574.473.389
Jumlah	10.590.842.035.270	8.369.529.106.041

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

*Penerimaan Hibah
Rp3,02 triliun*

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2010 adalah sebesar Rp3.022.986.560.763 atau 159,40 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.896.516.000.000. Hal ini berarti Penerimaan Hibah TA 2010 lebih besar Rp1.356.343.056.365 atau naik 81,38 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2009.

Penerimaan Hibah TA 2010, tidak termasuk penerimaan hibah dalam bentuk barang/jasa sebesar Rp138.496.730.860. Selain itu, terjadi perbedaan realisasi penerimaan hibah antara data Ditjen Perbendaharaan (DJPBN) selaku Kuasa BUN dengan data Ditjen Pengelolaan Utang (DJPU) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp978.354.081.926, lebih tinggi data DJPU. Hal tersebut disebabkan adanya selisih kurs atas penerimaan hibah luar negeri dan perbedaan waktu pengakuan atas penerimaan hibah melalui mekanisme rekening khusus.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.2. Belanja Negara

*Belanja Negara
Rp1.063,58 triliun*

Realisasi Belanja Negara TA 2010 adalah sebesar Rp1.042.117.219.744.817 atau 92,54 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.126.146.476.312.000. Belanja Negara TA 2010 lebih besar Rp104.735.200.175.050 atau naik 11,17 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2009. Realisasi Belanja Negara terdiri dari (i) Belanja Pemerintah Pusat, (ii) Transfer ke Daerah, dan (iii) Suspen.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

*Belanja Pemerintah
Pusat Rp697,41 triliun*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2010 adalah sebesar Rp697.406.380.187.177 atau 89,24 persen dari APBN-P sebesar Rp781.533.546.832.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2010 lebih besar Rp68.593.960.352.974 atau naik 10,91 persen dari Realisasi TA 2009.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

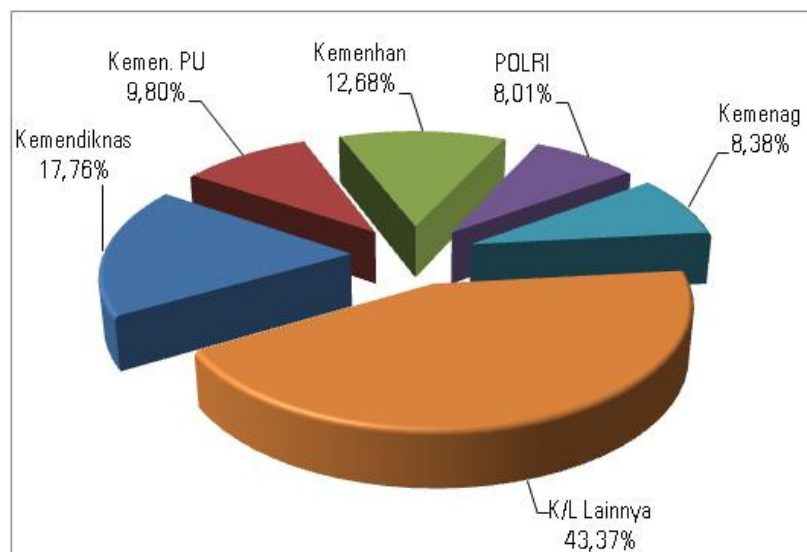
*Belanja Pemerintah Pusat
menurut Organisasi/BA*

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2010 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp363.164.716.115.981 atau 52,07 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat.

Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2010 pada K/L (selain BA BUN) adalah sebesar Rp334.241.664.071.196. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L terbesar adalah Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp59.347.896.316.284 atau 8,51 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat dan 17,76 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2010 dapat dilihat pada Grafik 35.



Grafik 35: Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2010

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam **Daftar 2**.

*Belanja Pemerintah Pusat
menurut Fungsi*

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

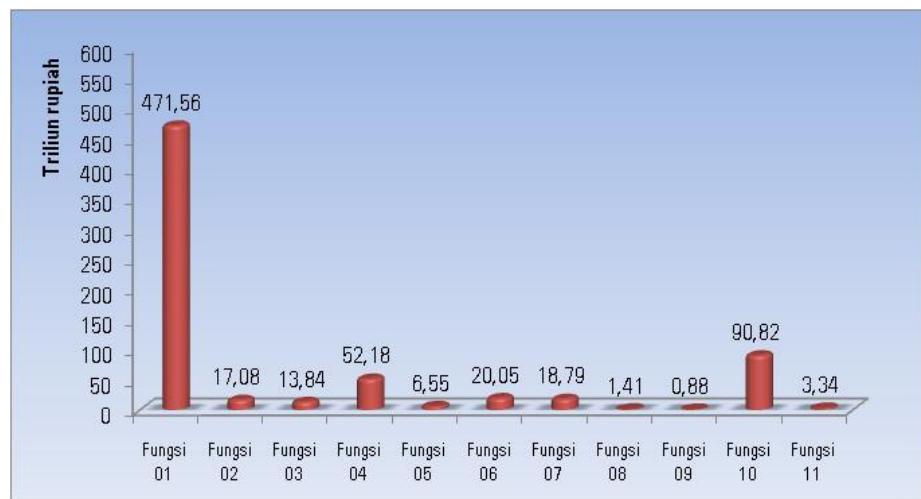
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada TA 2010 dan 2009 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 10.

Tabel 10
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
TA 2010 dan TA 2009
(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
01	Pelayanan Umum	471.557.571.038.693	417.771.920.565.487
02	Pertahanan	17.080.482.218.813	13.145.658.918.442
03	Ketertiban dan Keamanan	13.835.412.297.355	7.753.909.923.164
04	Ekonomi	52.178.365.068.333	58.845.148.894.736
05	Lingkungan Hidup	6.549.610.988.550	10.703.048.446.259
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	20.053.181.892.237	14.648.539.216.890
07	Kesehatan	18.793.019.106.219	15.743.133.970.199
08	Pariwisata dan Budaya	1.408.681.931.374	1.406.162.235.677
09	Agama	878.756.933.633	773.459.042.026
10	Pendidikan	90.818.313.946.039	84.919.493.686.757
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	3.341.614.948.781	3.102.255.711.903
	Total*	697.406.380.187.177	628.812.419.834.203

*) Termasuk realisasi sebesar Rp911.369.817.177 pada TA 2010 yang tidak dapat diketahui kode fungsinya.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2010 dapat terlihat pada Grafik 36.



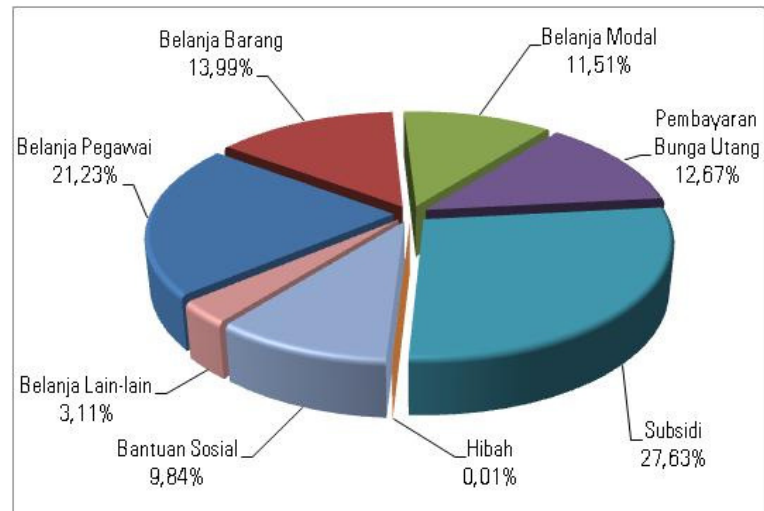
Grafik 36: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi
TA 2010

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dapat dilihat dalam **Daftar 2**.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

*Belanja Pemerintah
Pusat menurut Jenis
Belanja*

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 37.



Grafik 37: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2010

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp148,08 triliun*

Realisasi Belanja Pegawai TA 2010 adalah sebesar Rp148.078.084.098.609 yang berarti 91,04 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp162.659.024.805.169. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2010 lebih besar Rp20.408.335.414.679 atau naik 15,99 persen dari realisasi TA 2009. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	42.378.927.317.781	36.225.865.653.994
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	37.026.799.873.139	33.234.829.816.559
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	727.848.865.884	690.802.202.799
Belanja Gaji Dokter PTT	690.976.740.462	348.126.250.000
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	165.773.820.773	154.169.383.193
Belanja Honorarium	1.453.910.313.846	1.941.403.493.806
Belanja Lembur	468.392.462.505	391.846.042.842
Belanja Vakasi	248.540.481.180	229.888.017.283
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	12.163.454.097.369	5.932.860.284.322
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	50.605.032.969.737	46.845.082.652.853
Belanja Asuransi Kesehatan	1.816.913.001.200	1.390.972.995.080
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	129.299.057.338	131.075.484.000
Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dep. Hub. Pada PT KAI	202.215.097.395	152.826.407.199
Jumlah	148.078.084.098.609	127.669.748.683.930

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Belanja Barang Rp97,60 triliun

Realisasi Belanja Barang TA 2010 adalah sebesar Rp97.596.838.399.825 yang berarti 86,68 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp112.594.055.275.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2010 lebih besar Rp16.928.913.088.776 atau naik 20,99 persen dari Realisasi TA 2009. Rinciannya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Belanja Barang Operasional	20.052.908.959.051	19.383.210.565.028
Belanja Barang Non Operasional	31.489.642.277.566	23.643.232.204.400
Belanja Jasa	12.122.304.052.583	10.388.805.299.226
Belanja Pemeliharaan	7.809.477.752.715	6.910.170.300.648
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	16.772.900.020.797	13.614.084.449.797
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.542.375.569.738	1.544.661.594.161
Belanja Barang BLU	7.807.229.767.375	5.183.760.897.789
Jumlah	97.596.838.399.825	80.667.925.311.049

Belanja Barang BLU sebesar Rp7.807.229.767.375 terdiri dari:

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.544.506.232.879	1.938.043.400.317
Belanja Barang	2.754.048.722.902	1.994.450.012.080
Belanja Jasa	1.086.257.340.653	218.906.954.863
Belanja Pemeliharaan	299.313.699.206	241.276.720.907
Belanja Perjalanan	175.855.804.442	88.438.375.713
Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	947.247.967.293	702.645.433.909
Total	7.807.229.767.375	5.183.760.897.789

B.2.2.1.3. Belanja Modal

Belanja Modal Rp80,29 triliun

Realisasi Belanja Modal TA 2010 adalah sebesar Rp80.287.065.685.665 yang berarti 84,49 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp95.024.557.888.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2010 lebih besar Rp4.416.311.649.245 atau 5,82 persen dari Realisasi TA 2009. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Belanja Modal Tanah	1.783.053.775.727	1.736.542.685.303
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.282.275.864.330	20.146.954.953.487
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.553.253.478.159	13.289.266.576.469
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.165.754.367.386	37.548.690.215.824
Belanja Modal Fisik Lainnya	2.326.404.969.088	2.428.958.869.161
Belanja Modal BLU	1.176.323.230.975	720.340.736.176
Jumlah	80.287.065.685.665	75.870.754.036.420

Belanja Modal BLU terdiri dari:

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Belanja Modal Tanah	79.579.479.251	50.638.238.956
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	565.857.865.060	353.585.006.446
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	479.744.809.743	297.554.949.750
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.313.393.755	5.056.865.650
Belanja Modal Fisik Lainnya	36.827.683.166	13.505.675.374
Total	1.176.323.230.975	720.340.736.176

B.2.2.1.4. Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang Rp88,44 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2010 adalah sebesar Rp88.383.233.764.097 yang berarti 83,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp105.650.244.000.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2010 lebih kecil Rp5.398.829.126.037 atau 5,76 persen dari Realisasi TA 2009. Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang	54.560.273.982.091	55.835.119.571.928
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	26.212.133.864.479	29.499.873.730.217
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	2.750.995.750.000	1.242.704.483.100
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN LN	513.199.205.250	286.651.303.585
Belanja Pembayaran Discount SUN DN	2.073.333.477.100	5.400.184.906.000
Belanja Pembayaran Discount SUN LN	177.338.000.000	239.658.250.000
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara DN	737.473.500.000	200.531.500.000
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	36.998.773.200	20.511.309.000
Belanja Pembayaran Denda	1.321.487.211.977	1.056.827.836.304
Jumlah	88.383.233.764.097	93.782.062.890.134

B.2.2.1.5. Subsidi*Subsidi Rp214,17 triliun*

Realisasi Subsidi TA 2010 adalah sebesar Rp192.707.049.527.199 yang berarti 95,75 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp201.262.981.330.778. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi TA 2010 ini lebih besar Rp54.624.889.255.870 atau 39,56 persen dari Realisasi TA 2009. Rincian realisasi Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Subsidi Premium	38.137.806.140.189	15.216.887.265.203
Subsidi Minyak Solar	21.851.903.691.510	10.439.461.737.208
Subsidi Minyak Tanah	7.509.557.317.106	11.480.104.459.718
Subsidi Elpiji	14.852.055.677.068	7.902.937.128.861
Subsidi Pangan	15.153.810.327.000	12.987.000.000.000
Subsidi Listrik	57.601.620.070.361	49.546.467.923.878
Subsidi Benih	2.177.487.699.740	1.597.202.452.230
Subsidi Pupuk	18.410.887.781.046	18.321.055.599.873
Subsidi Pengawasan Pupuk	-	7.976.846.509
Belanja Subsidi PPh *)	2.893.212.477.088	2.836.295.455.367
Belanja Subsidi PPN *)	11.066.646.770.468	4.834.982.670.647
Belanja Subsidi Pajak Lainnya *)	597.581.839.451	-
Belanja Subsidi BM *)	257.632.977.488	7.187.562.916
Belanja Subsidi BPHTB	-	495.139.763.106
Belanja Subsidi PT KAI	535.000.000.000	514.771.498.849
Belanja Subsidi PT PELNI	600.000.000.000	600.000.000.000
Subsidi PT Pos dan Giro	175.000.000.000	174.998.848.000
Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya	63.894.220.390	49.659.492.612
Subsidi Bunga KPR	415.998.562.859	774.790.546.352
Subsidi Bunga Ketahanan Pangan	132.059.678.059	120.626.306.000
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	42.323.334.937	27.610.029.000
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR)	223.163.797.257	143.172.494.000
Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	2.303.401.468	2.720.654.000
Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias	3.442.236.760	1.111.537.000
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	3.660.340.105	-
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	1.186.849	-
Jumlah	192.707.049.527.199	138.082.160.271.329

*) Realisasi Subsidi PPh, PPN, Pajak Lainnya, dan Bea Masuk sebesar Rp14.557.441.087.007 merupakan Pajak dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah. Transaksi tersebut tidak disajikan pada Laporan Arus Kas.

Dalam realisasi Belanja Subsidi PPN, tidak termasuk realisasi Belanja Subsidi PPN tahun 2003 – 2009 sebesar Rp21.459.321.275.474, dengan rincian (dalam Rp):

Kelebihan Pagu APBN-P TA 2009	1.552.800.000.000
PPN Subsidi BBM & <i>Marketing Fee</i> Tahun 2005	10.756.581.796.426
PPN Subsidi BBM & <i>Marketing Fee</i> Tahun 2004	7.864.054.879.048
PPN Subsidi BBM & <i>Marketing Fee</i> Tahun 2003	1.285.884.600.000
Jumlah	21.459.321.275.474

Dalam realisasi subsidi TA 2010 terdapat pembayaran beberapa jenis subsidi yang dananya belum tersalurkan sampai dengan akhir TA 2010, dan ditempatkan pada rekening dana cadangan subsidi/PSO sebesar Rp15.985.990.766.906. Penempatan dana cadangan tersebut dilakukan karena dokumen penagihan dari pihak penerima subsidi belum selesai diverifikasi. Setelah verifikasi selesai, maka dana cadangan subsidi tersebut akan dibayarkan kepada penerima. Rincian penempatan dana atas realisasi subsidi TA 2010 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Subsidi Premium	2.113.237.391.817
Subsidi Minyak Tanah	595.985.914.429
Subsidi Minyak Solar	974.289.783.407
Subsidi LPG	1.043.741.129.751
Subsidi Listrik	271.474.935.307
Subsidi Pangan	4.234.526.934.429
Subsidi Pupuk	5.067.111.215.930
Subsidi Benih	1.457.523.458.172
Subsidi PT Pos Indonesia	43.750.000.000
Subsidi PT PELNI	50.000.000.000
Subsidi PT KAI	134.350.003.664
Jumlah	15.985.990.766.906

Belanja Hibah Rp70,01 miliar

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2010 adalah sebesar Rp70.008.777.575 yang berarti 28,78 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp243.218.000.000. Realisasi belanja Hibah tersebut merupakan Belanja Hibah kepada pemerintah daerah dalam rangka penerusan hibah untuk kegiatan *Local Basic Education Capacity*, Air Limbah Terpusat, dan Air Minum. Sementara pada TA 2009 belum terjadi realisasi Belanja Hibah.

Bantuan Sosial Rp68,61 triliun

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2010 adalah sebesar Rp68.611.111.986.287 yang berarti 96,40 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp71.172.785.592.785. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2010 lebih kecil Rp5.202.443.214.418 atau 7,05 persen dari Realisasi TA 2009. Rincian realisasi Bantuan Sosial adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM	4.608.123.632.500	4.430.598.244.500
Belanja Bantuan Langsung (<i>Block Grant</i>) Sekolah/ Lembaga/Guru	37.605.677.677.567	43.937.607.762.546
Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga	965.937.110.000	3.993.054.369.577
Belanja Bantuan Beasiswa	4.779.029.074.747	4.986.085.220.991
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	79.921.402.400	69.281.135.000
Belanja Lembaga Sosial Lainnya	20.572.423.089.073	16.396.928.468.091
Jumlah	68.611.11.986.287	73.813.555.200.705

Belanja Lain-lain
*Rp21,67 triliun***B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain**

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2010 adalah sebesar Rp21.672.987.947.920 yang berarti 65,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp32.926.679.940.269. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2010 lebih kecil Rp17.253.225.492.716 atau 44,32 persen dari Realisasi TA 2009. Rincian Belanja lain-lain adalah sebagai berikut (dalam Rp):

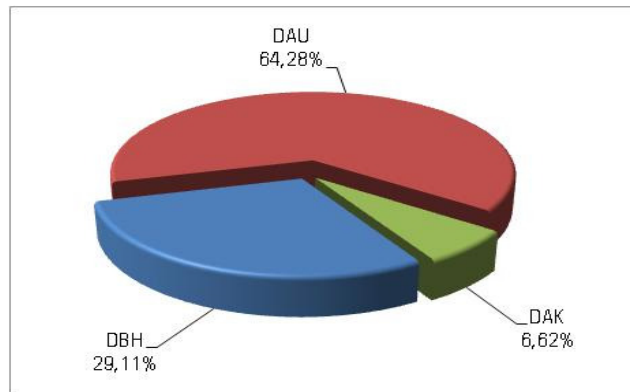
Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Belanja untuk Rekonstruksi Aceh	1.118.978.756	2.167.894.148.658
Belanja Pemilu/Sidang Tahunan	-	522.618.822.374
Belanja Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri	-	2.560.316.000
Belanja Cadangan Dana Reboisasi	-	307.536.874.653
Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat	-	166.867.298.926
Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP	946.476.175.056	913.533.850.904
Belanja Dana Penunjang (PHLN)	-	333.169.450
Belanja Non Modal-Otorita Batam	845.925.755	2.494.720.556
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs	909.200.000.000	-
Jasa Surveyor	232.979.742.237	322.021.223.920
Jasa Perbendaharaan	102.072.122.675	7.908.981.849
Belanja TVRI	571.871.726.475	534.478.886.095
Belanja RRI	558.912.123.288	558.900.740.318
Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM	-	3.732.513.800.000
Dana Cadangan Risiko Kenaikan Harga Tanah	358.183.000.000	-
Belanja Lain-lain	17.990.998.803.650	29.686.550.606.933
Jumlah	21.672.987.947.920	38.926.213.440.636

Dalam realisasi Belanja Lain-lain TA 2010 sebesar Rp17.990.998.803.650, antara lain digunakan untuk pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) pada Kementerian Pertahanan, konversi minyak tanah ke tabung LPG 3 Kg pada Kementerian ESDM, dan belanja untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada BNPB di Jawa Barat dan Sumatera Barat.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah*Transfer ke Daerah*
Rp344,73 triliun

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2010 adalah sebesar Rp344.727.611.830.379, yang berarti 100,03 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp344.612.929.480.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2010 ini lebih besar Rp36.142.379.847.442 atau 11,71 persen dari Realisasi TA 2009. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, dan (ii) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Komposisi realisasi Transfer untuk Daerah TA 2010 disajikan pada Grafik 38.



Grafik 38: Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2010

B.2.2.2.1. Dana Perimbangan

*Dana Perimbangan
Rp316,71 triliun*

Realisasi Dana Perimbangan TA 2010 adalah sebesar Rp316.711.293.029.068 yang berarti 100,75 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp314.363.315.800.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2010 ini lebih besar Rp29.459.830.050.131 atau 10,26 persen dari realisasi TA 2009. Dana Perimbangan terdiri dari (i) Dana Bagi Hasil (DBH), (ii) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (iii) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada **Daftar 3**.

B.2.2.2.1.1. Dana Bagi Hasil

DBH Rp92,18 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2010 adalah sebesar Rp92.183.491.233.868 atau 102,86 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp89.618.446.100.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2010 ini lebih besar Rp16.053.543.654.931 atau naik 21,09 persen dari realisasi TA 2009. Terlampaunya realisasi DBH dari anggarannya tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang dibagihasilkan yang melampaui anggarannya. Realisasi DBH terdiri dari Bagi Hasil Perpajakan sebesar Rp45.815.655.610.439, Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp1.202.111.025.283, dan Bagi Hasil SDA sebesar Rp45.165.724.598.146.

Dalam realisasi DBH SDA sebesar Rp45.165.724.598.146, terdapat Rp8.374.050.605.673 yang sampai dengan akhir TA 2010 dananya masih tersimpan pada rekening dana cadangan (*escrow account*), karena masih menunggu identifikasi daerah penerima. Penempatan dana cadangan tersebut dilakukan karena masih dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi daerah penerima oleh DJPK, pemerintah daerah, dan pihak/kementerian terkait. Setelah rekonsiliasi/verifikasi selesai, maka dana cadangan DBH tersebut akan dibayarkan kepada pemerintah daerah.

B.2.2.2.1.2. Dana Alokasi Umum

DAU Rp203,57 triliun

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2010 adalah sebesar Rp203.571.490.627.200, atau 99,98 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp203.606.484.500.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2010 ini lebih besar Rp17.157.390.627.200 atau naik 9,20 persen dari realisasi TA 2009.

B.2.2.2.1.3. Dana Alokasi Khusus*DAK Rp20,96 triliun*

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010 adalah sebesar Rp20.956.311.168.000, atau 99,14 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp21.138.385.200.000. Hal ini berarti realisasi DAK TA 2010 ini lebih kecil Rp3.751.104.232.000 atau turun 15,18 persen dari realisasi TA 2009.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Pada TA 2010, DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, serta sarana dan prasarana perdesaan.

B.2.2.2.2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian*Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Rp28,02 triliun*

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2010 adalah sebesar Rp28.016.318.801.311 atau 92,62 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp30.249.613.680.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2010 ini lebih besar Rp6.682.549.797.311 atau naik 31,32 persen dari realisasi TA 2009. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri dari (i) Dana Otonomi Khusus, dan (ii) Dana Penyesuaian.

B.2.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus*Dana Otonomi Khusus Rp9,10 triliun*

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2010 adalah sebesar Rp9.099.613.680.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp9.099.613.680.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2010 ini lebih kecil Rp426.950.320.000 atau turun 4,48 persen dari realisasi TA 2009.

B.2.2.2.2.2. Dana Penyesuaian*Dana Penyesuaian Rp18,92 triliun*

Realisasi Dana Penyesuaian TA 2010 adalah sebesar Rp18.916.705.121.311, yang berarti 89,44 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp21.150.000.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Penyesuaian TA 2010 ini lebih besar Rp7.109.500.117.311 atau naik 60,21 persen dari realisasi TA 2009. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. Dana Penyesuaian TA 2010 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah	6.880.652.670.011
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	4.133.700.221.300
Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus	80.200.000.000
Dana Insentif Daerah dan Dana Penyeimbang	1.387.800.000.000
Kurang Bayar Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana (DISP)	32.000.000.000
Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)	5.275.832.730.000
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)	1.126.519.500.000
Jumlah	18.916.705.121.311

B.2.2.3. Suspen

Suspen minus Rp17,41 miliar

Suspen merupakan perkiraan (akun) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi APBN menurut kementerian negara/lembaga dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Angka Suspen yang dilaporkan timbul karena perbedaan pencatatan realisasi Belanja Negara. Sementara bila terdapat selisih/perbedaan pencatatan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, maka data yang digunakan adalah data BUN yang dapat ditelusuri ke kas yang diterima. Jumlah Suspen TA 2010 adalah sebesar minus Rp16.772.272.739, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	BUN	Kementerian Negara/Lembaga (K/L)	Selisih (BUN – K/L)
Belanja Pemerintah Pusat			
Belanja Pegawai	148.072.602.131.332	148.078.084.098.609	(5.481.967.277)
Belanja Barang	97.587.913.734.089	97.596.838.399.825	(8.924.665.736)
Belanja Modal	80.307.176.396.873	80.287.065.685.665	20.110.711.208
Pembayaran Bunga Utang	88.381.042.974.663	88.383.233.764.097	(2.190.789.434)
Subsidi	214.166.370.802.673	214.166.370.802.673	-
Belanja Hibah	70.008.777.575	70.008.777.575	-
Belanja Bantuan Sosial	68.595.466.637.272	68.611.111.986.287	(15.645.349.015)
Belanja lain-lain	21.666.884.908.929	21.672.987.957.920	(6.103.038.991)
Total	718.847.466.363.406	718.865.701.462.651	(18.235.099.245)
Transfer keDaerah			
Dana Bagi Hasil	92.183.562.691.574	92.183.491.233.868	71.457.706
Dana Alokasi Umum	203.570.976.808.500	203.571.490.627.200	(513.818.700)
Dana Alokasi Khusus	20.956.311.168.000	20.956.311.168.000	-
Dana Otonomi Khusus	9.099.613.680.000	9.099.613.680.000	-
Dana Penyesuaian	18.918.610.308.811	18.916.705.121.311	1.905.187.500
Total	344.729.074.656.885	344.727.611.830.379	1.462.826.506
Suspen			(16.772.272.739)

Suspen disebabkan antara lain perbedaan pencatatan pengembalian belanja antara data BUN dan K/L.

B.2.3. Defisit Anggaran

Defisit Anggaran Rp46,85 triliun

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara & Hibah dan Realisasi Belanja Negara TA 2010 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Defisit Anggaran TA 2010 adalah sebesar Rp46.845.708.353.474, yang berarti 35,03 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp133.747.686.314.000, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Pendapatan Negara dan Hibah	995.271.511.391.343	848.763.235.195.483
Belanja Negara	(1.042.117.219.744.817)	(937.382.019.569.767)
Defisit Anggaran	(46.845.708.353.474)	(88.618.784.374.284)

B.2.4. Pembiayaan

Pembiayaan (Neto) Rp91,55 triliun

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2010 adalah sebesar Rp91.552.011.400.615 yang berarti 68,45 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp133.747.686.314.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

Pembiayaan Dalam Negeri Rp96,12 triliun

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2010 adalah sebesar Rp96.118.516.369.932, yang berarti 71,78 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp133.903.232.818.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iii) Surat Berharga Negara (Neto), (iv) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (v) Pinjaman Dalam Negeri, (vi) Kewajiban Penjaminan, (vii) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan (viii) Pembiayaan Lain-lain.

B.2.4.1.1. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah Rp22,19 triliun

Pembiayaan dari Rekening Pemerintah adalah penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang terkait dengan penerimaan dan pengembaliannya dari rekening-rekening pemerintah lainnya yang dikelola/dikuasai oleh Menteri Keuangan sebagai BUN. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rekening Pemerintah TA 2010 adalah sebesar Rp22.189.312.607.078, yang berarti 48,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp45.477.096.818.000. Rincian pembiayaan Rekening Pemerintah adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Penerimaan dari Rekening SAL	17.347.946.818.000	51.857.136.912.000
Penerimaan dari Rekening Dana Investasi	4.841.365.789.078	571.128.144.837
Penerimaan dari Rekening Pembangunan	-	620.982.699.000
Jumlah	22.189.312.607.078	53.049.247.755.837

B.2.4.1.2. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Pembiayaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Rp3,2 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2010 sebesar Rp3.232.148.153.135 atau 134,67 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp2.400.000.000.000.

Program privatisasi dilakukan Pemerintah dengan tujuan utama yaitu untuk peningkatan kinerja BUMN. Peningkatan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas modal BUMN dan pelepasan kepemilikan pemerintah kepada swasta agar BUMN lebih mampu bersaing. Sementara itu, Penjualan Aset Program Restrukturisasi dilakukan oleh PT PPA melalui penjualan aset pasca dibubarkannya BPPN. Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penerimaan Hasil Privatisasi	2.098.694.387.048
Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	133.448.541.746
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	747.760.020.064
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	252.245.204.278
Jumlah	3.232.148.153.136

B.2.4.1.3. Surat Berharga Negara (Neto)

Surat Berharga Negara (Neto) Rp91,10 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2010 adalah sebesar Rp91.102.598.250.248, atau 84,75 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp107.500.385.000.000. Pembiayaan dari SBN mencakup Penerbitan SBN dalam valas sesuai dengan penjelasan UU No. 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN yang menyatakan bahwa Surat Berharga Negara (Neto) merupakan selisih antara penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar Internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Penerimaan		
Penerbitan/Penjualan SPN	29.795.000.000.000	25.200.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	84.020.000.000.000	65.974.730.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	1.701.033.244.000	1.027.625.034.000
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	26.966.860.000.000	-
Imbalan Dibayar di muka SBSN – Jangka Panjang	109.996.698.000	-
Penerbitan/Penjualan SBSN – DN	-	9.519.290.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	25.041.328.000.000	39.770.426.000.000
Penerimaan Penerbitan SBSN – Valas	-	7.031.748.227.903
Imbalan Dibayar dimuka SBSN – DN	-	13.866.390.000
Total Penerimaan	167.634.217.942.000	148.537.685.651.903
Pengeluaran		
Pelunasan SPN	(24.700.000.000.000)	(10.512.000.000.000)
Pelunasan Obligasi DN	(40.154.415.022.752)	(26.262.207.106.001)
Pembelian Kembali Obligasi DN	(7.120.565.000.000)	(11.466.000.000.000)
Utang Bunga Obligasi Negara DN	(1.750.849.667.000)	(809.915.735.000)
Pelunasan SBSN-Jangka Pendek	(2.350.000.000.000)	-
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	(336.000.000.000)	-
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- Jk Panjang	(119.790.002.000)	-
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- DN	-	(16.665.166.900)
Total Pengeluaran	(76.531.619.691.752)	(49.066.788.007.901)
Jumlah Surat Berharga Negara (Neto)	91.102.598.250.248	99.470.897.644.002

B.2.4.1.4. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

*PMN/ Investasi
Pemerintah Rp19,80
triliun*

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2010 adalah sebesar Rp19.799.149.000.000, yang berarti 96,94 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P sebesar Rp20.424.249.000.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2010 adalah:

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya	6.038.600.000.000	11.673.967.076.291
Investasi Pemerintah	927.500.000.000	500.000.000.000
Investasi Pemerintah yang dipinjamkan kepada BUMN	7.500.000.000.000	-
Dana Bergulir	5.333.049.000.000	910.982.699.000
Jumlah	19.799.149.000.000	13.084.949.775.291

PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya sebesar Rp6.038.600.000.000, terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyertaan pada PT SMI	1.000.000.000.000
Penyertaan pada PT Pembiayaan Infrastruktur Indonesia	1.000.000.000.000
Penyertaan pada Perum Jamkrindo	900.000.000.000
Penyertaan pada PT Askrindo	1.120.000.000.000
Penyertaan pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	18.500.000.000
Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	2.000.000.000.000
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit SBSN II	100.000.000
Jumlah	6.038.600.000.000

Investasi Pemerintah sebesar Rp927.500.000.000 dialokasikan kepada BLU Pusat Investasi Pemerintah dan ditujukan untuk mendukung pembangunan bidang infrastruktur dan lainnya. Investasi Pemerintah yang dipinjamkan kepada BUMN sebesar Rp7.500.000.000.000 digunakan untuk pinjaman kepada PT PLN. Tujuan pemberian pinjaman ini adalah untuk menutup *financing gap* PT PLN akibat pengadaan dan penggantian trafo serta penguatan instalasi transmisi dan distribusi, serta investasi lainnya.

Dana Bergulir sebesar Rp5.333.049.000.000 dialokasikan kepada beberapa BLU, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat	2.683.049.000.000
BLU LPDB Kementerian Koperasi dan UKM	350.000.000.000
BLU Bidang Pendanaan Sekretarian BPJT Kementerian PU	2.300.000.000.000
Jumlah	5.333.049.000.000

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri

*Pinjaman dalam negeri
Rp393,61 miliar*

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2010 adalah sebesar Rp393.606.359.471, yang berarti 39,36 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P sebesar Rp1.000.000.000.000. Pinjaman ini merupakan pinjaman dari BUMN.

B.2.4.1.6. Kewajiban Penjaminan

*Kewajiban Penjaminan
Rp0*

Pada TA 2010 belum terdapat realisasi Kewajiban Penjaminan, sedangkan jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.050.000.000.000.

B.2.4.1.7. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

*Dana Pengembangan
Pendidikan Nasional Rp1
triliun*

Realisasi pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2010 adalah sebesar Rp1.000.000.000.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.000.000.000.000. Alokasi dana pengembangan pendidikan nasional adalah untuk pembentukan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak.

B.2.4.1.8. Pembiayaan Lain-lain

*Pembiayaan Lain-lain
Rp0*

Pembiayaan Lain-lain dalam TA 2010 adalah Rp0. Sementara itu, Pembiayaan Lain-lain dalam TA 2009 sebesar minus Rp15.126.346.233.334 berasal dari penyesuaian penambahan dan penurunan saldo rekening dalam mata uang asing karena selisih kurs. Pada TA 2010 selisih kurs yang telah terealisasi disajikan sebagai pendapatan atau belanja, dan yang belum terealisasi disajikan pada ekuitas dalam Neraca.

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

*Pembiayaan LN (Neto)
minus Rp4,57 triliun*

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2010 adalah sebesar minus Rp4.566.504.969.317, yang berarti 2.935,78 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp155.546.504.000. Pembiayaan Luar Negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri bruto setelah dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

*Penarikan Pinjaman LN
Rp54,79 triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2010 adalah sebesar Rp54.794.790.200.207 yang berarti 77,42 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp70.777.081.102.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program, dan (ii) penarikan pinjaman proyek.

*Penarikan Pinjaman
Program Rp28,97 triliun*

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program

Realisasi Pinjaman Program TA 2010 adalah sebesar Rp28.974.644.489.116, yang berarti 98,48 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp29.421.800.000.000.

Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai (*cash financing*) yang memerlukan *policy matrix* untuk pencairannya. *Policy matrix* adalah suatu *set of policy* yang menjadi *collateral* pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tunai APBN. Besarnya pinjaman program dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2010 dan TA 2009 (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Penarikan Pinjaman Program dari OECF	4.586.102.579.700	6.093.227.594.800
Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya	2.709.900.000.000	3.043.500.000.000
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	15.338.031.909.416	15.050.575.313.855
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	6.340.610.000.000	4.750.400.000.000
Jumlah	28.974.644.489.116	28.937.702.908.655

Realisasi Penarikan Pinjaman Program ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.01 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar minus Rp35.993.675.851. Selisih ini disebabkan adanya perbedaan saat pengakuan penerimaan pinjaman (selisih kurs) antara Ditjen Perbendaharaan selaku kuasa BUN dengan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran 999.01. Rincian perbedaan tersebut adalah (dalam Rp):

Uraian	Data BUN	Data BA 999	Selisih
Penarikan Pinjaman Program dari OECF	4.586.102.579.700	4.586.103.029.551	(449.851)
Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya	2.709.900.000.000	2.712.000.000.000	(2.100.000.000)
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	15.338.031.909.416	15.341.725.135.416	(3.693.226.000)
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	6.340.600.000.000	6.370.800.000.000	(30.200.000.000)
Jumlah	28.974.634.489.116	29.010.628.164.967	(35.993.675.851)

*Penarikan Pinjaman
Proyek Rp25,82 triliun*

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

Realisasi Pinjaman Proyek TA 2010 adalah sebesar Rp25.820.145.711.091, yang berarti 62,43 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp41.355.281.102.000.

Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kegiatan prioritas ini disusun BAPPENAS berdasarkan usulan dari kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2010 dan TA 2009 (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	13.648.925.389.889	12.322.925.734.667
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	7.995.635.711.316	8.224.672.697.242
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	3.972.357.132.656	5.270.208.271.880
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	203.227.477.230	3.906.536.194.105
Jumlah	25.820.145.711.091	29.724.342.897.894

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.02 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar Rp714.791.938.247. Rincian perbedaan

tersebut adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Data BUN	Data BA 999	Selisih
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	13.648.925.389.888	12.347.591.219.562	1.301.334.170.326
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	7.995.635.711.316	7.914.686.183.902	80.949.527.414
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	3.972.357.132.656	2.720.772.215.733	1.251.584.916.923
Penarikan Pinjaman Proyek Komersial	-	2.086.110.477.796	(2.086.110.477.796)
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	203.227.477.230	-	203.227.477.230
Jumlah	25.820.145.711.091	25.069.160.096.993	750.985.614.097

Perbedaan realisasi penarikan Pinjaman Proyek ini disebabkan oleh:

Uraian	Jumlah (Rp)
Selisih kurs	154.896.909.854
DJPU mencatat tahun 2010, DJPBN mencatat tahun 2009	(78.203.673.467)
DJPU mencatat tahun 2009, DJPBN mencatat tahun 2010	404.573.480.491
NoD terbit tahun 2010, namun belum diterbitkan SP3	(37.083.981.575)
SP3 sudah diterbitkan, namun NoD belum ada	51.838.605.270
Refund Penerimaan Pembiayaan	9.597.281.563
Total dapat teridentifikasi	505.624.622.136
Masih dalam proses identifikasi	245.160.991.961
Total	750.985.614.097

B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman (Neto)

*Penerusan Pinjaman
(Neto) minus Rp8,73
triliun*

Realisasi Penerusan Pinjaman (Neto) TA 2010 adalah sebesar minus Rp8.728.763.587.688, yang berarti 51,97 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp16.796.614.046.000. Penerusan Pinjaman Neto minus berarti selama TA 2010 Pengeluaran Pembiayaan untuk Penerusan Pinjaman lebih besar dari Penerimaan Cicilan Pengembaliannya. Rincian Penerusan Pinjaman (Neto) adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman:		
Penerusan Pinjaman LN kepada Daerah	492.024	54.241.853.891
Penerusan Pinjaman LN kepada BUMD	-	209.662.828.985
Penerusan Pinjaman LN kepada BUMN	-	2.869.992.734.677
Penerusan Pinjaman DN kepada Daerah	6.162.944.669	-
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	50.802.683.037	-
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	665.643.590	-
Total Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	57.631.763.320	3.133.897.417.553
Pengeluaran Penerusan Pinjaman:		
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	(68.078.795.670)	(26.698.929.640)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMD	(8.155.932.230)	-
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	(8.238.430.908.741)	(6.154.001.504.439)
Penerusan Pinjaman LN TAYL kepada BUMN	(471.729.714.367)	-
Total Pengeluaran Penerusan Pinjaman	(8.786.395.351.008)	(6.180.700.434.079)
Penerusan Pinjaman (Neto)	(8.728.763.587.688)	(3.046.803.016.526)

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

*Pembayaran Cicilan
Pokok Utang LN minus
Rp50,63 triliun*

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2010. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2010 adalah sebesar minus Rp50.632.531.581.836, yang berarti 93,53 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp54.136.013.560.000.

Berikut di bawah ini adalah rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2010 dan

TA 2009 (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN – Pinjaman Program	(10.503.057.712)	-
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Program	(8.950.355.684.638)	(8.755.976.968.919)
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek	(6.557.490.862.982)	-
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek	(35.114.181.976.504)	(59.275.136.888.158)
Jumlah	(50.632.531.581.836)	(68.031.113.857.077)

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

SiLPA Rp44,71 triliun

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp46.845.708.353.474 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp91.552.011.400.615 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp44.706.303.047.141, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Pendapatan Negara dan Hibah	995.271.511.391.343	848.763.235.195.483
Belanja Negara	1.042.117.219.744.817	937.382.019.569.767
Surplus (Defisit)	(46.845.708.353.474)	(88.618.784.374.284)
Pembiayaan Neto	91.552.011.400.615	112.583.311.415.415
SiLPA (SiKPA)	44.706.303.047.141	23.964.527.041.131

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA**1. Informasi Pendapatan dan Belanja Akrua**

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN TA 2010, Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual. Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan akuntansi berbasis akrual yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih Pemerintah dalam penganggaran berbasis kas. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual disajikan secara tersendiri dalam Suplemen LKPP Tahun 2010.

2. Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan TA 2010, dengan rincian sebagai berikut:

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2010 (dalam Rp)		
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan	Urusan Bersama
010	Kementerian Dalam Negeri	1.060.058.924.070	713.128.878.595	8.572.680.832.639
018	Kementerian Pertanian	838.133.294.026	2.105.826.539.766	
019	Kementerian Perindustrian	58.133.294.026	41.551.160.538	
020	Kementerian ESDM	32.373.480.054	-	
023	Kementerian Pendidikan Nasional	25.411.387.446.378	255.464.002.515	
024	Kementerian Kesehatan	684.433.980.507	1.786.869.749.824	
026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	214.952.737.940	1.189.779.429.018	
027	Kementerian Sosial	489.823.853.611	92.914.575.003	

029	Kementerian Kehutanan	90.967.066.192	-	
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	211.938.105.858	652.749.326.766	
033	Kementerian Pekerjaan Umum	99.573.298.465	1.604.726.486.243	869.390.000.000
040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	58.108.992.568	27.153.749.341	
043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	15.115.473.203		
044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	117.843.368.984	29.097.569.226	
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	194.576.949.631		
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	4.380.413.560		
067	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	1.958.561.800	571.275.216.604	
068	BKKBN	6.022.914.661		
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	3.211.298.100		
090	Kementerian Perdagangan	51.303.941.772	59.229.218.790	
091	Kementerian Perumahan Rakyat	41.792.906.866	-	
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	188.580.495.975	-	
104	BNP2 TKI	-	2.239.398.459	
	Total	28.875.027.298.658	9.132.005.300.688	9.442.070.832.639

3. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep *"enterprising the government"* dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun dan mengintegrasikan RBA dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU, minimal terdiri dari laporan operasional/laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan instansi PK BLU tersebut harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

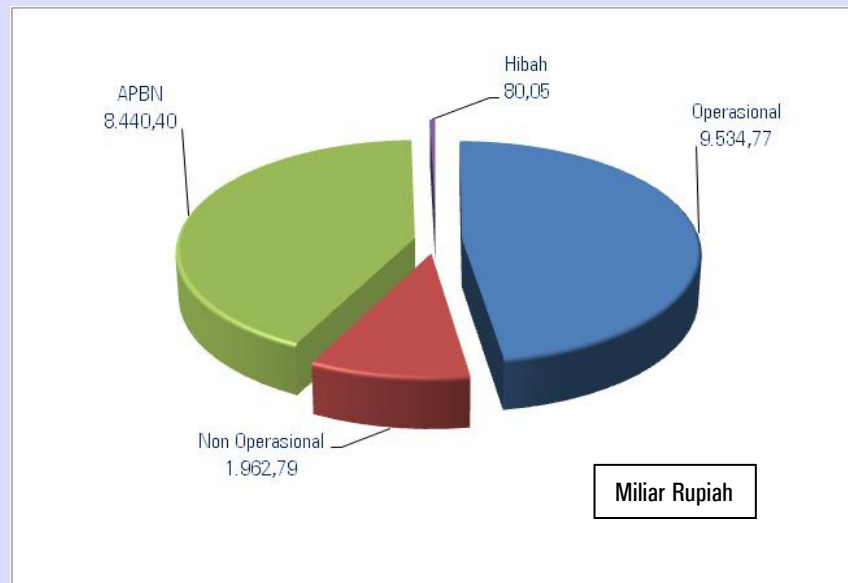
Sampai dengan 31 Desember 2010, terdapat 103 instansi pemerintah yang telah menerapkan PK BLU. Seratus satu Satker BLU tersebut berasal dari 19 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Sekretariat Negara	2
2	Kementerian Keuangan	2
3	kementerian Pertanian	2
4	Kementerian Perindustrian	4
5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1
6	Kementerian Perhubungan	5
7	Kementerian Pendidikan Nasional	20
8	Kementerian Kesehatan	41
9	Kementerian Agama	12
10	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3
11	Kementerian Kehutanan	1
12	Kementerian Pekerjaan Umum	1
13	Kenterian Negara Riset dan Teknologi	1
14	Kementerian Koperasi dan UKM	2
15	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1
16	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
17	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	1
18	Kementerian Perumahan Rakyat	1
19	POLRI	2
	Jumlah BLU	103

Ditinjau dari bidang layanan, dari 103 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

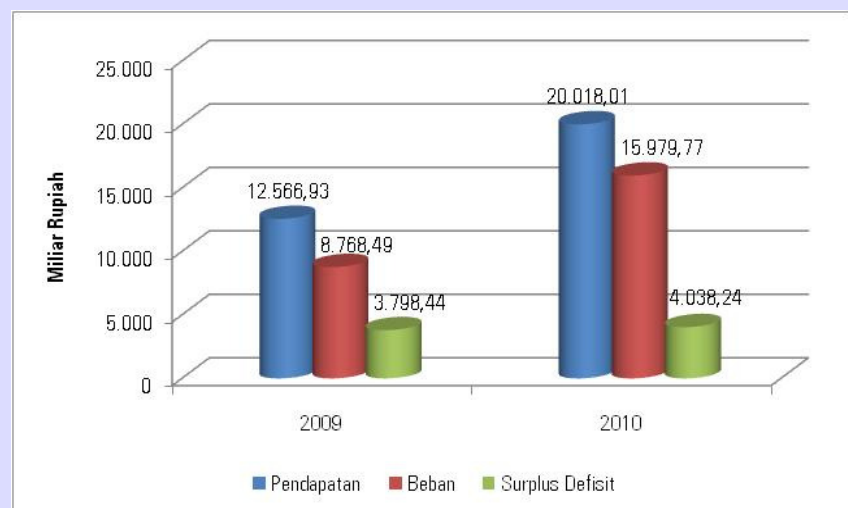
- a. 97 BLU bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- b. 2 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;
- c. 4 BLU bidang Pengelolaan Dana Khusus.

Dari 103 BLU, 9 BLU belum menyampaikan laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan 103 BLU, total pendapatan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp20.137.078.418.940. Komposisi pendapatan BLU pada TA 2010 dapat dilihat pada Grafik 39.



Grafik 39: Komposisi Pendapatan BLU TA 2010

Sementara itu, Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU Tahun 2010 terlihat pada Grafik 40.



Grafik 40: Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2010

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan secara lengkap pada **Daftar 37**.

4. Penerimaan dan Belanja Hibah

Sejak TA 2009, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah, Penerimaan Hibah baik melalui Bendahara Umum Negara maupun hibah langsung ke K/L, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran BA 999.02 (Hibah), bukan lagi oleh masing-masing K/L.

Berdasarkan LRA BA 999.02 jumlah penerimaan hibah sebesar Rp4.139.837.373.549 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan dan Hibah	Jumlah Rp
Hibah Luar Negeri	
Hibah Luar Negeri - Perorangan	15.607.423.514
Hibah Luar Negeri – Bilateral	237.113.081.573
Hibah Luar Negeri – Multilateral	2.450.209.051.807
Hibah Luar Negeri – Langsung	959.155.424.934
Hibah Luar Negeri - Barang	4.696.487.965
Hibah Luar Negeri - Jasa	129.246.720.415
Pengembalian	
Multilateral	(17.289.455.876)
Bilateral	(3.314.918.911)
Hibah Dalam Negeri	
Hibah Dalam Negeri	238.525.000.000
Hibah Dalam Negeri – Langsung	121.335.035.648
Hibah Dalam Negeri – Barang	4.553.522.480
Jumlah Pendapatan Hibah	4.139.837.373.549

Sementara itu, belanja hibah pada TA 2010 hanya berupa belanja hibah Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp101.128.883.084, hibah tersebut termasuk hibah barang sebesar Rp31.120.105.509.

5. Permasalahan dalam Klasifikasi Penganggaran

Sesuai dengan Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010, bahwa dalam realisasi belanja yang dilaporkan pada tahun 2010, terdapat ketidaksesuaian klasifikasi penganggaran pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga (K/L), yaitu:

- Belanja Barang pada 33 K/L sebesar Rp660 miliar seharusnya Belanja Modal.
- Belanja Modal pada 2 K/L sebesar Rp16,62 miliar seharusnya Belanja Bantuan Sosial.
- Belanja Modal pada 52 K/L sebesar Rp122,39 miliar seharusnya Belanja Barang.
- Belanja Barang pada 6 K/L sebesar Rp988,95 miliar seharusnya Belanja Bantuan Sosial.
- Anggaran Belanja Lain-lain tidak sesuai ketentuan dan karakteristik Belanja Lain-lain yang sebenarnya minimal sebesar Rp2.897,05 miliar.

Terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah akan lebih berhati-hati dalam pelaksanaan penelaahan dan monitoring penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) dan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan memperhatikan ketentuan yang ada, dan lebih mengintensifkan sosialisasi penerapan Bagan Akun Standar (BAS).

Selain itu, Pemerintah juga telah melakukan realokasi Belanja Lain-lain menjadi belanja K/L, bekerja sama dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam penyusunan Buletin Teknis SAP yang terkait dengan belanja, dan menyempurnakan peraturan yang terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK/TP)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

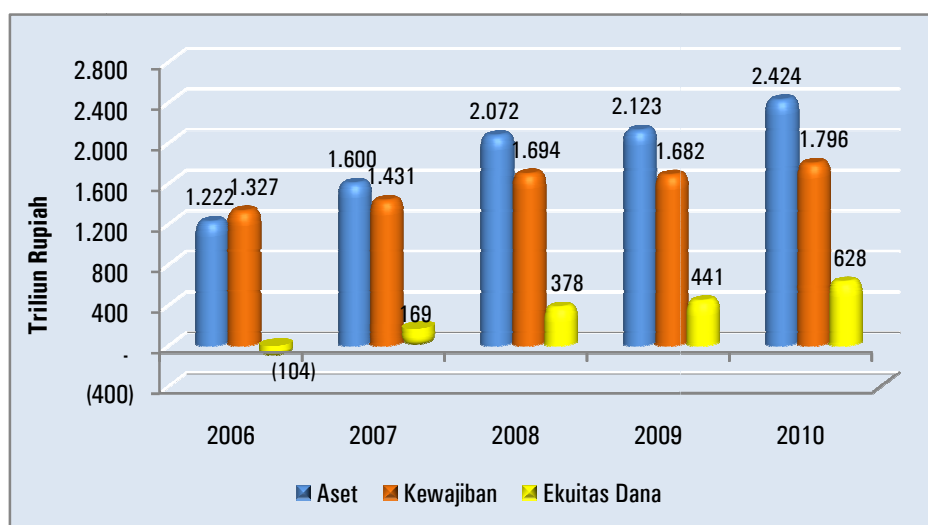
Posisi Neraca secara umum

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Aset Lancar	254.779.627.714.260	231.388.713.199.864
Investasi Jangka Panjang	706.410.075.389.077	737.039.382.666.868
Aset Tetap	1.184.301.167.405.585	979.000.257.110.824
Aset Lainnya	278.197.482.029.092	175.469.125.391.757
Jumlah Aset	2.423.688.352.538.014	2.122.897.478.369.313
Kewajiban Jangka Pendek	201.343.960.842.088	187.839.287.320.918
Kewajiban Jangka Panjang	1.594.734.246.970.359	1.493.869.107.262.445
Jumlah Kewajiban	1.796.078.207.812.447	1.681.708.394.583.363
Ekuitas Dana Lancar	83.462.571.113.177	43.549.425.878.946
Ekuitas Dana Investasi	544.147.573.612.390	397.639.657.907.004
Jumlah Ekuitas Dana Neto	627.610.144.725.567	441.189.083.785.950
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.423.688.352.538.014	2.122.897.478.369.313

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Grafik 41.

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir



Grafik 41: Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2006 - 2010

Grafik di atas menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun berturut-turut, nilai Ekuitas Dana selalu meningkat. Ekuitas Dana per 31 Desember 2010 naik 42,25 persen dari posisi 31 Desember 2009.

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Rekening Kas BUN di Bank Indonesia

*Rekening Kas BUN di BI
Rp82,43 triliun*

Jumlah Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp82.430.710.192.763 dan Rp32.185.520.242.213 merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Rekening	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Rekening BUN No. 502.000000	2.120.438.712.433	2.054.801.169.448
Rekening KUN dalam Valuta USD No. 600.502411	15.198.974.591	18.313.273.076
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah No. 519.000122	9.320.901.792.905	20.704.179.322.101
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD No. 608.001411	15.985.142.164.422	8.855.389.176.396
Rekening Penempatan dalam Valuta YEN No. 608.000111	2.300.652.032.330	68.956.634.284
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam Rupiah No. 519000124	606.723.757	606.723.757
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam USD No. 609022411	425.642.936.125	483.248.862.430
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam EURO No. 609000991	35.322.305	25.080.721
Rekening SAL	49.437.756.699.925	-
Rekening khusus	2.824.334.833.970	-
Jumlah	82.430.710.192.763	32.185.520.242.213

Pada LKPP Tahun 2009, Rekening Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp5.870.514.138.408 disajikan pada bagian dari Rekening Pemerintah Lainnya, dan Rekening Khusus sebesar Rp3.930.523.401.603 disajikan pada Aset Lainnya (Dana yang Dibatasi Penggunaannya).

Rincian Rekening Khusus dapat dilihat pada **Daftar 4**.

C.2.2. Rekening Kas di KPPN

*Rekening Kas di KPPN
Rp9,22 triliun*

Jumlah Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp9.218.612.887.732 dan Rp8.309.379.301.258 merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia.

Daftar Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada **Daftar 5**.

C.2.3. Rekening Pemerintah Lainnya

RPL Rp8,54 triliun

Jumlah Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp8.539.601.162.593 dan Rp32.218.505.711.694 merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Bank	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. Bank Indonesia	7.744.826.703.919	17.183.034.878.370
2. Bank Umum	794.774.458.674	15.035.470.833.324
Jumlah	8.539.601.162.593	32.218.505.711.694

1. Rekening Pemerintah Lainnya di BI, terdiri dari (dalam Rp):

Rekening	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)
Rekening RDI/RPD	106	1.653.866.298.449
Rekening SAL	-	5.870.514.138.408
Rekening Panas Bumi	208.604.971.388	190.638.768.900
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS	7.308.488.402.783	8.718.692.283.486
Rekening Pemerintah Lainnya	227.733.329.642	749.323.389.127
Jumlah	7.744.826.703.919	17.183.034.878.370

Pada tahun 2009, Rekening SAL merupakan bagian dari Rekening Pemerintah Lainnya di BI. Pada tahun 2010, Rekening SAL sebesar Rp49.437.756.699.925 direklasifikasikan menjadi bagian dari rekening kas BUN di Bank Indonesia.

Rincian lebih lengkap masing-masing RPL di BI dapat dilihat pada **Daftar 6**.

Khusus Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp7.308.488.402.783 merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah.

Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Panas Bumi disajikan pada **Catatan Penting Lainnya**.

Laporan Penerimaan Migas dan *Reimbursement* PPN ke setiap KKKS dapat dilihat pada **Daftar 7**.

2. Rekening Pemerintah Lainnya pada bank umum sebesar Rp794.774.458.674 merupakan Kas pada BA 999.04 yang tersimpan di berbagai bank umum berupa:

- Rekening Induk Dana Lingkungan (RIDL) sebesar Rp19.704.684.186;
- Rekening KUMK sebesar Rp760.788.981.475; dan
- 15 Rekening Pemerintah sebagai penampungan transaksi dari program/kegiatan yang masih berlangsung sebesar Rp14.280.793.013.

Pada LKPP Tahun 2009, RPL tersebut disajikan sebagai Dana Bergulir. Karena substansi rekening ini bukan merupakan Dana Bergulir, maka pada LKPP Tahun 2010, rekening ini disajikan sebagai bagian dari Rekening Pemerintah Lainnya.

Rincian RPL di bank umum dapat dilihat pada **Daftar 8**.

Pada LKPP Tahun 2009, saldo RPL di bank umum adalah sebesar Rp15.035.470.833.324, sebesar Rp15.000.000.000.000 merupakan saldo Rekening Penempatan Uang Negara dalam rangka pengelolaan kas jangka pendek. Pada tahun 2010, seluruh saldo rekening tersebut telah disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

C.2.4. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp518,92 miliar*

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp518.919.028.152 dan Rp1.036.241.894.537 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada **Daftar 9**.

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp632,34 miliar*

C.2.5. Kas di Bendahara Penerimaan

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp632.344.354.246 dan Rp1.040.200.195.970 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, termasuk bunga dan jasa giro, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada **Daftar 10**.

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp8,65 triliun*

C.2.6. Kas Lainnya dan Setara Kas

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp8.652.179.999.211 dan Rp901.887.427.630 merupakan kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, serta belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Bunga dan Jasa Giro, dan Pengembalian Belanja yang Belum Disetor ke Kas Negara	684.910.710.051	272.596.435.596
Kas yang Belum Dibayarkan kepada Pihak Ketiga	7.524.295.136.562	629.290.992.034
Hibah Langsung Kas pada K/L	440.323.355.419	-
Dana Lancar BLU	2.650.797.179	-
Jumlah	8.652.179.999.211	901.887.427.630

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. K/L	1.328.563.654.746	891.980.538.181
2. BUN	7.323.616.344.465	9.906.889.449
Jumlah	8.652.179.999.211	901.887.427.630

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada **Daftar 11**.

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berada di BUN sebesar Rp7.323.616.344.465 merupakan Kas Lainnya dan Setara Kas yang terdapat di Bagian Anggaran Belanja Lain-lain sebesar Rp7.323.616.344.465. Kas tersebut sebagian besar merupakan dana tunjangan kinerja untuk beberapa K/L yang sampai dengan akhir tahun belum dibayarkan kepada pegawai, dan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang akan disalurkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Instansi yang menangani bencana.

Kas pada BLU Rp7,34 triliun

C.2.7. Kas pada BLU

Jumlah Kas pada BLU per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp7.340.595.820.681 dan Rp5.676.975.379.101 merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU, yang terdiri dari (dalam Rp):

BLU pada Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	479.821.501.506	488.720.118.967
2. BLU di Kementerian Keuangan	1.085.722.227.076	684.555.535.893
3. BLU di Kementerian Perindustrian	15.834.915.124	3.700.755.939
4. BLU di Kementerian Perhubungan	93.038.372.556	36.760.635.569
5. BLU di Kementerian Pendidikan Nasional	1.161.521.456.378	922.558.918.746
6. BLU di Kementerian Kesehatan	972.325.591.499	733.712.654.546
7. BLU di Kementerian Agama	132.236.879.094	104.273.729.179
8. BLU di Kementerian Nakertrans	594.424.868	1.571.896.718
9. BLU di Kementerian Pekerjaan Umum	133.025.374.471	104.217.408.625
10. BLU di Kementerian Negara Ristek	734.444.972	728.838.641
11. BLU di Kementerian Negara Koperasi dan UKM	132.325.739.980	75.654.326.567
12. BLU di Kementerian Komunikasi dan Informatika	3.083.819.144.970	2.513.291.437.536
13. BLU di BPPT	7.949.782.111	5.238.532.988
14. BLU di LAPAN	1.518.809.599	1.990.589.187
15. BLU di Kementerian Pertanian	2.556.669.136	-
16. BLU di POLRI	13.845.569.596	-
17. BLU di Kementerian ESDM	15.443.187.078	-
18. BLU di Kementerian Perumahan Rakyat	8.281.730.667	-
Jumlah	7.340.595.820.681	5.676.975.379.101

Kas pada BLU sebesar Rp7.340.595.820.681 berasal dari Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN melalui SP2D Pengesahan atas Pendapatan dan Belanja Operasional BLU serta koreksi saldo awal kas pada BLU adalah sebesar Rp7.287.580.742.179 dan Kas pada BLU yang belum disahkan oleh KPPN sebesar Rp53.015.078.502. Lihat **Catatan D.1**.

C.2.8 Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp1.876.259.417.429 dan Rp5.560.724.882.615 merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum ada penggantian dari *lender*. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut *lender* adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uang Muka dari Rekening BUN Rp1,88 triliun

<i>Lender</i>	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. IBRD	887.745.480.535	2.562.224.426.309
2. ADB	361.921.824.683	727.617.392.785
3. OECF/JBIC	36.290.835.084	644.628.824.335
4. Lainnya	590.301.277.127	1.626.254.239.186
Jumlah	1.876.259.417.429	5.560.724.882.615

Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp1.876.259.417.429 adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009.

Sedangkan Uang Muka dari Rekening BUN yang *ineligible* pada tahun 2010 telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/KMK.05/2011, dan tidak disajikan pada Neraca. Jumlah uang muka yang tidak dapat ditagihkan kepada *lender* adalah sebesar Rp1.853.845.761.332 yang terjadi pada tahun 2008 dan tahun sebelumnya.

Rincian Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2010 menurut *lender* yang bersifat *ineligible* adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Lender	Jumlah (Rp)
IBRD	263.655.105.786
ADB	531.512.176.288
OECS/JBIC	637.577.471.249
Lainnya	421.101.008.009
Jumlah	1.853.845.761.332

C.2.9. Piutang Pajak

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp70.945.271.446.620 dan Rp63.658.918.330.257 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

*Piutang Pajak
Rp70,95 triliun*

Unit Pengelola (Kementerian Keuangan)	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. Direktorat Jenderal Pajak	54.008.060.540.425	49.999.727.823.996
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	16.937.210.906.195	13.659.045.063.184
3. BUN (Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain)	-	145.443.077
Jumlah	70.945.271.446.620	63.658.918.330.257

*Piutang Pajak pada
Ditjen Pajak*

1. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp54.008.060.540.425 dan Rp49.999.727.823.996 merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2010. Rincian piutang pajak per jenis pajak dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11
Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak
(Dalam Rp)

No.	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2010	31 Desember 2009
1.	Piutang PPh Pasal 21	1.266.406.447.889	951.534.554.486
2.	Piutang PPh Pasal 22	483.960.766.219	489.840.716.690
3.	Piutang PPh Pasal 23	2.203.941.784.322	1.688.528.889.756
4.	Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi	1.011.934.207.339	1.053.689.834.133
5.	Piutang PPh Pasal 25 Badan	14.375.139.273.281	16.424.024.121.140
6.	Piutang PPh Pasal 26	1.707.425.467.877	1.586.493.805.101
7.	Piutang PPh Final dan Fiskal LN	756.662.431.444	535.862.689.996
8.	Piutang PPN Dalam Negeri	13.758.554.551.125	14.533.638.585.793
9.	Piutang PPNBM Dalam Negeri	279.736.078.186	280.485.129.787
10.	Piutang PBB Pedesaan	1.617.432.556.023	1.327.539.551.495
11.	Piutang PBB Perkotaan	9.391.433.663.020	7.542.885.445.040
12.	Piutang PBB Perkebunan	388.198.560.617	474.394.030.911
13.	Piutang PBB Kehutanan	617.951.905.189	492.606.633.014
14.	Piutang PBB Pertambangan	4.029.788.497.473	158.566.341.854
15.	Piutang BPHTB	101.220.473.265	179.947.361.649
16.	Piutang PTLL	2.240.673.790	16.386.067.497
17.	Piutang Bunga Penagihan PPh	2.016.033.203.366	2.263.304.065.654
	Jumlah	54.008.060.540.425	49.999.727.823.996

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJP dapat dirinci sebagai berikut:

Umur Piutang	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
• Kurang dari 1 Tahun	17.268.606.805.698	13.167.888.974.329
• 1 Tahun dan Kurang dari 3 Tahun	11.089.759.076.321	12.641.269.957.462
• 3 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun	7.425.345.018.956	9.037.953.073.649
• 5 Tahun atau Lebih	18.224.349.638.997	15.152.615.818.556
Jumlah	54.008.060.540.425	49.999.727.823.996

- Dalam Piutang Pajak sebesar Rp54.008.060.540.425 tersebut terdapat penyisihan piutang pajak sebesar Rp9.451.456.569.984 dan piutang yang telah kadaluwarsa penagihannya sebesar Rp2.643.980.605.859. Dari Piutang Pajak yang telah kadaluwarsa tersebut, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp202.240.100.719 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan sebesar Rp45.802.510.018. Rincian Piutang Pajak per Kanwil dan Umur Piutang dapat dilihat pada **Daftar 12.A**.
- Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak melayani Wajib Pajak yang mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Nominal surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan atas surat ketetapan pajak dan banding/gugatan yang belum mendapat keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah Rp44.238.374.913.828. (Rincian pada **Daftar 12.B**).
- Dalam rangka melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penyitaan terhadap harta benda wajib pajak sebagai jaminan piutang pajak yang tidak dilunasi Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harga benda Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang dan atau penjualan yang dikecualikan dari lelang dengan estimasi harga pasar Rp2.620.530.699.255 dan USD1,164 serta 7,580 Euro dari piutang pajak sebesar Rp7.227.904.239.229

*Piutang Pajak pada
Ditjen Bea dan Cukai*

2. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp16.937.210.906.195 dan Rp13.659.045.063.184 merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Pajak per jenis pajak dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12

**Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai
(Dalam Rp)**

No.	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2010	31 Desember 2009
1	Piutang PPh Pasal 22 Impor	57.174.673.159	46.369.265.166
2	Piutang PPN Dalam Negeri	2.609.131.603.212	1.910.119.388.044
3	Piutang PPN Impor	264.640.361.368	242.980.196.543
4	Piutang PPN Lainnya	24.934.000	40.102.155.164
5	Piutang PPnBM Impor	20.402.870.685	32.417.342.712
6	Piutang PPnBM Lainnya	-	492.321.416
7	Piutang Cukai Hasil Tembakau	12.646.209.694.700	9.777.543.116.859
8	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	-	132.712.267.500
9	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	2.969.589.180	2.919.640.200
10	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	2.899.526.340	2.366.976.700
11	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	1.100.946.557	89.118.752.770
12	Piutang Bunga Penagihan PPN	5.821.060.805	26.296.597.609
13	Piutang Bea Masuk	700.809.407.559	577.719.582.938
14	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	445.108.152.433	575.232.281.854
15	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	179.085.323.897	188.582.383.945
16	Piutang Pajak/Pungutan Ekspor	1.623.559.853	14.072.793.764
17	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Keluar	33.897.172	-
18	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	175.305.275	-
Jumlah		16.937.210.906.195	13.659.045.063.184

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJBC dapat dirinci sebagai berikut:

Umur Piutang	Jumlah (Rp)
• Kurang dari 1 Tahun	15.549.337.791.645
• 1 Tahun s.d 2 Tahun	156.485.135.015
• 2 Tahun s.d 3 Tahun	409.426.853.939
• Di atas 3 Tahun	821.961.125.596
Jumlah	16.937.210.906.195

*Piutang Bukan Pajak
Rp9,02 triliun*

C.2.10. Piutang Bukan Pajak

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp9.020.978.486.579 dan Rp21.859.930.458.886. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang tersebut terdiri dari (dalam Rp):

Jenis Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. Piutang pada K/L	3.442.928.032.948	3.437.022.301.893
2. Piutang pada BUN	5.578.050.453.631	18.422.908.156.993
Jumlah	9.020.978.486.579	21.859.930.458.886

*Piutang Bukan Pajak di
BUN Rp5,58 triliun*

- Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2010 sebesar Rp3.442.928.032.948 dapat dilihat pada **Daftar 13**.
- Piutang Bukan Pajak pada BUN per 31 Desember 2010 sebesar Rp5.578.050.453.631 terdiri dari (dalam Rp):

	31 Desember 2010	31 Desember 2009

	(Audited)	(Audited)
1. Piutang Transfer ke Daerah	-	407.815.573.045
2. Piutang pada Belanja Subsidi	960.768.242.276	91.475.363.139
3. Piutang pada Belanja Lain-lain	167.584.222.817	
4. Piutang kepada PT PPA	2.121.512.481	6.632.512.481
5. Piutang Migas	4.278.399.501.958	16.432.267.206.671
6. Piutang Dividen dan Denda	169.176.974.099	1.083.069.018.860
7. Piutang PBHP BBM	-	401.648.482.797
Jumlah	5.578.050.453.631	18.422.908.156.993

1. Piutang Transfer ke Daerah pada LKPP Tahun 2010 direklasifikasi menjadi piutang lain-lain.
2. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar Rp960.768.242.276 terdiri dari:
 - Piutang sebesar Rp34.178.206 yang merupakan kelebihan pembayaran terhadap subsidi Minyak Tanah (Pertamina) berdasarkan hasil audit BPK RI TA 2010.
 - Piutang Bukan Pajak sebesar Rp800.682.649.113 terdiri dari :
 - a. Piutang bukan pajak sebesar Rp3.944.589.933 yang merupakan piutang dari PT Sang Hyang Seri (SHS) berdasarkan temuan BPK atas pemeriksaan LK Kementerian Pertanian TA 2009 yang menyebutkan bahwa terdapat kelebihan pembebanan bunga bank atas kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) TA 2009 oleh PT SHS dalam perannya menjalankan *Public Service Obligation* (PSO). Atas piutang bukan pajak sebesar Rp3.944.589.933 telah dilakukan penyetoran PNPB oleh PT SHS pada tanggal 11 Maret 2011.
 - b. Kelebihan bayar atas subsidi Pupuk berdasarkan hasil audit BPK TA 2010 sebesar Rp796.738.059.180 yang terdiri dari:
 - PT Pupuk Sriwijaya sebesar Rp431.556.392.538
 - PT Pupuk Kujang sebesar Rp11.797.627.295
 - PT Pupuk Iskandar Muda sebesar Rp47.520.057.993
 - PT Petrokimia Gresik sebesar Rp305.863.981.354
 - Piutang Bukan Pajak sebesar Rp160.051.414.957 yang merupakan Piutang Pemerintah kepada Perum Bulog atas kelebihan pembayaran Subsidi Pangan Program Raskin tahun 2004, 2006, dan 2007 sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-385/MK.2/2010 tanggal 17 September 2010 hal Kelebihan pembayaran Subsidi pangan Program Raskin tahun 2001 s.d. 2007. Nilai Piutang Bukan Pajak sebesar Rp160.051.414.957.
3. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) sebesar Rp167.584.222.817 merupakan piutang pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp143.436.551.574, Kementerian Keuangan sebesar Rp4.977.285.621, POLRI sebesar Rp86.272.164, Kementerian Pertanian sebesar Rp650.428, Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias sebesar Rp102.967.230, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp139.441.600, dan BULOG sebesar Rp18.841.053.200.
4. Piutang kepada PT PPA sebesar Rp2.121.512.481 merupakan kewajiban PT PPA atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA) yang masih harus disetorkan kepada pemerintah dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Piutang kepada PT PPA

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Saldo Awal (1)	6.632.512.481	8.910.512.481
Penerimaan:		
Hasil Pengelolaan Aset (HPA):		
Divestasi saham yang dikelola	300.000.000.000	-
Dividen atas saham yang dikelola	7.752.000.000	5.982.000.000
Pokok dan bunga atas tagihan yang dikelola	-	90.000.000
Pokok dan Bunga Bunga atas obligasi yang dikelola	116.517.000.000	67.063.000.000
<i>Redemption Obligasi</i>		
Penjualan dari right saham	364.000.000	-
HPA aset lainnya	67.000.000	-
Jumlah HPA	431.332.512.481	73.135.000.000
Dana Cadangan Biaya Pengelolaan		
Bunga dari dana HPA yg masih harus disetor	2.519.000.000	8.469.000.000
Jumlah Penerimaan (2)	433.851.512.481	81.604.000.000
Pengurangan:		
Biaya pengelolaan yang dapat diperoleh kembali tahun berjalan dan telah dibayar tunai	212.000.000	1.414.000.000
Imbalan Pengelolaan Aset	52.731.000.000	60.934.000.000
PPN atas Imbalan Pengelolaan Aset	5.273.000.000	6.093.000.000
PPN atas Penggantian Biaya Pengelolaan	21.000.000	141.000.000
Biaya aset periode sebelumnya	26.026.000.000	-
Imbalan Kinerja	9.868.000.000	-
PPN Imbalan Kinerja	986.000.000	-
Tunggakan biaya/biaya aset dengan penugasan khusus	-	214.000.000
Jumlah Pengurangan (3)	95.117.000.000	68.796.000.000
HPA yang harus disetor ke Pemerintah ((4) = (1) + (2) - (3))	338.734.512.481	21.718.512.481
HPA yang telah disetor ke Pemerintah (5)	(336.613.000.000)	(15.086.000.000)
Jumlah HPA yang masih harus disetor (6) = (4) - (5)	2.121.512.481	6.632.512.481

Piutang Migas

5. Piutang Migas per 31 Desember 2010 sebesar Rp Rp4.278.399.501.958 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. Piutang pada PT Pertamina	1.315.721.773.272	14.702.738.684.323
2. Piutang Migas Lainnya	2.962.677.728.686	1.729.528.522.348
Jumlah	4.278.399.501.958	16.432.267.206.671

Rincian Piutang Migas disajikan pada **Daftar 14**.

Piutang Dividen dan Denda

6. Piutang Dividen dan Denda per 31 Desember 2010 sebesar Rp169.176.974.099 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. Pokok Dividen	109.279.444.488	1.021.533.653.399
2. Denda Bunga Dividen	59.897.529.611	61.535.365.461
Jumlah	169.176.974.099	1.083.069.018.860

Berdasarkan penetapannya, Piutang Dividen dan Denda dibagi menjadi 2, yaitu:

- Piutang yang telah mendapat Penetapan Menteri Keuangan untuk diangsur oleh BUMN sebesar Rp104.165.536.447; dan
- Piutang yang belum mendapat penetapan Menteri Keuangan sebesar Rp65.011.437.652.

Penurunan jumlah piutang dividen dan denda dikarenakan piutang PT Pertamina sebesar Rp905.443.343.912 telah dilunasi.

Piutang atas PBHP BBM

7. Piutang atas Pendapatan Bersih Hasil Penjualan (PBHP) BBM per 31 Desember 2010

berjumlah Rp0, karena telah dilunasi seluruhnya sebesar Rp401.648.482.797 pada tahun 2010 oleh PT Pertamina.

*Bagian Lancar TPA
Rp65,40 juta*

C.2.11. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp65.404.443 dan Rp107.946.353 merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca yang berada di BAPPENAS.

*Bagian Lancar Tagihan
TGR Rp38,59 miliar*

C.2.12. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp38.591.410.963 dan Rp30.620.839.227 merupakan saldo Tagihan TGR pada K/L dan BUN (Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya) yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dan BUN dapat dilihat pada **Daftar 15**.

*Bagian Lancar Investasi
Jangka Panjang Rp4,84 triliun*

C.2.13. Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang

Jumlah Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp4.842.752.393.007 dan Rp5.067.629.170.009 merupakan bagian lancar Rekening Dana Investasi/Rekening Pemerintah Daerah (RDI/RPD) dan SLA kepada pemda, BUMN, dan BUMD yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

*Uang Muka Belanja
Rp614,12 miliar*

C.2.14. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp614.122.632.355 dan Rp210.222.609.348 merupakan uang muka dan/atau pembayaran termin yang telah diterima oleh kontraktor atau pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka penyediaan barang/jasa yang berada di beberapa K/L, yaitu (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. BPK	2.731.358.438	10.437.630.216
2. MA	1.194.187.308	6.212.330.140
3. Kejaksaan Agung	79.980.000.000	-
4. Sekretariat Negara	51.306.792	-
5. Kementerian Pertahanan	317.408.269.448	-
6. Kementerian Keuangan	30.201.365.733	35.148.473.050
7. Kementerian Pertanian	29.933.350	-
8. Kementerian Perhubungan	3.372.081.629	-
9. Kementerian Kesehatan	83.074.641.336	55.563.200.000
10. Kementerian Agama	3.666.667.259	-
11. BPPT	-	315.595.600
12. Kementerian Kehutanan	152.697.428	45.791.500
13. Kementerian Kelautan dan Perikanan	126.981.635	-
14. Kementerian Pekerjaan Umum	39.618.357	-
15. Kementerian Kominfo	-	53.350.000
16. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	2.589.148.125	-
17. BPS	1.095.359.112	120.006.897
18. BKN	12.085.426.264	20.034.107.145

19. BPN	1.250.000	-
20. Polri	160.984.302	-
21. Kementerian Perdagangan	37.875.466.975	41.110.990.542
22. BPOM	36.666.667	-
23. BNN	636.296.233	-
24. BPPT	-	-
25. LAN	197.713	-
26. KPK	33.181.500	249.002.600
27. BRR NAD-Nias	26.695.788.910	26.695.788.910
28. LIPI	5.520.590	9.720.000
29. LKPP	7.520.502.350	-
30. BAPETEN	-	80.773.000
31. BPN2TKI	-	87.083.000
32. BUN (Belanja Lain-Lain)	3.357.734.901	14.058.766.748
Jumlah	614.122.632.355	210.222.609.348

Piutang dari Kegiatan
BLU Rp1,12 triliun

C.2.15. Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp1.121.930.274.893 dan Rp1.520.445.115.328 merupakan piutang yang timbul dalam kegiatan operasional BLU sebesar Rp1.104.842.774.199 dan non operasional BLU sebesar Rp17.087.500.694.

Piutang Kegiatan Operasional BLU adalah sebesar Rp1.104.842.774.199 berada di (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	259.176.487.979	965.822.275.015
2. BLU di Kementerian Keuangan	1.800.000	-
3. BLU di Kementerian Pendidikan Nasional	42.200.054.389	55.805.933.794
4. BLU di Kementerian Perindustrian	1.585.267.809	-
5. BLU di Kementerian Kesehatan	751.575.087.776	493.273.227.599
6. BLU di Kementerian Agama	2.640.363.334	1.340.899.294
7. Kementerian PU	30.669.411.038	-
8. BLU di Kementerian Ristek	92.820.000	150.850.000
9. BLU di Kementerian Koperasi dan UKM	566.979.362	2.918.974.626
10. BLU di POLRI	6.819.067.311	-
11. BLU di BPPT	1.745.454.370	1.116.500.000
12. BLU di Kementerian Perumahan Rakyat	7.769.980.831	-
Jumlah	1.104.842.774.199	1.520.428.660.328

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp17.087.500.694 berada di (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. BLU di Kementerian Keuangan	6.146.237.068	-
2. BLU di Kementerian Kesehatan	223.938.493	16.455.000
3. BLU di Kementerian Agama	253.340.069	-
4. BLU di Sekretariat Negara	10.463.985.064	-
Jumlah	17.087.500.694	16.455.000

Piutang lain-lain
Rp12,59 triliun

C.2.16. Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp12.589.882.121.588 dan Rp15.492.809.289.778 merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang terdiri dari (dalam Rp):

Jenis Piutang	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. Piutang di K/L	296.809.311.019	44.358.140.754
2. Piutang di BUN	12.293.072.810.569	15.448.451.149.024
Jumlah	12.589.882.121.588	15.492.809.289.778

1. Piutang di K/L per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp296.809.311.019 dan Rp44.358.140.754 merupakan piutang yang berada di (Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. Kejaksaan Agung	287.253.500.095	32.824.418.507
2. BPK	408.856	-
3. Kementerian Pertahanan	-	11.016.754.047
4. BRR NAD-Nias	516.968.200	516.968.200
5. Badan SAR Nasional	9.038.433.868	-
Jumlah	296.809.311.019	44.358.140.754

2. Piutang yang berada di BUN sebesar Rp12.293.072.810.569 terdiri dari Piutang yang terkait dengan Penerusan Pinjaman sebesar Rp624.180.970.487 (sudah termasuk penyisihan piutang sebesar Rp53.567.541.189), piutang kepada 20 Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp11.137.384.987.276, Piutang Transfer ke Daerah sebesar Rp359.541.843.144, dan Piutang pada Bagian Anggaran Subsidi (999.07) sebesar Rp171.965.009.662.

- a. Piutang lainnya yang terkait dengan Penerusan Pinjaman sebesar Rp624.180.970.487 (Rp677.748.511.676 dikurangi penyisihan sebesar Rp53.567.541.189) terdiri dari:
 - Potensi tunggakan dapat ditagih per 31 Desember 2010 sebesar Rp238.804.513.666. Piutang tersebut merupakan bagian hak tagih Pemerintah yang telah jatuh tempo dan menunggak serta memiliki potensi untuk dapat ditagih pada tahun 2011, yang terdiri dari piutang pada:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	BUMN	68.277.738.517
2	BUMD	134.872.505.203
3	Pemda	12.706.041.993
4	Lainnya	22.948.227.952
	Jumlah	238.804.513.666

- Piutang Bunga sebesar Rp438.943.998.010 yang diklasifikasikan berdasarkan debitor, yaitu:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	BUMN	377.191.253.499
2	BUMD	34.097.076.536
3	Pemda	9.866.654.763
4	Lainnya (Channeling dan KUMK SUP 005)	17.789.013.212
	Jumlah	438.943.998.010

Piutang Kredit Program yang dilaporkan pada LKPP Tahun 2009 sebesar Rp2.000.988.665.721, tidak dilaporkan lagi pada LKPP Tahun 2010 karena untuk tunggakan KKOP Pangan MP 2000, Tunggakan Pengadaan KUT dan Dana Cadangan

KUT TP 1999/2000, tidak diakui lagi sebagai piutang lain-lain (berdasarkan pendapat dari KSAP), dan sebagian direklasifikasi menjadi aset lain-lain. Lihat Catatan 2.2.26.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih terkait piutang lainnya Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp53.567.541.189. Penyisihan piutang ini diterapkan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-12/PB/2011 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Kualitas dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Penerusan Pinjaman. Jumlah penyisihan piutang tersebut terdiri dari Penyisihan Bagian Lancar RDI sebesar Rp24.870.866.559, Penyisihan Piutang Bunga sebesar Rp2.145.238.965, serta Penyisihan Potensi Tunggal dapat ditagih sebesar Rp26.551.435.665.

- b. Piutang kepada 20 Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp11.137.384.987.276 merupakan total kewajiban 20 BDL kepada Pemerintah sampai dengan triwulan IV tahun 2009, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1) 15 BDL eks dana talangan Pemerintah	8.382.155.353.798	8.466.331.021.609
2) 5 BDL eks dana penjaminan Pemerintah	2.755.229.633.478	2.902.119.286.343
Jumlah	11.137.384.987.276	11.368.450.307.952

- 1). Piutang pada 15 BDL eks dana talangan Pemerintah sebesar Rp8.382.155.353.798 berasal dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Dana BLBI BDL yang di- <i>cessie</i> -kan	11.888.938.781.558	11.888.938.781.558
Dikurangi:		
- Pengembalian s.d. Desember 2006	(2.730.645.774.151)	(2.730.645.774.151)
- Pengembalian tahun 2007	(228.053.353.977)	(228.053.353.977)
- Pengembalian tahun 2008	(323.144.463.070)	(323.144.463.070)
- Pengembalian tahun 2009	(140.764.168.751)	(140.764.168.751)
- Pengembalian tahun 2010	(84.175.667.811)	-
Saldo	8.382.155.353.798	8.466.331.021.609

Dari 15 BDL, 12 BDL telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah cq. Kementerian Keuangan, 1 (satu) BDL yaitu Bank Umum Majapahit Jaya telah melaksanakan RUPS pembubaran Tim Likuidasi, dan 2 (dua) BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta dan PT Bank Industri.

Rincian Piutang 15 BDL lebih lengkap dapat dilihat pada **Daftar 16**.

- 2). Piutang pada 5 BDL Eks Dana Penjaminan sebesar Rp2.755.229.633.478 merupakan saldo penjaminan pemerintah terhadap 5 BDL yang diberikan melalui UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) dengan bank pembayar PT BNI (Persero), dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Total dana BLBI BDL yang di- <i>cessie</i> -kan	3.321.282.950.812	3.321.282.950.813
Dikurangi:		
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2006	(9.000.000.000)	(9.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2007	(28.500.000.000)	(28.500.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2008	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2009	(366.663.664.469)	(366.663.664.470)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2010	(146.889.652.865)	-
Saldo BLBI	2.755.229.633.478	2.902.119.286.343

- c. Piutang Transfer ke Daerah sebesar Rp359.541.843.144 terdiri dari lebih salur DBH Pajak sebesar Rp59.598.950.179, lebih salur DBH SDA sebesar Rp199.021.547.936, lebih salur diestimasi DBH SDA TA 2010 (Panas Bumi) sebesar Rp30.807.855.610, dan lebih salur diestimasi DBH Pajak 2010 sebesar Rp70.113.489.419.

Untuk Piutang akibat lebih salur Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Migas, Pertambangan Umum dan Kehutanan TA 2010 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1.	Lebih Salur DBH SDA Migas TA 2010	40.430.218.175
2.	Lebih Salur DBH SDA Pertambangan Umum TA 2010	4.791.734.751
3.	Lebih Salur DBH SDA Kehutanan TA 2010	153.799.595.010
Total		199.021.547.936

- d. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar Rp171.965.009.662 adalah Piutang Lain-lain yang berada di Kementerian Pertanian merupakan nilai stock Cadangan Benih Nasional (CBN) yang sementara digunakan oleh PT Sang Hyang Seri (SHS) sebanyak 22.735.121 kg dalam 4 (empat) komoditas. yang merupakan piutang pada Kementerian Pertanian.

Nilai stok Cadangan Benih Nasional (CBN) sebesar Rp171.965.009.662 termasuk nilai stok CBN yang rusak berdasarkan hasil cek fisik BPK TA 2010 pada gudang PT SHS, yaitu berupa Jagung Komposit CBN III tahun 2006 sebanyak 56.390 kg dengan harga Rp6.665/kg atau sebesar Rp375.839.350.

Pengembalian atas piutang tersebut bukan berupa penerimaan kas (PNBP) ke Kas Umum Negara (KUN) melainkan pengembalian berupa barang atau stok CBN yang dimaksudkan untuk didistribusikan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

*Investasi Jangka Pendek
BLU Rp30,75 miliar*

C.2.17. Investasi Jangka Pendek BLU

Jumlah Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp30.750.000.000 dan Rp11.770.000.000, merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam tahun 2011 berupa Deposito berjangka 12 bulan. Nilai Investasi Jangka Pendek tersebut berada di BLU pada Kementerian Pendidikan Nasional.

*Persediaan
Rp36,37 triliun*

C.2.18. Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp36.366.060.681.005 dan Rp36.606.824.405.660 dan merupakan nilai persediaan yang berdasarkan neraca K/L dan unit terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Persediaan	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Persediaan di K/L	33.071.754.378.769	32.986.275.378.751
Persediaan di BLU	457.683.029.189	303.087.546.746
Persediaan di BUN	2.836.623.273.047	3.317.461.480.163
Jumlah	36.366.060.681.005	36.606.824.405.660

Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada **Daftar 17**.

Persediaan di BUN per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.836.623.273.047 terdiri dari:

1. Persediaan pada BA 999.07 sebesar Rp175.307.190.305, merupakan nilai persediaan yang terdiri dari persediaan Cadangan Benih Nasional (CBN) yang belum disalurkan pada kelompok tani dan saat ini berada di gudang milik PT Sang Hyang Seri (Persero) sebanyak 4.987.295 kg

dengan harga perolehan terakhir masing-masing komoditas sebesar Rp74.943.240.305, dan persediaan CBN produk Tiran dari kegiatan Bantuan langsung Pengendalian Hama Terpadu (BL-PHT) yang masih disimpan oleh Dinas Pertanian di Kabupaten (belum disalurkan kepada kelompok tani) per 31 Desember 2010 sebesar Rp100.363.950.000.

2. Persediaan pada BA 999.08 sebesar Rp Rp2.661.316.082.742, terdiri dari:
 - a. Persediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum BULOG sebesar Rp2.531.993.053.040 yang berasal dari nilai semula sebesar Rp2.531.962.856.500 setara dengan quantum 460.362.373,28 dikalikan dengan HPB Tahun 2010 Rp5.500/Kg dan penambahan berdasarkan Hasil Reviu Itjen Kementerian Keuangan sebesar Rp30.196.540.
 - b. Persediaan pada pengguna dana BA BUN – Belanja Lain-lain sebesar Rp.129.323.029.702.

RDI/RPD Rp43,37 triliun

C.2.19. Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD)

Jumlah Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp43.367.037.927.876 dan Rp56.829.949.663.857 merupakan jumlah pinjaman pokok jangka panjang kepada Pemda, BUMD, dan BUMN yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. RDI/RPD ini merupakan perjanjian pinjaman/penerusan pinjaman yang ditandatangani sebelum tahun 2009. Berkurangnya saldo RDI/RPD per 31 Desember 2010 disebabkan adanya reklasifikasi ke Bagian Lancar, dan reklasifikasi ke Aset Lainnya terhadap tunggakan yang akan diselesaikan melalui restrukturisasi. Nilai sebesar Rp43.367.037.927.876 tersebut telah memperhitungkan penyisihan sebesar Rp217.924.813.708

Investasi sebesar Rp43.367.037.927.876 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. BUMN	40.610.349.242.668
2. BUMD	1.876.481.999.311
3. Pemda	365.826.153.594
4. Lainnya	732.305.346.013
Penyisihan	(217.924.813.708)
Jumlah	43.367.037.927.876

Rincian saldo RDI/RPD (termasuk bagian lancar) dapat dilihat pada **Daftar 18**.

Dana Bergulir
Rp3,89 triliun

C.2.20. Dana Bergulir

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp3.891.209.869.656 dan Rp5.447.163.620.088 merupakan dana Pemerintah yang disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat, dan lain-lain yang dikelola oleh K/L dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. Kementerian Perindustrian	3.469.232.868	5.554.685.931
2. Kementerian Kehutanan	466.591.360	-
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan	12.206.756.931	12.206.756.931
4. Kementerian Lingkungan Hidup	49.447.128.945	38.604.024.698
5. Kementerian Negara Koperasi dan UKM	2.113.145.137.627	1.750.277.381.147
6. Kementerian Negara Perumahan Rakyat	246.832.814.636	-
7. Kementerian Pekerjaan Umum	1.465.642.207.289	-
8. BUN	-	3.640.520.771.381
Jumlah	3.891.209.869.656	5.447.163.620.088

Dari Dana Bergulir sebesar Rp3.891.209.869.656 terdapat Dana Bergulir yang sumber pembiayaannya berasal dari BA 999.03 sebesar Rp2.056.665.021.925 dan disalurkan melalui BLU pada Kementerian Kehutanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Negara Koperasi dan KUKM.

Penjelasan masing-masing dana bergulir adalah:

1. Dana bergulir di Kementerian Perindustrian per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp3.469.232.868 dan Rp5.554.685.931 merupakan dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada pengusaha kecil yang dikelola oleh 15 LPT-Indag.
2. Dana Bergulir di Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2010 sebesar Rp 466.591.360 adalah dana bergulir yang dikelola oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.
3. Dana Bergulir di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp12.206.756.931 merupakan dana perguliran pada koperasi usaha bersama (KUB) pada 13 pelabuhan.
4. Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp49.447.128.945 dan Rp38.604.024.698 merupakan dana KLH yang ditempatkan di Bank Syariah Mandiri yang akan disalurkan kepada Usaha Ekonomi Lemah sebagai kredit untuk membiayai investasi di bidang lingkungan hidup.
5. Dana Bergulir di Kementerian Negara Koperasi dan UKM per 31 Desember 2010 Rp2.113.145.137.627 merupakan dana pemerintah yang disalurkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah melalui lembaga koperasi sebagai stimulan dalam pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Nilai tersebut termasuk Dana Bergulir yang disalurkan oleh BUN kepada Lembaga Pengelolaan Dana bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar Rp350.000.000.000, yang sebesar Rp295.810.000.000 masih berupa Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan.

Nilai yang disajikan tersebut berdasarkan hasil inventarisasi pihak independen atas perkembangan nilai dana bergulir sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu jumlah yang terdapat dalam rekening perguliran dan piutang yang diperkirakan dapat tertagih. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, bahwa seluruh dana bergulir harus diinventarisasi dan disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jumlah dana bergulir tersebut semula disajikan pada tahun 2007 sebesar Rp3.085.849.168.850 yang berasal antara lain dari belanja bantuan sosial, belanja subsidi, dan belanja modal dari APBN TA 2000 s.d. 2007 yang tidak jelas perlakuannya sebagai dana bergulir atau bantuan sosial sehingga perlu dilakukan koreksi pembukuan.

6. Dana Bergulir di Kementerian Negara Perumahan Rakyat per 31 Desember 2010 sebesar Rp246.832.814.636 merupakan dana bergulir untuk pembiayaan perumahan. Pembiayaan perumahan ini merupakan realokasi subsidi bunga kredit program untuk kredit kepemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh) .
7. Dana Bergulir di Kementerian Pekerjaan Umum per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.465.642.207.289 merupakan hak tagihan BLU BPJT kepada pihak ketiga khususnya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang telah diberikan pinjaman untuk dana uang ganti rugi pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol.
8. Dana Bergulir yang dikelola BUN pada LKPP Tahun 2009 merupakan dana yang berada Kas di Bank Umum Pengelolaan Dana Bergulir, Dana Lingkungan Bergulir, Dana bergulir KKPA, dan Pinjaman KUMK dari SU-005. Pada LKPP Tahun 2010, Kas di Bank Umum Pengelolaan Dana Bergulir disajikan sebagai Rekening Pemerintah Lainnya, karena sifatnya bukan digulirkan. Sedangkan Dana Lingkungan Bergulir, Dana bergulir KKPA, dan Pinjaman KUMK dari SU-005 disajikan sebagai Aset Lainnya.

Investasi Non Permanen Lainnya Rp98,46 miliar

C.2.21. Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp98.464.787.895 dan Rp1.297.107.854.426 merupakan investasi yang berada di beberapa K/L dan BUN, yaitu (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
K/L	49.464.787.895	60.093.772.761
BUN	49.000.000.000	1.237.014.081.665
Jumlah	98.464.787.895	1.297.107.854.426

Investasi Non Permanen Lainnya di K/L per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp49.464.787.895 dan Rp60.093.772.761 berada pada Kementerian Perindustrian.

Investasi Non Permanen pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp49.464.787.895 merupakan pemberian keringanan dalam pembelian peralatan dan mesin untuk mempertahankan keberadaan dan mengembangkan potensi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

Nilai Investasi Non Permanen pada BUN terdapat pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (Kementerian Keuangan) sebesar Rp49.000.000.000 bersumber dari BA 999.03. Investasi tersebut berupa penanaman dalam proyek yang dialihkan kepada pihak ketiga yang berasal dari dana bergulir dan pendapatan PIP yang digulirkan kembali. Jumlah senilai Rp29.000.000.000 merupakan pemberian pinjaman modal kerja kepada PT Nindya Karya, sedangkan Rp20.000.000.000 merupakan pemberian pinjaman modal kerja kepada PT Wijaya Karya.

Investasi Non Permanen Lainnya di BUN per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp0 dan Rp1.237.014.081.665. Investasi tersebut merupakan investasi oleh BLU PIP di BLU BPJT. Pada tahun 2010, investasi tersebut telah dikembalikan oleh BLU BPJT kepada BLU PIP. Dana yang dikembalikan tersebut belum digulirkan lagi oleh BLU PIP, sehingga dananya disajikan sebagai Aset Lainnya (Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan).

PMN Rp564,09 triliun

C.2.22. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp564.087.107.302.153 dan Rp555.416.111.508.201 merupakan nilai penyertaan modal negara pada BUMN, Non BUMN, BHMN, dan Lembaga Internasional dengan jumlah (dalam Rp):

PMN	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. BUMN	523.294.056.365.721	513.573.807.703.885
2. BHMN	2.193.481.021.163	1.906.624.988.050
3. Non BUMN	3.969.599.282.340	3.753.910.818.065
4. Lembaga Internasional	34.629.850.632.929	36.181.747.998.201
5. Badan Usaha Lainnya	120.000.000	20.000.000
Jumlah	564.087.107.302.153	555.416.111.508.201

PMN pada BUMN

1. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp523.294.056.365.721 dan Rp513.573.807.703.885 disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*), yaitu dihitung dari penjumlahan total ekuitas masing-masing BUMN setelah dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN yang bersangkutan. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2010 tersebut merupakan nilai PMN

pada 146 BUMN dengan status laporan keuangan sebagai berikut:

Status Laporan Keuangan	Jumlah BUMN	Jumlah (Rp)
<i>Audited</i> 2010	121	507.294.528.875.527
Unaudited 2010	20	15.946.163.497.441
Prognosa 2010	2	(36.615.242.400)
Prognosa 2009	1	134.901.000.000
<i>Audited</i> 2009	1	25.465.869.515
<i>Audited</i> 2005	1	(70.387.634.362)
Jumlah	146	523.294.056.365.721

Rincian PMN pada BUMN dapat dilihat pada **Daftar 19.A**.

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2010 tersebut termasuk Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada 25 BUMN dengan nilai sebesar Rp47.527.099.986.351. (**Daftar 19.B**)

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2010 termasuk PMN pada 4 (empat) BUMN yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Sarana Multigriya Financial, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003 dan Pasal 22 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2006, LKPP dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara yang memuat informasi lebih rinci tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih yang disajikan dalam **Daftar 36**.

PMN pada BHMN

- PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) merupakan nilai ekuitas pada BHMN dengan rincian sebagai berikut:

BHMN	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)
a. Institut Pertanian Bogor (IPB)	1.101.497.542.000	1.207.033.824.203
b. Universitas Airlangga	1.188.424.915.202	682.983.555.507
c. BP MIGAS	(96.441.436.039)	16.607.608.340
Jumlah	2.193.481.021.163	1.906.624.988.050

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), seluruh penyelenggara pendidikan harus berbentuk BHP, untuk itu seluruh PT BHMN harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHP sesuai ketentuan UU tersebut. Namun, sebelum dilakukannya penyesuaian perubahan bentuk dan tata kelola menjadi BHP, telah ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010 dalam sidang putusan uji materi Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang memutuskan antara lain bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yang memberikan landasan hukum penyelenggara pendidikan dalam bentuk BHMN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan juga menyatakan UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menetapkan antara lain PT BHMN ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah

yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menetapkan perubahan PT BHMN menjadi instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU), namun pelaksanaan pengalihan status tersebut masih memerlukan langkah-langkah, yaitu:

- Penetapan melalui Peraturan Pemerintah mengenai PT BHMN Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Pendidikan Indonesia menjadi instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU.
- Penetapan pengalihan seluruh kekayaan masing-masing PT BHMN menjadi kekayaan instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU.

Mengingat penerapan pelaksanaan PPK BLU masih memerlukan proses lebih lanjut, maka selama masa transisi nilai penyertaan negara pada PT BHMN tetap disajikan dalam laporan keuangan BA 999.03 sebesar nilai aktiva bersih.

Ikhtisar Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya disajikan pada **Daftar 37**.

PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN)

3. PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN) sebesar Rp3.969.599.282.340, merupakan penyertaan pemerintah pada perusahaan dengan prosentase kepemilikan kurang dari 51%. Nilai penyertaan pada perusahaan minoritas dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50% disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost method*).

Perubahan nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN per 31 Desember 2010 disebabkan oleh:

- a. Perubahan total ekuitas pada Non-BUMN dengan kepemilikan Pemerintah antara 20% sampai dengan 50%, karena perhitungan Pemerintah menggunakan metode ekuitas;
- b. Penjualan kepemilikan Pemerintah pada PT Intirub dan PT Kertas Blabak;
- c. Adanya perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar USD. Perubahan kurs tengah BI berpengaruh pada kepemilikan Pemerintah pada PT Freeport dan PT Indonesia Asahan Aluminium. Pada kedua perusahaan tersebut, Laporan Keuangan disajikan menggunakan mata uang USD, sehingga harus dilakukan konversi ke dalam mata uang Rupiah, untuk menghitung nilai kepemilikan Pemerintah;
- d. Adanya perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar Ringgit Malaysia. Perubahan kurs tengah BI untuk Ringgit Malaysia berpengaruh pada kepemilikan di Asean Bintulu Fertilizer, mengingat nilai kepemilikan Pemerintah disajikan pada mata uang Ringgit Malaysia;
- e. Terdapat Non-BUMN yang statusnya berubah menjadi BUMN, yang diakibatkan meningkatnya kepemilikan Pemerintah, yaitu PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Semen Kupang. Peningkatan kepemilikan Pemerintah pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia disebabkan adanya hibah saham dari Bank Indonesia yang dilakukan pada tahun 2010.
- f. Penambahan PT Waskita Karya sebagai Non-BUMN. Pada tahun 2010, Pemerintah melakukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi pada PT Waskita Karya dengan cara penerbitan saham baru. Saham baru yang diterbitkan tersebut diambil bagian secara penuh oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dengan total dana yang disetorkan sebesar Rp474.992.100.000. Setelah proses tersebut, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) memiliki saham PT Waskita Karya sebesar 99%, sedangkan Pemerintah memiliki kepemilikan pada PT Waskita Karya sebesar 1%. Dengan proses tersebut PT

Waskita Karya selanjutnya dikategorikan sebagai Non-BUMN.

Pada non-BUMN dengan kepemilikan Negara di bawah 20%, nilai penyertaan negara pada Non-BUMN tersebut adalah tetap, sepanjang tidak ada penambahan penyertaan yang dilakukan oleh Pemerintah, mengingat perhitungan kepemilikan negara menggunakan metode biaya. Berdasarkan hal tersebut, nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN tersebut tidak terpengaruh pada status laporan keuangan non-BUMN tersebut, atau perubahan ekuitas pada Non-BUMN tersebut. Rincian PMN pada perusahaan minoritas dapat dilihat pada **Daftar 20**.

*Penyertaan pada
Lembaga Internasional*

4. Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia dalam rangka keanggotaan pada beberapa organisasi/lembaga keuangan internasional/regional baik yang telah disetor maupun yang masih dalam bentuk *promissory notes* sampai dengan 31 Desember 2010. PMN ini dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2010. Rincian PMN pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada **Daftar 21**.

Sampai dengan 31 Desember 2010, dari total penyertaan (kuota) pada Lembaga Internasional sebesar Rp34.629.850.632.929, termasuk penyertaan dalam bentuk *promissory notes* sebesar Rp25.427.026.825.757 di antaranya sebesar Rp25.329.806.542.486 kepada *International Monetary Fund* (IMF). Rincian *promissory notes* per Lembaga Internasional adalah sebagai berikut:

No.	Nama Lembaga	Jumlah (Rp)
1.	International Monetary Fund	25.329.806.542.486
2.	International Bank for Reconstruction and Development	79.174.191.965
3.	International Development Association	5.173.139.668
4.	Multilateral Investment Guarantee Agency	10.204.946.838
5.	Common Fund for Commodities	2.668.004.800
	Jumlah total	25.427.026.825.757

Penyertaan dalam bentuk *Promissory Notes* disajikan sebagai bagian utang. Lihat Catatan **C.2.35** dan Catatan **C.2.41**.

*PMN pada Badan Usaha
Lainnya*

5. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya sebesar Rp120.000.000 merupakan Investasi Permanen Pemerintah pada perusahaan penerbit SBSN. Perusahaan penerbit SBSN terdiri atas 2 (dua) perusahaan, yaitu Perusahaan Penerbit SBSN I dan Perusahaan Penerbit SBSN. Nilai kepemilikan Negara pada masing-masing perusahaan tersebut sebesar Rp 10.000.000. Kenaikan nilai penyertaan pada Badan Usaha Lainnya pada tahun 2010 disebabkan adanya pendirian perusahaan penerbit SBSN yang baru, yaitu Perusahaan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II (SBSN II) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II dengan nilai penyertaan Rp100.000.000.

*Investasi Permanen BLU
Rp6,64 miliar*

C.2.23. Investasi Permanen BLU

Saldo Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 yang berjumlah Rp6.637.194.500 dan Rp6.637.194.500 merupakan penyertaan modal oleh BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) pada PT Senayan Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10%.

Investasi Permanen
Lainnya Rp94,96 triliun**C.2.24. Investasi Permanen Lainnya**

Jumlah Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp94.959.618.306.997 dan Rp118.042.412.825.796 merupakan nilai PMN pada badan-badan lainnya yang disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*). Rincian Investasi Permanen Lainnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. Bank Indonesia	68.798.801.000.000	93.507.343.000.000
2. Otorita Batam	14.058.084.887.589	14.108.503.023.102
3. LPS	11.298.734.420.000	10.363.639.727.000
4. Taman Mini Indonesia Indah *)	33.041.277.896	29.335.529.796
5. Otorita Asahan	737.240.235.575	449.482.699
6. BP Gedung Manggala Wanabakti	23.634.260.978	23.616.276.978
7. Yayasan Gedung Veteran	10.082.224.959	9.525.786.221
Jumlah	94.959.618.306.997	118.042.412.825.796

Keterangan:

*) Investasi Permanen Lainnya pada TMI merupakan nilai net ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2010 setelah dikurangi dengan nilai Tanah sebesar Rp771.500.000 karena telah disajikan pada Laporan Keuangan Sekretariat Negara.

Aset Tetap Rp1.184,30
triliun**C.2.25. Aset Tetap**

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp1.184.301.167.405.585 dan Rp979.000.257.110.824 merupakan nilai aset tetap berdasarkan neraca K/L dan Neraca BUN. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dan belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan).

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Tanah	565.920.545.473.098	468.627.411.873.568
Peralatan dan Mesin	150.868.673.195.411	145.762.742.351.120
Gedung dan Bangunan	137.042.921.053.205	123.197.516.471.880
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	276.682.171.786.874	186.921.467.820.342
Aset Tetap Lainnya	7.748.128.178.913	5.885.891.367.838
Konstruksi Dalam Pengerjaan	46.038.727.718.084	48.605.227.226.076
Jumlah	1.184.301.167.405.585	979.000.257.110.824

Dalam nilai Aset Tetap per 31 Desember 2010 tersebut termasuk Aset Tetap yang dikelola oleh BLU sebesar Rp133.580.273.750.513, dengan rincian:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Tanah	107.957.793.253.986	95.535.411.805.193
Peralatan dan Mesin	8.490.665.409.433	4.966.017.559.406
Gedung dan Bangunan	13.083.319.031.365	7.876.117.493.888
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	968.311.649.972	713.964.367.457
Aset Tetap Lainnya	429.004.262.220	265.921.678.218
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.651.180.143.537	888.635.762.510
Jumlah	133.580.273.750.513	110.246.068.666.672

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp205.300.910.294.761 atau 20,97% dari nilai per 31 Desember 2009. Kenaikan nilai Aset Tetap ini terutama karena koreksi berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian aset tetap yang dilakukan oleh K/L, perolehan dari realisasi Belanja Modal TA 2010, aset tetap yang diperoleh dari dana non APBN (hibah), dan lainnya.

Sampai saat ini, telah dilakukan inventarisasi dan penilaian atas nilai wajar Aset Tetap pada seluruh K/L dengan tingkat penyelesaian 99,97 persen. Hasil inventarisasi dan penilaian tersebut telah dijadikan sebagai dasar koreksi atas nilai aset tetap pada sebagaimana telah dijelaskan di atas. Lihat **Catatan Penting Lainnya**.

Nilai Aset Tetap yang disajikan dalam LKPP merupakan konsolidasian dari LKKL dan LKBUN, yang telah dilakukan rekonsiliasi dengan Laporan BMN dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Perbedaan nilai antara LKKL dengan LBMN disajikan pada **Catatan Penting Lainnya**.

Rincian daftar Aset Tetap per K/L dan BUN disajikan pada **Daftar 22**.

Aset Lainnya
Rp278,2 triliun

C.2.26. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp278.197.482.029.092 dan Rp175.469.125.391.757 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Tagihan Penjualan Angsuran	1.377.994.323	217.273.759
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	38.234.179.361	47.520.521.456
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	212.609.665.200	83.647.500.000
Penerusan Pinjaman	2.070.158.163.656	78.561.103.000
Aset Tak Berwujud	9.351.448.050.646	7.033.044.402.391
Aset yang Dibatasi Penggunaannya	40.987.103.326.394	34.471.434.956.330
Dana Kelolaan BLU	18.459.000.085.715	5.565.054.549.000
Dana Penjaminan	71.135.792.697	172.808.669.214
Aset Lain-lain	207.006.414.771.100	128.016.836.416.607
Jumlah	278.197.482.029.092	175.469.125.391.757

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

TPA Rp1,38 miliar

Saldo TPA per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp1.377.994.323 dan Rp217.273.759 merupakan saldo TPA yang berada di (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. Kementerian Perhubungan	-	216.000.000
2. Kementerian Negara PPN/BAPPENAS	243.500	1.273.759
3. Kementerian Negara KUKM	1.377.750.823	-
Jumlah	1.377.994.323	217.273.759

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan TGR Rp38,23 miliar

Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp38.234.179.361 dan Rp47.520.521.456 merupakan saldo Tagihan TGR yang berada di K/L sebesar Rp38.219.701.433 dan di BUN sebesar Rp14.477.928. Rincian Tagihan TGR pada K/L dapat dilihat pada **Daftar 23**.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

*Kemitraan dengan Pihak
Ketiga Rp212,61 miliar*

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp212.609.665.200 dan Rp83.647.500.000 merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	128.962.165.200	-
2. Kementerian Negara PPN/ BAPPENAS	83.647.500.000	83.647.500.000
Jumlah	212.609.665.200	83.647.500.000

Penerusan Pinjaman

*Penerusan Pinjaman
Rp2,07 triliun*

Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp2.070.158.163.656 dan Rp78.561.103.000 merupakan total pokok pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca, yang berasal dari perjanjian penerusan pinjaman yang ditandatangani mulai tahun 2009. Penerusan Pinjaman tersebut terdiri atas Penerusan Pinjaman kepada BUMN sebesar Rp2.062.414.032.959 dan kepada pemerintah daerah sebesar Rp18.146.935.540 dikurangi penyisihan sebesar Rp10.402.804.843.

Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud
Rp9,35 triliun*

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp9.351.448.050.646 dan Rp7.033.044.402.391 merupakan aset yang berupa *software*, biaya survei/penelitian, dan hak paten yang berada di K/L dan BUN. Rincian Aset Tak Berwujud pada K/L dapat dilihat pada **Daftar 24**.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya

*Dana yang Dibatasi
Penggunaannya Rp40,99
triliun*

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp40.987.103.326.394 dan Rp34.471.434.956.330, terdiri atas (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. Kementerian Luar Negeri	366.254.294.334	344.790.485.660
2. Kementerian Pertahanan	2.549.198.826.943	1.065.282.380.931
3. Kementerian ESDM	6.225.158.015	15.156.151.643
4. Kementerian Agama	2.617.237.058.588	1.549.610.795.295
5. Kementerian Nakertrans	-	244.136.650.000
6. Kementerian Kehutanan	5.996.376.112	17.693.469.394
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan	87.380.711.730	96.428.953.601
8. Kementerian Lingkungan Hidup	23.480.476.922	15.268.063.284
9. BUN	35.331.330.423.750	31.123.068.006.522
Jumlah	40.987.103.326.394	34.471.434.956.330

Masing-masing Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp366.254.294.334 merupakan saldo kas besi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-2.18/424/0182 tanggal 13 Januari 1992 untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian yang mungkin timbul, terutama untuk membiayai perwakilan apabila remise (*cash supply*) terlambat dan keperluan lainnya yang penggunaannya harus mendapat persetujuan/instruksi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri.

2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp2.549.198.826.943 merupakan dana devisa berupa L/C yang belum dicairkan oleh pihak ketiga.
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian ESDM sebesar Rp6.225.158.015 merupakan dana penjaminan berupa uang deposito untuk perusahaan-perusahaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
4. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Agama sebesar Rp2.617.237.058.588 terdiri dari:
 - a. Dana Abadi Umat (DAU) sebesar Rp1.739.384.628.575 yang merupakan dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan haji dan dari sumber lain sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 1999. DAU dialokasikan untuk kemaslahatan umat Islam di bidang pendidikan, dakwah, pembangunan sarana dan prasarana ibadah serta bidang penyelenggaraan haji.
 - b. Aset bersih Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp877.852.430.013. Aset bersih sebesar Rp877.852.430.013 merupakan total seluruh aset BPIH berupa aset lancar, aset terikat, dan aset tetap sebesar Rp28.677.106.616.986 dikurangi total kewajiban sebesar Rp27.799.254.186.973. BPIH mengelola setoran awal hingga adanya pelunasan BPIH sebagai akibat adanya keputusan keberangkatan jemaah atau adanya keputusan dari jemaah itu sendiri untuk menunda atau membatalkan kepesertaan dalam program BPIH atau adanya keputusan dari pejabat yang berwenang.
5. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp0. Pada neraca per 31 Desember 2009 nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebesar Rp244.136.650.000 yang merupakan rekening penjaminan berupa uang jaminan dari Perusahaan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS/JTKI) dan jaminan dari Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta. Pada tahun 2010, seluruh rekening telah ditutup dan disetorkan kepada pihak yang bersangkutan.
6. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp5.996.376.112 merupakan Deposito Terbeku Dana Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS).
7. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp87.380.711.730 merupakan dana pada koperasi usaha bersama di 13 pelabuhan.
8. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp23.480.476.922 merupakan dana yang berada di rekening untuk menampung penerimaan awal dari programan *Debt for Nature Swap (DNS)* dan menampung alokasi biaya peningkatan kemampuan kualitas Sumber Daya Manusia dalam memahami pengelolaan lingkungan hidup dan pembiayaan di sektor lingkungan hidup.
9. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN sebesar Rp35.331.330.423.750, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)
Rekening Retur	410.881.635.675	-
Rekening Cadangan	31.077.734.977.042	24.266.868.283.889
<i>Escrow</i> Bank Mutiara	155.364.266.014	162.431.776.280
Aset Bersih Bapertarum	3.551.726.799.482	2.756.006.261.663
999.08	135.622.745.537	-
999.04	-	7.238.283.087
Rekening Khusus	-	3.930.523.401.603
Jumlah	35.331.330.423.750	34.471.434.956.330

Rincian masing-masing dana yang dibatasi penggunaannya pada BUN adalah:

- a. Rekening Retur sebesar Rp410.881.635.675 merupakan saldo Rekening Retur Kuasa

BUN Pusat untuk menampung retur SP2D karena adanya kesalahan rekening pihak penerima. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat dapat dilihat pada **Daftar 25 A**.

- b. Rekening Cadangan sebesar Rp31.077.734.977.042 merupakan rekening yang digunakan untuk menampung sisa anggaran belanja yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Rekening Cadangan Reboisasi	4.546.878.110.596	4.580.366.551.577
Rekening Cadangan Subsidi/PSO	16.767.875.871.035	8.315.359.876.292
Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil	8.374.050.605.673	9.013.541.234.519
Rekening Cadangan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengalihan Minyak Tanah ke LPG	1.388.930.389.738	2.357.600.621.501
Jumlah	31.077.734.977.042	24.266.868.283.889

- **Rekening Cadangan Reboisasi** sebesar Rp4.546.878.110.596, adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa dana reboisasi setiap tahun dari bagian pemerintah pusat setelah dikurangi alokasi ke Kementerian Kehutanan. Dana yang terdapat dalam rekening cadangan reboisasi digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi seperti Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan No. 06.1/PMK.01/2007 dan No. 02/Menhut-II/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.
- **Rekening Cadangan Subsidi**, adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa pagu DIPA subsidi/PSO yang belum dapat dicairkan karena belum didukung oleh bukti-bukti yang sah. Pencairan dana yang terdapat dalam Rekening Cadangan Subsidi/PSO dibatasi sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam PMK No. 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara, kecuali rekening cadangan Subsidi/PSO yang berkaitan dengan BULOG pencairannya menunggu hasil audit BPK.

Rincian Rekening Cadangan Subsidi adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Subsidi Premium	2.113.237.391.817	672.697.576.336
Subsidi Minyak Tanah	595.985.914.429	360.903.902.457
Subsidi Minyak Solar	974.289.783.407	509.086.127.020
Subsidi LPG	1.043.741.129.751	596.428.709.593
Subsidi Listrik	271.474.935.307	-
Subsidi Pangan	4.234.526.934.429	1.018.854.936.573
Subsidi Benih	1.457.523.458.172	577.464.581.022
Subsidi Pupuk	5.067.111.215.930	4.238.281.790.561
Subsidi Minyak Goreng	-	-
Subsidi PELNI	50.000.000.000	150.000.000.000
Subsidi PT KAI	134.350.003.664	133.750.000.000
Subsidi PT Pos dan Giro	43.750.000.000	43.750.000.000
PSO Perum BULOG	14.061.909.276	14.061.909.276
Subsidi Bunga Kredit Program	767.823.194.853	-
Jumlah	16.767.875.871.035	8.315.359.876.292

Subsidi Bunga Kredit Program merupakan Dana Cadangan pada BA 999.07 sebesar Rp767.823.194.853 yang berasal dari pengisian *escrow account* oleh Pemerintah

untuk subsidi bunga kredit program dari 24 April 2000 sampai dengan 23 Desember 2003 sebesar Rp4.563.465.585.400, dikurangi tagihan BI sebesar Rp3.795.642.390.547 yang telah dibayarkan oleh Pemerintah.

Lihat **Catatan B.2.2.1.5**.

- **Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil** sebesar Rp8.374.050.605.673 adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa penerimaan sumber daya alam setiap tahun yang berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan yang belum disalurkan kepada Pemerintah Daerah karena belum teridentifikasi daerah penghasilnya. Rekening sebesar Rp8.374.050.605.673 ini seluruhnya merupakan Cadangan DBH.
- **Rekening Cadangan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengalihan Minyak Tanah ke LPG** sebesar Rp1.388.930.389.738 merupakan rekening Cadangan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengalihan Minyak Tanah ke LPG yang akan dicairkan untuk membayar Pertamina apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

Rincian masing-masing rekening cadangan disajikan pada **Daftar 25 B**.

- c. Rekening *escrow* sebesar Rp155.364.266.014 adalah Rekening *escrow* pada rekening No. 1022-000320250-001 atas nama Dirjen Anggaran yang berada di Bank Mutiara (dulu Bank Century) yang setara dengan USD17,279,976.20. Rekening tersebut digunakan untuk menampung hibah dari Pemerintah Amerika Serikat.
- d. Aset Bapertarum sebesar Rp3.551.726.799.482 merupakan nilai ekuitas (kekayaan bersih) Bapertarum.
- e. Dana sebesar Rp135.622.745.537 pada BA 999.08 merupakan dana devisa berupa L/C yang belum dicairkan oleh pihak ketiga pada Kementerian Pertahanan yang sumber dananya berasal dari BA 999.08.

Pada LKPP Tahun 2009, Rekening Khusus yang merupakan rekening khusus Pemerintah di BI disajikan pada Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Pada LKPP Tahun 2010 ini, Rekening Khusus direklasifikasi menjadi bagian dari Rekening Kas BUN di BI.

Dana Kelolaan BLU Yang Belum Digulirkan/Disalurkan

*Dana Kelolaan BLU yang
Belum Digulirkan
Rp18,46 triliun*

Dana Kelolaan BLU sebesar Rp18.459.000.085.715 merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga, yang terdiri:

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. Kementerian Keuangan	12.878.500.000.000	3.315.400.000.000
2. Kementerian Kehutanan	2.014.116.107.640	2.014.582.699.000
3. Kementerian Koperasi dan UKM	295.810.000.000	235.071.850.000
4. Kementerian Perumahan Rakyat	2.436.216.185.364	-
5. Kementerian Pekerjaan Umum	834.357.792.711	-
Jumlah	18.459.000.085.715	5.565.054.549.000

Dana Kelolaan BLU yang berada di Kementerian Keuangan sebesar Rp12.878.500.000.000 merupakan dana yang ada di BLU PIP yang disimpan pada rekening giro dan deposito sebagai berikut:

No.	Nama Bank	Jumlah (Rp)
1.	Giro di Bank Mandiri	500.000.000
2.	Deposito Bank Mandiri	1.198.000.000.000
3.	Deposito Bank BRI	413.500.000.000
4.	Deposito Bank Syariah BRI	55.000.000.000
5.	Deposito Bank Bukopin	750.000.000.000
6.	Deposito Bank Jabar Banten	1.685.500.000.000
7.	Deposito Bank BNI	1.300.000.000.000
8.	Deposito Bank Syariah Mandiri	100.000.000.000
9.	Deposito Bank BTN	3.710.000.000.000
10.	Deposito Bank Muamalat	52.000.000.000
11.	Deposito Bank BTN	3.614.000.000.000
Jumlah		12.878.500.000.000

Dana Penjaminan

Dana Penjaminan
Rp71,14 miliar

Dana Penjaminan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp71.135.792.697 dan Rp172.808.669.214 merupakan dana penjaminan yang berada Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang dikelola oleh perusahaan penjamin, yaitu Perum Jaminan Kredit Indonesia.

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain Rp207,01 triliun

Aset Lain-lain sebesar Rp207.006.414.771.100 berdasarkan instansi/unit terkait dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. K/L	56.966.506.583.499	48.858.931.604.569
2. BA BUN 999.03	1.000.000.000.000	-
3. BA BUN 999.04	2.934.591.997.850	1.831.854.601.991
4. BA BUN 999.08	30.415.353.808	95.341.030.453
5. PT PPA (Persero)	2.614.411.741.232	2.863.675.218.429
6. Aset PT PPA yang sudah dikembalikan ke Menteri Keuangan	1.749.873.770.941	1.854.973.326.509
7. Tim Koordinasi	29.203.047.197.602	30.684.557.738.627
8. Aset KKKS	68.224.330.326.991	13.786.901.149.851
9. Aset eks Pertamina	44.283.237.799.177	28.040.601.746.178
Jumlah	207.006.414.771.100	128.016.836.416.607

Penjelasan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

- Aset Lain-lain yang berada di K/L sebesar Rp56.966.506.583.499 diantaranya berupa:
 - Piutang uang pengganti kerugian negara di Kejaksaan Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum diselesaikan sebesar Rp11.746.951.479.945.
 - Piutang PNB di Kementerian ESDM sebesar Rp7.908.591.570.983 dan diantaranya sebesar Rp7.072.717.975.019 terdiri dari Rp1.649.151.709.341 dan USD603.221.659,66 ekuivalen Rp5.423.566.265.679 merupakan piutang PNB periode 2001-2007 yang berasal dari 6 (enam) kontraktor batubara Generasi I dan telah diaudit oleh Tim BPKP. Sampai saat ini, piutang tersebut belum dapat ditagih penuh karena perusahaan tambang batubara dimaksud masih menahan setoran ini sebagai potongan atas restitusi pajak (PPN) yang harus dibayar oleh Pemerintah pada

periode tersebut.

- Aset pada Kementerian Diknas sebesar Rp13.409.756.256.271 yang merupakan BMN yang akan diserahkan ke Pemda sebesar Rp5.912.917.025.353 dan *Block Grant* Dana BOS sebesar Rp7.082.164.434.949.
- Kementerian Kesehatan sebesar Rp8.867.996.267.030 yang merupakan BMN yang akan diserahkan ke Pemda, dan BMN yang berasal dari dana bantuan sosial (*block grant* dan BOS) sebesar Rp7.082.164.434.949.
- Kementerian Luar Negeri sebesar Rp80.077.829.666 merupakan aset lain-lain yang bersumber dari penggunaan Uang Persediaan oleh Satker Perwakilan di Luar Negeri yaitu antara lain untuk keperluan pinjaman sementara untuk pegawai/diplomat yang baru bertugas di Perwakilan (Beban Pusat Persekot Resmi dan Beban Perjalanan), dan keperluan kegiatan mendesak oleh instansi lain maupun internal Kemenlu/perwakilan.
- Dana Hutan Tanaman Industri, Dana Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai, Dana Kredit Usaha Persuteraan Alam dan Dana Kredit Usaha Hutan Rakyat di Kementerian Kehutanan sebesar Rp1.891.868.394.313.
- Piutang macet di beberapa K/L yang penagihannya dialihkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
- Aset Tetap yang sudah rusak berat dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintahan;
- Aset Tetap milik K/L yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;

Rincian Aset Lain-lain di K/L disajikan pada **Daftar 26**.

2. Aset lain-lain pada BA 999.03 berupa *endowment fund* (Dana Pendidikan Nasional) sebesar Rp1.000.000.000.000 yang ada di BLU PIP-Kementerian Keuangan.
3. Aset Lain-Lain BA BUN 999.04 sebesar Rp2.934.591.997.851 yaitu nilai bruto sebesar Rp24.365.985.778.115 dikurangi dengan penyisihan sebesar Rp21.431.393.780.264. Rincian Aset lain-lain pada BA 999.04 adalah sebagai berikut:

- Piutang Jangka Panjang sebesar Rp2.429.422.180.129 yang terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. KUMK	2.379.780.000.000
2. KKPA Bagi Hasil Bank Muamalat	9.000.000.000
3. Dana Induk Lingkungan	52.850.331.786
Penyisihan piutang tidak tertagih	(12.208.151.660)
Jumlah	2.429.422.180.129

Pada LKPP Tahun 2009, KUMK, KKPA, dan Dana Induk Lingkungan tersebut disajikan sebagai Dana Bergulir. Pada LKPP Tahun 2010 ini, dana tersebut direklasifikasi menjadi Aset Lainnya karena tidak memenuhi syarat sebagai Dana Bergulir.

- Aset Lainnya RDI sebesar Rp345.363.088.819 (Rp20.978.561.957.346 (bruto) di kurangi penyisihan sebesar Rp20.633.198.868.527) berasal dari seluruh tunggakan yang akan diselesaikan melalui restrukturisasi dan piutang yang tertunggak lebih dari satu tahun per tanggal neraca (sebelumnya disajikan dalam Investasi Jangka Panjang Non Permanen) sebesar Rp17.625.840.907.468,50, tunggakan dalam proses Penyertaan Modal Negara di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebesar Rp1.407.521.061.647,42, tunggakan macet yang terdiri dari tunggakan BBO/BBKU/BDL sebesar Rp1.833.881.892.394,87, tunggakan Eks Timor Timur sebesar Rp128.340.000,00, dan tunggakan koperasi/proyek sebesar Rp111.189.755.835,95. Aset Lainnya RDI telah memperhitungkan penyisihan tidak

tertagih sebesar Rp20.633.198.868.527.

- Aset Lainnya Kredit Program Non Subsidi sebesar Rp159.806.728.903 (Rp945.793.488.982 (bruto) dikurangi penyisihan sebesar Rp785.986.760.079) terdiri atas:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. PIR Perkebunan	353.946.774.003
2. UPP Perkebunan	327.598.307.141
3. Peternakan	97.285.772.443
4. Kredit Listrik Pedesaan	2.066.512.000
5. Pengembangan Pendidikan Akuntansi	5.270.305.000
6. Dana Cadangan Risiko	94.749.242.712
7. Dana Jaminan Ulang	45.937.046.227
8. Dana Kelolaan	4.117.066.194
9. Dana Risiko	14.822.463.262
Penyisihan	(785.986.760.079)
Jumlah	159.806.728.903

Pada LKPP Tahun 2009 hak tagih PIR perkebunan, UPP perkebunan, hak tagih peternakan, hak tagih kredit listrik pedesaan, dan Pengembangan Pendidikan Akuntansi disajikan sebagai Piutang Lain-lain.

4. Aset Lain-lain yang berasal dari Bagian Anggaran 999.08 sebesar Rp30.415.353.808 berada di beberapa K/L atau lembaga sebagai berikut (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. Kementerian Pertanian	550.074.000	-
2. Kementerian Perhubungan	9.403.159.995	-
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	79.553.843.093
4. LPP TVRI	343.084.000	-
5. LPP RRI	4.352.223.463	20.375.010
6. Otorita Batam	15.766.812.350	15.766.812.350
Jumlah	30.415.353.808	95.341.030.453

5. Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero) sebesar Rp2.614.411.741.232 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang masih dikelola PT PPA (Persero) menunggu untuk dijual dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara sebagai PNPB. Nilai aset tersebut merupakan nilai pengalihan eks BPPN ke Menteri Keuangan. Rincian Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA disajikan pada **Daftar 27**.
6. Aset lain-lain eks PT PPA sebesar Rp1.749.873.770.941 merupakan aset eks PT PPA yang masih berada di Kementerian Keuangan setelah perjanjian PT PPA tahap pertama diselesaikan.

Mutasi aset selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Aset	SALDO AWAL 2010		MUTASI 2010		SALDO AKHIR 2010	
		Unit	Rp	Unit	Rp	Unit	Rp
1	Aset Kredit	314	183.054.001.193	(20)	(2.583.244)	294	183.051.417.949
2	Aset Properti	3.291	1.628.373.331.426	(112)	(100.698.269.706)	3.179	1.527.675.061.720
3	Surat Berharga	9	16.657.242.209	0	-	9	16.657.242.209
4	Aset Saham Non Bank	15	3.460.850.371	6	19.029.198.693	21	22.490.049.064
TOTAL		3.629	1.831.545.425.199	(126)	(81.671.654.258)	3.503	1.749.873.770.941

7. Aset Lain-lain yang berasal dari Tim Koordinasi sebesar Rp29.203.047.197.602 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah (belum bersih), sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (Persero). Termasuk di dalamnya adalah tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebesar Rp21.066.535.795.763 yang merupakan piutang BPPN yang timbul sehubungan dengan

PKPS kepada perusahaan induk yang didirikan oleh eks Pemegang Saham Pengendali (PSP) BTO dan BBO dalam rangka penyelesaian terhadap kewajiban eks PSP tersebut berdasarkan perjanjian MSAA, MRNIA, dan piutang BPPN kepada eks PSP BBKU dan BTO II dalam perjanjian APU.

Sampai dengan 31 Desember 2010 telah dilakukan inventarisasi terhadap aset eks BPPN dengan hasil sebagai berikut:

JENIS ASET	JUMLAH	NILAI			
		Rp	USD	JPY	DM
Aset Kredit (termasuk PKPS)	16.067	25.149.958.821.745	232.633.139,50	9.610.910,20	500.000
Aset Properti	1.128	1.462.099.189.630	-	-	-
Aset Nostro		478.622.000.000	-	-	-
Aset Inventaris	58.937	16.247.173.622	-	-	-

Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada **Daftar 28**.

8. Aset KKKS sebesar Rp 68.224.330.326.991 merupakan aset negara yang digunakan dalam rangka kontrak kerja sama minyak bumi dan gas alam yang dikelola oleh KKKS. Nilai Aset KKKS tersebut merupakan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP), yang terdiri dari:

- Aset non tanah dari 20 KKKS dengan nilai sebesar Rp 54.435.971.627.007;
- Aset berupa tanah dari 41 KKKS dengan nilai sebesar Rp13.788.358.699.984; dan

Terdapat beberapa aset KKKS yang telah dilakukan IP, namun tidak/belum dilaporkan dalam Neraca LKPP Tahun 2010, karena:

- sumur yang sudah tidak digunakan Rp3.700.714.272.718;
- penggunaan kurs yang masih ditelusuri keakuratannya Rp53.244.911.221.663;
- *subsequent expenditure* yang masih diragukan Rp2.269.442.151.817; dan
- belum diaudit oleh BPK Rp34.252.694.492.430.

Rincian Nilai Aset KKKS Migas per 31 Desember 2010 disajikan pada **Daftar 29**.

9. Aset eks Pertamina sebesar Rp44.283.237.799.177 merupakan nilai aset sebagai akibat penetapan Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) Per 17 September 2003. Aset tersebut terdiri atas:

- a. Aset Tetap LNG BADAQ-Bontang Rp21.386.569.198.000 dan LNG ARUN-Lhokseumawe Rp 6.259.705.405.000.

Perolehan aset LNG Arun dan LNG Badak berasal dari pinjaman sindikasi bank yang tertuang dalam *PSC Agreement* antara Pertamina (saat itu bertindak selaku Pemerintah) dengan PSC untuk pembangunan LNG Arun dan LNG Badak. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2011 untuk pembangunan LNG Badak, sedangkan untuk pembangunan LNG Arun sudah lunas. Adapun sumber dana untuk pembayaran pinjaman dimaksud berasal dari hasil penjualan gas LNG Arun dan LNG Badak sehingga kemungkinan *default* atas pembayaran tersebut sangat kecil.

Aset kilang LNG Arun dan LNG Badak dioperasikan oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL di bawah pengawasan PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara atas kedua aset LNG dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008.

Inventarisasi dan penilaian terhadap aktiva kilang LNG Arun dilakukan oleh PT Arun NGL, Kanwil I DJKN Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe sejak tanggal 15 Desember 2010, sedangkan terhadap aktiva kilang LNG Badak dilakukan oleh PT Badak NGL, Kanwil XIII DJKN Samarinda dan KPKNL Bontang sejak tanggal 1 Nopember 2010. Saat ini Laporan Inventarisasi dan Penilaian aktiva kilang LNG Arun dan LNG Badak sedang dalam tahap penyelesaian oleh masing-masing Tim Pelaksana.

- b. Aset Tetap yang tidak dialihkan kepada PT Pertamina (Persero) pada 10 lokasi

dengan total nilai sebesar Rp410.606.196.177. Nilai Aset Lainnya tersebut di atas dihitung berdasarkan hasil penilaian PT Ujatek yang telah direviu oleh Ditjen Pajak dan telah dinilai BMN di Jalan Tanjung 34 Jakarta Pusat oleh Tim Penilai DJKN dengan nilai sebesar Rp15.379.053.000.

Dalam Aset Tetap tersebut terdapat aset berupa:

- Aset tanah di Jalan Taragong Nomor 33 Jakarta Selatan dengan luas tanah 105.557m² yang masih disewa oleh Jakarta International School (JIS). Perjanjian sewa menyewa dilakukan oleh JIS dan Pertamina sebelum aset tersebut diserahkan kepada Pemerintah. Saat ini masih dalam proses pembahasan mengenai besaran tarif sewa. Karena aset tersebut telah menjadi milik Pemerintah maka ketentuan pemanfaatan aset harus mengikuti ketentuan PMK 96/PMK.06/2007, namun JIS keberatan dengan besaran tarif karena perjanjian sewa menyewa dilakukan sebelum aset tersebut diserahkan kepada Pemerintah.
 - Aset tanah di Jalan Abdul Muis 68, Jakarta seluas 22.305m² yang digunakan sebagian untuk SPBU COCO Pertamina 31.102.02 dan bangunan satu lantai untuk kantor PT Mitra Tours & Travel. Saat ini masih dalam proses pembahasan mengenai besaran tarif sewa, karena pihak penyewa keberatan dengan besaran tarif sewa.
- c. Aset yang digunakan oleh Pertamina EP adalah sebesar Rp16.226.357.000.000. Terhadap aset ini Menteri Keuangan melalui surat Nomor:S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal Isu-Isu Penting Pertamina, Pertamina diminta untuk melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset tersebut. Hasil inventarisasi dan penilaian aset dimaksud telah dimintakan kepada PT Pertamina dengan surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor 3865/KN/2010 tanggal 1 Juli 2010, namun PT Pertamina belum menyampaikan rincian aset hasil inventarisasi, melainkan masih berupa pengelompokan aset.

Aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tersebut dikenakan sewa karena Pertamina EP dalam hal ini selaku KKKS. Pihak PT Pertamina (Persero) telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 1105/C00000/2008-SO tanggal 15 Agustus 2008 mengenai permohonan PT Pertamina untuk menerapkan skema sewa atas penggunaan BMN berupa aset eks KKKS Pertamina atas sebagian dari BMN senilai Rp16.226.357.000.000 dan kemudian telah disetujui permohonan pengenaan sewa tersebut oleh Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009 yang menjelaskan bahwa Pemerintah menyetujui usulan Pertamina untuk menerapkan skema sewa atas sebagian aset yang digunakan oleh Pertamina EP.

Kemudian berdasarkan surat Nomor S-533/KN/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal Sewa Aset Eks KKKS Pertamina Senilai Rp16.226.357.000.000, dijelaskan bahwa pihak PT Pertamina telah membukukan Beban Sewa atas peralatan yang harus disewa pada Laporan Keuangan Audited PT Pertamina (Persero) tahun 2003 sampai dengan 2009. Namun pihak PT Pertamina sampai dengan saat ini belum melakukan pembayaran atas nilai sewa tersebut kepada negara, sehingga Pemerintah meminta PT Pertamina untuk dengan segera menyetorkan beban sewa tersebut ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang (Kode Akun 423151). Namun pihak Pertamina (Persero) belum dapat melakukan pembayaran karena belum adanya kontrak perjanjian sewa menyewa antara pemerintah dengan Pertamina (Persero). Saat ini Pemerintah sedang melakukan kajian atas permasalahan ini.

C.2.27. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*Utang PFK Rp1,58 triliun*

Utang PFK per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp1.575.434.547.871 dan Rp906.088.090.285 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

URAIAN	31 Desember 2009	Transaksi Tahun 2010		31 Desember 2010
		Penerimaan	Pengeluaran	
PFK 10% Gaji PNS	681.606.782.714	14.364.213.100.694	13.748.624.194.032	1.297.195.689.376
PFK 2% Gaji Terusan	258.521.120	2.603.737.089	6.197.747.721	(3.335.489.512)
PFK 2% Iuran Kes. Pemda	202.182.562.242	1.837.582.636.147	1.797.809.190.951	241.956.007.438
PFK 2% Iuran As. Bidan/ Dokter PTT	1.474.480.103	10.812.199.258	6.998.666.413	5.288.012.948
PFK 2% Iuran Askes TNI/Polri	912.030.106	109.328.815.636	110.145.039.554	95.806.188
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-Lain	19.653.714.000	380.422.971.142	363.707.083.683	36.369.601.459
Penerimaan PFK Beras Bulog	-	194.517.894.374	196.652.974.400	(2.135.080.026)
JUMLAH	906.088.090.285	16.899.481.354.340	16.230.134.896.754	1.575.434.547.871

C.2.28. Utang Kepada Pihak Ketiga*Utang Kepada Pihak Ketiga Rp31,37 triliun*

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp31.370.392.714.561 dan Rp22.310.440.584.286 merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut:

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
K/L	2.671.573.478.397	1.521.740.584.985
BUN	28.698.819.236.164	20.788.699.999.301
Jumlah	31.370.392.714.561	22.310.440.584.286

- Utang kepada pihak ketiga yang berada di K/L sebesar Rp2.671.573.478.397 antara lain berupa dana yang harus dibayarkan atas pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, honor yang belum dibayarkan kepada pegawai, keterlambatan penagihan dari pihak ketiga, akun lawan Rekening Penjaminan yang berada di Kementerian ESDM, akun lawan dari dana yang dibatasi penggunaannya pada Kementerian Agama berupa aset bersih BPIH, dan lain-lain. Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada **Daftar 30**.
- Utang kepada pihak ketiga yang berada di BUN sebesar Rp28.698.819.236.164, antara lain terdiri dari:
 - Utang Transfer ke Daerah dan kekurangan dana bagi hasil yang belum dibayarkan sebesar Rp15.798.435.847.230. Dari jumlah utang tersebut, sebesar Rp8.374.050.605.673 merupakan kewajiban terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan yang dananya masih disimpan pada Rekening Cadangan.

Rincian Utang Transfer ke Daerah dan kekurangan dana bagi hasil yang belum dibayarkan sebesar Rp15.798.435.847.230, adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kewajiban	Jumlah (Rp)
1.	Kurang Salur DBH SDA MIGAS TA 2008	2.000.000.000.000
2.	Kurang Salur DBH SDA Pertum TA 2007-2009	407.423.705.483
3.	Kurang Salur DBH SDA Kehutanan TA 2007-2009	31.296.227.000
4.	Kurang Salur DBH SDA Panas Bumi TA 2006-2008	65.524.373.380
5.	Kurang Salur DBH SDA Perikanan TA 2009	3.695.140.000
6.	Kurang Salur BP PBB TA 2009	29.748.407.893
7.	Kurang Salur DBH PBB Bagian Daerah TA 2009	7.383.979.299
8.	Kurang Salur BP PBB TA 2010	3.196.883.196
9.	Kurang Salur DBH BPHTB Bagian Daerah	69.039.882

10.	Kurang Salur DBH PPh 21 & 25/29 TA 2009	2.530.372.541
11.	Kurang Salur DBH PPh 21 & 25/29 TA 2010	22.659.520.860
12.	Kurang Salur DBH CHT TA 2009	42.529.109.453
13.	Kurang Salur DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat (10%) TA 2008-2009	653.322.394
14.	Kurang Salur DBH BPHTB Bagian Pemerintah Pusat (20%) TA 2008-2009	48.322.274
15.	Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Papua Barat TA 2008	100.500.000.000
16.	Kewajiban Transfer Diestimasi DBH CHT TA 2010	63.794.606.179
17.	Kewajiban Transfer Diestimasi DBH SDA TA 2010	10.033.610.376.707
18.	Kewajiban Transfer Diestimasi DBH Pajak TA 2008-2010	2.983.772.460.689
Total		15.798.435.847.230

- b. Utang pada BAPERTARUM sebesar Rp3.551.726.799.482 merupakan selisih antara penerimaan Iuran Tabungan Perumahan yang dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan pengeluarannya.
- c. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan utang yang timbul kepada pihak ketiga karena terjadinya Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening yaitu retur SP2D sebesar Rp228.178.119.195. Jumlah ini berasal dari Utang Tahun 2009 sebesar Rp277.710.469.149 ditambah penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening tahun berjalan sebesar Rp303.806.199.164 dikurangi pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening sebesar Rp353.338.549.118. **Catatan D.2.29.**
- d. Utang Pihak Ketiga pada Rekening retur merupakan utang kepada Pihak Ketiga yang disetor ke Rekening Retur yang berasal dari retur SP2D karena kesalahan nama dan nomor rekening yang tercantum dalam SP2D sebesar Rp410.881.635.675.
- e. Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (Belanja Lain-lain) per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp8.709.596.834.582. Jumlah tersebut diantaranya berupa:
- Tunjangan kinerja yang belum dibayarkan kepada pegawai sampai dengan 31 Desember 2010 pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp3.468.259.655.400, POLRI sebesar Rp1.901.315.726.000, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi sebesar Rp3.262.116.000, BPKP sebesar Rp2.386.392.454.
 - Dana yang harus disalurkan oleh BNPB kepada BPBD atau Instansi yang menangani bencana tahun 2011 sebesar Rp1.943.137.220.500.
 - Dana yang harus disalurkan oleh Kementerian ESDM dalam rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengalihan Minyak Tanah ke LPG sebesar Rp1.388.930.389.738.

C.2.29. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

*Utang Kelebihan
Pembayaran Pendapatan
Rp3,55 triliun*

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp3.547.727.872.825 dan Rp1.943.343.103.544 merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang dilakukan oleh penysetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

Unit	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
K/L	329.105.858.431	294.292.518.256
BUN	3.218.622.014.394	1.649.050.585.288
Jumlah	3.547.727.872.825	1.943.343.103.544

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan di K/L sebesar Rp329.105.858.431 adalah pada

Kementerian Keuangan yang merupakan SPM-KP yang belum diterbitkan SP2D-nya.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan di BUN sebesar Rp3.218.622.014.394 merupakan Dividen interim BUMN Perbankan sebesar Rp596.510.040.000 dan dividen interim BUMN Non-perbankan sebesar Rp2.622.111.974.394.

C.2.30. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang
Jangka Panjang Rp88,29
triliun

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp88.286.391.827.798 dan Rp92.505.447.212.104 merupakan utang Pemerintah yang diperhitungkan akan dibayar atau jatuh tempo 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca, yang terdiri dari (dalam Rp):

	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Bagian Lancar Utang Luar Negeri	46.967.144.953.748	52.103.964.634.352
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri	41.319.246.874.050	40.401.482.577.752
Jumlah	88.286.391.827.798	92.505.447.212.104

Bagian Lancar Utang Luar Negeri sebesar Rp46.967.144.953.748 terdiri dari Bagian Lancar Utang Luar Negeri pada BA 999.01 (Pengelolaan Utang) sebesar Rp46.875.144.953.748 dan BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp92.000.000.000 yang terdapat pada Sekretariat Negara untuk pengadaan *green aircraft* pesawat kepresidenan yang direncanakan akan dibayar pada tahun 2011. Rincian Bagian Lancar Utang Luar Negeri pada BA 999.01 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Utang	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Bilateral	25.011.609.189.547	22.416.189.271.596
Multilateral	15.802.488.453.594	17.629.136.043.330
Kredit Ekspor	5.720.068.007.249	11.513.593.244.123
Kredit Komersil	340.979.303.359	545.046.075.303
Jumlah	46.875.144.953.748	52.103.964.634.352

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri sebesar Rp41.319.246.874.050 terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang untuk pinjaman dalam negeri sebesar Rp26.240.423.965 dan reklasifikasi Surat Berharga Negara (SBN) dalam negeri yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca sebesar Rp41.292.929.030.085, serta bagian lancar utang jangka panjang pada POLRI sebesar Rp77.420.000. SBN dalam negeri yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis SBN	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
I. Fixed Rate Bonds dan ORI		
Nominal	22.570.875.000.000	30.824.567.000.000
Unamortized Premium (Discount)	(36.046.915.000)	(27.605.081.000)
Nilai bersih (nilai buku)	22.534.828.085.000	30.796.961.919.000
I. Variable Rate		
Nominal	6.031.666.000.000	-
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	6.031.666.000.000	-
II. Zero Coupon Bond		
Nominal	-	5.887.000.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	(61.327.364.000)
Nilai bersih (nilai buku)	-	5.825.672.636.000

III. Surat Utang Pemerintah kepada BI		
Nominal yg harus diamortisasi	3.795.739.945.085	3.442.848.022.752
Accrued Indexation	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	3.795.739.945.085	3.442.848.022.752
IV. SBSN (SDHI)		
Nominal	-	336.000.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	-	336.000.000.000
V. ORI		
Nominal	8.930.695.000.000	-
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	8.930.695.000.000	-
Total SBN (I + II + III+IV)	41.292.929.030.085	32.384.310.569.463

Catatan:

- Fixed Rate Bond terdiri dari 6 seri Fixed Rate Bond;
- Variable Rate terdiri dari 2 seri, yaitu VR0017 dan VR0032;
- Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004 dan SU-007

Rincian lebih lanjut Bagian Lancar Utang Obligasi Dalam Negeri dapat dilihat pada **Daftar 31**.

C.2.31. Utang Biaya Pinjaman

*Utang Biaya Pinjaman
Rp20,26 triliun*

Jumlah Utang Biaya Pinjaman per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp20.261.543.289.213 dan Rp18.526.547.819.139 merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman dalam negeri	17.691.280.724.779	15.597.015.919.292
Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri	2.570.262.564.434	2.929.531.899.847
Jumlah	20.261.543.289.213	18.526.547.819.139

Penjelasan masing-masing Utang Bunga adalah sebagai berikut:

*Utang Bunga Obligasi
dan pinjaman dalam
negeri*

1. Utang Bunga Obligasi dan bunga pinjaman dalam negeri per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp17.691.280.724.779 dan Rp15.597.015.919.292 dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Fixed Rate Bonds	11.903.224.814.209	10.253.389.705.433
ORI	188.952.890.315	172.337.129.915
SBSN	559.492.461.220	267.442.510.990
Variable Rate Bonds	1.041.801.480.732	1.078.887.218.618
SUP kepada BI	82.972.507.969	83.829.456.792
SBN Valas	3.914.829.855.620	3.741.129.897.544
Pinjaman Dalam Negeri	6.714.714	-
Jumlah	17.691.280.724.779	15.597.015.919.292

Rincian lebih lanjut Utang Bunga Obligasi dapat dilihat pada **Daftar 32**.

*Utang Bunga Pinjaman
Luar Negeri*

2. Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp2.570.262.564.434 dan Rp2.929.531.899.847 dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Utang Bilateral	1.099.068.332.647	1.293.353.413.564
Kredit Komersial	57.013.952.710	50.822.753.443
Kredit Ekspor	392.096.139.330	491.702.580.282
Leasing	-	-
Multilateral	1.022.084.139.747	1.093.653.152.558
Jumlah	2.570.262.564.434	2.929.531.899.847

C.2.32. Utang Subsidi

Utang Subsidi Rp22,16 triliun

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp22.161.795.155.886 dan Rp15.717.145.891.103, yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Utang Subsidi PSO yang Belum Disalurkan (BULOG, PT Peln, PT KAI, PT Pos)	3.859.013.047.361	10.672.960.497.793
Utang Subsidi Bunga Ketahanan Pangan & Kredit Program	-	44.886.631.000
Utang Subsidi Listrik	9.358.746.506.021	4.999.298.762.310
Utang Subsidi BBM dan LPG	5.229.785.718.162	-
Utang Subsidi Pupuk dan Benih	3.524.386.273.599	-
Utang Subsidi Bunga Kredit Program KLB	189.863.610.743	-
Jumlah	22.161.795.155.886	15.717.145.891.103

C.2.33. Utang Surat Perbendaharaan Negara

Utang SPN/OBN Jangka Pendek Rp29,24 triliun

Jumlah Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Obligasi Negara Jangka Pendek per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp29.235.009.035.000 dan Rp26.515.739.064.000. SPN merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun atau pada tahun 2011. Sampai akhir tahun 2010, terdapat 10 (sepuluh) seri SPN. Rincian SPN dapat dilihat dalam **Daftar 33**.

C.2.34. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp119,12 miliar

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp119.116.551.668 dan Rp4.763.707.423 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagaimana pada **Daftar 34**.

C.2.35. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp4,79 triliun

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp4.786.549.847.266 dan Rp9.409.771.849.034, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
1. Mahkamah Agung	19.618.900	-
2. Kejaksaan Agung	-	1.107.134.365
3. Sekretariat Negara	-	27.422.680.297
4. Kementerian Keuangan	4.155.000	-
5. Kementerian Pertahanan	5.448.966.363	6.452.456.075.718

6. Kementerian Pertanian	52.000.000	-
7. Kementerian ESDM	-	40.800.000
8. Kementerian Kesehatan	688.273.071	374.080.443
9. Kementerian Agama	4.042.740	19.319.622
10. Kementerian Kehutanan	2.500.000.000	-
11. Kementerian PU	10.975.304.123	26.602.885.062
12. Badan Pusat Statistik	-	45.104.149
13. Dewan Ketahanan Nasional	22.006.020	-
14. Perpustakaan Nasional	13.654.600	-
15. KPU	544.180	-
16. BNP2TKI	15.538.380	-
17. BPLS	30.879.257	-
18. <i>Promissory Notes</i>	40.000.000.000	172.237.676.816
19. Kewajiban kepada KKKS	4.694.495.095.450	2.699.948.679.303
20. BUN	32.279.769.182	29.517.413.259
Jumlah	4.786.549.847.266	9.409.771.849.034

Utang *Promissory Notes* adalah utang yang terkait dengan penyertaan Pemerintah pada lembaga-lembaga keuangan internasional yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal neraca. *Promissory Notes* sebesar Rp40.000.000.000 adalah yang akan dibayarkan kepada *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*. Pada tahun 2010 terhadap *Promissory Notes* sebesar Rp172.237.676.816 telah dibayar kepada IBRD sebesar Rp168.260.000.000 dan kepada ADB sebesar Rp3.977.676.816.

Kewajiban kepada KKKS per 31 Desember 2010 sebesar Rp4.694.495.095.450 merupakan estimasi kewajiban kontraktual Pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama dengan KKKS berupa *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB terkait dengan penerimaan migas pada rekening 600.000.411.

Total saldo penerimaan migas yang berada di rekening 600.000.411 per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp7.308.488.402.783. Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah yang diestimasi akan dibayarkan kepada KKKS adalah sebesar Rp4.694.495.095.450, dan sisanya sebesar Rp2.613.993.307.333 yang sudah dapat diperhitungkan menjadi hak Negara dan telah disetorkan ke Kas Negara pada bulan Januari 2011 disajikan sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan. Rincian kewajiban Pemerintah kepada KKKS adalah:

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Fee Penjualan PT Pertamina (Persero)	1.461.702.617.856	1.496.554.286.363
<i>DMO Fee</i>	379.216.579.658	156.353.535.120
<i>DMO Fee</i> PT Pertamina EP	1.994.285.015.542	979.491.715.220
<i>Underlifting</i> KKKS	6.019.436.827	67.549.142.600
<i>Reimbursement</i> PPN	839.199.601.438	-
PDRD	10.005.175.358	-
Retur atas penyelesaian kewajiban kontraktual pemerintah yang belum dibayarkan kembali	4.066.668.771	-
Jumlah	4.694.495.095.450	2.699.948.679.303

C.2.36. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp987.172.961.936.007 dan Rp901.496.354.102.092 merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2010 sebesar

*Utang Jangka Panjang
DN SBN Rp987,17
triliun*

Rp987.172.961.936.007 ini terdiri dari SBN berdenominasi dalam rupiah sebesar Rp825.341.669.095.007 dan SBN Internasional (valas) sebesar Rp161.831.292.841.000.

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis SBN	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
I. Fixed Rate Bonds		
Principle Outstanding	377.152.742.000.000	328.762.182.000.000
Unamortized Premium (Discount)	(5.646.008.629.000)	(9.505.672.462.000)
Nilai Bersih (Nilai Buku)	371.506.733.371.000	319.256.509.538.000
II. ORI		
Principle Outstanding	31.741.370.000.000	33.956.065.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	31.741.370.000.000	33.956.065.000.000
III. Zero Coupon Bonds		
Principle Outstanding	2.512.000.000.000	2.799.000.000.000
Unamortized Premium (Discount)	(373.721.119.000)	(622.417.073.000)
Nilai Bersih (Nilai Buku)	2.138.278.881.000	2.176.582.927.000
IV. Variable Rate Bonds		
Principle Outstanding	136.763.416.000.000	143.286.082.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	136.763.416.000.000	143.286.082.000.000
V. Surat Utang Pemerintah kepada BI		
Principle Outstanding	244.636.437.364.007	248.432.177.309.092
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	244.636.437.364.007	248.432.177.309.092
VI. SBSN		
Principle Outstanding	38.499.850.000.000	11.532.990.000.000
Unamortized Premium (Discount)	55.583.479.000	(19.938.244.000)
Nilai Bersih (Nilai Buku)	38.555.433.479.000	11.513.051.756.000
Subtotal SBN Denominasi Rupiah	825.341.669.095.007	758.620.468.530.092
VII. Obligasi Negara dalam Valas		
Principles Outstanding	176.800.327.246.903	151.759.653.246.903
Accrued Indexation	(14.824.427.246.903)	(8.599.653.246.903)
Net Unamortized Premium (Discount)	(144.607.159.000)	(284.114.428.000)
Subtotal Obligasi Negara dalam (Valas)	161.831.292.841.000	142.875.885.572.000
Total SBN Jangka Panjang	987.172.961.936.007	901.496.354.102.092

Catatan:

- *Fixed Rate Bonds* terdiri dari 34 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2012 – 2038.
- ORI terdiri dari 4 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2012 – 2013.
- *Zero Coupon Bonds* terdiri dari 2 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2012 dan 2013.
- *Variable Rate Bonds* terdiri dari 14 seri, dengan masa jatuh tempo tahun 2012 – 2020.
- *Fixed Rate Bonds*, ORI, *Zero Coupon Bonds*, dan *Variable Rate Bonds* diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada Bank Indonesia (BI) terdiri dari SU002, SU004, SU007 dan SRBI01, dengan masa jatuh tempo tahun 2025 – 2033. SUP tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*).
- Pelunasan SRBI dapat bersumber dari surplus BI yang menjadi bagian Pemerintah dan akan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah mencapai di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter BI kurang dari 3%, maka Pemerintah akan membayar *charge* kepada BI sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut.
- SBSN terdiri dari 8 seri *fixed rate* dengan masa jatuh tempo tahun 2013 – 2030, 5 seri SDHI dengan masa jatuh tempo 2012-2014 dan 2 seri Sukuk Ritel (SR-001 dan SR-002) dengan dengan masa jatuh

tempo tahun 2012 -2013.

- Obligasi Negara dalam Valas terdiri dari 11 seri berdenominasi USD dengan masa jatuh tempo tahun 2014 – 2038, 2 seri berdenominasi JPY yang jatuh tempo tahun 2019 dan 2020, dan 1 seri SBSN berdenominasi USD yang jatuh tempo tahun 2014.

Rincian Utang Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang dapat dilihat pada **Daftar 35**. Penjelasan lebih lengkap tentang SBN dapat dilihat pada Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun 2010 pada **Daftar 42**.

C.2.37. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT Rp8,39 triliun

Utang Kepada Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) sebesar Rp8.389.364.871.001 merupakan kewajiban Pemerintah terhadap Program Dana Pensiun dan THT akibat kenaikan gaji PNS tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP No. 9 Tahun 2007	1.638.443.906.070
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP No. 14 Tahun 2008	2.450.505.392.359
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP No. 8 Tahun 2009	3.024.845.340.493
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP No. 25 Tahun 2010	1.275.570.232.079
Jumlah	8.389.364.871.001

Nilai *Unfunded Liability* atas Program THT sebesar Rp8.389.364.871.001 merupakan nilai yang ditetapkan PT Taspen. Pemerintah dapat menyesuaikan besaran *Unfunded Liability* tersebut. Pelunasan *Unfunded Liability* akan dilakukan Pemerintah apabila dinilai perlu setelah dilakukan:

- Audit menyeluruh (*due diligence*) atas PT Taspen (Persero) oleh auditor dan aktuaris independen; dan
- Pemisahan kekayaan dan kewajiban Program THT non-PNS dari kekayaan dan kewajiban Program THT PNS sesuai dengan PMK No. 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua PNS.

C.2.38. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang DN Perbankan Rp367,37 miliar

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp367.365.935.506 dan Rp0 merupakan posisi utang dalam negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan tersebut adalah pinjaman antara Pemerintah RI sebagai penerima pinjaman dengan PT. BNI Persero dan PT. BRI Persero sebagai pemberi pinjaman. Pinjaman tersebut digunakan untuk pengadaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan dan POLRI. Jangka waktu pinjaman adalah 8 tahun dengan tingkat bunga JIBOR 3 *months* ditambah *spread* 1% untuk pinjaman dari BRI, sedangkan untuk pinjaman dari BNI tingkat bunganya adalah JIBOR 3 *months* ditambah *spread* 1,1%.

C.2.39. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang DN Lainnya Rp2,83 triliun

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp3.095.222.852.622 terdiri dari Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional sebesar Rp2.826.956.396.635, dan pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp268.266.455.986.

Dalam rangka penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional, sejak tahun 1972 s.d. 1999, Bank Indonesia (BI) atas nama Pemerintah juga telah melakukan pembayaran secara

tunai atas penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional. Jumlah yang telah dibayarkan oleh BI adalah sebesar Rp2.826.956.396.635, termasuk diantaranya Rp2.764.860.843.169 kepada IMF. Pembayaran oleh BI dilakukan sebelum terbit UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI. BI mencatat pembayaran tersebut sebagai dana talangan/piutang kepada Pemerintah. Pemerintah belum menyepakati nilai dan status dana talangan/piutang tersebut. Pemerintah mengusulkan kepada BI, agar dana talangan/piutang tersebut dihapuskan dan tidak ditagihkan kepada Pemerintah. Terkait dengan itu, Menteri Keuangan telah mengirim surat kepada BI beberapa kali, terakhir dengan surat No. S-08/MK.11/2010 tanggal 9 Maret 2010 untuk meminta jawaban mengenai penyelesaian status dana talangan sesuai dengan usulan Pemerintah agar dapat dihapuskan. Kementerian Keuangan telah melakukan pertemuan dengan BI pada tanggal 7 Mei 2010, dan sesuai kesepakatan dilakukan beberapa langkah berikut: (1) Pemerintah dan BI melakukan verifikasi atas seluruh data dan transaksi dan talangan tersebut untuk memastikan jumlah dan status klaim BI; (2) Bila status dan jumlah dana talangan tersebut telah disepakati bersama, maka Pemerintah dan BI akan segera melakukan langkah penyelesaian status dana talangan.

Pemerintah dan Bank Indonesia telah melakukan verifikasi atas dana talangan tersebut, dan disepakati bahwa jumlah sebesar Rp2.780.599.599.504 telah didukung dengan data dan dokumen yang memadai yaitu Rekening Koran, Warkat transaksi, Surat dari BI ke Kementerian Keuangan dan sebaliknya, faksimili, SWIFT, dan Teleks. Sementara untuk jumlah Rp46.356.797.131 hanya didukung rekening koran. Pemerintah dan Bank Indonesia hingga saat ini terus melakukan pembahasan terkait nilai dana talangan tersebut dan opsi penyelesaian yang akan diambil atas permasalahan dana talangan tersebut.

Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp268.266.455.986 adalah pada Kementerian Keuangan sebesar Rp149.937.775.000, Kementerian Kehutanan sebesar Rp118.153.090.986, dan POLRI sebesar Rp175.590.000.

C.2.40. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

*Utang Jangka Panjang
LN Perbankan Rp569,98
triliun*

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp569.983.008.549.466 dan Rp559.498.473.496.215 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang LN Perbankan adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Utang	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Bilateral	304.131.160.950.816	293.256.375.603.449
Multilateral	192.151.937.241.684	185.092.514.769.756
Kredit Ekspor	69.553.738.449.152	77.789.218.434.627
Kredit Komersial	4.146.171.907.814	3.360.364.688.383
Jumlah	569.983.008.549.466	559.498.473.496.215

C.2.41. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

*Utang Jangka Panjang
Luar Negeri Lainnya
Rp25,73 triliun*

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp25.726.322.825.757 dan Rp30.047.323.267.503 merupakan utang dalam bentuk *Promissory Notes* terkait dengan Penyertaan Pemerintah Lembaga Keuangan Internasional yang jatuh tempo/dibayar lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan sebesar Rp25.387.026.825.756, dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya untuk pengadaan *green aircraft* pesawat kepresidenan sebesar Rp339.296.000.000 yang direncanakan akan dibayar pada tahun 2012. Rincian *Promissory Notes* tersebut adalah sebagai berikut:

Lembaga Keuangan Internasional	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
International Monetary Fund	25.329.806.542.486	30.025.221.161.884
International Bank for Reconstruction and Development	39.174.191.965	3.249.459.262
International Development Association	5.173.139.668	5.173.139.668
Multilateral Investment Guarantee Agency	10.204.946.838	10.669.169.200
Common Fund for Commodities	2.668.004.800	3.010.337.488
Total	25.387.026.825.757	30.047.323.267.503

Kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri, SBN, dan *Promissory Notes* dalam mata uang Rupiah, serta kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri (tidak termasuk utang bunga) dalam valuta asing secara keseluruhan disajikan pada Tabel 13 dan Tabel 14.

Tabel 13
Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan *Promissory Notes*
(Dalam Rp Juta)

Jenis Utang	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan (Penurunan)
Utang Luar Negeri (LN):			
Utang LN – Bagian Lancar	46.875.144,95	52.103.964,63	(5.228.819,68)
Utang LN – Jangka Panjang	569.983.008,55	559.498.473,50	10.484.535,05
Total Utang LN	616.858.153,50	611.602.438,13	5.255.715,37
Surat Berharga Negara (SBN):			
SBN – Bagian Lancar	41.292.929,03	40.401.482,58	891.446,45
SPN	29.235.009,04	24.165.739,06	5.069.269,98
SDHI	-	2.350.000,00	(2.350.000,00)
SBSN – Jangka Panjang	987.172.961,94	901.496.354,11	85.676.607,83
Total SBN	1.057.700.900,01	968.413.575,75	89.287.324,26
<i>Promissory Notes</i> (PN):			
PN Jangka Pendek	40.000,00	172.237,68	(132.237,68)
PN Jangka Panjang	25.387.026,83	30.047.323,27	(4.660.296,44)
Total PN	25.427.026,83	30.219.560,95	(4.792.534,12)

*Posisi Utang Luar negeri,
SBN, dan PN*

Tabel 14
Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing

Valuta	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan (Penurunan)
ACU	243.433.159	236.465.090	6.968.069
ADB	127.936.829	159.685.629	(31.748.800)
AUD	291.268.328	252.227.928	39.040.400
CAD	147.964.276	166.408.714	(18.444.438)
CHF	267.927.409	332.695.913	(64.768.504)
CNY	1.428.321.707	-	1.428.321.707
DKK	47.250.332	56.448.135	(9.197.803)
EUR	4.913.284.893	5.976.434.768	(1.063.149.875)
GBP	413.252.437	508.798.112	(95.545.675)
JPY	2.419.516.814.741	2.677.167.077.889	(257.650.263.148)
KRW	176.127.149.560	184.822.322.290	(8.695.172.730)
KWD	10.147.400	13.126.300	(2.978.900)
SAR	110.752.119	125.931.599	(15.179.480)
SDR	2.107.222.242	2.017.406.425	89.815.817
USD	21.204.837.666	20.983.066.384	221.771.282
WBD	417.154.131	1.123.076.519	(705.922.388)

*Posisi Utang Luar negeri
Menurut Valuta Asing*

*SAL Setelah
Penyesuaian Rp52,38
triliun*

C.2.42. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2010 setelah penyesuaian adalah sebesar Rp52.382.103.135.529. SAL setelah penyesuaian tersebut berasal dari saldo awal SAL tahun 2010 sebesar Rp66.523.922.425.799, dan penyesuaian saldo SAL selama tahun 2010 sebesar minus Rp14.141.819.290.270. Pada TA 2010 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian sebesar Rp 46.527.600.199.917, sehingga saldo akhir SAL per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp97.740.596.426.838. Rincian SAL sebagaimana disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15
Saldo Anggaran Lebih TA 2010 dan 2009

Uraian	TA 2010 (Rp)	TA 2009 (Rp)
Saldo Awal SAL	66.523.922.425.799	94.616.144.685.098
Penggunaan SAL	(17.347.946.818.000)	(51.857.136.912.000)
Penambahan dari Selisih Lebih Kas Tahun Lalu	261.781.092.126	461.520.691.590
Koreksi Kas KPPN	7.566.397.318	-
Koreksi Saldo Awal Kas pada BLU	112.445.204.316	126.493.379.426
Penyesuaian Rekening Khusus ¹⁾	2.824.334.833.970	-
SAL setelah Penyesuaian	52.382.103.135.529	43.347.021.844.114
SiLPA (SiKPA) Sebelum Penyesuaian	44.706.303.047.141	23.964.527.041.131
Penyesuaian SiLPA (SiKPA):		
Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu	(168.929.200.391)	(666.602.712.196)
Penyesuaian UP Disetor pada KPPN Bukan Mitra Kerja	159.535.528.423	(43.513.387.221)
Penyesuaian Rekening Retur	241.745.699	-
Penyesuaian Pendapatan Anggaran lain-lain	(1.024.810)	-
Penyesuaian <i>Front End Fee</i> Tahun 2008	-	(77.510.360.029)
Penyesuaian Dana Talangan (<i>Backlog</i>) ²⁾	1.830.450.103.855	-
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	46.527.600.199.917	23.176.900.581.685
Saldo Akhir SAL	98.909.703.335.446	66.523.922.425.799
Selisih Kurs		
Selisih Kurs Kas di BUN	(1.143.806.183.819)	-
Selisih Kurs Kas Hibah Sumatera	(21.203.033.895)	-
Selisih Kurs Kas Hibah ESSP	(4.097.690.894)	-
Selisih Kurs	(1.169.106.908.608)	-
Saldo Akhir SAL dan Selisih Kurs	97.740.596.426.838	66.523.922.425.799
Rincian SAL terdiri dari:		
Rekening SAL di BI	49.437.756.699.925	5.870.514.138.408
Rekening BUN di BI	30.168.618.658.868	32.185.520.242.213
Rekening KPPN	9.218.612.887.732	8.309.379.301.258
Rekening Khusus ¹⁾	2.824.334.833.970	-
Rekening Penempatan pada Bank Umum	-	15.000.000.000.000
Kas di Bendahara Pengeluaran ³⁾	518.914.873.152	1.036.241.894.537
Uang Persediaan di Kementerian LN sebagai Aset Lainnya	80.077.829.666	-
Kas pada BLU ⁴⁾	7.287.580.742.179	5.567.846.500.943
Kas Hibah Langsung K/L yang telah Disahkan ⁵⁾	48.185.913.485	-
Utang PFK	(1.575.434.547.871)	(906.088.090.285)
Utang Kepada Pihak Ketiga (SP2D Retur)	(228.178.119.195)	(277.710.469.149)
Selisih Kas (Lebih) Kurang	(39.873.345.073)	(261.781.092.126)
Saldo Akhir SAL	97.740.596.426.838	66.523.922.425.799

Catatan:

- 1). Rekening Khusus sejak LKPP Tahun 2010 disajikan sebagai bagian dari SAL.
- 2). Penyesuaian atas Pengembalian Dana Talangan (*Backlog*) merupakan jumlah kas yang diterima pada Rekening BUN dari lender atas pengeluaran pembiayaan yang sebelumnya ditalangi dari Rekening BUN.
- 3). Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut setelah dikurangi Rp4.155.000 yang merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Keuangan yang berasal dari penarikan kembali kelebihan setoran sisa UP TA 2008 pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan pada TA 2010.

- 4). Kas BLU sebesar Rp7.287.580.742.179 merupakan Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN melalui SP2D Pengesahan dan koreksi saldo awal.
- 5). Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan berdasarkan laporan KPPN yang melakukan pengesahan pendapatan hibah langsung K/L dan belanja yang dilakukan atas pendapatan hibah tersebut.

C.2.43. SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian

SiLPA setelah
Penyesuaian Rp46,53
triliun

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp46.527.600.199.917 dan Rp23.176.900.581.685 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan dan pengeluaran anggaran selama TA 2010 setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.016.730.832.666.817	848.763.235.195.483
Belanja Negara	1.063.576.541.020.291	937.382.019.569.767
Surplus (Defisit)	(46.845.708.353.474)	(88.618.784.374.284)
Pembiayaan Neto	91.552.011.400.615	112.583.311.415.415
SiLPA (SiKPA) Sebelum Penyesuaian	44.706.303.047.141	23.964.527.041.131
Penyesuaian SiLPA:		
Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu	(168.929.200.391)	(666.602.712.196)
Penyesuaian UP Disetor Pada KPPN Bukan Mitra Kerja	159.535.528.423	(43.513.387.221)
Penyesuaian Rekening Retur	241.745.699	-
Penyesuaian Dana Talangan (Backlog)	1.830.450.103.855	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	(1.024.810)	-
Penyesuaian <i>Front End Fee</i> Tahun 2008	-	(77.510.360.029)
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	46.527.600.199.917	23.176.900.581.685

C.2.44. Dana Lancar Lainnya

Dana Lancar Lainnya
Rp1,54 triliun

Jumlah Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp1.540.934.451.110 dan Rp2.821.340.491.184, yang terdiri dari (Rp):

	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Rekening Pemerintah Lainnya (selain Rek. SAL, Rek. Migas, Rek. Panas Bumi)	1.022.507.788.422	2.438.660.520.900
Kas BLU yang Belum Disahkan sebagai SiLPA	55.665.875.681	109.128.878.158
Investasi Jangka Pendek BLU	30.750.000.000	11.770.000.000
Kas Hibah Langsung yang belum disahkan *)	392.137.441.936	-
Koreksi Selisih SAL:		
Selisih Kas Lebih Tahun ini	39.873.345.073	261.781.092.126
Jumlah	1.540.934.451.110	2.821.340.491.184

Catatan:

*) Kas Hibah Langsung yang belum disahkan merupakan selisih antara Kas Hibah Langsung pada neraca dengan kas hibah langsung yang disahkan KPPN.

C.2.45. Cadangan Piutang

Cadangan Piutang
Rp100,14 triliun

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2010 dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp100.141.379.244.383 dan Rp113.401.408.641.800 merupakan akun lawan dari Piutang, termasuk Uang Muka dari Rekening BUN.

Cadangan Persediaan
Rp36,37 triliun**C.2.46. Cadangan Persediaan**

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp36.366.060.681.005 dan Rp36.606.824.405.660 merupakan pasangan perkiraan persediaan yang dilaporkan K/L dan instansi terkait lainnya, termasuk persediaan pada BLU.

Pendapatan yang
Ditangguhkan Rp4,21
triliun**C.2.47. Pendapatan yang Ditangguhkan**

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp4.210.269.507.402 dan Rp7.522.179.004.649 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) K/L yang belum disetorkan ke Kas Negara serta pendapatan dan piutang terkait penerimaan migas dan panas bumi yang belum dapat diakui sebagai PNBP karena *earning process*-nya belum selesai. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun lawan (pasangan) atas (dalam Rp):

Akun Lawan	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Kas di Bendahara Penerimaan	632.344.354.246	1.040.200.195.970
Kas Lainnya dan Setara Kas ¹⁾	684.910.710.051	272.596.435.596
Rek. Migas No. 600.000411 ²⁾	2.613.993.307.333	6.018.743.604.183
Rek. Penerimaan Panas Bumi	208.604.971.388	190.638.768.900
Aset Lainnya ³⁾	70.416.164.384	-
Jumlah	4.210.269.507.402	7.522.179.004.649

Catatan:

- 1). Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan dana yang berasal dari penerimaan hibah yang belum disahkan, pengembalian belanja, pungutan pajak dan bunga jasa giro yang belum disetor yang berada pada Bendahara Pengeluaran. (lihat Catatan C.2.6)
- 2). Merupakan sebagian dari jumlah dari rekening migas yang telah teridentifikasi sebagai potensi penerimaan Negara, yaitu sebesar Rp7.308.488.402.783 dikurangi estimasi kewajiban kepada KKKS sebesar Rp4.694.495.095.450. (lihat Catatan C.2.35)
- 3). Merupakan aset lain-lain BLU PIP pada Kementerian Keuangan berupa bunga deposito 12 bulanan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp1 triliun sebesar Rp70.000.000.000 dan bunga diterima di muka dari deposito 1 bulanan Rp70 miliar sebesar Rp416.164.384.

Dana yang Harus
Disediakan untuk
Pembayaran Utang
Jangka Pendek minus
Rp149,92 triliun**C.2.48. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek**

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar minus Rp149.918.772.353.919 dan minus Rp175.176.238.495.688. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Jumlah ini merupakan total nilai Utang Jangka Pendek dikurangi Utang PFK.

Rincian penghitungan Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Total Utang Jangka Pendek	201.385.762.723.580	187.839.287.320.918
Dikurangi:		
Utang PFK	(1.575.434.547.871)	(906.088.090.285)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Kas Lainnya dan Setara Kas, rekening penjaminan ESDM, Uang Muka	(7.530.524.449.577)	(629.290.992.034)
Pendapatan Diterima di Muka	(119.116.551.668)	(4.763.707.423)
Utang karena Kesalahan Pemindahbukuan Rekening BUN	(639.059.754.870)	(277.710.469.149)

dan Rekening Retur		
Rekening Cadangan Subsidi	(16.144.595.658.372)	-
Kewajiban kepada KKKS	(4.694.495.095.450)	(2.699.948.679.303)
Rekening Cadangan Penyediaan Sarana dan Prasarana		
Pengalihan Minyak Tanah ke LPG	(1.388.930.389.738)	-
Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil	(8.374.050.605.673)	-
Akun lawan Aset Bapetaram	(3.551.726.799.482)	-
Selisih Kurs Bagian Lancar	(7.407.254.635.468)	(8.145.246.887.035)
Jumlah	149.918.772.353.919	175.176.238.495.688

C.2.49. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang Masih
Harus Diserahkan minus
Rp119,12 miliar

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2010 sebesar minus Rp119.116.551.668 dan 31 Desember 2009 sebesar minus Rp4.763.707.423 merupakan akun lawan dari Pendapatan yang Diterima di Muka.

C.2.50. Barang/Jasa yang Harus Diterima

Barang/Jasa yang Masih
Harus Diterima minus
Rp614,12 miliar

Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2010 sebesar Rp614.122.632.355 merupakan akun lawan dari Uang Muka Belanja. Akun ini tidak ada pada tahun 2009 dan baru diterapkan pada tahun 2010.

C.2.51. Selisih Kurs Bagian Lancar

Selisih Kurs Bagian
Lancar minus Rp8,28
triliun

Selisih Kurs Bagian Lancar per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar minus Rp8.282.009.832.937 dan minus Rp8.145.246.887.035 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih kurs meliputi:

Uraian	Jumlah (Rp)
Selisih kurs atas Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang terkait dengan utang luar negeri dan dalam negeri	(7.407.254.635.468)
Selisih kurs atas Rekening BUN dan Hibah Sumatera dalam valas	(1.169.106.908.608)
Selisih kurs pada aset Penerusan Pinjaman	294.351.711.139
Jumlah	(8.282.009.832.937)

Selisih Kurs atas Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang terkait dengan utang dalam negeri (SBN Valas) sebesar minus Rp350.144.603.291 dan utang luar negeri sebesar minus Rp7.057.110.032.177. Selisih kurs bagian lancar utang luar negeri terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Bilateral	3.726.653.971.272	(3.504.251.493.432)
Multilateral	2.401.291.970.177	(2.755.906.704.715)
Kredit Ekspor	872.360.388.602	(1.799.883.371.417)
Kredit Komersial	56.803.702.126	(85.205.317.471)
Jumlah	(7.057.110.032.177)	(8.145.246.887.035)

Selisih Kurs atas Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dihitung dengan menggunakan rata-rata antara Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dengan total Utang Jangka Panjangnya.

C.2.52. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

*Diinvestasikan dalam
Investasi Jangka
Panjang Rp702,84 triliun*

Jumlah Perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp702.836.007.101.463 dan Rp737.039.382.666.868 merupakan dana Pemerintah Pusat yang diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen dan investasi non permanen yang merupakan lawan dari perkiraan Investasi Jangka Panjang.

C.2.53. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

*Diinvestasikan dalam
Aset Tetap Rp1.184,30
triliun*

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp1.184.301.167.405.585 dan Rp979.000.257.110.824 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Tetap.

C.2.54. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

*Diinvestasikan dalam
Aset Lainnya Rp246,55
triliun*

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp246.554.471.882.238 dan Rp175.469.125.391.757 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk aset Lainnya. Pada LKPP Tahun 2010, jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya dihitung berdasarkan jumlah total Aset Lainnya dikurangi dengan bagian Aset Lainnya yang merupakan kontra akun dari utang, seperti rekening cadangan.

C.2.55. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

*Dana yang Harus
Disediakan untuk
Pembayaran Utang
Jangka Panjang minus
Rp1.498,91 triliun*

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar minus Rp1.498.908.975.231.840 dan minus Rp1.397.804.839.153.173 merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Jumlah ini merupakan akumulasi utang jangka panjang yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri dikurangi selisih kurs, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	999.024.915.595.136	904.323.310.498.727
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	595.709.331.375.223	589.545.796.763.718
Selisih Kurs Utang Jangka Panjang	(95.825.271.738.517)	(96.064.268.109.272)
Jumlah	1.498.908.975.231.840	1.397.804.839.153.173

C.2.56. Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang

*Selisih Kurs Bagian
Jangka Panjang minus
Rp90,64 triliun*

Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebesar minus Rp90.635.097.545.054 dan Rp96.064.268.109.273 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang yang terkait dengan Utang LN	(95.825.271.738.517)
Selisih kurs pada aset atas Investasi Jangka Panjang dan Aset Lainnya dalam Penerusan Pinjaman	5.190.174.193.463
Jumlah	(90.635.097.545.054)

Rincian selisih kurs atas utang luar negeri dan SBN Internasional (Valas) sebesar minus Rp95.825.271.738.517 adalah (dalam Rp):

Selisih Kurs	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)
Utang Luar Negeri:		
Bilateral	43.407.207.560.265	45.843.835.440.355
Multilateral	27.424.940.597.605	28.934.923.480.812
Kredit Ekspor	9.927.077.357.071	12.160.540.829.206
Kredit Komersial	591.763.579.965	525.315.111.996
Subtotal	81.350.989.094.905	87.464.614.862.369
Obligasi Internasional (Valas)	14.474.282.643.612	8.599.653.246.903
Jumlah	95.825.271.738.517	96.064.268.109.272

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Migas

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp7.308.488.402.783. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening No. 600.000.411, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama Tahun 2010.

Tabel 16
Mutasi Rekening Nomor 600.000.411 Tahun 2010 dan 2009

URAIAN	31-12-2010 (Unaudited)		31-12-2009 (Audited)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	927.520.455,69	8.718.692,28	1.425.926.062	15.613.890,37
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PPh Migas dan Penerimaan Bag Pemerintah	15.912.325.738,86	144.239.197,04	10.903.640.790	111.658.653,23
2. Koreksi Kurs Pembukuan Kredit/Debit	-	11.313.460,37	-	11.884.032,76
3. Pengembalian Dana Talangan	-	-	-	-
4. Koreksi Pembukuan a)	714.025.664,68	311.828,36	66.928.156	744.405,91
5. Penerimaan lain-lain b)	4.332.618,86	39.644,95	2.265.065	23.062,50
Total Penerimaan	16.630.684.022,39	155.904.130,72	10.972.834.011	124.310.154,39
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda via BO III	2.150.329.632,00	19.296.722,52	1.621.629.855	15.788.800,00
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	7.719.815,46	69.419,03	7.896.727	79.254,51
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN No. 502.600411				
• PPh Minyak Bumi (411111)	2.510.283.110,16	22.833.341,09	1.513.416.013	15.620.430,59
• PPh Gas Alam (411112)	3.967.161.571,40	36.039.390,02	2.973.481.012	30.742.781,51
• Pendapatan Minyak Bumi (421111)	767.666.850,30	6.993.373,37	172.270.072	1.936.707,53
• Pendapatan Gas Alam (421211)	4.528.692.964,56	40.918.314,50	2.432.299.494	24.408.672,44
• Pendapatan Migas lainnya (423439)	16.771.764,59	156.037,90	7.517.959	77.748,89
• PPh Pasal 25 (411126)	-	-	20.041.199	190.351,31
Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD	13.948.625.708,47	126.306.598,43	8.748.552.331	88.844.746,78
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
a. Reimbursement PPN ke Kontraktor	835.313.981,16	7.558.317,58	601.432.690	6.146.966,48
b. Pembayaran DMO Fee KKKS c)	853.250.008,40	7.692.409,99	1.241.280.286	12.000.168,35
c. Pembayaran Fee Penjualan Migas Tahun 2007 & 2008 kepada PT Pertamina (Persero) d)	147.363.664,22	1.324.946,71	305.304.294	2.895.811,23
d. Pembayaran Fee / Anggaran BPMIGAS	120.982.831,97	1.100.419,71	77.615.407	805.711,39
e. Pembayaran Underlifting KKKS e)	124.797.310,19	1.127.042,04	424.560.211	4.352.978,53
f. Pengembalian Sisa Dana White & Case kepada PT Pertamina (Persero)	-	-	5.536.678	54.425,55
Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD	2.081.707.795,94	18.803.136,03	2.655.729.566	26.256.061,53
3. Koreksi Pembukuan Debit f)	713.938.620,06	304.947,31	66.957.720	744.431,41
4. Koreksi Kurs Pembukuan Debit	-	11.890.051,04	-	15.360.112,76
5. Pengeluaran lain-lain g)	1.065.135,00	9.595,80	-	-
6. Administrasi Bank h)	84,50	5,99	-	-
Total Pengeluaran	16.745.337.343,97	157.314.334,60	11.471.239.618	131.205.352,48
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	(114.653.321,58)	(1.410.203,88)	(498.405.606)	(6.895.198,09)
V. Saldo Akhir (I + IV i)	812.867.134,11	7.308.488,40	927.520.456	8.718.692,28

Penjelasan:

a) Koreksi Pembukuan

Koreksi pembukuan kredit sebesar USD714,025,664.68 atau setara dengan Rp311.828.361.912 merupakan koreksi-koreksi kredit yang diakibatkan adanya koreksi nominal oleh Bank Indonesia, koreksi pembukuan ganda, retur pengeluaran (retur pembayaran kewajiban-kewajiban sektor

migas), kesalahan transfer kepada pihak ketiga, pembetulan atau koreksi karena kesalahan penggunaan kurs, dll, dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi atas double pembukuan/ dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada setoran SDA migas dari KKKS sebesar USD24,421,994.77 atau setara dengan Rp226.254.547.021.
- Koreksi pembukuan karena salah nominal oleh BI atas pembayaran kewajiban migas sebesar USD686,882,970.78 atau setara dengan Rp61.202.919.639.
- Koreksi pembukuan atas retur pembayaran PBB Migas sebesar USD1,598,968.14 atau setara dengan Rp14.336.151.168.
- Koreksi pembukuan atas retur pembayaran DMO Fee KKKS sebesar USD450,493.64 atau setara dengan Rp4.057.704.620.
- Koreksi pembukuan atas retur pembayaran PDRD sebesar USD1,791.04 atau setara dengan Rp16.289.520.
- Koreksi pembukuan atas retur pembayaran *Underlifting* KKKS/ *Overlifting* Pemerintah sebesar USD669,446.31 atau setara dengan Rp5.960.749.944.

b) Penerimaan Lain-lain

Penerimaan lain-lain sebesar USD4,332,618.86 atau setara dengan Rp39.644.947.958 terdiri atas:

- Penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyeter maupun peruntukannya yaitu sebesar USD3.267.483.86 atau setara Rp29.920.265.408 merupakan transaksi yang diterima bulan Juli 2010; dan
- Penerimaan karena salah setor oleh Energy Equity Epic (Sengkang) ke rekening migas No.600.000411 yang peruntukannya bukan sebagai penerimaan migas, melainkan penerimaan pajak sebesar USD1,065,135.00 atau setara dengan Rp9.724.682.550. Terkait penerimaan yang salah setor tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilakukan pemindahbukuan ke rekening Pajak No.600.500411 sebagai pendapatan PPH Pasal 26 (akun 411127).

c) Pembayaran DMO Fee KKKS

Termasuk di dalamnya pembayaran DMO Fee kepada KKKS yang dilakukan melalui mekanisme *offsetting* sebesar USD612,780,999.98 atau setara dengan Rp5.523.610.434.964, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran DMO Fee kepada PT Pertamina EP untuk periode bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Oktober 2010 sebesar USD612,280,771.05 yang diperhitungkan dengan penyelesaian sebagian kewajiban PT Pertamina (Persero) terkait kasus Karaha Bodas Company (KBC) sebesar USD214,364,040.11 dan atas kewajiban valas migas sebesar USD397,916,730.94, sehingga pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN No.600.000411 sebagai:

- Pendapatan Gas Alam (Akun 421211)	USD612,280,771.05	setara	Rp5.519.098.870.245
- Pembayaran DMO Fee kepada ConocoPhillips Natuna sebesar USD310,212.04 dan PetroChina Jabung sebesar USD190,016.89 yang diperhitungkan dengan penyelesaian kewajiban ekspor minyak mentah ConocoPhillips Natuna sebesar USD310,212.04 dan kewajiban LPG PetroChina Jabung sebesar USD190,016.89, sehingga pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN sebagai:

- Pendapatan Minyak Bumi (Akun 421111)	USD310,212.04	setara	Rp2.797.802.389
- Pendapatan Gas Alam (Akun 421211)	USD190,016.89	setara	Rp1.713.762.331

d) Pembayaran Fee Penjual Migas Tahun 2009

Atas pembayaran Fee Penjual Migas Tahun 2009 kepada PT Pertamina (Persero) sebesar USD147,363,664.22 yang diperhitungkan dengan penyelesaian kewajiban valas migas PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah, sehingga pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN sebagai:

- Pendapatan Gas Alam (Akun 421211)	USD131,287,628.12	setara	Rp1.180.407.064.427
- PPh PT Pertamina (Persero) Pasal 23 (Akun 411124)	USD2,679,339.35	setara	Rp24.089.940.096
- PPN PT Pertamina (Persero) (Akun 411211)	USD13,396,696.75	setara	Rp120.449.700.479

e) **Pembayaran *Underlifting* KKKS/ *Overlifting* Pemerintah**

Dalam pembayaran *underlifting* KKKS Tahun 2010, termasuk di dalamnya pembayaran *underlifting* kepada PT Pertamina EP sebesar USD104,348,438.00 yang diperhitungkan dengan penyelesaian sebagian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah atas kasus Karaha Bodas Company (KBC), sehingga pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN sebagai setoran Pendapatan Gas Alam (Kode Akun 421211) sebesar USD104,348,438.00 atau setara dengan Rp940.596.820.132.

f) **Koreksi Pembukuan Debit**

Koreksi pembukuan debit sebesar USD713,938,620.06 atau setara dengan Rp304.947.312.312 merupakan koreksi-koreksi debit yang diakibatkan adanya koreksi nominal oleh Bank Indonesia, koreksi pembukuan ganda, retur pengeluaran (retur pembayaran kewajiban-kewajiban sektor migas), kesalahan transfer kepada pihak ketiga, pembetulan atau koreksi karena kesalahan penggunaan kurs, dll, dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi pembukuan karena salah nominal oleh BI atas pembayaran kewajiban migas sebesar USD686,882,970.78 atau setara dengan Rp61.202.919.639.
- Koreksi atas *double* pembukuan/ dua kali jurnal penerimaan pada setoran SDA migas dari KKKS sebesar USD24,421,994.77 atau setara dengan Rp220.161.255.478.
- Koreksi pembukuan atas retur pembayaran PBB Migas sebesar USD1,598,968.14 atau setara dengan Rp14.336.151.168.
- Koreksi pembukuan atas retur pembayaran PDRD sebesar USD1,810.75 atau setara dengan Rp16.289.520.
- Koreksi pembukuan atas retur pembayaran DMO Fee KKKS sebesar USD363,429.31 atau setara dengan Rp3.270.387.755.
- Koreksi pembukuan atas retur pembayaran *Underlifting* KKKS/ *Overlifting* Pemerintah sebesar USD669,446.31 atau setara dengan Rp5.960.308.751.

g) **Pengeluaran Lain-lain**

Pengeluaran lain-lain sebesar USD1,065,135.00 atau setara dengan Rp9.595.801.215 merupakan pengeluaran pemindahbukuan ke rekening Pajak No.600.500411 sebagai pendapatan PPh Pasal 26 (akun 411127) atas salah setor Energy Equity Epic (Sengkang).

h) **Administrasi Perbankan**

Biaya administrasi perbankan sebesar USD84.50 atau setara dengan Rp5.988.990 merupakan potongan yang dilakukan oleh Bank koresponden KKKS karena adanya retur atau pengembalian akibat salah rekening ketika pemerintah melakukan pembayaran atas kewajiban kontraktual. Potongan tersebut dapat diketahui dengan berkurangnya jumlah nominal antara pembayaran aktual dengan jumlah nominal yang diretur.

i) **Saldo Akhir**

Dari total saldo akhir sebesar USD812,867,134.11 atau setara dengan Rp7.308.488.402.783, termasuk pendapatan yang ditunda sebesar USD290,734,435.25, dan sisanya sebesar USD522,132,698.86 akan digunakan sebagai cadangan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban kontraktual dan kewajiban-kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas tahun 2010 yang belum diselesaikan sampai akhir Desember 2010.

Ringkasan Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dari Kontrak Kerja Sama Tahun 2010

Berikut adalah ringkasan hasil kegiatan usaha hulu migas dari kontrak kerjasama selama tahun 2010 (periode *lifting* Januari s.d. Desember) pada KKKS:

Uraian	Satuan	Jumlah	
		2010 ¹⁾	2009
Lifting Oil	MBBLS ²⁾	332.684	323.579
Lifting Gas	MSCF ³⁾	2.563.955	2.287.971
Price	USD	57.97	
Oil	USD/ICP ⁴⁾	78.87	61,44
Gas	USD/Harga Rata-rata Tertimbang	7.28	6,34
Gross Revenue	(USD 000)	44.912.276	34.394.129
First Tranche Petroleum	(USD 000)	7.936.777	6.025.349
Investment Credit	(USD 000)	190.022	(74.208)
Cost Recovery	(USD 000)	10.752.707	9.216.016
Total Recoverable	(USD 000)	10.942.729	9.141.808
Equity to be Split	(USD 000)	26.032.770	19.226.972
Government Share ⁵⁾	(USD 000)	46.376.226	19.646.187
Lifting Pemerintah	(USD 000)	19.937.522	14.225.407
Net Under Lifting Pemerintah	(USD 000)	457.981	796.564

Keterangan:

1) Merupakan data sementara berdasarkan konsolidasi FQR IV

2) MBBLS = 000 Barrels

3) MSCF = 000 Square Cubic Feet

4) ICP = Indonesian Crude Price

5) Berdasarkan % split Production Sharing Contract.

Berdasarkan Laporan Satker Penerimaan Negara, realisasi *lifting* selama tahun 2010 (Desember 2009 s.d. November 2010) adalah sebesar Rp 179.258.260.302 MBBLS (MBOPD).

Dari jumlah *lifting* Pemerintah sebesar USD19.937.522 ribu ditagihkan pada tahun 2010 sebesar USD20.645.885 ribu selisihnya sebesar USD708.363 ribu merupakan pendapatan DMO, harga minyak mentah premium, dan adjustment tahun-tahun sebelumnya dan dilaporkan BPMIGAS kepada Pemerintah dalam Laporan Arus Migas tahun 2010.

Berikut adalah jumlah tagihan *lifting* Pemerintah pada tahun 2010 yang penyelesaiannya pada Rekening Migas No.600.000411 dan Kas Umum Negara (KUN) dilakukan pada tahun 2010 (Periode 1 Januari – 31 Desember 2010):

Uraian	Satuan	Jumlah
Total Lifting Pemerintah Tahun 2010	(USD 000)	20.645.885
Penyelesaian:		
Setoran ke Rekening 600.000411	(USD 000)	8.084.985
Setoran ke Rekening 600.502411	(USD 000)	-
Setoran ke Rekening 502.000000	(Rp Juta)	94.157.280

Sedangkan berikut adalah jumlah tagihan *lifting* Pemerintah tahun 2009 yang penyelesaiannya pada Rekening Migas No. 600.000411 dan KUN dilakukan pada tahun 2009 dan 2010:

Uraian	Satuan	Jumlah
Total Lifting Pemerintah Tahun 2009	(USD 000)	16.083.965
Penyelesaian:		
Tahun 2009 (periode 1 Januari - 31 Desember 2009)		
Setoran ke Rekening 600.000411	(USD 000)	5.139.451
Setoran ke Rekening 600.502411	(USD 000)	523.205
Setoran ke Rekening 502.000000	(Rp Juta)	70.141.551
Tahun 2010 (periode 1 Januari - 31 Desember 2010)		
Setoran ke Rekening 600.000411	(USD 000)	1.408.700
Setoran ke Rekening 600.502411	(USD 000)	-
Setoran ke Rekening 502.000000	(Rp Juta)	19.853.437
Total		
Setoran ke Rekening 600.000411	(USD 000)	6.548.151
Setoran ke Rekening 600.502411	(USD 000)	523.205
Setoran ke Rekening 502.000000	(Rp Juta)	89.994.987

Data Rincian hasil kegiatan usaha hulu migas tahun 2009 dan 2010 dari kontrak kerjasama per KKKS dan data penerimaan di luar PPh serta pengeluaran per KKKS ke Rekening Migas No.600.000411, Rekening No.600.502411, dan Rekening No.502.000000 atas tagihan dan kewajiban *lifting* tahun 2009 dan 2010 disajikan pada Daftar 6.

2. Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084)

Pada Catatan C.2.3 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp208.604.971.388 dan Rp190.638.768.899. Rekening Panas Bumi (No. 508.000084) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

	URAIAN	31 Desember 2010	31 Desember 2009
I.	Saldo Awal ¹⁾	190.638.768.899	86.635.248.233
II.	Penerimaan:		
	1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	803.357.658.926	821.152.357.725
	2. Koreksi Pembukuan Kredit	-	781.832.710
	Total Penerimaan	803.357.658.926	821.934.190.435
III.	Pengeluaran:		
	1. Pembayaran PBB Panas Bumi	180.258.219.624	245.017.477.786
	2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi ²⁾	261.346.804.029	70.764.929.954
	3. Pemindahbukuan PNBPT Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN ³⁾	343.786.432.784	400.393.666.556
	4. Pinjaman untuk Dana Talangan	-	-
	5. Koreksi Pembukuan debit	-	1.754.595.472
	Total Pengeluaran	785.391.456.438	717.930.669.76
IV.	Kenaikan/Penurunan (II - III)	17.966.202.488	104.003.520.666
V.	Saldo Akhir (I + IV) ⁴⁾	208.604.971.388	190.638.768.899

Penjelasan:

1) Saldo awal sebesar Rp190.638.768.899 merupakan cadangan pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN panas bumi kepada:

1. PT Pertamina (Persero)	Rp55.961.720.143
2. Chevron Geothermal Salak, Ltd	Rp69.363.197.207
3. Chevron Geothermal Indonesia, Ltd	Rp61.973.409.367
4. Dayabumi Salak Pratama, Ltd	Rp 3.340.442.180

2) Pembayaran kembali PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp261.346.804.029 terdiri dari:

1. Pembayaran kembali PPN yang pengajuannya Tahun 2010	Rp170.953.925.999
2. Pembayaran kembali PPN yang dicadangkan akhir Tahun 2009	Rp 90.392.878.030

3) Pemindahbukuan PNPB Pertambangan Panas Bumi ke Rekening KUN sebesar Rp343.786.432.784,70 terdiri dari:

1. PNPB Pertambangan Panas Bumi Triwulan I tahun 2010	Rp86.898.360.241
2. PNPB Pertambangan Panas Bumi Triwulan II tahun 2010	Rp75.840.910.281
3. PNPB Pertambangan Panas Bumi Triwulan III tahun 2010	Rp97.433.050.131
4. PNPB Pertambangan Panas Bumi Triwulan IV tahun 2010	Rp83.614.112.130

4) Saldo akhir sebesar Rp208.604.971.388 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban terkait dengan kegiatan usaha panas bumi yang terdiri dari:

a. Cadangan pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN panas bumi sebesar Rp204.832.699.830,00 kepada:

1. PT Pertamina (Persero)	Rp 41.731.650.747
2. Chevron Geothermal Salak, Ltd	Rp116.735.120.972
3. Chevron Geothermal Indonesia, Ltd	Rp 46.030.488.293
4. Dayabumi Salak Pratama, Ltd	Rp 335.439.818

b. Cadangan Pembayaran PBB Pertambangan panas bumi Tahun 2010 untuk Wilayah Kerja Panas Bumi PT Geodipa Energy sebesar Rp3.772.271.558

3. Penertiban Barang Milik Negara

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP terdapat beberapa temuan yang terkait dengan Barang Milik Negara (BMN), antara lain: (i) BMN yang disajikan pada Neraca belum dapat diyakini kewajarannya, (ii) Aset Tetap Kementerian Negara/Lembaga belum disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (iii) prosedur pencatatan dan pelaporan barang milik negara tidak dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi yang telah ditetapkan, dan (vi) sistem pengendalian intern pengelolaan atas BMN masih lemah.

Sebagai tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tersebut, Pemerintah telah dan sedang melakukan penertiban BMN. Sebagai langkah awal, telah diterbitkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2007 jo. Keppres 13 Tahun 2009 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara. Penertiban BMN dilaksanakan melalui inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi seluruh BMN pada K/L, sehingga diharapkan terwujud penertiban dan pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel baik secara administratif, fisik maupun hukum.

Lingkup obyek penertiban terdiri dari seluruh aset tetap/BMN yang perolehannya berasal dari APBN dan perolehan yang sah serta kekayaan negara lain-lain yang diungkapkan dalam temuan BPK. Pelaksanaan penertiban BMN dilakukan mulai Oktober 2007 s.d. 31 Maret 2011 terhadap 74 K/L, Lembaga Pelayanan Publik, dan aset kekayaan negara lain-

lain seperti Aset KKKS, BMKT, Aset Asing/Cina, Aset eks Kepabeanaan, Aset eks BPPN, Aset eks BDL, dan Aset eks Kelolaan PPA. Hasil inventarisasi dan penilaian BMN akan dijadikan sebagai dasar koreksi atas nilai BMN yang telah disajikan pada Neraca Awal Pemerintah per 31 Desember 2004.

Hasil inventarisasi dan penilaian sampai dengan 31 Desember 2010 telah dibukukan pada LKKL sebesar Rp410.294.609.023.193. Rincian Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN disajikan pada **Daftar 39**.

4. Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

Dalam rangka melanjutkan penertiban rekening Pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara serta untuk memenuhi amanat undang-undang yang menjadi landasan bagi reformasi pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan melakukan langkah-langkah lanjutan penertiban rekening pemerintah pada seluruh instansi K/L melalui penerbitan 4 (empat) Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:

- Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
- Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja;
- Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.05/2010 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.05/2007 tentang Pembentukan Tim Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP) telah melakukan langkah-langkah penertiban rekening yaitu:

- a. Mendata rekening-rekening di 76 (K/L) dan BUN yang berjumlah 41.390 rekening, dan dari jumlah tersebut telah ditutup 7.499 rekening dengan saldo rekening yang disetor ke kas negara sebesar Rp7.127.498.618.805 dan USD11,600,887.
- b. Rekening operasional K/L (untuk digunakan permanen dan/atau sementara/masih perlu ditindaklanjuti) yang dikelola oleh K/L per 31 Desember 2010 sebanyak 31.197 rekening. Masih terdapat rekening operasional yang belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku BUN. Pada tahun 2011, TPRP ditugaskan untuk terus mencari keterangan terhadap rekening operasional K/L yang belum mendapat persetujuan dari BUN.
- c. Terhadap rekening yang dibekukan sebanyak 3.095 rekening, 180 rekening telah diaktifkan kembali berdasarkan klarifikasi dari K/L yang bersangkutan, 1417 rekening yang diusulkan ditutup, dan masih terdapat rekening yang masih dibekukan karena belum ada klarifikasi dan permintaan pengaktifan kembali dari K/L yang bersangkutan atau rekening tersebut tidak memenuhi syarat untuk diaktifkan kembali. Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 02/PB/2010 tentang Tindak Lanjut Atas Pengenaan Sanksi Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja, Tim akan segera mengusulkan penutupan

terhadap rekening yang masih dibekukan dan tidak mendapatkan tanggapan/respons dari K/L sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

- d. Rekening yang diinvestigasi 4.803 rekening, 3.016 rekening dinyatakan telah selesai, dan 1.208 rekening masih dalam proses, karena belum semua APIP K/L telah tuntas melakukan penyelidikan terhadap keseluruhan rekening yang diserahkan oleh Tim maupun rekening tambahan yang ditemukan dalam proses penyelidikan.

Rekening pada 33 KL dinyatakan *clear and free*, dan akan segera diserahkan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) - Ditjen Perbendaharaan sebagai unit yang secara struktural bertugas membina dan memonitor ketertiban KL dalam mengelola rekening Pemerintah agar tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Rekening pada 43 K/L lainnya, sebagian besar telah dapat dikategorikan sebagai rekening-rekening yang *clear and free*, namun belum dapat dilakukan karena masih terdapat beberapa rekening pada K/L bersangkutan yang belum dinyatakan *clear and free*. TPRP terus mengupayakan penyelesaian terhadap rekening-rekening tersebut agar statusnya segera ditetapkan sebagai rekening yang *clear and free*. Termasuk di dalamnya adalah K/L yang memiliki kantor vertikal (diantaranya satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang sangat banyak antara lain: Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan Kepolisian RI.

Penertiban Rekening Pemerintah masih terus dilanjutkan pada TA 2011, dengan tugas antara lain perbaikan/*Updating* data; Tindak lanjut terhadap rekening-rekening diinvestigasi; Penyusunan daftar rekening yang telah disetujui; Inventarisasi Rekening Bendahara Umum Negara (BUN), termasuk Rekening Kas Umum Negara (RKUN); Percepatan penyelesaian data rekening pada 43 K/L, antara lain Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan Kepolisian RI; dan Pengujian/pengkajian ulang rekening-rekening yang telah diberi persetujuan.

Laporan lengkap mengenai Penertiban Rekening Pemerintah Tahun 2010 disajikan tersendiri dalam bentuk Suplemen.

5. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

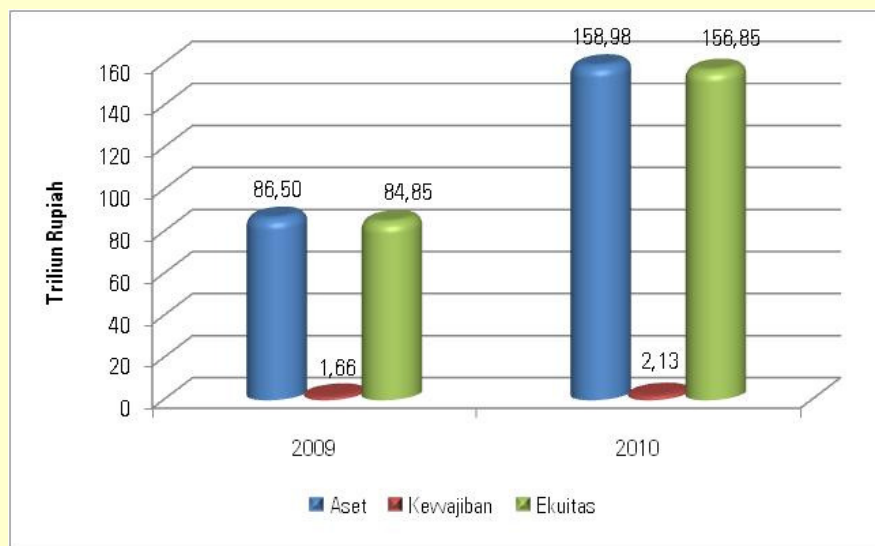
Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan, aset tersebut berlokasi di Gedung Museum BPK RI, Magelang. Barang bersejarah tersebut saat ini masih tercatat di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta.
- b. Kementerian Perhubungan berupa Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.
- c. Kementerian Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah. Aset tersebut dikelompokkan menjadi 6 kelompok:
 - Koleksi dengan bahan dasar logam sebanyak 17 unit
 - Koleksi dengan bahan dasar kayu sebanyak 64 unit
 - Koleksi dengan bahan dasar tekstil sebanyak 498 unit
 - Koleksi dengan bahan dasar kertas sebanyak 207 unit
 - Koleksi dengan bahan dasar audio visual sebanyak 139 unit
 - Koleksi dengan bahan dasar lain-lain sebanyak 16 unit

- d. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
- Arsip Konvensional sebanyak 27.910 km linier.
 - Arsip Kartografi dan Kearsitekturan sebanyak 110.736 lembar.
 - Arsip Film sebanyak 58.800 reel.
 - Arsip Mikrofilm sebanyak 13.648 reel.
 - Arsip Video sebanyak 30.250 kaset.
 - Arsip Rekaman Suara sebanyak 37.369 kaset.
 - Arsip Optical Disc sebanyak 427 keping.
 - Arsip foto sebanyak 341.131 lembar (negatif foto) dan 200.000 lembar (positif foto).
 - Arsip foto belum terdata sebanyak 221 boks dan 282 album.
- e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit aset bersejarah yang terdiri dari Tugu Peringatan, Tugu Raffless, Makam Belanda (Santiong) dan Patung Kepala Sapi.
- f. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Survei Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.
- g. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan 598 Benda Cagar Budaya (BCB), yang dikelompokkan menjadi:
- Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb).
 - Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.
- Aset Bersejarah yang dikelola Kementerian Budpar sebanyak 27.031 unit yang tergolong dalam Candi, Tugu Peringatan, Bangunan Bersejarah, tanah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi serta aset tetap lainnya.
- h. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 9.733 eksemplar naskah kuno.
- i. Kementerian Hukum dan HAM menguasai aset bersejarah dengan rincian:
- Tugu Peringatan sebanyak 1 Unit
 - Alat Kantor dan Rumah Tangga sebanyak 4 Unit
 - Eksakta sebanyak 13 Unit.
- j. Kementerian Sosial RI menguasai aset bersejarah berupa Tugu Peringatan sebanyak 5 unit serta 1 Unit Makam Bersejarah.
- k. Kementerian Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.
- l. Kementerian Pekerjaan Umum menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
- Tugu Peringatan sebanyak 14 unit
 - Bangunan Bersejarah sebanyak 4 unit
 - Aset Eksakta sebanyak 2 unit
 - Aset Non-Eksakta sebanyak 7 unit.

6. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU telah dijelaskan sebelumnya pada Catatan Penting Lainnya dalam Laporan Realisasi APBN. Perbandingan aset, kewajiban, dan ekuitas Saker BLU per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2010 berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disajikan dalam grafik di bawah ini:



**Grafik 27: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum
31 Desember 2009 dan 30 Juni 2010**

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan pada **Daftar 38**.

7. Neraca Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darusalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR-NAD-Nias)

BRR-NAD Nias dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 tanggal 16 April 2005 tentang Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi yang selanjutnya menjadi UU dengan diterbitkannya UU No. 10 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005.

Masa tugas BRR berlaku 4 (empat) tahun dan pengakhiran masa Tugas BRR NAD-Nias diatur dalam PP No. 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yaitu pada tanggal 16 April 2009.

Dalam rangka penyelesaian Aset-aset BRR NAD-Nias yang berakhir tanggal 16 April 2009, Pemerintah membentuk Tim Likuidasi BRR-NAD-Nias. Tugas Tim Likuidasi antara lain menyusun Laporan Keuangan Likuidasi Bagian Anggaran 094 (BRR NAD-Nias). Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2010, LK Likuidasi belum diterbitkan, namun LK Penutup per 31 Desember 2010 telah disusun, sehingga Neraca BRR NAD-Nias yang disajikan dalam LKPP Tahun 2010 merupakan Neraca Penutup per 31 Desember 2010. Berikut ini adalah Neraca per 31 Desember 2008 (Audited) dan Neraca penutup per 31 Desember 2010.

NERACA

BRR NAD-NIAS

Uraian	31 Des 2008 (<i>Audited</i>)	31 Des 2010
Aset		
Aset Lancar		
Piutang Kepada Pihak Ketiga	516.968.200	516.968.200
Uang Muka Belanja	24.546.204.400	24.546.204.400
Belanja Dibayar Di Muka	2.149.584.510	2.149.584.510
Persediaan	78.951.123.713	78.951.123.713
Jumlah Aset Lancar	106.163.880.823	106.163.880.823
Aset Tetap		
Tanah	572.821.719.812	537.280.018.542
Peralatan Dan Mesin	1.538.503.845.802	1.218.014.961.326
Gedung Dan Bangunan	3.351.099.589.510	1.883.717.025.421
Jalan Irigasi Dan Jaringan	4.771.805.420.047	2.663.434.576.446
Aset Tetap Lainnya	27.483.007.111	17.462.905.274
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.049.831.238.560	926.854.586.811
Jumlah Aset Tetap	11.311.544.820.842	7.246.764.073.820
Aset Lainnya		
Aset Lain-Lain	661.364.926.291	669.869.028.122
Jumlah Aset Lainnya	661.364.926.291	669.869.028.122
Jumlah Aset	12.079.073.627.956	8.022.796.982.765
Kewajiban	0	0
Ekuitas Dana		
Ekuitas Dana Lancar		
Cadangan Piutang	27.212.757.110	27.212.757.110
Cadangan Persediaan	78.951.123.713	78.951.123.713
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	106.163.880.823	106.163.880.823
Ekuitas Dana Investasi		
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	11.311.544.820.842	7.246.764.073.820
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	661.364.926.291	669.869.028.122
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	11.972.909.747.133	7.916.633.101.942
Jumlah Ekuitas Dana	12.079.073.627.956	8.022.796.982.765
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	12.079.073.627.956	8.022.796.982.765

Perubahan nilai aset tetap dan aset lainnya dari Neraca per 31 Desember 2008 (*Audited*) menjadi Neraca Penutup per 31 Desember 2010 adalah karena adanya koreksi dan penghapusbukuan.

8. Lembaga Non Struktural dan Yayasan di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga

Lembaga Non Struktural merupakan bagian eksekutif (berada di bawah atau bertanggung jawab kepada presiden atau menteri), namun bukan merupakan struktur/bagian dari kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian. Eksistensi dan fungsinya diatur dalam UU, PP, Keppres maupun Peraturan Presiden. Pembentukan lembaga negara non struktural dimaksudkan untuk membantu pemerintah menangani masalah yang belum bisa dilaksanakan dan diselesaikan oleh lembaga negara formal.

Istilah non struktural dikaitkan dengan tidak adanya hubungan organisatoris antara lembaga ini dengan K/L selain hubungan kerja meskipun pendanaannya menginduk ke K/L. Istilah tersebut secara eksplisit juga diungkap dalam peraturan perundangan yang membentuknya. Kata "independen" atau mandiri/otonom terkadang menjadi kata tambahan dalam peraturan pembentukan lembaga tertentu. Biasanya dikaitkan dengan keterlibatan pihak-pihak di luar pemerintahan seperti: praktisi, pakar, dan tokoh

masyarakat dalam komposisi keanggotaan atau pengurus LNS.

Nomenklatur lembaga itu bermacam-macam. Ada akademi, badan, dewan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga, majelis, otorita, dan unit kerja. Kesekretariatan LNS/I biasanya berada di departemen atau instansi resmi pemerintah yang sudah ada sebelumnya, sedangkan pegawai seluruhnya berasal atau merupakan pinjaman dari K/L. Gaji pegawai sekretariat LNS sebagai PNS tetap dibayar oleh instansi asal, sedangkan dari LNS biasanya mereka mendapat tunjangan tambahan.

Hingga akhir Tahun 2010, Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi 101 LNS atau terdapat peningkatan 11 LNS yang sebagian besar baru dibentuk pada tahun 2010. Dari 101 lembaga tersebut, lebih dari sepertiganya (35 lembaga) merupakan amanat yang tertulis dalam Undang-Undang. Menilik legalitas pembentukannya, sebanyak 20% dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah. Sedangkan yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden sebanyak 60% dan 20% berdasarkan Peraturan Presiden.

Komposisi sumber dana untuk membiayai kegiatan operasional LNS bisa dikategorikan dalam 3 jenis:

1. Sekitar 75% (68 LNS) dibiayai dari APBN. Sebanyak 43 Sekretariat LNS merupakan Satker yang berada di bawah K/L, sedangkan 25 Sekretariat LNS dibiayai dari Kegiatan K/L. Dari 43 satker tersebut, diantaranya adalah 13 Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BP KAPET) yang didanai APBN melalui Dana Dekonsentrasi di SKPD Dinas PU & Kimpraswil.
2. Empat LNS yakni: Bapertarum, Badan Pengelola Dana Abadi Umat, Otorita Asahan, dan LPS mendanai kegiatannya dari penerimaan tertentu tanpa kucuran dana dari APBN.
3. Empat Lembaga Non Struktural yang menerima dana dari APBN dan Non APBN yakni: Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN).

Enam LNS saat ini sudah tidak aktif lagi namun peraturan perundang-undangan tentang pembentukan LNS tersebut belum dicabut. Sedangkan 8 LNS belum aktif karena belum lama dibentuk pemerintah dan 10 LNS yang baru dibentuk pada tahun 2010 .

LNS yang dibiayai dari APBN murni, akuntansi atas transaksi keuangan dan laporan keuangannya sudah dikonsolidasikan dalam LKKL maupun dalam LKPP. LNS yang menjadi satuan kerja atau entitas akuntansi tersendiri, pengurusan administrasi keuangannya ditangani oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat atau pejabat struktural K/L yang menaungi dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

LNS sebagai entitas akuntansi tunduk pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP 8/2006 bahwa Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan K/L menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Selanjutnya, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja interim K/L berdasarkan Laporan Keuangan dan Kinerja interim Kuasa Pengguna Anggaran dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sampai dengan akhir Tahun 2010, total aset LNS sebesar Rp54,29 triliun. Pemilik aset terbesar berturut-turut: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-PNS, LPP RRI, dan LPP TVRI.

Lembaga Non Struktural dapat dilihat pada **Daftar 36**.

Yayasan di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga

UU No. 17 Tahun 2003 pasal 2 memasukkan yayasan di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dalam ruang lingkup keuangan negara. Terdapat kata “pihak lain” pada butir g dan l yaitu:

- “Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah”.
- “Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”.

Dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 2 butir l UU 17/2003 meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan K/L, atau perusahaan negara/daerah.

Berdasarkan ruang lingkup keuangan negara di atas, yayasan di lingkungan K/L adalah yayasan yang terafiliasi dengan K/L, yang menurut Akta Notaris dan Anggaran Dasarnya didirikan atau dipimpin oleh pejabat pemerintah aktif di K/L tertentu atau yayasan yang menerima dan memanfaatkan aset negara dalam melaksanakan kegiatannya. Identifikasi atas yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga ini diperlukan untuk kemajuan tata kelola pemerintahan melalui transparansi dan akuntabilitas sektor publik.

Identifikasi lebih lanjut atas yayasan di lingkungan K/L dipisahkan dari yayasan-yayasan yang bernaung di bawah institusi TNI. Hal ini karena Pasal 76 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah mengamanatkan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, pemerintah harus mengambil alih seluruh aktifitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini ada 900-an unit bisnis baik berupa yayasan maupun koperasi di bawah naungan TNI yang telah teridentifikasi oleh Badan Pengelola Transformasi Bisnis TNI yang diketuai oleh Sekretaris Kementerian Negara BUMN untuk diserahkan kepada Presiden. Selanjutnya yayasan maupun koperasi tersebut ditransformasikan dalam korporasi atau dimasukkan dalam mekanisme APBN, sehingga TNI bisa berkonsentrasi mengembangkan profesionalitas tentara dan meninggalkan bisnis.

Sejauh ini, yayasan dalam lingkup keuangan negara yang sudah teridentifikasi dan menyampaikan laporan keuangan yakni:

1. Yayasan Harapan Kita dalam hal ini Badan Pengelola dan Pengembangan TMII yang mengelola TMII.
2. Yayasan Sarana Wana Jaya dalam hal ini Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti yang berada di Kementerian Kehutanan.
3. Yayasan Gedung Veteran RI yang mengelola gedung “Graha Purna Yudha” di Jalan Sudirman, Semanggi – Jakarta Pusat.
4. Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bhumi Bhakti Adhiguna di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
5. Yayasan Gedung Arsip Nasional RI
6. Yayasan Yustitia Dharmayukti Karini di lingkungan Mahkamah Agung
7. Yayasan Purna Bhakti (YARNATI) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
8. Yayasan Pengembangan BUMN di lingkungan Kementerian Negara BUMN

Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bhumi Bhakti Adhiguna (YBBA) di lingkungan Badan Pertanahan Nasional telah dibubarkan sesuai Akta Notaris S.Rachma C.Hardiyo

Hoesodo, SH Nomor 3 tanggal 18 Desember 2008 dan menunjuk Tim Likuidasi yang bertugas melakukan likuidasi atau pemberesan hak-hak dan kewajiban yayasan meliputi administrasi, kekayaan, dan keuangan yayasan. Saat ini tim likuidasi yayasan telah melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyangkut tata cara penyerahan dan pelimpahan aset-aset YBBA.

Badan Pemeriksa Keuangan mengkonfirmasi telah melakukan pembekuan kegiatan yayasan di lingkup BPK-RI yaitu Yayasan Cakra Bhakti dan PT Pentas Cakra Bhakti dalam pengelolaan aset milik negara di BPK-RI, yang ditindaklanjuti dengan SK Sekjen No. 244a/K/X-XIII.2/10/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pencabutan Pengelolaan Sebagian Fasilitas Pendukung Milik Badan Pemeriksa Keuangan yang berada di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dari Yayasan Cakra Bhakti.

Ikhtisar laporan keuangan yayasan tersebut disajikan dalam **Daftar 36**.

9. Aset Bekas Milik Asing/Cina

Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) merupakan Aset yang dikuasai Negara yang berasal dari bekas:

1. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
2. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
3. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G.30.S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66.

Penyelesaian ABMA/C diatur dalam PMK No. 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Sesuai dengan PMK No. 188/PMK.06/2008, penyelesaian ABMA/C dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia (apabila telah selesai, maka dicatat dan dilaporkan sebagai BMN);
2. disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah (apabila telah selesai, maka dicatat dan dilaporkan sebagai BMD);
3. dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
4. dipertukarkan dengan aset yang dimiliki oleh pihak ketiga;
5. dihibahkan;
6. dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
7. dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina.

Sampai dengan 31 Desember 2010, dari total 1.010, telah diselesaikan sebanyak 24 aset dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemantapan status hukum ABMA/C menjadi BMN sebanyak 1 aset di Provinsi DKI

Jakarta, 4 aset di Provinsi Jawa Barat, 1 aset di Provinsi Jawa Timur, dan 2 aset di Provinsi Bali.

2. Pemantapan status hukum ABMA/C menjadi BMD sebanyak 2 aset di Sumatera Utara, 7 aset di Jawa Barat, 1 aset di Jawa Tengah, 2 aset di Jawa Timur, dan 1 aset di Kalimantan Timur.
3. Pelepasan ABMA/C kepada pihak ketiga dengan pembayaran kompensasi sebanyak 1 aset di Provinsi Bangka Belitung.
4. Pengeluaran ABMA/C dari daftar lampiran PMK 188/2008 sebanyak 2 aset di Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah masih terus melakukan inventarisasi dan penilaian ABMA/C dalam rangka *updating* data. Sampai dengan 31 Desember 2010, dari 1.010 aset, telah dilakukan inventarisasi/cek fisik aset sebanyak 645 aset dan diantaranya telah dilakukan penilaian sebanyak 275 aset dengan nilai mencapai Rp1.449.937.014.583.

Rincian ABMA/C disajikan pada **Daftar 40**.

10. Kewajiban Kontinjensi

Merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena: (i) tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau (ii) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

• Jaminan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batu Bara

Sesuai Perpres Nomor 91 Tahun 2007, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW berbahan bakar batubara oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur.

Kewajiban pemerintah untuk membayar kepada kreditur PT PLN (Persero) baru akan timbul jika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya. Sehingga terdapat unsur ketidakpastian atas timbulnya kewajiban Pemerintah. Selain itu, jumlah kewajiban yang mungkin timbul atas penjaminan kepada PT PLN (Persero) tidak dapat diukur secara pasti. Jumlah pastinya baru akan diketahui pada masa yang akan datang.

Besaran kewajiban kontinjensi atas penjaminan kepada PT PLN (Persero) tidak dapat diukur secara handal. Estimasi besaran kewajiban didasarkan pada jumlah kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur proyek 10.000 MW serta probabilitas gagal bayar dari kewajiban tersebut. Kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur pada tahun 2010 terbatas pada kewajiban pembayaran bunga atas pinjaman. Sesuai dengan PMK Nomor 44 tahun 2008, perhitungan estimasi besaran kewajiban kontinjensi dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal. Adapun estimasi besaran kewajiban kontinjensi untuk tahun 2010 yang dialokasikan dalam APBN-P TA 2010 sebesar Rp1 triliun, namun belum terealisasi.

Terdapat ketidakpastian atas waktu dan jumlah kewajiban yang mungkin timbul terkait dengan penjaminan kepada PT PLN (Persero). Kewajiban Pemerintah kepada kreditur PT PLN (Persero) baru akan timbul jika PT PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya/gagal bayar. Terjadinya gagal bayar PT PLN (Persero) tergantung dengan kondisi keuangan PT PLN (Persero). Untuk memperkirakan terjadinya gagal bayar, digunakan rasio CICR (*Consolidated Interest Coverage Ratio*) dan DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*).

Sesuai dengan PMK 44 Tahun 2008, apabila terjadi gagal bayar, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur PT PLN (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero).

Berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ditunjuk sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dalam kegiatan penjaminan Pemerintah pada proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW berbahan bakar batubara oleh PT PLN (Persero).

- ***Jaminan Pembangunan Proyek Monorail Jakarta***

Proyek infrastruktur lain yang juga mendapat dukungan Pemerintah adalah proyek pembangunan monorail Jakarta (*green line dan blue line*). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta yang ditetapkan tanggal 13 Desember 2006, Pemerintah memberikan jaminan melalui mekanisme APBN terhadap pembangunan Proyek Monorail Jakarta yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kerja sama dengan Badan Usaha. Dukungan Pemerintah diberikan dalam bentuk pemberian jaminan untuk menutup kekurangan (*shortfall*) atas batas minimum penumpang (*ridership*) sebesar 160.000 penumpang per hari. Nilai jaminan maksimum sebesar USD11,25 juta per tahun selama lima tahun, terhitung sejak proyek tersebut beroperasi secara komersial dengan kemampuan angkut sebesar 270.000 penumpang per hari. Jaminan berlaku efektif sejak tanggal 15 Maret 2007 untuk jangka waktu 36 bulan. Apabila ketentuan dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka berdasarkan PMK Nomor 30/PMK.02/2007 pemberian jaminan menjadi batal dan tidak berlaku. Sampai triwulan pertama tahun anggaran 2009, investor proyek pembangunan monorail Jakarta belum kunjung berhasil mendapatkan fasilitas pembiayaan (*financial close*) sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI). Terkait dengan hal tersebut, pihak Pemprov DKI akan melakukan uji tuntas (*due diligence*) secara komprehensif yang hasilnya akan digunakan sebagai acuan bagi Pemprov DKI dalam menetapkan kelanjutan proyek ini. Mengingat hal tersebut, untuk tahun 2010 belum ada risiko fiskal terkait dengan proyek ini karena monorail belum beroperasi pada tahun 2010.

- ***Jaminan Risiko Land Capping atas Proyek Pembangunan Jalan Tol***

Dalam rangka proyek pembangunan jalan tol, Pemerintah menanggung sebagian dari kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan. Jumlah proyek pembangunan jalan tol mendapat dukungan Pemerintah sebanyak 28 proyek, diantaranya adalah proyek-proyek Jalan Tol Trans Jawa dan Jakarta Outer Ring Road II (JORR II).

Pemberian dukungan Pemerintah atas kenaikan biaya pengadaan tanah pada 28 ruas jalan tol dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan jalan tol yang

tersendat karena permasalahan kenaikan harga dalam pembebasan tanah yang akan digunakan dalam pembangunan jalan tol. Di samping itu, dukungan juga dimaksudkan untuk menjaga tingkat kelayakan finansial dari proyek jalan tol sehingga diharapkan investor segera menyelesaikan pembangunannya.

Pemberian dukungan pemerintah dimaksud akan dialokasikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun anggaran yakni tahun 2008 hingga tahun 2010 dengan total nilai dukungan sebesar Rp4,89 triliun. Mengingat jangka waktu tersebut, kiranya dukungan pemerintah ini bersifat temporer. Arah kebijakan mendatang untuk percepatan pembangunan jalan tol, risiko *land capping* akan ditanggulangi dengan melakukan penyediaan lahan terlebih dahulu oleh kementerian negara/lembaga.

- ***Percepatan Penyediaan Air Minum***

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mencapai *millennium development goals* (MDG), Pemerintah memandang perlu untuk mendorong peningkatan investasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan akses PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional, melalui kebijakan pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat.

Kebijakan dimaksud dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Jaminan Pemerintah Pusat adalah sebesar 70% dari jumlah kewajiban pembayaran kembali kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo, sedangkan sisanya sebesar 30% menjadi risiko bank yang memberikan kredit investasi. Sedangkan tingkat bunga kredit investasi yang disalurkan bank kepada PDAM ditetapkan sebesar BI rate ditambah paling tinggi 5%, dengan ketentuan tingkat bunga sebesar BI rate ditanggung PDAM dan selisih bunga di atas BI rate paling tinggi sebesar 5% menjadi subsidi yang ditanggung Pemerintah Pusat.

Jaminan atas kewajiban PDAM serta subsidi bunga tersebut akan dibayarkan Pemerintah melalui skema APBN. Jaminan tersebut selanjutnya akan menjadi kewajiban PDAM dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan ini adalah ketidakmampuan PDAM untuk membayar kewajibannya yang jatuh tempo kepada perbankan. Untuk itu Pemerintah akan memenuhi 70% dari kewajiban PDAM tersebut. Faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya hal itu di antaranya adalah tingkat kehilangan air (*non water revenue/NWR*) yang tinggi, manajemen internal PDAM yang kurang handal, serta penetapan tarif air minum (oleh Pemda/Kepala Daerah) yang berada di bawah harga keekonomian.

Kewajiban PDAM kepada bank masih terbatas pada kewajiban pembayaran bunga atas pinjaman. Untuk itu dalam APBN-P Tahun 2010, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar guna mengantisipasi risiko fiskal atas kewajiban PDAM dalam pembayaran bunga kredit tersebut.

11. *Unfunded Liability* atas Program Tabungan Hari Tua (THT)

Dalam pelaksanaan pemberian kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil, disamping Negara dapat menanggung pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan PNS, juga melibatkan PNS dalam menanggung pembiayaan untuk penyelenggaraannya melalui iuran PNS bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1974, maka dari setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dipungut iuran 10% dari penghasilan setiap bulannya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. 3¼% dari 10% tersebut merupakan iuran THT. Sesuai dengan penjelasan Pasal 6 PP No. 25 Tahun 1981, Penghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diterima peserta setiap bulan tanpa pangan, satu dan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 478/KMK.06/2002, skema THT adalah manfaat pasti, di mana setiap PNS pada saat pensiun atau meninggal dunia akan menerima manfaat asuransi dwiguna dan atau manfaat asuransi kematian dan formulanya sudah ditetapkan.

Pasal 14 PP 25 Tahun 1981 menyatakan bahwa dalam hal penyelenggara asuransi sosial yaitu Badan Usaha Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka Negara bertanggung jawab penuh untuk itu.

Sesuai dengan Pasal 1 poin 3 PMK 65 Tahun 2008, Utang Kepada Dana Pensiun dan THT (*unfunded liability*) THT adalah pos belanja yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah dalam rangka penyesuaian perhitungan besarnya manfaat THT PNS dan Hakim.

Pada Laporan Keuangan PT TASPEN (program THT) Tahun 2010 diungkapkan bahwa terdapat Piutang *Past Service Liability* (PSL) Pemberi Kerja atas THT yang diestimasi, akibat kenaikan gaji pokok PNS tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
PSL Pemberi Kerja akibat PP 9/2007	1.638.443.906.070
PSL Pemberi Kerja akibat PP 14/2008	2.450.505.392.359
PSL Pemberi Kerja akibat PP 8/2009	3.024.845.340.493
PSL Pemberi Kerja akibat PP 25/2010	1.275.570.232.079
Total	8.389.364.871.001

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT (*unfunded liability*) tersebut merupakan estimasi sepihak oleh PT TASPEN (Persero). Pelunasan *Unfunded Liability* tersebut akan dilakukan Pemerintah apabila dinilai perlu setelah dilakukan:

- Audit menyeluruh (*due diligence*) atas PT Taspem (Persero) oleh auditor dan aktuaris independen; dan
- Pemisahan kekayaan dan kewajiban Program THT non-PNS dari kekayaan dan kewajiban Program THT PNS sesuai dengan PMK No. 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua PNS.

Selanjutnya, guna meningkatkan kemanfaatan program pensiun dan program THT bagi PNS, Pemerintah akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Perumusan dan penetapan program THT PNS baru yang mampu meningkatkan manfaat THT bagi PNS;
- Perumusan dan penetapan mekanisme program THT PNS baru yang lebih efisien dan akuntabel serta sesuai dengan *international best practices*;
- Pengaturan dan pengawasan yang lebih efektif atas PT Taspem (Persero).

12. *Past Service Liabilities* Program Pensiun

Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi Pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS, sebagai peserta. Namun

demikian, selama ini untuk penyelenggaraan program pensiun dan program THT, iuran hanya disetor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok.

Pemerintah menganut sistem pembayaran secara *pay as you go*, yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh Pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun dengan sistem *sharing* dengan Dana Pensiun. Pada APBN-P TA 2010 pembayaran pensiun 100% beban APBN. Sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2008, Pemerintah meminta PT TASPEN melakukan *sharing* terhadap pembayaran manfaat pensiun seperti pada tabel berikut ini:

No.	Periode	Sharing (%)		Sharing (Rp)	
		APBN	TASPEN	APBN	TASPEN
1	Januari - Maret 1994	0%	100%	-	684.484.404.672
2	April 1994 - Maret 1997	77,50%	22,50%	10.320.490.467.535	3.251.694.491.666
3	April 1997 - Desember 1998	77%	23%	4.166.973.000.000	1.443.702.023.854
4	Januari 1999 - Desember 2002	75%	25%	38.808.429.790.889	10.629.716.358.793
5	Januari 2003 - Desember 2005	79%	21%	45.267.251.395.247	10.369.704.931.390
6	Januari - Desember 2006	82,50%	17,50%	18.983.960.941.237	3.772.133.279.016
7	Januari - Desember 2007	85,50%	14,50%	23.342.832.127.554	3.476.843.628.139
8	Januari - Desember 2008	91%	9%	30.715.182.682.604	2.630.389.180.583
Total				171.605.120.405.066	36.258.668.298.113

Sistem pembayaran sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kekurangan pendanaan penyelenggaraan program pensiun dan THT. Berdasarkan Hasil Valuasi Aktuaria Independen per 31 Desember 2010 terdapat kewajiban Aktuaria Program Dana Pensiun sebesar Rp1.809,42 triliun. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan seluruh PNS, termasuk Veteran, TNI dan Polri (yang telah menjalani masa pensiun sampai dengan 31 Maret 1989), serta pejabat negara.

Sejak 1 April 1989, pembayaran pensiun TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri (Persero). Berdasarkan hasil perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh konsultan PT Binaputera Jaga Hikmah per 25 April 2007 menunjukkan bahwa *past service liabilities* (gabungan program pensiun dan beras) pada PT Asabri (Persero) per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp70,22 triliun.

Berdasarkan penjelasan di atas, total saldo *past service liabilities* untuk seluruh pensiun PNS, Veteran, TNI dan Polri adalah sebesar Rp1.879,64 triliun. Saldo *past service liabilities* ini belum disajikan sebagai kewajiban dalam LKPP Tahun 2010.

Sesuai dengan data dalam Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) Tahun 2010 diketahui bahwa jumlah dana titipan atas iuran program pensiun sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp28,76 triliun. Rincian Dana Program pensiun per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

A. Saldo per 31 Desember 2009	19.592.869.430.343
B. Penerimaan:	
Penerimaan Iuran Peserta	5.752.886.773.308
Penerimaan Dana dari Pemerintah	44.290.528.851.896
Hasil Investasi	2.331.840.697.387
Kenaikan Nilai Investasi	1.577.850.220.993
Pendapatan Lain-lain	2.421.605.068
Total Penerimaan	53.955.528.148.652
C. Pengeluaran:	
Pembayaran Manfaat Pensiun	44.072.261.214.225
Beban Operasional	554.750.108.128
Total Pengeluaran	44.627.011.322.353
D. Perubahan Dana (B-C)	9.328.516.826.299
E. Koreksi Dana Bersih	(158.344.359.085)
F. Saldo per 31 Desember 2010 (A + D + E)	28.763.041.897.557

13. Laporan Barang Milik Negara

Berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tetap per 31 Desember 2010, antara data Neraca LKKL dan data Laporan BMN, terdapat selisih sebesar Rp37.031.344.342.935, dengan rincian:

Jenis Aset Tetap	Data Neraca LKKL *)	Data LBMN *)	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Tanah	565.383.265.454.556	565.285.893.727.659	97.371.726.897
Peralatan dan Mesin	149.650.658.234.085	156.220.826.045.295	(6.570.167.811.210)
Gedung dan Bangunan	135.159.204.027.784	137.987.647.777.601	(2.828.443.749.817)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	274.018.737.210.428	301.803.911.892.267	(27.785.174.681.839)
Aset Tetap Lainnya	7.730.665.273.639	8.009.160.462.225	(278.495.188.586)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	45.111.873.131.273	44.778.307.769.649	333.565.361.624
Jumlah	1.177.054.403.331.760	1.214.085.747.674.700	(37.031.344.342.935)

*) tidak termasuk aset tetap yang ada di BRR NAD-Nias.

Selisih tersebut terutama disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Aset berstatus Bagian Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Kementerian ESDM sebesar Rp25,14 triliun masih tercatat pada LBMN.
2. Aset yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa Gedung dan Bangunan dan Peralatan dan Mesin, pada Neraca LKKL telah direklasifikasi menjadi Aset Lain-lain, namun masih tersaji sebagai Aset Tetap pada Laporan BMN.
3. Adanya aset tetap renovasi yang belum diakomodasikan dalam SIMAK-BMN sehingga pencatatannya dilakukan dalam aplikasi SAKPA saja.
4. Hal-hal lain yang menyebabkan selisih antara lain:
 - a. Beberapa Kementerian belum menyampaikan Laporan BMN-nya karena belum menggunakan pencatatan dengan Aplikasi SIMAK-BMN.
 - b. Adanya pergeseran data BMN dalam proses penyusunan LBP Tahun Anggaran 2010 yang dihimpun dari level pelaporan yang berada di bawahnya yang tidak diikuti dengan update data BMN pada LKKL.
 - c. SIMAK-BMN belum mencatat perolehan aset karena SPM pengesahan belum terbit.
 - d. Terdapat reklasifikasi aset yang belum dicatat dalam Laporan BMN.

14. Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP Tahun 2009

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Pemerintah telah melakukan tindak lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2009. Tindak lanjut dimaksud dapat dilihat pada **Daftar 41**.

C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN**Pencairan Dana Cadangan Subsidi/PSO dan Dana Cadangan DBH**

Sampai dengan LKPP Tahun 2010 ini disusun, dari total Rp25.748.971.862.317 dana cadangan subsidi/PSO dan dana cadangan DBH (lihat *Catatan C.2.26. Aset Lainnya-Dana yang Dibatasi Penggunaannya*) yang telah disalurkan kepada pihak ketiga sebesar Rp20.664.412.915.540 dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp5.084.558.846.777 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011.

Rincian dana cadangan yang disalurkan kepada pihak ketiga, disetorkan ke Kas Negara, saldo adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Dana Cadangan	Disalurkan kepada Pihak Ketiga	Disetorkan ke Kas Negara	Total
1. Subsidi Premium	1.924.576.449.503	188.660.942.314	2.113.237.391.817
2. Subsidi Minyak Tanah	580.247.161.509	15.738.752.920	595.985.914.429
3. Subsidi Minyak Solar	974.289.783.407	0	974.289.783.407
4. Subsidi LPG	1.043.741.129.751	0	1.043.741.129.751
5. Subsidi Listrik	271.474.935.307	0	271.474.935.307
6. Subsidi Pangan	3.482.420.249.209	752.106.685.220	4.234.526.934.429
7. Subsidi Benih	1.291.866.954.801	165.656.503.371	1.457.523.458.172
8. Subsidi Pupuk	2.148.291.304.875	2.918.819.911.055	5.067.111.215.930
9. Subsidi PELNI	50.000.000.000	0	50.000.000.000
10. Subsidi PT KAI	134.147.988.515	202.015.149	134.350.003.664
11. Subsidi PT Pos dan Giro	43.750.000.000	0	43.750.000.000
12. Konversi minyak tanah ke LPG-BPH Migas	1.367.129.314.091	21.801.075.647	1.388.930.389.738
13. DBH	7.352.477.644.572	1.021.572.961.101	8.374.050.605.673
Jumlah	20.664.412.915.540	5.084.558.846.777	25.748.971.862.317

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2010 sebesar Rp67,05 triliun

Saldo Awal Kas BUN, KPPN, dan BLU per 1 Januari 2010 adalah sebesar Rp67.053.271.784.456 yang merupakan saldo akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU per 31 Desember 2009 ditambah koreksi saldo awal kas pada TA 2010. Rincian saldo awal Kas BUN, KPPN, dan BLU adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU:		
Kas BUN di BI	32.185.520.242.213	67.707.599.065.065
Kas di KPPN	8.309.379.301.258	6.755.052.343.271
Kas pada BLU	5.567.846.500.943	1.367.545.965.572
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Sebelum Penyesuaian	46.062.746.044.414	75.830.197.373.908
Penyesuaian Saldo Awal		
Penyesuaian Saldo Awal Kas pada BLU	112.445.204.316	252.842.539.718
Penyesuaian Saldo Awal Kas pada BLU Sebelum TA 2009	-	1.499.773.871.336
Penyesuaian Saldo Awal Rekening SAL *)	5.870.514.138.408	-
Penyesuaian Saldo Awal Rekening Penempatan pada Bank Umum *)	15.000.000.000.000	-
Penyesuaian Saldo Awal KPPN	7.566.397.318	-
Total Penyesuaian Saldo Awal	20.990.525.740.042	1.752.616.411.054
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Setelah Koreksi	67.053.271.784.456	77.582.813.784.962

*) Penyesuaian dilakukan karena transaksi pada Rekening SAL dan Rekening Penempatan pada Bank Umum pada TA 2010 disajikan pada transaksi Laporan Arus Kas TA 2010.

PERUBAHAN KAS

Kenaikan Kas pada TA 2010 sebesar Rp29,09 triliun

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2010 dan TA 2009 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

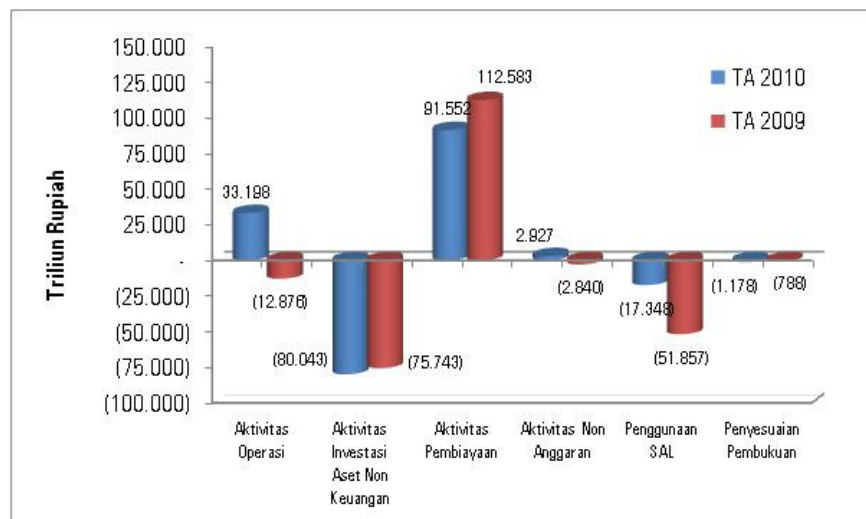
Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	33.197.591.404.914	(12.875.854.630.543)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(80.043.299.758.387)	(75.742.929.743.741)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pembiayaan	91.552.011.400.614	112.583.311.415.415
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Non Anggaran	2.927.386.748.278	(2.839.831.410.233)
Koreksi Pembukuan:		
Penggunaan SAL *)	(17.347.946.818.000)	(51.857.136.912.000)
Penyesuaian Pembukuan **)	(1.178.259.859.686)	(787.626.459.446)
Kenaikan (Penurunan) Kas	29.107.483.117.733	(31.520.067.740.548)

*) Peggunaan SAL pada TA 2010 sudah diakui sebagai bagian dari Penerimaan Pembiayaan

**) Penyesuaian Pembukuan terdiri dari:

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Pengembalian Pendapatan TA yang lalu	(168.929.200.391)	(648.859.364.437)
Front End Fee TA 2008 yang belum dibukukan	-	(77.510.360.029)
Koreksi Uang Persediaan	159.535.528.423	(43.513.387.221)
Koreksi Kas pada BLU RS Cicendo & RS Rotinsulu	-	(17.743.347.759)
Koreksi rekening retur	241.745.699	-
Selisih Kurs	(1.169.106.908.607)	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	(1.024.810)	-
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	(1.178.259.859.686)	(787.626.459.446)

Komposisi Arus Kas Bersih dari tiap aktivitas disajikan dalam Grafik 42.



Grafik 42: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

SALDO AKHIR KAS DAN BANK

Saldo Akhir Kas per
31 Desember 2010
sebesar Rp117,33
triliun

Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2010 sebesar Rp117.332.963.445.378 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Kas BUN, KPPN & BLU *)	96.160.754.902.189	46.062.746.044.414
Rekening Khusus	2.824.334.833.970	-
Rekening Pemerintah Lainnya	8.539.601.162.593	32.218.505.711.694
Kas di Bendahara Pengeluaran	518.919.028.152	1.036.241.894.537
Kas di Bendahara Penerimaan	632.344.354.246	1.040.200.195.970
Kas Lainnya dan Setara Kas **)	8.603.994.085.726	901.887.427.630
Kas pada BLU ***)	53.015.078.502	109.128.878.158
Jumlah Saldo Akhir Kas	117.332.963.445.378	81.368.710.152.403

*) Saldo Akhir Kas BUN, KPPN & BLU terdiri dari:

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Rekening Kas BUN di BI	79.606.375.358.793	32.185.520.242.213
Rekening Kas di KPPN	9.218.612.887.732	8.309.379.301.258
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	7.287.580.742.179	5.567.846.500.943
Hibah Kas Langsung K/L yang Sudah Disahkan	48.185.913.485	-
Jumlah	96.160.754.902.189	46.062.746.044.414

*) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp8.603.994.085.726 berasal dari saldo sebesar Rp8.652.179.999.211 dikurangi dengan Kas dari hibah langsung K/L yang sudah disahkan sebesar Rp48.185.913.485.

***) Kas pada BLU sebesar Rp53.015.078.502 merupakan Kas pada BLU yang belum disahkan oleh KPPN dan beberapa koreksi, dengan perhitungan sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Total Kas pada BLU menurut K/L	7.340.595.820.681	5.676.975.379.101
Dikurangi:		
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	7.287.580.742.179	5.567.846.500.943
Kas pada BLU yang belum disahkan KPPN	53.015.078.502	109.128.878.158

Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN sebesar Rp7.287.580.742.179 berasal dari perhitungan sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Saldo awal BLU	5.567.846.500.943	1.367.545.965.572
Koreksi Tambah Saldo Awal Kas pada BLU	112.445.204.316	1.752.616.411.054
Koreksi Kurang pada BLU RS Cicendo dan RS Rotinsulu	-	(17.743.347.759)
Pendapatan BLU	10.590.842.035.270	8.369.529.106.041
Belanja BLU	(8.983.552.998.350)	(5.904.101.633.965)
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	7.287.580.742.179	5.567.846.500.943

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2010 diuraikan sebagai berikut:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp33,20 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2010. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp33.197.591.404.914, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Arus Kas Masuk	980.192.560.688.363	848.646.609.964.902
Dikurangi Arus Kas Keluar	946.994.969.283.449	861.522.464.595.445
Arus Kas Bersih	33.197.591.404.914	(12.875.854.630.543)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi menunjukkan bahwa pendapatan operasional Pemerintah cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasional Pemerintah. Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2009, terdapat kenaikan arus kas bersih sebesar Rp46.073.446.035.457 atau 357,83%.

D.2.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan Rp708,49 triliun

Penerimaan Perpajakan pada TA 2010 sebesar Rp708.491.594.557.244 terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp679.834.693.844.284 dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp28.656.900.712.960. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2010 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Rincian Penerimaan Perpajakan TA 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Pajak Dalam Negeri		
Pajak Penghasilan (PPh)	354.152.324.675.100	317.614.988.311.624
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM)	219.538.218.197.355	193.067.541.998.775
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	28.580.589.978.740	24.270.191.705.513
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.026.429.073.342	6.464.517.415.416
Cukai	66.165.922.512.567	56.718.468.581.956
Pajak Lainnya	3.371.209.407.180	3.116.049.056.610
Jumlah Penerimaan Pajak DN	679.834.693.844.284	601.251.757.069.894
Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	19.759.193.417.044	18.098.273.245.280
Bea Keluar	8.897.707.295.916	564.954.748.325
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	28.656.900.712.960	18.663.227.993.605
Penerimaan Perpajakan	708.491.594.557.244	619.914.985.063.499

Dengan demikian, penerimaan Perpajakan dalam TA 2010 lebih besar Rp88.576.609.493.745 atau 14,29 persen dari TA 2009.

a. Pajak Penghasilan

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada TA 2010 adalah sebesar Rp354.152.324.675.100 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Rincian penerimaan kas dari PPh pada TA 2010 dan TA 2009 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
PPh Migas		
PPh Minyak Bumi	22.833.341.093.125	18.360.480.065.849
PPh Gas Alam	36.039.390.019.682	31.683.194.144.689
PPh Lainnya Minyak Bumi	-	-
PPh Migas Lainnya	-	-
Jumlah PPh Migas	58.872.731.112.807	50.043.674.210.538
PPh Non Migas		
PPh Pasal 21	55.331.533.581.255	52.072.653.972.683
PPh Pasal 22	4.737.703.749.312	4.368.552.138.289
PPh Pasal 22 Impor	23.601.167.040.565	19.202.894.609.796
PPh Pasal 23	16.277.579.888.579	16.032.496.664.217
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2.934.981.111.137	3.346.803.263.201
PPh Pasal 25/29 Badan	131.480.615.289.276	120.312.764.156.957
PPh Pasal 26	20.958.300.304.414	18.365.176.514.472
PPh Final dan Fiskal LN	39.926.176.715.682	33.847.137.287.436
PPh Non Migas Lainnya	31.535.882.073	22.835.494.035
Jumlah PPh Non Migas	295.279.593.562.293	267.571.314.101.086
Jumlah Pajak Penghasilan	354.152.324.675.100	317.614.988.311.624

Dengan demikian, penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2010 lebih besar Rp36.537.336.363.476 atau 11,50 persen dari penerimaan TA 2009.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) untuk

TA 2010 adalah sebesar Rp219.538.218.197.355. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	131.879.564.017.016	126.524.801.302.850
PPN dan PPnBM Impor	87.495.388.460.763	66.255.615.400.539
PPN dan PPnBM lainnya	163.265.719.576	287.125.295.386
Jumlah PPN dan PPnBM	219.538.218.197.355	193.067.541.998.775

Dengan demikian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah pada TA 2010 lebih besar Rp26.470.676.198.580 atau 13,71 persen dari TA 2009.

c. Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2010 adalah sebesar Rp28.580.589.978.740. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
PBB Pedesaan	1.231.724.607.759	1.434.162.381.044
PBB Perkotaan	6.379.133.976.045	5.510.387.938.885
PBB Perkebunan	906.563.035.437	705.413.144.414
PBB Kehutanan	231.794.826.611	158.094.180.964
PBB Pertambangan	499.103.659.423	514.805.691.913
PBB Migas	19.332.269.873.465	15.947.328.368.293
Jumlah PBB (Neto)	28.580.589.978.740	24.270.191.705.513

Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada TA 2010 lebih besar Rp4.310.398.273.227 atau 17,76 persen dari TA 2009.

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada TA 2010 adalah sebesar Rp8.026.429.073.342 yang berarti lebih besar Rp1.561.911.657.926 atau 24,16 persen dari penerimaan TA 2009 sebesar Rp6.464.517.415.416.

e. Cukai

Penerimaan Cukai pada TA 2010 adalah sebesar Rp66.165.922.512.567, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Cukai Hasil Tembakau	63.295.281.573.097	55.379.914.472.652
Cukai Ethyl Alkohol	145.871.055.229	385.069.410.227
Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	2.697.254.271.105	927.224.651.121
Denda Administrasi Cukai	12.995.359.858	15.946.685.476
Cukai Lainnya	14.520.253.278	10.313.362.480
Jumlah Penerimaan Cukai (Neto)	66.165.922.512.567	56.718.468.581.956

Dengan demikian, penerimaan Cukai pada TA 2010 lebih besar Rp9.447.453.930.611 atau 16,66 persen dari Penerimaan Cukai TA 2009.

f. Pajak Lainnya

Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2010 adalah sebesar Rp3.371.209.407.180. Rincian

Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Penjualan Benda dan Bea Materai	3.340.690.298.876	3.035.798.665.298
Pendapatan PPN Batubara	5.049.944	-
Pajak Tidak Langsung	907.491.220	1.199.386.323
Bunga Penagihan Pajak:		
- Bunga Penagihan PPh	(18.094.935.596)	32.277.412.571
- Bunga Penagihan PPN	47.163.985.911	44.936.249.306
- Bunga Penagihan PPnBM	443.759.337	68.297.251
- Bunga Penagihan PTLL	93.757.488	1.769.045.861
Jumlah Bunga Penagihan Pajak	29.606.567.140	79.051.004.989
Jumlah Pajak Lainnya	3.371.209.407.180	3.116.049.056.610

Dengan demikian, penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2010 lebih besar Rp255.160.350.570 atau 8,19 persen dari TA 2009.

g. Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2010 adalah sebesar Rp28.656.900.712.960, yang terdiri dari Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp19.759.193.417.044 dan Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp8.897.707.295.916. Rincian Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Bea Masuk		
Bea Masuk	18.599.690.058.915	17.737.630.922.391
Bea Masuk DTP atas Hibah (SPM Nihil)	2.061.591.716	3.656.606.296
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	540.590.656.021	680.420.327.241
Bea Masuk dalam rangka KITE	566.917.871.634	(366.083.630.565)
Denda atas sanksi administrasi	10.000.000	-
Pabean Lainnya	49.923.238.758	42.649.019.917
Jumlah Bea Masuk	19.759.193.417.044	18.098.273.245.280
Bea Keluar	8.897.707.295.916	564.954.748.325
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	28.656.900.712.960	18.663.227.993.605

Dengan demikian, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2010 lebih besar Rp9.993.672.719.355 atau 53,55 persen dari TA 2009.

Penerimaan Perpajakan TA 2010 tersebut tidak termasuk Pajak Ditanggung Pemerintah (Pajak DTP) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP).

D.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

*PNBP sebesar
Rp268,68 triliun*

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2010 adalah sebesar Rp268.677.979.570.356, yang berarti lebih besar Rp41.612.998.173.350 atau 18,33 persen dari TA 2009 sebesar Rp227.064.981.397.006.

PNBP tersebut berasal dari penerimaan dari Sumber Daya Alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU.

Rincian atas penerimaan negara bukan pajak adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2010 adalah sebesar Rp168.825.442.320.286. Penerimaan ini merupakan penerimaan negara yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi SDA, yang terdiri dari:

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Minyak Bumi	111.814.923.202.135	90.055.956.098.738
Pendapatan Gas Alam	40.918.314.502.416	35.696.003.511.600
Pendapatan Pertambangan Umum	12.646.750.881.580	10.369.410.930.584
Pendapatan Kehutanan	3.009.672.120.638	2.345.432.302.758
Pendapatan Perikanan	91.995.180.732	92.039.435.895
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	343.786.432.785	400.393.666.556
Jumlah Penerimaan SDA	168.825.442.320.286	138.959.235.946.131

Dengan demikian, penerimaan Sumber Daya Alam pada TA 2010 lebih besar Rp29.866.206.374.155 atau 21,49 persen dari TA 2009.

b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada TA 2010 adalah sebesar Rp30.096.932.694.265, yang berarti lebih besar Rp4.047.389.624.825 atau 15,54 persen dari TA 2009 sebesar Rp26.049.543.069.440. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara.

c. Penerimaan PNBP Lainnya

Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2010 adalah sebesar Rp59.164.762.520.535. Penerimaan ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/ Sitaan	6.304.681.982.846	5.245.174.719.960
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	9.782.852.016.185	11.007.170.053.975
Pendapatan Sewa	147.500.857.682	124.823.250.679
Pendapatan Jasa I	16.735.427.684.773	13.317.228.679.684
Pendapatan Jasa II	1.667.532.340.637	1.614.683.875.661
Pendapatan Jasa Luar Negeri	688.636.910.955	436.564.995.570
Pendapatan Jasa Perbankan	596.750.769	971.796.825
Pendapatan atas Pengelolaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	3.468.219.982.039	3.001.226.634.244
Pendapatan Jasa Kepolisian	2.595.168.223.016	1.756.304.250.420
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	144.628.206.659	71.163.765.630
Pendapatan Jasa Lainnya	116.335.390.253	175.245.203.121
Pendapatan Bunga	3.858.459.830.064	1.575.215.565.189
Pendapatan Gain On Bond Redemption	48.397.000.000	790.983.202.537
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	3.445.549.357.000	373.158.620.000
Pendapatan Fee atas <i>Security Landing</i>	0	31.033.105
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	166.607.987.382	163.745.970.532
Pendapatan Pendidikan	2.983.449.553.759	3.257.742.968.625
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	213.767.299.728	635.620.302.960
Pendapatan Iuran dan Denda	704.797.429.654	605.357.951.326
Pendapatan Pelunasan Piutang	47.908.471.893	60.516.516.546
Pendapatan dari Penutupan Rekening	11.769.234.305	217.842.978.081
Pendapatan Lain-lain	6.032.476.010.936	9.255.900.940.724
Jumlah PNBP Lainnya (Neto)	59.164.762.520.535	53.686.673.275.394

Dengan demikian, penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2010 lebih besar Rp5.478.089.245.141 atau 10,20 persen dari TA 2009.

d. Penerimaan Badan Layanan Umum

Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) pada TA 2010 adalah sebesar Rp10.590.842.035.270, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	9.906.996.304.665	7.669.417.926.128
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	34.976.353.539	46.050.792.391
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	172.630.678.219	206.485.914.133
Pendapatan BLU Lainnya	476.238.698.847	447.574.473.389
Jumlah Penerimaan BLU (Neto)	10.590.842.035.270	8.369.529.106.041

Dengan demikian, penerimaan BLU pada TA 2010 lebih besar Rp2.221.312.929.229 atau 26,54 persen dari TA 2009.

D.2.3. Penerimaan Hibah

*Penerimaan Hibah
sebesar Rp3,02 triliun*

Penerimaan Hibah pada TA 2010 adalah sebesar Rp3.022.986.560.763. Pendapatan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu, penerimaan hibah juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Hibah Dalam Negeri		
Hibah Dalam Negeri – Perorangan	0	77.350.000
Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha	25.000.000	11.628.100.575
Hibah Dalam Negeri Lainnya	254.107.349.174	385.173.221
Hibah Dalam Negeri Langsung (Lembaga/Badan Usaha)	98.867.782.983	0
Hibah Dalam negeri Langsung – Pemda	70.238.704.605	0
Jumlah Hibah Dalam Negeri	423.238.836.762	12.090.623.796
Hibah Luar Negeri		
Hibah Luar Negeri – Perorangan	235.708.020	167.684.688
Hibah Luar Negeri – Bilateral	253.114.464.189	223.447.187.873
Hibah Luar Negeri – Multilateral	1.804.053.783.311	1.430.862.250.905
Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya	542.343.768.481	75.757.135
Jumlah Hibah Luar Negeri	2.599.747.724.001	1.654.552.880.601
Jumlah Hibah	3.022.986.560.763	1.666.643.504.397

Dengan demikian, penerimaan Hibah pada TA 2010 lebih besar Rp1,356,343,056,366 atau 81,38 persen dari TA 2009.

D.2.4. Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
sebesar Rp148,07
triliun*

Belanja Pegawai pada TA 2010 adalah sebesar Rp148.072.602.131.332, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	42.465.549.827.688	36.219.858.779.829
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	36.935.432.979.430	33.244.614.465.152
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	727.783.954.393	690.795.819.499

Belanja Gaji Dokter PTT	690.958.920.462	348.074.150.000
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	165.688.295.443	153.865.532.989
Belanja Honorarium	1.444.890.460.937	1.941.399.446.994
Belanja Lembur	470.289.735.805	391.846.896.592
Belanja Vakasi	248.539.701.180	231.790.734.047
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	12.171.280.231.935	5.929.832.181.705
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	50.603.760.868.126	46.836.483.165.806
Belanja Asuransi Kesehatan	1.816.913.001.200	1.390.972.995.080
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	129.299.057.338	131.075.484.000
Belanja Cadangan Perubahan <i>Sharing</i>	0	(112.370.167)
Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dephub Pada PT KAI	202.215.097.395	152.826.407.199
Total Belanja Pegawai	148.072.602.131.332	127.663.323.688.725

Dengan demikian, Belanja Pegawai pada TA 2010 lebih besar Rp20.409.278.442.607 atau 15,99 persen dari TA 2009.

D.2.5. Belanja Barang

*Belanja Barang
sebesar Rp97,59
triliun*

Belanja Barang pada TA 2010 adalah sebesar Rp97.587.913.734.089 yang merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Belanja Barang	51.545.119.265.391	43.032.180.554.518
Belanja Jasa	12.122.676.491.698	10.381.776.334.174
Belanja Pemeliharaan	7.809.363.490.993	6.910.589.163.767
Belanja Perjalanan	18.303.524.718.632	15.156.091.211.519
Belanja Barang BLU	7.807.229.767.375	5.183.760.897.789
Jumlah Belanja Barang	97.587.913.734.089	80.664.398.161.767

Dengan demikian, Belanja Barang TA 2010 ini lebih besar Rp16.923.515.572.322 atau 20,98 persen dari TA 2009.

D.2.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang

*Belanja Pembayaran
Bunga Utang sebesar
Rp88,38 triliun*

Belanja Pembayaran Bunga Utang pada TA 2010 sebesar Rp88.381.042.974.663 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Bunga Utang mengalami penurunan Rp5.400.889.448.150 atau 5,76 persen dari Belanja Bunga Utang TA 2009 sebesar Rp93.781.932.422.813.

Rincian Belanja Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) masing-masing sebesar Rp73.802.092.037.454 dan Rp14.578.950.937.209 dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp73.802.092.037.454

merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik berdominasi rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara DN	54.560.273.982.091	55.835.119.571.928
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	2.750.995.750.000	1.242.704.483.099
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara DN	2.073.333.477.100	5.400.184.906.000
Belanja Pembayaran <i>Loss On Bond Redemption</i>	737.473.500.000	200.531.500.000
Belanja Pembayaran Discount SBSN DN	36.998.773.200	20.511.309.000
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Valas	11.633.182.927.198	11.057.884.166.031
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Valas	513.199.205.250	286.651.303.585
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara Valas	177.338.000.000	239.658.250.000
Belanja Pembayaran Denda	1.319.296.422.615	1.056.697.368.986
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN	73.802.092.037.454	75.339.942.858.629

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp14.578.950.937.209 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Belanja Bunga Pinjaman Program	3.551.962.345.689	4.012.667.518.042
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	11.026.988.591.520	14.429.322.046.142
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	14.578.950.937.209	18.441.989.564.184

D.2.7. Subsidi

*Subsidi sebesar
Rp177,89 triliun*

Belanja Subsidi pada TA 2010 sebesar Rp177.891.975.462.704 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Subsidi Perusahaan Negara		
Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM	82.351.322.825.873	45.039.390.590.990
Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM:		
Subsidi Non BBM - Harga/biaya	93.343.805.878.147	82.459.702.822.490
Subsidi Non BBM - Pajak	-	7.671.278.126.014
Subsidi Non BBM - Lainnya	-	495.139.763.106
Subtotal	93.343.805.878.147	90.626.120.711.610
Subsidi dalam Rangka PSO	1.373.894.220.390	1.339.429.839.461
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	177.069.022.924.410	137.004.941.142.061
Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	822.952.538.294	1.070.031.566.352
Jumlah Subsidi Perusahaan Swasta	822.952.538.294	1.070.031.566.352
Jumlah Belanja Subsidi (Neto)	177.891.975.462.704	138.074.972.708.413

Dengan demikian, Subsidi TA 2010 ini lebih besar Rp39.817.002.754.291 atau 28,84 persen dari TA 2009.

Subsidi Pajak TA 2010 tersebut tidak termasuk Pajak Ditanggung Pemerintah (Pajak DTP) dan

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP).

D.2.8. Belanja Hibah

*Bantuan Hibah
sebesar Rp70 miliar*

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah yang sifatnya tidak wajib. Pada TA 2010 terdapat belanja hibah negara kepada pemerintah daerah sebesar Rp70.008.777.575.

D.2.9. Bantuan Sosial

*Bantuan Sosial
sebesar Rp68,60
triliun*

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp68.595.466.637.272 merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Kompensasi Kenaikan Harga BBM	4.608.087.845.000	4.430.598.244.500
Bantuan Langsung Sekolah/Lembaga/Guru	37.604.432.063.192	43.919.937.543.541
Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga	965.889.642.762	3.991.797.084.200
Beasiswa	4.775.195.414.218	4.984.713.937.103
Lembaga Peribadatan	79.907.018.360	69.281.135.000
Lembaga Sosial Lainnya	20.561.954.653.740	16.400.566.434.690
Jumlah Bantuan Sosial (Neto)	68.595.466.637.272	73.796.894.379.034

Dengan demikian, Belanja Bantuan Sosial TA 2010 ini lebih kecil Rp5.201.427.741.762 atau 7,05 persen dari TA 2009.

D.2.10. Belanja Lain-lain

*Belanja Lain-lain
sebesar Rp21,67
triliun*

Belanja Lain-lain pada TA 2010 adalah sebesar Rp21.666.884.908.929, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Belanja Rekonstruksi Aceh	1.052.074.256	2.168.250.071.603
Kerjasama Teknis Internasional	-	(9.856.000)
Pemilu Tahunan	(2.040.000)	548.819.540.925
Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri	-	2.560.316.000
Cadangan Dana Reboisasi	(3.325)	305.973.497.740
Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)	-	166.961.798.926
Belanja DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP	942.264.497.985	912.710.139.096
Belanja Dana Penunjang (PHLN)	1.199.027.080	6.475.052.982
Belanja Non Modal-Otorita Batam	845.925.755	1.364.900.120
Belanja karena rugi selisih kurs	909.200.000.000	-
Jasa Surveyor	232.979.742.237	322.021.223.920
Jasa Perbendaharaan	102.072.122.675	7.908.981.849
Jasa Pelayanan Bank Operasional	-	(267.289)
Belanja untuk LPP TVRI	571.869.960.625	535.098.327.345
Belanja untuk LPP RRI	558.918.956.130	558.878.876.821
Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM	-	3.732.510.503.550
Dana Cadangan Risiko Kenaikan Harga Tanah	358.183.000.000	-
Belanja Lainnya	17.988.301.645.511	29.686.188.144.168
Jumlah Belanja Lain-lain	21.666.884.908.929	38.955.711.251.756

Dengan demikian, Belanja Lain-lain TA 2010 mengalami penurunan sebesar Rp17.288.826.342.827 atau 44,38 persen dari TA 2009.

*DBH Pajak sebesar
Rp45,82 triliun*

D.2.11. Dana Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil Pajak pada TA 2010 adalah sebesar Rp45.815.708.635.828, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Bagi Hasil Pajak Penghasilan	10.931.465.581.702	10.219.078.886.979
Bagi Hasil PBB	27.108.379.095.361	23.073.895.100.055
Bagi Hasil BPHTB	7.775.863.958.765	5.976.152.588.390
Jumlah Bagi Hasil Pajak	45.815.708.635.828	39.269.126.575.424

Dengan demikian, Bagi Hasil Pajak TA 2010 lebih besar Rp6.546.582.060.404 atau 16,67 persen dari TA 2009.

*DBH Cukai Tembakau
sebesar Rp1,20 triliun*

D.2.12. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

Bagi Hasil Cukai Tembakau merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil Cukai Tembakau pada TA 2010 adalah sebesar Rp1.202.111.025.283, sedangkan pada TA 2009 sebesar Rp1.065.069.180.000. Dengan demikian DBH Cukai Tembakau TA 2010 lebih besar Rp137.041.845.283 atau 12,87%.

*DBH SDA sebesar
Rp45,17 triliun*

D.2.13. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil SDA dalam TA 2010 adalah sebesar Rp45.165.743.030.463, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Bagi Hasil Minyak Bumi	20.567.117.652.257	14.613.344.635.284
Bagi Hasil Gas Alam	14.629.244.504.747	11.515.305.364.716
Bagi Hasil Pertambangan Umum	7.790.420.800.000	7.197.559.262.497
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	305.855.434.155	1.093.168.337.439
Bagi Hasil Kehutanan	1.753.104.639.304	1.307.096.277.783
Bagi Hasil Perikanan	120.000.000.000	69.277.945.794
Jumlah Bagi Hasil SDA	45.165.743.030.463	35.795.751.823.513

Dengan demikian, DBH SDA TA 2010 lebih besar Rp9.369.991.206.950 atau 26,18 persen dari TA 2009.

*DAU sebesar
Rp203,57 triliun*

D.2.14. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan propinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2010 sebesar Rp203.570.976.808.500, jumlah tersebut lebih besar Rp17.156.876.808.500 atau 9,20 persen dari TA 2009 sebesar Rp186.414.100.000.000.

D.2.15. Dana Alokasi Khusus

DAK sebesar Rp20,96 triliun

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Alokasi Khusus pada TA 2010 sebesar Rp20.956.311.168.000, jumlah tersebut lebih kecil Rp3.751.104.232.000 atau 15,18 persen dari TA 2009 sebesar Rp24.707.415.400.000.

D.2.16. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus sebesar Rp9,1 triliun

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Transfer Dana Otonomi Khusus pada TA 2010 sebesar Rp9.099.613.680.000, jumlah tersebut lebih kecil Rp426.950.320.000 atau 4,48 persen dari TA 2009 sebesar Rp9.526.564.000.000.

D.2.17. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian sebesar Rp18,92 triliun

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Transfer Dana Penyesuaian pada TA 2010 adalah sebesar Rp18.918.610.308.811, lebih besar Rp7.111.405.304.811 atau 60,23 persen dari TA 2009 sebesar Rp11.807.205.004.000.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Penurunan kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan sebesar minus Rp80,04 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2010 menunjukkan arus kas keluar bersih sebesar minus Rp80.043.299.758.387, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (<i>Audited</i>)	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Arus Masuk	263.876.638.486	109.437.667.665
Dikurangi Arus Keluar	80.307.176.396.873	75.852.367.411.406
Arus Kas Bersih	(80.043.299.758.387)	(75.742.929.743.741)

Dengan demikian, Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2010 lebih besar Rp4.300.370.014.646 atau 5,68 persen dari TA 2009.

D.2.18. Penjualan Aset

Penjualan Aset sebesar Rp263,88 miliar

Pendapatan Penjualan Aset merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa rumah tinggal, kendaraan bermotor, dan aset yang rusak atau berlebihan. Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap pada TA 2010 adalah sebesar Rp263.876.638.486, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan, dan Tanah	92.412.745.784	28.539.972.711
Penjualan Kendaraan Bermotor	2.169.006.285	1.250.275.075
Penjualan Sewa Beli	43.296.161.610	45.972.247.413
Penjualan Aset Tetap Lainnya	143.252.500	417.757.500
Penjualan Aset Lainnya	125.855.472.307	33.257.414.966
Jumlah Penjualan Aset	263.876.638.486	109.437.667.665

Dengan demikian, Pendapatan ini pada TA 2010 lebih besar Rp154.438.970.821 atau 141,12 persen dari TA 2009.

D.2.19. Belanja Aset Tetap

Belanja Aset Tetap sebesar Rp80,31 triliun

Belanja Aset Tetap pada TA 2010 adalah sebesar Rp80.307.176.396.873 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Belanja Modal Tanah	1.801.599.831.427	1.713.705.981.324
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.288.339.011.692	20.164.010.627.379
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.534.548.831.437	13.296.296.467.812
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	30.184.518.770.901	37.529.420.819.921
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.321.846.720.441	2.428.592.778.794
Belanja Modal BLU	1.176.323.230.975	720.340.736.176
Jumlah Belanja Aset Tetap	80.307.176.396.873	75.852.367.411.406

Belanja Aset Tetap ini pada TA 2010 lebih besar Rp4.454.808.985.467 atau 5,87 persen dari TA 2009.

Dengan Arus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp33.197.591.404.914 dan Arus Kas Bersih Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar minus Rp80.043.299.758.387 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp46.845.708.353.473. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Kenaikan kas dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp91,55 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas Pemerintah dan tuntutan Pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Pembiayaan Neto dalam TA 2010 adalah sebesar Rp91.552.011.400.614, yang berasal dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Arus Masuk	248.301.707.025.210	302.425.694.268.267
Dikurangi Arus Keluar	156.749.695.624.596	189.842.382.852.852
Arus Kas Bersih	91.552.011.400.614	112.583.311.415.415

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan TA 2010 lebih kecil Rp21.031.300.014.801 atau 18,68 persen dari TA 2009.

*Penerimaan
Pembiayaan DN
sebesar Rp193,45
triliun*

D.2.20. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2010 adalah sebesar Rp193.449.285.061.684, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Rekening Pemerintah	22.189.312.607.078	53.049.247.755.837
Privatisasi dan Penjualan Aset Restrukturisasi	3.232.148.153.135	690.333.091.255
Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)	167.634.217.942.000	148.537.685.651.903
Pinjaman Dalam Negeri	393.606.359.471	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	193.449.285.061.684	202.277.266.498.995

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2010 lebih kecil Rp8.827.981.437.311 atau 4,36 persen dibandingkan dengan TA 2009.

a. Rekening Pemerintah

Penerimaan pembiayaan dari Rekening Pemerintah pada TA 2010 sebesar Rp22.189.312.607.078 merupakan penerimaan pembiayaan dari rekening yang dimiliki oleh Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Penerimaan dari Rekening SAL	17.347.946.818.000	51.857.136.912.000
Penerimaan dari Rekening Dana Investasi	4.841.365.789.078	571.128.144.837
Penerimaan dari Rekening Pembangunan Hutan	-	620.982.699.000
Total Penerimaan dari Rekening Pemerintah	22.189.312.607.078	53.049.247.755.837

Penerimaan pembiayaan dari Rekening Pemerintah TA 2010 lebih kecil Rp30.859.935.148.759 atau 58,17 persen dari TA 2009.

b. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2010 adalah sebesar Rp3.232.148.153.135, berarti lebih besar Rp2.541.815.061.880 atau 368,2 persen dari penerimaan pada TA 2009 sebesar Rp690.333.091.255. Penerimaan ini berasal dari privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi dan penjualan/penyelesaian aset eks BPPN dan aset bekas milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Rincian Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Penerimaan Hasil Privatisasi	2.098.694.387.048	0
Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	133.448.541.746	435.579.335.129
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian aset eks BPPN	747.760.020.064	148.564.632.260
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	252.245.204.277	106.189.123.866
Total Penerimaan	3.232.148.153.135	690.333.091.255

c. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)

Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik berdominasi rupiah maupun valas. Penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2010 sebesar Rp167.634.217.942.000, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Penerbitan/Penjualan SPN	29.795.000.000.000	25.200.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	84.020.000.000.000	65.974.730.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	1.701.033.244.000	1.027.625.034.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas	0	39.770.426.000.000
Penerbitan/Penjualan SBSN - DN	26.966.860.000.000	9.519.290.000.000
Penerbitan/Penjualan SBSN - Valas	25.041.328.000.000	7.031.748.227.903
Imbalan Dibayar di muka SBSN - DN	109.996.698.000	13.866.390.000
Total Penerimaan SBN	167.634.217.942.000	148.537.685.651.903

Dengan demikian, penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2010 lebih besar Rp19.096.532.290.097 atau 12,86 persen dibanding TA 2009.

d. Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dalam TA 2010 adalah sebesar Rp393.606.359.471 yang merupakan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dari BUMN.

D.2.21. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

*Penerimaan
Pembiayaan LN
sebesar Rp54,79
triliun*

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2010 sebesar Rp54.794.790.200.206 merupakan seluruh penerimaan Pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, serta penjadwalan kembali bunga utang luar negeri. Rincian Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Pinjaman Program	28.974.644.489.116	28.937.702.908.655
Pinjaman Proyek	25.820.145.711.090	29.724.342.897.894
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	54.794.790.200.206	58.662.045.806.549

Dengan demikian, penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2010 lebih kecil Rp3.867.255.606.343 atau 6,59 persen dari TA 2009.

a. Pinjaman Program

Pinjaman Program yang diterima dalam TA 2010 adalah sebesar Rp28.974.644.489.116, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Program Bilateral	7.296.002.579.700	9.136.727.594.800
Program Multilateral	21.678.641.909.416	19.800.975.313.855
Jumlah Pinjaman Program	28.974.644.489.116	28.937.702.908.655

Dengan demikian, Pinjaman Program TA 2010 lebih besar Rp36.941.580.461 atau 0,13 persen dari TA 2009.

b. Pinjaman Proyek

Pinjaman Proyek yang diterima dalam TA 2010 adalah sebesar Rp25.820.145.711.090, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Pinjaman Proyek dari Bilateral	13.648.925.389.888	12.322.925.734.667
Pinjaman Proyek dari Multilateral	7.995.635.711.316	8.224.672.697.242
Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	3.972.357.132.656	5.270.208.271.880
Pinjaman Proyek Lainnya	203.227.477.230	3.906.536.194.105
Jumlah Pinjaman Proyek	25.820.145.711.090	29.724.342.897.894

Dengan demikian, Pinjaman Proyek TA 2010 lebih kecil Rp3.904.197.186.804 atau 13,13 persen dibandingkan TA 2009.

D.2.22. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan
Pengembalian
Penerusan Pinjaman
sebesar Rp57,63
miliar

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada TA 2010 sebesar Rp57.631.763.320 merupakan seluruh penerimaan Pemerintah sehubungan dengan cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD dan BUMN. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN	57.631.271.296	-
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN	492.024	3.133.897.417.553
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	57.631.763.320	3.133.897.417.553

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam TA 2010 lebih kecil Rp3.076.265.654.233 atau 98,16 persen dari TA 2009.

D.2.23. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Penerimaan
Pembiayaan Lain-lain
sebesar Rp0

Penerimaan Pembiayaan Lain-lain pada TA 2009 adalah sebesar Rp38.352.484.545.170 yang berasal dari penyesuaian penambahan saldo rekening dalam mata uang asing karena selisih kurs. Pada TA 2010 selisih kurs atas saldo rekening BUN dalam mata uang asing yang sudah terealisasi diakui sebagai penambah pendapatan atau penambah belanja, sehingga penerimaan pembiayaan lain-lain karena selisih kurs pada TA 2010 menjadi tidak ada.

D.2.24. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran
Pembiayaan DN
sebesar Rp77,53
triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2010 adalah sebesar Rp77.531.619.691.752 yang digunakan untuk pembiayaan pengembangan pendidikan nasional, pelunasan SPN, Obligasi Negara, dan SBSN, dengan rincian sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Pengembangan Pendidikan Nasional	1.000.000.000.000	-
Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	24.700.000.000.000	10.512.000.000.000
Pelunasan Obligasi Negara Rupiah	49.025.829.689.752	38.538.122.841.001
Pelunasan SBSN	2.805.790.002.000	16.665.166.900
Jumlah Pembiayaan Dalam Negeri	77.531.619.691.752	49.066.788.007.901

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2010 lebih besar Rp28.464.831.683.851 atau 58,01 persen dibandingkan TA 2009.

*Pengeluaran
Pembiayaan LN
sebesar Rp50,63
triliun*

D.2.25. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2010 sebesar Rp50.632.531.581.836 merupakan pembiayaan cicilan pokok utang luar negeri, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Pinjaman Program	8.960.858.742.350	8.755.976.968.919
Pinjaman Proyek	41.671.672.839.486	59.275.136.888.158
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	50.632.531.581.836	68.031.113.857.077

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2010 lebih kecil Rp17.398.582.275.241 atau 25,57 persen dibandingkan dengan TA 2009.

*PMN/Investasi
Pemerintah sebesar
Rp19,80 triliun*

D.2.26. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta investasi dalam bentuk dana bergulir. PMN/Investasi Pemerintah dalam TA 2010 adalah sebesar Rp19.799.149.000.000, yang terdiri dari:

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	6.038.600.000.000	11.673.967.076.291
Investasi Pemerintah untuk BLU PIP	8.427.500.000.000	500.000.000.000
Dana Bergulir	5.333.049.000.000	910.982.699.000
Jumlah Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	19.799.149.000.000	13.084.949.775.291

Dengan demikian, PMN/ Investasi Pemerintah TA 2010 lebih besar Rp6.714.199.224.709 atau 51,31 persen dari TA 2009.

*Penerusan Pinjaman
sebesar Rp8,79 triliun*

D.2.27. Penerusan Pinjaman

Penerusan Pinjaman merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Penerusan pinjaman luar negeri pada TA 2010 adalah sebesar Rp8.786.395.351.008. Jumlah tersebut lebih besar Rp2.605.694.916.929 atau 42,16 persen dibandingkan dengan TA 2009 sebesar Rp6.180.700.434.079.

*Pengeluaran
Pembiayaan Lain-lain
sebesar Rp0*

D.2.28. Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain

Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain pada TA 2009 sebesar Rp53.478.830.778.504, berasal dari penyesuaian penambahan saldo rekening dalam mata uang asing karena selisih kurs. Pada TA 2010 selisih kurs atas saldo rekening BUN dalam mata uang asing yang sudah terealisasi diakui sebagai penambah pendapatan atau penambah belanja, sehingga penerimaan pembiayaan lain-lain karena selisih kurs pada TA 2010 menjadi tidak ada.

Dengan Arus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp91.552.011.400.614 dan defisit anggaran sebesar Rp46.845.708.353.473, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2010 sebesar Rp44.706.303.047.141.

*Penurunan Kas dari
Aktivitas
Nonanggaran sebesar
Rp2,93 triliun*

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Dalam TA 2010, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah sebesar minus Rp2.927.386.748.278, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	619.814.108.170	956.696.291.231
PFK <i>Prefinancing</i> (Neto)	(34.367.584.001)	(2.500.000.000.000)
Kiriman Uang (Neto)	2.110.479.145.563	(1.545.543.155.898)
Transito (Neto)	231.461.078.546	249.015.454.434
Arus Kas Bersih	2.927.386.748.278	(2.839.831.410.233)

Dengan demikian, Arus Keluar Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran TA 2010 lebih besar Rp5.767.218.158.511 atau 203,08 persen dari TA 2009.

*PFK (Neto) sebesar
Rp619,81 Milyar*

D.2.29. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam TA 2010 sebesar Rp619.814.108.170 berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya, serta penerimaan dan pengeluaran karena kesalahan rekening pihak ketiga. Adapun Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK pada TA 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Penerimaan Non Anggaran PFK		
Penerimaan PFK 10% Gaji	14.364.213.100.694	13.167.818.220.274
Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	2.603.737.089	3.766.019.825
Penerimaan PFK Beras BULOG	194.517.894.374	172.521.810.942
Penerimaan PFK 2% Pemda	1.957.723.651.041	1.799.950.017.900
Penerimaan PFK Penutupan Rekening	538	881.870
Penerimaan PFK Lain-lain	380.422.971.142	355.865.935.419
Penerimaan Non Anggaran PFK karena Kesalahan Rekening	303.806.199.164	521.054.698.191
Jumlah Penerimaan PFK	17.203.287.554.042	16.020.977.584.421
Pengeluaran Non Anggaran PFK		
Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji	(13.748.624.194.032)	(12.578.656.020.477)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	(6.197.747.721)	(8.204.704.170)
Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog	(196.652.974.400)	(174.361.917.476)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Pemda	(1.914.952.896.918)	(1.698.969.644.025)
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(363.707.083.683)	(360.744.778.000)
Pengeluaran Non Anggaran PFK karena Kesalahan Rekening	(353.338.549.118)	(243.344.229.042)
Jumlah Pengeluaran PFK	(16.583.473.445.872)	(15.064.281.293.190)
PFK (Neto)	619.814.108.170	956.696.291.231

Dengan demikian, Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam TA 2010 lebih kecil Rp336.882.183.061 atau 35,21 persen dari TA 2009.

*PFK Prefinancing
sebesar minus
Rp34,37 miliar*

D.2.30. PFK Prefinancing dan PFK Lainnya

PFK Prefinancing dan PFK Lainnya TA 2010 sebesar minus Rp34.367.584.001 merupakan transaksi yang dilakukan BUN berupa *prefinancing* (pembiayaan pendahuluan), penerimaan/pengembalian dana talangan, dan pembayaran rekening khusus kosong (reksus kosong), dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Penerimaan PFK Prefinancing:		
Penerimaan Dana Talangan dari Rekening SAL	-	10.000.000.000.000
Jumlah Penerimaan PFK Prefinancing	-	10.000.000.000.000
Dikurangi:		
Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya dan Pengembalian Dana Talangan:		
Pembayaran dari Rekening BUN ke Reksus Kosong	(34.367.584.001)	-
Pengembalian Dana Talangan dari Rekening BUN ke Rekening SAL	-	(12.500.000.000.000)
Jumlah Pembayaran PFK Prefinancing	(34.367.584.001)	(12.500.000.000.000)
Jumlah PFK Prefinancing (Neto)	(34.367.584.001)	(2.500.000.000.000)

Dengan demikian, PFK *Prefinancing* dan PFK Lainnya dalam TA 2010 lebih kecil Rp2.465.632.415.999 atau 98,63 persen dari TA 2009.

D.2.31. Kiriman Uang

*Kiriman Uang sebesar
Rp2,11 triliun*

Kiriman Uang (KU) Neto TA 2010 sebesar Rp2.110.479.145.563 antara lain merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dan sebaliknya, pemindahbukuan intern rekening BUN, dan pemindahbukuan intern KPPN.

Dalam transaksi KU TA 2010 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, dan ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Rincian KU adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Penerimaan Kiriman Uang	1.325.889.913.002.690	587.188.187.776.413
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	1.836.812.447.294.620	485.551.004.467.303
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	422.936.887.167	193.533.422.980
Penerimaan Pemindahbukuan	953.561.129.420.368	742.252.369.032.078
Penerimaan Pemindahbukuan Penutupan Rekening	0	1.274.445
Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka		
Penempatan	2.430.648.501.857.460	2.202.017.618.830.220
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	300.188.447.031	72.564.947.475
Jumlah Penerimaan KU	6.547.635.116.909.336	4.017.275.279.750.910
Dikurangi:		
Pengeluaran Kiriman Uang	(1.325.909.445.857.020)	(580.363.687.655.370)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	(1.836.821.363.734.340)	(492.045.583.099.721)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	(189.533.624.804)	(217.811.557.253)
Pengeluaran Pemindahbukuan	(951.654.706.149.508)	(744.110.339.294.908)
Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka		
Penempatan	(2.430.648.501.857.460)	(2.202.017.618.830.220)
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(301.086.540.642)	(65.782.469.340)
Jumlah Pengeluaran KU	(6.545.524.637.763.774)	(4.018.820.822.906.810)
Jumlah KU (Neto)	2.110.479.145.563	(1.545.543.155.898)

Dengan demikian, KU keluar neto dalam TA 2010 lebih besar Rp3.656.002.301,461 atau

236,55 persen dari TA 2009.

Dalam jumlah KU (Neto) TA 2010 sebesar Rp2.110.479.145.563, terdapat transaksi pengembalian dana talangan rekening khusus kosong dari *lender* sebesar Rp1.864.987.287.856. Jumlah pengembalian dana talangan rekening khusus kosong tersebut mengurangi saldo Uang Muka BUN pada neraca.

D.2.32. Transito

Transito Rp231,46 miliar

Transito (Neto) TA 2010 sebesar Rp231.461.078.546 merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2010 (Audited)	TA 2009 (Audited)
Penerimaan Transito		
Penerimaan Pengembalian UP Dana Rupiah	14.615.755.922.810	16.543.240.933.282
Penerimaan Pengembalian UP Dana Pinjaman/Hibah LN	180.924.620.174	206.667.044.198
Penerimaan Pengembalian UP Pengguna PNB (Swadana)	800.285.940.550	1.024.908.510.243
Penerimaan Pengembalian UP Tahun Anggaran yang Lalu	921.474.650.732	1.016.364.762.277
Penerimaan Pengembalian UP Pengembalian (Restitusi) Pajak	75.345.533	-
Jumlah Penerimaan Transito	16.518.516.479.799	18.791.181.250.000
Dikurangi:		
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran UP Dana Rupiah	(15.292.755.972.415)	17.265.084.844.123
Pengeluaran UP Dana Pinjaman/Hibah LN	(183.710.889.707)	209.442.622.750
Pengeluaran UP Pengguna PNB (Swadana)	(823.849.322.851)	1.081.908.799.022
Pengeluaran Pengemb. Kelebihan Setoran Sisa UP/TUP TAYL	13.660.783.720	14.270.470.329
Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak	(400.000.000)	-
Jumlah Pengeluaran Transito	(16.287.055.401.253)	(18.542.165.795.566)
Jumlah Transito (Neto)	231.461.078.546	249.015.454.434

Dengan demikian, Transito (Neto) dalam TA 2010 lebih besar Rp17.554.375.888 atau 7,05 persen dari TA 2009.



REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI 2010	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI 2009	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	992.398.789.998.000	995.271.511.391.343	100,29%	848.763.235.195.483	146.508.276.195.860
41	Penerimaan Perpajakan	743.325.906.000.000	723.306.668.621.739	97,31%	619.922.172.626.415	103.384.495.995.324
411	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	720.764.533.000.000	694.392.134.931.291	96,34%	601.251.757.069.894	93.140.377.861.397
4111	Pendapatan Pajak Penghasilan	362.219.020.000.000	357.045.537.152.188	98,57%	317.614.988.311.624	36.537.336.363.476
41111	Pendapatan Pajak PPh Migas	55.382.380.000.000	58.872.731.112.807	106,30%	50.043.674.210.538	8.829.056.902.269
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	22.557.780.000.000	22.833.341.093.125	101,22%	18.360.480.065.849	4.472.861.027.276
411112	Pendapatan PPh Gas Alam	32.824.600.000.000	36.039.390.019.682	109,79%	31.683.194.144.689	4.356.195.874.993
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	-	-	-	-	-
41112	Pendapatan PPh Non-Migas	306.797.070.000.000	295.268.135.134.989	96,24%	267.539.660.156.223	27.728.474.978.766
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	61.573.360.000.000	55.331.533.581.255	89,86%	52.072.653.972.683	3.258.879.608.572
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	5.433.280.000.000	4.737.703.749.312	87,20%	4.368.552.138.289	369.151.611.023
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	23.913.640.000.000	23.601.167.040.565	98,69%	19.202.894.609.796	4.398.272.430.769
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	19.961.450.000.000	16.277.579.888.579	81,55%	16.032.496.664.217	245.083.224.362
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	4.295.860.000.000	2.934.981.111.137	68,32%	3.346.803.263.201	(411.822.152.064)
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	126.655.400.000.000	131.480.615.289.276	103,81%	120.312.764.156.957	11.167.851.132.319
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	22.865.390.000.000	20.958.300.304.414	91,66%	18.365.176.514.472	2.593.123.789.942
411128	Pendapatan PPh Final	42.098.690.000.000	39.914.718.288.378	94,81%	33.815.483.342.573	6.099.234.945.805
411129	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	-	31.535.882.073	-	22.835.494.035	8.700.388.038
41113	Pendapatan PPh Fiskal	39.570.000.000	11.458.427.304	28,96%	31.653.944.863	(20.195.517.559)
411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	39.570.000.000	11.458.427.304	28,96%	31.653.944.863	(20.195.517.559)
41114	Pendapatan PPh ditanggung Pemerintah	-	2.893.212.477.088	-	-	2.893.212.477.088
411141	Pendapatan PPh psl 21 ditanggung Pemerintah	-	13.443.203.890	-	-	13.443.203.890
411142	Pendapatan PPh psl 22 ditanggung Pemerintah	-	20.887.691	-	-	20.887.691
411144	Pendapatan PPh psl 23 ditanggung Pemerintah	-	13.610.253.027	-	-	13.610.253.027
411146	Pendapatan PPh psl 25/29 ditanggung Pemerintah	-	646.917.431.460	-	-	646.917.431.460
411147	Pendapatan PPh psl 26 ditanggung Pemerintah	-	2.026.558.132.445	-	-	2.026.558.132.445
411148	Pendapatan PPh Final ditanggung Pemerintah	-	192.662.568.575	-	-	192.662.568.575
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	262.962.992.000.000	230.604.864.967.823	87,69%	193.067.541.998.775	37.537.322.969.048
41121	Pendapatan PPN	-	207.134.899.640.327	-	184.158.779.639.841	22.976.120.000.486
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	-	124.270.086.028.947	-	120.441.921.986.428	3.828.164.042.519
411212	Pendapatan PPN Impor	-	82.705.863.862.547	-	63.445.004.843.881	19.260.859.018.666
411219	Pendapatan PPN Lainnya	-	158.949.748.833	-	271.852.809.532	(112.903.060.699)
41122	Pendapatan PPNBM	-	12.403.318.557.028	-	8.908.762.358.934	3.494.556.198.094
411221	Pendapatan PPNBM Dalam Negeri	-	7.609.477.988.069	-	6.082.879.316.422	1.526.598.671.647
411222	Pendapatan PPNBM Impor	-	4.789.524.598.216	-	2.810.610.556.658	1.978.914.041.558
411229	Pendapatan PPNBM Lainnya	-	4.315.970.743	-	15.272.485.854	(10.956.515.111)
41123	Pendapatan PPN ditanggung Pemerintah	-	11.066.646.770.468	-	-	11.066.646.770.468
411231	Pendapatan PPN Dalam Negeri Ditanggung Pemerintah	-	9.601.076.564.662	-	-	9.601.076.564.662
411232	Pendapatan PPN Impor Ditanggung Pemerintah	-	1.457.726.880.227	-	-	1.457.726.880.227

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI 2010	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI 2009	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	6	7
411239	Pendapatan PPN Lainnya Ditanggung Pemerintah		7.843.325.579			7.843.325.579
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	25.319.148.000.000	28.580.589.978.740	112,88%	24.270.191.705.513	4.310.398.273.227
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	25.319.148.000.000	28.580.589.978.740	112,88%	24.270.191.705.513	4.310.398.273.227
411311	Pendapatan PBB Pedesaan	-	1.231.724.607.759		1.434.162.381.044	(202.437.773.285)
411312	Pendapatan PBB Perkotaan	-	6.379.133.976.045		5.510.387.938.885	868.746.037.160
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	-	906.563.035.437		705.413.144.414	201.149.891.023
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	-	231.794.826.611		158.094.180.964	73.700.645.647
411315	Pendapatan PBB Pertambangan	-	499.103.659.423		514.805.691.913	(15.702.032.490)
411316	Pendapatan PBB Migas	-	19.332.269.873.465		15.947.328.368.293	3.384.941.505.172
411319	Pendapatan PBB Lainnya	-	-		-	-
4114	Pendapatan BPHTB	7.155.525.000.000	8.026.429.073.342	112,17%	6.464.517.415.416	1.561.911.657.926
41141	Pendapatan BPHTB	7.155.525.000.000	8.026.429.073.342	112,17%	6.464.517.415.416	1.561.911.657.926
411411	Pendapatan BPHTB	7.155.525.000.000	8.026.429.073.342	112,17%	6.464.517.415.416	1.561.911.657.926
4115	Pendapatan Cukai	59.265.922.000.000	66.165.922.512.567	111,64%	56.718.468.581.956	9.447.453.930.611
41151	Pendapatan Cukai	59.265.922.000.000	66.165.922.512.567	111,64%	56.718.468.581.956	9.447.453.930.611
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	55.865.922.000.000	63.295.281.573.097	113,30%	55.379.914.472.652	7.915.367.100.445
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	419.237.000.000	145.871.055.229	0,35%	385.069.410.227	(239.198.354.998)
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	2.980.763.000.000	2.697.254.271.105	90,49%	927.224.651.121	1.770.029.619.984
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	-	12.995.359.858		15.946.685.476	(2.951.325.618)
411519	Pendapatan Cukai Lainnya	-	14.520.253.278		10.313.362.480	4.206.890.798
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	3.841.926.000.000	3.968.791.246.631	103,30%	3.116.049.056.610	852.742.190.021
41161	Pendapatan Pajak Lainnya	3.841.926.000.000	3.341.602.840.040	86,98%	3.036.998.051.621	304.604.788.419
411611	Pendapatan Bea Meterai	-	952.366.711.391		947.438.292.533	4.928.418.858
411612	Pendapatan Dari Penjualan Benda Meterai	-	2.388.323.587.485		2.088.360.372.765	299.963.214.720
411613	Pendapatan PPn Batubara	-	5.049.944		-	5.049.944
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	907.491.220		1.199.386.323	(291.895.103)
41162	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	-	29.606.567.140		79.051.004.989	(49.444.437.849)
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	-	(18.094.935.596)		32.277.412.571	(50.372.348.167)
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	-	47.163.985.911		44.936.249.306	2.227.736.605
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	-	443.759.337		68.297.251	375.462.086
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	-	93.757.488		1.769.045.861	(1.675.288.373)
41163	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Ditanggung Pemerintah	-	597.581.839.451			597.581.839.451
411631	Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah		383.768.113.579			383.768.113.579
411632	Pendapatan Bunga Penagihan PPN Ditanggung Pemerintah		213.813.725.872			213.813.725.872
412	Pajak Perdagangan Internasional	22.561.373.000.000	28.914.533.690.448	128,16%	18.670.415.556.521	10.244.118.133.927
4121	Pendapatan Bea Masuk	17.106.813.000.000	20.016.826.394.532	117,01%	18.105.460.808.196	1.911.365.586.336
41211	Pendapatan Bea Masuk	17.106.813.000.000	20.016.826.394.532	117,01%	18.105.460.808.196	1.911.365.586.336
412111	Pendapatan Bea Masuk		18.599.690.058.915		17.737.630.922.391	862.059.136.524
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)		2.061.591.716		3.656.606.296	(1.595.014.580)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI 2010	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI 2009	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	6	7
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean		540.590.656.021		680.420.327.241	(139.829.671.220)
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)		566.917.871.634		(366.083.630.565)	933.001.502.199
412115	Denda atas sanksi administrasi dari pelaksanaan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya		10.000.000		-	10.000.000
412116	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DPT) transaksi non kas		257.632.977.488		7.187.562.916	250.445.414.572
412119	Pendapatan Pabean Lainnya		49.923.238.758		42.649.019.917	7.274.218.841
4122	Pendapatan Bea Keluar	5.454.560.000.000	8.897.707.295.916	163,12%	564.954.748.325	8.332.752.547.591
41221	Pendapatan Bea Keluar	5.454.560.000.000	8.897.707.295.916	163,12%	564.954.748.325	8.332.752.547.591
412211	Pendapatan Bea Keluar		8.896.400.417.873		541.790.472.028	8.354.609.945.845
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar		591.535.995		22.850.264.421	(22.258.728.426)
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar		715.342.048		314.011.876	401.330.172
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	247.176.367.998.000	268.941.856.208.841	10880,57%	227.174.419.064.671	41.767.437.144.170
421	Penerimaan Sumber Daya Alam	164.726.732.000.000	168.825.442.320.286	1,02%	138.959.235.946.131	29.866.206.374.155
4211	Pendapatan Minyak Bumi	112.515.090.000.000	111.814.923.202.135	99,38%	90.055.956.098.738	21.758.967.103.397
421111	Pendapatan Minyak Bumi	112.515.090.000.000	111.814.923.202.135	99,38%	90.055.956.098.738	21.758.967.103.397
4212	Pendapatan Gas Bumi	39.204.780.000.000	40.918.314.502.416	104,37%	35.696.003.511.600	5.222.310.990.816
421211	Pendapatan Gas Bumi	39.204.780.000.000	40.918.314.502.416	104,37%	35.696.003.511.600	5.222.310.990.816
4213	Pendapatan Pertambangan Umum	9.738.026.000.000	12.646.750.881.580	129,87%	10.369.410.930.584	2.277.339.950.996
421311	Pendapatan Iuran Tetap	155.517.000.000	160.826.175.155	103,41%	146.076.343.166	14.749.831.989
421312	Pendapatan Royalti	9.582.509.000.000	12.485.924.706.425	130,30%	10.223.334.587.418	2.262.590.119.007
4214	Pendapatan Kehutanan	2.874.416.000.000	3.009.672.120.638	104,71%	2.345.432.302.758	664.239.817.880
42141	Pendapatan Dana Reboisasi	1.631.650.000.000	1.764.961.490.127	108,17%	1.424.643.773.974	340.317.716.153
421411	Pendapatan Dana Reboisasi	1.631.650.000.000	1.764.961.490.127	108,17%	1.424.643.773.974	340.317.716.153
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.123.025.000.000	797.327.294.898	71,00%	676.951.865.569	120.375.429.329
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.123.025.000.000	797.327.294.898	71,00%	676.951.865.569	120.375.429.329
42143	Pendapatan IIUPH (IHPH)	19.741.000.000	271.537.761.764	1375,50%	74.198.312.251	197.339.449.513
421431	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri	741.000.000	10.164.000	1,37%	18.398.750	(8.234.750)
421432	Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu	-	-	-	-	-
421433	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan	-	-	-	-	-
421434	Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam	19.000.000.000	271.527.597.764	1429,09%	74.179.913.501	197.347.684.263
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan	100.000.000.000	175.845.573.849	175,85%	169.638.350.964	6.207.222.885
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	100.000.000.000	175.845.573.849	175,85%	169.638.350.964	6.207.222.885
4215	Pendapatan Perikanan	150.000.000.000	91.995.180.732	61,33%	92.039.435.895	(44.255.163)
42151	Pendapatan Perikanan	150.000.000.000	91.995.180.732	61,33%	92.039.435.895	(44.255.163)
421511	Pendapatan Perikanan	150.000.000.000	91.995.180.732	61,33%	92.039.435.895	(44.255.163)
4216	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	244.420.000.000	343.786.432.785	140,65%	400.393.666.556	(56.607.233.771)
42161	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	244.420.000.000	343.786.432.785	140,65%	400.393.666.556	(56.607.233.771)
421611	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	244.420.000.000	343.786.432.785	140,65%	400.393.666.556	(56.607.233.771)
422	Pendapatan Bagian Laba BUMN	29.500.000.000.000	30.096.932.694.265	102,02%	26.049.543.069.440	4.047.389.624.825

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI 2010	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI 2009	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	6	7
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	29.500.000.000.000	30.096.932.694.265	102,02%	26.049.543.069.440	4.047.389.624.825
42211	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	-	3.622.669.340.835		3.309.326.563.398	313.342.777.437
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	-	3.622.669.340.835		3.309.326.563.398	313.342.777.437
42212	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	-	26.474.263.353.430		22.740.216.506.042	3.734.046.847.388
422121	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	-	26.474.263.353.430		22.740.216.506.042	3.734.046.847.388
423	Pendapatan PNBPN Lainnya	43.462.758.949.000	59.428.639.159.020	136,73%	53.796.110.943.059	5.632.528.215.961
4231	Pendapatan Penjualan dan Sewa	13.628.121.128.000	16.498.911.495.199	121,07%	16.486.605.692.279	12.305.802.920
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	5.572.998.385.000	6.304.681.982.846	113,13%	5.245.174.719.960	1.059.507.262.886
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	4.789.531.000	8.840.385.090	184,58%	8.334.590.230	505.794.860
423112	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	19.301.289.000	18.250.910.450	94,56%	14.893.693.476	3.357.216.974
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	5.462.904.000.000	5.905.303.304.231	108,10%	5.077.861.923.765	827.441.380.466
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	22.620.558.000	102.967.451.962	455,19%	115.581.728.622	(12.614.276.660)
423115	Pendapatan Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi Lainnya	12.428.725.000	123.802.711	1,00%	1.148.944.465	(1.025.141.754)
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, dan Hasil Cetakan Lainnya	47.330.848.000	49.661.606.824	104,92%	7.512.264.053	42.149.342.771
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	422.755.000	7.547.704.451	1785,36%	3.767.294.520	3.780.409.931
423118	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni		199.653.660.148		4.034.800	199.649.625.348
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	3.200.679.000	12.333.156.979	385,33%	16.070.246.029	(3.737.089.050)
42312	Pendapatan Penjualan Aset	44.195.477.000	263.876.638.486	597,07%	109.437.667.665	154.438.970.821
423121	Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan, dan Tanah	323.813.000	92.412.745.784	28538,92%	28.539.972.711	63.872.773.073
423122	Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor	1.288.763.000	2.169.006.285	168,30%	1.250.275.075	918.731.210
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli	40.628.701.000	43.296.161.610	106,57%	45.972.247.413	(2.676.085.803)
423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing		143.252.500		417.757.500	(274.505.000)
423129	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih / Rusak / Dihapuskan	1.954.200.000	125.855.472.307	6440,26%	33.257.414.966	92.598.057.341
42313	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	7.918.070.000.000	9.782.852.016.185	123,55%	11.007.170.053.975	(1.224.318.037.790)
423131	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak		401.655.452.053		2.227.824.555.817	(1.826.169.103.764)
423132	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	7.918.070.000.000	9.225.099.856.939	116,51%	6.800.558.328.077	2.424.541.528.862
423139	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas		156.096.707.193		1.978.787.170.081	(1.822.690.462.888)
42314	Pendapatan Sewa	92.857.266.000	147.500.857.682	158,85%	124.823.250.679	22.677.607.003
423141	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri	33.919.110.000	41.289.230.015	121,73%	34.510.865.657	6.778.364.358
423142	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	44.457.438.000	81.303.753.392	182,88%	69.698.243.288	11.605.510.104
423143	Pendapatan Sewa Benda-Benda Bergerak	4.385.814.000	3.855.865.338	87,92%	5.831.384.600	(1.975.519.262)
423149	Pendapatan Sewa Benda-Benda Tak Bergerak Lainnya	10.094.904.000	21.052.008.937	208,54%	14.782.757.134	6.269.251.803
4232	Pendapatan Jasa	20.719.691.836.000	25.416.545.489.101	122,67%	20.373.389.201.155	4.926.156.563.417
42321	Pendapatan Jasa I	14.526.063.042.000	16.735.427.684.773	115,21%	13.317.228.679.684	3.418.199.005.089
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	75.603.726.000	26.972.219.206	35,68%	50.411.541.506	(23.439.322.300)
423212	Pendapatan Tempat Hiburan/ Taman/ Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)	14.431.240.000	13.507.952.838	93,60%	14.329.069.872	(821.117.034)
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa/Paspor dan SIM, STNK, dan BPKB	1.281.211.064.000	1.584.435.643.363	123,67%	1.193.375.158.663	391.060.484.700
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	9.846.457.549.000	12.007.236.137.331	121,94%	9.630.445.650.099	2.376.790.487.232
423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	90.661.422.000	128.633.605.374	141,88%	117.353.221.496	11.280.383.878

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI 2010	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI 2009	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	6	7
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC	2.413.098.424.000	2.156.973.962.184	89,39%	1.526.184.794.621	630.789.167.563
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	80.365.500.000	67.695.346.723	84,23%	67.459.923.868	235.422.855
423218	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	724.234.117.000	749.972.817.754	103,55%	717.669.319.559	32.303.498.195
42322	Pendapatan Jasa II	775.352.285.000	1.667.532.340.637	215,07%	1.614.683.875.661	52.848.464.976
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	76.130.052.000	899.577.361.700	1181,63%	842.427.200.721	57.150.160.979
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	576.193.252.000	577.840.430.288	100,29%	651.556.539.058	(73.716.108.770)
423223	Pendapatan Iuran Lelang Untuk Fakir Miskin		1.603.830		18.555.123	(16.951.293)
423224	Pendapatan Jasa Catatan Sipil		-		-	-
423225	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	4.026.275.000	1.684.334.872	41,83%	1.868.673.901	(184.339.029)
423226	Pendapatan Uang Pewarganegaraan	3.500.000.000	2.302.525.000	65,79%	1.715.623.888	586.901.112
423227	Pendapatan Bea Lelang	44.047.706.000	98.718.053.134	224,12%	73.367.962.392	25.350.090.742
423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara	67.705.000.000	83.638.067.511	123,53%	41.341.756.823	42.296.310.688
423229	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	3.750.000.000	3.769.964.302	100,53%	2.387.563.755	1.382.400.547
42323	Pendapatan Jasa Luar Negeri	399.007.610.000	688.636.910.955	172,59%	436.564.995.570	252.071.915.385
423231	Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI	103.245.960.000	222.950.631.794	215,94%	144.001.053.394	78.949.578.400
423232	Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler	289.750.400.000	63.855.938.116	22,04%	15.433.774.123	48.422.163.993
423239	Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri	6.011.250.000	401.830.341.045	6684,64%	277.130.168.053	124.700.172.992
42324	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	770.000	596.750.769	77500,10%	971.796.825	(375.046.056)
423241	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	770.000	596.750.769	77500,10%	971.796.825	(375.046.056)
42325	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	3.008.103.524.000	3.468.219.982.039	115,30%	3.001.226.634.244	466.993.347.795
423251	Pendapatan Atas Penertiban SP2D Dalam Rangka TSA	8.103.524.000	54.670.833.438	674,66%	8.310.249.543	46.360.583.895
423252	Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum	1.110.000.000.000	859.561.688.137	77,44%	1.092.416.071.794	(232.854.383.657)
423253	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	60.000.000.000	119.679.649.746	199,47%	51.470.234.634	68.209.415.112
423254	Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	1.830.000.000.000	2.434.307.810.718	133,02%	1.849.030.078.273	585.277.732.445
42326	Pendapatan Jasa Kepolisian	1.988.623.375.000	2.551.632.939.516	128,31%	1.756.304.250.420	795.328.689.096
423261	Pendapatan Surat Ijin Mengemudi (SIM)	754.875.000.000	772.317.121.152	102,31%	629.592.223.032	142.724.898.120
423262	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	425.000.000.000	659.827.930.000	155,25%	412.525.287.000	247.302.643.000
423263	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	367.500.000	2.821.285.000	767,70%	473.754.500	2.347.530.500
423264	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)	567.700.000.000	708.817.183.264	124,86%	468.644.776.000	240.172.407.264
423265	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	214.000.000.000	377.401.460.100	176,36%	216.741.899.888	160.659.560.212
423266	Pendapatan Klinik Pengemudi (KLIPENG)	25.000.000.000	27.332.620.000	109,33%	26.471.895.000	860.725.000
423267	Pendapatan Senjata Api (SENPI)	1.680.875.000	3.115.340.000	185,34%	1.854.415.000	1.260.925.000
42327	Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	-	144.628.206.659		71.163.765.630	73.464.441.029
423271	Pendapatan Jasa Pelayanan Tol Suramadu	-	144.628.206.659		71.163.765.630	73.464.441.029
42328	Pendapatan Jasa Kepolisian II	-	43.535.283.500		-	43.535.283.500
423281	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah		19.896.244.000		-	19.896.244.000
423282	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian		19.339.550.000		-	19.339.550.000
423283	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Lapori Diri		3.033.595.000		-	3.033.595.000
423284	Pendapatan Penerbitan Karti Sidik Jari (Inafis Card)		216.055.000		-	216.055.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI 2010	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI 2009	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	6	7
423285	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas		1.049.839.500		-	1.049.839.500
42329	Pendapatan Jasa Lainnya	22.541.230.000	116.335.390.253	516,10%	175.245.203.121	(58.909.812.868)
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	22.541.230.000	116.335.390.253	516,10%	175.245.203.121	(58.909.812.868)
4233	Pendapatan Bunga	3.174.741.000.000	7.352.406.187.064	231,59%	2.739.388.420.831	4.613.017.766.233
42331	Pendapatan Bunga	3.174.741.000.000	3.858.459.830.064	121,54%	1.575.215.565.189	2.283.244.264.875
423311	Pendapatan Bunga atas Investasi Dalam Obligasi		11.453		101.531.951	(101.520.498)
423312	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi		11.250.499		143.850.000	(132.599.501)
423313	Pendapatan Bunga Dari Piutang dan Penerusan Pinjaman	3.174.740.000.000	3.855.810.466.950	121,45%	1.495.830.578.386	2.359.979.888.564
423319	Pendapatan Bunga Lainnya	1.000.000	2.638.101.162	263810,12%	79.139.604.852	(76.501.503.690)
42332	Pendapatan Gain On Bond Redemption	-	48.397.000.000		790.983.202.537	(742.586.202.537)
423321	Pendapatan Gain On Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang		48.397.000.000		790.983.202.537	(742.586.202.537)
42333	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	-	3.445.549.357.000		373.158.620.000	3.072.390.737.000
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah		3.329.814.211.000		373.158.620.000	2.956.655.591.000
423332	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing		-		-	-
423333	Pendapatan Fee atas Securities Lending SUN		115.735.146.000			
42334	Pendapatan Fee Lainnya atas Surat Berharga Negara	-	-		31.033.105	(31.033.105)
423341	Pendapatan Fee Lainnya atas Transaksi Securities lending SUN		-		31.033.105	(31.033.105)
4234	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	27.645.342.000	166.607.987.382	602,66%	163.745.970.532	2.862.016.850
42341	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	27.645.342.000	166.607.987.382	602,66%	163.745.970.532	2.862.016.850
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	450.000.000	2.011.001.870	446,89%	1.714.283.275	296.718.595
423412	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	150.000.000	396.657.500	264,44%	393.864.350	2.793.150
423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	150.000.000	6.661.900.797	4441,27%	9.231.925.890	(2.570.025.093)
423414	Pendapatan Hasil Denda/Denda Tilang dan Sebagainya	19.012.000.000	123.908.626.474	651,74%	126.344.865.730	(2.436.239.256)
423415	Pendapatan Ongkos Perkara	7.635.842.000	13.603.572.312	178,15%	12.884.277.268	719.295.044
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi		2.907.120.280		2.645.657.000	261.463.280
423417	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi		1.215.000		-	1.215.000
423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	247.500.000	17.117.893.149	6916,32%	10.531.097.019	6.586.796.130
4235	Pendapatan Pendidikan	4.150.842.462.000	2.983.449.553.759	71,88%	3.257.742.968.625	(274.293.414.866)
42351	Pendapatan Pendidikan	4.150.842.462.000	2.983.449.553.759	71,88%	3.257.742.968.625	(274.293.414.866)
423511	Pendapatan Uang Pendidikan	3.292.090.864.000	2.516.227.138.711	76,43%	2.875.582.334.464	(359.355.195.753)
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan	79.682.052.000	67.063.416.310	84,16%	61.110.002.313	5.953.413.997
423513	Pendapatan Uang Ujian Untuk Menjalankan Praktek	32.712.544.000	37.736.732.419	115,36%	28.497.867.450	9.238.864.969
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	746.357.002.000	362.422.266.319	48,56%	292.552.764.398	69.869.501.921
4236	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	49.020.000.000	213.767.299.728	436,08%	635.620.302.960	(421.853.003.232)
42361	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	49.020.000.000	213.767.299.728	436,08%	635.620.302.960	(421.853.003.232)
423611	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan	8.224.800.000	141.609.772.505	1721,74%	581.512.280.441	(439.902.507.936)
423612	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	2.000.000.000	3.093.293.049	154,66%	1.313.248.263	1.780.044.786
423613	Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan Negara	38.795.200.000	732.520.810	1,89%	3.775.036.022	(3.042.515.212)
423614	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetapkan di Pengadilan	-	68.214.118.624		48.993.479.140	19.220.639.484
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	-	117.594.740		26.259.094	91.335.646

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI 2010	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI 2009	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	6	7
4237	Pendapatan Iuran dan Denda	526.796.886.000	704.797.429.654	133,79%	605.357.951.326	99.439.456.228
42371	Pendapatan Iuran Badan Usaha	473.300.830.000	520.140.157.960	109,90%	511.540.828.643	8.599.329.317
423711	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM	345.385.414.000	365.403.000.729	105,80%	364.938.544.783	464.455.946
423712	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	87.915.416.000	93.987.176.082	106,91%	94.696.633.798	(709.457.716)
423713	Pendapatan Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	40.000.000.000	60.749.981.149	151,87%	51.905.650.062	8.844.331.087
42372	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan	16.638.431.000	9.368.074.970	56,30%	2.082.253.392	7.285.821.578
423721	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan	16.638.431.000	9.368.074.970	56,30%	2.082.253.392	7.285.821.578
42373	Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	34.524.511.000	60.837.427.669	176,22%	14.475.199.968	46.362.227.701
423731	Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup atau	7.150.000.000	6.137.191.414	85,83%	7.614.403.588	(1.477.212.174)
423732	Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)	1.056.374.000	294.319.660	27,86%	14.000.000	280.319.660
423733	Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB)		-		4.000.000	(4.000.000)
423734	Pungutan Izin Berburu di Taman Buru dan Areal Buru (PIB)		1.000.000		6.660.490.380	(6.659.490.380)
423735	Pungutan masuk Obyek Wisata Alam	25.680.137.000	19.453.445.176	75,75%	182.306.000	19.271.139.176
423736	Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)	638.000.000	1.079.637.218	169,22%	-	1.079.637.218
423737	Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)		2.000.000		-	2.000.000
423738	Pendapaatan Penggantian Nilai Tegakan		33.869.834.201		-	33.869.834.201
42374	Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan	-	-		-	-
423741	Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan		-		-	-
42375	Pendapatan Denda I	2.333.114.000	114.312.598.855	4899,57%	76.643.636.031	37.668.940.724
423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan		151.279.640		433.520.958	(282.241.318)
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.333.114.000	93.517.541.919	4008,27%	57.097.478.220	36.420.063.699
423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB		12.535.755		49.235.796	(36.700.041)
423754	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal		12.912.271.452		14.149.237.862	(1.236.966.410)
423755	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha		1.665.686.288		2.415.466.821	(749.780.533)
423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA		191.778.669		569.410.738	(377.632.069)
423757	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan Uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia		35.382.723		-	35.382.723
423758	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling		22.100			
423759	Pendapatan Denda Atas Kekurangan/Keterlambatan Penyeteroran Penerimaan Negara Oleh Bank/Pos Persepsi	-	5.826.100.309		1.929.285.636	3.896.814.673
42376	Pendapatan Denda II	-	139.170.200		616.033.292	(476.863.092)
423761	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I		662.223		414.659.430	(413.997.207)
423762	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB/BPHTB oleh BO III PBB/BPHTB		138.507.977		201.373.862	(62.865.885)
4239	Pendapatan Lain-Lain	1.185.900.295.000	6.092.153.717.133	513,72%	9.534.260.435.351	(3.442.106.718.218)
42391	Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu	1.180.040.244.000	5.763.384.770.255	488,41%	5.083.125.099.232	680.259.671.023
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	2.414.521.000	112.128.272.229	4643,91%	100.363.292.690	11.764.979.539
423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	6.167.000	171.940.148.523	2788067,92%	58.544.589.624	113.395.558.899
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni TAYL	3.664.416.000	552.554.329.449	15078,92%	2.405.434.929.293	(1.852.880.599.844)
423914	Penerimaan Kembali Belanja Lain Pinjaman Luar Negeri TAYL	3.000.000	15.612.303.420	520410,11%	46.925.719.710	(31.313.416.290)
423915	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL	2.000.000	1.716.092.506	85804,63%	2.752.283.958	(1.036.191.452)
423916	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL		2.151.705.140		5.071.780.159	(2.920.075.019)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI 2010	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI 2009	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	6	7
423917	Penerimaan Kembali Belanja Transfer ke Daerah TAYL		1.760.505.873.461		169.743.796.760	1.590.762.076.701
423919	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	1.173.950.140.000	3.146.776.045.527	268,05%	2.294.288.707.038	852.487.338.489
42392	Pendapatan Pelunasan Piutang	2.917.202.000	47.908.471.893	1642,27%	60.516.516.546	(12.608.044.653)
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non-Bendahara	45.590.000	10.199.938.763	22373,19%	16.363.615.998	(6.163.677.235)
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara(Masuk TP/TGR) Bendahara	2.871.612.000	37.708.533.130	1313,15%	44.152.900.548	(6.444.367.418)
42393	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	11.769.234.305		217.842.978.081	(206.073.743.776)
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening		11.769.234.305		217.842.978.081	(206.073.743.776)
42394	Pendapatan dari Selisih Kurs	-	64.500.000.000		-	
423941	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam pengelolaan RKUN		64.500.000.000			
42399	Pendapatan Lain-Lain	2.942.849.000	204.591.240.681	6952,15%	4.172.775.841.492	(3.968.184.600.811)
423991	Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	1.630.133.000	9.104.301.811	558,50%	8.179.068.629	925.233.182
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional	1.312.716.000	106.242.546	8,09%	3.765.414.652	(3.659.172.106)
423993	Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)		88.284.316		394.076.562.545	(393.988.278.229)
423994	Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah		-		-	-
423995	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia		-		2.646.354.981.538	(2.646.354.981.538)
423997	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari bank/pos Persepsi		6.979.189		-	6.979.189
423999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain		195.285.432.819		1.120.399.814.128	(925.114.381.309)
424	Pendapatan Badan Layanan Umum	9.486.877.049.000	10.590.842.035.270	111,64%	8.369.529.106.041	2.221.312.929.229
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	8.734.592.860.000	9.906.996.304.665	113,42%	7.669.417.926.128	2.237.578.378.537
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	8.215.786.529.000	9.509.402.889.281	115,75%	7.369.173.284.832	2.140.229.604.449
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	3.613.150.998.000	3.988.992.788.405	110,40%	3.385.490.774.241	603.502.014.164
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	2.932.996.003.000	3.719.660.590.566	126,82%	2.575.339.075.375	1.144.321.515.191
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	45.404.497.000	103.733.581.373	228,47%	96.916.873.868	6.816.707.505
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan	2.845.790.000	-	0,00%	-	-
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian		-		-	-
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	1.433.103.837.000	1.366.551.545.167	95,36%	956.653.979.484	409.897.565.683
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	3.500.000.000	1.077.380.011	30,78%	942.893.180	134.486.831
424118	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang		2.979.868.036		-	2.979.868.036
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	184.785.404.000	326.407.135.723	176,64%	353.829.688.684	(27.422.552.961)
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	158.482.305.000	85.209.252.626	53,77%	100.744.832.370	(15.535.579.744)
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita		-		-	-
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Terpadu Pengembangan Ekonomi Terpadu		-		-	-
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	27.600.000	-	0,00%	-	-
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	158.454.705.000	85.209.252.626	53,78%	100.744.832.370	(15.535.579.744)
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	360.324.026.000	312.384.162.758	86,70%	199.499.808.926	112.884.353.832
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan		-		-	-
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah		-		-	-
424133	Pendapatan Program Modal Ventura	3.437.496.000	7.680.184.851	223,42%	4.082.867.248	3.597.317.603
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	47.030.126.000	86.683.499.197	184,31%	3.137.882.798	83.545.616.399

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI 2010	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI 2009	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	6	7
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	2.501.353.000	1.916.662.340	76,63%	442.229.628	1.474.432.712
424136	Pendapatan Investasi	304.942.751.000	204.465.814.770	67,05%	141.359.135.606	63.106.679.164
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	2.412.300.000	11.638.001.600	482,44%	50.477.693.646	(38.839.692.046)
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	102.868.085.000	34.976.353.539	34,00%	46.050.792.391	(11.074.438.852)
42421	Pendapatan Hibah Terkait	101.768.085.000	33.177.838.534	32,60%	35.649.346.365	(2.471.507.831)
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Perorangan	351.750.000	760.325.000	216,15%	3.675.000.000	(2.914.675.000)
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	19.296.335.000	32.417.513.534	168,00%	31.955.650.476	461.863.058
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Pemda	4.000.000.000	-	0,00%	-	-
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Perorangan	-	-	-	-	-
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	18.695.889	(18.695.889)
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Negara	78.120.000.000	-	0,00%	-	-
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya	-	-	-	-	-
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat	1.100.000.000	1.798.515.005	163,50%	10.401.446.026	(8.602.931.021)
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan	75.000.000	287.690.005	383,59%	4.657.200	283.032.805
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	-	9.000.000	-	9.718.466.523	(9.709.466.523)
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Pemda	-	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Perorangan	-	-	-	-	-
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	-	-
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Negara	-	-	-	-	-
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Lainnya	1.025.000.000	1.825.000	0,18%	678.322.303	(676.497.303)
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	520.282.927.000	172.630.678.219	33,18%	206.485.914.133	(33.855.235.914)
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	520.282.927.000	172.630.678.219	33,18%	206.485.914.133	(33.855.235.914)
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	4.782.600.000	910.654.575	19,04%	34.558.572	876.096.003
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	513.000.327.000	166.269.392.277	32,41%	199.728.142.685	(33.458.750.408)
424313	Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah	2.500.000.000	5.450.631.367	218,03%	6.723.212.876	(1.272.581.509)
4249	Pendapatan BLU Lainnya	129.133.177.000	476.238.698.847	368,80%	447.574.473.389	28.664.225.458
42491	Pendapatan BLU Lainnya	129.133.177.000	476.238.698.847	368,80%	447.574.473.389	28.664.225.458
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	129.133.177.000	476.238.698.847	368,80%	447.574.473.389	28.664.225.458
43	Penerimaan Hibah	1.896.516.000.000	3.022.986.560.763	159,40%	1.666.643.504.397	1.356.343.056.366
431	Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	-	3.022.986.560.763	-	1.666.643.504.397	1.356.343.056.366
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	-	423.238.836.762	-	12.090.623.796	411.148.212.966
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	-	254.132.349.174	-	12.090.623.796	242.041.725.378
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Perorangan	-	-	-	77.350.000	(77.350.000)
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	-	25.000.000	-	11.628.100.575	(11.603.100.575)
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya	-	254.107.349.174	-	385.173.221	253.722.175.953
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Non Kas	-	-	-	-	-
431121	Pendapatan Hibah Berupa Barang	-	-	-	-	-
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung	-	169.106.487.588	0,00%	-	169.106.487.588
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	-	98.867.782.983	-	-	98.867.782.983

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI 2010	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI 2009	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	6	7
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Pemerintah Daerah		70.238.704.605	-	-	70.238.704.605
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri		2.599.747.724.001		1.654.552.880.601	945.194.843.400
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri	-	2.599.747.724.001		1.654.552.880.601	945.194.843.400
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Perorangan		235.708.020		167.684.688	68.023.332
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Bilateral		253.114.464.189		223.447.187.873	29.667.276.316
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Multilateral		1.804.053.783.311		1.430.862.250.905	373.191.532.406
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya		542.343.768.481		75.757.135	542.268.011.346
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Non Kas		-		-	-
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri Berupa Barang		-		-	-
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri Berupa Jasa		-		-	-
	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	158.454.705.000	85.209.252.626	53,78%	100.744.832.370	(15.535.579.744)
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	360.324.026.000	312.384.162.758	86,70%	199.499.808.926	112.884.353.832
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan		-		-	-
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah		-		-	-
424133	Pendapatan Program Modal Ventura	3.437.496.000	7.680.184.851	223,42%	4.082.867.248	3.597.317.603
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	47.030.126.000	86.683.499.197	184,31%	3.137.882.798	83.545.616.399
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	2.501.353.000	1.916.662.340	76,63%	442.229.628	1.474.432.712
424136	Pendapatan Investasi	304.942.751.000	204.465.814.770	67,05%	141.359.135.606	63.106.679.164
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	2.412.300.000	11.638.001.600	482,44%	50.477.693.646	(38.839.692.046)
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	102.868.085.000	34.976.353.539	34,00%	46.050.792.391	(11.074.438.852)
42421	Pendapatan Hibah Terkait	101.768.085.000	33.177.838.534	32,60%	35.649.346.365	(2.471.507.831)
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Perorangan	351.750.000	760.325.000	216,15%	3.675.000.000	(2.914.675.000)
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	19.296.335.000	32.417.513.534	168,00%	31.955.650.476	461.863.058
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Pemda	4.000.000.000	-	0,00%	-	-
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Perorangan		-		-	-
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha		-		18.695.889	(18.695.889)
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Negara	78.120.000.000	-	0,00%	-	-
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya		-		-	-
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat	1.100.000.000	1.798.515.005	163,50%	10.401.446.026	(8.602.931.021)
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan	75.000.000	287.690.005	383,59%	4.657.200	283.032.805
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha		9.000.000		9.718.466.523	(9.709.466.523)
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Pemda		1.500.000.000		-	1.500.000.000
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Perorangan		-		-	-
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha		-		-	-
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Negara		-		-	-
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Lainnya	1.025.000.000	1.825.000	0,18%	678.322.303	(676.497.303)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	REALISASI 2010	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI 2009	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	6	7
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	520.282.927.000	172.630.678.219	33,18%	206.485.914.133	(33.855.235.914)
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	520.282.927.000	172.630.678.219	33,18%	206.485.914.133	(33.855.235.914)
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	4.782.600.000	910.654.575	19,04%	34.558.572	876.096.003
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	513.000.327.000	166.269.392.277	32,41%	199.728.142.685	(33.458.750.408)
424313	Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah	2.500.000.000	5.450.631.367	218,03%	6.723.212.876	(1.272.581.509)
4249	Pendapatan BLU Lainnya	129.133.177.000	476.238.698.847	368,80%	447.574.473.389	28.664.225.458
42491	Pendapatan BLU Lainnya	129.133.177.000	476.238.698.847	368,80%	447.574.473.389	28.664.225.458
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	129.133.177.000	476.238.698.847	368,80%	447.574.473.389	28.664.225.458
43	Penerimaan Hibah	1.896.516.000.000	3.022.986.560.763	159,40%	1.666.643.504.397	1.356.343.056.365
431	Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	-	3.022.986.560.763	-	1.666.643.504.397	1.356.343.056.365
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	-	423.238.836.762	-	12.090.623.796	411.148.212.966
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	-	254.132.349.174	-	12.090.623.796	242.041.725.378
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Perorangan	-	-	-	77.350.000	(77.350.000)
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	-	25.000.000	-	11.628.100.575	(11.603.100.575)
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya	-	254.107.349.174	-	385.173.221	253.722.175.953
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Non Kas	-	-	-	-	-
431121	Pendapatan Hibah Berupa Barang	-	-	-	-	-
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung	-	169.106.487.588	0,00%	-	169.106.487.588
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	-	98.867.782.983	-	-	98.867.782.983
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Pemerintah Daerah	-	70.238.704.605	-	-	70.238.704.605
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri	-	2.599.747.724.001	-	1.654.552.880.601	945.194.843.399
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri	-	2.599.747.724.001	-	1.654.552.880.601	945.194.843.399
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Perorangan	-	235.708.020	-	167.684.688	68.023.332
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Bilateral	-	253.114.464.189	-	223.447.187.873	29.667.276.316
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Multilateral	-	1.804.053.783.311	-	1.430.862.250.905	373.191.532.406
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya	-	542.343.768.481	-	75.757.135	542.268.011.346
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Non Kas	-	-	-	-	-
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri Berupa Barang	-	-	-	-	-
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri Berupa Jasa	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	992.398.789.998.000	995.271.511.391.343	100,29%	848.763.235.195.483	146.508.276.195.860

RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2010 DAN 2009
(Dalam Rupiah)

BIDANG INDUSTRI/BUMN	2010	2009
1	2	3
I. PERBANKAN	3.622.669.340.835	3.309.326.563.397
1. PT Bank Mandiri	1.676.517.780.000	1.514.242.415.000
2. PT Bank Negara Indonesia	553.763.472.605	203.455.007.288
3. PT Bank Rakyat Indonesia	1.246.070.000.000	1.504.300.000.000
4. PT Bank Tabungan Negara	95.907.085.380	43.047.417.188
5. PT Bank Ekspor Indonesia	18.468.608.399	24.164.797.701
6. PT Bank Bukopin	31.942.394.451	20.116.926.221
II. ASURANSI	339.497.469.995	98.449.508.828
1. PT Asuransi Jasindo	24.950.000.000	18.034.529.000
2. PT Asuransi Ekspor Indonesia	7.445.000.000	5.952.850.000
3. PT Asuransi Jasa Raharja	307.102.469.995	72.117.500.000
4. PT Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia)		2.344.629.828
III. PEMBIAYAAN	540.768.218.000	203.848.300.000
1. PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	8.796.686.000	4.632.000.000
2. Perum Pegadaian	519.097.760.000	190.065.000.000
3. Perum SPU (Sarana Pengembangan Usaha)	-	-
4. PT. Jamkrindo	11.319.336.000	9.151.300.000
5. PT. Penanaman Modal Madani	1.554.436.000	
IV. JASA KONSTRUKSI	91.734.163.134	62.971.291.783
1. PT Adhi Karya	25.961.713.064	10.649.791.178
2. PT Nindya Karya		1.370.170.605
3. PT Pembangunan Perumahan	25.467.450.070	18.606.330.000
4. PT Wijaya Karya	40.080.000.000	32.120.000.000
5. PT Yodya Karya	225.000.000	225.000.000
V. PENUNJANG KONSTRUKSI	418.440.176.000	248.625.748.000
PT Jasa Marga	418.440.176.000	248.625.748.000
VI. JASA PENILAI	13.114.538.334	5.609.161.203
1. PT Surveyor Indonesia	4.564.000.000	982.284.800
2. PT BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)	2.564.982.682	1.703.857.503
3. PT. SUCOFINDO	5.985.555.652	2.923.018.900
VII. JASA LAINNYA	46.852.000.000	46.286.436.347
PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset)	46.852.000.000	46.286.436.347
VIII. PELABUHAN	803.511.900.308	912.410.580.379
1. PT Pelabuhan Indonesia I	43.681.239.365	55.092.000.000

RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2010 DAN 2009
(Dalam Rupiah)

BIDANG INDUSTRI/BUMN	2010	2009
1	2	3
2. PT Pelabuhan Indonesia II	471.512.714.118	559.748.841.379
3. PT Pelabuhan Indonesia III	273.317.946.825	266.914.739.000
4. PT Pelabuhan Indonesia IV	15.000.000.000	30.655.000.000
IX. KEBANDARUDARAAN	386.463.662.373	360.430.000.000
1. PT Angkasa Pura I	162.261.231.000	162.380.000.000
2. PT Angkasa Pura II	224.202.431.373	198.050.000.000
X. LOGISTIK	2.724.645.849	2.001.968.859
PT BGR (Bhanda Ghara Reksha)	2.724.645.849	2.001.968.859
XI. JASA PERDAGANGAN	1.238.526.191	1.397.986.000
PT Sarinah	1.238.526.191	1.397.986.000
XII. INDUSTRI FARMASI	21.768.149.817	12.467.090.131
1. PT Kimia Farma		12.467.090.131
2. PT Bio Farma (Persero)	21.768.149.817	
XIII. PARIWISATA	12.812.262.352	7.607.245.475
PT Pengembangan Pariwisata Bali	12.812.262.352	7.607.245.475
XIV. KAWASAN INDUSTRI	12.464.336.234	10.411.587.425
1. PT Kawasan Berikat Nusantara	12.180.453.527	9.273.657.793
2. PT Kawasan Industri Makasar		-
3. PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma	198.017.707	145.618.855
4. PT Kawasan Industri Medan		906.445.777
5. PT PDI Pengembangan Pulau Batam	85.865.000	85.865.000
XV. PERKEBUNAN	518.350.877.354	881.813.827.277
1. Perkebunan Nusantara II	400.000.000	37.605.130.291
2. Perkebunan Nusantara III	155.944.228.000	273.415.496.000
3. Perkebunan Nusantara IV	125.357.640.000	260.774.628.122
4. Perkebunan Nusantara V	43.605.615.050	112.619.182.000
5. Perkebunan Nusantara VI	43.918.986.003	33.124.732.000
6. Perkebunan Nusantara VII	45.106.798.271	65.209.972.000
7. Perkebunan Nusantara VIII	18.002.341.511	17.281.146.561
8. Perkebunan Nusantara IX	5.777.555.380	10.308.273.900
9. Perkebunan Nusantara X	25.812.908.900	4.904.336.100
10. Perkebunan Nusantara XI	16.785.476.328	1.215.393.303
11. Perkebunan Nusantara XII	13.221.628.002	23.157.246.300
12. Perkebunan Nusantara XIII	24.417.699.909	42.198.290.700

RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2010 DAN 2009
(Dalam Rupiah)

BIDANG INDUSTRI/BUMN	2010	2009
1	2	3
XVI. PERTANIAN	3.730.070.000	2.180.461.473
PT Sang Hyang Seri	3.730.070.000	2.180.461.473
XVII. PUPUK	617.939.000.000	366.896.000.000
1. PT Pupuk Sriwidjaya	617.939.000.000	366.896.000.000
2. PT ASEAN Bintulu Fertilizer		-
XVIII. PERCETAKAN & PENERBITAN	50.000.000.000	160.000.000.000
Perum Peruri	50.000.000.000	160.000.000.000
XXIV. PERTAMBANGAN	1.058.423.765.685	1.448.421.357.500
1. PT Aneka Tambang	157.374.600.000	356.292.300.000
2. PT Timah	101.969.293.185	436.266.350.000
3. PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	799.079.872.500	655.862.707.500
XXV. ENERGI	6.132.115.583.926	702.725.762.253
1. PT. Perusahaan Gas Negara	2.132.115.583.926	702.725.762.253
2. PT. PLN	4.000.000.000.000	
XXVI. BAJA & KONSTRUKSI BAJA	148.401.676.000	137.871.560.955
PT Krakatau Steel	148.401.676.000	137.871.560.955
XXVII. TELEKOMUNIKASI	2.975.876.310.676	3.339.660.084.397
1. PT Telkom	2.973.997.410.676	3.339.660.084.397
2. PT Inti	278.900.000	
3. PT LEN Industri	1.600.000.000	
XXVIII. INDUSTRI PERTAHANAN	13.900.000.000	6.421.010.560
PT Dahana	13.900.000.000	6.421.010.560
XXIX. SEMEN	1.030.640.014.626	887.714.350.140
1. PT Semen Gresik	933.186.480.700	826.510.665.140
2. PT Semen Baturaja	95.419.163.926	61.203.685.000
3. PT Semen Padang	2.034.370.000	
XXX. KEHUTANAN	0	25.000.000
Inhutani I		25.000.000
XXXI. PELAYARAN	0	25.815.000.000
ASDP		25.815.000.000
XXXII. USAHA ANEKA INDUSTRI	11.846.890.000	0

RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2010 DAN 2009
(Dalam Rupiah)

BIDANG INDUSTRI/BUMN	2010	2009
1	2	3
PT. Rajawali Nusantara Indonesia	11.846.890.000	-
XXXIII. BUMN DENGAN SAHAM MINORITAS	1.741.922.823.004	2.355.783.336.938
1. PT Rekayasa Industri	110.371.000	209.182.000
2. PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	3.684.267.900	4.169.144.567
3. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	4.096.702.253	1.815.760.800
4. PT Socfin Indonesia	81.096.777.400	108.342.827.100
5. PT Indosat	107.065.522.500	134.239.631.250
6. PT Freeport Indonesia	1.513.926.787.500	2.086.889.865.000
XXXIV. PERUMAHAN	500.000.000	0
Perum Perumnas	500.000.000	
XXXIV. PERKERETAAPIAN	2.669.000.000	0
PT Inka	2.669.000.000	
XXXV. PERTAMINA	9.508.899.687.824	10.472.488.776.340
Jumlah Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	30.097.332.694.066	26.049.543.069.438

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	260.267.423.000	204.892.225.504	119.370.278	204.772.855.226	(55.494.567.774)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	51.824.803.000	42.260.424.300	16.345.700	42.244.078.600	(9.580.724.400)
02	MAJELIS	208.442.620.000	162.631.801.204	103.024.578	162.528.776.626	(45.913.843.374)
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.376.177.837.000	1.805.006.529.709	12.635.211.767	1.792.371.317.942	(583.806.519.058)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.121.321.831.000	761.379.887.805	312.799.697	761.067.088.108	(360.254.742.892)
02	DEWAN	1.254.856.006.000	1.043.626.641.904	12.322.412.070	1.031.304.229.834	(223.551.776.166)
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.297.043.514.000	1.987.707.259.997	13.505.504.648	1.974.201.755.349	(322.841.758.651)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.062.486.479.000	1.808.954.556.104	9.402.526.550	1.799.552.029.554	(262.934.449.446)
02	B.P.K. PUSAT	234.557.035.000	178.752.703.893	4.102.978.098	174.649.725.795	(59.907.309.205)
005	MAHKAMAH AGUNG	5.219.948.230.000	3.901.523.238.704	5.760.430.042	3.895.762.808.662	(1.324.185.421.338)
01	SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG	2.554.137.915.000	2.399.395.234.138	1.285.036.405	2.398.110.197.733	(156.027.717.267)
02	KEPANTERAAN	87.549.088.000	69.954.121.233	22.566	69.954.098.667	(17.594.989.333)
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	58.136.616.000	46.402.061.245	18.165.829	46.383.895.416	(11.752.720.584)
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	35.775.463.000	35.018.194.559	1.761.464	35.016.433.095	(759.029.905)
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TUN	12.837.928.000	12.130.366.716	36.090.879	12.094.275.837	(743.652.163)
06	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	2.372.699.207.000	1.253.903.402.965	3.539.557.727	1.250.363.845.238	(1.122.335.361.762)
07	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	74.653.493.000	62.202.512.806	780.898.979	61.421.613.827	(13.231.879.173)
08	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	24.158.520.000	22.517.345.042	98.896.193	22.418.448.849	(1.740.071.151)
006	KEJAKSAAN AGUNG	2.940.008.036.000	2.637.514.570.871	788.607.807	2.636.725.963.064	(303.282.072.936)
01	KEJAKSAAN AGUNG	2.940.008.036.000	2.637.514.570.871	788.607.807	2.636.725.963.064	(303.282.072.936)
007	SEKRETARIAT NEGARA	1.908.432.847.000	1.532.160.821.064	1.747.508.406	1.530.413.312.658	(378.019.534.342)
01	SEKRETARIAT NEGARA	1.092.248.917.000	850.753.543.395	749.440.584	850.004.102.811	(242.244.814.189)
02	SEKRETARIAT KABINET	50.000.000.000	36.218.218.568	253.637.404	35.964.581.164	(14.035.418.836)
03	RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN	441.185.747.000	385.975.849.089	70.272.607	385.905.576.482	(55.280.170.518)
04	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN	163.255.774.000	131.894.719.605	-	131.894.719.605	(31.361.054.395)
05	SEKRETARIAT MILITER	24.930.100.000	23.956.323.380	-	23.956.323.380	(973.776.620)
06	PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN	52.900.000.000	52.755.709.482	-	52.755.709.482	(144.290.518)
07	DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN	34.500.000.000	25.153.313.997	-	25.153.313.997	(9.346.686.003)
08	UNIT KERJA PRESIDEN BD.PENGAWASAN & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP-PPP)	49.412.309.000	25.453.143.548	674.157.811	24.778.985.737	(24.633.323.263)
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	13.363.278.780.000	12.121.687.862.731	10.935.694.215	12.110.752.168.516	(1.252.526.611.484)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	528.775.147.000	479.025.768.509	577.191.680	478.448.576.829	(50.326.570.171)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	43.900.160.000	41.897.440.864	954.586.145	40.942.854.719	(2.957.305.281)
03	DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	125.400.110.000	122.450.933.802	97.601.493	122.353.332.309	(3.046.777.691)
04	DITJEN PEMERINTAHAN UMUM	310.464.565.000	254.221.972.925	326.042.827	253.895.930.098	(56.568.634.902)
05	DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.528.921.037.000	9.895.426.767.755	6.419.325.520	9.889.007.442.235	(639.913.594.765)
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	415.592.642.000	387.085.081.117	836.264.707	386.248.816.410	(29.343.825.590)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
07	DITJEN OTONOMI DAERAH	252.235.534.000	328.504.326.759	805.270.917	327.699.055.842	75.463.521.842
08	DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	925.222.884.000	411.673.541.072	846.422.944	410.827.118.128	(514.395.765.872)
09	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	66.520.812.000	61.089.318.525	53.639.872	61.035.678.653	(5.485.133.347)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	30.244.754.000	27.018.614.932	8.744.567	27.009.870.365	(3.234.883.635)
12	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	136.001.135.000	113.294.096.471	10.603.543	113.283.492.928	(22.717.642.072)
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.563.674.704.000	3.756.798.235.093	4.893.217.583	3.751.905.017.510	(1.811.769.686.490)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	4.942.601.536.000	3.266.028.988.893	2.814.484.485	3.263.214.504.408	(1.679.387.031.592)
02	DITJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	36.885.563.000	33.030.844.873	570.358.582	32.460.486.291	(4.425.076.709)
03	DITJEN AMERIKA DAN EROPA	33.573.898.000	25.793.115.555	168.025.872	25.625.089.683	(7.948.808.317)
04	DITJEN KERJASAMA ASEAN	40.515.300.000	37.478.254.113	567.894.525	36.910.359.588	(3.604.940.412)
05	DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL	347.688.703.000	260.964.958.610	104.069.386	260.860.889.224	(86.827.813.776)
06	DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	55.019.400.000	44.271.104.121	109.142.329	44.161.961.792	(10.857.438.208)
07	DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	34.182.260.000	28.096.782.301	203.882.588	27.892.899.713	(6.289.360.287)
08	DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER	30.427.000.000	25.798.312.561	185.698.078	25.612.614.483	(4.814.385.517)
09	INSPEKTORAT JENDERAL	20.590.844.000	16.278.614.532	99.486.882	16.179.127.650	(4.411.716.350)
11	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	22.190.200.000	19.057.259.534	70.174.856	18.987.084.678	(3.203.115.322)
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	42.898.968.071.000	42.412.449.065.110	20.810.400.592	42.391.638.664.518	(507.329.406.482)
01	KEMENTERIAN PERTAHANAN	8.235.694.122.000	6.594.606.513.905	5.528.178.419	6.589.078.335.486	(1.646.615.786.514)
21	MARKAS BESAR TNI	4.822.506.502.000	5.167.232.466.227	5.535.007.144	5.161.697.459.083	339.190.957.083
22	MARKAS BESAR TNI AD	18.871.610.102.000	19.291.609.717.281	5.089.268.930	19.286.520.448.351	414.910.346.351
23	MARKAS BESAR TNI AL	6.395.838.608.000	6.573.000.461.510	2.452.725.299	6.570.547.736.211	174.709.128.211
24	MARKAS BESAR TNI AU	4.573.318.737.000	4.785.999.906.187	2.205.220.800	4.783.794.685.387	210.475.948.387
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	5.320.126.424.000	4.837.898.837.938	5.809.499.153	4.832.089.338.785	(488.037.085.215)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	4.354.408.578.000	3.964.685.405.560	2.204.040.456	3.962.481.365.104	(391.927.212.896)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	28.186.902.000	27.963.111.035	29.179.461	27.933.931.574	(252.970.426)
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	79.009.970.000	71.480.825.760	889.314.380	70.591.511.380	(8.418.458.620)
05	DITJEN PEMASYARAKATAN	205.913.488.000	199.229.501.055	45.890.540	199.183.610.515	(6.729.877.485)
06	DITJEN IMIGRASI	367.227.344.000	322.772.531.113	1.274.400.511	321.498.130.602	(45.729.213.398)
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	72.625.695.000	58.100.022.543	116.571.750	57.983.450.793	(14.642.244.207)
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	43.671.479.000	34.074.194.459	339.656.850	33.734.537.609	(9.936.941.391)
09	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	26.944.988.000	24.164.823.593	1.416.535	24.163.407.058	(2.781.580.942)
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	47.695.327.000	43.976.210.648	10.302.791	43.965.907.857	(3.729.419.143)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM	20.514.611.000	19.828.905.956	21.426.562	19.807.479.394	(707.131.606)
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	73.928.042.000	71.623.306.216	877.299.317	70.746.006.899	(3.182.035.101)
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	15.368.284.219.000	14.298.142.294.501	21.677.426.012	14.276.464.868.489	(1.091.819.350.511)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	6.351.341.442.000	5.490.764.396.822	15.826.232.025	5.474.938.164.797	(876.403.277.203)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	93.609.000.000	90.526.200.496	538.137.171	89.988.063.325	(3.620.936.675)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
03	DITJEN ANGGARAN	99.476.764.000	95.625.189.671	137.954.732	95.487.234.939	(3.989.529.061)
04	DITJEN PAJAK	3.952.180.552.000	4.319.005.999.039	1.218.185.722	4.317.787.813.317	365.607.261.317
05	DITJEN BEA DAN CUKAI	1.968.287.700.000	1.627.137.038.020	479.632.349	1.626.657.405.671	(341.630.294.329)
06	DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	107.770.667.000	106.318.595.888	565.132.104	105.753.463.784	(2.017.203.216)
07	DITJEN PENGELOLAAN UTANG	77.932.980.000	184.206.507.790	119.510.252	184.086.997.538	106.154.017.538
08	DITJEN PERBENDAHARAAN	1.369.400.556.000	1.262.943.812.132	870.879.231	1.262.072.932.901	(107.327.623.099)
09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	641.006.865.000	498.025.099.926	1.480.975.067	496.544.124.859	(144.462.740.141)
10	BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN	159.136.721.000	145.798.248.519	6.415.267	145.791.833.252	(13.344.887.748)
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	419.209.283.000	367.952.325.609	299.051.160	367.653.274.449	(51.556.008.551)
12	BADAN KEBIJAKAN FISKAL	128.931.689.000	109.838.880.589	135.320.932	109.703.559.657	(19.228.129.343)
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	8.887.678.348.000	8.032.071.166.358	15.984.564.152	8.016.086.602.206	(871.591.745.794)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.466.372.574.000	1.255.954.884.644	7.902.393.771	1.248.052.490.873	(218.320.083.127)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	66.097.200.000	54.228.210.400	1.396.939.196	52.831.271.204	(13.265.928.796)
03	DITJEN TANAMAN PANGAN	1.098.068.300.000	954.016.279.123	1.033.133.830	952.983.145.293	(145.085.154.707)
04	DITJEN HOLTIKULTURA	418.276.200.000	388.008.800.337	282.763.246	387.726.037.091	(30.550.162.909)
05	DITJEN PERKEBUNAN	454.116.000.000	406.385.165.291	705.530.245	405.679.635.046	(48.436.364.954)
06	DITJEN PETERNAKAN	1.112.353.175.000	1.045.910.415.264	451.263.292	1.045.459.151.972	(66.894.023.028)
07	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	373.008.800.000	335.595.762.550	78.852.932	335.516.909.618	(37.491.890.382)
08	DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR	916.483.780.000	821.953.321.289	835.848.497	821.117.472.792	(95.366.307.208)
09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	943.781.820.000	887.618.094.410	1.083.683.791	886.534.410.619	(57.247.409.381)
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	1.214.047.099.000	1.092.432.585.352	1.920.696.065	1.090.511.889.287	(123.535.209.713)
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	397.683.500.000	365.193.918.643	50.601.184	365.143.317.459	(32.540.182.541)
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	427.389.900.000	424.773.729.055	242.858.103	424.530.870.952	(2.859.029.048)
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.684.616.721.000	1.494.188.113.749	1.460.547.258	1.492.727.566.491	(191.889.154.509)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	374.769.938.000	339.842.668.445	879.326.905	338.963.341.540	(35.806.596.460)
02	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA	177.188.921.000	156.686.227.447	156.066.384	156.530.161.063	(20.658.759.937)
03	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, TEKSTIL DAN ANEKA	345.276.777.000	290.085.652.258	24.582.333	290.061.069.925	(55.215.707.075)
04	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA	81.567.813.000	74.730.550.349	17.253.032	74.713.297.317	(6.854.515.683)
05	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	349.240.899.000	288.365.784.869	72.519.161	288.293.265.708	(60.947.633.292)
06	INSPEKTORAT JENDERAL	19.908.000.000	19.786.810.586	6.602.206	19.780.208.380	(127.791.620)
07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	336.664.373.000	324.690.419.795	304.197.237	324.386.222.558	(12.278.150.442)
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8.002.454.051.000	5.546.887.666.715	3.326.420.439	5.543.561.246.276	(2.458.892.804.724)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	957.583.672.000	822.676.426.022	1.846.248.783	820.830.177.239	(136.753.494.761)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	111.310.200.000	92.644.593.890	86.448.255	92.558.145.635	(18.752.054.365)
04	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI	563.323.900.000	485.507.183.785	1.326.654	485.505.857.131	(77.818.042.869)
05	DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	3.479.224.100.000	2.191.162.906.560	283.379.576	2.190.879.526.984	(1.288.344.573.016)
06	DITJEN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI	590.561.379.000	331.294.250.639	20.417.202	331.273.833.437	(259.287.545.563)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
07	DEWAN ENERGI NASIONAL	51.148.800.000	37.209.627.522	3.919.616	37.205.707.906	(13.943.092.094)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	735.592.300.000	579.313.696.435	300.633.645	579.013.062.790	(156.579.237.210)
12	BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	795.156.000.000	383.572.278.477	63.317.976	383.508.960.501	(411.647.039.499)
13	BADAN GEOLOGI	718.553.700.000	623.506.703.385	720.728.732	622.785.974.653	(95.767.725.347)
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	17.569.085.027.000	15.569.868.645.486	7.789.303.552	15.562.079.341.934	(2.007.005.685.066)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	322.940.226.000	287.349.597.494	247.982.812	287.101.614.682	(35.838.611.318)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	71.001.767.000	56.508.416.030	12.659.716	56.495.756.314	(14.506.010.686)
03	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.838.442.619.000	1.720.448.105.890	86.777.690	1.720.361.328.200	(118.081.290.800)
04	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	4.565.876.441.000	3.956.973.532.661	1.004.111.985	3.955.969.420.676	(609.907.020.324)
05	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	4.420.046.579.000	3.946.560.877.850	3.452.657.969	3.943.108.219.881	(476.938.359.119)
08	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	3.742.350.695.000	3.418.687.750.911	1.721.626.847	3.416.966.124.064	(325.384.570.936)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	87.828.682.000	81.089.891.506	8.252.568	81.081.638.938	(6.747.043.062)
12	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN	2.520.598.018.000	2.102.250.473.144	1.255.233.965	2.100.995.239.179	(419.602.778.821)
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	63.438.079.335.000	59.459.590.006.586	111.693.690.302	59.347.896.316.284	(4.090.183.018.716)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.305.264.105.000	1.162.196.674.997	641.822.780	1.161.554.852.217	(143.709.252.783)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	252.923.247.000	180.195.441.528	8.898.889.112	171.296.552.416	(81.626.694.584)
03	DITJEN MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	25.614.785.778.000	25.018.309.792.209	29.393.286.851	24.988.916.505.358	(625.869.272.642)
04	DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	22.857.743.972.000	20.694.117.904.714	36.622.546.937	20.657.495.357.777	(2.200.248.614.223)
05	DITJEN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL	2.789.829.522.000	2.560.369.328.844	5.391.200.574	2.554.978.128.270	(234.851.393.730)
08	DITJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	9.353.462.381.000	8.772.702.821.800	16.885.004.585	8.755.817.817.215	(597.644.563.785)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD	1.264.070.330.000	1.071.698.042.494	13.860.939.463	1.057.837.103.031	(206.233.226.969)
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	23.796.785.833.000	22.496.458.336.327	68.116.824.789	22.428.341.511.538	(1.368.444.321.462)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	3.146.753.545.000	2.275.057.343.381	47.864.472.690	2.227.192.870.691	(919.560.674.309)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	76.977.600.000	60.730.486.059	1.539.579.685	59.190.906.374	(17.786.693.626)
03	DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT	2.543.335.083.000	1.875.435.646.993	7.401.993.587	1.868.033.653.406	(675.301.429.594)
04	DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK	12.355.008.770.000	12.280.899.064.483	2.893.517.911	12.278.005.546.572	(77.003.223.428)
05	DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	1.357.441.840.000	2.110.205.562.399	1.010.916.198	2.109.194.646.201	751.752.806.201
07	DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	972.434.566.000	929.550.387.300	351.339.886	929.199.047.414	(43.235.518.586)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	226.525.339.000	367.342.149.079	1.408.867.143	365.933.281.936	139.407.942.936
12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	3.118.309.090.000	2.597.237.696.633	5.646.137.689	2.591.591.558.944	(526.717.531.056)
025	KEMENTERIAN AGAMA	30.129.675.904.000	28.047.146.918.980	39.081.205.164	28.008.065.713.816	(2.121.610.190.184)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	26.554.897.990.000	25.008.983.760.885	27.460.282.376	24.981.523.478.509	(1.573.374.511.491)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	95.332.091.000	89.995.335.058	1.013.489.651	88.981.845.407	(6.350.245.593)
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	143.756.138.000	140.225.801.246	293.082.906	139.932.718.340	(3.823.419.660)
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	2.610.024.860.000	2.140.036.548.685	6.831.719.222	2.133.204.829.463	(476.820.030.537)
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	124.292.444.000	119.381.278.389	28.034.337	119.353.244.052	(4.939.199.948)
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KHATOLIK	96.045.200.000	88.888.768.978	14.647.067	88.874.121.911	(7.171.078.089)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	72.594.772.000	70.629.515.693	265.731.201	70.363.784.492	(2.230.987.508)
08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	56.893.366.000	50.931.013.803	1.771.091.961	49.159.921.842	(7.733.444.158)
09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	189.353.574.000	169.705.596.556	1.246.708.607	168.458.887.949	(20.894.686.051)
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	186.485.469.000	168.369.299.687	156.417.836	168.212.881.851	(18.272.587.149)
026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.122.098.807.000	2.768.741.346.481	4.880.606.945	2.763.860.739.536	(358.238.067.464)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	320.539.233.000	287.867.348.816	154.168.321	287.713.180.495	(32.826.052.505)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	37.454.272.000	35.445.187.646	3.250.410	35.441.937.236	(2.012.334.764)
04	DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	480.663.711.000	375.590.660.439	2.151.756.670	373.438.903.769	(107.224.807.231)
05	DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	123.853.290.000	111.887.264.118	569.544.204	111.317.719.914	(12.535.570.086)
06	DITJEN PEMBINAAN PENYIAPAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI	646.861.128.000	590.044.830.230	802.161.472	589.242.668.758	(57.618.459.242)
07	DITJEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	610.694.225.000	562.021.120.487	588.788.609	561.432.331.878	(49.261.893.122)
08	DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	125.124.617.000	118.751.599.156	26.806.605	118.724.792.551	(6.399.824.449)
11	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI	50.127.070.000	48.313.063.176	12.873.526	48.300.189.650	(1.826.880.350)
13	DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	726.781.261.000	638.820.272.413	571.257.128	638.249.015.285	(88.532.245.715)
027	KEMENTERIAN SOSIAL	3.727.706.319.000	3.479.834.367.336	8.924.901.938	3.470.909.465.398	(256.796.853.602)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	178.265.476.000	170.630.917.428	600.553.478	170.030.363.950	(8.235.112.050)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	23.494.621.000	21.021.273.842	867.570	21.020.406.272	(2.474.214.728)
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	753.249.185.000	725.498.048.758	4.128.739.365	721.369.309.393	(31.879.875.607)
04	DITJEN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	697.915.799.000	679.465.237.561	2.013.404.794	677.451.832.767	(20.463.966.233)
05	DITJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.936.833.840.000	1.748.819.367.167	1.896.195.548	1.746.923.171.619	(189.910.668.381)
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	137.947.398.000	134.399.522.580	285.141.183	134.114.381.397	(3.833.016.603)
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	4.023.444.100.000	3.293.866.688.852	3.013.665.364	3.290.853.023.488	(732.591.076.512)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	519.255.373.000	424.799.944.903	152.254.144	424.647.690.759	(94.607.682.241)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	39.990.375.000	36.207.160.087	341.004.016	35.866.156.071	(4.124.218.929)
03	DITJEN BINA PRODUKSI KEHUTANAN	288.826.234.000	229.840.073.648	388.445.544	229.451.628.104	(59.374.605.896)
04	DITJEN REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL	1.424.643.336.000	1.161.793.258.917	214.388.096	1.161.578.870.821	(263.064.465.179)
05	DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM	1.209.211.873.000	978.098.300.749	965.537.722	977.132.763.027	(232.079.109.973)
06	DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN	329.252.024.000	264.897.592.589	743.532.418	264.154.060.171	(65.097.963.829)
07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN	212.264.885.000	198.230.357.959	208.503.424	198.021.854.535	(14.243.030.465)
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.380.840.198.000	3.141.588.436.649	2.067.998.921	3.139.520.437.728	(241.319.760.272)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	470.372.824.000	458.802.062.150	325.935.960	458.476.126.190	(11.896.697.810)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	43.649.200.000	42.348.563.864	11.508.863	42.337.055.001	(1.312.144.999)
03	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	790.606.136.000	552.378.075.634	301.815.058	552.076.260.576	(238.529.875.424)
04	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	516.819.935.000	589.037.578.856	221.752.291	588.815.826.565	71.995.891.565
05	DITJEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN & PERIKANAN	324.722.700.000	271.583.102.224	217.005.962	271.456.096.262	(53.266.603.738)
06	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)	206.552.100.000	195.752.236.880	122.988.819	195.539.248.061	(11.012.851.939)
07	DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)	496.308.800.000	426.490.723.592	69.854.530	426.420.869.062	(69.887.930.938)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
11	BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRKP)	274.445.772.000	265.210.489.094	98.768.123	265.111.720.971	(9.334.051.029)
12	BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	257.362.731.000	339.985.604.355	698.369.315	339.287.235.040	81.924.504.040
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	36.092.102.070.000	32.755.590.626.424	8.685.091.795	32.746.905.534.629	(3.345.196.535.371)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	488.470.457.000	425.631.548.990	58.843.962	425.572.705.028	(62.897.751.972)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	76.600.000.000	60.913.304.344	1.922.941.120	58.990.363.224	(17.609.636.776)
03	DITJEN PENATAAN RUANG	364.429.700.000	337.194.310.651	339.607.047	336.854.703.604	(27.574.996.396)
04	DITJEN BINA MARGA	17.766.500.091.000	15.943.718.783.698	2.485.107.639	15.941.233.676.059	(1.825.266.414.941)
05	DITJEN CIPTA KARYA	7.819.167.151.000	7.936.405.185.532	939.095.738	7.935.466.089.794	116.298.938.794
06	DITJEN SUMBER DAYA AIR	8.974.401.743.000	7.523.489.196.383	2.455.274.979	7.521.033.921.404	(1.453.367.821.596)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	318.808.107.000	296.974.404.381	353.496.530	296.620.907.851	(22.187.199.149)
13	BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	210.724.821.000	191.286.133.067	130.709.716	191.155.423.351	(19.569.397.649)
14	BADAN PENGELOLA JALAN TOL	48.000.000.000	16.003.705.444	5.064	16.003.700.380	(31.996.299.620)
15	BADAN PENDUKUNG PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	25.000.000.000	23.974.053.934	10.000	23.974.043.934	(1.025.956.066)
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	238.847.550.000	194.752.528.639	422.340.653	194.330.187.986	(44.517.362.014)
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	238.847.550.000	194.752.528.639	422.340.653	194.330.187.986	(44.517.362.014)
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	116.403.423.000	97.670.956.575	763.027.416	96.907.929.159	(19.495.493.841)
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	116.403.423.000	97.670.956.575	763.027.416	96.907.929.159	(19.495.493.841)
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	101.168.316.000	84.518.164.178	94.244.384	84.423.919.794	(16.744.396.206)
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	101.168.316.000	84.518.164.178	94.244.384	84.423.919.794	(16.744.396.206)
040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.679.564.579.000	1.590.938.965.519	949.317.836	1.589.989.647.683	(89.574.931.317)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	259.890.098.000	237.741.182.513	89.512.124	237.651.670.389	(22.238.427.611)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	21.960.422.000	21.072.007.471	6.785.523	21.065.221.948	(895.200.052)
03	DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN PERFILMAN	189.819.655.000	182.639.141.366	35.650.941	182.603.490.425	(7.216.164.575)
04	DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA	290.634.179.000	278.439.486.622	263.231.128	278.176.255.494	(12.457.923.506)
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	117.572.087.000	108.079.146.202	53.698.470	108.025.447.732	(9.546.639.268)
06	DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN	409.838.327.000	394.665.250.270	440.108.687	394.225.141.583	(15.613.185.417)
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	389.849.811.000	368.302.751.075	60.330.963	368.242.420.112	(21.607.390.888)
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	166.203.110.000	92.764.144.435	5.565.757	92.758.578.678	(73.444.531.322)
01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	166.203.110.000	92.764.144.435	5.565.757	92.758.578.678	(73.444.531.322)
042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	650.514.069.000	621.861.340.495	1.864.505.841	619.996.834.654	(30.517.234.346)
01	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	650.514.069.000	621.861.340.495	1.864.505.841	619.996.834.654	(30.517.234.346)
043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	422.347.903.000	404.713.385.034	353.950.755	404.359.434.279	(17.988.468.721)
01	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	422.347.903.000	404.713.385.034	353.950.755	404.359.434.279	(17.988.468.721)
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	789.303.660.000	729.578.953.329	18.528.041	729.560.425.288	(59.743.234.712)
01	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	789.303.660.000	729.578.953.329	18.528.041	729.560.425.288	(59.743.234.712)
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	183.504.506.000	165.278.067.232	189.837.378	165.088.229.854	(18.416.276.146)
01	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	183.504.506.000	165.278.067.232	189.837.378	165.088.229.854	(18.416.276.146)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	129.751.091.000	84.118.350.426	751.523.226	83.366.827.200	(46.384.263.800)
01	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	129.751.091.000	84.118.350.426	751.523.226	83.366.827.200	(46.384.263.800)
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	985.866.020.000	963.416.710.873	133.040.498	963.283.670.375	(22.582.349.625)
01	BADAN INTELIJEN NEGARA	985.866.020.000	963.416.710.873	133.040.498	963.283.670.375	(22.582.349.625)
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	625.106.089.000	606.788.595.082	696.995.093	606.091.599.989	(19.014.489.011)
01	LEMBAGA SANDI NEGARA	625.106.089.000	606.788.595.082	696.995.093	606.091.599.989	(19.014.489.011)
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	30.169.210.000	29.045.439.501	1.848.777	29.043.590.724	(1.125.619.276)
01	SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL	30.169.210.000	29.045.439.501	1.848.777	29.043.590.724	(1.125.619.276)
054	BADAN PUSAT STATISTIK	5.153.658.220.000	4.950.274.226.942	2.529.689.014	4.947.744.537.928	(205.913.682.072)
01	BADAN PUSAT STATISTIK	5.153.658.220.000	4.950.274.226.942	2.529.689.014	4.947.744.537.928	(205.913.682.072)
055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	566.311.570.000	385.360.827.800	769.072.241	384.591.755.559	(181.719.814.441)
01	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	566.311.570.000	385.360.827.800	769.072.241	384.591.755.559	(181.719.814.441)
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.951.618.046.000	2.297.232.410.652	2.736.291.783	2.294.496.118.869	(657.121.927.131)
01	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.951.618.046.000	2.297.232.410.652	2.736.291.783	2.294.496.118.869	(657.121.927.131)
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	443.553.893.000	397.056.075.591	110.230.038	396.945.845.553	(46.608.047.447)
01	PERPUSTAKAAN NASIONAL	443.553.893.000	397.056.075.591	110.230.038	396.945.845.553	(46.608.047.447)
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.888.683.652.000	2.201.063.942.635	1.549.092.242	2.199.514.850.393	(689.168.801.607)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	138.675.627.000	125.164.671.709	166.024.416	124.998.647.293	(13.676.979.707)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	18.437.240.000	16.859.407.776	5.311.727	16.854.096.049	(1.583.143.951)
03	DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI	2.045.221.226.000	1.502.224.830.322	638.551.071	1.501.586.279.251	(543.634.946.749)
04	DITJEN APLIKASI TELEMATIKA	188.031.500.000	99.456.822.216	128.234.068	99.328.588.148	(88.702.911.852)
05	DITJEN SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI	234.507.108.000	212.935.873.264	265.792.883	212.670.080.381	(21.837.027.619)
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	155.633.251.000	144.105.492.078	276.743.148	143.828.748.930	(11.804.502.070)
07	BADAN INFORMASI PUBLIK	108.177.700.000	100.316.845.270	68.434.929	100.248.410.341	(7.929.289.659)
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	27.794.953.111.000	26.821.492.440.649	38.448.549.682	26.783.043.890.967	(1.011.909.220.033)
01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	27.794.953.111.000	26.821.492.440.649	38.448.549.682	26.783.043.890.967	(1.011.909.220.033)
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	657.887.863.000	605.467.268.755	1.937.294.989	603.529.973.766	(54.357.889.234)
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	657.887.863.000	605.467.268.755	1.937.294.989	603.529.973.766	(54.357.889.234)
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	238.546.914.000	157.781.845.685	31.589.106	157.750.256.579	(80.796.657.421)
01	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	238.546.914.000	157.781.845.685	31.589.106	157.750.256.579	(80.796.657.421)
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	428.662.735.000	378.812.131.201	540.759.335	378.271.371.866	(50.391.363.134)
01	SEKRETARIAT UTAMA	182.724.370.000	159.096.061.721	55.987.401	159.040.074.320	(23.684.295.680)
02	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	32.335.362.000	29.231.029.961	219.335.534	29.011.694.427	(3.323.667.573)
03	DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL	144.981.480.000	128.995.170.301	63.896.000	128.931.274.301	(16.050.205.699)
04	DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	12.361.600.000	11.027.084.140	46.214.000	10.980.870.140	(1.380.729.860)
88	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL	12.206.400.000	11.772.569.197	16.664.000	11.755.905.197	(450.494.803)
06	DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	24.286.197.000	21.204.223.212	9.862.400	21.194.360.812	(3.091.836.188)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
07	DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	19.767.326.000	17.485.992.669	128.800.000	17.357.192.669	(2.410.133.331)
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	368.199.637.000	345.344.375.686	253.409.965	345.090.965.721	(23.108.671.279)
01	PELAKSANA HARIAN BNN	368.199.637.000	345.344.375.686	253.409.965	345.090.965.721	(23.108.671.279)
067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1.039.977.002.000	1.024.977.748.850	435.477.184	1.024.542.271.666	(15.434.730.334)
01	SEKRETARIAT KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	131.988.900.000	116.821.763.369	4.741.028	116.817.022.341	(15.171.877.659)
02	DEPUTI I BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	38.800.000.000	37.228.323.823	-	37.228.323.823	(1.571.676.177)
03	DEPUTI II BIDANG PENINGKATAN INFRASTRUKTUR	173.300.000.000	129.615.216.785	13.959.500	129.601.257.285	(43.698.742.715)
04	DEPUTI III BIDANG PEMBINAAN EKONOMI DAN DUNIA USAHA	366.769.700.000	280.607.782.678	145.039.000	280.462.743.678	(86.306.956.322)
05	DEPUTI IV BIDANG PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL DAN BUDAYA	73.318.400.000	67.026.704.400	37.675.400	66.989.029.000	(6.329.371.000)
06	DEPUTI V BIDANG PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS	255.800.002.000	393.677.957.795	234.062.256	393.443.895.539	137.643.893.539
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1.361.003.200.000	1.333.579.517.155	826.200.629	1.332.753.316.526	(28.249.883.474)
01	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1.361.003.200.000	1.333.579.517.155	826.200.629	1.332.753.316.526	(28.249.883.474)
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	58.085.920.000	53.057.490.212	356.325.146	52.701.165.066	(5.384.754.934)
01	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	58.085.920.000	53.057.490.212	356.325.146	52.701.165.066	(5.384.754.934)
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	947.279.285.000	885.776.657.874	279.933.275	885.496.724.599	(61.782.560.401)
01	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	947.279.285.000	885.776.657.874	279.933.275	885.496.724.599	(61.782.560.401)
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	961.461.456.000	760.981.479.641	1.986.390.303	758.995.089.338	(202.466.366.662)
01	KOMISI PEMILIHAN UMUM	961.461.456.000	760.981.479.641	1.986.390.303	758.995.089.338	(202.466.366.662)
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	189.296.606.000	169.725.533.091	44.314.671	169.681.218.420	(19.615.387.580)
01	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	189.296.606.000	169.725.533.091	44.314.671	169.681.218.420	(19.615.387.580)
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	113.912.908.000	64.163.251.917	482.037.541	63.681.214.376	(50.231.693.624)
01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	113.912.908.000	64.163.251.917	482.037.541	63.681.214.376	(50.231.693.624)
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	496.181.084.000	493.557.575.511	674.947.243	492.882.628.268	(3.298.455.732)
01	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	496.181.084.000	493.557.575.511	674.947.243	492.882.628.268	(3.298.455.732)
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	406.798.829.000	389.033.862.088	600.072.770	388.433.789.318	(18.365.039.682)
01	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	406.798.829.000	389.033.862.088	600.072.770	388.433.789.318	(18.365.039.682)
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	669.006.397.000	678.451.148.048	1.014.600.888	677.436.547.160	8.430.150.160
01	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	669.006.397.000	678.451.148.048	1.014.600.888	677.436.547.160	8.430.150.160
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	239.030.606.000	222.615.737.393	131.468.488	222.484.268.905	(16.546.337.095)
01	L A P A N	239.030.606.000	222.615.737.393	131.468.488	222.484.268.905	(16.546.337.095)
083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	463.004.343.000	309.475.543.223	839.152.289	308.636.390.934	(154.367.952.066)
01	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	463.004.343.000	309.475.543.223	839.152.289	308.636.390.934	(154.367.952.066)
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	121.597.303.000	103.137.015.330	361.009.231	102.776.006.099	(18.821.296.901)
01	BADAN STANDARISASI NASIONAL	121.597.303.000	103.137.015.330	361.009.231	102.776.006.099	(18.821.296.901)
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	57.291.932.000	53.818.855.750	272.232.560	53.546.623.190	(3.745.308.810)
01	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	57.291.932.000	53.818.855.750	272.232.560	53.546.623.190	(3.745.308.810)
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	199.481.863.000	189.109.429.708	378.389.624	188.731.040.084	(10.750.822.916)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
01	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	199.481.863.000	189.109.429.708	378.389.624	188.731.040.084	(10.750.822.916)
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	114.037.904.000	104.579.117.740	292.531.552	104.286.586.188	(9.751.317.812)
01	ARSIP NASIONAL	114.037.904.000	104.579.117.740	292.531.552	104.286.586.188	(9.751.317.812)
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	497.651.170.000	388.346.170.413	325.233.213	388.020.937.200	(109.630.232.800)
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	497.651.170.000	388.346.170.413	325.233.213	388.020.937.200	(109.630.232.800)
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	667.048.950.000	640.613.317.908	2.824.338.836	637.788.979.072	(29.259.970.928)
01	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	667.048.950.000	640.613.317.908	2.824.338.836	637.788.979.072	(29.259.970.928)
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1.455.286.332.000	1.259.847.996.712	1.520.301.119	1.258.327.695.593	(196.958.636.407)
01	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN	393.878.132.000	322.820.146.725	634.295.994	322.185.850.731	(71.692.281.269)
02	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	373.181.200.000	348.526.318.557	149.424.261	348.376.894.296	(24.804.305.704)
03	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	162.590.000.000	142.975.778.198	30.393.560	142.945.384.638	(19.644.615.362)
04	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	67.750.000.000	64.910.382.405	98.010.374	64.812.372.031	(2.937.627.969)
05	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN	22.726.000.000	21.265.312.006	112.080.623	21.153.231.383	(1.572.768.617)
06	BADAN PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	264.250.000.000	199.815.494.908	424.433.520	199.391.061.388	(64.858.938.612)
07	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	130.311.000.000	122.912.701.388	61.081.158	122.851.620.230	(7.459.379.770)
08	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	40.600.000.000	36.621.862.525	10.581.629	36.611.280.896	(3.988.719.104)
091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	964.518.419.000	915.108.463.025	168.036.691	914.940.426.334	(49.577.992.666)
01	SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	808.383.039.000	766.217.558.668	125.543.091	766.092.015.577	(42.291.023.423)
02	DEPUTI PEMBIAYAAN	39.877.000.000	38.756.512.572	-	38.756.512.572	(1.120.487.428)
03	DEPUTI PENGEMBANGAN KAWASAN	41.086.200.000	38.822.954.945	42.493.600	38.780.461.345	(2.305.738.655)
04	DEPUTI PERUMAHAN FORMAL	38.961.000.000	37.455.045.370	-	37.455.045.370	(1.505.954.630)
05	DEPUTI PERUMAHAN SWADAYA	36.211.180.000	33.856.391.470	-	33.856.391.470	(2.354.788.530)
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.503.859.460.000	2.393.565.551.674	425.644.210	2.393.139.907.464	(110.719.552.536)
01	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.503.859.460.000	2.393.565.551.674	425.644.210	2.393.139.907.464	(110.719.552.536)
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	458.751.431.000	268.855.957.593	853.054.553	268.002.903.040	(190.748.527.960)
01	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	458.751.431.000	268.855.957.593	853.054.553	268.002.903.040	(190.748.527.960)
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	634.559.462.000	376.103.758.238	7.419.922.516	368.683.835.722	(265.875.626.278)
01	SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI	280.742.652.000	92.185.768.125	64.641.133	92.121.126.992	(188.621.525.008)
02	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	353.816.810.000	283.917.990.113	7.355.281.383	276.562.708.730	(77.254.101.270)
100	KOMISI YUDISIAL RI	58.473.572.000	54.176.486.902	3.360.660	54.173.126.242	(4.300.445.758)
01	KOMISI YUDISIAL RI	58.473.572.000	54.176.486.902	3.360.660	54.173.126.242	(4.300.445.758)
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	222.062.080.000	267.658.623.262	1.366.394.434	266.292.228.828	44.230.148.828
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	222.062.080.000	267.658.623.262	1.366.394.434	266.292.228.828	44.230.148.828
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	253.519.140.000	227.000.231.706	908.311.144	226.091.920.562	(27.427.219.438)
01	SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI	190.655.057.000	171.998.573.215	335.604.347	171.662.968.868	(18.992.088.132)
02	DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI BNP2TKI	11.000.000.000	10.283.372.300	40.692.000	10.242.680.300	(757.319.700)
03	DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI	28.864.083.000	23.219.486.383	113.711.465	23.105.774.918	(5.758.308.082)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
04	DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI	23.000.000.000	21.498.799.808	418.303.332	21.080.496.476	(1.919.503.524)
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.216.090.640.000	636.893.474.987	64.187.616	636.829.287.371	(579.261.352.629)
01	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.216.090.640.000	636.893.474.987	64.187.616	636.829.287.371	(579.261.352.629)
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	110.215.290.000	72.103.806.555	1.400.157.420	70.703.649.135	(39.511.640.865)
01	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	110.215.290.000	72.103.806.555	1.400.157.420	70.703.649.135	(39.511.640.865)
107	BADAN SAR NASIONAL	591.088.111.000	512.632.673.282	10.213.326	512.622.459.956	(78.465.651.044)
01	BADAN SAR NASIONAL	591.088.111.000	512.632.673.282	10.213.326	512.622.459.956	(78.465.651.044)
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	82.313.900.000	61.808.828.415	913.006.782	60.895.821.633	(21.418.078.367)
01	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	82.313.900.000	61.808.828.415	913.006.782	60.895.821.633	(21.418.078.367)
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	415.399.060.272.000	363.347.496.322.184	182.780.206.203	363.164.716.115.981	(52.234.344.156.019)
01	PENGELOLAAN UTANG	105.650.244.000.000	87.069.887.053.269	8.140.501.149	87.061.746.552.120	(18.588.497.447.880)
02	HIBAH	243.218.000.000	70.008.777.575	-	70.008.777.575	(173.209.222.425)
07	BELANJA SUBSIDI	201.262.981.330.778	192.707.049.527.199	-	192.707.049.527.199	(8.555.931.803.579)
08	BELANJA LAINNYA	108.242.616.941.222	82.591.350.964.141	174.639.705.054	82.416.711.259.087	(25.825.905.682.135)
99	TRANSAKSI KHUSUS		909.200.000.000	-	909.200.000.000	909.200.000.000
	JUMLAH	781.533.546.832.000	698.045.196.034.466	638.815.847.289	697.406.380.187.177	(84.127.166.644.823)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bunga Utang	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bansos	Lain-lain	Total Belanja
		51	52	53	54	55	56	57	58	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	16.576.034.467	184.218.693.169	3.978.127.590	-	-	-	-	-	204.772.855.226
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	464.611.847.095	896.325.228.612	431.434.242.235	-	-	-	-	-	1.792.371.317.942
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	520.435.179.520	669.124.755.650	784.641.820.179	-	-	-	-	-	1.974.201.755.349
005	MAHKAMAH AGUNG	2.599.291.782.931	606.197.911.650	690.273.114.081	-	-	-	-	-	3.895.762.808.662
006	KEJAKSAAN AGUNG	882.626.384.451	943.940.054.097	810.159.524.516	-	-	-	-	-	2.636.725.963.064
007	SEKRETARIAT NEGARA	269.124.146.917	1.013.958.955.129	245.867.735.612	-	-	-	1.462.475.000	-	1.530.413.312.658
010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	260.967.622.860	2.292.066.493.812	914.609.694.414	-	-	-	8.643.108.357.430	-	12.110.752.168.516
011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	1.803.686.561.291	1.880.755.041.012	67.463.415.207	-	-	-	-	-	3.751.905.017.510
012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	21.631.289.823.155	9.475.808.227.246	11.284.540.614.117	-	-	-	-	-	42.391.638.664.518
013	DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI	1.781.358.066.267	1.800.054.493.285	1.250.676.779.233	-	-	-	-	-	4.832.089.338.785
015	DEPARTEMEN KEUANGAN	7.177.468.681.133	3.927.556.076.682	1.849.952.898.697	1.321.487.211.977	-	-	-	-	14.276.464.868.489
018	DEPARTEMEN PERTANIAN	906.479.533.859	3.175.853.125.346	499.583.165.878	-	-	-	3.434.170.777.123	-	8.016.086.602.206
019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	267.743.049.992	1.038.951.039.142	186.033.477.357	-	-	-	-	-	1.492.727.566.491
020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	476.862.020.907	2.123.045.672.887	2.943.653.552.482	-	-	-	-	-	5.543.561.246.276
022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	1.158.162.941.133	2.697.631.286.391	11.706.285.114.410	-	-	-	-	-	15.562.079.341.934
023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	6.726.641.636.556	12.556.990.081.454	5.594.797.213.943	-	-	-	34.469.467.384.331	-	59.347.896.316.284
024	DEPARTEMEN KESEHATAN	3.326.829.073.168	8.857.810.279.540	4.869.703.667.522	-	-	-	5.373.998.491.308	-	22.428.341.511.538
025	DEPARTEMEN AGAMA	12.550.760.100.009	4.583.517.410.230	2.770.752.631.896	-	-	-	8.103.035.571.681	-	28.008.065.713.816
026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	217.495.119.293	1.872.409.577.541	658.935.854.107	-	-	-	15.020.188.595	-	2.763.860.739.536
027	DEPARTEMEN SOSIAL	184.453.490.715	1.049.435.655.012	174.179.977.026	-	-	-	2.062.840.342.645	-	3.470.909.465.398
029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	707.044.926.791	2.222.228.583.657	359.189.513.040	-	-	-	2.390.000.000	-	3.290.853.023.488
032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	387.573.352.464	1.907.243.821.885	786.063.330.999	-	-	-	58.639.932.380	-	3.139.520.437.728
033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	939.108.383.769	5.953.985.210.813	23.066.113.812.097	-	-	-	2.787.698.127.950	-	32.746.905.534.629
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	14.760.410.237	116.028.375.260	63.541.402.489	-	-	-	-	-	194.330.187.986
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	9.725.609.115	82.438.350.421	4.743.969.623	-	-	-	-	-	96.907.929.159
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	13.574.511.048	63.518.107.706	7.331.301.040	-	-	-	-	-	84.423.919.794
040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	240.213.111.490	1.011.752.495.938	323.864.040.255	-	-	-	14.160.000.000	-	1.589.989.647.683
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	15.965.015.035	44.660.249.786	32.133.313.857	-	-	-	-	-	92.758.578.678
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	26.150.935.842	260.749.772.676	333.096.424.372	-	-	-	(298.236)	-	619.996.834.654
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	42.533.370.254	348.136.740.619	13.689.323.406	-	-	-	-	-	404.359.434.279
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	42.451.472.672	450.400.395.750	51.188.601.116	-	-	-	185.519.955.750	-	729.560.425.288
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	12.349.268.126	148.325.062.173	2.737.468.690	-	-	-	1.676.430.865	-	165.088.229.854
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	17.502.910.984	63.384.861.072	2.479.055.144	-	-	-	-	-	83.366.827.200
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	62.838.994.235	711.978.985.390	188.465.690.750	-	-	-	-	-	963.283.670.375
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	37.779.721.729	53.559.412.868	514.752.465.392	-	-	-	-	-	606.091.599.989
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	5.596.537.843	20.718.037.638	2.729.015.243	-	-	-	-	-	29.043.590.724
054	BADAN PUSAT STATISTIK	579.323.595.626	3.820.418.578.951	548.002.363.351	-	-	-	-	-	4.947.744.537.928
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	39.697.899.247	332.842.409.427	12.051.446.885	-	-	-	-	-	384.591.755.559
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	912.281.516.772	1.062.473.490.695	319.741.111.402	-	-	-	-	-	2.294.496.118.869
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	33.082.801.913	319.191.019.789	44.672.023.851	-	-	-	-	-	396.945.845.553
059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	164.351.995.744	1.754.588.870.766	254.505.416.491	-	-	-	26.068.567.392	-	2.199.514.850.393
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	18.914.742.265.965	5.695.607.898.705	2.172.693.726.297	-	-	-	-	-	26.783.043.890.967

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bunga Utang	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bansos	Lain-lain	Total Belanja
		51	52	53	54	55	56	57	58	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	148.156.842.170	298.273.685.857	157.099.445.739	-	-	-	-	-	603.529.973.766
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	21.785.302.250	81.763.743.220	51.186.211.109	-	-	-	3.015.000.000	-	157.750.256.579
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	28.852.035.434	306.097.472.461	43.321.863.971	-	-	-	-	-	378.271.371.866
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	13.069.231.107	185.847.250.970	146.174.483.644	-	-	-	-	-	345.090.965.721
067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	10.186.239.018	459.096.859.573	20.371.317.150	-	-	-	534.887.855.925	-	1.024.542.271.666
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	166.396.238.631	1.147.963.901.572	18.393.176.323	-	-	-	-	-	1.332.753.316.526
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	15.742.052.475	34.696.189.676	2.262.922.915	-	-	-	-	-	52.701.165.066
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	172.000.617.049	350.666.721.106	362.829.386.444	-	-	-	-	-	885.496.724.599
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	249.292.835.439	425.391.661.506	84.310.592.393	-	-	-	-	-	758.995.089.338
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	9.533.364.904	147.412.186.944	12.735.666.572	-	-	-	-	-	169.681.218.420
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	15.049.689.193	18.732.804.499	29.898.720.684	-	-	-	-	-	63.681.214.376
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	211.726.983.062	259.146.428.759	22.009.216.447	-	-	-	-	-	492.882.628.268
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	192.230.334.618	144.829.817.248	51.373.637.452	-	-	-	-	-	388.433.789.318
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	158.074.092.708	332.634.599.525	180.984.223.177	-	-	-	5.743.631.750	-	677.436.547.160
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	58.810.301.477	121.031.047.587	42.642.919.841	-	-	-	-	-	222.484.268.905
083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	30.344.911.108	100.303.980.137	177.987.499.689	-	-	-	-	-	308.636.390.934
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	9.078.041.590	69.859.683.729	23.838.280.780	-	-	-	-	-	102.776.006.099
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	20.957.878.079	29.825.947.129	2.762.797.982	-	-	-	-	-	53.546.623.190
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	36.438.780.914	113.306.371.563	38.985.887.607	-	-	-	-	-	188.731.040.084
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	24.713.836.805	48.885.363.188	30.687.386.195	-	-	-	-	-	104.286.586.188
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	142.720.971.186	153.805.152.970	91.494.813.044	-	-	-	-	-	388.020.937.200
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	264.660.560.898	329.287.063.881	43.841.354.293	-	-	-	-	-	637.788.979.072
090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	182.765.627.384	926.038.324.349	143.731.366.360	-	-	-	5.792.377.500	-	1.258.327.695.593
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	24.363.779.993	397.096.451.129	320.214.195.212	-	-	-	173.266.000.000	-	914.940.426.334
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	26.983.543.514	1.986.344.873.921	379.471.490.029	-	-	-	340.000.000	-	2.393.139.907.464
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	157.599.309.217	70.390.523.841	40.013.069.982	-	-	-	-	-	268.002.903.040
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	128.736.529.750	220.385.300.875	19.562.005.097	-	-	-	-	-	368.683.835.722
100	KOMISI YUDISIAL RI	6.202.123.278	46.448.992.726	1.522.010.238	-	-	-	-	-	54.173.126.242
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	6.350.528.093	223.075.865.415	18.716.828.520	-	-	-	18.149.006.800	-	266.292.228.828
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	31.456.517.389	172.759.029.250	17.134.013.923	-	-	-	4.742.360.000	-	226.091.920.562
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	12.752.515.418	61.490.128.846	557.702.801.207	-	-	-	4.883.841.900	-	636.829.287.371
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	6.033.745.661	57.705.915.787	6.963.987.687	-	-	-	-	-	70.703.649.135
107	BADAN SAR NASIONAL	82.552.981.112	127.790.847.544	302.278.831.300	-	-	-	-	-	512.622.459.956
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	17.060.458.096	40.579.517.170	3.255.846.367	-	-	-	-	-	60.895.821.633
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	58.953.893.596.969	17.994.106.000	-	87.061.746.552.120	192.707.049.527.199	70.008.777.575	2.681.035.608.198	21.672.987.947.920	363.164.716.115.981
	JUMLAH	148.078.084.098.609	97.596.838.399.825	80.287.065.685.665	88.383.233.764.097	192.707.049.527.199	70.008.777.575	68.611.111.986.287	21.672.987.947.920	697.406.380.187.177

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
01	PELAYANAN UMUM	528.770.342.639.000	471.920.214.816.150	362.643.777.457	471.557.571.038.693	(57.212.771.600.307)
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	108.725.491.443.000	103.445.692.587.551	173.678.676.320	103.272.012.911.231	(5.453.478.531.769)
01	PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI	1.201.313.976.000	3.998.190.915.346	20.231.216.081	3.977.959.699.265	2.776.645.723.265
02	PROGRAM PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN OPTIMALISASI DIPLOMASI INDONESIA	4.984.378.804.000	3.473.418.043.370	3.924.389.432	3.469.493.653.938	(1.514.885.150.062)
03	PROGRAM PERBAIKAN PROSES POLITIK	57.974.336.000	41.914.000.265	365.872.741	41.548.127.524	(16.426.208.476)
04	PROGRAM PENEKASAN KOMITMEN PERDAMAIAN DUNIA	11.380.000.000	9.013.006.354	106.615.186	8.906.391.168	(2.473.608.832)
05	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL	153.258.600.000	121.566.941.179	597.414.814	120.969.526.365	(32.289.073.635)
06	PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL	169.693.400.000	145.301.091.949	624.246.638	144.676.845.311	(25.016.554.689)
07	PROGRAM PENATAAN HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT	1.258.100.000	1.155.564.900	-	1.155.564.900	(102.535.100)
09	PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK	83.349.895.557.000	80.747.004.995.162	118.341.894.694	80.628.663.100.468	(2.721.232.456.532)
10	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA	1.416.433.429.000	1.228.201.766.944	17.491.146.528	1.210.710.620.416	(205.722.808.584)
12	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	874.656.969.000	677.264.214.700	855.768.973	676.408.445.727	(198.248.523.273)
13	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	2.412.730.104.000	1.379.789.498.831	3.539.904.819	1.376.249.594.012	(1.036.480.509.988)
15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	1.172.606.706.000	896.963.158.633	1.808.550.037	895.354.608.596	(277.252.097.404)
16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	115.791.800.000	108.927.353.104	79.037.300	108.848.315.804	(6.943.484.196)
17	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA	4.942.184.539.000	3.878.145.349.181	394.569.419	3.877.750.779.762	(1.064.433.759.238)
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	1.380.601.320.000	1.128.510.939.678	1.660.097.806	1.126.850.841.872	(253.750.478.128)
20	PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN KEUANGAN NEGARA	1.539.971.699.000	980.036.542.116	57.482.750	979.979.059.366	(569.992.639.634)
21	PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELUARAN NEGARA	513.811.464.000	387.137.326.023	614.154.313	386.523.171.710	(127.288.292.290)
22	PROGRAM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA	29.773.546.000	77.799.208.622	178.118.375	77.621.090.247	47.847.544.247
23	PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEUANGAN	61.407.385.000	56.334.782.322	61.071.667	56.273.690.655	(5.133.694.345)
24	PROGRAM STABILISASI EKONOMI DAN SEKTOR KEUANGAN	175.863.288.000	140.046.348.468	477.731.718	139.568.616.750	(36.294.671.250)
25	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN HUTANG	36.536.388.000	32.403.851.780	78.715.146	32.325.136.634	(4.211.251.366)
26	PROGRAM PEMANTAPAN PELAKSANAAN SISTEM PENGANGGARAN	9.426.433.000	9.719.626.269	29.540.000	9.690.086.269	263.653.269
27	PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK	3.948.123.100.000	3.827.298.589.672	2.028.610.806	3.825.269.978.866	(122.853.121.134)
28	PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA	166.420.500.000	98.980.587.931	330.943.377	98.649.644.554	(67.770.855.446)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	2.583.700	(2.583.700)	(2.583.700)
9	PROGRAM TIDAK ADA	-	568.904.752	-	568.904.752	568.904.752
01.02	BANTUAN LUAR NEGERI	-	-	3.037.895	(3.037.895)	(3.037.895)
01	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	3.037.895	(3.037.895)	(3.037.895)
01.03	PELAYANAN UMUM	1.864.026.000.000	1.144.077.311.707	1.188.955.103	1.142.888.356.604	(721.137.643.396)
01	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	6.752.400.000	6.700.620.200	237.403.800	6.463.216.400	(289.183.600)
02	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	878.323.600.000	368.338.782.009	582.395.903	367.756.386.106	(510.567.213.894)
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	978.950.000.000	769.037.909.498	177.510.800	768.860.398.698	(210.089.601.302)
08	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	191.644.600	(191.644.600)	(191.644.600)
01.04	PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK	1.678.452.674.000	1.582.730.687.902	2.216.312.932	1.580.514.374.970	(97.938.299.030)
01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK	1.136.999.055.000	1.082.902.026.292	1.669.159.465	1.081.232.866.827	(55.766.188.173)
02	PROGRAM DIFUSI DAN PEMANFAATAN IPTEK	196.712.597.000	177.844.948.127	333.825.997	177.511.122.130	(19.201.474.870)
03	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK	344.741.022.000	321.983.713.483	213.327.470	321.770.386.013	(22.970.635.987)
01.05	PINJAMAN PEMERINTAH	105.650.244.000.000	87.069.887.053.269	8.140.501.149	87.061.746.552.120	(18.588.497.447.880)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
01	PROGRAM PEMBAYARAN BUNGA UTANG	105.650.244.000.000	87.069.887.053.269	8.140.501.149	87.061.746.552.120	(18.588.497.447.880)
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	1.676.981.950.000	1.705.899.329.558	2.292.008.670	1.703.607.320.888	26.625.370.888
01	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	6.500.000.000	4.630.562.573	67.998.220	4.562.564.353	(1.937.435.647)
02	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	20.600.000.000	13.980.291.682	113.949.400	13.866.342.282	(6.733.657.718)
04	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	9.200.000.000	7.881.227.755	25.554.200	7.855.673.555	(1.344.326.445)
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	491.888.800.000	558.549.794.179	693.154.014	557.856.640.165	65.967.840.165
06	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	43.704.000.000	22.638.672.781	46.126.500	22.592.546.281	(21.111.453.719)
07	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL	291.801.000.000	274.998.133.628	123.834.000	274.874.299.628	(16.926.700.372)
08	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARAT PEMERINTAH DAERAH	68.849.350.000	62.387.464.259	43.813.050	62.343.651.209	(6.505.698.791)
10	PROGRAM PEMULIHAN WILAYAH PASCA KONFLIK	12.000.000.000	11.529.344.501	506.000	11.528.838.501	(471.161.499)
11	PROGRAM PEMULIHAN DAERAH YANG TERKENA BENCANA NASIONAL	169.269.400.000	224.191.250.148	1.177.073.286	223.014.176.862	53.744.776.862
13	PROGRAM PEMBINAAN DAERAH	1.669.400.000	763.798.800	-	763.798.800	(905.601.200)
14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS	561.500.000.000	524.348.789.252	-	524.348.789.252	(37.151.210.748)
01.90	PELAYANAN UMUM LAINNYA	309.175.146.572.000	276.971.927.846.163	175.112.485.388	276.796.815.360.775	(32.378.331.211.225)
01	PROGRAM SUBSIDI DAN TRANSFER LAINNYA	265.382.164.013.601	246.232.253.451.486	164.464.551.619	246.067.788.899.867	(19.314.375.113.734)
02	PROGRAM PEMBIAYAAN LAIN-LAIN	42.841.652.258.399	29.600.836.923.879	10.291.304.532	29.590.545.619.347	(13.251.106.639.052)
03	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS	951.330.300.000	1.138.837.470.798	356.629.237	1.138.480.841.561	187.150.541.561
01.07	SUB FUNGSI TIDAK ADA	-	-	10.800.000	(10.800.000)	(10.800.000)
07	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	10.800.000	(10.800.000)	(10.800.000)
02	PERTAHANAN	21.434.068.602.000	17.088.193.990.125	7.711.771.312	17.080.482.218.813	(4.353.586.383.187)
02.01	PERTAHANAN NEGARA	13.900.404.324.000	11.279.492.001.000	4.529.472.646	11.274.962.528.354	(2.625.441.795.646)
01	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN INTEGRATIF	2.874.911.266.000	-	3.712.908.718	(3.712.908.718)	(2.878.624.174.718)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA DARAT	3.643.941.700.000	3.723.941.700.000	74.617.019	3.723.867.082.981	79.925.382.981
03	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA LAUT	3.054.394.700.000	3.146.394.700.000	360.000	3.146.394.340.000	91.999.640.000
04	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA UDARA	2.960.367.900.000	3.042.367.900.000	522.170.350	3.041.845.729.650	81.477.829.650
05	PROGRAM PENEGAKAN KEDAULATAN DAN PENJAGAAN KEUTUHAN WILAYAH NKRI	1.320.425.000.000	1.320.423.943.000	46.450.977	1.320.377.492.023	(47.507.977)
06	PROGRAM PENGEMBANGAN BELA NEGARA	46.363.758.000	46.363.758.000	116.500.215	46.247.257.785	(116.500.215)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	846.250	(846.250)	
09	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	7.538.617	(7.538.617)	(7.538.617)
19	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	48.080.500	(48.080.500)	(48.080.500)
02.02	DUKUNGAN PERTAHANAN	7.304.621.042.000	5.656.924.432.516	3.050.752.083	5.653.873.680.433	(1.650.747.361.567)
01	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PERTAHANAN	485.509.194.000	510.079.702.263	2.851.903.369	507.227.798.894	21.718.604.894
02	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN	6.819.111.848.000	5.146.844.730.253	182.322.624	5.146.662.407.629	(1.672.449.440.371)
09	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	16.526.090	(16.526.090)	(16.526.090)
02.03	BANTUAN MILITER LUAR NEGERI	41.722.060.000	41.722.060.000	3.600	41.722.056.400	(3.600)
01	PROGRAM KERJASAMA MILITER INTERNASIONAL	41.722.060.000	41.722.060.000	3.600	41.722.056.400	(3.600)
02.04	LITBANG PERTAHANAN	159.149.576.000	81.883.896.609	78.249.940	81.805.646.669	(77.343.929.331)
01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN	24.349.576.000	24.349.576.000	63.032.940	24.286.543.060	(63.032.940)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL	134.800.000.000	57.534.320.609	15.217.000	57.519.103.609	(77.280.896.391)
02.90	PERTAHANAN LAINNYA	28.171.600.000	28.171.600.000	53.293.043	28.118.306.957	(53.293.043)
01	PROGRAM OPERASI BHAKTI TNI	28.171.600.000	28.171.600.000	53.293.043	28.118.306.957	(53.293.043)
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	16.908.265.639.000	13.875.573.041.674	40.160.744.319	13.835.412.297.355	(3.072.853.341.645)
03.01	KEPOLISIAN	10.986.409.186.000	8.723.828.062.898	34.922.750.644	8.688.905.312.254	(2.297.503.873.746)
01	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN	278.794.900.000	265.178.768.374	555.395.619	264.623.372.755	(14.171.527.245)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEPOLISIAN	4.428.754.857.000	2.300.349.955.248	345.065.986	2.300.004.889.262	(2.128.749.967.738)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	71.305.300.000	70.994.927.630	2.954.500	70.991.973.130	(313.326.870)
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN	198.854.200.000	195.330.000.700	32.825.300	195.297.175.400	(3.557.024.600)
05	PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS	3.548.194.251.000	3.552.627.200.046	24.675.174.842	3.527.952.025.204	(20.242.225.796)
06	PROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PENGAMANAN DAN PENGGALANGAN KEAMANAN NEGARA	778.754.300.000	770.400.425.509	-	770.400.425.509	(8.353.874.491)
07	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAMANAN RAHASIA NEGARA	532.362.203.000	520.984.213.591	378.071.900	520.606.141.691	(11.756.061.309)
08	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA	319.062.487.000	300.978.442.079	172.823.313	300.803.618.766	(18.258.868.234)
09	PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI	221.596.588.000	161.918.095.184	7.031.448.065	154.886.647.119	(66.709.940.881)
10	PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	578.296.900.000	556.607.335.081	813.760.969	555.793.574.112	(22.503.325.888)
12	PROGRAM KERJASAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	30.433.200.000	28.460.699.456	323.311.350	28.137.388.106	(2.295.811.894)
35	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	423.098.800	(423.098.800)	(423.098.800)
93	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	168.820.000	(168.820.000)	(168.820.000)
03.02	PENANGGULANGAN BENCANA	373.779.311.000	308.936.609.520	-	308.936.609.520	(64.842.701.480)
01	PROGRAM PENCARIAN DAN PENYELAMATAN	373.779.311.000	308.936.609.520	-	308.936.609.520	(64.842.701.480)
03.03	PEMBINAAN HUKUM	5.548.077.142.000	4.842.808.369.256	5.237.993.675	4.837.570.375.581	(710.506.766.419)
01	PROGRAM PERENCANAAN HUKUM	681.400.733.000	16.806.201.578	101.043.044	16.805.158.534	(664.595.574.466)
02	PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM	88.438.647.000	70.415.270.627	375.039.700	70.040.230.927	(18.398.416.073)
03	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM	144.087.275.000	115.506.178.582	462.074.020	115.044.104.562	(28.053.170.438)
04	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM	-	497.854.968.459	1.451.619.007	496.403.349.452	496.403.349.452
05	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA	2.946.564.341.000	2.753.417.182.167	1.544.964.769	2.751.872.217.398	(194.692.123.602)
06	PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM	1.534.211.546.000	1.266.080.186.759	644.709.365	1.265.435.477.394	(268.776.068.606)
07	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROFESI HUKUM	153.364.600.000	122.628.381.084	634.103.770	121.994.277.314	(31.370.322.686)
09	PROGRAM PEMBINAAN SARANA DAN PRASARANA HUKUM	-	-	24.440.000	(24.440.000)	(24.440.000)
04	EKONOMI	61.203.878.223.000	52.213.812.256.548	35.447.188.215	52.178.365.068.333	(9.025.513.154.667)
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM	1.834.532.377.000	1.644.094.897.185	2.138.527.317	1.641.956.369.868	(192.576.007.132)
01	PROGRAM PERSAINGAN USAHA	82.313.900.000	61.808.828.415	913.006.782	60.895.821.633	(21.418.078.367)
02	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	98.093.224.000	87.535.622.327	85.945.957	87.449.676.370	(10.643.547.630)
03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	86.964.000.000	76.846.858.540	76.890.257.556	76.890.257.556	(10.273.742.444)
05	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UMKM	49.199.962.000	58.802.265.548	220.989.448	58.581.276.100	9.381.314.100
06	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	467.621.600.000	369.717.978.752	591.246.870	369.126.731.882	(98.494.868.118)
08	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUINGGULAN KOMPETITIF UKM	80.150.000.000	77.933.721.618	-	77.933.721.618	(2.216.278.382)
09	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	288.066.115.000	265.384.891.041	5.750.000	265.379.141.041	(22.686.973.959)
10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	18.000.000.000	17.414.738.270	-	17.414.738.270	(585.261.730)
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO	226.224.600.000	218.133.383.220	12.530.600	218.120.852.620	(8.103.747.380)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
12	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	437.898.976.000	410.516.609.454	152.456.676	410.364.152.778	(27.534.823.222)
04.02	TENAGA KERJA	1.566.924.787.000	1.341.439.068.642	3.900.817.773	1.337.538.250.869	(229.386.536.131)
01	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	662.797.647.000	573.921.188.432	331.671.850	573.589.516.582	(89.208.130.418)
03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA	325.316.400.000	273.574.325.234	593.639.881	272.980.685.353	(52.335.714.647)
04	PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA	578.810.740.000	493.943.554.976	2.975.506.042	490.968.048.934	(87.842.691.066)
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	10.155.026.154.000	9.018.659.850.781	13.972.174.894	9.004.687.675.887	(1.150.338.478.113)
02	PROGRAM PEMANTAPAN PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	329.398.100.000	253.512.837.059	322.118.711	253.190.718.348	(76.207.381.652)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	512.276.375.000	470.497.178.604	281.805.136	470.215.373.468	(42.061.001.532)
04	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	3.831.744.254.000	3.486.950.563.675	2.316.514.974	3.484.634.048.701	(347.110.205.299)
05	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN	504.597.500.000	428.367.739.353	264.470.829	428.103.268.524	(76.494.231.476)
06	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN	1.776.337.216.000	1.572.126.966.101	1.244.954.661	1.570.882.011.440	(205.455.204.560)
08	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	3.200.672.709.000	2.807.204.565.989	9.542.310.583	2.797.662.255.406	(403.010.453.594)
04.04	PENGAIRAN	5.542.216.180.000	4.572.093.764.949	1.850.024.585	4.570.243.740.364	(971.972.439.636)
01	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER AIR LAINNYA	2.255.871.580.000	1.480.304.378.191	1.718.336.316	1.478.586.041.875	(777.285.538.125)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	3.286.344.600.000	3.091.778.986.758	131.688.269	3.091.647.298.489	(194.687.301.511)
02	PROGRAM TIDAK ADA	-	10.400.000	-	10.400.000	10.400.000
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	3.841.030.936.000	2.518.427.114.828	283.400.393	2.518.143.714.435	(1.322.887.221.565)
01	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN	3.282.773.300.000	2.032.788.300.047	231.196.376	2.032.557.103.671	(1.250.216.196.329)
02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI	289.378.000.000	269.559.298.281	-	269.559.298.281	(19.818.701.719)
03	PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SERTA TEKNOLOGI ENERGI	47.040.700.000	33.117.460.154	2.225.917	33.115.234.237	(13.925.465.763)
04	PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SARANA DAN PRASARANA ENERGI	46.297.800.000	37.760.682.540	5.710.000	37.754.972.540	(8.542.827.460)
05	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PEMERINTAH DAERAH, KOPERASI DAN MASYARAKAT TERHADAP JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI	100.216.000.000	74.125.882.258	10.387.500	74.115.494.758	(26.100.505.242)
06	PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN	17.590.000.000	15.686.393.020	17.617.000	15.688.776.020	(1.921.223.980)
08	PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI SERTA BISNIS KETENAGALISTRIKAN	57.735.136.000	50.999.774.051	16.263.600	50.983.510.451	(6.751.625.549)
10	PROGRAM TIDAK ADA	-	4.389.324.477	-	4.389.324.477	4.389.324.477
04.06	PERTAMBANGAN	2.714.095.296.000	2.028.936.938.764	2.301.439.986	2.026.635.498.778	(687.459.797.222)
01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.784.615.283.000	1.294.630.383.436	2.099.090.563	1.292.531.292.873	(492.083.970.127)
02	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MIGAS	929.480.033.000	734.306.555.328	202.349.423	734.104.205.905	(195.375.827.095)
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	1.697.876.054.000	1.528.257.360.453	1.958.674.245	1.526.298.686.208	(171.577.367.792)
01	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	224.140.000.000	235.709.738.997	461.410.973	235.248.328.024	11.108.328.024
02	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	312.493.049.000	255.296.742.436	70.127.161	255.226.615.275	(57.266.433.725)
03	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	468.142.655.000	436.690.390.096	489.687.091	436.200.703.005	(31.941.951.995)
04	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	693.100.350.000	600.560.488.924	842.208.164	599.718.280.760	(93.382.069.240)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	94.840.856	(94.840.856)	(94.840.856)
32	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	400.000	(400.000)	(400.000)
04.08	TRANSPORTASI	31.068.192.022.000	27.524.100.842.914	7.304.526.813	27.516.796.316.101	(3.551.395.705.899)
01	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	5.849.031.765.000	5.638.669.288.445	72.647.163	5.638.596.641.282	(210.435.123.718)
02	PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	11.859.500.615.000	9.915.377.398.877	2.015.505.155	9.913.361.893.722	(1.946.138.721.278)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
03	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	391.703.300.000	357.200.699.879	16.848.280	357.183.851.599	(34.519.448.401)
04	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN LLAJ	121.439.000.000	116.724.363.631	-	116.724.363.631	(4.714.636.369)
05	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	32.395.000.000	31.854.152.900	-	31.854.152.900	(540.847.100)
06	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN	135.857.900.000	308.487.926.633	-	308.487.926.633	172.630.026.633
07	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API	3.476.238.740.000	2.987.924.029.652	1.694.172.424	2.986.229.857.228	(490.008.882.772)
08	PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DAN SARANA KERETA API	40.718.900.000	40.499.419.918	-	40.499.419.918	(219.480.082)
09	PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI KELEMBAGAAN PERKERETAAPIAN	43.880.600.000	41.515.284.343	24.350.000	41.490.934.343	(2.389.665.657)
10	PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PRASARANA LLAJ	66.474.700.000	62.752.863.566	-	62.752.863.566	(3.721.836.434)
11	PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT	2.818.003.638.000	2.357.989.472.615	214.967.130	2.357.774.505.485	(460.229.132.515)
12	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA TRANSPORTASI LAUT	158.615.000.000	150.117.487.576	-	150.117.487.576	(8.497.512.424)
13	PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PERATURAN TRANSPORTASI LAUT	580.456.100.000	536.779.927.308	130.311.000	536.649.616.308	(43.806.483.692)
14	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP	996.980.400.000	941.956.985.853	53.615.625	941.903.370.228	(55.077.028.772)
15	PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DERMAGA SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	43.455.200.000	40.219.862.700	-	40.219.862.700	(3.235.337.300)
16	PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI KELEMBAGAAN ASDP	24.755.600.000	24.080.895.230	-	24.080.895.230	(674.704.770)
17	PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA	3.206.895.350.000	2.940.386.644.515	2.792.567.662	2.937.594.076.853	(269.301.273.147)
18	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA TRANSPORTASI UDARA	245.951.150.000	239.587.523.080	13.200.000	239.574.323.080	(6.376.826.920)
19	PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PERATURAN TRANSPORTASI UDARA	387.873.865.000	237.912.680.407	93.459.544	237.819.220.863	(150.154.644.137)
20	PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA	69.900.800.000	62.430.903.082	84.488.900	62.346.414.182	(7.554.385.818)
21	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	56.577.200.000	55.532.196.876	-	55.532.196.876	(1.045.003.124)
22	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	461.387.199.000	436.100.835.828	98.393.930	436.002.441.898	(25.384.757.102)
04.09	TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.474.076.616.000	1.748.349.411.523	1.068.225.399	1.747.281.186.124	(726.795.429.876)
01	PROGRAM PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI POS DAN TELEMATIKA	456.619.422.000	344.335.607.342	561.351.885	343.774.255.457	(112.845.166.543)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA POS DAN TELEMATIKA	1.759.153.744.000	1.241.395.518.808	298.870.696	1.241.096.648.112	(518.057.095.888)
03	PROGRAM PENGUSAHAAN SERTA PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	258.303.450.000	162.618.285.373	208.002.818	162.410.282.555	(95.893.167.445)
04.90	EKONOMI LAINNYA	309.907.801.000	289.453.006.509	669.376.810	288.783.629.699	(21.124.171.301)
01	PROGRAM PENINGKATAN KLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	-	61.937.895.580	327.033.934	61.610.861.646	61.610.861.646
02	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	164.343.080.000	145.957.144.703	141.074.000	145.816.070.703	(18.527.009.297)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL	70.102.621.000	57.415.395.167	199.718.876	57.215.676.291	(12.886.944.709)
04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMN	75.462.100.000	24.142.571.059	1.550.000	24.141.021.059	(51.321.078.941)
05	LINGKUNGAN HIDUP	8.585.832.500.000	6.553.774.465.080	4.163.476.530	6.549.610.988.550	(2.036.221.511.450)
05.01	MANAJEMEN LIMBAH	557.370.000.000	764.408.125.895	32.383.939	764.375.741.956	207.005.741.956
01	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN DRAINASE	549.370.000.000	756.774.956.067	32.383.939	756.742.572.128	207.372.572.128
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN	8.000.000.000	7.633.169.828	-	7.633.169.828	(366.830.172)
05.03	PENANGGULANGAN POLUSI	158.394.856.000	151.537.596.785	117.487.630	151.420.109.155	(6.974.746.845)
01	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	910.558.000	756.468.400	-	756.468.400	(154.089.600)
02	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	157.484.298.000	150.781.128.385	117.487.630	150.663.640.755	(6.820.657.245)
05.04	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	5.378.512.260.000	3.898.986.156.415	1.121.422.948	3.897.864.733.467	(1.480.647.526.533)
01	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	680.689.201.000	516.159.609.015	565.736.741	515.593.872.274	(165.075.328.726)
02	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	1.459.262.600.000	1.171.767.478.386	129.159.743	1.171.638.318.643	(287.624.281.357)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	431.115.277.000	372.495.965.784	343.977.968	372.151.987.816	(58.963.289.184)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
04	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI	2.807.465.182.000	1.838.563.103.230	82.548.496	1.838.480.554.734	(968.984.627.266)
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN	2.290.000.551.000	1.580.103.473.893	2.052.077.599	1.578.051.396.294	(711.949.154.706)
01	PROGRAM PENATAAN RUANG	597.591.571.000	441.742.658.496	326.583.274	441.416.075.222	(156.175.495.778)
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN	1.692.408.980.000	1.138.360.815.397	1.725.494.325	1.136.635.321.072	(555.773.658.928)
05.90	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	201.554.833.000	158.739.112.092	840.104.414	157.899.007.678	(43.655.825.322)
01	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	201.554.833.000	158.739.112.092	840.104.414	157.899.007.678	(43.655.825.322)
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	21.509.029.504.000	20.063.233.263.295	10.051.371.058	20.053.181.892.237	(1.455.847.611.763)
06.01	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.460.038.424.000	1.359.197.522.899	405.167.062	1.358.792.355.837	(101.246.068.163)
01	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.460.038.424.000	1.359.197.522.899	405.167.062	1.358.792.355.837	(101.246.068.163)
06.02	PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEMUKIMAN	3.226.454.322.000	2.693.543.241.636	330.595.452	2.693.212.646.184	(533.241.675.816)
01	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT	356.499.722.000	194.665.298.978	238.484.496	194.426.814.482	(162.072.907.518)
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	2.869.954.600.000	2.498.877.942.658	92.110.956	2.498.785.831.702	(371.168.768.298)
06.03	PENYEDIAAN AIR MINUM	3.338.490.851.000	2.973.132.920.191	434.126.719	2.972.698.793.472	(365.792.057.528)
01	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	1.106.636.400.000	917.021.062.035	400.000	917.020.662.035	(189.615.737.965)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	2.231.854.451.000	2.056.111.858.156	433.726.719	2.055.678.131.437	(176.176.319.563)
06.90	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA	13.484.045.907.000	13.037.359.578.569	8.881.481.825	13.028.478.096.744	(455.567.810.256)
01	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN	414.447.009.000	359.188.119.420	810.107.572	358.378.011.848	(56.068.997.152)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	408.154.700.000	376.129.465.047	740.977.341	375.388.487.706	(32.766.212.294)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL	948.969.900.000	840.940.290.304	735.235.640	840.205.054.664	(108.764.845.336)
04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL	95.813.702.000	262.255.403.227	42.947.700	262.212.455.527	166.398.753.527
06	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KOTA-KOTA BESAR DAN METROPOLITAN	15.000.000.000	14.287.975.695	77.616.000	14.210.359.695	(789.640.305)
07	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERDESAAN	1.122.743.200.000	1.295.201.587.104	13.534.500	1.295.188.052.604	172.444.852.604
08	PROGRAM PENGEMBANGAN KETERKAITAN PEMBANGUNAN ANTAR KOTA	24.000.000.000	29.595.697.114	16.177.350	29.579.519.764	5.579.519.764
09	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	10.420.867.396.000	9.826.891.468.068	6.444.885.722	9.820.446.582.346	(600.420.813.654)
10	PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA-KOTA KECIL DAN MENENGAH	34.050.000.000	32.869.572.590	-	32.869.572.590	(1.180.427.410)
05	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	-	-	-
07	KESEHATAN	19.801.511.355.000	18.816.112.978.217	23.093.871.998	18.793.019.106.219	(1.008.492.248.781)
07.01	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	1.410.053.969.000	1.331.387.543.224	2.084.243.958	1.329.303.299.266	(80.750.668.734)
01	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	960.952.836.000	921.310.521.017	350.414.762	920.960.106.255	(39.992.729.745)
02	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	442.911.233.000	404.271.376.512	1.643.079.392	402.628.297.120	(40.282.935.880)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA	6.189.900.000	5.805.645.695	90.749.804	5.714.895.891	(475.004.109)
07.02	PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN	11.945.578.265.000	12.088.601.431.657	2.632.194.454	12.085.969.237.203	140.390.972.203
01	PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	11.945.578.265.000	12.088.601.431.657	2.632.194.454	12.085.969.237.203	140.390.972.203
07.03	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	3.391.898.233.000	3.173.295.586.094	7.716.677.701	3.165.578.908.393	(226.319.324.607)
02	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	96.825.187.000	80.835.444.782	61.864.000	80.773.580.782	(16.051.606.218)
03	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.075.857.340.000	1.480.290.479.746	6.177.572.178	1.474.112.907.567	(601.744.432.433)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
04	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMERANTASAN PENYAKIT	826.019.917.000	1.273.314.182.285	539.008.379	1.272.775.173.906	446.755.256.906
05	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	393.195.789.000	338.855.479.281	938.233.143	337.917.246.138	(55.278.542.862)
07.04	KELUARGA BERENCANA	807.249.500.000	794.940.851.591	149.506.457	794.791.345.134	(12.458.154.866)
01	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	677.642.100.000	669.235.104.382	94.243.182	669.140.861.200	(8.501.238.800)
02	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	34.811.400.000	33.462.623.070	13.623.400	33.448.999.670	(1.362.400.330)
03	PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS	94.796.000.000	92.243.124.139	41.430.335	92.201.693.804	(2.594.306.196)
07	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	209.540	(209.540)	(209.540)
07.05	LITBANG KESEHATAN	160.271.840.000	258.709.559.858	1.151.834.170	257.557.725.688	97.285.885.688
01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	160.271.840.000	258.709.559.858	1.151.834.170	257.557.725.688	97.285.885.688
07.90	KESEHATAN LAINNYA	2.086.459.548.000	1.169.178.005.793	9.359.415.258	1.159.818.590.535	(926.640.957.465)
01	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	1.321.163.373.000	660.002.170.224	2.406.423.009	657.595.747.215	(663.567.625.785)
02	PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN	765.296.175.000	509.175.835.569	6.837.869.456	502.337.966.113	(262.958.208.887)
03	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	114.765.793	(114.765.793)	(114.765.793)
19	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	357.000	(357.000)	(357.000)
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	1.530.466.077.000	1.409.930.233.131	1.248.301.757	1.408.681.931.374	(121.784.145.626)
08.01	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA	936.361.619.000	882.805.218.813	730.170.195	882.075.048.618	(54.286.570.382)
01	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	59.000.000.000	56.887.064.850	6.850.287	56.880.214.563	(2.119.785.437)
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	204.102.700.000	187.962.804.596	167.794.926	187.795.009.670	(18.307.690.330)
03	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	90.419.419.000	84.777.415.331	99.000	84.777.316.331	(5.642.102.669)
04	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	426.339.500.000	407.863.140.994	495.810.174	407.367.330.820	(18.972.169.180)
05	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	130.500.000.000	120.204.013.437	52.634.828	120.151.378.609	(10.348.621.391)
06	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	26.000.000.000	25.110.779.605	-	25.110.779.605	(889.220.395)
09	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	6.980.980	(6.980.980)	(6.980.980)
08.02	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.460.000.000	6.033.041.675	2.064.700	6.030.976.975	(429.023.025)
02	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA	6.460.000.000	6.033.041.675	2.064.700	6.030.976.975	(429.023.025)
08.03	PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN	157.029.458.000	137.158.241.390	462.690.112	136.695.551.278	(20.333.906.722)
01	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	157.029.458.000	137.158.241.390	462.690.112	136.695.551.278	(20.333.906.722)
08.05	PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI	430.615.000.000	383.933.731.253	53.376.750	383.880.354.503	(46.734.645.497)
01	PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI	430.615.000.000	383.933.731.253	53.376.750	383.880.354.503	(46.734.645.497)
09	AGAMA	943.083.260.000	880.838.246.238	2.081.312.605	878.756.933.633	(64.326.326.367)
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA	839.942.560.000	783.108.534.082	1.914.671.805	781.193.862.277	(58.748.697.723)
01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	715.607.760.000	660.599.627.876	1.764.999.309	658.834.628.567	(56.773.131.433)
02	PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN, PENGAMALAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN	124.334.800.000	122.508.906.206	124.894.090	122.384.012.116	(1.950.787.884)
09	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	24.778.406	(24.778.406)	(24.778.406)
09.02	KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA	30.500.000.000	29.545.381.549	96.940.000	29.448.441.549	(1.051.558.451)
01	PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	30.500.000.000	29.545.381.549	96.940.000	29.448.441.549	(1.051.558.451)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
09.03	LITBANG AGAMA	33.033.700.000	28.738.392.607	30.439.950	28.708.952.657	(4.324.747.343)
01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA	33.033.700.000	28.738.392.607	30.439.950	28.708.952.657	(4.324.747.343)
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	39.607.000.000	39.444.938.000	39.260.850	39.405.677.150	(201.322.850)
01	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN	39.607.000.000	39.444.938.000	15.042.200	39.429.895.800	(177.104.200)
07	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	24.218.650	(24.218.650)	(24.218.650)
10	PENDIDIKAN	97.235.677.199.000	90.961.387.220.846	143.073.274.807	90.818.313.946.039	(6.417.363.252.961)
10.01	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1.327.703.341.000	1.225.763.552.910	550.536.164	1.225.213.016.746	(102.490.324.254)
01	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1.327.703.341.000	1.225.763.552.910	542.544.956	1.225.221.007.954	(102.482.333.046)
03	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	200.000	(200.000)	(200.000)
09	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	7.791.208	(7.791.208)	(7.791.208)
10.02	PENDIDIKAN DASAR	34.735.086.743.000	33.352.801.248.772	51.304.545.801	33.301.496.702.971	(1.433.590.040.029)
01	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	34.735.086.743.000	33.352.801.248.772	51.120.275.301	33.301.680.973.471	(1.433.405.769.529)
03	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	184.270.500	(184.270.500)	(184.270.500)
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH	7.610.473.963.000	7.141.602.439.710	8.112.154.585	7.133.490.285.125	(476.983.677.875)
01	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	7.610.473.963.000	7.141.602.439.710	8.112.154.585	7.133.490.285.125	(476.983.677.875)
10.04	PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	1.218.036.426.000	1.104.784.985.144	4.810.919.118	1.099.974.066.026	(118.062.359.974)
01	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	1.218.036.426.000	1.104.784.985.144	4.810.919.118	1.099.974.066.026	(118.062.359.974)
10.05	PENDIDIKAN KEDINASAN	196.390.750.000	188.756.789.757	143.212.040	188.613.577.717	(7.777.172.283)
01	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	196.390.750.000	188.756.789.757	143.212.040	188.613.577.717	(7.777.172.283)
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	29.666.244.036.000	27.267.839.571.335	37.022.613.796	27.230.816.957.539	(2.435.427.078.461)
01	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	29.666.244.036.000	27.267.839.571.335	36.970.518.700	27.230.869.052.635	(2.435.374.983.365)
03	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	52.095.096	(52.095.096)	(52.095.096)
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN	19.002.345.210.000	17.491.404.497.684	24.379.977.723	17.467.024.519.961	(1.535.320.690.039)
01	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.212.969.782.000	5.300.897.961.510	10.417.415.441	5.290.480.546.069	(922.489.235.931)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	390.106.000.000	345.239.969.397	192.407.070	345.047.562.327	(45.058.437.673)
03	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	12.399.269.428.000	11.845.266.566.777	13.763.680.862	11.831.502.885.915	(567.766.542.085)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	841.500	(841.500)	(841.500)
08	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	4.755.500	(4.755.500)	(4.755.500)
09	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	877.350	(877.350)	(877.350)
10.08	PEMBINAAN KEAGAMAAN	771.537.120.000	728.318.936.845	2.662.402.617	725.656.534.228	(45.880.585.772)
01	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN	771.537.120.000	728.318.936.845	2.565.634.617	725.753.302.228	(45.783.817.772)
09	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	96.768.000	(96.768.000)	(96.768.000)
10.09	LITBANG PENDIDIKAN	814.070.310.000	623.134.650.724	13.851.482.363	609.283.168.361	(204.787.141.639)
01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	814.070.310.000	623.134.650.724	13.851.482.363	609.283.168.361	(204.787.141.639)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
10.10	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.893.789.300.000	1.836.980.547.965	235.430.600	1.836.745.117.365	(57.044.182.635)
01	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA	27.500.000.000	25.759.570.968	-	25.759.570.968	(1.740.429.032)
02	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA	331.260.042.000	319.290.556.395	98.975.000	319.191.581.395	(12.068.460.605)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA	20.000.000.000	18.564.238.534	-	18.564.238.534	(1.435.761.466)
04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	311.383.704.000	302.181.394.616	136.455.600	302.044.939.016	(9.338.764.984)
05	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	1.203.645.554.000	1.171.184.787.452	-	1.171.184.787.452	(32.460.766.548)
11	KEPENDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	3.611.391.834.000	3.349.730.734.025	8.115.785.244	3.341.614.948.781	(269.776.885.219)
11.04	KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	782.056.045.000	758.965.333.473	3.624.919.360	755.340.414.113	(26.715.630.887)
01	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN	595.929.000.000	579.602.491.521	3.535.631.454	576.066.860.067	(19.862.139.933)
02	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	20.459.000.000	18.945.835.600	30.556.850	18.915.278.750	(1.543.721.250)
04	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	29.062.045.000	24.993.115.960	11.061.356	24.982.054.604	(4.079.990.396)
05	PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	136.606.000.000	135.423.890.392	47.669.700	135.376.220.692	(1.229.779.308)
11.05	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	123.902.752.000	111.508.911.153	121.447.049	111.387.464.104	(12.515.287.896)
01	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	98.253.081.000	86.465.522.059	113.636.349	86.351.885.710	(11.901.195.290)
02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	25.649.671.000	25.043.389.094	7.810.700	25.035.578.394	(614.092.606)
11.06	PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL	559.108.100.000	543.690.873.033	1.860.633.623	541.830.239.410	(17.277.860.590)
01	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	533.264.000.000	519.735.106.220	1.860.633.623	517.874.472.597	(15.389.527.403)
02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	25.844.100.000	23.955.766.813	-	23.955.766.813	(1.888.333.187)
11.08	BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.927.954.100.000	1.737.924.029.752	1.858.284.656	1.736.065.745.096	(191.888.354.904)
01	PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	1.927.954.100.000	1.737.924.029.752	1.858.284.656	1.736.065.745.096	(191.888.354.904)
11.09	LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL	81.343.124.000	69.797.207.120	83.663.940	69.713.543.180	(11.629.580.820)
01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	21.738.900.000	20.969.874.778	39.504.300	20.930.370.478	(808.529.522)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	59.604.224.000	48.827.332.342	44.159.640	48.783.172.702	(10.821.051.298)
11.90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	137.027.713.000	127.844.379.494	566.836.616	127.277.542.878	(9.750.170.122)
01	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL	5.977.700.000	5.693.542.693	840.000	5.692.702.693	(284.997.307)
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	131.050.013.000	122.150.836.801	565.996.616	121.584.840.185	(9.465.172.815)
00	FUNGSI TIDAK ADA	-	912.394.789.137	1.024.971.987	911.369.817.150	911.369.817.150
00.00	SUB FUNGSI TIDAK ADA	-	912.394.789.137	1.024.971.987	911.369.817.150	911.369.817.150
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	912.394.789.137	1.024.971.987	911.369.817.150	911.369.817.150
	JUMLAH	781.533.546.832.000	698.045.196.034.466	638.815.847.289	697.406.380.187.177	(84.127.166.644.823)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Wilayah	Dana Bagi Hasil				DAU	DAK	Total Dana Perimbangan
		Pajak	SDA	Cukai	Jumlah			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6+7+8
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1.088.149.259.487	1.524.875.217.593	1.560.591.990	2.614.585.069.070	7.212.672.691.600	809.701.725.000	10.636.959.485.670
2	Provinsi Sumatera Utara	1.963.207.227.277	30.727.157.784	9.626.293.977	2.003.560.679.038	12.039.673.850.240	1.397.152.050.000	15.440.386.579.278
3	Provinsi Sumatera Barat	575.876.125.990	30.081.329.056	4.463.818.642	610.421.273.688	7.174.906.801.200	677.538.175.000	8.462.866.249.888
4	Provinsi Riau	1.990.686.848.682	8.483.051.427.936	0	10.473.738.276.618	1.956.283.971.600	255.686.850.000	12.685.709.098.218
5	Provinsi Kepulauan Riau	1.034.116.328.134	3.053.619.751.783	0	4.087.736.079.917	1.279.600.973.800	94.441.805.000	5.461.778.858.717
6	Provinsi Jambi	803.292.004.019	1.112.725.989.859	2.059.678.917	1.918.077.672.795	3.865.557.840.000	449.207.475.000	6.232.842.987.795
7	Provinsi Sumatera Selatan	2.081.821.854.037	3.493.311.586.171	1.694.216.233	5.576.827.656.441	5.521.185.231.000	552.168.800.000	11.650.181.687.441
8	Provinsi Bangka Belitung	281.445.882.234	186.456.497.575	0	467.902.379.809	2.068.172.218.200	181.571.100.000	2.717.645.698.009
9	Provinsi Bengkulu	298.193.692.559	22.946.317.921	0	321.140.010.480	3.289.868.586.800	381.555.300.000	3.992.563.897.280
10	Provinsi Lampung	672.244.494.230	313.631.384.466	2.059.947.542	987.935.826.238	6.155.371.777.200	675.920.500.000	7.819.228.103.438
11	Provinsi DKI Jakarta	9.463.279.081.270	112.194.874.059	731.427.038	9.576.205.382.367	447.570.978.000	0	10.023.776.360.367
12	Provinsi Jawa Barat	4.725.055.115.750	622.698.412.060	73.812.726.529	5.421.566.254.339	19.760.373.329.200	1.729.519.035.000	26.911.458.618.539
13	Provinsi Banten	1.716.659.354.199	3.896.286.957	2.401.429.133	1.722.957.070.289	4.404.360.226.200	378.603.600.000	6.505.920.896.489
14	Provinsi Jawa Tengah	2.387.861.311.333	36.281.740.899	281.555.648.209	2.705.698.700.441	21.012.701.664.600	1.957.220.543.000	25.675.620.908.041
15	Provinsi DI Yogyakarta	374.876.469.567	698.977.207	18.101.290.644	393.676.737.418	3.284.558.738.000	274.584.300.000	3.952.819.775.418
16	Provinsi Jawa Timur	3.953.042.411.835	429.004.208.847	668.524.205.748	5.050.570.826.430	23.570.721.692.800	1.879.244.600.000	30.500.537.119.230
17	Provinsi Kalimantan Barat	670.650.565.068	89.780.406.704	0	760.430.971.772	6.286.737.086.500	631.084.025.000	7.678.252.083.272
18	Provinsi Kalimantan Tengah	685.121.945.806	370.581.653.164	803.823.831	1.056.507.422.801	5.699.181.914.000	453.638.400.000	7.209.327.736.801
19	Provinsi Kalimantan Selatan	680.100.552.296	1.506.752.713.300	0	2.186.853.265.596	4.331.617.436.760	538.618.300.000	7.057.089.002.356
20	Provinsi Kalimantan Timur	2.917.049.054.917	12.722.819.136.574	1.019.184.189	15.640.887.375.680	1.515.102.520.800	222.270.210.000	17.378.260.106.480
21	Provinsi Sulawesi Utara	414.627.982.362	8.487.949.177	0	423.115.931.539	4.569.714.035.800	620.676.275.000	5.613.506.242.339
22	Provinsi Gorontalo	167.186.903.630	3.445.459.314	0	170.632.362.944	1.976.254.703.200	238.457.000.000	2.385.344.066.144
23	Provinsi Sulawesi Tengah	397.547.796.054	23.950.308.883	0	421.498.104.937	4.644.971.094.800	461.237.900.000	5.527.707.099.737
24	Provinsi Sulawesi Selatan	1.145.192.714.801	39.218.248.999	6.810.601.697	1.191.221.565.497	9.313.625.264.400	1.030.726.800.000	11.535.573.629.897
25	Provinsi Sulawesi Barat	185.594.004.863	4.536.717.918	0	190.130.722.781	1.921.562.034.000	205.486.200.000	2.317.178.956.781
26	Provinsi Sulawesi Tenggara	374.921.598.986	40.584.072.967	0	415.505.671.953	4.389.525.123.600	494.787.625.000	5.299.818.420.553
27	Provinsi Bali	694.235.614.439	1.200.010.599	8.850.728.480	704.286.353.518	3.849.007.842.400	333.568.425.000	4.886.862.620.918
28	Provinsi Nusa Tenggara Barat	370.848.573.759	229.169.863.495	116.442.008.235	716.460.445.489	4.597.268.149.200	462.299.600.000	5.776.028.194.689
29	Provinsi Nusa Tenggara Timur	508.887.714.566	4.040.198.218	1.593.404.249	514.521.317.033	6.612.124.878.200	859.587.700.000	7.986.233.895.233
30	Provinsi Maluku	406.052.736.070	40.011.652.461	0	446.064.388.531	3.677.965.543.800	451.745.300.000	4.575.775.232.331
31	Provinsi Maluku Utara	389.071.311.152	211.780.249.755	0	600.851.560.907	3.132.269.885.700	459.166.900.000	4.192.288.346.607
32	Provinsi Papua	1.257.463.758.268	1.428.673.915.030	0	2.686.137.673.298	10.592.911.944.000	1.379.115.550.000	14.658.165.167.298
33	Provinsi Papua Barat	1.141.295.322.799	8.984.490.881.415	0	10.125.786.204.214	3.418.070.599.600	419.729.100.000	13.963.585.903.814
	Dana Cadangan	0	0		0	0		0
	Nilai Belum Teridentifikasi Daerah Penerima				0			0
	Kembali ke RKUN				0			0
	JUMLAH	45.815.655.610.439	45.165.724.598.146	1.202.111.025.283	92.183.491.233.868	203.571.490.627.200	20.956.311.168.000	316.711.293.029.068

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			Total 7 = 4 + 5 + 6
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	
1	2	3	4	5	6	7
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	233.702.990.768	52.486.610.333	156.115.315.159	4.167.227.752	212.769.153.244
2	Kab. Aceh Barat	22.411.620.900	3.012.938.601	17.042.753.572	3.133.426.201	23.189.118.374
3	Kab. Aceh Besar	27.638.991.553	3.573.789.484	20.641.806.156	4.248.568.354	28.464.163.994
4	Kab. Aceh Selatan	24.453.772.013	2.128.056.288	18.923.151.212	2.965.522.649	24.016.730.149
5	Kab. Aceh Singkil	23.482.309.919	1.927.894.174	19.016.740.497	2.820.421.666	23.765.056.337
6	Kab. Aceh Tengah	26.576.699.849	2.259.169.004	20.994.957.332	2.983.745.241	26.237.871.577
7	Kab. Aceh Tenggara	22.430.254.005	2.033.415.883	17.372.356.711	2.960.219.636	22.365.992.230
8	Kab. Aceh Timur	84.876.114.174	1.680.167.704	79.688.513.989	5.857.446.021	87.206.127.714
9	Kab. Aceh Utara	172.345.668.829	5.785.394.236	160.132.991.786	3.575.813.597	169.494.199.619
10	Kab. Bireun	36.239.873.814	2.513.128.377	29.999.767.549	4.052.581.532	36.565.477.458
11	Kab. Pidie	25.200.875.121	3.048.005.597	18.911.843.433	3.305.291.607	25.265.140.637
12	Kab. Simeulue	20.682.902.589	1.665.651.202	15.884.981.596	2.823.756.697	20.374.389.495
13	Kota Banda Aceh	45.072.307.351	21.991.996.786	18.757.480.355	5.826.518.325	46.575.995.466
14	Kota Sabang	22.324.896.924	2.139.909.759	17.050.430.720	3.000.746.444	22.191.086.923
15	Kota Langsa	43.940.507.040	2.967.539.251	17.531.713.095	3.767.350.073	24.266.602.419
16	Kota Lhokseumawe	132.633.202.416	7.767.021.004	44.528.790.875	3.596.286.375	55.892.098.254
17	Kab. Nagan Raya	27.243.101.985	2.128.354.202	23.184.439.983	2.976.652.938	28.289.447.123
18	Kab. Aceh Jaya	23.188.520.958	1.637.848.726	18.055.921.204	2.801.588.443	22.495.358.373
19	Kab. Pidie Jaya	21.760.893.707	1.522.077.318	17.292.676.596	3.214.993.913	22.029.747.827
20	Kab. Aceh Barat Daya	23.497.217.284	1.573.432.713	18.516.852.277	2.879.560.595	22.969.845.585
21	Kab. Gayo Lues	29.483.972.718	1.463.417.276	25.185.198.454	2.815.206.937	29.463.822.667
22	Kab. Aceh Tamiang	74.307.008.445	2.710.678.499	65.225.432.574	4.726.166.215	72.662.277.288
23	Kab. Bener Meriah	24.290.508.719	1.717.761.962	19.397.954.378	2.826.431.449	23.942.147.789
24	Kota Subulussalam	17.404.378.545	1.462.539.589	13.295.730.934	2.875.280.533	17.633.551.056
25	Provinsi Sumatera Utara	396.994.778.231	130.331.749.356	218.377.340.111	51.689.603.910	400.398.693.377
26	Kab. Asahan	58.929.615.520	5.363.686.703	48.210.358.825	5.352.076.776	58.926.122.304
27	Kab. Dairi	27.547.181.659	3.030.228.059	21.634.818.826	3.051.297.552	27.716.344.437
28	Kab. Deli Serdang	127.081.165.523	9.321.296.602	89.338.758.496	38.763.894.435	137.423.749.533
29	Kab. Tanah Karo	33.874.081.118	3.512.153.573	25.385.292.322	4.614.228.071	33.511.673.966
30	Kab. Labuhan Batu	53.831.136.215	5.163.407.023	37.688.560.347	6.959.946.351	49.811.913.721
31	Kab. Langkat	135.564.836.128	6.279.109.381	124.490.327.765	4.158.049.476	134.927.486.622
32	Kab. Mandailing Natal	34.706.706.636	3.019.511.848	27.443.251.331	6.153.406.441	36.616.169.620
33	Kab. Nias	12.929.479.841	1.839.254.630	8.260.411.938	3.058.692.321	13.158.358.889
34	Kab. Simalungun	71.983.966.880	5.912.552.911	52.417.116.737	3.773.485.646	62.103.155.294
35	Kab. Tapanuli Selatan	31.783.190.713	3.904.370.809	27.084.992.291	3.133.073.571	34.122.436.671
36	Kab. Tapanuli Tengah	26.378.018.948	2.797.662.219	19.783.976.703	7.437.003.741	30.018.642.663
37	Kab. Tapanuli Utara	27.155.577.185	3.133.504.427	20.928.683.011	2.856.023.532	26.918.210.970
38	Kab. Toba Samosir	26.877.062.218	5.451.558.225	19.074.558.359	2.814.310.873	27.340.427.457
39	Kota Binjai	42.300.739.738	3.056.424.868	31.868.525.627	5.505.041.838	40.429.992.333
40	Kota Medan	367.794.148.622	77.566.199.069	164.338.784.961	131.583.982.750	373.488.966.780
41	Kota Pematang Siantar	27.722.742.281	2.727.758.845	13.085.894.836	7.383.095.512	27.726.749.193
42	Kota Sibolga	21.673.620.598	3.231.380.745	14.735.924.271	3.207.276.092	21.174.561.108
43	Kota Tanjung Balai	19.893.001.427	2.762.368.763	10.471.087.829	3.233.835.900	16.467.292.492
44	Kab. Batu Bara	30.880.957.843	5.075.890.010	21.284.384.121	3.264.522.652	29.624.796.783
45	Kab. Labuhan Batu Utara	39.923.876.051	2.561.807.228	40.607.527.609	4.270.657.933	47.439.992.230
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	53.673.075.646	4.046.508.783	29.957.487.340	3.548.078.581	37.552.074.704
47	Kab. Padang Lawas Utara	27.532.856.467	1.782.734.829	25.290.512.368	2.855.874.177	29.829.121.374
48	Kab. Padang Lawas	27.241.445.280	1.786.377.885	20.272.015.311	7.205.895.986	29.264.289.182
49	Kab. Nias Utara	12.295.519.283	1.818.335.797	7.502.347.082	2.756.430.382	12.077.113.261
50	Kab. Nias Barat	10.997.116.055	1.809.075.494	6.204.605.460	2.756.182.777	10.769.863.731
51	Kota Tebing Tinggi	27.087.237.699	3.031.062.728	25.701.751.108	4.452.729.563	33.185.543.399
52	Kota Padang Sidempuan	26.746.981.887	4.343.100.416	18.128.153.892	3.588.536.321	26.059.790.429
53	Kab. Pakpak Bharat	24.240.818.368	2.012.768.754	19.380.318.938	2.756.700.777	24.149.788.469
54	Kab. Nias Selatan	24.945.086.522	2.138.692.126	20.195.753.463	2.760.340.665	25.094.786.254
55	Kab. Humbang Hasundutan	27.003.632.347	2.755.192.858	20.841.191.005	2.775.966.642	26.372.350.505
56	Kab. Serdang Bedagai	51.065.932.311	4.731.611.566	42.189.384.865	5.493.998.726	52.414.995.157
57	Kab. Samosir	18.107.808.496	2.658.770.923	12.467.376.104	2.766.814.009	17.892.961.036
58	Kota Gunung Sitoli	12.118.575.252	2.793.137.567	6.512.111.511	2.969.516.895	12.274.765.963
59	Provinsi Sumatera Barat	109.679.800.206	38.671.660.943	60.768.733.389	5.226.638.544	104.667.032.876
60	Kab. Limapuluh Kota	26.828.125.569	1.930.668.842	21.301.470.621	3.000.875.149	26.233.014.612
61	Kab. Agam	25.075.225.553	2.796.234.180	17.509.089.243	3.370.446.649	23.675.770.072
62	Kab. Kepulauan Mentawai	23.482.811.140	1.110.338.682	19.383.106.013	2.758.589.977	23.252.034.672
63	Kab. Padang Pariaman	21.053.652.438	1.831.577.062	15.856.390.313	2.976.063.751	20.664.031.126
64	Kab. Pasaman	24.926.530.875	2.118.615.689	19.670.049.529	2.903.515.396	24.692.180.614
65	Kab. Pesisir Selatan	29.171.330.656	2.056.160.728	23.887.448.507	2.928.455.441	28.872.064.676
66	Kab. Sijunjung	22.300.974.502	1.961.444.263	16.616.513.740	2.853.649.519	21.431.607.522
67	Kab. Solok	26.542.740.599	2.040.419.936	20.244.978.175	3.386.434.321	25.671.832.432
68	Kab. Tanah Datar	22.494.216.816	2.277.086.480	16.360.054.290	3.108.815.776	21.745.956.546
69	Kota Bukit Tinggi	18.735.886.800	3.446.012.951	9.531.152.907	5.567.610.763	18.544.776.621
70	Kota Padang Panjang	18.965.476.934	1.580.796.379	14.394.139.887	2.982.935.176	18.957.871.442
71	Kota Padang	75.003.646.197	19.737.257.866	29.775.358.585	15.442.421.936	64.955.038.387
72	Kota Payakumbuh	18.166.075.276	2.168.338.998	12.072.017.707	3.883.521.225	18.123.877.930
73	Kota Sawahlunto	17.878.798.297	1.986.857.184	12.984.723.346	2.816.771.816	17.788.352.346
74	Kota Solok	18.579.999.150	2.172.750.409	13.301.728.026	2.948.102.809	18.422.581.244
75	Kota Pariaman	20.954.431.474	2.109.206.552	15.750.958.330	2.923.856.089	20.783.820.971
76	Kab. Pasaman Barat	33.205.640.532	2.394.003.709	21.954.392.058	3.041.316.397	27.359.712.164
77	Kab. Dharmasraya	25.178.000.814	2.200.591.174	20.004.885.156	3.567.161.756	25.772.638.086
78	Kab. Solok Selatan	25.461.769.075	1.878.562.125	21.439.587.838	2.791.098.214	26.109.248.177
79	Provinsi Riau	441.440.858.917	125.174.867.445	301.032.629.088	15.584.325.185	441.791.821.718
80	Kab. Bengkalis	246.863.150.839	35.524.406.208	211.592.001.205	4.083.731.430	251.200.138.843
81	Kab. Indragiri Hilir	66.554.498.994	8.186.179.979	52.370.337.200	3.328.266.477	63.884.783.656
82	Kab. Indragiri Hulu	87.575.341.460	11.000.499.786	71.748.145.164	3.118.122.980	85.866.767.910
83	Kab. Kampar	150.988.788.553	9.602.118.193	136.560.402.479	22.240.018.462	168.402.539.134
84	Kab. Kuantan Singingi	44.240.991.022	7.350.890.916	32.798.807.319	3.251.220.672	43.400.918.907
85	Kab. Pelalawan	117.234.157.794	9.288.224.010	103.990.453.707	3.401.315.119	116.679.992.836
86	Kab. Rokan Hilir	186.910.453.975	9.212.855.977	174.990.594.328	3.503.271.312	186.806.721.617
87	Kab. Rokan Hulu	124.133.900.803	7.343.960.057	109.597.757.060	11.285.535.897	128.227.253.014
88	Kab. Siak	208.642.706.348	17.863.427.542	182.049.332.278	4.424.821.452	204.337.581.272

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			Total 7 = 4 + 5 + 6
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	
1	2	3	4	5	6	
89	Kota Dumai	73.450.014.720	15.045.226.501	42.496.072.308	5.003.277.216	62.544.576.025
90	Kota Pekanbaru	145.744.326.918	49.147.771.873	62.492.316.065	28.830.567.213	140.470.655.151
91	Kab. Kepulauan Meranti	98.878.594.135	8.196.740.103	82.936.623.598	2.927.081.850	94.060.445.551
92	Provinsi Kepulauan Riau	230.863.880.409	75.528.375.238	132.352.758.919	26.494.204.238	234.375.338.395
93	Kab. Bintan	74.970.836.411	8.646.663.372	65.757.564.695	10.818.986.607	85.223.214.674
94	Kab. Natuna	206.437.498.401	5.915.345.173	197.543.933.191	2.827.018.777	206.286.297.141
95	Kab. Karimun	61.523.286.521	9.362.896.455	51.014.730.095	6.425.641.821	66.803.268.371
96	Kota Batam	256.456.909.139	66.194.883.139	97.426.728.508	86.547.234.104	250.168.845.751
97	Kab. Kepulauan Anambas	74.170.257.077	7.959.307.380	63.317.599.308	2.783.830.617	74.060.737.285
98	Kota Tanjung Pinang	63.404.556.556	9.761.685.472	42.124.153.266	12.948.393.436	64.834.232.174
99	Kab. Lingga	52.313.274.046	5.434.221.426	44.019.502.474	2.910.670.443	52.364.394.343
100	Provinsi Jambi	160.538.187.496	20.700.353.349	131.492.688.099	4.826.265.417	157.019.306.865
101	Kab. Batanghari	100.780.359.593	2.251.806.381	87.035.945.576	3.689.570.799	92.977.322.756
102	Kab. Bungo	34.694.904.756	2.483.787.645	25.268.237.570	5.401.133.014	33.153.158.229
103	Kab. Kerinci	23.108.354.004	1.761.941.234	18.036.850.044	2.853.039.982	22.651.831.260
104	Kab. Merangin	39.672.602.046	2.438.660.136	33.652.875.269	2.924.801.673	39.016.137.078
105	Kab. Muaro Jambi	90.312.427.413	2.007.708.994	74.898.630.765	4.919.838.858	81.826.278.617
106	Kab. Sarolangun	61.754.085.944	1.655.140.350	59.899.960.219	5.324.584.988	66.879.685.557
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	84.481.211.877	2.320.039.669	79.150.546.002	3.050.499.509	84.521.085.180
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	101.891.012.112	2.562.773.572	96.901.958.709	3.216.838.570	102.681.570.851
109	Kab. Tebo	42.183.698.117	1.342.330.048	37.230.441.300	3.759.907.132	42.332.678.480
110	Kota Jambi	67.232.914.308	10.762.657.020	43.930.934.299	11.645.198.235	66.338.769.554
111	Kota Sungai Penuh	13.102.570.159	1.152.206.045	8.551.587.985	2.800.846.665	12.504.440.695
112	Provinsi Sumatera Selatan	376.682.283.419	85.275.995.480	284.035.117.988	60.917.545.891	430.228.659.359
113	Kab. Lahat	88.534.432.308	4.944.265.093	86.623.229.572	3.497.106.621	95.064.601.286
114	Kab. Musi Banyuasin	289.278.567.866	8.060.119.553	271.918.704.133	11.643.048.777	291.621.872.463
115	Kab. Musi Rawas	164.741.779.398	3.426.355.992	156.763.548.898	4.627.145.170	164.817.050.060
116	Kab. Muara Enim	189.117.568.018	14.657.323.106	194.122.406.464	6.420.239.974	215.199.969.544
117	Kab. Ogan Komering Ilir	56.090.270.575	5.025.701.898	52.674.149.108	6.512.500.658	64.212.351.664
118	Kab. Ogan Komering Ulu	83.512.275.012	5.386.232.429	74.393.540.656	3.465.973.479	83.245.753.059
119	Kota Palembang	158.995.076.973	50.912.972.947	63.844.509.443	213.888.888.148	328.646.170.538
120	Kota Pagar Alam	34.326.587.531	3.152.618.337	26.013.604.273	2.957.102.514	32.123.325.124
121	Kota Lubuk Linggau	33.334.165.899	5.014.574.768	24.548.155.339	4.400.354.582	33.963.084.689
122	Kota Prabumulih	57.868.612.880	7.430.537.099	47.519.314.511	3.679.197.203	58.629.048.813
123	Kab. Empat Lawang	30.356.305.194	3.013.546.365	24.158.473.469	2.895.072.756	30.067.092.590
124	Kab. Banyuasin	117.645.491.054	5.123.215.164	104.479.814.637	11.512.164.219	121.115.194.020
125	Kab. Ogan Ilir	68.773.724.610	3.974.604.238	59.673.919.681	3.791.320.705	67.439.844.624
126	Kab. OKU Timur	35.214.641.467	4.095.726.110	28.336.678.895	2.843.238.054	35.275.833.059
127	Kab. OKU Selatan	31.861.369.665	3.178.503.106	25.799.727.930	2.857.545.918	31.835.776.954
128	Provinsi Bangka Belitung	50.382.721.087	14.427.279.671	35.437.256.118	2.144.050.449	52.008.585.838
129	Kab. Bangka	35.364.886.089	2.960.835.094	30.491.486.270	3.684.695.559	37.137.016.923
130	Kab. Belitung	32.520.285.262	2.853.816.345	26.344.564.617	4.407.223.641	33.605.604.603
131	Kota Pangkal Pinang	38.322.817.925	7.535.023.206	26.164.779.609	7.524.264.579	41.224.067.394
132	Kab. Bangka Selatan	27.950.989.951	1.693.565.847	23.464.070.767	2.830.248.942	27.987.885.556
133	Kab. Bangka Tengah	28.235.425.850	2.218.200.086	22.669.532.141	3.378.515.658	28.266.247.885
134	Kab. Bangka Barat	31.045.786.210	3.697.663.820	25.498.305.316	2.949.110.827	32.145.079.963
135	Kab. Belitung Timur	29.797.211.991	2.308.955.561	25.638.656.924	3.087.099.843	31.034.712.328
136	Provinsi Bengkulu	50.456.858.670	11.816.182.843	37.358.628.433	1.952.165.443	51.126.976.719
137	Kab. Bengkulu Selatan	19.205.564.196	1.347.175.630	14.755.184.544	2.999.377.023	19.101.737.197
138	Kab. Bengkulu Utara	24.296.622.256	1.726.838.836	18.566.866.386	3.913.419.711	24.207.124.933
139	Kab. Rejang Lebong	23.087.574.636	1.693.977.427	18.058.623.966	3.288.304.595	23.040.905.988
140	Kota Bengkulu	28.628.189.318	6.469.844.202	16.128.489.129	6.818.395.244	29.416.528.575
141	Kab. Kaur	25.551.906.255	945.153.371	21.799.749.615	2.776.346.234	25.521.249.220
142	Kab. Seluma	23.149.334.102	1.078.931.113	19.079.264.174	3.018.142.620	23.176.337.907
143	Kab. Mukomuko	27.372.087.082	1.378.709.055	23.784.881.958	3.752.933.891	28.916.524.904
144	Kab. Lebong	33.989.143.902	973.105.674	29.825.015.912	2.835.971.499	33.634.093.085
145	Kab. Bengkulu Tengah	15.113.959.067	949.273.248	11.949.945.823	3.000.904.144	15.900.123.315
146	Kab. Kepahiang	24.208.355.937	1.161.465.700	20.162.897.677	2.954.807.957	24.279.171.334
147	Provinsi Lampung	125.087.101.225	33.727.117.981	82.125.945.428	13.684.127.438	129.537.190.847
148	Kab. Lampung Barat	32.460.439.570	2.006.932.059	27.886.294.976	2.775.777.071	32.669.004.106
149	Kab. Lampung Selatan	39.485.017.887	3.904.637.381	26.791.722.159	4.663.149.340	35.359.508.880
150	Kab. Lampung Tengah	60.401.119.293	4.841.687.484	44.144.145.708	33.653.024.213	82.638.857.405
151	Kab. Lampung Utara	38.670.765.998	3.187.394.618	31.031.140.296	3.174.900.982	37.393.435.896
152	Kab. Lampung Timur	84.342.535.105	3.482.667.815	73.968.191.043	3.017.224.800	80.469.083.658
153	Kab. Tanggamus	27.436.859.769	2.399.839.444	21.355.647.463	2.946.023.563	26.701.510.470
154	Kab. Tulang Bawang	26.787.491.424	4.459.822.403	26.086.170.607	3.387.676.256	33.933.669.266
155	Kab. Way Kanan	37.832.718.095	1.934.174.343	31.719.217.242	2.851.541.672	36.504.933.257
156	Kab. Pesawaran	21.732.520.184	1.810.485.987	16.523.969.721	3.147.802.306	21.482.058.014
157	Kab. Pringsewu	17.528.436.182	1.699.296.292	11.871.513.591	3.030.558.685	16.601.368.568
158	Kab. Mesuji	19.781.764.929	1.642.625.817	11.262.414.244	2.754.994.105	15.660.034.166
159	Kab. Tulang Bawang Barat	19.068.292.330	1.454.725.300	10.557.948.100	2.754.994.105	14.767.667.505
160	Kota Bandar Lampung	74.211.551.668	15.691.835.237	47.629.718.633	21.339.004.174	84.660.558.044
161	Kota Metro	26.822.810.722	2.433.089.753	17.820.904.148	3.791.008.835	24.045.002.736
162	Provinsi DKI Jakarta	9.568.174.844.175	4.911.295.496.446	2.455.332.958.653	2.031.990.805.392	9.398.619.060.491
163	Provinsi Jawa Barat	1.106.727.240.749	415.648.319.330	439.759.996.135	234.691.504.044	1.090.099.819.509
164	Kab. Bandung	178.886.836.618	17.704.889.427	92.688.083.157	40.196.735.220	150.591.707.804
165	Kab. Bekasi	471.737.587.022	108.977.995.483	207.474.448.545	164.381.492.912	480.833.936.940
166	Kab. Bogor	300.914.954.115	35.758.764.560	136.260.165.019	122.727.661.312	294.746.590.891
167	Kab. Ciamis	56.495.224.273	10.135.806.572	41.859.738.424	4.432.580.348	56.428.125.344
168	Kab. Cianjur	95.949.955.173	11.454.813.219	59.215.474.810	18.428.331.117	89.098.619.146
169	Kab. Cirebon	76.723.731.816	15.277.418.856	51.781.868.189	13.638.703.264	80.697.990.309
170	Kab. Garut	84.504.899.249	12.906.416.434	56.537.620.178	9.026.432.764	78.470.469.376
171	Kab. Indramayu	174.112.075.126	17.973.465.527	148.696.407.503	7.331.878.275	174.001.751.305
172	Kab. Karawang	270.850.299.621	41.816.855.766	182.286.458.328	51.253.082.000	275.356.396.094
173	Kab. Kuningan	50.370.617.367	10.168.899.271	35.048.836.685	4.998.417.348	50.216.153.304
174	Kab. Majalengka	80.245.569.370	9.533.187.918	66.101.392.195	5.396.119.156	81.030.689.269
175	Kab. Purwakarta	82.120.057.506	18.052.597.723	47.087.465.100	30.172.136.012	95.312.198.835
176	Kab. Subang	166.683.064.848	12.664.753.253	148.698.061.381	6.658.875.297	168.021.689.931

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			Total 7 = 4 + 5 + 6
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	
1	2	3	4	5	6	
177	Kab. Sukabumi	118.016.818.921	13.940.140.144	72.907.414.007	13.898.034.065	100.745.588.216
178	Kab. Sumedang	55.560.214.166	10.839.941.889	34.452.693.142	6.613.877.148	51.906.512.179
179	Kab. Tasikmalaya	60.791.792.703	10.911.417.001	45.156.520.813	4.232.484.501	60.300.422.315
180	Kab. Bandung Barat	108.055.631.303	14.102.747.428	42.043.527.707	30.666.893.095	86.813.168.230
181	Kota Bandung	502.994.486.668	121.341.681.553	187.150.803.167	171.059.508.608	479.551.994.328
182	Kota Bekasi	241.520.511.075	20.955.661.536	109.238.379.369	111.678.434.246	241.872.475.151
183	Kota Bogor	123.213.785.833	22.446.730.900	57.281.728.914	49.979.281.030	129.707.740.844
184	Kota Cirebon	62.500.549.874	15.121.942.328	25.879.340.422	13.700.122.934	54.701.405.684
185	Kota Depok	185.519.997.307	25.065.099.362	72.991.514.217	82.582.944.461	190.639.558.040
186	Kota Sukabumi	33.188.937.381	10.846.710.201	14.384.845.638	7.368.322.931	32.599.878.770
187	Kota Cimahi	69.408.679.253	11.579.547.089	27.989.161.204	17.021.698.713	56.590.407.006
188	Kota Tasikmalaya	44.481.380.334	13.275.826.581	23.101.132.698	9.505.828.152	45.882.787.431
189	Kota Banjar	29.670.693.042	7.825.805.022	17.567.241.111	3.443.983.363	28.837.029.496
190	Provinsi Banten	402.816.092.614	185.585.322.349	121.535.991.289	104.583.770.904	411.705.084.542
191	Kab. Lebak	53.776.557.877	12.768.485.807	36.408.141.464	4.319.013.465	53.496.640.736
192	Kab. Pandeglang	47.280.715.522	13.975.408.280	28.062.619.332	4.095.857.007	46.133.884.619
193	Kab. Serang	91.020.060.885	23.326.595.065	44.364.682.470	20.188.908.539	87.880.186.074
194	Kab. Tangerang	330.771.006.740	68.315.370.452	141.523.168.024	105.285.557.653	315.124.096.129
195	Kota Cilegon	109.312.111.569	37.713.626.230	58.390.176.815	48.925.465.858	145.029.268.903
196	Kota Tangerang	347.608.918.848	72.186.352.301	161.887.659.934	88.276.066.090	322.350.078.325
197	Kota Serang	40.600.572.134	14.856.444.419	17.197.215.838	8.925.299.140	40.978.959.397
198	Kota Tangerang Selatan	245.124.267.456	36.256.957.242	92.321.018.006	160.358.968.706	288.936.943.954
199	Provinsi Jawa Tengah	564.417.575.207	205.629.211.144	253.529.666.256	64.994.893.235	524.153.770.635
200	Kab. Banjarnegara	43.838.782.485	6.242.701.327	33.643.156.461	4.113.960.678	43.999.818.466
201	Kab. Banyumas	71.726.820.780	12.466.776.809	52.174.882.104	12.725.976.957	77.367.635.870
202	Kab. Batang	38.454.926.692	4.916.637.626	31.916.647.915	4.913.613.302	41.746.898.843
203	Kab. Blora	75.976.882.231	5.990.274.867	66.275.966.344	3.988.866.961	76.255.108.172
204	Kab. Boyolali	42.982.953.477	6.297.015.112	29.867.440.144	4.925.947.058	41.090.402.314
205	Kab. Brebes	58.591.660.516	5.458.504.310	50.158.108.731	5.296.675.195	60.913.288.236
206	Kab. Cilacap	245.834.672.765	18.887.504.808	66.326.692.330	7.749.318.230	92.963.516.368
207	Kab. Demak	44.514.167.008	5.300.666.029	33.678.951.972	5.798.256.303	44.777.874.304
208	Kab. Grobogan	58.971.438.343	5.147.848.281	49.878.263.092	4.245.916.280	59.272.027.653
209	Kab. Jepara	54.965.223.558	8.373.278.033	39.987.388.839	22.476.260.276	70.836.927.148
210	Kab. Karanganyar	48.834.414.533	6.637.598.388	28.525.000.309	9.971.253.159	45.133.851.856
211	Kab. Kebumen	46.369.285.673	5.952.302.584	35.837.271.781	3.954.684.790	45.744.259.155
212	Kab. Kendal	47.478.447.161	5.720.627.519	34.570.748.466	5.988.522.425	46.279.898.410
213	Kab. Klaten	47.362.803.074	6.628.919.249	27.022.015.715	7.858.899.120	41.509.834.084
214	Kab. Kudus	76.979.698.299	22.931.077.074	43.787.512.111	9.413.006.042	76.132.389.227
215	Kab. Magelang	47.027.232.740	5.956.926.311	33.849.438.817	5.935.511.669	45.741.876.797
216	Kab. Pati	52.883.714.390	6.291.968.287	41.242.011.294	6.923.351.949	54.457.331.540
217	Kab. Pekalongan	36.294.171.369	4.640.493.125	28.127.233.142	4.951.342.368	37.719.068.635
218	Kab. Pemalang	48.523.242.724	5.328.898.216	35.707.995.118	5.152.414.402	46.189.307.736
219	Kab. Purbalingga	39.734.325.623	6.019.313.198	30.433.957.406	4.820.582.463	41.273.853.067
220	Kab. Purworejo	39.764.614.578	4.982.908.607	30.860.250.372	4.391.891.665	40.235.050.644
221	Kab. Rembang	40.733.459.373	4.917.944.700	32.752.027.929	3.603.521.659	41.273.494.288
222	Kab. Semarang	48.601.712.061	7.558.052.330	31.801.770.435	10.936.211.716	50.296.034.481
223	Kab. Sragen	39.590.611.822	5.405.199.423	28.184.393.148	5.102.145.586	38.691.738.157
224	Kab. Sukoharjo	54.545.208.853	8.303.548.392	29.779.693.973	15.470.175.404	53.553.417.769
225	Kab. Tegal	49.012.355.039	5.127.487.902	33.891.590.589	7.027.259.243	46.046.337.734
226	Kab. Temanggung	36.649.564.792	5.173.023.359	27.303.043.469	4.251.048.680	36.727.116.508
227	Kab. Wonogiri	40.215.424.649	6.631.101.024	32.247.698.539	3.704.939.582	41.583.739.145
228	Kab. Wonosobo	39.398.231.672	4.778.224.185	29.573.480.572	3.607.782.054	37.959.486.811
229	Kota Magelang	20.774.129.612	5.527.641.617	10.010.652.327	4.736.278.488	20.274.572.432
230	Kota Pekalongan	27.989.821.873	5.771.227.326	14.580.258.040	6.101.683.037	26.453.168.403
231	Kota Salatiga	24.749.278.351	4.828.818.372	11.736.776.864	6.572.357.826	23.137.953.062
232	Kota Semarang	309.358.948.785	64.837.723.452	123.653.447.826	102.153.033.923	290.644.205.201
233	Kota Surakarta	79.188.024.442	14.624.722.933	33.599.522.358	30.715.772.392	78.940.017.683
234	Kota Tegal	28.630.813.459	5.514.259.800	14.361.807.199	6.825.110.207	26.701.177.206
235	Provinsi DI Yogyakarta	82.725.273.091	35.882.076.933	30.654.266.597	15.774.387.210	82.310.730.740
236	Kab. Bantul	48.982.782.774	7.409.643.445	30.819.730.289	12.969.390.304	51.198.764.038
237	Kab. Gunung Kidul	32.576.828.619	5.066.978.050	26.067.523.581	3.610.471.508	34.744.973.139
238	Kab. Kulon Progo	28.318.602.859	5.511.125.647	19.862.109.701	4.010.080.246	29.383.315.594
239	Kab. Sleman	107.804.199.186	17.094.782.363	52.724.724.736	33.961.163.208	103.780.670.307
240	Kota Yogyakarta	77.105.800.112	18.341.797.132	32.796.978.958	22.321.414.068	73.460.190.158
241	Provinsi Jawa Timur	877.004.714.310	296.097.909.479	437.740.825.213	122.412.088.854	856.250.823.546
242	Kab. Bangkalan	75.596.312.492	5.226.218.892	66.756.721.121	3.747.333.866	75.730.273.879
243	Kab. Banyuwangi	69.636.577.743	8.837.483.607	54.609.643.983	8.067.953.550	69.515.081.140
244	Kab. Blitar	48.049.467.058	5.515.051.127	37.261.918.376	5.616.422.256	48.393.391.759
245	Kab. Bojonegoro	102.804.025.221	6.553.804.156	92.322.313.780	11.189.029.133	110.065.147.069
246	Kab. Bondowoso	33.031.540.956	4.943.467.821	24.279.173.924	3.630.064.778	32.852.706.523
247	Kab. Gresik	166.905.014.340	31.655.468.108	91.572.980.950	30.708.534.962	153.936.984.020
248	Kab. Jember	80.633.377.548	11.173.618.679	50.138.401.359	9.564.388.279	70.876.408.317
249	Kab. Jombang	58.075.807.209	6.617.078.008	43.895.303.916	6.896.238.918	57.408.820.842
250	Kab. Kediri	68.223.473.320	6.884.927.648	57.772.442.143	8.823.766.567	73.481.166.358
251	Kab. Lamongan	69.451.960.459	6.235.510.075	58.449.258.174	4.746.120.514	69.430.888.763
252	Kab. Lumajang	40.784.022.373	6.119.442.324	28.654.221.816	4.369.281.378	39.143.385.518
253	Kab. Madiun	39.402.250.766	5.190.177.040	30.602.905.137	4.200.988.731	39.994.070.908
254	Kab. Magetan	36.076.419.675	5.578.597.993	26.455.953.289	4.246.201.153	36.280.752.435
255	Kab. Malang	89.340.556.476	10.461.406.835	70.043.904.592	32.327.534.625	112.832.846.052
256	Kab. Mojokerto	77.111.601.948	8.841.453.506	57.361.265.687	9.170.495.706	75.373.214.899
257	Kab. Nganjuk	49.347.335.782	5.821.442.321	39.765.708.900	5.025.447.301	50.612.598.522
258	Kab. Ngawi	43.515.596.860	5.344.615.470	34.21.239.912	3.621.239.912	43.265.846.612
259	Kab. Pacitan	33.343.486.868	5.217.886.679	25.628.971.313	3.342.987.453	34.189.845.445
260	Kab. Pamekasan	51.792.506.584	5.329.608.972	42.690.164.291	3.390.548.162	51.410.319.425
261	Kab. Pasuruan	84.940.471.979	12.524.867.434	50.992.685.370	13.899.502.425	77.417.055.229
262	Kab. Ponorogo	49.522.775.699	5.733.582.231	40.438.602.707	6.289.202.210	52.461.387.148
263	Kab. Probolinggo	53.967.573.287	8.247.990.771	38.193.414.189	4.173.830.419	50.615.235.373
264	Kab. Sampang	61.173.416.948	5.113.685.582	53.233.952.971	2.965.517.827	61.313.156.380

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			Total 7 = 4 + 5 + 6
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	
1	2	3	4	5	6	
265	Kab. Sidoarjo	231.770.643.514	29.289.572.773	140.126.982.043	59.648.753.309	229.065.308.125
266	Kab. Situbondo	36.965.745.756	4.973.537.548	26.329.234.725	4.220.167.186	35.522.939.459
267	Kab. Sumenep	138.853.138.436	6.506.794.366	127.608.558.821	3.284.109.567	137.377.462.754
268	Kab. Trenggalek	39.362.638.814	5.628.215.695	30.667.408.759	3.827.295.385	40.122.919.839
269	Kab. Tuban	92.042.043.279	8.957.504.467	79.311.624.115	6.683.780.816	94.952.909.398
270	Kab. Tulungagung	52.262.217.831	6.550.076.867	39.908.748.611	9.111.791.350	55.570.616.828
271	Kota Blitar	25.129.958.666	5.164.334.333	15.864.540.746	5.163.366.140	26.192.241.219
272	Kota Kediri	40.834.117.279	13.084.660.234	18.685.132.953	10.478.144.354	42.247.937.541
273	Kota Madiun	32.718.765.701	8.459.545.322	17.145.176.697	6.779.678.148	32.384.400.167
274	Kota Malang	91.841.876.689	16.759.841.327	43.040.321.580	36.779.514.011	96.579.676.918
275	Kota Mojokerto	26.726.986.563	5.246.542.427	17.140.108.584	5.059.943.089	27.446.594.100
276	Kota Pasuruan	24.893.960.211	6.794.557.911	12.632.068.955	4.630.834.312	24.057.461.178
277	Kota Probolinggo	32.524.458.398	6.050.166.868	21.137.778.290	5.181.352.434	32.369.297.592
278	Kota Surabaya	815.805.089.116	133.826.567.326	341.758.567.832	235.435.805.390	711.021.940.548
279	Kota Batu	29.525.985.329	4.460.678.081	19.519.531.655	6.559.304.861	30.539.514.597
280	Provinsi Kalimantan Barat	121.903.172.217	33.457.494.863	81.944.117.743	14.445.862.164	129.847.474.770
281	Kab. Bengkayang	28.081.385.841	2.145.110.868	22.778.801.657	3.012.370.588	27.936.283.113
282	Kab. Landak	37.332.851.208	1.862.527.714	25.506.816.970	3.825.171.224	31.194.515.908
283	Kab. Kapuas Hulu	50.548.571.767	1.748.386.004	46.860.565.345	2.854.510.824	51.463.462.173
284	Kab. Ketapang	48.465.423.580	3.573.009.058	45.053.978.748	4.240.551.007	52.867.538.813
285	Kab. Pontianak	21.931.147.156	2.408.890.225	12.864.990.461	4.673.468.389	19.947.349.075
286	Kab. Sambas	37.546.147.499	2.738.547.927	30.944.596.037	6.953.236.505	40.636.380.469
287	Kab. Sanggau	44.623.518.578	3.410.900.472	36.937.767.081	9.999.064.181	50.347.731.734
288	Kab. Sintang	44.504.888.853	2.078.644.581	38.771.123.334	6.002.204.282	46.851.972.197
289	Kota Pontianak	64.358.471.583	17.723.048.933	27.101.049.733	20.666.031.080	65.490.129.746
290	Kota Singkawang	23.437.021.943	2.974.605.385	14.812.628.433	6.114.774.838	23.902.008.656
291	Kab. Kayong Utara	25.475.383.220	1.383.059.704	21.260.042.826	2.784.442.591	25.427.545.121
292	Kab. Kubu Raya	29.660.611.767	3.380.127.846	23.102.887.790	8.244.898.945	34.727.914.581
293	Kab. Sekadai	30.925.058.980	2.096.076.020	32.108.946.676	14.133.229.802	48.338.252.498
294	Kab. Melawi	35.057.413.571	2.948.061.147	29.423.950.308	2.680.890.990	35.232.702.445
295	Provinsi Kalimantan Tengah	130.073.476.292	23.415.426.871	103.509.728.841	2.496.304.475	129.421.460.187
296	Kab. Barito Selatan	53.099.641.158	1.508.110.221	48.179.208.443	2.852.987.813	52.540.306.477
297	Kab. Barito Utara	51.226.987.763	1.877.546.869	43.709.833.883	3.047.636.578	48.635.017.330
298	Kab. Kapuas	40.946.542.368	1.804.941.423	36.718.181.733	3.481.815.391	42.004.938.687
299	Kab. Kotawaringin Barat	38.089.211.702	3.896.286.957	33.535.602.141	3.973.080.974	41.404.970.072
300	Kab. Kotawaringin Timur	50.790.781.806	4.406.013.638	42.089.404.038	5.170.394.198	51.665.811.874
301	Kota Palangkaraya	31.110.839.574	8.439.982.309	16.367.259.982	7.062.296.210	31.869.538.501
302	Kab. Barito Timur	40.053.685.089	2.158.017.394	35.006.035.100	2.832.545.734	39.996.598.228
303	Kab. Murung Raya	51.882.268.925	2.461.491.858	43.832.664.940	2.792.013.497	49.086.170.295
304	Kab. Pulang Pisau	29.958.833.029	1.500.770.321	25.748.199.451	2.810.846.940	30.059.816.712
305	Kab. Gunung Mas	33.451.129.185	1.453.221.608	27.896.353.470	2.879.628.550	32.229.204.628
306	Kab. Lamandau	35.168.238.027	1.339.435.936	33.440.714.845	2.782.092.889	37.562.243.670
307	Kab. Sukamara	32.799.034.249	1.109.726.337	29.536.770.932	2.821.100.473	33.467.597.742
308	Kab. Katingan	37.714.677.263	1.191.928.393	29.745.126.416	2.802.206.849	33.739.259.658
309	Kab. Seruyan	51.669.010.377	2.018.011.409	45.713.248.342	3.246.488.263	50.977.748.014
310	Provinsi Kalimantan Selatan	137.284.014.488	48.426.365.559	84.767.717.638	9.782.810.264	142.976.893.461
311	Kab. Banjar	41.324.768.412	4.175.908.047	31.273.291.795	6.125.276.548	41.574.476.390
312	Kab. Barito Kuala	26.062.981.483	2.851.198.307	19.698.420.780	3.492.311.059	26.041.930.146
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	25.792.813.435	2.702.182.339	19.904.282.415	3.072.151.153	25.678.615.907
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	25.588.330.453	3.076.532.748	18.817.276.970	3.295.731.553	25.189.541.271
315	Kab. Hulu Sungai Utara	36.278.923.331	2.566.357.939	30.631.394.607	3.123.662.861	36.321.615.407
316	Kab. Kotabaru	48.142.227.884	8.617.321.677	41.645.512.729	3.168.505.990	53.431.340.396
317	Kab. Tabalong	84.681.610.480	5.019.521.867	75.804.620.272	13.572.846.019	94.396.988.158
318	Kab. Tanah Laut	34.120.349.143	4.174.047.922	26.938.557.583	3.493.973.993	34.606.579.498
319	Kab. Tapin	29.451.327.351	2.737.665.675	25.182.698.889	3.094.512.408	31.014.876.972
320	Kota Banjarbaru	29.190.549.031	5.744.769.438	17.675.872.582	8.202.163.089	31.622.805.109
321	Kota Banjarmasin	60.667.802.906	19.789.761.745	22.455.305.511	16.121.002.237	58.366.069.493
322	Kab. Balangan	44.572.686.641	2.933.974.011	39.452.256.009	4.023.092.713	46.409.322.733
323	Kab. Tanah Bumbu	34.588.139.862	6.325.359.147	26.580.558.113	4.160.735.077	37.066.852.337
324	Provinsi Kalimantan Timur	645.404.024.094	189.543.512.697	431.689.880.288	32.777.282.350	654.010.675.335
325	Kab. Berau	64.158.191.620	9.585.337.605	45.989.956.502	5.159.279.958	61.114.574.065
326	Kab. Bulungan	133.652.886.547	8.425.334.919	111.982.927.645	6.242.899.140	126.651.161.704
327	Kab. Kutai Kartanegara	598.674.701.074	20.190.282.868	568.182.171.670	12.477.422.930	600.849.877.468
328	Kab. Kutai Barat	84.148.515.245	11.518.627.685	60.786.201.094	3.098.376.292	75.403.205.071
329	Kab. Kutai Timur	192.119.649.535	26.459.507.921	163.355.130.366	40.853.684.761	230.668.323.048
330	Kab. Malinau	67.016.487.297	7.328.331.471	54.383.799.036	2.781.368.702	64.493.499.209
331	Kab. Nunukan	138.359.253.877	7.675.709.819	126.548.814.881	3.143.786.104	137.368.310.804
332	Kab. Pasir	69.201.974.322	11.389.524.465	47.868.230.428	6.952.966.055	66.210.720.948
333	Kota Balikpapan	219.091.651.808	84.573.293.476	96.528.241.572	34.834.992.943	215.936.527.991
334	Kota Bontang	159.895.622.126	42.538.741.722	114.033.281.255	7.846.700.440	164.418.723.417
335	Kab. Tana Tidung	56.332.198.335	6.232.021.950	51.468.878.896	2.754.994.105	60.465.894.951
336	Kota Samarinda	165.401.661.635	29.254.309.871	116.057.469.218	31.062.359.635	176.374.138.724
337	Kota Tarakan	150.950.613.923	11.478.893.287	132.206.486.884	5.284.334.525	148.969.714.476
338	Kab. Penajam Paser Utara	133.633.336.989	7.345.121.116	123.058.623.812	4.978.311.042	135.382.055.970
339	Provinsi Sulawesi Utara	74.191.658.974	26.317.261.863	38.757.094.447	5.947.380.833	71.021.737.143
340	Kab. Bolaang Mongondow	20.597.937.194	1.116.615.176	17.232.006.159	2.939.540.733	21.288.162.068
341	Kab. Minahasa	30.916.969.351	1.905.115.325	24.622.033.704	4.249.964.387	30.777.113.416
342	Kab. Sangihe	17.138.814.765	2.101.047.697	11.855.913.992	2.901.488.615	16.858.450.304
343	Kota Bitung	27.779.397.337	2.423.317.235	12.785.608.833	5.087.106.131	20.296.032.199
344	Kota Manado	54.768.454.721	17.311.675.802	25.396.614.978	19.626.046.790	62.334.337.570
345	Kab. Kepulauan Talaud	19.315.973.648	1.329.304.439	14.865.905.069	2.756.373.401	18.951.582.909
346	Kab. Minahasa Selatan	20.400.436.873	1.158.382.970	15.275.033.397	2.863.706.302	19.297.122.669
347	Kab. Minahasa Tenggara	20.178.232.975	1.063.389.907	16.155.108.729	2.782.982.482	20.001.481.118
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	17.962.601.381	1.506.022.629	13.607.282.382	2.760.934.553	17.874.239.564
349	Kota Tomatubagu	17.753.726.484	2.146.951.211	12.073.126.983	3.188.471.666	17.408.549.860
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	19.313.620.951	946.760.238	13.817.131.064	2.818.315.332	17.582.206.634
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	13.379.485.925	940.608.888	8.960.274.642	2.757.729.384	12.658.612.914
352	Kota Tomohon	26.241.233.537	1.982.912.961	21.261.311.139	3.980.782.576	27.225.006.676

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			Total 7 = 4 + 5 + 6
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	
1	2	3	4	5	6	
353	Kab. Minahasa Utara	25.140.060.872	2.337.360.814	10.197.036.387	3.703.775.762	16.238.172.963
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	20.203.895.225	1.061.511.514	16.122.693.502	2.758.486.847	19.942.691.863
355	Provinsi Gorontalo	26.115.968.162	8.622.388.373	16.608.392.515	1.295.592.447	26.526.373.335
356	Kab. Boalemo	22.967.367.692	1.181.110.855	19.649.983.926	2.893.414.205	23.724.508.986
357	Kab. Gorontalo	21.676.281.167	2.720.267.091	15.841.955.774	3.892.783.503	22.455.006.368
358	Kota Gorontalo	23.056.122.633	5.160.657.798	13.251.670.782	6.028.694.671	24.441.023.251
359	Kab. Pohuwato	24.313.251.536	1.414.975.452	19.732.657.866	2.924.308.716	24.071.942.034
360	Kab. Gorontalo Utara	20.605.211.672	1.036.540.257	16.244.669.944	2.826.185.085	20.107.395.286
361	Kab. Bone Bolango	25.871.758.362	1.420.031.095	21.641.232.856	3.146.952.223	26.208.216.174
362	Provinsi Sulawesi Tengah	70.303.991.987	15.149.334.467	52.248.832.034	1.950.415.993	69.348.582.494
363	Kab. Banggai	34.102.839.785	2.372.826.386	26.949.735.222	4.873.110.796	34.195.672.404
364	Kab. Banggai Kepulauan	26.753.996.586	1.166.091.017	22.732.044.773	2.790.955.795	26.689.091.585
365	Kab. Buol	25.918.913.800	1.235.125.835	21.723.245.169	2.861.256.877	25.839.627.881
366	Kab. Toli-Toli	23.322.325.972	1.544.464.785	17.561.944.038	3.301.080.969	22.407.489.792
367	Kab. Donggala	33.072.109.004	1.441.684.772	28.134.931.142	2.844.463.979	32.421.058.893
368	Kab. Morowali	49.096.551.188	1.223.861.294	45.519.900.460	2.846.210.795	49.589.972.549
369	Kab. Poso	33.139.682.769	1.801.327.034	28.506.414.474	3.317.203.274	33.624.944.782
370	Kota Palu	29.383.150.288	7.643.554.242	14.683.396.970	6.257.614.793	28.584.566.005
371	Kab. Parigi Moutong	29.546.456.151	1.965.559.197	22.973.138.680	3.042.597.091	27.981.294.968
372	Kab. Sigi	19.521.000.770	1.116.708.178	14.930.388.900	2.964.403.263	19.011.500.341
373	Kab. Tojo Una Una	29.028.013.253	1.079.757.117	24.283.759.505	2.981.212.576	28.344.729.198
374	Provinsi Sulawesi Selatan	207.901.743.805	71.492.987.903	124.703.362.966	20.545.597.523	216.741.948.392
375	Kab. Bantaeng	27.411.244.221	2.019.680.971	22.107.474.458	2.988.220.627	27.115.376.057
376	Kab. Barru	27.314.084.869	2.201.289.618	21.598.015.687	3.187.037.176	26.986.342.481
377	Kab. Bone	48.374.046.373	4.288.049.697	40.945.103.145	4.833.136.833	50.066.289.675
378	Kab. Bulukumba	33.813.154.629	3.087.758.054	26.028.258.471	3.661.395.487	32.777.412.012
379	Kab. Enrekang	32.090.271.371	2.173.822.840	26.921.084.972	2.801.647.324	31.896.555.136
380	Kab. Gowa	37.103.694.543	3.100.317.685	28.461.853.612	9.711.528.633	41.273.699.940
381	Kab. Jeneponto	29.430.838.440	2.527.626.279	23.700.095.918	2.867.186.223	29.094.908.420
382	Kab. Luwu	27.398.908.308	1.866.207.292	22.207.510.020	2.959.831.232	27.053.548.544
383	Kab. Luwu Utara	37.953.951.724	2.208.317.138	32.108.062.116	2.976.547.879	37.292.927.133
384	Kab. Maros	32.627.218.588	3.534.131.728	26.144.862.765	5.003.273.452	34.682.267.945
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	32.980.783.223	6.184.449.456	24.265.070.111	3.331.959.641	33.781.479.208
386	Kab. Pinrang	32.278.462.995	2.545.442.616	24.841.736.819	3.823.131.008	31.210.310.443
387	Kab. Selayar	25.008.865.461	2.017.692.878	20.005.379.365	2.852.623.401	24.875.595.644
388	Kab. Sidenreng Rappang	38.121.281.859	2.536.117.745	32.170.170.320	3.523.877.445	38.230.165.510
389	Kab. Sinjai	26.695.223.107	2.331.458.022	20.907.151.297	3.263.882.872	26.502.293.191
390	Kab. Soppeng	28.815.924.248	2.120.355.553	23.077.169.525	3.193.524.954	28.391.050.032
391	Kab. Takalar	27.542.528.604	2.450.519.101	20.947.412.800	3.205.078.242	26.603.010.143
392	Kab. Tana Toraja	22.316.782.597	2.498.907.817	16.701.374.370	2.976.263.782	22.176.545.969
393	Kab. Wajo	69.079.932.381	3.070.781.612	62.308.342.427	3.421.977.428	68.802.101.467
394	Kota Pare-pare	26.062.242.146	3.805.531.059	18.682.446.505	5.576.204.150	28.064.181.714
395	Kab. Toraja Utara	19.620.630.914	1.819.589.718	14.457.532.701	2.875.841.017	19.152.963.436
396	Kota Makassar	152.938.203.168	33.720.761.598	74.547.444.388	62.283.949.114	170.552.155.100
397	Kota Palopo	22.443.511.303	3.521.072.508	15.191.900.327	3.664.778.466	22.377.751.301
398	Kab. Luwu Timur	37.741.757.052	11.870.025.260	34.445.476.649	3.143.005.633	49.458.507.542
399	Provinsi Sulawesi Barat	33.290.376.813	5.561.722.571	18.263.535.044	503.071.099	24.328.328.714
400	Kab. Majene	30.666.204.813	1.277.242.796	26.413.004.129	2.870.373.189	30.560.620.114
401	Kab. Mamuju	41.102.835.424	3.038.921.607	32.279.832.277	4.153.982.175	39.472.736.059
402	Kab. Polewali Mandar	31.100.912.122	1.725.995.299	25.389.978.576	3.403.913.782	30.519.887.657
403	Kab. Mamasa	26.391.798.595	977.384.287	22.674.788.373	2.782.110.038	26.434.282.698
404	Kab. Mamuju Utara	39.221.581.773	1.325.859.474	28.519.189.511	3.027.979.285	32.872.828.250
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	62.808.839.176	17.668.990.350	43.860.702.076	3.229.404.860	64.758.097.286
406	Kab. Buton	29.321.607.431	1.565.109.316	25.506.775.048	2.805.937.980	29.877.822.344
407	Kab. Konawe	25.388.541.249	2.029.923.092	19.526.296.035	2.931.971.564	24.488.190.691
408	Kab. Kolaka	36.503.745.641	4.138.812.948	30.798.225.142	7.606.293.947	42.543.332.037
409	Kab. Muna	22.922.197.558	1.681.099.938	18.071.713.399	2.881.486.040	22.634.299.377
410	Kota Kendari	34.968.630.558	7.991.139.029	19.534.623.329	9.317.003.426	36.842.765.784
411	Kota Bau-bau	26.276.739.526	1.983.822.286	20.393.215.796	3.728.127.600	26.105.165.682
412	Kab. Konawe Selatan	30.000.736.854	2.050.869.857	25.362.169.102	2.838.180.956	30.251.219.915
413	Kab. Bombana	25.396.722.110	1.197.129.865	21.293.489.336	2.768.673.908	25.259.293.109
414	Kab. Konawe Utara	24.358.856.088	896.270.754	20.631.926.006	2.754.994.105	24.283.190.865
415	Kab. Buton Utara	16.675.139.020	792.936.277	13.031.190.863	2.754.994.105	16.579.121.045
416	Kab. Wakatobi	20.089.255.939	992.997.186	16.308.389.402	2.795.235.033	20.097.621.621
417	Kab. Kolaka Utara	26.152.503.529	1.086.959.311	22.762.695.976	2.794.850.002	26.644.505.289
418	Provinsi Bali	135.887.816.317	55.529.962.425	50.890.050.957	42.017.653.978	148.437.667.360
419	Kab. Badung	166.818.001.437	20.209.700.378	80.271.577.337	85.650.457.957	186.131.735.672
420	Kab. Bangli	23.635.033.664	3.670.560.010	16.342.905.565	3.308.029.401	23.321.494.976
421	Kab. Buleleng	38.954.375.092	5.996.832.929	25.609.366.092	9.428.775.937	41.034.974.958
422	Kab. Gianyar	32.785.161.221	6.208.319.222	18.833.158.860	11.228.795.385	36.270.273.467
423	Kab. Jembrana	28.392.362.485	4.156.853.921	17.520.302.660	6.504.799.198	28.181.955.779
424	Kab. Karangasem	27.907.659.568	4.939.692.747	19.327.282.674	4.859.009.408	29.125.984.829
425	Kab. Klungkung	19.837.552.930	4.429.540.242	11.140.828.717	3.310.456.259	18.880.825.218
426	Kab. Tabanan	36.038.092.084	5.128.968.946	22.896.518.688	7.667.613.697	35.693.101.331
427	Kota Denpasar	123.449.874.062	27.682.571.005	59.615.459.410	60.907.625.611	148.205.656.026
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	76.362.388.588	35.703.937.606	37.564.548.749	3.692.748.676	76.961.235.031
429	Kab. Bima	23.517.593.859	3.081.749.087	16.912.200.919	2.928.266.999	22.922.217.005
430	Kab. Dompu	21.111.278.019	2.747.078.969	15.114.808.227	2.909.280.864	20.771.168.060
431	Kab. Lombok Barat	24.847.717.349	2.113.242.405	17.040.284.993	6.080.943.712	25.234.471.110
432	Kab. Lombok Tengah	31.545.675.353	3.556.117.644	24.577.350.913	3.692.590.266	31.826.058.823
433	Kab. Lombok Timur	33.455.948.843	4.786.462.456	23.705.454.209	3.473.968.334	31.965.884.999
434	Kab. Sumbawa	31.697.881.231	3.265.453.202	24.989.534.071	3.457.943.144	32.273.930.417
435	Kota Mataram	38.936.175.662	9.964.944.119	19.914.391.631	10.364.646.562	40.243.982.312
436	Kab. Lombok Utara	19.123.713.469	2.088.537.680	13.630.455.408	3.124.784.691	18.843.777.779
437	Kota Bima	23.302.447.181	2.828.008.910	17.011.753.922	3.357.533.001	23.197.295.833
438	Kab. Sumbawa Barat	43.613.844.469	18.544.648.285	24.351.110.847	2.930.978.223	45.826.738.355
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	76.269.411.136	20.275.797.186	54.137.405.336	1.709.701.581	76.122.904.103
440	Kab. Alor	21.007.870.235	1.113.525.519	16.848.911.599	2.859.824.008	20.822.261.126

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			Total 7 = 4 + 5 + 6
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	
1	2	3	4	5	6	
441	Kab. Belu	24.566.761.236	1.647.001.930	19.586.216.322	3.255.384.755	24.488.603.007
442	Kab. Ende	19.582.520.986	1.588.812.961	14.786.968.916	3.181.516.764	19.557.298.641
443	Kab. Flores Timur	24.083.217.656	1.302.876.660	19.893.541.251	2.864.672.809	24.061.090.720
444	Kab. Kupang	18.768.988.543	1.456.967.355	14.653.243.807	2.971.144.312	19.081.355.474
445	Kab. Lembata	19.434.466.243	920.918.468	15.581.441.857	2.800.315.549	19.302.675.874
446	Kab. Manggarai	19.754.844.326	1.155.913.564	15.542.824.440	2.985.532.601	19.684.270.605
447	Kab. Ngada	16.606.771.232	1.038.835.220	12.696.138.039	2.821.093.873	16.556.067.132
448	Kab. Sikka	19.711.422.685	1.385.568.679	15.078.777.250	3.377.496.920	19.841.842.849
449	Kab. Sumba Barat	16.402.277.966	1.258.245.763	12.144.434.802	2.801.179.220	16.203.859.785
450	Kab. Sumba Timur	25.747.338.275	2.501.145.699	19.949.145.198	2.915.868.209	25.366.159.106
451	Kab. Timor Tengah Selatan	26.229.860.674	717.834.058	22.370.542.786	2.908.971.670	25.997.348.514
452	Kab. Timor Tengah Utara	23.597.062.521	1.215.487.904	19.397.047.385	2.815.573.029	23.428.108.318
453	Kota Kupang	28.114.404.896	9.164.648.722	14.277.878.464	6.308.929.006	29.751.456.192
454	Kab. Rote Ndao	21.786.908.148	876.470.183	18.021.936.219	2.804.350.661	21.702.757.063
455	Kab. Nagekeo	18.707.149.739	680.226.549	15.173.582.935	2.784.075.289	18.637.884.773
456	Kab. Sumba Tengah	18.249.810.606	453.472.339	14.937.375.541	2.764.248.761	18.155.096.641
457	Kab. Sumba Barat Daya	19.967.612.094	456.212.923	16.595.679.898	2.833.531.652	19.885.424.473
458	Kab. Manggarai Timur	18.635.705.422	931.666.398	14.900.470.394	2.772.406.473	18.604.543.285
459	Kab. Sabu Raijua	11.517.748.359	564.712.770	7.335.354.706	2.754.994.105	10.655.061.581
460	Kab. Manggarai Barat	21.512.370.166	1.002.692.831	17.189.354.653	3.066.867.117	21.258.914.601
461	Provinsi Maluku	71.885.495.522	11.293.277.437	58.175.062.764	1.081.482.599	70.548.822.800
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	28.691.438.774	988.866.409	24.553.353.656	2.924.141.548	28.466.361.613
463	Kab. Maluku Tengah	43.369.372.390	1.514.851.989	38.649.663.641	2.938.698.118	43.103.213.748
464	Kab. Maluku Tenggara	29.096.251.088	1.484.048.146	24.255.570.812	2.835.983.417	28.575.602.375
465	Kab. Pulau Buru	22.558.699.307	775.728.505	17.769.587.246	2.754.994.105	21.300.309.856
466	Kota Ambon	37.864.226.218	8.173.134.362	22.698.998.923	6.569.666.042	37.441.799.327
467	Kab. Seram Bagian Barat	27.200.083.688	701.125.424	22.887.121.036	2.754.994.105	26.343.240.565
468	Kab. Seram Bagian Timur	63.297.688.884	647.885.366	58.169.997.000	2.754.994.105	61.572.876.471
469	Kab. Maluku Barat Daya	24.665.846.141	792.949.583	21.133.958.358	2.754.994.105	24.681.902.046
470	Kab. Buru Selatan	17.190.316.964	549.437.220	13.832.418.638	2.754.994.105	17.136.849.963
471	Kab. Kepulauan Aru	29.561.538.702	736.291.597	25.917.178.308	2.754.994.105	29.408.464.010
472	Kota Tual	17.542.705.492	575.597.545	14.142.098.259	2.832.411.790	17.550.107.594
473	Provinsi Maluku Utara	68.910.657.175	21.938.215.669	46.403.382.505	740.563.526	69.082.161.700
474	Kab. Halmahera Tengah	34.687.883.900	1.960.959.452	29.013.752.648	2.760.697.017	33.735.409.117
475	Kab. Halmahera Barat	30.925.005.071	1.560.061.465	26.020.452.146	2.798.098.265	30.398.598.266
476	Kota Ternate	48.397.851.441	13.385.596.146	31.020.168.639	5.339.692.136	49.745.456.921
477	Kab. Halmahera Timur	38.870.456.385	1.697.595.040	32.646.042.830	2.771.525.796	37.115.163.666
478	Kota Tidore Kepulauan	30.294.105.024	2.969.245.136	23.867.171.325	2.761.605.241	29.598.021.702
479	Kab. Kepulauan Sula	29.774.809.136	1.844.398.596	25.627.997.403	2.760.469.529	30.232.865.528
480	Kab. Pulau Morotai	16.870.623.123	1.127.921.224	11.923.206.806	2.763.598.201	15.814.726.031
481	Kab. Halmahera Selatan	41.038.542.173	2.084.932.207	35.017.204.588	2.771.270.777	39.873.407.572
482	Kab. Halmahera Utara	29.080.223.701	6.010.601.947	23.148.888.748	3.030.257.689	32.189.748.384
483	Kab. Yalimo	14.146.304.782	1.362.418.647	10.027.611.142	2.754.994.105	14.145.023.894
484	Kab. Lanny Jaya	16.111.801.475	1.368.542.813	11.989.171.623	2.754.994.105	16.112.708.541
485	Provinsi Papua	251.982.374.793	78.694.176.197	172.457.795.391	3.116.162.008	254.268.133.596
486	Kab. Biak Numfor	24.671.472.471	2.887.707.606	18.090.212.302	2.983.653.538	23.961.173.446
487	Kab. Jayapura	41.361.631.724	1.851.584.914	33.383.428.921	4.081.676.803	39.316.690.638
488	Kab. Jayawijaya	29.690.859.740	2.434.171.032	23.264.271.736	2.958.257.505	28.656.700.273
489	Kab. Merauke	49.506.991.181	3.524.653.138	40.197.960.309	4.374.047.952	48.096.661.399
490	Kab. Mimika	143.675.393.982	59.907.390.208	111.294.739.203	4.942.908.654	176.145.038.065
491	Kab. Nabire	33.990.265.286	2.207.286.461	27.522.131.927	2.955.452.301	32.684.870.689
492	Kab. Paniai	27.961.812.957	1.623.000.200	25.857.787.332	2.754.994.105	30.235.781.637
493	Kab. Puncak Jaya	33.061.331.889	1.519.113.693	27.384.353.885	2.754.994.105	31.658.681.693
494	Kab. Kepulauan Yapen	36.269.292.982	1.958.640.223	31.142.881.266	2.903.788.622	36.005.310.111
495	Kota Jayapura	39.854.625.586	11.204.561.366	19.781.411.249	8.781.258.258	39.767.230.873
496	Kab. Sarmi	38.731.727.797	1.448.197.889	28.588.698.613	2.765.639.417	32.802.535.919
497	Kab. Keerom	36.178.146.460	1.504.595.598	31.918.784.604	2.992.814.979	36.416.195.181
498	Kab. Yahukimo	40.869.404.032	1.304.060.187	36.584.118.262	2.754.994.105	40.643.172.554
499	Kab. Pegunungan Bintang	40.529.299.941	1.715.123.106	35.693.867.930	2.754.994.105	40.163.985.141
500	Kab. Tolikara	35.515.090.538	1.347.010.259	31.142.445.509	2.754.994.105	35.244.449.873
501	Kab. Boven Digoel	48.384.408.588	2.699.163.640	42.201.058.925	2.754.994.105	47.725.216.670
502	Kab. Mappi	48.189.219.251	2.002.102.610	43.221.996.342	2.754.994.105	47.979.093.057
503	Kab. Asmat	44.664.215.272	1.846.455.342	38.305.396.292	2.754.994.105	42.906.845.739
504	Kab. Waropen	48.901.970.988	1.342.579.061	43.450.198.619	3.071.890.751	47.864.668.431
505	Kab. Mamberamo Raya	30.855.923.446	1.232.285.060	26.741.176.238	2.754.994.105	30.728.455.403
506	Kab. Mamberamo Tengah	17.087.941.026	1.299.178.719	13.034.072.425	2.754.994.105	17.088.245.249
507	Kab. Nduga	15.174.120.124	1.340.037.016	11.077.696.313	2.754.994.105	15.172.727.434
508	Kab. Dogiyai	22.527.881.315	1.330.506.561	18.862.999.563	2.754.994.105	22.948.500.229
509	Kab. Intan Jaya	22.693.548.031	1.418.785.447	14.899.420.055	2.754.994.105	19.073.199.607
510	Kab. Puncak	25.446.336.269	1.505.427.787	21.145.139.292	2.754.994.105	25.405.561.184
511	Kab. Deiyai	19.147.149.240	1.382.707.253	11.325.023.527	2.754.994.105	15.462.724.885
512	Kab. Supiori	23.808.279.719	1.277.505.156	19.587.057.053	2.754.994.105	23.619.556.314
513	Provinsi Papua Barat	187.583.795.972	19.628.823.442	163.523.502.304	1.671.327.570	184.823.653.316
514	Kab. Sorong	117.815.526.639	2.964.843.691	112.389.753.347	3.705.123.452	119.079.720.490
515	Kab. Manokwari	101.499.149.729	3.879.806.898	93.123.449.700	4.026.821.034	101.030.077.632
516	Kab. Fak Fak	57.566.406.426	2.069.940.141	50.486.639.861	3.152.336.329	55.707.916.331
517	Kota Sorong	56.912.953.049	5.980.688.303	45.808.532.868	6.793.101.866	58.362.323.037
518	Kab. Sorong Selatan	68.894.729.698	1.544.994.323	63.602.851.377	2.764.611.481	67.912.457.181
519	Kab. Raja Ampat	74.021.580.681	1.541.944.260	70.304.200.331	2.765.763.444	74.611.908.035
520	Kab. Teluk Bintuni	180.326.635.842	6.690.155.289	166.151.659.965	2.754.994.105	175.596.809.359
521	Kab. Teluk Wondama	38.028.308.297	1.730.306.418	33.210.038.965	2.754.994.105	37.695.339.488
522	Kab. Tambrauw	28.559.948.492	917.226.657	23.781.638.292	2.754.994.105	27.453.859.054
523	Kab. Maybrat	28.747.000.820	900.873.786	24.011.420.330	2.754.994.105	27.667.288.221
524	Kab. Kaimana	50.621.777.225	1.350.602.400	42.609.972.327	2.761.722.681	46.722.297.408
525	dana cadangan	0	0	0	0	0
526	Nilai belum teridentifikasi daerah penerima	0	0	87.553.892.075	(24.342.971.942)	63.210.920.133
JUMLAH		45.976.433.498.031	10.931.465.581.702	27.146.941.959.903	7.737.248.068.834	45.815.655.610.439

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1.056.704.464.034	271.895.224.708	784.555.905.385	216.472.732	0	36.861.209	0	1.056.704.464.034
2	Kab. Aceh Barat	10.860.010.013	1.142.750.391	9.382.638.628	66.770.570	0	26.401.732	133.334.511	10.751.895.832
3	Kab. Aceh Besar	10.871.581.099	1.142.750.391	9.382.638.628	33.379.542	0	71.363.846	133.334.511	10.763.466.918
4	Kab. Aceh Selatan	11.130.032.237	1.142.750.391	9.382.638.628	359.843.508	0	3.351.018	133.334.511	11.021.918.056
5	Kab. Aceh Singkil	10.860.347.104	1.142.750.391	9.382.638.628	24.179.182	0	69.330.211	133.334.511	10.752.232.923
6	Kab. Aceh Tengah	10.975.072.797	1.142.750.391	9.382.638.628	194.162.422	0	14.072.664	133.334.511	10.866.958.616
7	Kab. Aceh Tenggara	10.827.261.122	1.142.750.391	9.382.638.628	7.794.422	0	52.628.989	133.334.511	10.719.146.941
8	Kab. Aceh Timur	15.045.049.931	1.365.258.808	13.244.709.083	23.154.422	0	170.478.926	133.334.511	14.936.935.750
9	Kab. Aceh Utara	224.084.574.626	21.159.192.854	202.663.273.555	7.794.422	0	12.865.103	133.334.511	223.976.460.445
10	Kab. Bireun	10.791.149.934	1.142.750.391	9.382.638.628	7.794.422	0	16.517.801	133.334.511	10.683.035.753
11	Kab. Pidie	10.857.079.524	1.142.750.391	9.382.638.628	43.768.182	0	46.473.631	133.334.511	10.748.995.343
12	Kab. Simeulue	10.782.544.789	1.142.750.391	9.382.638.628	7.794.422	0	7.912.656	133.334.511	10.674.430.608
13	Kota Banda Aceh	10.777.983.151	1.142.750.391	9.382.638.628	7.794.422	0	3.351.018	133.334.511	10.669.868.970
14	Kota Sabang	10.777.983.151	1.142.750.391	9.382.638.628	7.794.422	0	3.351.018	133.334.511	10.669.868.970
15	Kota Langsa	10.777.983.151	1.142.750.391	9.382.638.628	7.794.422	0	3.351.018	133.334.511	10.669.868.970
16	Kota Lhokseumawe	10.777.983.151	1.142.750.391	9.382.638.628	7.794.422	0	3.351.018	133.334.511	10.669.868.970
17	Kab. Nagan Raya	10.883.336.687	1.142.750.391	9.382.638.628	108.860.022	0	7.638.954	133.334.511	10.775.222.506
18	Kab. Aceh Jaya	10.788.815.311	1.142.750.391	9.382.638.628	12.144.582	0	9.833.018	133.334.511	10.680.701.130
19	Kab. Pidie Jaya	10.809.448.088	1.142.750.392	9.382.638.628	7.794.422	0	34.812.954	133.334.511	10.701.330.907
20	Kab. Aceh Barat Daya	10.868.470.176	1.142.750.391	9.382.638.628	25.983.822	0	75.648.643	133.334.511	10.760.355.995
21	Kab. Gayo Lues	10.777.983.151	1.142.750.391	9.382.638.628	7.794.422	0	3.351.018	133.334.511	10.669.868.970
22	Kab. Aceh Tamiang	14.700.494.970	5.117.553.232	9.275.344.440	15.087.342	0	51.061.264	133.334.511	14.592.380.789
23	Kab. Bener Meriah	10.798.102.771	1.142.750.391	9.382.638.628	7.794.422	0	23.470.638	133.334.511	10.689.988.590
24	Kota Subulussalam	10.834.095.788	1.142.750.392	9.382.638.628	33.316.982	0	33.941.094	133.334.511	10.725.981.607
25	Provinsi Sumatera Utara	3.035.206.391	731.893.251	615.822.800	172.440.253	0	1.515.050.087	0	3.035.206.391
26	Kab. Asahan	422.540.013	47.911.892	38.488.800	0	0	94.690.629	133.334.511	314.425.832
27	Kab. Dairi	523.871.012	47.911.892	38.488.800	101.330.999	0	94.690.629	133.334.511	415.756.831
28	Kab. Deli Serdang	805.648.581	48.628.460	420.880.800	0	0	94.690.629	133.334.511	697.534.400
29	Kab. Tanah Karo	437.008.557	47.911.892	38.488.800	10.465.280	0	98.693.893	133.334.511	328.894.376
30	Kab. Labuhan Batu	763.107.109	47.911.892	38.488.800	0	0	435.257.725	133.334.511	654.992.928
31	Kab. Langkat	2.361.812.044	1.261.647.431	760.042.000	0	0	98.673.921	133.334.511	2.253.697.863
32	Kab. Mandailing Natal	2.819.546.046	47.911.892	38.488.800	198.851.320	0	2.292.845.342	133.334.511	2.711.431.865
33	Kab. Nias	452.198.672	47.911.892	38.488.800	2.103.040	0	122.246.248	133.334.511	344.084.491
34	Kab. Simalungun	758.088.306	47.911.892	38.488.800	0	0	430.238.922	133.334.511	649.974.125
35	Kab. Tapanuli Selatan	2.681.374.559	47.911.892	38.488.800	270.012.053	0	2.083.513.122	133.334.511	2.573.260.378
36	Kab. Tapanuli Tengah	566.763.239	47.911.892	38.488.800	80.109.560	0	158.804.295	133.334.511	458.649.058
37	Kab. Tapanuli Utara	612.452.198	47.911.892	38.488.800	67.771.690	0	216.831.124	133.334.511	504.338.017
38	Kab. Toba Samosir	434.184.512	47.911.892	38.488.800	0	0	106.335.128	133.334.511	326.070.331
39	Kota Binjai	713.173.717	249.334.396	127.700.000	0	0	94.690.629	133.334.511	605.059.536
40	Kota Medan	422.540.013	47.911.892	38.488.800	0	0	94.690.629	133.334.511	314.425.832
41	Kota Pematang Siantar	422.540.013	47.911.892	38.488.800	0	0	94.690.629	133.334.511	314.425.832
42	Kota Sibolga	422.540.013	47.911.892	38.488.800	0	0	94.690.629	133.334.511	314.425.832
43	Kota Tanjung Balai	422.540.013	47.911.892	38.488.800	0	0	94.690.629	133.334.511	314.425.832
44	Kab. Batu Bara	422.540.013	47.911.892	38.488.800	0	0	94.690.629	133.334.511	314.425.832
45	Kab. Labuhan Batu Utara	423.486.615	37.998.454	38.488.800	0	0	105.550.669	133.334.511	315.372.434
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	542.845.615	37.998.454	38.488.800	0	0	224.909.669	133.334.511	434.731.434
47	Kab. Padang Lawas Utara	524.467.795	37.998.454	38.488.800	0	0	206.531.849	133.334.511	416.353.614

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kab. Padang Lawas	8.104.220.465	37.998.454	38.488.800	0	0	7.786.284.519	133.334.511	7.996.106.284
49	Kab. Nias Utara	412.626.575	37.998.454	38.488.800	0	0	94.690.629	133.334.511	304.512.394
50	Kab. Nias Barat	412.626.575	37.998.454	38.488.800	0	0	94.690.629	133.334.511	304.512.394
51	Kota Tebing Tinggi	422.540.013	47.911.892	38.488.800	0	0	94.690.629	133.334.511	314.425.832
52	Kota Padang Sidempuan	469.573.591	47.911.892	38.488.800	47.033.578	0	94.690.629	133.334.511	361.459.410
53	Kab. Pakpak Bharat	478.286.606	47.911.892	38.488.800	12.536.320	0	137.900.902	133.334.511	370.172.425
54	Kab. Nias Selatan	648.288.294	47.911.892	38.488.800	0	0	320.438.910	133.334.511	540.174.113
55	Kab. Humbang Hasundutan	1.098.581.991	47.911.892	38.488.800	5.764.480	0	764.968.127	133.334.511	990.467.810
56	Kab. Serdang Bedagai	422.540.013	47.911.892	38.488.800	0	0	94.690.629	133.334.511	314.425.832
57	Kab. Samosir	422.540.013	47.911.892	38.488.800	0	0	94.690.629	133.334.511	314.425.832
58	Kota Gunung Sitoli	412.626.575	37.998.454	38.488.800	0	0	94.690.629	133.334.511	304.512.394
59	Provinsi Sumatera Barat	2.799.730.570	0	0	1.901.832.632	0	897.897.938	0	2.799.730.570
60	Kab. Limapuluh Kota	584.123.979	0	0	240.612.947	0	102.062.340	133.334.511	476.009.798
61	Kab. Agam	591.620.348	0	0	204.405.667	0	145.765.989	133.334.511	483.506.167
62	Kab. Kepulauan Mentawai	11.121.311.190	0	0	202.569.907	0	10.677.292.591	133.334.511	11.013.197.009
63	Kab. Padang Pariaman	544.228.063	0	0	202.569.907	0	100.209.464	133.334.511	436.113.882
64	Kab. Pasaman	643.648.095	0	0	258.226.263	0	143.973.140	133.334.511	535.533.914
65	Kab. Pesisir Selatan	644.823.824	0	0	250.221.279	0	153.153.853	133.334.511	536.709.643
66	Kab. Sijunjung	1.844.576.490	0	0	1.473.638.618	0	129.489.180	133.334.511	1.736.462.309
67	Kab. Solok	784.602.984	0	0	214.488.587	0	328.665.705	133.334.511	676.488.803
68	Kab. Tanah Datar	550.980.555	0	0	208.470.707	0	101.061.156	133.334.511	442.866.374
69	Kota Bukit Tinggi	543.785.035	0	0	202.569.907	0	99.766.436	133.334.511	435.670.854
70	Kota Padang Panjang	543.785.035	0	0	202.569.907	0	99.766.436	133.334.511	435.670.854
71	Kota Padang	543.785.035	0	0	202.569.907	0	99.766.436	133.334.511	435.670.854
72	Kota Payakumbuh	543.785.035	0	0	202.569.907	0	99.766.436	133.334.511	435.670.854
73	Kota Sawahlunto	2.193.477.462	0	0	1.851.640.868	0	100.387.902	133.334.511	2.085.363.281
74	Kota Solok	543.785.035	0	0	202.569.907	0	99.766.436	133.334.511	435.670.854
75	Kota Pariaman	543.785.035	0	0	202.569.907	0	99.766.436	133.334.511	435.670.854
76	Kab. Pasaman Barat	835.837.109	0	0	202.569.907	0	391.818.510	133.334.511	727.722.928
77	Kab. Dharmasraya	4.499.643.304	0	0	896.201.772	0	3.361.992.840	133.334.511	4.391.529.123
78	Kab. Solok Selatan	1.234.184.312	0	0	252.374.538	0	740.361.082	133.334.511	1.126.070.131
79	Provinsi Riau	1.650.835.783.168	1.606.618.192.333	419.537.600	16.161.760.640	0	27.636.292.595	0	1.650.835.783.168
80	Kab. Bengkalis	1.649.969.086.010	1.609.127.700.637	76.280.000	2.920.752.717	0	37.602.903.964	133.334.511	1.649.860.971.829
81	Kab. Indragiri Hilir	391.989.350.879	297.967.436.675	76.280.000	3.834.958.917	0	89.869.226.595	133.334.511	391.881.236.698
82	Kab. Indragiri Hulu	357.494.737.713	301.581.346.309	76.280.000	30.029.902.093	0	25.565.760.619	133.334.511	357.386.623.532
83	Kab. Kampar	647.371.640.231	636.660.383.244	76.280.000	3.011.148.605	0	7.382.379.690	133.334.511	647.263.526.050
84	Kab. Kuantan Singingi	309.935.539.792	297.967.436.675	76.280.000	4.659.092.164	0	6.991.282.261	133.334.511	309.827.425.611
85	Kab. Pelalawan	354.562.798.218	304.356.797.550	839.074.800	2.904.160.597	0	46.221.316.579	133.334.511	354.454.684.037
86	Kab. Rokan Hilir	875.147.524.932	857.638.622.190	76.280.000	2.888.992.597	0	14.302.181.453	133.334.511	875.039.410.751
87	Kab. Rokan Hulu	330.530.576.533	308.510.123.574	76.280.000	2.918.688.597	0	18.784.035.670	133.334.511	330.422.462.352
88	Kab. Siak	996.281.920.149	956.129.066.374	76.280.000	2.895.398.997	0	36.939.726.086	133.334.511	996.173.805.968
89	Kota Dumai	332.241.298.736	297.967.436.676	76.280.000	2.888.992.597	0	31.067.140.771	133.334.511	332.133.184.555
90	Kota Pekanbaru	306.164.595.947	298.066.333.363	76.280.000	2.888.992.597	0	4.891.541.295	133.334.511	306.056.481.766
91	Kab. Kepulauan Meranti	281.823.945.800	260.500.086.059	76.280.000	2.888.992.597	0	18.117.138.452	133.334.511	281.715.831.619
92	Provinsi Kepulauan Riau	697.062.049.737	352.613.064.466	327.559.400.322	16.889.584.949	0	0	0	697.062.049.737
93	Kab. Bintan	249.599.911.457	125.577.559.105	104.968.082.474	18.775.897.845	0	36.923.341	133.334.511	249.491.797.276
94	Kab. Natuna	822.568.958.974	548.772.056.842	268.075.079.215	5.480.374.225	0	0	133.334.511	822.460.844.793

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	Kab. Karimun	242.641.191.814	125.577.559.105	104.968.082.474	11.852.929.512	0	1.172.031	133.334.511	242.533.077.633
96	Kota Batam	236.272.408.857	125.577.559.105	104.968.082.474	5.480.054.225	0	5.264.361	133.334.511	236.164.294.676
97	Kab. Kepulauan Anambas	327.846.523.460	193.480.350.263	128.644.670.280	5.480.054.225	0	0	133.334.511	327.738.409.279
98	Kota Tanjung Pinang	241.335.620.186	125.577.559.105	104.968.082.474	10.548.529.915	0	0	133.334.511	241.227.506.005
99	Kab. Lingga	237.049.886.565	125.577.559.105	104.968.082.474	6.262.796.294	0	0	133.334.511	236.941.772.384
100	Provinsi Jambi	220.519.236.758	100.883.444.259	106.400.319.642	10.639.908.161	0	2.595.564.696	0	220.519.236.758
101	Kab. Batanghari	52.558.819.341	20.482.201.486	21.067.037.455	2.818.028.091	0	7.950.103.617	133.334.511	52.450.705.160
102	Kab. Bungo	63.691.524.042	20.737.893.091	21.761.180.253	19.830.221.461	0	1.120.780.545	133.334.511	63.583.409.861
103	Kab. Kerinci	45.194.005.547	20.737.893.091	21.761.180.253	2.087.817.069	0	365.666.442	133.334.511	45.085.891.366
104	Kab. Merangin	46.210.953.325	20.737.893.091	21.761.180.253	2.873.761.925	0	596.669.364	133.334.511	46.102.839.144
105	Kab. Muaro Jambi	49.788.403.943	25.489.550.700	20.733.978.374	2.178.172.269	0	1.145.253.908	133.334.511	49.680.289.762
106	Kab. Sarolangun	49.568.650.304	24.879.518.440	20.493.295.781	2.440.943.580	0	1.513.443.811	133.334.511	49.460.536.123
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	297.083.665.583	135.741.848.715	156.478.668.486	2.115.015.149	0	2.506.684.541	133.334.511	296.975.551.402
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	156.030.414.126	71.777.483.862	79.871.528.060	2.087.817.069	0	2.052.136.443	133.334.511	155.922.299.945
109	Kab. Tebo	50.962.225.972	20.617.418.911	21.706.117.220	2.171.267.993	0	6.225.973.156	133.334.511	50.854.111.791
110	Kota Jambi	47.555.475.023	23.711.384.914	21.138.943.314	2.087.817.069	0	375.881.034	133.334.511	47.447.360.842
111	Kota Sungai Penuh	34.751.871.886	15.125.852.758	16.950.017.779	2.087.817.069	0	346.735.588	133.334.511	34.643.757.705
112	Provinsi Sumatera Selatan	693.262.016.191	202.137.192.146	407.140.975.466	80.804.499.950	0	3.179.348.629	0	693.262.016.191
113	Kab. Lahat	166.809.009.475	36.165.433.706	72.313.854.490	57.564.623.996	0	523.648.591	133.334.511	166.700.895.294
114	Kab. Musi Banyuasin	1.021.193.375.859	279.841.769.880	704.717.135.357	12.615.511.293	0	23.777.510.637	133.334.511	1.021.085.261.678
115	Kab. Musi Rawas	253.467.100.530	66.683.526.326	172.142.211.954	13.215.621.524	0	1.184.292.034	133.334.511	253.358.986.349
116	Kab. Muara Enim	234.698.765.171	62.557.352.185	56.830.403.275	114.149.124.088	0	920.436.931	133.334.511	234.590.650.990
117	Kab. Ogan Komering Ilir	99.591.246.218	28.876.741.785	58.162.996.646	11.464.888.454	0	845.170.641	133.334.511	99.483.132.037
118	Kab. Ogan Komering Ulu	118.716.111.186	49.468.306.358	56.655.839.412	11.887.909.649	0	462.607.075	133.334.511	118.607.997.005
119	Kota Palembang	99.080.838.477	28.876.741.785	58.162.996.646	11.345.458.694	0	454.192.660	133.334.511	98.972.724.296
120	Kota Pagar Alam	99.080.838.477	28.876.741.785	58.162.996.646	11.345.458.694	0	454.192.660	133.334.511	98.972.724.296
121	Kota Lubuk Linggau	99.080.838.477	28.876.741.785	58.162.996.646	11.345.458.694	0	454.192.660	133.334.511	98.972.724.296
122	Kota Prabumulih	98.858.957.913	31.229.348.245	55.555.335.102	11.378.633.214	0	454.192.660	133.334.511	98.750.843.732
123	Kab. Empat Lawang	99.102.726.477	28.876.741.785	58.162.996.646	11.367.346.694	0	454.192.660	133.334.511	98.994.612.296
124	Kab. Banyuasin	113.462.590.300	46.092.941.863	55.053.667.405	11.504.780.414	0	569.751.926	133.334.511	113.354.476.119
125	Kab. Ogan Ilir	100.208.430.810	30.576.636.870	57.590.693.894	11.345.458.694	0	454.192.660	133.334.511	100.100.316.629
126	Kab. OKU Timur	99.159.724.928	28.876.741.785	58.162.996.646	11.422.634.428	0	455.903.377	133.334.511	99.051.610.747
127	Kab. OKU Selatan	99.160.728.397	28.876.741.785	58.162.996.646	11.425.348.614	0	454.192.660	133.334.511	99.052.614.216
128	Provinsi Bangka Belitung	40.488.642.876	8.581.540.326	0	31.885.154.229	0	21.948.321	0	40.488.642.876
129	Kab. Bangka	27.744.023.480	2.450.145.756	0	25.025.216.023	0	27.213.009	133.334.511	27.635.909.299
130	Kab. Belitung	18.613.651.800	2.450.145.756	0	15.828.437.803	0	93.619.549	133.334.511	18.505.537.619
131	Kota Pangkal Pinang	12.827.012.459	2.450.145.756	0	10.128.936.438	0	6.481.573	133.334.511	12.718.898.278
132	Kab. Bangka Selatan	21.988.750.233	2.450.145.756	0	19.286.742.354	0	10.413.431	133.334.511	21.880.636.052
133	Kab. Bangka Tengah	20.915.119.532	2.450.145.756	0	18.125.003.047	0	18.522.037	133.334.511	20.807.005.351
134	Kab. Bangka Barat	25.967.054.510	2.450.145.756	0	23.243.580.744	0	31.879.318	133.334.511	25.858.940.329
135	Kab. Belitung Timur	18.669.041.952	2.450.145.756	0	15.957.305.453	0	20.142.051	133.334.511	18.560.927.771
136	Provinsi Bengkulu	4.240.387.254	0	0	4.210.394.934	0	29.992.320	0	4.240.387.254
137	Kab. Bengkulu Selatan	1.178.322.325	0	0	906.313.357	0	30.560.276	133.334.511	1.070.208.144
138	Kab. Bengkulu Utara	4.153.230.723	0	0	3.821.128.408	0	90.653.623	133.334.511	4.045.116.542
139	Kab. Rejang Lebong	1.147.810.981	0	0	901.513.357	0	4.848.932	133.334.511	1.039.696.800
140	Kota Bengkulu	1.147.421.523	0	0	901.513.357	0	4.459.474	133.334.511	1.039.307.342
141	Kab. Kaur	1.239.549.777	0	0	904.744.879	0	93.356.206	133.334.511	1.131.435.596

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142	Kab. Seluma	1.487.112.945	0	0	1.213.964.571	0	31.699.682	133.334.511	1.378.998.764
143	Kab. Mukomuko	1.357.098.627	0	0	925.442.317	0	190.207.618	133.334.511	1.248.984.446
144	Kab. Lebong	1.156.669.141	0	0	911.013.517	0	4.206.932	133.334.511	1.048.554.960
145	Kab. Bengkulu Tengah	5.770.690.654	0	0	5.492.661.738	0	36.580.224	133.334.511	5.662.576.473
146	Kab. Kepahiang	1.149.165.781	0	0	903.510.157	0	4.206.932	133.334.511	1.041.051.600
147	Provinsi Lampung	89.888.935.824	83.064.686.781	6.628.693.168	114.251.656	0	81.304.219	0	89.888.935.824
148	Kab. Lampung Barat	14.375.137.093	13.157.742.944	946.490.602	16.946.515	0	12.508.340	133.334.511	14.267.022.912
149	Kab. Lampung Selatan	14.368.660.293	13.157.742.944	946.490.602	10.469.715	0	12.508.340	133.334.511	14.260.546.112
150	Kab. Lampung Tengah	14.371.556.540	13.157.742.944	946.490.602	13.365.962	0	12.508.340	133.334.511	14.263.442.359
151	Kab. Lampung Utara	14.363.924.293	13.157.742.944	946.490.602	5.733.715	0	12.508.340	133.334.511	14.255.810.112
152	Kab. Lampung Timur	52.596.723.421	51.390.542.072	946.490.602	5.733.715	0	12.508.340	133.334.511	52.488.609.240
153	Kab. Tanggamus	14.601.118.417	13.157.742.944	946.490.602	242.927.839	0	12.508.340	133.334.511	14.493.004.236
154	Kab. Tulang Bawang	14.442.097.153	13.157.742.944	946.490.602	17.251.395	0	79.163.520	133.334.511	14.333.982.972
155	Kab. Way Kanan	14.395.156.168	13.157.742.944	946.490.602	8.772.275	0	40.701.655	133.334.511	14.287.041.987
156	Kab. Pesawaran	10.823.451.737	9.481.163.754	946.490.602	141.840.349	0	12.508.340	133.334.511	10.715.337.556
157	Kab. Pringsewu	10.687.345.103	9.481.163.754	946.490.602	5.733.715	0	12.508.340	133.334.511	10.579.230.922
158	Kab. Mesuji	10.809.251.888	9.481.163.754	946.490.602	5.733.715	0	134.415.125	133.334.511	10.701.137.707
159	Kab. Tulang Bawang Barat	10.687.345.103	9.481.163.754	946.490.602	5.733.715	0	12.508.340	133.334.511	10.579.230.922
160	Kota Bandar Lampung	14.370.355.674	13.157.742.944	946.490.602	5.733.715	0	18.939.721	133.334.511	14.262.241.493
161	Kota Metro	14.363.924.293	13.157.742.944	946.490.602	5.733.715	0	12.508.340	133.334.511	14.255.810.112
162	Provinsi DKI Jakarta	112.843.558.301	91.515.304.455	19.879.561.618	0	0	0	800.007.986	112.194.874.059
163	Provinsi Jawa Barat	141.560.534.939	55.172.008.995	17.854.435.923	5.931.569.231	60.837.746.196	1.764.774.594	0	141.560.534.939
164	Kab. Bandung	65.980.388.451	4.294.298.284	1.379.008.922	467.957.014	59.456.082.038	141.593.501	133.334.511	65.872.274.270
165	Kab. Bekasi	33.420.810.782	24.690.941.061	2.943.584.400	467.957.014	4.935.697.648	141.181.967	133.334.511	33.312.696.601
166	Kab. Bogor	48.433.930.389	4.294.298.284	1.379.008.922	11.797.095.937	30.549.590.450	172.488.104	133.334.511	48.325.816.208
167	Kab. Ciamis	12.623.575.098	4.294.298.284	1.379.008.922	467.957.014	4.935.697.648	1.305.164.538	133.334.511	12.515.460.917
168	Kab. Cianjur	12.447.128.860	4.294.298.284	1.379.008.922	488.253.694	4.935.697.648	1.108.421.620	133.334.511	12.339.014.679
169	Kab. Cirebon	11.468.960.898	4.294.298.284	1.379.008.922	467.957.014	4.935.697.648	150.550.338	133.334.511	11.360.846.717
170	Kab. Garut	25.592.826.482	4.294.298.284	1.379.008.922	627.718.614	18.901.813.053	148.538.917	133.334.511	25.484.712.301
171	Kab. Indramayu	21.860.858.344	11.899.501.624	3.799.060.400	467.957.014	4.935.697.648	517.192.966	133.334.511	21.752.744.163
172	Kab. Karawang	21.618.496.437	8.245.867.967	7.582.921.200	467.957.014	4.935.697.648	144.603.916	133.334.511	21.510.382.256
173	Kab. Kuningan	11.527.979.987	4.294.298.284	1.379.008.922	467.957.014	4.935.697.648	209.569.427	133.334.511	11.419.865.806
174	Kab. Majalengka	11.621.422.673	4.437.738.034	1.379.008.922	467.957.014	4.935.697.648	159.572.363	133.334.511	11.513.308.492
175	Kab. Purwakarta	11.617.107.707	4.294.298.284	1.379.008.922	469.972.476	4.935.697.648	296.681.685	133.334.511	11.508.993.526
176	Kab. Subang	23.535.506.488	4.962.523.147	12.777.994.000	467.957.014	4.935.697.648	149.885.987	133.334.511	23.427.392.307
177	Kab. Sukabumi	34.373.914.119	4.294.298.284	1.379.008.922	528.280.710	27.575.099.799	355.777.712	133.334.511	34.265.799.938
178	Kab. Sumedang	11.520.488.679	4.294.298.284	1.379.008.922	467.957.014	4.935.697.648	202.078.119	133.334.511	11.412.374.498
179	Kab. Tasikmalaya	11.540.470.837	4.294.298.284	1.379.008.922	472.831.881	4.935.697.648	217.185.410	133.334.511	11.432.356.656
180	Kab. Bandung Barat	11.417.882.100	4.294.298.284	1.379.008.922	478.897.174	4.867.019.694	157.209.334	133.334.511	11.309.767.919
181	Kota Bandung	11.459.592.527	4.294.298.284	1.379.008.922	467.957.014	4.935.697.648	141.181.967	133.334.511	11.351.478.346
182	Kota Bekasi	11.459.592.527	4.294.298.284	1.379.008.922	467.957.014	4.935.697.648	141.181.967	133.334.511	11.351.478.346
183	Kota Bogor	11.459.592.527	4.294.298.284	1.379.008.922	467.957.014	4.935.697.648	141.181.967	133.334.511	11.351.478.346
184	Kota Cirebon	11.459.592.527	4.294.298.284	1.379.008.922	467.957.014	4.935.697.648	141.181.967	133.334.511	11.351.478.346
185	Kota Depok	11.459.592.527	4.294.298.284	1.379.008.922	467.957.014	4.935.697.648	141.181.967	133.334.511	11.351.478.346
186	Kota Sukabumi	11.459.592.527	4.294.298.284	1.379.008.922	467.957.014	4.935.697.648	141.181.967	133.334.511	11.351.478.346
187	Kota Cimahi	11.459.592.527	4.294.298.284	1.379.008.922	467.957.014	4.935.697.648	141.181.967	133.334.511	11.351.478.346
188	Kota Tasikmalaya	11.459.592.527	4.294.298.284	1.379.008.922	467.957.014	4.935.697.648	141.181.967	133.334.511	11.351.478.346

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
189	Kota Banjar	11.670.357.280	4.294.298.284	1.379.008.922	467.957.014	4.935.697.648	351.946.720	133.334.511	11.562.243.099
190	Provinsi Banten	561.840.000	0	0	156.909.362	0	404.930.638	0	561.840.000
191	Kab. Lebak	724.855.239	0	0	338.615.605	0	144.790.942	133.334.511	616.741.058
192	Kab. Pandeglang	1.084.795.310	0	0	62.581.817	0	780.764.801	133.334.511	976.681.129
193	Kab. Serang	398.284.976	0	0	41.141.817	0	115.694.467	133.334.511	290.170.795
194	Kab. Tangerang	398.284.976	0	0	41.141.817	0	115.694.467	133.334.511	290.170.795
195	Kota Cilegon	398.284.976	0	0	41.141.817	0	115.694.467	133.334.511	290.170.795
196	Kota Tangerang	398.284.976	0	0	41.141.817	0	115.694.467	133.334.511	290.170.795
197	Kota Serang	398.284.976	0	0	41.141.817	0	115.694.467	133.334.511	290.170.795
198	Kota Tangerang Selatan	398.284.976	0	0	41.141.817	0	115.694.467	133.334.511	290.170.795
199	Provinsi Jawa Tengah	6.314.865.451	621.711.280	94.734.000	42.613.005	0	5.555.807.166	0	6.314.865.451
200	Kab. Banjarnegara	621.454.131	36.571.251	5.572.000	2.473.753	0	335.388.435	133.334.511	513.339.950
201	Kab. Banyumas	677.912.879	36.571.251	5.572.000	23.510.833	0	370.810.103	133.334.511	569.798.698
202	Kab. Batang	1.248.531.608	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	963.099.232	133.334.511	1.140.417.427
203	Kab. Blora	7.510.332.736	1.243.388.081	56.654.800	1.840.433	0	5.967.000.730	133.334.511	7.402.218.555
204	Kab. Boyolali	746.454.396	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	461.022.020	133.334.511	638.340.215
205	Kab. Brebes	981.681.855	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	696.249.479	133.334.511	873.567.674
206	Kab. Cilacap	953.200.209	36.571.251	5.572.000	68.088.411	0	601.519.855	133.334.511	845.086.028
207	Kab. Demak	612.244.561	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	326.812.185	133.334.511	504.130.380
208	Kab. Grobogan	1.467.906.022	36.605.731	5.572.000	1.840.433	0	1.182.439.166	133.334.511	1.359.791.841
209	Kab. Jepara	612.244.561	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	326.812.185	133.334.511	504.130.380
210	Kab. Karanganyar	613.017.213	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	327.584.837	133.334.511	504.903.032
211	Kab. Kebumen	625.409.269	36.571.251	5.572.000	3.155.233	0	338.662.093	133.334.511	517.295.088
212	Kab. Kendal	1.223.011.930	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	937.579.554	133.334.511	1.114.897.749
213	Kab. Klaten	612.244.561	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	326.812.185	133.334.511	504.130.380
214	Kab. Kudus	612.244.561	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	326.812.185	133.334.511	504.130.380
215	Kab. Magelang	612.244.561	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	326.812.185	133.334.511	504.130.380
216	Kab. Pati	924.346.101	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	638.913.725	133.334.511	816.231.920
217	Kab. Pekalongan	626.234.716	36.571.251	5.572.000	6.155.033	0	336.487.740	133.334.511	518.120.535
218	Kab. Pemalang	1.183.489.700	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	898.057.324	133.334.511	1.075.375.519
219	Kab. Purbalingga	612.557.195	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	327.124.819	133.334.511	504.443.014
220	Kab. Purworejo	659.130.700	36.571.251	5.572.000	37.168.840	0	338.369.917	133.334.511	551.016.519
221	Kab. Rembang	1.441.002.356	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	1.155.569.980	133.334.511	1.332.888.175
222	Kab. Semarang	612.512.307	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	327.079.931	133.334.511	504.398.126
223	Kab. Sragen	612.244.561	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	326.812.185	133.334.511	504.130.380
224	Kab. Sukoharjo	612.244.561	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	326.812.185	133.334.511	504.130.380
225	Kab. Tegal	953.107.568	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	667.675.192	133.334.511	844.993.387
226	Kab. Temanggung	663.356.351	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	377.923.975	133.334.511	555.242.170
227	Kab. Wonogiri	662.896.577	36.571.251	5.572.000	19.092.813	0	360.211.821	133.334.511	554.782.396
228	Kab. Wonosobo	631.092.668	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	345.660.292	133.334.511	522.978.487
229	Kota Magelang	612.244.561	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	326.812.185	133.334.511	504.130.380
230	Kota Pekalongan	612.244.561	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	326.812.185	133.334.511	504.130.380
231	Kota Salatiga	612.244.561	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	326.812.185	133.334.511	504.130.380
232	Kota Semarang	765.298.564	36.571.251	138.386.000	1.840.433	0	347.052.188	133.334.511	657.184.383
233	Kota Surakarta	612.244.561	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	326.812.185	133.334.511	504.130.380
234	Kota Tegal	612.244.561	36.571.251	5.572.000	1.840.433	0	326.812.185	133.334.511	504.130.380
235	Provinsi DI Yogyakarta	6.460.930	0	0	5.552.770	0	908.160	0	6.460.930

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236	Kab. Bantul	241.993.060	0	0	0	0	544.368	133.334.511	133.878.879
237	Kab. Gunung Kidul	243.162.052	0	0	0	0	1.713.360	133.334.511	135.047.871
238	Kab. Kulon Progo	264.126.526	0	0	22.211.082	0	466.752	133.334.511	156.012.345
239	Kab. Sleman	241.902.772	0	0	0	0	454.080	133.334.511	133.788.591
240	Kota Yogyakarta	241.902.772	0	0	0	0	454.080	133.334.511	133.788.591
241	Provinsi Jawa Timur	89.467.433.091	82.618.743.919	2.876.626.000	113.349.301	0	3.858.713.871	0	89.467.433.091
242	Kab. Bangkalan	14.613.621.890	13.338.077.720	818.621.139	4.742.974	0	210.731.365	133.334.511	14.505.507.709
243	Kab. Banyuwangi	7.101.497.291	4.454.137.373	151.903.600	25.948.120	0	2.228.059.506	133.334.511	6.993.383.110
244	Kab. Blitar	5.185.815.965	4.454.137.373	151.903.600	7.040.522	0	331.285.778	133.334.511	5.077.701.784
245	Kab. Bojonegoro	130.599.122.617	129.193.551.290	151.903.600	4.742.974	0	1.007.476.061	133.334.511	130.491.008.436
246	Kab. Bondowoso	5.073.352.602	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	221.119.963	133.334.511	4.965.238.421
247	Kab. Gresik	7.014.422.919	5.998.037.430	561.275.320	4.742.974	0	208.918.503	133.334.511	6.906.308.738
248	Kab. Jember	5.550.704.888	4.454.137.373	151.903.600	38.659.540	0	664.555.683	133.334.511	5.442.590.707
249	Kab. Jombang	5.257.683.165	4.454.137.373	151.903.600	137.492.237	0	272.701.263	133.334.511	5.149.568.984
250	Kab. Kediri	5.341.874.028	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	489.641.389	133.334.511	5.233.759.847
251	Kab. Lamongan	5.314.838.062	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	462.605.423	133.334.511	5.206.723.881
252	Kab. Lumajang	5.398.450.700	4.454.137.373	151.903.600	28.032.640	0	522.928.395	133.334.511	5.290.336.519
253	Kab. Madiun	6.162.459.037	4.454.137.373	151.903.600	13.093.814	0	1.301.875.558	133.334.511	6.054.344.856
254	Kab. Magetan	5.062.515.935	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	210.283.296	133.334.511	4.954.401.754
255	Kab. Malang	5.219.896.447	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	367.663.808	133.334.511	5.111.782.266
256	Kab. Mojokerto	5.069.620.815	4.454.137.373	151.903.600	6.213.251	0	215.917.899	133.334.511	4.961.506.634
257	Kab. Nganjuk	5.371.083.397	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	518.850.758	133.334.511	5.262.996.216
258	Kab. Ngawi	5.547.357.976	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	695.125.337	133.334.511	5.439.243.795
259	Kab. Pacitan	5.085.707.840	4.454.137.373	151.903.600	28.769.886	0	209.448.289	133.334.511	4.977.593.659
260	Kab. Pamekasan	5.060.811.766	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	208.579.127	133.334.511	4.952.697.585
261	Kab. Pasuruan	5.102.445.222	4.454.137.373	151.903.600	33.478.400	0	221.477.157	133.334.511	4.994.331.041
262	Kab. Ponorogo	5.182.208.719	4.454.137.373	151.903.600	12.283.174	0	322.435.880	133.334.511	5.074.094.538
263	Kab. Probolinggo	5.127.194.041	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	274.961.402	133.334.511	5.019.079.860
264	Kab. Sampang	5.060.811.766	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	208.579.127	133.334.511	4.952.697.585
265	Kab. Sidoarjo	5.092.864.441	4.486.190.048	151.903.600	4.742.974	0	208.579.127	133.334.511	4.984.750.260
266	Kab. Situbondo	5.090.576.865	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	238.344.226	133.334.511	4.982.462.684
267	Kab. Sumenep	5.447.651.204	4.314.027.327	587.125.600	4.742.974	0	300.306.611	133.334.511	5.339.537.023
268	Kab. Trenggalek	5.124.833.814	4.454.137.373	151.903.600	49.220.776	0	228.123.373	133.334.511	5.016.719.633
269	Kab. Tuban	12.767.760.466	11.380.988.426	151.903.600	4.742.974	0	988.676.774	133.334.511	12.659.646.285
270	Kab. Tulungagung	5.070.237.651	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	218.005.012	133.334.511	4.962.123.470
271	Kota Blitar	5.060.811.766	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	208.579.127	133.334.511	4.952.697.585
272	Kota Kediri	5.060.811.766	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	208.579.127	133.334.511	4.952.697.585
273	Kota Madiun	5.060.811.766	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	208.579.127	133.334.511	4.952.697.585
274	Kota Malang	5.060.811.766	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	208.579.127	133.334.511	4.952.697.585
275	Kota Mojokerto	5.060.811.766	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	208.579.127	133.334.511	4.952.697.585
276	Kota Pasuruan	5.060.811.766	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	208.579.127	133.334.511	4.952.697.585
277	Kota Probolinggo	5.060.811.766	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	208.579.127	133.334.511	4.952.697.585
278	Kota Surabaya	5.060.811.766	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	208.579.127	133.334.511	4.952.697.585
279	Kota Batu	5.061.198.977	4.454.137.373	151.903.600	4.742.974	0	208.966.338	133.334.511	4.953.084.796
280	Provinsi Kalimantan Barat	10.836.588.411	0	0	7.029.231.583	0	3.807.356.828	0	10.836.588.411
281	Kab. Bengkayang	1.499.519.296	0	0	958.717.191	0	299.353.413	133.334.511	1.391.405.115
282	Kab. Landak	1.758.129.668	0	0	1.171.350.909	0	345.330.067	133.334.511	1.650.015.487

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
283	Kab. Kapuas Hulu	15.038.169.833	0	0	1.606.982.231	0	13.189.738.910	133.334.511	14.930.055.652
284	Kab. Ketapang	27.879.721.594	0	0	13.515.015.883	0	14.123.257.019	133.334.511	27.771.607.413
285	Kab. Pontianak	1.637.988.413	0	0	1.005.196.351	0	391.343.370	133.334.511	1.529.874.232
286	Kab. Sambas	1.539.905.424	0	0	962.976.871	0	335.479.861	133.334.511	1.431.791.243
287	Kab. Sanggau	4.160.893.971	0	0	3.502.926.930	0	416.518.349	133.334.511	4.052.779.790
288	Kab. Sintang	13.115.033.996	0	0	990.431.551	0	11.883.153.753	133.334.511	13.006.919.815
289	Kota Pontianak	1.781.720.628	0	0	872.624.191	0	667.647.745	133.334.511	1.673.606.447
290	Kota Singkawang	1.418.803.896	0	0	878.001.791	0	299.353.413	133.334.511	1.310.689.715
291	Kab. Kayong Utara	1.418.520.416	0	0	877.718.311	0	299.353.413	133.334.511	1.310.406.235
292	Kab. Kubu Raya	3.932.324.061	0	0	929.647.391	0	2.761.227.978	133.334.511	3.824.209.880
293	Kab. Sekadau	1.436.716.136	0	0	895.914.031	0	299.353.413	133.334.511	1.328.601.955
294	Kab. Melawi	3.839.969.495	0	0	906.160.191	0	2.692.360.612	133.334.511	3.731.855.314
295	Provinsi Kalimantan Tengah	45.236.209.638	0	0	22.991.614.774	0	22.244.594.864	0	45.236.209.638
296	Kab. Barito Selatan	13.427.303.760	0	0	7.686.760.452	0	5.499.094.616	133.334.511	13.319.189.579
297	Kab. Barito Utara	46.754.949.499	0	0	12.835.939.724	0	33.677.561.083	133.334.511	46.646.835.318
298	Kab. Kapuas	28.107.480.491	0	0	4.484.482.595	0	23.381.549.204	133.334.511	27.999.366.310
299	Kab. Kotawaringin Barat	11.912.874.112	0	0	3.291.623.614	0	8.379.801.806	133.334.511	11.804.759.931
300	Kab. Kotawaringin Timur	23.654.515.600	0	0	4.181.767.376	0	19.251.299.532	133.334.511	23.546.401.419
301	Kota Palangkaraya	5.938.842.604	0	0	3.341.733.974	0	2.355.659.938	133.334.511	5.830.728.423
302	Kab. Barito Timur	10.578.051.342	0	0	8.015.589.365	0	2.321.013.285	133.334.511	10.469.937.161
303	Kab. Murung Raya	52.460.378.552	0	0	27.837.938.801	0	24.380.991.059	133.334.511	52.352.264.371
304	Kab. Pulang Pisau	5.927.018.472	0	0	3.278.889.174	0	2.406.680.606	133.334.511	5.818.904.291
305	Kab. Gunung Mas	13.087.254.015	0	0	3.451.811.174	0	9.393.994.149	133.334.511	12.979.139.834
306	Kab. Lamandau	21.418.386.119	0	0	3.466.312.334	0	17.710.625.093	133.334.511	21.310.271.938
307	Kab. Sukamara	5.902.948.235	0	0	3.277.717.974	0	2.383.781.569	133.334.511	5.794.834.054
308	Kab. Katingan	44.663.356.947	0	0	3.538.360.700	0	40.883.547.555	133.334.511	44.555.242.766
309	Kab. Seruyan	43.025.682.312	0	0	3.362.639.032	0	39.421.594.588	133.334.511	42.917.568.131
310	Provinsi Kalimantan Selatan	299.792.590.507	3.895.592.266	0	295.359.019.862	0	537.978.379	0	299.792.590.507
311	Kab. Banjar	103.177.950.377	649.265.376	0	101.458.149.135	0	829.087.174	133.334.511	103.069.836.196
312	Kab. Barito Kuala	50.589.218.472	649.265.376	0	49.020.536.370	0	677.968.034	133.334.511	50.481.104.291
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	55.221.989.166	649.265.376	0	54.220.708.684	0	110.566.414	133.334.511	55.113.874.985
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	50.083.376.858	649.265.376	0	49.102.188.210	0	90.474.580	133.334.511	49.975.262.677
315	Kab. Hulu Sungai Utara	50.338.925.340	649.265.376	0	49.020.536.370	0	427.674.902	133.334.511	50.230.811.159
316	Kab. Kotabaru	104.076.912.880	649.265.376	0	102.394.902.957	0	791.295.855	133.334.511	103.968.798.699
317	Kab. Tabalong	172.494.994.364	7.096.340.379	0	162.360.422.599	0	2.796.782.694	133.334.511	172.386.880.183
318	Kab. Tanah Laut	157.213.661.208	649.265.376	0	155.871.869.284	0	451.077.856	133.334.511	157.105.547.027
319	Kab. Tapin	83.113.786.389	649.265.376	0	82.123.490.184	0	99.582.137	133.334.511	83.005.672.208
320	Kota Banjarbaru	60.533.837.866	649.265.376	0	59.553.460.735	0	89.663.063	133.334.511	60.425.723.685
321	Kota Banjarmasin	50.000.913.501	649.265.376	0	49.020.536.370	0	89.663.063	133.334.511	49.892.799.320
322	Kab. Balangan	157.569.335.687	1.344.109.536	0	155.894.114.396	0	89.663.063	133.334.511	157.461.221.506
323	Kab. Tanah Bumbu	113.950.705.038	649.265.376	0	111.450.308.476	0	1.609.682.494	133.334.511	113.842.590.857
324	Provinsi Kalimantan Timur	2.945.943.923.643	658.588.961.778	1.584.591.151.576	674.638.073.752	0	28.125.736.537	0	2.945.943.923.643
325	Kab. Berau	548.707.872.044	98.919.436.239	240.022.001.470	159.890.581.830	0	49.634.403.813	133.334.511	548.599.757.863
326	Kab. Bulungan	490.274.816.071	103.028.864.999	238.387.980.851	105.968.097.095	0	42.648.424.434	133.334.511	490.166.701.890
327	Kab. Kutai Kartanegara	2.813.715.419.825	617.977.905.713	1.773.000.906.101	406.573.118.833	0	15.922.040.486	133.334.511	2.813.607.305.644
328	Kab. Kutai Barat	653.433.209.831	98.919.436.239	240.022.001.470	253.331.833.298	0	60.918.490.132	133.334.511	653.325.095.650
329	Kab. Kutai Timur	1.019.460.443.536	102.462.944.680	239.551.259.190	637.313.838.857	0	39.890.952.117	133.334.511	1.019.352.329.355

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
330	Kab. Malinau	475.337.310.024	98.919.436.239	240.022.001.470	114.417.044.276	0	21.737.379.347	133.334.511	475.229.195.843
331	Kab. Nunukan	464.977.698.282	101.762.505.218	238.879.421.683	104.192.063.165	0	19.902.259.524	133.334.511	464.869.584.101
332	Kab. Pasir	593.312.800.999	98.919.436.241	240.022.001.470	240.594.637.137	0	13.535.277.459	133.334.511	593.204.686.818
333	Kota Balikpapan	445.119.377.769	98.919.436.241	240.022.001.470	103.212.791.142	0	2.723.700.224	133.334.511	445.011.263.588
334	Kota Bontang	463.756.135.431	105.290.765.798	252.000.129.531	103.599.958.753	0	2.623.832.657	133.334.511	463.648.021.250
335	Kab. Tana Tidung	391.021.798.977	79.094.836.838	178.878.169.223	125.850.670.347	0	6.956.673.877	133.334.511	390.913.684.796
336	Kota Samarinda	482.303.780.909	99.555.990.950	243.900.241.902	135.982.266.708	0	2.623.832.657	133.334.511	482.195.666.728
337	Kota Tarakan	455.923.169.458	111.103.923.509	238.625.225.545	103.185.107.288	0	2.767.464.424	133.334.511	455.815.055.277
338	Kab. Penajam Paser Utara	481.044.978.309	124.555.826.873	243.397.584.906	104.535.390.381	0	8.314.727.457	133.334.511	480.936.864.128
339	Provinsi Sulawesi Utara	904.636.683	0	0	744.863.691	0	159.772.992	0	904.636.683
340	Kab. Bolaang Mongondow	671.059.096	0	0	245.252.421	0	184.357.983	133.334.511	562.944.915
341	Kab. Minahasa	324.623.227	0	0	60.349.823	0	22.824.712	133.334.511	216.509.046
342	Kab. Sangihe	324.623.227	0	0	60.349.823	0	22.824.712	133.334.511	216.509.046
343	Kota Bitung	328.842.071	0	0	64.568.667	0	22.824.712	133.334.511	220.727.890
344	Kota Manado	324.737.907	0	0	60.464.503	0	22.824.712	133.334.511	216.623.726
345	Kab. Kepulauan Talaud	324.623.227	0	0	60.349.823	0	22.824.712	133.334.511	216.509.046
346	Kab. Minahasa Selatan	332.691.696	0	0	68.162.986	0	23.080.018	133.334.511	224.577.515
347	Kab. Minahasa Tenggara	358.088.811	0	0	93.189.623	0	23.450.496	133.334.511	249.974.630
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	324.623.227	0	0	60.349.823	0	22.824.712	133.334.511	216.509.046
349	Kota Kotamubagu	324.623.227	0	0	60.349.823	0	22.824.712	133.334.511	216.509.046
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2.529.344.268	0	0	1.751.799.000	0	536.096.576	133.334.511	2.421.230.087
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	858.021.033	0	0	70.589.823	0	545.982.518	133.334.511	749.906.852
352	Kota Tomohon	324.623.227	0	0	60.349.823	0	22.824.712	133.334.511	216.509.046
353	Kab. Minahasa Utara	368.749.555	0	0	104.476.151	0	22.824.712	133.334.511	260.635.374
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.485.751.410	0	0	204.854.874	0	1.039.447.844	133.334.511	1.377.637.229
355	Provinsi Gorontalo	298.980.863	0	0	154.577.663	0	144.403.200	0	298.980.863
356	Kab. Boalemo	864.585.626	0	0	1.254.400	0	621.882.534	133.334.511	756.471.445
357	Kab. Gorontalo	622.270.829	0	0	228.668.903	0	152.153.234	133.334.511	514.156.648
358	Kota Gorontalo	299.209.972	0	0	0	0	57.761.280	133.334.511	191.095.791
359	Kab. Pohuwato	1.313.703.707	0	0	355.509.970	0	716.745.045	133.334.511	1.205.589.526
360	Kab. Gorontalo Utara	325.763.591	0	0	18.300.160	0	66.014.739	133.334.511	217.649.410
361	Kab. Bone Bolango	369.629.812	0	0	67.122.560	0	61.058.560	133.334.511	261.515.631
362	Provinsi Sulawesi Tengah	3.160.929.716	1.381.993.279	0	808.058.212	0	970.878.225	0	3.160.929.716
363	Kab. Banggai	3.983.535.394	276.398.655	0	737.147.520	0	2.728.540.527	133.334.511	3.875.421.213
364	Kab. Banggai Kepulauan	788.531.766	276.398.655	0	70.141.280	0	200.543.139	133.334.511	680.417.585
365	Kab. Buol	2.549.609.521	276.398.655	0	232.782.875	0	1.798.979.299	133.334.511	2.441.495.340
366	Kab. Toli-Toli	1.093.114.856	276.398.655	0	123.033.476	0	452.234.033	133.334.511	985.000.675
367	Kab. Donggala	2.110.248.009	276.398.655	0	113.247.276	0	1.479.153.386	133.334.511	2.002.133.828
368	Kab. Morowali	5.367.126.462	2.763.986.558	0	1.325.120.007	0	1.036.571.205	133.334.511	5.259.012.281
369	Kab. Poso	1.489.121.530	276.398.655	0	143.952.320	0	827.321.863	133.334.511	1.381.007.349
370	Kota Palu	774.551.462	276.398.655	0	110.984.471	0	145.719.644	133.334.511	666.437.281
371	Kab. Parigi Moutong	1.573.256.022	276.398.655	0	225.190.420	0	830.218.255	133.334.511	1.465.141.841
372	Kab. Sigi	766.777.804	276.398.655	0	70.141.280	0	178.789.177	133.334.511	658.663.623
373	Kab. Tojo Una Una	1.482.762.332	276.398.655	0	278.672.480	0	686.242.505	133.334.511	1.374.648.151
374	Provinsi Sulawesi Selatan	7.002.537.550	0	0	6.917.573.195	0	84.964.355	0	7.002.537.550
375	Kab. Bantaeng	823.767.512	0	0	574.930.616	0	7.388.204	133.334.511	715.653.331
376	Kab. Barru	852.791.918	0	0	585.810.616	0	25.532.610	133.334.511	744.677.737

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
377	Kab. Bone	885.447.096	0	0	636.610.200	0	7.388.204	133.334.511	777.332.915
378	Kab. Bulukumba	823.767.512	0	0	574.930.616	0	7.388.204	133.334.511	715.653.331
379	Kab. Enrekang	835.728.034	0	0	584.843.416	0	9.435.926	133.334.511	727.613.853
380	Kab. Gowa	823.767.512	0	0	574.930.616	0	7.388.204	133.334.511	715.653.331
381	Kab. Jeneponto	826.063.832	0	0	577.226.936	0	7.388.204	133.334.511	717.949.651
382	Kab. Luwu	950.197.714	0	0	697.862.056	0	10.886.966	133.334.511	842.083.533
383	Kab. Luwu Utara	925.314.068	0	0	664.521.656	0	19.343.720	133.334.511	817.199.887
384	Kab. Maros	831.991.992	0	0	583.155.096	0	7.388.204	133.334.511	723.877.811
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	836.232.280	0	0	587.395.384	0	7.388.204	133.334.511	728.118.099
386	Kab. Pinrang	823.767.512	0	0	574.930.616	0	7.388.204	133.334.511	715.653.331
387	Kab. Selayar	823.767.512	0	0	574.930.616	0	7.388.204	133.334.511	715.653.331
388	Kab. Sidenreng Rappang	860.067.469	0	0	608.991.416	0	9.627.361	133.334.511	751.953.288
389	Kab. Sinjai	829.300.952	0	0	580.464.056	0	7.388.204	133.334.511	721.186.771
390	Kab. Soppeng	823.767.512	0	0	574.930.616	0	7.388.204	133.334.511	715.653.331
391	Kab. Takalar	829.689.872	0	0	580.852.976	0	7.388.204	133.334.511	721.575.691
392	Kab. Tana Toraja	883.231.045	0	0	634.296.672	0	7.485.681	133.334.511	775.116.864
393	Kab. Wajo	826.150.872	0	0	577.313.976	0	7.388.204	133.334.511	718.036.691
394	Kota Pare-pare	823.767.512	0	0	574.930.616	0	7.388.204	133.334.511	715.653.331
395	Kab. Toraja Utara	843.657.811	0	0	594.365.121	0	7.843.998	133.334.511	735.543.630
396	Kota Makassar	835.734.861	0	0	574.930.616	0	19.355.553	133.334.511	727.620.680
397	Kota Palopo	846.981.592	0	0	598.144.696	0	7.388.204	133.334.511	738.867.411
398	Kab. Luwu Timur	15.345.497.801	0	0	14.215.903.472	0	888.145.637	133.334.511	15.237.383.620
399	Provinsi Sulawesi Barat	337.070.452	0	0	6.810.680	0	330.259.772	0	337.070.452
400	Kab. Majene	366.578.578	0	0	0	0	125.129.886	133.334.511	258.464.397
401	Kab. Mamuju	3.217.631.558	0	0	22.621.920	0	2.953.560.946	133.334.511	3.109.517.377
402	Kab. Polewali Mandar	369.778.578	0	0	3.200.000	0	125.129.886	133.334.511	261.664.397
403	Kab. Mamasa	367.999.378	0	0	1.420.800	0	125.129.886	133.334.511	259.885.197
404	Kab. Mamuju Utara	418.230.279	0	0	0	0	176.781.587	133.334.511	310.116.098
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	7.085.438.441	0	0	6.907.745.991	0	177.692.450	0	7.085.438.441
406	Kab. Buton	2.666.378.845	0	0	1.896.784.523	0	528.145.630	133.334.511	2.558.264.664
407	Kab. Konawe	2.308.435.067	0	0	1.759.676.537	0	307.309.838	133.334.511	2.200.320.886
408	Kab. Kolaka	11.556.711.284	0	0	11.075.341.056	0	239.921.536	133.334.511	11.448.597.103
409	Kab. Muna	1.631.338.996	0	0	1.170.268.417	0	219.621.887	133.334.511	1.523.224.815
410	Kota Kendari	1.449.230.918	0	0	1.170.268.417	0	37.513.809	133.334.511	1.341.116.737
411	Kota Bau-bau	1.444.024.828	0	0	1.170.268.417	0	32.307.717	133.334.511	1.335.910.645
412	Kab. Konawe Selatan	2.797.193.350	0	0	2.473.219.930	0	82.524.728	133.334.511	2.689.079.169
413	Kab. Bombana	2.221.397.123	0	0	1.940.290.659	0	39.657.772	133.334.511	2.113.282.942
414	Kab. Konawe Utara	2.369.539.666	0	0	2.088.012.378	0	40.078.596	133.334.511	2.261.425.485
415	Kab. Buton Utara	1.616.193.542	0	0	1.203.095.457	0	171.649.393	133.334.511	1.508.079.361
416	Kab. Wakatobi	1.444.024.828	0	0	1.170.268.417	0	32.307.717	133.334.511	1.335.910.645
417	Kab. Kolaka Utara	3.291.536.255	0	0	1.290.990.867	0	1.759.096.696	133.334.511	3.183.422.074
418	Provinsi Bali	0	0	0	0	0	0	0	0
419	Kab. Badung	241.448.692	0	0	0	0	0	133.334.511	133.334.511
420	Kab. Bangli	241.448.692	0	0	0	0	0	133.334.511	133.334.511
421	Kab. Buleleng	241.448.692	0	0	0	0	0	133.334.511	133.334.511
422	Kab. Gianyar	241.448.692	0	0	0	0	0	133.334.511	133.334.511
423	Kab. Jembrana	241.448.692	0	0	0	0	0	133.334.511	133.334.511

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424	Kab. Karangasem	241.448.692	0	0	0	0	0	133.334.511	133.334.511
425	Kab. Klungkung	241.448.692	0	0	0	0	0	133.334.511	133.334.511
426	Kab. Tabanan	241.448.692	0	0	0	0	0	133.334.511	133.334.511
427	Kota Denpasar	241.448.692	0	0	0	0	0	133.334.511	133.334.511
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	45.454.117.945	0	0	45.441.420.779	0	12.697.166	0	45.454.117.945
429	Kab. Bima	10.535.890.093	0	0	10.131.727.322	0	162.714.079	133.334.511	10.427.775.912
430	Kab. Dompu	10.398.173.836	0	0	10.077.416.445	0	79.308.699	133.334.511	10.290.059.655
431	Kab. Lombok Barat	10.255.535.288	0	0	10.011.083.005	0	3.003.591	133.334.511	10.147.421.107
432	Kab. Lombok Tengah	10.244.908.252	0	0	10.000.621.565	0	2.837.995	133.334.511	10.136.794.071
433	Kab. Lombok Timur	10.240.922.167	0	0	9.996.670.205	0	2.803.270	133.334.511	10.132.807.986
434	Kab. Sumbawa	11.035.459.126	0	0	10.750.322.750	0	43.687.684	133.334.511	10.927.344.945
435	Kota Mataram	10.247.344.597	0	0	9.996.670.205	0	9.225.700	133.334.511	10.139.230.416
436	Kab. Lombok Utara	10.240.922.167	0	0	9.996.670.205	0	2.803.270	133.334.511	10.132.807.986
437	Kota Bima	10.253.722.167	0	0	10.009.470.205	0	2.803.270	133.334.511	10.145.607.986
438	Kab. Sumbawa Barat	91.344.009.667	0	0	90.873.489.413	0	229.071.562	133.334.511	91.235.895.486
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	246.218.438	0	0	199.480.580	0	46.737.858	0	246.218.438
440	Kab. Alor	299.719.729	0	0	24.610.090	0	33.660.947	133.334.511	191.605.548
441	Kab. Belu	488.260.700	0	0	242.138.223	0	4.673.785	133.334.511	380.146.519
442	Kab. Ende	315.835.022	0	0	29.915.690	0	44.470.640	133.334.511	207.720.841
443	Kab. Flores Timur	263.659.491	0	0	15.010.090	0	7.200.709	133.334.511	155.545.310
444	Kab. Kupang	261.132.567	0	0	15.010.090	0	4.673.785	133.334.511	153.018.386
445	Kab. Lembata	261.132.567	0	0	15.010.090	0	4.673.785	133.334.511	153.018.386
446	Kab. Manggarai	292.009.005	0	0	45.886.528	0	4.673.785	133.334.511	183.894.824
447	Kab. Ngada	261.132.567	0	0	15.010.090	0	4.673.785	133.334.511	153.018.386
448	Kab. Sikka	277.071.190	0	0	15.010.090	0	20.612.408	133.334.511	168.957.009
449	Kab. Sumba Barat	261.245.047	0	0	15.010.090	0	4.786.265	133.334.511	153.130.866
450	Kab. Sumba Timur	262.572.459	0	0	15.010.090	0	6.113.677	133.334.511	154.458.278
451	Kab. Timor Tengah Selatan	269.745.767	0	0	23.623.290	0	4.673.785	133.334.511	161.631.586
452	Kab. Timor Tengah Utara	261.132.567	0	0	15.010.090	0	4.673.785	133.334.511	153.018.386
453	Kota Kupang	261.132.567	0	0	15.010.090	0	4.673.785	133.334.511	153.018.386
454	Kab. Rote Ndao	285.853.207	0	0	39.730.730	0	4.673.785	133.334.511	177.739.026
455	Kab. Nagekeo	261.132.567	0	0	15.010.090	0	4.673.785	133.334.511	153.018.386
456	Kab. Sumba Tengah	261.132.567	0	0	15.010.090	0	4.673.785	133.334.511	153.018.386
457	Kab. Sumba Barat Daya	261.132.567	0	0	15.010.090	0	4.673.785	133.334.511	153.018.386
458	Kab. Manggarai Timur	389.194.681	0	0	143.072.204	0	4.673.785	133.334.511	281.080.500
459	Kab. Sabu Raijua	261.132.567	0	0	15.010.090	0	4.673.785	133.334.511	153.018.386
460	Kab. Manggarai Barat	309.018.180	0	0	62.895.703	0	4.673.785	133.334.511	200.903.999
461	Provinsi Maluku	3.999.111.586	143.254.400	0	381.869.351	0	3.473.987.835	0	3.999.111.586
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	6.617.537.371	28.650.400	0	83.252.406	0	6.264.185.873	133.334.511	6.509.423.190
463	Kab. Maluku Tengah	4.199.428.594	28.650.400	0	76.001.566	0	3.853.327.936	133.334.511	4.091.314.413
464	Kab. Maluku Tenggara	644.879.538	28.650.400	0	76.098.046	0	298.682.400	133.334.511	536.765.357
465	Kab. Pulau Buru	11.106.080.488	28.650.400	0	74.882.046	0	10.761.099.350	133.334.511	10.997.966.307
466	Kota Ambon	639.655.655	28.650.400	0	74.882.046	0	294.674.517	133.334.511	531.541.474
467	Kab. Seram Bagian Barat	1.673.706.523	28.650.400	0	91.118.966	0	1.312.488.465	133.334.511	1.565.592.342
468	Kab. Seram Bagian Timur	5.066.973.770	286.509.200	0	74.882.046	0	4.464.133.832	133.334.511	4.958.859.589
469	Kab. Maluku Barat Daya	1.340.270.195	28.650.400	0	775.998.553	0	294.172.550	133.334.511	1.232.156.014
470	Kab. Buru Selatan	4.244.955.082	28.650.400	0	74.882.046	0	3.899.973.944	133.334.511	4.136.840.901

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
471	Kab. Kepulauan Aru	1.029.155.962	28.650.400	0	74.882.046	0	684.174.824	133.334.511	921.041.781
472	Kota Tual	639.153.688	28.650.400	0	74.882.046	0	294.172.550	133.334.511	531.039.507
473	Provinsi Maluku Utara	28.897.510.054	0	0	24.905.566.739	0	3.991.943.315	0	28.897.510.054
474	Kab. Halmahera Tengah	9.868.051.166	0	0	6.276.908.376	0	3.349.694.098	133.334.511	9.759.936.985
475	Kab. Halmahera Barat	6.961.342.615	0	0	6.157.928.496	0	561.965.427	133.334.511	6.853.228.434
476	Kota Ternate	6.795.165.604	0	0	6.151.610.416	0	402.106.496	133.334.511	6.687.051.423
477	Kab. Halmahera Timur	38.458.732.076	0	0	29.013.249.423	0	9.204.033.961	133.334.511	38.350.617.895
478	Kota Tidore Kepulauan	7.969.221.231	0	0	6.151.610.416	0	1.576.162.123	133.334.511	7.861.107.050
479	Kab. Kepulauan Sula	10.301.458.989	0	0	6.441.790.864	0	3.618.219.433	133.334.511	10.193.344.808
480	Kab. Pulau Morotai	9.026.880.882	0	0	6.151.610.416	0	2.633.821.774	133.334.511	8.918.766.701
481	Kab. Halmahera Selatan	34.643.786.407	0	0	16.348.588.854	0	18.053.748.861	133.334.511	34.535.672.226
482	Kab. Halmahera Utara	19.316.174.238	0	0	17.060.585.737	0	2.014.139.809	133.334.511	19.208.060.057
483	Kab. Yalimo	20.365.591.242	0	0	19.362.709.762	0	761.432.788	133.334.511	20.257.477.061
484	Kab. Lanny Jaya	20.365.591.242	0	0	19.362.709.762	0	761.432.788	133.334.511	20.257.477.061
485	Provinsi Papua	283.894.838.286	0	0	271.596.598.248	0	12.298.240.038	0	283.894.838.286
486	Kab. Biak Numfor	20.398.668.563	0	0	19.362.709.762	0	794.510.109	133.334.511	20.290.554.382
487	Kab. Jayapura	22.714.490.145	0	0	19.362.820.402	0	3.090.221.051	133.334.511	22.606.375.964
488	Kab. Jayawijaya	20.410.006.842	0	0	19.407.125.362	0	761.432.788	133.334.511	20.301.892.661
489	Kab. Merauke	22.880.908.262	0	0	19.362.709.762	0	3.276.749.808	133.334.511	22.772.794.081
490	Kab. Mimika	554.171.981.396	0	0	542.771.999.565	0	11.158.533.139	133.334.511	554.063.867.215
491	Kab. Nabire	25.031.349.093	0	0	19.598.781.282	0	5.191.119.119	133.334.511	24.923.234.912
492	Kab. Paniai	20.789.793.235	0	0	19.786.911.755	0	761.432.788	133.334.511	20.681.679.054
493	Kab. Puncak Jaya	20.437.137.076	0	0	19.424.460.984	0	771.227.400	133.334.511	20.329.022.895
494	Kab. Kepulauan Yapen	20.421.443.200	0	0	19.365.907.842	0	814.086.666	133.334.511	20.313.329.019
495	Kota Jayapura	20.365.591.242	0	0	19.362.709.762	0	761.432.788	133.334.511	20.257.477.061
496	Kab. Sarmi	32.606.400.337	0	0	19.756.274.105	0	12.608.677.540	133.334.511	32.498.286.156
497	Kab. Keerom	22.511.092.078	0	0	19.587.912.716	0	2.681.730.670	133.334.511	22.402.977.897
498	Kab. Yahukimo	20.365.591.242	0	0	19.362.709.762	0	761.432.788	133.334.511	20.257.477.061
499	Kab. Pegunungan Bintang	20.452.539.415	0	0	19.449.657.935	0	761.432.788	133.334.511	20.344.425.234
500	Kab. Tolikara	20.438.840.522	0	0	19.435.959.042	0	761.432.788	133.334.511	20.330.726.341
501	Kab. Boven Digoel	40.471.908.846	0	0	19.362.709.762	0	20.867.750.392	133.334.511	40.363.794.665
502	Kab. Mappi	20.425.670.586	0	0	19.362.709.762	0	821.512.132	133.334.511	20.317.556.405
503	Kab. Asmat	21.178.745.359	0	0	19.362.709.762	0	1.574.586.905	133.334.511	21.070.631.178
504	Kab. Waropen	21.110.666.490	0	0	19.405.628.162	0	1.463.589.636	133.334.511	21.002.552.309
505	Kab. Mamberamo Raya	37.956.197.008	0	0	19.362.709.762	0	18.352.038.554	133.334.511	37.848.082.827
506	Kab. Mamberamo Tengah	20.365.591.242	0	0	19.362.709.762	0	761.432.788	133.334.511	20.257.477.061
507	Kab. Nduga	20.365.591.242	0	0	19.362.709.762	0	761.432.788	133.334.511	20.257.477.061
508	Kab. Dogiyai	20.365.591.242	0	0	19.362.709.762	0	761.432.788	133.334.511	20.257.477.061
509	Kab. Intan Jaya	20.365.591.242	0	0	19.362.709.762	0	761.432.788	133.334.511	20.257.477.061
510	Kab. Puncak	20.365.591.242	0	0	19.362.709.762	0	761.432.788	133.334.511	20.257.477.061
511	Kab. Deiyai	20.365.591.242	0	0	19.362.709.762	0	761.432.788	133.334.511	20.257.477.061
512	Kab. Supiori	20.365.591.242	0	0	19.362.709.762	0	761.432.788	133.334.511	20.257.477.061
513	Provinsi Papua Barat	397.830.267.386	318.728.970.154	67.171.108.864	1.226.740.970	0	10.703.447.398	0	397.830.267.386
514	Kab. Sorong	45.441.829.171	34.065.491.019	2.054.456.301	266.476.362	0	8.813.956.797	133.334.511	45.333.714.990
515	Kab. Manokwari	10.648.459.372	4.919.391.215	1.752.289.796	246.276.442	0	3.489.053.227	133.334.511	10.540.345.191
516	Kab. Fak Fak	12.765.077.161	4.919.391.215	1.752.289.796	250.180.442	0	5.601.767.016	133.334.511	12.656.962.980
517	Kota Sorong	8.734.195.484	4.919.391.215	1.752.289.796	234.660.442	0	1.586.405.339	133.334.511	8.626.081.303

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
518	Kab. Sorong Selatan	10.589.128.837	4.919.391.215	1.752.289.796	242.289.242	0	3.433.709.892	133.334.511	10.481.014.656
519	Kab. Raja Ampat	23.177.633.534	14.710.630.829	1.752.289.796	2.503.736.945	0	3.969.527.272	133.334.511	23.069.519.353
520	Kab. Teluk Bintuni	48.240.884.014	7.308.731.235	17.220.731.459	239.580.762	0	23.230.391.866	133.334.511	48.132.769.833
521	Kab. Teluk Wondama	13.170.150.165	4.919.391.215	1.752.289.796	234.660.442	0	6.022.360.020	133.334.511	13.062.035.984
522	Kab. Tambrauw	7.041.977.707	3.227.173.438	1.752.289.796	234.660.442	0	1.586.405.339	133.334.511	6.933.863.526
523	Kab. Maybrat	7.041.977.707	3.227.173.438	1.752.289.796	234.660.442	0	1.586.405.339	133.334.511	6.933.863.526
524	Kab. Kaimana	26.947.951.195	4.919.391.215	1.752.289.796	363.415.642	0	19.671.405.850	133.334.511	26.839.837.014
524	Dana Cadangan	8.320.317.858.560	4.936.894.367.491	2.943.063.372.864	147.148.734.227	0	293.211.383.978	53.732.747.113	8.374.050.605.673
JUMLAH		45.165.724.598.146	20.567.117.652.257	14.629.244.504.747	7.790.420.800.000	305.837.001.838	1.753.104.639.304	120.000.000.000	45.165.724.598.146

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	944.768.813	417.177.065
2	Kab. Aceh Barat	52.487.156	23.176.503
3	Kab. Aceh Besar	52.487.156	23.176.503
4	Kab. Aceh Selatan	52.487.156	23.176.503
5	Kab. Aceh Singkil	52.487.156	23.176.503
6	Kab. Aceh Tengah	251.938.350	111.247.217
7	Kab. Aceh Tenggara	52.487.156	23.176.503
8	Kab. Aceh Timur	52.487.156	23.176.503
9	Kab. Aceh Utara	52.487.156	23.176.503
10	Kab. Bireun	52.487.156	23.176.503
11	Kab. Pidie	251.938.350	251.938.350
12	Kab. Simeulue	52.487.156	23.176.503
13	Kota Banda Aceh	52.487.156	23.176.503
14	Kota Sabang	52.487.156	52.487.156
15	Kota Langsa	52.487.156	23.176.503
16	Kota Lhokseumawe	52.487.156	23.176.503
17	Kab. Nagan Raya	52.487.156	23.176.503
18	Kab. Aceh Jaya	52.487.156	23.176.503
19	Kab. Pidie Jaya	251.938.350	111.247.217
20	Kab. Aceh Barat Daya	52.487.156	23.176.503
21	Kab. Gayo Lues	251.938.350	111.247.217
22	Kab. Aceh Tamiang	52.487.156	23.176.503
23	Kab. Bener Meriah	251.938.350	111.247.217
24	Kota Subulussalam	52.487.156	23.176.503
25	Provinsi Sumatera Utara	3.116.113.902	3.116.113.902
26	Kab. Asahan	150.000.000	75.000.000
27	Kab. Dairi	450.000.000	450.000.000
28	Kab. Deli Serdang	228.500.000	228.500.000
29	Kab. Tanah Karo	855.000.000	855.000.000
30	Kab. Labuhan Batu	120.000.000	120.000.000
31	Kab. Langkat	169.500.000	169.500.000
32	Kab. Mandailing Natal	122.000.000	61.000.000
33	Kab. Nias	49.100.000	0
34	Kab. Simalungun	809.818.537	809.818.537
35	Kab. Tapanuli Selatan	118.327.173	118.327.173
36	Kab. Tapanuli Tengah	118.000.000	59.000.000
37	Kab. Tapanuli Utara	800.000.000	800.000.000
38	Kab. Toba Samosir	107.824.730	53.912.365
39	Kota Binjai	118.000.000	59.000.000
40	Kota Medan	270.462.000	270.462.000
41	Kota Pematang Siantar	900.000.000	900.000.000
42	Kota Sibolga	100.000.000	100.000.000
43	Kota Tanjung Balai	110.000.000	55.000.000
44	Kab. Batu Bara	116.000.000	116.000.000
45	Kab. Labuhan Batu Utara	120.000.000	120.000.000
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	117.000.000	117.000.000
47	Kab. Padang Lawas Utara	110.000.000	55.000.000
48	Kab. Padang Lawas	110.000.000	110.000.000
49	Kab. Nias Utara	49.100.000	39.280.000
50	Kab. Nias Barat	49.100.000	49.100.000
51	Kota Tebing Tinggi	110.000.000	110.000.000
52	Kota Padang Sidempuan	110.000.000	55.000.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
53	Kab. Pakpak Bharat	100.000.000	100.000.000
54	Kab. Nias Selatan	49.100.000	0
55	Kab. Humbang Hasundutan	340.000.000	170.000.000
56	Kab. Serdang Bedagai	145.000.000	145.000.000
57	Kab. Samosir	100.000.000	100.000.000
58	Kota Gunung sitoli	49.100.000	39.280.000
59	Provinsi Sumatera Barat	1.525.309.799	1.525.309.799
60	Kab. Limapuluh Kota	524.436.648	524.436.648
61	Kab. Agam	80.279.463	80.279.463
62	Kab. Kepulauan Mentawai	80.279.463	36.044.868
63	Kab. Padang Pariaman	80.279.463	36.044.868
64	Kab. Pasaman	80.279.463	80.279.463
65	Kab. Pesisir Selatan	80.279.463	80.279.463
66	Kab. Sijunjung	80.279.463	36.044.868
67	Kab. Solok	450.410.450	450.410.450
68	Kab. Tanah Datar	468.176.738	468.176.738
69	Kota Bukit Tinggi	80.279.463	36.044.868
70	Kota Padang Panjang	80.279.463	36.044.868
71	Kota Padang	80.279.463	80.279.463
72	Kota Payakumbuh	483.968.993	217.298.401
73	Kota Sawahlunto	508.150.884	508.150.884
74	Kota Solok	80.279.463	80.279.463
75	Kota Pariaman	80.279.463	36.044.868
76	Kab. Pasaman Barat	80.279.463	36.044.868
77	Kab. Dharmasraya	80.279.463	80.279.463
78	Kab. Solok Selatan	80.279.463	36.044.868
79	Provinsi Riau	0	0
80	Kab. Bengkalis	0	0
81	Kab. Indragiri Hilir	0	0
82	Kab. Indragiri Hulu	0	0
83	Kab. Kampar	0	0
84	Kab. Kuantan Singingi	0	0
85	Kab. Pelalawan	0	0
86	Kab. Rokan Hilir	0	0
87	Kab. Rokan Hulu	0	0
88	Kab. Siak	0	0
89	Kota Dumai	0	0
90	Kota Pekanbaru	0	0
91	Kab. Kepulauan Meranti	0	0
92	Provinsi Kepulauan Riau	0	0
93	Kab. Bintan	0	0
94	Kab. Natuna	0	0
95	Kab. Karimun	0	0
96	Kota Batam	0	0
97	Kab. Kepulauan Anambas	0	0
98	Kota Tanjung Pinang	0	0
99	Kab. Lingga	0	0
100	Provinsi Jambi	728.585.299	728.585.299
101	Kab. Batanghari	72.858.529	31.865.336
102	Kab. Bungo	72.858.529	31.865.336
103	Kab. Kerinci	971.447.065	971.447.065
104	Kab. Merangin	72.858.529	31.865.336

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
105	Kab. Muaro Jambi	72.858.529	31.865.336
106	Kab. Sarolangun	72.858.529	31.865.336
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	72.858.529	31.865.336
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	72.858.529	31.865.336
109	Kab. Tebo	72.858.529	31.865.336
110	Kota Jambi	72.858.529	72.858.529
111	Kota Sungai Penuh	72.858.529	31.865.336
112	Provinsi Sumatera Selatan	612.371.544	612.371.544
113	Kab. Lahat	40.824.769	17.689.953
114	Kab. Musi Banyuasin	40.824.769	17.689.953
115	Kab. Musi Rawas	40.824.769	17.689.953
116	Kab. Muara Enim	40.824.769	40.824.769
117	Kab. Ogan Komering Ilir	204.123.848	204.123.848
118	Kab. Ogan Komering Ulu	40.824.769	17.689.953
119	Kota Palembang	40.824.769	17.689.953
120	Kota Pagar Alam	40.824.769	17.689.953
121	Kota Lubuk Linggau	204.123.848	204.123.848
122	Kota Prabumulih	40.824.769	17.689.953
123	Kab. Empat Lawang	40.824.769	17.689.953
124	Kab. Banyuasin	40.824.769	17.689.953
125	Kab. Ogan Ilir	204.123.848	88.449.768
126	Kab. OKU Timur	40.824.769	17.689.953
127	Kab. OKU Selatan	367.422.926	367.422.926
128	Provinsi Bangka Belitung	0	0
129	Kab. Bangka	0	0
130	Kab. Belitung	0	0
131	Kota Pangkal Pinang	0	0
132	Kab. Bangka Selatan	0	0
133	Kab. Bangka Tengah	0	0
134	Kab. Bangka Barat	0	0
135	Kab. Belitung Timur	0	0
136	Provinsi Bengkulu	0	0
137	Kab. Bengkulu Selatan	0	0
138	Kab. Bengkulu Utara	0	0
139	Kab. Rejang Lebong	0	0
140	Kota Bengkulu	0	0
141	Kab. Kaur	0	0
142	Kab. Seluma	0	0
143	Kab. Mukomuko	0	0
144	Kab. Lebong	0	0
145	Kab. Bengkulu Tengah	0	0
146	Kab. Kepahiang	0	0
147	Provinsi Lampung	617.984.263	617.984.263
148	Kab. Lampung Barat	52.970.080	52.970.080
149	Kab. Lampung Selatan	98.093.838	98.093.838
150	Kab. Lampung Tengah	272.422.150	272.422.150
151	Kab. Lampung Utara	65.919.674	65.919.674
152	Kab. Lampung Timur	255.507.911	255.507.911
153	Kab. Tanggamus	182.044.588	182.044.588
154	Kab. Tulang Bawang	52.970.080	52.970.080
155	Kab. Way Kanan	63.719.403	63.719.403
156	Kab. Pesawaran	99.665.992	99.665.992

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
157	Kab. Pringsewu	86.769.243	86.769.243
158	Kab. Mesuji	52.970.080	52.970.080
159	Kab. Tulang Bawang Barat	52.970.080	52.970.080
160	Kota Bandar Lampung	52.970.080	52.970.080
161	Kota Metro	52.970.080	52.970.080
162	Provinsi DKI Jakarta	1.462.854.078	731.427.038
163	Provinsi Jawa Barat	22.792.262.746	22.792.262.746
164	Kab. Bandung	1.876.229.071	1.876.229.071
165	Kab. Bekasi	10.045.283.977	10.045.283.977
166	Kab. Bogor	717.766.876	717.766.876
167	Kab. Ciamis	2.915.536.759	2.915.536.759
168	Kab. Cianjur	946.221.865	946.221.865
169	Kab. Cirebon	1.549.327.688	1.549.327.688
170	Kab. Garut	4.944.281.532	4.944.281.532
171	Kab. Indramayu	845.635.711	845.635.711
172	Kab. Karawang	5.843.733.706	5.843.733.706
173	Kab. Kuningan	1.011.183.141	1.011.183.141
174	Kab. Majalengka	3.036.602.199	1.394.417.112
175	Kab. Purwakarta	845.635.711	845.635.711
176	Kab. Subang	717.766.876	717.766.876
177	Kab. Sukabumi	841.869.925	841.869.925
178	Kab. Sumedang	4.726.553.370	4.726.553.370
179	Kab. Tasikmalaya	938.689.516	938.689.516
180	Kab. Bandung Barat	790.947.849	790.947.849
181	Kota Bandung	926.635.943	926.635.943
182	Kota Bekasi	845.635.711	845.635.711
183	Kota Bogor	795.811.056	276.513.528
184	Kota Cirebon	3.834.943.008	3.834.943.008
185	Kota Depok	902.867.793	902.867.793
186	Kota Sukabumi	728.132.381	728.132.381
187	Kota Cimahi	717.766.876	717.766.876
188	Kota Tasikmalaya	915.623.584	915.623.584
189	Kota Banjar	921.264.274	921.264.274
190	Provinsi Banten	888.869.500	711.095.600
191	Kab. Lebak	155.552.000	124.441.600
192	Kab. Pandeglang	155.552.000	124.441.600
193	Kab. Serang	811.638.600	649.310.880
194	Kab. Tangerang	155.552.000	155.552.000
195	Kota Cilegon	155.552.000	124.441.600
196	Kota Tangerang	155.552.000	124.441.600
197	Kota Serang	329.078.319	263.262.653
198	Kota Tangerang Selatan	155.552.000	124.441.600
199	Provinsi Jawa Tengah	84.466.694.463	84.466.694.463
200	Kab. Banjarnegara	2.778.037.164	2.778.037.164
201	Kab. Banyumas	2.617.719.858	2.617.719.858
202	Kab. Batang	3.024.343.586	3.024.343.586
203	Kab. Blora	3.437.841.872	3.437.841.872
204	Kab. Boyolali	4.896.051.744	4.896.051.744
205	Kab. Brebes	2.585.356.122	2.585.356.122
206	Kab. Cilacap	2.580.936.711	2.580.936.711
207	Kab. Demak	6.154.913.594	6.154.913.594
208	Kab. Grobogan	4.299.782.288	4.299.782.288

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
209	Kab. Jepara	8.201.479.217	8.201.479.217
210	Kab. Karanganyar	3.575.983.409	3.575.983.409
211	Kab. Kebumen	2.998.624.999	2.998.624.999
212	Kab. Kendal	13.542.622.168	13.542.622.168
213	Kab. Klaten	7.159.262.823	7.159.262.823
214	Kab. Kudus	53.262.539.632	53.262.539.632
215	Kab. Magelang	5.871.835.101	5.871.835.101
216	Kab. Pati	3.094.533.556	3.094.533.556
217	Kab. Pekalongan	2.576.014.761	2.576.014.761
218	Kab. Pemalang	3.053.800.959	3.053.800.959
219	Kab. Purbalingga	2.908.153.942	2.908.153.942
220	Kab. Purworejo	2.892.490.149	2.892.490.149
221	Kab. Rembang	2.610.345.886	2.610.345.886
222	Kab. Semarang	3.069.709.097	3.069.709.097
223	Kab. Sragen	2.660.282.067	2.660.282.067
224	Kab. Sukoharjo	3.006.863.903	3.006.863.903
225	Kab. Tegal	2.901.688.439	2.901.688.439
226	Kab. Temanggung	14.894.592.811	14.894.592.811
227	Kab. Wonogiri	2.605.904.165	2.605.904.165
228	Kab. Wonosobo	4.671.895.894	4.671.895.894
229	Kota Magelang	2.578.508.681	2.578.508.681
230	Kota Pekalongan	3.058.175.250	3.058.175.250
231	Kota Salatiga	2.953.248.896	2.953.248.896
232	Kota Semarang	5.311.289.543	5.311.289.543
233	Kota Surakarta	2.679.902.390	2.679.902.390
234	Kota Tegal	2.574.223.069	2.574.223.069
235	Provinsi DI Yogyakarta	5.430.387.193	5.430.387.193
236	Kab. Bantul	3.620.258.129	3.620.258.129
237	Kab. Gunung Kidul	1.810.129.064	1.810.129.064
238	Kab. Kulon Progo	2.715.193.597	2.715.193.597
239	Kab. Sleman	2.534.180.690	2.534.180.690
240	Kota Yogyakarta	1.991.141.971	1.991.141.971
241	Provinsi Jawa Timur	200.557.261.711	200.557.261.711
242	Kab. Bangkalan	5.394.594.384	5.394.594.384
243	Kab. Banyuwangi	5.695.228.665	5.695.228.665
244	Kab. Blitar	9.110.283.801	9.110.283.801
245	Kab. Bojonegoro	17.810.706.569	17.810.706.569
246	Kab. Bondowoso	9.409.083.969	9.409.083.969
247	Kab. Gresik	5.493.023.603	5.493.023.603
248	Kab. Jember	9.789.918.571	9.789.918.571
249	Kab. Jombang	9.668.038.748	9.668.038.748
250	Kab. Kediri	45.324.684.399	45.324.684.399
251	Kab. Lamongan	8.508.391.929	8.508.391.929
252	Kab. Lumajang	6.449.907.288	6.449.907.288
253	Kab. Madiun	6.550.703.442	6.550.703.442
254	Kab. Magetan	6.088.352.403	6.088.352.403
255	Kab. Malang	28.832.915.011	28.832.915.011
256	Kab. Mojokerto	7.014.750.496	7.014.750.496
257	Kab. Nganjuk	9.944.118.495	9.944.118.495
258	Kab. Ngawi	8.567.837.389	8.567.837.389
259	Kab. Pacitan	6.135.650.108	6.135.650.108
260	Kab. Pamekasan	20.737.524.565	20.737.524.565

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
261	Kab. Pasuruan	43.726.683.363	43.726.683.363
262	Kab. Ponorogo	6.505.408.535	6.505.408.535
263	Kab. Probolinggo	11.712.431.828	11.712.431.828
264	Kab. Sampang	6.941.265.079	6.941.265.079
265	Kab. Sidoarjo	10.856.144.512	10.856.144.512
266	Kab. Situbondo	6.243.990.090	6.243.990.090
267	Kab. Sumenep	14.487.542.815	14.487.542.815
268	Kab. Trenggalek	6.227.106.682	6.227.106.682
269	Kab. Tuban	6.892.427.387	6.892.427.387
270	Kab. Tulungagung	11.675.872.318	11.675.872.318
271	Kota Blitar	6.102.750.720	6.102.750.720
272	Kota Kediri	45.897.795.222	45.897.795.222
273	Kota Madiun	5.498.187.052	5.498.187.052
274	Kota Malang	19.749.235.151	19.749.235.151
275	Kota Mojokerto	6.126.264.442	6.126.264.442
276	Kota Pasuruan	6.197.717.370	6.197.717.370
277	Kota Probolinggo	5.407.037.755	5.407.037.755
278	Kota Surabaya	15.537.370.414	15.537.370.414
279	Kota Batu	5.655.999.467	5.655.999.467
280	Provinsi Kalimantan Barat	0	0
281	Kab. Bengkayang	0	0
282	Kab. Landak	0	0
283	Kab. Kapuas Hulu	0	0
284	Kab. Ketapang	0	0
285	Kab. Pontianak	0	0
286	Kab. Sambas	0	0
287	Kab. Sanggau	0	0
288	Kab. Sintang	0	0
289	Kota Pontianak	0	0
290	Kota Singkawang	0	0
291	Kab. Kayong Utara	0	0
292	Kab. Kubu Raya	0	0
293	Kab. Sekadau	0	0
294	Kab. Melawi	0	0
295	Provinsi Kalimantan Tengah	482.294.309	241.147.153
296	Kab. Barito Selatan	37.099.562	18.549.780
297	Kab. Barito Utara	37.099.562	18.549.780
298	Kab. Kapuas	37.099.562	18.549.780
299	Kab. Kotawaringin Barat	37.099.562	18.549.780
300	Kab. Kotawaringin Timur	37.099.562	18.549.780
301	Kota Palangkaraya	37.099.562	18.549.780
302	Kab. Barito Timur	37.099.562	18.549.780
303	Kab. Murung Raya	37.099.562	18.549.780
304	Kab. Pulang Pisau	643.059.079	321.529.538
305	Kab. Gunung Mas	37.099.562	18.549.780
306	Kab. Lamandau	37.099.562	18.549.780
307	Kab. Sukamara	37.099.562	18.549.780
308	Kab. Katingan	37.099.562	18.549.780
309	Kab. Seruyan	37.099.562	18.549.780
310	Provinsi Kalimantan Selatan	0	0
311	Kab. Banjar	0	0
312	Kab. Barito Kuala	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	0
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0
315	Kab. Hulu Sungai Utara	0	0
316	Kab. Kotabaru	0	0
317	Kab. Tabalong	0	0
318	Kab. Tanah Laut	0	0
319	Kab. Tapin	0	0
320	Kota Banjarbaru	0	0
321	Kota Banjarmasin	0	0
322	Kab. Balangan	0	0
323	Kab. Tanah Bumbu	0	0
324	Provinsi Kalimantan Timur	470.392.711	470.392.711
325	Kab. Berau	36.184.054	18.092.026
326	Kab. Bulungan	36.184.054	18.092.026
327	Kab. Kutai Kartanegara	36.184.054	18.092.026
328	Kab. Kutai Barat	36.184.054	18.092.026
329	Kab. Kutai Timur	36.184.054	18.092.026
330	Kab. Malinau	36.184.054	18.092.026
331	Kab. Nunukan	36.184.054	18.092.026
332	Kab. Pasir	36.184.054	18.092.026
333	Kota Balikpapan	627.190.282	313.595.140
334	Kota Bontang	36.184.054	18.092.026
335	Kab. Tana Tidung	36.184.054	18.092.026
336	Kota Samarinda	36.184.054	18.092.026
337	Kota Tarakan	36.184.054	18.092.026
338	Kab. Penajam Paser Utara	36.184.054	18.092.026
339	Provinsi Sulawesi Utara	0	0
340	Kab. Bolaang Mongondow	0	0
341	Kab. Minahasa	0	0
342	Kab. Sangihe	0	0
343	Kota Bitung	0	0
344	Kota Manado	0	0
345	Kab. Kepulauan Talaud	0	0
346	Kab. Minahasa Selatan	0	0
347	Kab. Minahasa Tenggara	0	0
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	0	0
349	Kota Kotamubagu	0	0
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	0
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0
352	Kota Tomohon	0	0
353	Kab. Minahasa Utara	0	0
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	0
355	Provinsi Gorontalo	0	0
356	Kab. Boalemo	0	0
357	Kab. Gorontalo	0	0
358	Kota Gorontalo	0	0
359	Kab. Pohuwato	0	0
360	Kab. Gorontalo Utara	0	0
361	Kab. Bone Bolango	0	0
362	Provinsi Sulawesi Tengah	0	0
363	Kab. Banggai	0	0
364	Kab. Banggai Kepulauan	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
365	Kab. Buol	0	0
366	Kab. Toli-Toli	0	0
367	Kab. Donggala	0	0
368	Kab. Morowali	0	0
369	Kab. Poso	0	0
370	Kota Palu	0	0
371	Kab. Parigi Moutong	0	0
372	Kab. Sigi	0	0
373	Kab. Tojo Una Una	0	0
374	Provinsi Sulawesi Selatan	2.518.464.812	2.518.464.812
375	Kab. Bantaeng	108.786.898	108.786.898
376	Kab. Barru	141.904.325	141.904.325
377	Kab. Bone	795.010.792	795.010.792
378	Kab. Bulukumba	104.936.034	47.463.496
379	Kab. Enrekang	104.936.034	104.936.034
380	Kab. Gowa	104.936.034	104.936.034
381	Kab. Jeneponto	104.936.034	47.463.496
382	Kab. Luwu	104.936.034	104.936.034
383	Kab. Luwu Utara	104.936.034	104.936.034
384	Kab. Maros	104.936.034	47.463.496
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	104.936.034	47.463.496
386	Kab. Pinrang	104.936.034	104.936.034
387	Kab. Selayar	104.936.034	104.936.034
388	Kab. Sidenreng Rappang	104.936.034	104.936.034
389	Kab. Sinjai	449.973.415	449.973.415
390	Kab. Soppeng	1.999.921.983	904.582.415
391	Kab. Takalar	104.936.034	104.936.034
392	Kab. Tana Toraja	104.936.034	104.936.034
393	Kab. Wajo	228.856.034	228.856.034
394	Kota Pare-pare	104.936.034	47.463.496
395	Kab. Toraja Utara	104.936.034	104.936.034
396	Kota Makassar	368.051.870	166.473.118
397	Kota Palopo	104.936.034	104.936.034
398	Kab. Luwu Timur	104.936.034	104.936.034
399	Provinsi Sulawesi Barat	0	0
400	Kab. Majene	0	0
401	Kab. Mamuju	0	0
402	Kab. Polewali Mandar	0	0
403	Kab. Mamasa	0	0
404	Kab. Mamuju Utara	0	0
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	0	0
406	Kab. Buton	0	0
407	Kab. Konawe	0	0
408	Kab. Kolaka	0	0
409	Kab. Muna	0	0
410	Kota Kendari	0	0
411	Kota Bau-bau	0	0
412	Kab. Konawe Selatan	0	0
413	Kab. Bombana	0	0
414	Kab. Konawe Utara	0	0
415	Kab. Buton Utara	0	0
416	Kab. Wakatobi	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
417	Kab. Kolaka Utara	0	0
418	Provinsi Bali	2.655.218.544	2.655.218.544
419	Kab. Badung	295.024.283	295.024.283
420	Kab. Bangli	315.203.943	315.203.943
421	Kab. Buleleng	3.491.553.380	3.491.553.380
422	Kab. Gianyar	606.569.925	606.569.925
423	Kab. Jembrana	295.024.283	295.024.283
424	Kab. Karangasem	307.061.273	307.061.273
425	Kab. Klungkung	295.024.283	295.024.283
426	Kab. Tabanan	295.024.283	295.024.283
427	Kota Denpasar	295.024.283	295.024.283
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	35.793.886.258	35.793.886.258
429	Kab. Bima	6.139.616.714	6.139.616.714
430	Kab. Dompu	3.108.729.428	3.108.729.428
431	Kab. Lombok Barat	8.804.511.972	8.804.511.972
432	Kab. Lombok Tengah	11.881.288.867	11.881.288.867
433	Kab. Lombok Timur	35.843.892.810	35.843.892.810
434	Kab. Sumbawa	6.056.029.433	6.056.029.433
435	Kota Mataram	5.300.722.504	2.429.776.547
436	Kab. Lombok Utara	3.044.565.474	3.044.565.474
437	Kota Bima	1.895.791.070	1.895.791.070
438	Kab. Sumbawa Barat	1.443.919.662	1.443.919.662
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	777.275.160	777.275.160
440	Kab. Alor	40.909.219	17.774.668
441	Kab. Belu	51.818.344	51.818.344
442	Kab. Ende	40.909.219	17.774.668
443	Kab. Flores Timur	40.909.219	17.774.668
444	Kab. Kupang	40.909.219	17.774.668
445	Kab. Lembata	40.909.219	17.774.668
446	Kab. Manggarai	40.909.219	17.774.668
447	Kab. Ngada	40.909.219	17.774.668
448	Kab. Sikka	984.548.535	426.592.053
449	Kab. Sumba Barat	40.909.219	17.774.668
450	Kab. Sumba Timur	40.909.219	17.774.668
451	Kab. Timor Tengah Selatan	40.909.219	17.774.668
452	Kab. Timor Tengah Utara	40.909.219	17.774.668
453	Kota Kupang	40.909.219	17.774.668
454	Kab. Rote Ndao	40.909.219	17.774.668
455	Kab. Nagekeo	40.909.219	17.774.668
456	Kab. Sumba Tengah	40.909.219	17.774.668
457	Kab. Sumba Barat Daya	40.909.219	17.774.668
458	Kab. Manggarai Timur	40.909.219	17.774.668
459	Kab. Sabu Raijua	40.909.219	17.774.668
460	Kab. Manggarai Barat	40.909.219	17.774.668
461	Provinsi Maluku	0	0
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	0	0
463	Kab. Maluku Tengah	0	0
464	Kab. Maluku Tenggara	0	0
465	Kab. Pulau Buru	0	0
466	Kota Ambon	0	0
467	Kab. Seram Bagian Barat	0	0
468	Kab. Seram Bagian Timur	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
469	Kab. Maluku Barat Daya	0	0
470	Kab. Buru Selatan	0	0
471	Kab. Kepulauan Aru	0	0
472	Kota Tual	0	0
473	Provinsi Maluku Utara	0	0
474	Kab. Halmahera Tengah	0	0
475	Kab. Halmahera Barat	0	0
476	Kota Ternate	0	0
477	Kab. Halmahera Timur	0	0
478	Kota Tidore Kepulauan	0	0
479	Kab. Kepulauan Sula	0	0
480	Kab. Pulau Morotai	0	0
481	Kab. Halmahera Selatan	0	0
482	Kab. Halmahera Utara	0	0
483	Kab. Yalimo	0	0
484	Kab. Lanny Jaya	0	0
485	Provinsi Papua	0	0
486	Kab. Biak Numfor	0	0
487	Kab. Jayapura	0	0
488	Kab. Jayawijaya	0	0
489	Kab. Merauke	0	0
490	Kab. Mimika	0	0
491	Kab. Nabire	0	0
492	Kab. Paniai	0	0
493	Kab. Puncak Jaya	0	0
494	Kab. Kepulauan Yapen	0	0
495	Kota Jayapura	0	0
496	Kab. Sarmi	0	0
497	Kab. Keerom	0	0
498	Kab. Yahukimo	0	0
499	Kab. Pegunungan Bintang	0	0
500	Kab. Tolikara	0	0
501	Kab. Boven Digoel	0	0
502	Kab. Mappi	0	0
503	Kab. Asmat	0	0
504	Kab. Waropen	0	0
505	Kab. Mamberamo Raya	0	0
506	Kab. Mamberamo Tengah	0	0
507	Kab. Nduga	0	0
508	Kab. Dogiyai	0	0
509	Kab. Intan Jaya	0	0
510	Kab. Puncak	0	0
511	Kab. Deiyai	0	0
512	Kab. Supiori	0	0
513	Provinsi Papua Barat	0	0
514	Kab. Sorong	0	0
515	Kab. Manokwari	0	0
516	Kab. Fak Fak	0	0
517	Kota Sorong	0	0
518	Kab. Sorong Selatan	0	0
519	Kab. Raja Ampat	0	0
520	Kab. Teluk Bintuni	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
521	Kab. Teluk Wondama	0	0
522	Kab. Tambrauw	0	0
523	Kab. Maybrat	0	0
524	Kab. Kaimana	0	0
524	Dana Cadangan	0	0
JUMLAH		1.216.056.657.586	1.202.111.025.283

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	621.431.612.000	621.431.612.000
2	Kab. Aceh Barat	316.982.375.800	316.982.375.800
3	Kab. Aceh Besar	409.154.439.200	409.154.439.200
4	Kab. Aceh Selatan	339.306.762.600	339.306.762.600
5	Kab. Aceh Singkil	216.215.162.600	216.215.162.600
6	Kab. Aceh Tengah	328.282.554.600	328.282.554.600
7	Kab. Aceh Tenggara	308.213.423.800	308.213.423.800
8	Kab. Aceh Timur	371.698.135.400	371.698.135.400
9	Kab. Aceh Utara	268.061.024.200	268.061.024.200
10	Kab. Bireun	417.816.439.200	417.816.439.200
11	Kab. Pidie	447.301.512.600	447.301.512.600
12	Kab. Simeulue	220.907.252.400	220.907.252.400
13	Kota Banda Aceh	352.171.414.400	352.171.414.400
14	Kota Sabang	217.687.391.400	217.687.391.400
15	Kota Langsa	243.169.476.400	243.169.476.400
16	Kota Lhokseumawe	264.506.766.000	264.506.766.000
17	Kab. Nagan Raya	295.083.002.800	295.083.002.800
18	Kab. Aceh Jaya	204.206.912.200	204.206.912.200
19	Kab. Pidie Jaya	226.625.119.200	226.625.119.200
20	Kab. Aceh Barat Daya	239.696.639.200	239.696.639.200
21	Kab. Gayo Lues	242.902.934.000	242.902.934.000
22	Kab. Aceh Tamiang	254.279.483.400	254.279.483.400
23	Kab. Bener Meriah	242.331.033.200	242.331.033.200
24	Kota Subulussalam	164.641.825.000	164.641.825.000
25	Provinsi Sumatera Utara	813.233.489.000	813.233.489.000
26	Kab. Asahan	505.170.575.000	505.170.575.000
27	Kab. Dairi	344.529.866.400	343.729.256.640
28	Kab. Deli Serdang	821.706.722.600	821.706.722.600
29	Kab. Tanah Karo	421.964.431.200	421.964.431.200
30	Kab. Labuhan Batu	330.254.631.800	330.254.631.800
31	Kab. Langkat	655.701.432.800	655.701.432.800
32	Kab. Mandailing Natal	414.902.640.000	414.902.640.000
33	Kab. Nias	153.113.521.200	153.113.521.200
34	Kab. Simalungun	676.489.615.000	676.489.615.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	338.409.534.400	338.409.534.400
36	Kab. Tapanuli Tengah	324.965.956.600	324.965.956.600
37	Kab. Tapanuli Utara	384.432.837.800	384.432.837.800
38	Kab. Toba Samosir	291.865.017.400	291.865.017.400
39	Kota Binjai	310.408.044.800	310.408.044.800
40	Kota Medan	829.156.452.400	829.156.452.400
41	Kota Pematang Siantar	333.300.176.600	333.300.176.600
42	Kota Sibolga	227.216.241.600	227.216.241.600
43	Kota Tanjung Balai	245.287.994.400	245.287.994.400
44	Kab. Batu Bara	348.425.561.800	348.425.561.800
45	Kab. Labuhan Batu Utara	312.454.233.400	312.454.233.400
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	259.206.516.800	259.206.516.800
47	Kab. Padang Lawas Utara	243.969.546.000	243.969.546.000
48	Kab. Padang Lawas	243.076.975.200	243.076.975.200
49	Kab. Nias Utara	109.596.654.000	109.079.958.000
50	Kab. Nias Barat	63.749.596.200	63.749.596.200
51	Kota Tebing Tinggi	239.645.806.200	239.645.806.200
52	Kota Padang Sidempuan	285.580.961.200	285.580.961.200
53	Kab. Pakpak Bharat	169.174.202.600	169.174.202.600
54	Kab. Nias Selatan	278.245.224.200	278.245.224.200
55	Kab. Humbang Hasundutan	290.244.199.200	290.244.199.200

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
56	Kab. Serdang Bedagai	424.251.816.400	424.251.816.400
57	Kab. Samsir	250.324.617.200	250.324.617.200
58	Kota Gunung sitoli	100.936.064.600	100.936.064.600
59	Provinsi Sumatera Barat	661.617.385.000	661.617.385.000
60	Kab. Limapuluh Kota	431.798.294.800	431.798.294.800
61	Kab. Agam	461.800.777.600	461.800.777.600
62	Kab. Kepulauan Mentawai	290.049.329.000	290.049.329.000
63	Kab. Padang Pariaman	444.608.028.000	444.608.028.000
64	Kab. Pasaman	338.503.554.600	338.503.554.600
65	Kab. Pesisir Selatan	480.270.975.000	480.270.975.000
66	Kab. Sijunjung	302.755.103.200	302.755.103.200
67	Kab. Solok	415.421.036.000	415.421.036.000
68	Kab. Tanah Datar	424.535.477.200	424.535.477.200
69	Kota Bukit Tinggi	250.060.280.800	250.060.280.800
70	Kota Padang Panjang	211.241.947.400	211.241.947.400
71	Kota Padang	673.952.788.200	673.952.788.200
72	Kota Payakumbuh	256.579.668.200	256.579.668.200
73	Kota Sawahlunto	209.158.158.600	209.158.158.600
74	Kota Solok	218.281.809.600	218.281.809.600
75	Kota Pariaman	248.926.344.400	248.926.344.400
76	Kab. Pasaman Barat	350.371.158.800	350.371.158.800
77	Kab. Dharmasraya	266.175.621.200	266.175.621.200
78	Kab. Solok Selatan	238.799.063.600	238.799.063.600
79	Provinsi Riau	58.869.157.000	58.869.157.000
80	Kab. Bengkalis	19.210.131.600	9.605.065.800
81	Kab. Indragiri Hilir	378.481.235.800	378.481.235.800
82	Kab. Indragiri Hulu	236.426.908.600	236.426.908.600
83	Kab. Kampar	159.844.480.200	159.844.480.200
84	Kab. Kuantan Singingi	263.602.236.200	263.602.236.200
85	Kab. Pelalawan	191.671.267.800	191.671.267.800
86	Kab. Rokan Hilir	8.956.879.200	8.956.879.200
87	Kab. Rokan Hulu	214.240.139.600	214.240.139.600
88	Kab. Siak	11.135.464.800	11.135.464.800
89	Kota Dumai	98.760.161.800	98.760.161.800
90	Kota Pekanbaru	319.722.094.000	319.722.094.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	4.968.880.800	4.968.880.800
92	Provinsi Kepulauan Riau	310.161.843.000	310.161.843.000
93	Kab. Bintan	113.470.739.000	113.470.739.000
94	Kab. Natuna	769.366.800	769.366.800
95	Kab. Karimun	83.388.239.800	83.388.239.800
96	Kota Batam	234.211.037.800	234.211.037.800
97	Kab. Kepulauan Anambas	213.130.152.800	213.130.152.800
98	Kota Tanjung Pinang	189.806.289.000	189.806.289.000
99	Kab. Lingga	134.663.305.600	134.663.305.600
100	Provinsi Jambi	489.069.421.000	489.069.421.000
101	Kab. Batanghari	297.563.692.800	297.563.692.800
102	Kab. Bungo	325.242.322.200	325.242.322.200
103	Kab. Kerinci	341.481.894.200	341.481.894.200
104	Kab. Merangin	360.317.419.000	360.317.419.000
105	Kab. Muaro Jambi	321.457.951.600	321.457.951.600
106	Kab. Sarolangun	310.577.267.600	310.577.267.600
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	221.315.240.200	221.315.240.200
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	244.056.180.400	244.056.180.400
109	Kab. Tebo	293.116.197.600	293.116.197.600
110	Kota Jambi	413.068.530.400	413.068.530.400

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
111	Kota Sungai Penuh	248.291.723.000	248.291.723.000
112	Provinsi Sumatera Selatan	512.083.577.000	512.083.577.000
113	Kab. Lahat	356.133.799.400	356.133.799.400
114	Kab. Musi Banyuasin	89.368.534.200	89.368.534.200
115	Kab. Musi Rawas	349.208.956.400	349.208.956.400
116	Kab. Muara Enim	379.268.439.200	379.243.364.200
117	Kab. Ogan Komering Ilir	562.735.874.400	562.735.874.400
118	Kab. Ogan Komering Ulu	316.706.336.200	316.706.336.200
119	Kota Palembang	751.817.370.200	751.817.370.200
120	Kota Pagar Alam	183.312.634.400	183.312.634.400
121	Kota Lubuk Linggau	219.553.589.200	219.553.589.200
122	Kota Prabumulih	196.080.921.200	196.080.921.200
123	Kab. Empat Lawang	194.613.140.800	194.613.140.800
124	Kab. Banyuasin	464.591.959.000	464.591.959.000
125	Kab. Ogan Ilir	294.174.512.400	294.174.512.400
126	Kab. OKU Timur	389.124.933.400	389.124.933.400
127	Kab. OKU Selatan	262.435.728.600	262.435.728.600
128	Provinsi Bangka Belitung	410.811.433.000	410.811.433.000
129	Kab. Bangka	280.882.840.200	280.882.840.200
130	Kab. Belitung	244.998.857.000	244.998.857.000
131	Kota Pangkal Pinang	245.275.470.000	245.275.470.000
132	Kab. Bangka Selatan	229.810.112.000	229.810.112.000
133	Kab. Bangka Tengah	207.063.234.200	207.063.234.200
134	Kab. Bangka Barat	221.722.059.600	221.722.059.600
135	Kab. Belitung Timur	227.608.212.200	227.608.212.200
136	Provinsi Bengkulu	523.041.290.000	523.041.290.000
137	Kab. Bengkulu Selatan	298.385.446.200	298.385.446.200
138	Kab. Bengkulu Utara	337.631.399.600	337.631.399.600
139	Kab. Rejang Lebong	346.012.770.200	346.012.770.200
140	Kota Bengkulu	366.972.886.000	366.972.886.000
141	Kab. Kaur	222.303.742.800	222.303.742.800
142	Kab. Seluma	263.764.287.400	263.764.287.400
143	Kab. Mukomuko	258.159.153.800	258.159.153.800
144	Kab. Lebong	222.225.862.000	222.225.862.000
145	Kab. Bengkulu Tengah	212.404.814.000	212.404.814.000
146	Kab. Kepahiang	238.966.934.800	238.966.934.800
147	Provinsi Lampung	643.748.209.000	643.748.209.000
148	Kab. Lampung Barat	368.073.836.800	368.073.836.800
149	Kab. Lampung Selatan	541.936.251.200	541.936.251.200
150	Kab. Lampung Tengah	782.924.214.600	782.924.214.600
151	Kab. Lampung Utara	497.459.671.200	497.459.671.200
152	Kab. Lampung Timur	602.457.162.800	602.457.162.800
153	Kab. Tanggamus	388.060.862.000	388.060.862.000
154	Kab. Tulang Bawang	265.900.711.400	265.900.711.400
155	Kab. Way Kanan	328.485.408.800	328.485.408.800
156	Kab. Pesawaran	360.916.279.200	360.916.279.200
157	Kab. Pringsewu	250.986.681.800	250.986.681.800
158	Kab. Mesuji	114.277.524.400	114.277.524.400
159	Kab. Tulang Bawang Barat	141.102.520.400	141.102.520.400
160	Kota Bandar Lampung	612.331.420.800	612.331.420.800
161	Kota Metro	256.711.022.800	256.711.022.800
162	Provinsi DKI Jakarta	447.570.978.000	447.570.978.000
163	Provinsi Jawa Barat	1.086.123.940.000	1.086.123.940.000
164	Kab. Bandung	1.223.635.910.400	1.223.635.910.400
165	Kab. Bekasi	562.659.511.200	549.722.883.600

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
166	Kab. Bogor	1.179.297.531.800	1.179.297.531.800
167	Kab. Ciamis	935.684.843.400	935.684.843.400
168	Kab. Cianjur	947.429.071.400	947.429.071.400
169	Kab. Cirebon	939.754.225.000	939.754.225.000
170	Kab. Garut	1.132.674.419.600	1.132.674.419.600
171	Kab. Indramayu	782.462.654.200	782.462.654.200
172	Kab. Karawang	773.556.766.400	773.556.766.400
173	Kab. Kuningan	707.636.781.400	707.636.781.400
174	Kab. Majalengka	717.458.878.600	717.458.878.600
175	Kab. Purwakarta	489.097.673.400	489.097.673.400
176	Kab. Subang	712.690.907.000	712.690.907.000
177	Kab. Sukabumi	940.361.609.000	940.361.609.000
178	Kab. Sumedang	678.436.882.600	678.436.882.600
179	Kab. Tasikmalaya	898.551.109.200	898.551.109.200
180	Kab. Bandung Barat	632.637.155.800	632.637.155.800
181	Kota Bandung	997.018.087.600	997.018.087.600
182	Kota Bekasi	700.862.569.000	700.862.569.000
183	Kota Bogor	472.330.478.200	472.330.478.200
184	Kota Cirebon	387.272.086.000	387.272.086.000
185	Kota Depok	490.836.643.000	490.836.643.000
186	Kota Sukabumi	314.420.182.400	314.420.182.400
187	Kota Cimahi	358.675.377.600	358.675.377.600
188	Kota Tasikmalaya	482.853.557.600	482.853.557.600
189	Kota Banjar	228.891.105.000	228.891.105.000
190	Provinsi Banten	381.979.019.000	381.979.019.000
191	Kab. Lebak	655.633.732.600	655.633.732.600
192	Kab. Pandeglang	695.077.858.800	695.077.858.800
193	Kab. Serang	596.018.029.000	596.018.029.000
194	Kab. Tangerang	689.957.246.000	689.957.246.000
195	Kota Cilegon	296.903.709.800	296.903.709.800
196	Kota Tangerang	521.842.451.600	521.842.451.600
197	Kota Serang	338.089.697.200	338.089.697.200
198	Kota Tangerang Selatan	228.858.482.200	228.858.482.200
199	Provinsi Jawa Tengah	1.168.787.757.000	1.168.787.757.000
200	Kab. Banjarnegara	549.086.241.800	549.086.241.800
201	Kab. Banyumas	800.041.886.200	800.041.886.200
202	Kab. Batang	456.612.490.400	456.612.490.400
203	Kab. Blora	534.933.753.200	534.933.753.200
204	Kab. Boyolali	644.295.188.400	644.295.188.400
205	Kab. Brebes	793.388.633.600	793.388.633.600
206	Kab. Cilacap	858.494.805.000	858.494.805.000
207	Kab. Demak	537.774.633.000	537.774.633.000
208	Kab. Grobogan	661.591.243.000	661.591.243.000
209	Kab. Jepara	560.339.065.400	560.339.065.400
210	Kab. Karanganyar	578.136.510.000	578.136.510.000
211	Kab. Kebumen	694.508.132.000	694.508.132.000
212	Kab. Kendal	562.410.928.800	562.410.928.800
213	Kab. Klaten	794.578.500.600	794.578.500.600
214	Kab. Kudus	490.320.602.000	490.320.602.000
215	Kab. Magelang	646.745.005.000	646.377.044.600
216	Kab. Pati	672.718.577.600	672.718.577.600
217	Kab. Pekalongan	522.140.126.800	522.140.126.800
218	Kab. Pemalang	663.014.059.200	663.014.059.200
219	Kab. Purbalingga	501.264.927.000	501.264.927.000
220	Kab. Purworejo	574.223.951.400	574.223.951.400

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
221	Kab. Rembang	440.690.920.400	440.690.920.400
222	Kab. Semarang	558.841.094.600	558.841.094.600
223	Kab. Sragen	616.163.268.000	616.163.268.000
224	Kab. Sukoharjo	555.737.150.800	555.737.150.800
225	Kab. Tegal	675.986.636.000	675.986.636.000
226	Kab. Temanggung	466.954.701.800	466.954.701.800
227	Kab. Wonogiri	678.144.131.800	678.144.131.800
228	Kab. Wonosobo	472.257.259.000	472.257.259.000
229	Kota Magelang	276.055.277.800	276.055.277.800
230	Kota Pekalongan	283.186.129.400	283.186.129.400
231	Kota Salatiga	254.304.885.400	254.304.885.400
232	Kota Semarang	705.127.046.400	705.127.046.400
233	Kota Surakarta	499.448.133.400	499.448.133.400
234	Kota Tegal	264.765.972.800	264.765.972.800
235	Provinsi DI Yogyakarta	527.471.247.000	527.471.247.000
236	Kab. Bantul	650.155.374.600	650.155.374.600
237	Kab. Gunung Kidul	569.064.300.000	569.064.300.000
238	Kab. Kulon Progo	452.814.382.400	452.814.382.400
239	Kab. Sleman	633.902.186.000	633.902.186.000
240	Kota Yogyakarta	451.151.248.000	451.151.248.000
241	Provinsi Jawa Timur	1.212.934.765.000	1.212.934.765.000
242	Kab. Bangkalan	540.673.349.200	540.673.349.200
243	Kab. Banyuwangi	847.492.863.600	847.492.863.600
244	Kab. Blitar	722.624.807.000	722.624.807.000
245	Kab. Bojonegoro	671.334.015.600	671.334.015.600
246	Kab. Bondowoso	514.798.736.800	514.798.736.800
247	Kab. Gresik	583.049.464.000	583.049.464.000
248	Kab. Jember	1.039.957.302.600	1.039.957.302.600
249	Kab. Jombang	671.161.730.000	671.161.730.000
250	Kab. Kediri	774.913.365.200	774.913.365.200
251	Kab. Lamongan	709.600.468.000	709.600.468.000
252	Kab. Lumajang	610.913.701.000	610.913.701.000
253	Kab. Madiun	536.676.840.200	536.676.840.200
254	Kab. Magetan	549.786.853.000	549.786.853.000
255	Kab. Malang	1.098.661.082.600	1.098.661.082.600
256	Kab. Mojokerto	580.883.953.600	580.883.953.600
257	Kab. Nganjuk	670.500.978.800	670.500.978.800
258	Kab. Ngawi	643.199.832.200	643.199.832.200
259	Kab. Pacitan	481.331.149.800	481.331.149.800
260	Kab. Pamekasan	499.085.171.400	499.085.171.400
261	Kab. Pasuruan	729.083.219.800	729.083.219.800
262	Kab. Ponorogo	630.179.321.400	630.179.321.400
263	Kab. Probolinggo	626.027.473.600	626.027.473.600
264	Kab. Sampang	481.054.292.600	481.054.292.600
265	Kab. Sidoarjo	757.504.208.800	757.504.208.800
266	Kab. Situbondo	472.502.542.800	472.502.542.800
267	Kab. Sumenep	615.333.252.800	615.333.252.800
268	Kab. Trenggalek	540.329.789.400	540.329.789.400
269	Kab. Tuban	620.235.218.000	620.235.218.000
270	Kab. Tulungagung	693.321.595.200	693.321.595.200
271	Kota Blitar	243.943.484.200	243.943.484.200
272	Kota Kediri	454.620.546.000	454.620.546.000
273	Kota Madiun	302.447.711.200	302.447.711.200
274	Kota Malang	563.889.870.600	563.889.870.600
275	Kota Mojokerto	257.373.151.800	257.373.151.800

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
276	Kota Pasuruan	249.303.313.800	249.303.313.800
277	Kota Probolinggo	290.981.302.200	290.981.302.200
278	Kota Surabaya	835.287.608.800	835.287.608.800
279	Kota Batu	247.723.360.200	247.723.360.200
280	Provinsi Kalimantan Barat	755.123.093.000	755.123.093.000
281	Kab. Bengkayang	299.274.116.600	299.274.116.600
282	Kab. Landak	367.083.662.800	367.083.662.800
283	Kab. Kapuas Hulu	546.078.567.000	546.078.567.000
284	Kab. Ketapang	619.806.637.400	619.487.360.500
285	Kab. Pontianak	325.156.483.000	325.156.483.000
286	Kab. Sambas	482.155.137.600	482.155.137.600
287	Kab. Sanggau	455.606.872.600	455.606.872.600
288	Kab. Sintang	502.847.227.800	502.847.227.800
289	Kota Pontianak	444.371.697.200	444.371.697.200
290	Kota Singkawang	280.422.238.800	280.422.238.800
291	Kab. Kayong Utara	223.601.687.600	223.601.687.600
292	Kab. Kubu Raya	433.422.105.000	433.422.105.000
293	Kab. Sekadau	259.458.088.600	259.458.088.600
294	Kab. Melawi	292.648.748.400	292.648.748.400
295	Provinsi Kalimantan Tengah	707.880.493.000	707.880.493.000
296	Kab. Barito Selatan	339.596.562.800	339.596.562.800
297	Kab. Barito Utara	321.201.548.000	321.201.548.000
298	Kab. Kapuas	522.570.329.800	522.570.329.800
299	Kab. Kotawaringin Barat	379.204.727.000	379.204.727.000
300	Kab. Kotawaringin Timur	470.518.625.600	470.518.625.600
301	Kota Palangkaraya	367.567.690.400	367.567.690.400
302	Kab. Barito Timur	277.430.008.000	277.430.008.000
303	Kab. Murung Raya	395.082.859.800	395.082.859.800
304	Kab. Pulang Pisau	313.339.013.600	313.339.013.600
305	Kab. Gunung Mas	315.616.269.000	315.616.269.000
306	Kab. Lamandau	260.004.608.000	260.004.608.000
307	Kab. Sukamara	261.276.285.000	261.276.285.000
308	Kab. Katingan	404.510.175.200	404.510.175.200
309	Kab. Seruyan	363.382.718.800	363.382.718.800
310	Provinsi Kalimantan Selatan	458.074.767.000	458.074.767.000
311	Kab. Banjar	393.755.205.000	393.755.205.000
312	Kab. Barito Kuala	328.105.160.200	328.105.160.200
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	298.470.960.200	298.470.960.200
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	302.340.001.200	302.340.001.200
315	Kab. Hulu Sungai Utara	258.793.619.200	258.793.619.200
316	Kab. Kotabaru	340.691.069.200	340.691.069.200
317	Kab. Tabalong	282.236.091.200	282.236.091.200
318	Kab. Tanah Laut	292.241.151.200	292.241.151.200
319	Kab. Tapin	254.504.141.800	254.415.342.760
320	Kota Banjarbaru	235.182.585.600	235.182.585.600
321	Kota Banjarmasin	439.927.336.800	439.927.336.800
322	Kab. Balangan	195.206.828.600	195.206.828.600
323	Kab. Tanah Bumbu	252.177.318.600	252.177.318.600
324	Provinsi Kalimantan Timur	0	0
325	Kab. Berau	164.695.125.600	164.695.125.600
326	Kab. Bulungan	80.305.973.600	80.305.973.600
327	Kab. Kutai Kartanegara	13.217.901.600	6.608.950.800
328	Kab. Kutai Barat	255.580.769.400	253.913.410.200
329	Kab. Kutai Timur	75.503.620.600	75.503.620.600
330	Kab. Malinau	312.829.517.800	312.829.517.800

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
331	Kab. Nunukan	47.858.848.200	47.858.848.200
332	Kab. Pasir	34.375.424.600	34.375.424.600
333	Kota Balikpapan	95.150.851.200	95.150.851.200
334	Kota Bontang	7.061.665.200	7.061.665.200
335	Kab. Tana Tidung	218.453.383.000	218.453.383.000
336	Kota Samarinda	207.354.105.200	207.354.105.200
337	Kota Tarakan	6.744.158.400	6.744.158.400
338	Kab. Penajam Paser Utara	4.247.486.400	4.247.486.400
339	Provinsi Sulawesi Utara	558.781.013.000	558.781.013.000
340	Kab. Bolaang Mongondow	301.394.051.600	301.394.051.600
341	Kab. Minahasa	397.191.946.000	397.191.946.000
342	Kab. Sangihe	296.202.858.800	296.202.858.800
343	Kota Bitung	282.649.195.000	282.649.195.000
344	Kota Manado	444.428.892.600	444.428.892.600
345	Kab. Kepulauan Talaud	262.554.054.200	262.554.054.200
346	Kab. Minahasa Selatan	307.735.304.200	307.735.304.200
347	Kab. Minahasa Tenggara	225.841.502.600	225.841.502.600
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	227.049.391.400	227.049.391.400
349	Kota Kotamubagu	213.137.048.200	213.137.048.200
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	162.326.169.800	162.326.169.800
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	177.072.187.000	177.072.187.000
352	Kota Tomohon	227.537.155.200	227.537.155.200
353	Kab. Minahasa Utara	277.333.823.800	277.333.823.800
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	208.479.442.400	208.479.442.400
355	Provinsi Gorontalo	400.750.820.000	400.750.820.000
356	Kab. Boalemo	225.103.085.000	225.103.085.000
357	Kab. Gorontalo	364.530.100.400	364.530.100.400
358	Kota Gorontalo	289.600.354.200	289.600.354.200
359	Kab. Pohuwato	255.781.973.400	255.781.973.400
360	Kab. Gorontalo Utara	189.125.973.600	189.125.973.600
361	Kab. Bone Bolango	251.362.396.600	251.362.396.600
362	Provinsi Sulawesi Tengah	659.331.271.000	659.331.271.000
363	Kab. Banggai	474.875.782.600	474.875.782.600
364	Kab. Banggai Kepulauan	273.612.923.000	273.612.923.000
365	Kab. Buol	299.404.077.200	299.404.077.200
366	Kab. Toli-Toli	328.842.935.200	328.842.935.200
367	Kab. Donggala	365.522.159.200	365.522.159.200
368	Kab. Morowali	403.220.159.200	403.220.159.200
369	Kab. Poso	401.372.748.200	401.372.748.200
370	Kota Palu	416.086.931.400	416.086.931.400
371	Kab. Parigi Moutong	399.451.988.200	399.451.988.200
372	Kab. Sigi	343.319.367.200	343.319.367.200
373	Kab. Tojo Una Una	279.930.752.400	279.930.752.400
374	Provinsi Sulawesi Selatan	706.276.399.000	706.276.399.000
375	Kab. Bantaeng	251.964.918.400	251.964.918.400
376	Kab. Barru	286.743.814.600	286.743.814.600
377	Kab. Bone	597.267.763.000	597.267.763.000
378	Kab. Bulukumba	412.846.671.000	412.846.671.000
379	Kab. Enrekang	289.700.895.000	289.700.895.000
380	Kab. Gowa	466.007.569.000	466.007.569.000
381	Kab. Jeneponto	336.711.106.600	336.711.106.600
382	Kab. Luwu	366.703.274.200	366.703.274.200
383	Kab. Luwu Utara	353.215.039.200	353.215.039.200
384	Kab. Maros	350.796.634.600	350.796.634.600
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	379.971.024.600	379.971.024.600

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
386	Kab. Pinrang	390.317.644.600	390.317.644.600
387	Kab. Selayar	269.922.267.000	269.922.267.000
388	Kab. Sidenreng Rappang	346.377.254.800	346.377.254.800
389	Kab. Sinjai	321.212.098.200	321.212.098.200
390	Kab. Soppeng	362.038.646.400	362.038.646.400
391	Kab. Takalar	319.339.990.400	319.339.990.400
392	Kab. Tana Toraja	317.041.750.400	317.041.750.400
393	Kab. Wajo	403.140.439.400	403.140.439.400
394	Kota Pare-pare	261.930.518.200	261.930.518.200
395	Kab. Toraja Utara	264.232.098.600	264.232.098.600
396	Kota Makassar	730.545.006.200	730.545.006.200
397	Kota Palopo	278.587.486.600	278.587.486.600
398	Kab. Luwu Timur	250.734.954.400	250.734.954.400
399	Provinsi Sulawesi Barat	405.749.577.000	405.749.577.000
400	Kab. Majene	276.931.694.200	276.931.694.200
401	Kab. Mamuju	400.865.314.400	400.865.314.400
402	Kab. Polewali Mandar	377.964.527.800	377.964.527.800
403	Kab. Mamasa	248.591.197.600	248.591.197.600
404	Kab. Mamuju Utara	211.459.723.000	211.459.723.000
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	595.762.419.000	595.762.419.000
406	Kab. Buton	372.435.520.400	372.435.520.400
407	Kab. Konawe	427.940.262.000	427.940.262.000
408	Kab. Kolaka	357.237.206.200	357.237.206.200
409	Kab. Muna	425.909.204.400	425.909.204.400
410	Kota Kendari	365.596.305.000	365.596.305.000
411	Kota Bau-bau	287.043.004.200	287.043.004.200
412	Kab. Konawe Selatan	366.666.100.800	366.666.100.800
413	Kab. Bombana	245.269.683.000	245.269.683.000
414	Kab. Konawe Utara	265.844.915.000	265.844.915.000
415	Kab. Buton Utara	219.288.106.000	219.288.106.000
416	Kab. Wakatobi	213.725.699.200	213.725.699.200
417	Kab. Kolaka Utara	246.806.698.400	246.806.698.400
418	Provinsi Bali	489.942.535.000	489.942.535.000
419	Kab. Badung	164.151.005.200	164.151.005.200
420	Kab. Bangli	310.679.700.800	310.679.700.800
421	Kab. Buleleng	570.137.970.400	570.137.970.400
422	Kab. Gianyar	424.459.932.400	424.459.932.400
423	Kab. Jembrana	331.769.232.400	331.769.232.400
424	Kab. Karangasem	407.329.707.600	407.329.707.600
425	Kab. Klungkung	302.789.219.800	302.789.219.800
426	Kab. Tabanan	469.572.301.200	469.572.301.200
427	Kota Denpasar	378.176.237.600	378.176.237.600
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	573.406.755.000	573.406.755.000
429	Kab. Bima	485.618.953.800	485.618.953.800
430	Kab. Dompu	327.074.276.600	327.074.276.600
431	Kab. Lombok Barat	445.247.762.400	445.247.762.400
432	Kab. Lombok Tengah	581.610.186.000	581.610.186.000
433	Kab. Lombok Timur	665.301.398.400	665.301.398.400
434	Kab. Sumbawa	463.799.797.400	463.799.797.400
435	Kota Mataram	358.308.234.400	358.308.234.400
436	Kab. Lombok Utara	239.004.473.000	239.004.473.000
437	Kota Bima	268.003.625.600	268.003.625.600
438	Kab. Sumbawa Barat	189.892.686.600	189.892.686.600
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	674.635.569.000	674.635.569.000
440	Kab. Alor	303.871.123.000	303.871.123.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
441	Kab. Belu	406.044.391.400	406.044.391.400
442	Kab. Ende	341.146.623.000	341.146.623.000
443	Kab. Flores Timur	319.829.578.400	319.829.578.400
444	Kab. Kupang	352.191.939.600	352.191.939.600
445	Kab. Lembata	238.811.480.600	238.811.480.600
446	Kab. Manggarai	306.655.631.800	306.655.631.800
447	Kab. Ngada	251.232.903.600	251.232.903.600
448	Kab. Sikka	324.846.450.200	324.846.450.200
449	Kab. Sumba Barat	226.715.046.000	226.715.046.000
450	Kab. Sumba Timur	343.395.037.400	343.395.037.400
451	Kab. Timor Tengah Selatan	413.039.582.400	413.039.582.400
452	Kab. Timor Tengah Utara	302.080.770.200	302.080.770.200
453	Kota Kupang	365.491.223.600	365.491.223.600
454	Kab. Rote Ndao	213.543.519.800	213.543.519.800
455	Kab. Nagekeo	225.795.921.600	225.795.921.600
456	Kab. Sumba Tengah	182.261.221.600	182.261.221.600
457	Kab. Sumba Barat Daya	243.099.757.400	243.099.757.400
458	Kab. Manggarai Timur	255.080.624.400	255.080.624.400
459	Kab. Sabu Raijua	65.937.012.000	65.937.012.000
460	Kab. Manggarai Barat	256.419.471.200	256.419.471.200
461	Provinsi Maluku	607.572.176.000	607.572.176.000
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	289.387.155.200	289.387.155.200
463	Kab. Maluku Tengah	477.282.938.800	477.282.938.800
464	Kab. Maluku Tenggara	247.446.742.400	247.446.742.400
465	Kab. Pulau Buru	245.244.500.800	245.244.500.800
466	Kota Ambon	395.780.811.400	395.780.811.400
467	Kab. Seram Bagian Barat	278.251.164.800	278.251.164.800
468	Kab. Seram Bagian Timur	215.180.355.200	215.180.355.200
469	Kab. Maluku Barat Daya	265.288.013.600	265.288.013.600
470	Kab. Buru Selatan	199.372.158.200	199.372.158.200
471	Kab. Kepulauan Aru	273.334.076.400	273.334.076.400
472	Kota Tual	183.825.451.000	183.825.451.000
473	Provinsi Maluku Utara	479.726.664.000	479.726.664.000
474	Kab. Halmahera Tengah	223.940.604.600	223.940.604.600
475	Kab. Halmahera Barat	235.822.992.800	235.780.305.700
476	Kota Ternate	293.445.180.800	293.445.180.800
477	Kab. Halmahera Timur	209.228.565.800	209.228.565.800
478	Kota Tidore Kepulauan	269.089.831.000	269.089.831.000
479	Kab. Kepulauan Sula	238.328.489.200	238.328.489.200
480	Kab. Pulau Morotai	76.463.947.600	76.463.947.600
481	Kab. Halmahera Selatan	307.210.335.800	307.210.335.800
482	Kab. Halmahera Utara	210.840.014.200	210.840.014.200
483	Kab. Yalimo	286.648.768.000	286.648.768.000
484	Kab. Lanny Jaya	301.567.179.000	301.567.179.000
485	Provinsi Papua	1.148.740.891.000	1.148.740.891.000
486	Kab. Biak Numfor	324.643.378.800	323.114.390.400
487	Kab. Jayapura	386.696.525.200	386.696.525.200
488	Kab. Jayawijaya	389.740.879.600	389.740.879.600
489	Kab. Merauke	716.383.448.800	716.383.448.800
490	Kab. Mimika	240.045.147.800	240.045.147.800
491	Kab. Nabire	392.522.465.600	392.522.465.600
492	Kab. Paniai	196.481.339.400	196.481.339.400
493	Kab. Puncak Jaya	381.883.625.400	381.648.244.200
494	Kab. Kepulauan Yapen	277.877.726.800	277.877.726.800
495	Kota Jayapura	367.786.142.000	367.786.142.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
496	Kab. Sarmi	407.645.463.600	407.645.463.600
497	Kab. Keerom	299.248.554.200	299.248.554.200
498	Kab. Yahukimo	403.468.127.000	403.468.127.000
499	Kab. Pegunungan Bintang	461.724.465.200	461.697.143.600
500	Kab. Tolikara	333.298.523.000	333.298.523.000
501	Kab. Boven Digoel	499.702.810.800	499.702.810.800
502	Kab. Mappi	429.477.840.000	429.254.766.000
503	Kab. Asmat	534.536.475.600	534.536.475.600
504	Kab. Waropen	312.943.505.600	312.943.505.600
505	Kab. Mamberamo Raya	391.523.731.000	391.523.731.000
506	Kab. Mamberamo Tengah	276.866.443.000	276.866.443.000
507	Kab. Nduga	278.924.970.000	278.924.970.000
508	Kab. Dogiyai	242.187.040.800	242.187.040.800
509	Kab. Intan Jaya	122.084.756.000	122.084.756.000
510	Kab. Puncak	433.520.045.000	433.520.045.000
511	Kab. Deiyai	70.503.670.000	70.503.670.000
512	Kab. Supiori	274.468.718.000	274.468.718.000
513	Provinsi Papua Barat	605.915.614.000	605.915.614.000
514	Kab. Sorong	232.801.617.600	232.801.617.600
515	Kab. Manokwari	397.456.966.400	397.456.966.400
516	Kab. Fak Fak	361.638.181.000	361.638.181.000
517	Kota Sorong	248.550.853.400	248.550.853.400
518	Kab. Sorong Selatan	159.244.251.600	159.244.251.600
519	Kab. Raja Ampat	314.749.587.400	314.749.587.400
520	Kab. Teluk Bintuni	324.711.031.200	324.711.031.200
521	Kab. Teluk Wondama	236.994.687.800	236.994.687.800
522	Kab. Tambrauw	71.860.919.000	71.860.919.000
523	Kab. Maybrat	115.709.874.000	115.709.874.000
524	Kab. Kaimana	348.437.016.200	348.437.016.200
524	Dana Cadangan	0	0
	JUMLAH	203.606.484.500.000	203.571.490.627.200

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	30.356.900.000	30.356.900.000
2	Kab. Aceh Barat	33.669.200.000	33.669.200.000
3	Kab. Aceh Besar	40.026.800.000	40.026.800.000
4	Kab. Aceh Selatan	38.480.300.000	38.480.300.000
5	Kab. Aceh Singkil	34.193.000.000	34.193.000.000
6	Kab. Aceh Tengah	32.280.300.000	32.280.300.000
7	Kab. Aceh Tenggara	33.639.000.000	33.639.000.000
8	Kab. Aceh Timur	51.423.800.000	51.423.800.000
9	Kab. Aceh Utara	66.590.000.000	66.590.000.000
10	Kab. Bireun	51.205.800.000	51.205.800.000
11	Kab. Pidie	46.610.200.000	46.610.200.000
12	Kab. Simeulue	33.835.500.000	33.835.500.000
13	Kota Banda Aceh	21.351.600.000	21.351.600.000
14	Kota Sabang	19.898.000.000	16.841.325.000
15	Kota Langsa	21.624.700.000	21.624.700.000
16	Kota Lhokseumawe	19.227.100.000	19.227.100.000
17	Kab. Nagan Raya	29.730.300.000	29.730.300.000
18	Kab. Aceh Jaya	24.148.200.000	24.148.200.000
19	Kab. Pidie Jaya	35.756.000.000	35.756.000.000
20	Kab. Aceh Barat Daya	29.883.100.000	29.883.100.000
21	Kab. Gayo Lues	27.881.000.000	27.881.000.000
22	Kab. Aceh Tamiang	35.373.100.000	35.373.100.000
23	Kab. Bener Meriah	30.454.500.000	30.454.500.000
24	Kota Subulussalam	25.120.000.000	25.120.000.000
25	Provinsi Sumatera Utara	29.137.700.000	29.137.700.000
26	Kab. Asahan	48.288.300.000	48.288.300.000
27	Kab. Dairi	44.113.800.000	44.113.800.000
28	Kab. Deli Serdang	85.589.900.000	85.589.900.000
29	Kab. Tanah Karo	47.518.000.000	47.518.000.000
30	Kab. Labuhan Batu	45.054.900.000	45.054.900.000
31	Kab. Langkat	65.865.700.000	65.865.700.000
32	Kab. Mandailing Natal	58.131.400.000	58.131.400.000
33	Kab. Nias	53.790.900.000	53.790.900.000
34	Kab. Simalungun	70.279.300.000	62.053.050.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	41.495.400.000	41.495.400.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	51.299.900.000	51.299.900.000
37	Kab. Tapanuli Utara	48.018.500.000	48.018.500.000
38	Kab. Toba Samosir	46.949.200.000	46.949.200.000
39	Kota Binjai	24.831.500.000	24.831.500.000
40	Kota Medan	67.201.000.000	67.201.000.000
41	Kota Pematang Siantar	23.107.400.000	23.107.400.000
42	Kota Sibolga	18.135.900.000	18.135.900.000
43	Kota Tanjung Balai	19.508.400.000	19.508.400.000
44	Kab. Batu Bara	42.832.000.000	42.832.000.000
45	Kab. Labuhan Batu Utara	29.565.500.000	29.565.500.000
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	29.993.000.000	29.993.000.000
47	Kab. Padang Lawas Utara	35.076.000.000	30.443.250.000
48	Kab. Padang Lawas	42.767.600.000	42.767.600.000
49	Kab. Nias Utara	38.784.900.000	38.784.900.000
50	Kab. Nias Barat	33.044.900.000	27.591.975.000
51	Kota Tebing Tinggi	17.807.400.000	17.807.400.000
52	Kota Padang Sidempuan	20.661.600.000	20.661.600.000
53	Kab. Pakpak Bharat	24.610.700.000	24.610.700.000
54	Kab. Nias Selatan	62.217.700.000	57.176.475.000
55	Kab. Humbang Hasundutan	29.210.500.000	29.210.500.000
56	Kab. Serdang Bedagai	61.308.800.000	61.308.800.000
57	Kab. Samosir	38.969.700.000	38.969.700.000
58	Kota Gunung sitoli	29.988.800.000	25.337.800.000
59	Provinsi Sumatera Barat	19.220.500.000	14.415.375.000
60	Kab. Limapuluh Kota	48.959.200.000	48.959.200.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
61	Kab. Agam	55.134.400.000	55.134.400.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	29.630.700.000	24.146.625.000
63	Kab. Padang Pariaman	52.206.400.000	52.206.400.000
64	Kab. Pasaman	36.285.600.000	36.285.600.000
65	Kab. Pesisir Selatan	61.016.100.000	61.016.100.000
66	Kab. Sijunjung	31.977.700.000	31.977.700.000
67	Kab. Solok	50.482.300.000	50.482.300.000
68	Kab. Tanah Datar	46.579.100.000	46.579.100.000
69	Kota Bukit Tinggi	18.187.300.000	18.187.300.000
70	Kota Padang Panjang	14.553.500.000	14.553.500.000
71	Kota Padang	43.515.500.000	43.515.500.000
72	Kota Payakumbuh	11.818.300.000	11.818.300.000
73	Kota Sawahlunto	19.075.100.000	19.075.100.000
74	Kota Solok	15.912.600.000	13.791.675.000
75	Kota Pariaman	19.270.200.000	19.270.200.000
76	Kab. Pasaman Barat	50.123.700.000	50.123.700.000
77	Kab. Dharmasraya	37.485.300.000	37.485.300.000
78	Kab. Solok Selatan	28.514.800.000	28.514.800.000
79	Provinsi Riau	22.368.500.000	22.368.500.000
80	Kab. Bengkalis	13.554.300.000	10.165.725.000
81	Kab. Indragiri Hilir	32.306.700.000	24.230.025.000
82	Kab. Indragiri Hulu	14.392.600.000	14.392.600.000
83	Kab. Kampar	39.596.000.000	39.596.000.000
84	Kab. Kuantan Singingi	33.794.300.000	33.794.300.000
85	Kab. Pelalawan	15.088.900.000	15.088.900.000
86	Kab. Rokan Hilir	21.642.700.000	16.232.025.000
87	Kab. Rokan Hulu	44.189.400.000	44.189.400.000
88	Kab. Siak	14.628.300.000	14.628.300.000
89	Kota Dumai	3.460.400.000	3.460.400.000
90	Kota Pekanbaru	11.516.600.000	11.516.600.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	8.032.100.000	6.024.075.000
92	Provinsi Kepulauan Riau	4.558.900.000	4.558.900.000
93	Kab. Bintan	10.682.800.000	10.682.800.000
94	Kab. Natuna	24.788.800.000	20.622.425.000
95	Kab. Karimun	2.687.900.000	2.687.900.000
96	Kota Batam	39.852.200.000	39.852.200.000
97	Kab. Kepulauan Anambas	23.894.000.000	12.463.770.000
98	Kota Tanjung Pinang	3.141.900.000	3.141.900.000
99	Kab. Lingga	1.439.700.000	431.910.000
100	Provinsi Jambi	20.030.000.000	20.030.000.000
101	Kab. Batanghari	39.795.600.000	39.795.600.000
102	Kab. Bungo	55.727.600.000	55.727.600.000
103	Kab. Kerinci	44.282.600.000	44.282.600.000
104	Kab. Merangin	51.654.200.000	45.982.275.000
105	Kab. Muaro Jambi	47.124.000.000	47.124.000.000
106	Kab. Sarolangun	41.869.900.000	41.869.900.000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	0
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	49.299.200.000	49.299.200.000
109	Kab. Tebo	39.982.200.000	39.982.200.000
110	Kota Jambi	32.235.900.000	32.235.900.000
111	Kota Sungai Penuh	32.878.200.000	32.878.200.000
112	Provinsi Sumatera Selatan	23.742.800.000	17.807.100.000
113	Kab. Lahat	41.286.200.000	41.286.200.000
114	Kab. Musi Banyuasin	49.922.100.000	49.922.100.000
115	Kab. Musi Rawas	52.616.500.000	52.616.500.000
116	Kab. Muara Enim	14.843.600.000	14.843.600.000
117	Kab. Ogan Komering Ilir	67.107.400.000	67.107.400.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu	0	0
119	Kota Palembang	28.427.000.000	28.427.000.000
120	Kota Pagar Alam	17.590.500.000	17.590.500.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
121	Kota Lubuk Linggau	19.317.300.000	19.317.300.000
122	Kota Prabumulih	18.776.900.000	18.776.900.000
123	Kab. Empat Lawang	30.489.900.000	30.489.900.000
124	Kab. Banyuasin	60.981.700.000	60.981.700.000
125	Kab. Ogan Ilir	36.467.000.000	36.467.000.000
126	Kab. OKU Timur	50.529.300.000	50.529.300.000
127	Kab. OKU Selatan	46.006.300.000	46.006.300.000
128	Provinsi Bangka Belitung	8.071.800.000	8.071.800.000
129	Kab. Bangka	28.670.200.000	28.670.200.000
130	Kab. Belitung	28.292.400.000	28.292.400.000
131	Kota Pangkal Pinang	19.871.400.000	16.951.600.000
132	Kab. Bangka Selatan	26.044.900.000	26.044.900.000
133	Kab. Bangka Tengah	24.330.500.000	24.330.500.000
134	Kab. Bangka Barat	21.883.200.000	21.883.200.000
135	Kab. Belitung Timur	27.326.500.000	27.326.500.000
136	Provinsi Bengkulu	20.983.900.000	20.983.900.000
137	Kab. Bengkulu Selatan	35.982.300.000	35.982.300.000
138	Kab. Bengkulu Utara	46.218.400.000	46.218.400.000
139	Kab. Rejang Lebong	47.609.700.000	47.609.700.000
140	Kota Bengkulu	25.364.700.000	25.364.700.000
141	Kab. Kaur	34.917.500.000	34.917.500.000
142	Kab. Seluma	35.374.200.000	35.374.200.000
143	Kab. Mukomuko	34.315.200.000	34.315.200.000
144	Kab. Lebong	26.130.400.000	26.130.400.000
145	Kab. Bengkulu Tengah	43.860.100.000	43.860.100.000
146	Kab. Kepahiang	30.798.900.000	30.798.900.000
147	Provinsi Lampung	27.573.800.000	27.573.800.000
148	Kab. Lampung Barat	42.369.700.000	42.369.700.000
149	Kab. Lampung Selatan	71.311.000.000	71.311.000.000
150	Kab. Lampung Tengah	87.142.200.000	87.142.200.000
151	Kab. Lampung Utara	76.824.900.000	76.824.900.000
152	Kab. Lampung Timur	76.243.800.000	76.243.800.000
153	Kab. Tanggamus	59.989.700.000	59.989.700.000
154	Kab. Tulang Bawang	37.934.400.000	37.934.400.000
155	Kab. Way Kanan	41.198.600.000	41.198.600.000
156	Kab. Pesawaran	48.176.700.000	48.176.700.000
157	Kab. Pringsewu	36.508.600.000	36.508.600.000
158	Kab. Mesuji	13.328.200.000	13.328.200.000
159	Kab. Tulang Bawang Barat	4.085.200.000	4.085.200.000
160	Kota Bandar Lampung	34.104.100.000	34.104.100.000
161	Kota Metro	19.129.600.000	19.129.600.000
162	Provinsi DKI Jakarta	0	0
163	Provinsi Jawa Barat	38.570.300.000	38.570.300.000
164	Kab. Bandung	118.903.700.000	118.903.700.000
165	Kab. Bekasi	83.699.900.000	83.699.900.000
166	Kab. Bogor	143.081.300.000	143.081.300.000
167	Kab. Ciamis	92.253.900.000	92.253.900.000
168	Kab. Cianjur	101.270.400.000	101.270.400.000
169	Kab. Cirebon	81.189.200.000	81.189.200.000
170	Kab. Garut	119.553.000.000	119.553.000.000
171	Kab. Indramayu	91.968.900.000	91.968.900.000
172	Kab. Karawang	97.141.100.000	97.141.100.000
173	Kab. Kuningan	77.738.300.000	77.738.300.000
174	Kab. Majalengka	62.322.500.000	62.322.500.000
175	Kab. Purwakarta	50.558.600.000	50.558.600.000
176	Kab. Subang	58.051.000.000	58.051.000.000
177	Kab. Sukabumi	95.938.500.000	95.938.500.000
178	Kab. Sumedang	66.170.900.000	66.170.900.000
179	Kab. Tasikmalaya	60.545.500.000	60.545.500.000
180	Kab. Bandung Barat	67.873.500.000	67.873.500.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
181	Kota Bandung	63.544.800.000	51.515.510.000
182	Kota Bekasi	14.901.100.000	11.175.825.000
183	Kota Bogor	9.756.700.000	9.756.700.000
184	Kota Cirebon	19.634.900.000	19.634.900.000
185	Kota Depok	35.765.900.000	35.765.900.000
186	Kota Sukabumi	23.090.700.000	23.090.700.000
187	Kota Cimahi	27.297.200.000	27.297.200.000
188	Kota Tasikmalaya	28.793.200.000	28.793.200.000
189	Kota Banjar	15.658.600.000	15.658.600.000
190	Provinsi Banten	13.660.600.000	13.660.600.000
191	Kab. Lebak	91.147.200.000	91.147.200.000
192	Kab. Pandeglang	89.350.200.000	89.350.200.000
193	Kab. Serang	48.693.700.000	48.693.700.000
194	Kab. Tangerang	70.529.900.000	70.529.900.000
195	Kota Cilegon	0	0
196	Kota Tangerang	7.552.600.000	7.552.600.000
197	Kota Serang	45.728.800.000	45.728.800.000
198	Kota Tangerang Selatan	11.940.600.000	11.940.600.000
199	Provinsi Jawa Tengah	37.739.000.000	28.304.250.000
200	Kab. Banjarnegara	60.953.600.000	60.953.600.000
201	Kab. Banyumas	76.326.300.000	76.326.300.000
202	Kab. Batang	46.457.400.000	46.457.400.000
203	Kab. Blora	82.515.300.000	82.515.300.000
204	Kab. Boyolali	55.663.700.000	55.663.700.000
205	Kab. Brebes	66.824.200.000	66.824.200.000
206	Kab. Cilacap	100.844.400.000	100.844.400.000
207	Kab. Demak	56.535.200.000	56.535.200.000
208	Kab. Grobogan	67.472.400.000	67.472.400.000
209	Kab. Jepara	64.454.400.000	64.454.400.000
210	Kab. Karanganyar	55.095.100.000	55.095.100.000
211	Kab. Kebumen	65.818.900.000	65.818.900.000
212	Kab. Kendal	58.544.700.000	58.544.700.000
213	Kab. Klaten	70.542.300.000	70.542.300.000
214	Kab. Kudus	30.502.200.000	30.502.200.000
215	Kab. Magelang	100.912.400.000	100.912.400.000
216	Kab. Pati	66.729.600.000	66.729.600.000
217	Kab. Pekalongan	63.845.500.000	63.845.500.000
218	Kab. Pemalang	61.660.200.000	61.660.200.000
219	Kab. Purbalingga	44.809.000.000	44.809.000.000
220	Kab. Purworejo	56.527.500.000	56.527.500.000
221	Kab. Rembang	48.878.400.000	48.878.400.000
222	Kab. Semarang	51.310.300.000	51.310.300.000
223	Kab. Sragen	51.644.800.000	51.644.800.000
224	Kab. Sukoharjo	49.452.900.000	49.452.900.000
225	Kab. Tegal	59.002.900.000	59.002.900.000
226	Kab. Temanggung	46.794.100.000	46.794.100.000
227	Kab. Wonogiri	72.347.900.000	72.347.900.000
228	Kab. Wonosobo	55.332.700.000	55.332.700.000
229	Kota Magelang	17.730.100.000	15.046.993.000
230	Kota Pekalongan	20.788.400.000	20.788.400.000
231	Kota Salatiga	21.182.300.000	21.182.300.000
232	Kota Semarang	30.292.200.000	30.292.200.000
233	Kota Surakarta	29.118.400.000	29.118.400.000
234	Kota Tegal	24.689.700.000	24.689.700.000
235	Provinsi DI Yogyakarta	11.384.100.000	11.384.100.000
236	Kab. Bantul	60.565.500.000	60.565.500.000
237	Kab. Gunung Kidul	77.574.200.000	77.574.200.000
238	Kab. Kulon Progo	41.614.100.000	41.614.100.000
239	Kab. Sleman	69.847.300.000	69.847.300.000
240	Kota Yogyakarta	13.599.100.000	13.599.100.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
241	Provinsi Jawa Timur	56.982.200.000	56.982.200.000
242	Kab. Bangkalan	70.109.300.000	70.109.300.000
243	Kab. Banyuwangi	81.595.300.000	81.595.300.000
244	Kab. Blitar	63.901.500.000	63.901.500.000
245	Kab. Bojonegoro	57.373.200.000	57.373.200.000
246	Kab. Bondowoso	58.151.300.000	58.151.300.000
247	Kab. Gresik	27.171.200.000	27.171.200.000
248	Kab. Jember	87.752.900.000	87.752.900.000
249	Kab. Jombang	50.279.900.000	50.279.900.000
250	Kab. Kediri	61.016.200.000	61.016.200.000
251	Kab. Lamongan	59.965.300.000	59.965.300.000
252	Kab. Lumajang	61.751.200.000	61.751.200.000
253	Kab. Madiun	44.983.000.000	44.983.000.000
254	Kab. Magetan	46.131.400.000	46.131.400.000
255	Kab. Malang	88.658.700.000	88.658.700.000
256	Kab. Mojokerto	38.706.000.000	38.706.000.000
257	Kab. Nganjuk	58.462.400.000	58.462.400.000
258	Kab. Ngawi	57.853.200.000	57.853.200.000
259	Kab. Pacitan	57.983.600.000	57.983.600.000
260	Kab. Pamekasan	53.507.900.000	53.507.900.000
261	Kab. Pasuruan	67.950.400.000	61.458.700.000
262	Kab. Ponorogo	59.699.600.000	59.699.600.000
263	Kab. Probolinggo	48.620.800.000	48.620.800.000
264	Kab. Sampang	62.379.400.000	62.379.400.000
265	Kab. Sidoarjo	56.341.900.000	56.341.900.000
266	Kab. Situbondo	39.967.200.000	39.967.200.000
267	Kab. Sumenep	54.535.400.000	47.900.500.000
268	Kab. Trenggalek	60.708.000.000	60.708.000.000
269	Kab. Tuban	37.105.600.000	37.105.600.000
270	Kab. Tulungagung	52.432.900.000	52.432.900.000
271	Kota Blitar	14.303.500.000	14.303.500.000
272	Kota Kediri	903.700.000	903.700.000
273	Kota Madiun	17.502.800.000	17.502.800.000
274	Kota Malang	7.476.800.000	7.476.800.000
275	Kota Mojokerto	15.042.400.000	15.042.400.000
276	Kota Pasuruan	15.799.500.000	15.799.500.000
277	Kota Probolinggo	21.104.800.000	21.104.800.000
278	Kota Surabaya	59.885.800.000	59.885.800.000
279	Kota Batu	18.275.000.000	18.275.000.000
280	Provinsi Kalimantan Barat	29.618.800.000	29.618.800.000
281	Kab. Bengkayang	38.437.200.000	38.437.200.000
282	Kab. Landak	47.254.200.000	47.254.200.000
283	Kab. Kapuas Hulu	54.970.000.000	54.970.000.000
284	Kab. Ketapang	51.413.200.000	51.413.200.000
285	Kab. Pontianak	38.748.800.000	38.748.800.000
286	Kab. Sambas	59.425.400.000	59.425.400.000
287	Kab. Sanggau	61.089.000.000	61.089.000.000
288	Kab. Sintang	52.600.700.000	52.600.700.000
289	Kota Pontianak	25.379.900.000	25.379.900.000
290	Kota Singkawang	24.920.700.000	24.920.700.000
291	Kab. Kayong Utara	35.250.100.000	29.127.825.000
292	Kab. Kubu Raya	48.237.700.000	48.237.700.000
293	Kab. Sekadau	37.678.400.000	37.678.400.000
294	Kab. Melawi	32.182.200.000	32.182.200.000
295	Provinsi Kalimantan Tengah	32.296.200.000	32.296.200.000
296	Kab. Barito Selatan	33.308.600.000	33.308.600.000
297	Kab. Barito Utara	29.160.300.000	29.160.300.000
298	Kab. Kapuas	48.802.500.000	48.802.500.000
299	Kab. Kotawaringin Barat	13.491.600.000	13.491.600.000
300	Kab. Kotawaringin Timur	32.324.800.000	32.324.800.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
301	Kota Palangkaraya	25.397.500.000	25.397.500.000
302	Kab. Barito Timur	26.388.000.000	26.388.000.000
303	Kab. Murung Raya	11.790.700.000	11.790.700.000
304	Kab. Pulang Pisau	37.803.200.000	37.803.200.000
305	Kab. Gunung Mas	35.801.600.000	35.801.600.000
306	Kab. Lamandau	32.183.700.000	32.183.700.000
307	Kab. Sukamara	23.298.800.000	23.298.800.000
308	Kab. Katingan	39.207.400.000	39.207.400.000
309	Kab. Seruyan	32.383.500.000	32.383.500.000
310	Provinsi Kalimantan Selatan	19.837.300.000	19.837.300.000
311	Kab. Banjar	52.149.600.000	52.149.600.000
312	Kab. Barito Kuala	54.395.500.000	54.395.500.000
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	39.309.300.000	39.309.300.000
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	35.372.800.000	35.372.800.000
315	Kab. Hulu Sungai Utara	44.774.500.000	44.774.500.000
316	Kab. Kotabaru	37.115.400.000	37.115.400.000
317	Kab. Tabalong	40.577.400.000	40.577.400.000
318	Kab. Tanah Laut	53.541.600.000	53.541.600.000
319	Kab. Tapin	30.862.600.000	30.862.600.000
320	Kota Banjarbaru	19.692.300.000	19.692.300.000
321	Kota Banjarmasin	35.833.600.000	35.833.600.000
322	Kab. Balangan	31.194.200.000	31.194.200.000
323	Kab. Tanah Bumbu	43.962.200.000	43.962.200.000
324	Provinsi Kalimantan Timur	33.643.200.000	33.643.200.000
325	Kab. Berau	16.408.200.000	16.408.200.000
326	Kab. Bulungan	5.081.500.000	5.081.500.000
327	Kab. Kutai Kartanegara	15.163.900.000	4.549.170.000
328	Kab. Kutai Barat	44.971.100.000	44.971.100.000
329	Kab. Kutai Timur	19.440.400.000	19.440.400.000
330	Kab. Malinau	37.054.500.000	37.054.500.000
331	Kab. Nunukan	41.580.200.000	41.580.200.000
332	Kab. Pasir	7.284.800.000	5.463.600.000
333	Kota Balikpapan	6.492.400.000	6.492.400.000
334	Kota Bontang	0	0
335	Kab. Tana Tidung	3.837.000.000	3.837.000.000
336	Kota Samarinda	1.002.800.000	300.840.000
337	Kota Tarakan	0	0
338	Kab. Penajam Paser Utara	3.448.100.000	3.448.100.000
339	Provinsi Sulawesi Utara	17.439.200.000	17.439.200.000
340	Kab. Bolaang Mongondow	42.411.800.000	42.411.800.000
341	Kab. Minahasa	41.869.100.000	41.869.100.000
342	Kab. Sangihe	56.606.800.000	56.606.800.000
343	Kota Bitung	25.800.000.000	25.800.000.000
344	Kota Manado	28.014.400.000	28.014.400.000
345	Kab. Kepulauan Talaud	45.112.000.000	45.112.000.000
346	Kab. Minahasa Selatan	44.943.500.000	44.943.500.000
347	Kab. Minahasa Tenggara	35.233.800.000	35.233.800.000
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	40.859.300.000	40.859.300.000
349	Kota Kotamubagu	45.704.200.000	45.704.200.000
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	53.203.900.000	45.275.575.000
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	46.888.500.000	46.888.500.000
352	Kota Tomohon	20.799.100.000	20.799.100.000
353	Kab. Minahasa Utara	39.958.900.000	39.958.900.000
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	43.760.100.000	43.760.100.000
355	Provinsi Gorontalo	10.734.900.000	10.734.900.000
356	Kab. Boalemo	35.305.700.000	35.305.700.000
357	Kab. Gorontalo	59.382.000.000	59.382.000.000
358	Kota Gorontalo	27.269.100.000	27.269.100.000
359	Kab. Pohuwato	33.246.000.000	33.246.000.000
360	Kab. Gorontalo Utara	38.104.100.000	38.104.100.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
361	Kab. Bone Bolango	34.415.200.000	34.415.200.000
362	Provinsi Sulawesi Tengah	28.596.800.000	28.596.800.000
363	Kab. Banggai	48.103.200.000	48.103.200.000
364	Kab. Banggai Kepulauan	33.120.700.000	33.120.700.000
365	Kab. Buol	35.013.100.000	35.013.100.000
366	Kab. Toli-Toli	39.445.400.000	39.445.400.000
367	Kab. Donggala	51.916.400.000	51.916.400.000
368	Kab. Morowali	40.790.300.000	40.790.300.000
369	Kab. Poso	40.261.400.000	40.261.400.000
370	Kota Palu	26.929.500.000	26.929.500.000
371	Kab. Parigi Moutong	43.905.600.000	43.905.600.000
372	Kab. Sigi	29.955.200.000	29.955.200.000
373	Kab. Tojo Una Una	43.200.300.000	43.200.300.000
374	Provinsi Sulawesi Selatan	29.238.400.000	29.238.400.000
375	Kab. Bantaeng	30.458.900.000	30.458.900.000
376	Kab. Barru	32.613.000.000	32.613.000.000
377	Kab. Bone	69.655.500.000	69.655.500.000
378	Kab. Bulukumba	50.926.200.000	50.926.200.000
379	Kab. Enrekang	32.100.300.000	32.100.300.000
380	Kab. Gowa	58.489.400.000	58.489.400.000
381	Kab. Jeneponto	43.457.600.000	43.457.600.000
382	Kab. Luwu	50.447.700.000	50.447.700.000
383	Kab. Luwu Utara	40.591.000.000	40.591.000.000
384	Kab. Maros	46.372.000.000	46.372.000.000
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	44.142.800.000	44.142.800.000
386	Kab. Pinrang	48.491.200.000	48.491.200.000
387	Kab. Selayar	35.670.600.000	35.670.600.000
388	Kab. Sidenreng Rappang	37.266.700.000	37.266.700.000
389	Kab. Sinjai	38.822.800.000	38.822.800.000
390	Kab. Soppeng	34.562.800.000	34.562.800.000
391	Kab. Takalar	43.478.400.000	43.478.400.000
392	Kab. Tana Toraja	49.336.800.000	49.336.800.000
393	Kab. Wajo	49.285.100.000	49.285.100.000
394	Kota Pare-pare	23.514.400.000	23.514.400.000
395	Kab. Toraja Utara	46.022.500.000	46.022.500.000
396	Kota Makassar	45.753.700.000	45.753.700.000
397	Kota Palopo	21.880.500.000	21.880.500.000
398	Kab. Luwu Timur	28.148.500.000	28.148.500.000
399	Provinsi Sulawesi Barat	17.532.000.000	17.532.000.000
400	Kab. Majene	29.958.700.000	29.958.700.000
401	Kab. Mamuju	41.272.100.000	41.272.100.000
402	Kab. Polewali Mandar	47.426.500.000	47.426.500.000
403	Kab. Mamasa	37.424.500.000	37.424.500.000
404	Kab. Mamuju Utara	31.872.400.000	31.872.400.000
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	24.032.400.000	24.032.400.000
406	Kab. Buton	50.716.100.000	50.716.100.000
407	Kab. Konawe	56.434.500.000	56.434.500.000
408	Kab. Kolaka	49.064.900.000	49.064.900.000
409	Kab. Muna	52.310.000.000	46.078.525.000
410	Kota Kendari	28.684.500.000	28.684.500.000
411	Kota Bau-bau	22.747.800.000	22.747.800.000
412	Kab. Konawe Selatan	51.853.500.000	51.853.500.000
413	Kab. Bombana	34.976.100.000	34.976.100.000
414	Kab. Konawe Utara	34.796.400.000	34.796.400.000
415	Kab. Buton Utara	32.529.200.000	32.529.200.000
416	Kab. Wakatobi	31.471.200.000	31.471.200.000
417	Kab. Kolaka Utara	31.402.500.000	31.402.500.000
418	Provinsi Bali	11.135.100.000	8.351.325.000
419	Kab. Badung	3.616.100.000	3.616.100.000
420	Kab. Bangli	29.437.300.000	29.437.300.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
421	Kab. Buleleng	65.768.200.000	65.768.200.000
422	Kab. Gianyar	43.762.400.000	43.762.400.000
423	Kab. Jembrana	34.720.800.000	34.720.800.000
424	Kab. Karangasem	56.334.800.000	56.334.800.000
425	Kab. Klungkung	29.499.200.000	29.499.200.000
426	Kab. Tabanan	47.642.700.000	47.642.700.000
427	Kota Denpasar	14.435.600.000	14.435.600.000
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	24.764.400.000	24.764.400.000
429	Kab. Bima	56.571.400.000	56.571.400.000
430	Kab. Dompu	39.595.700.000	39.595.700.000
431	Kab. Lombok Barat	46.058.100.000	46.058.100.000
432	Kab. Lombok Tengah	59.579.500.000	59.579.500.000
433	Kab. Lombok Timur	71.729.900.000	71.729.900.000
434	Kab. Sumbawa	56.562.200.000	56.562.200.000
435	Kota Mataram	24.135.000.000	24.135.000.000
436	Kab. Lombok Utara	34.767.400.000	34.767.400.000
437	Kota Bima	23.654.200.000	23.654.200.000
438	Kab. Sumbawa Barat	24.881.800.000	24.881.800.000
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	30.106.900.000	30.106.900.000
440	Kab. Alor	40.856.800.000	40.856.800.000
441	Kab. Belu	51.019.700.000	51.019.700.000
442	Kab. Ende	34.752.300.000	34.752.300.000
443	Kab. Flores Timur	36.326.300.000	36.326.300.000
444	Kab. Kupang	41.608.600.000	41.608.600.000
445	Kab. Lembata	30.835.100.000	30.835.100.000
446	Kab. Manggarai	42.693.100.000	42.693.100.000
447	Kab. Ngada	41.564.000.000	41.564.000.000
448	Kab. Sikka	40.295.300.000	40.295.300.000
449	Kab. Sumba Barat	50.094.600.000	50.094.600.000
450	Kab. Sumba Timur	52.532.200.000	52.532.200.000
451	Kab. Timor Tengah Selatan	52.656.600.000	52.656.600.000
452	Kab. Timor Tengah Utara	34.957.700.000	34.957.700.000
453	Kota Kupang	31.014.400.000	31.014.400.000
454	Kab. Rote Ndao	36.660.600.000	36.660.600.000
455	Kab. Nagekeo	31.930.900.000	31.930.900.000
456	Kab. Sumba Tengah	30.081.000.000	30.081.000.000
457	Kab. Sumba Barat Daya	41.378.000.000	41.378.000.000
458	Kab. Manggarai Timur	45.413.000.000	45.413.000.000
459	Kab. Sabu Raijua	30.085.800.000	30.085.800.000
460	Kab. Manggarai Barat	32.724.800.000	32.724.800.000
461	Provinsi Maluku	32.497.800.000	32.497.800.000
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	38.910.600.000	38.910.600.000
463	Kab. Maluku Tengah	61.182.100.000	61.182.100.000
464	Kab. Maluku Tenggara	37.092.400.000	37.092.400.000
465	Kab. Pulau Buru	42.539.700.000	42.539.700.000
466	Kota Ambon	28.449.000.000	28.449.000.000
467	Kab. Seram Bagian Barat	43.034.500.000	43.034.500.000
468	Kab. Seram Bagian Timur	34.605.800.000	34.605.800.000
469	Kab. Maluku Barat Daya	37.630.100.000	37.630.100.000
470	Kab. Buru Selatan	30.953.100.000	30.953.100.000
471	Kab. Kepulauan Aru	30.901.500.000	30.901.500.000
472	Kota Tual	33.948.700.000	33.948.700.000
473	Provinsi Maluku Utara	26.386.100.000	26.386.100.000
474	Kab. Halmahera Tengah	35.817.900.000	35.817.900.000
475	Kab. Halmahera Barat	36.910.900.000	36.910.900.000
476	Kota Ternate	24.653.800.000	24.653.800.000
477	Kab. Halmahera Timur	31.244.400.000	31.244.400.000
478	Kota Tidore Kepulauan	26.599.500.000	26.599.500.000
479	Kab. Kepulauan Sula	28.826.000.000	28.826.000.000
480	Kab. Pulau Morotai	26.902.900.000	26.902.900.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
481	Kab. Halmahera Selatan	44.598.300.000	44.598.300.000
482	Kab. Halmahera Utara	38.761.000.000	38.761.000.000
483	Kab. Yalimo	66.670.400.000	66.670.400.000
484	Kab. Lanny Jaya	71.795.700.000	71.795.700.000
485	Provinsi Papua	75.055.000.000	75.055.000.000
486	Kab. Biak Numfor	49.051.500.000	49.051.500.000
487	Kab. Jayapura	45.192.100.000	45.192.100.000
488	Kab. Jayawijaya	72.324.200.000	72.324.200.000
489	Kab. Merauke	93.766.600.000	93.766.600.000
490	Kab. Mimika	46.369.500.000	46.369.500.000
491	Kab. Nabire	44.133.200.000	44.133.200.000
492	Kab. Paniai	42.409.000.000	42.409.000.000
493	Kab. Puncak Jaya	50.039.400.000	50.039.400.000
494	Kab. Kepulauan Yapen	38.880.700.000	38.880.700.000
495	Kota Jayapura	32.148.500.000	32.148.500.000
496	Kab. Sarmi	32.106.300.000	32.106.300.000
497	Kab. Keerom	36.217.200.000	36.217.200.000
498	Kab. Yahukimo	58.931.800.000	58.931.800.000
499	Kab. Pegunungan Bintang	65.525.000.000	65.525.000.000
500	Kab. Tolikara	38.772.100.000	38.772.100.000
501	Kab. Boven Digoel	41.020.400.000	41.020.400.000
502	Kab. Mappi	43.558.400.000	43.558.400.000
503	Kab. Asmat	60.005.500.000	60.005.500.000
504	Kab. Waropen	39.799.000.000	39.799.000.000
505	Kab. Mamberamo Raya	34.677.900.000	34.677.900.000
506	Kab. Mamberamo Tengah	77.932.300.000	66.547.750.000
507	Kab. Nduga	68.483.600.000	68.483.600.000
508	Kab. Dogiyai	33.478.200.000	33.478.200.000
509	Kab. Intan Jaya	42.723.400.000	42.723.400.000
510	Kab. Puncak	65.960.200.000	65.960.200.000
511	Kab. Deiyai	36.135.700.000	36.135.700.000
512	Kab. Supiori	25.803.400.000	25.803.400.000
513	Provinsi Papua Barat	21.756.500.000	21.756.500.000
514	Kab. Sorong	33.529.300.000	33.529.300.000
515	Kab. Manokwari	53.596.500.000	53.596.500.000
516	Kab. Fak Fak	30.824.300.000	30.824.300.000
517	Kota Sorong	19.384.300.000	19.384.300.000
518	Kab. Sorong Selatan	29.721.200.000	29.721.200.000
519	Kab. Raja Ampat	54.588.800.000	54.588.800.000
520	Kab. Teluk Bintuni	33.612.900.000	33.612.900.000
521	Kab. Teluk Wondama	34.812.100.000	34.812.100.000
522	Kab. Tambrauw	29.400.200.000	29.400.200.000
523	Kab. Maybrat	36.648.600.000	36.648.600.000
524	Kab. Kaimana	41.854.400.000	41.854.400.000
524	Dana Cadangan	0	0
	JUMLAH	21.138.385.200.000	20.956.311.168.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6=4+5
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	3.898.740.472.632	3.849.806.840.000	47.754.982.632	3.897.561.822.632
2	Kab. Aceh Barat	58.220.959.132	0	65.600.959.132	65.600.959.132
3	Kab. Aceh Besar	44.230.433.000	0	53.694.433.000	53.694.433.000
4	Kab. Aceh Selatan	28.088.000.000	0	33.706.600.000	33.706.600.000
5	Kab. Aceh Singkil	6.878.909.615	0	10.586.909.615	10.586.909.615
6	Kab. Aceh Tengah	25.812.500.000	0	33.177.500.000	33.177.500.000
7	Kab. Aceh Tenggara	59.767.959.131	0	65.979.959.131	65.979.959.131
8	Kab. Aceh Timur	27.953.000.000	0	36.665.000.000	36.665.000.000
9	Kab. Aceh Utara	5.931.137.019	0	28.236.137.019	28.236.137.019
10	Kab. Bireun	53.009.660.094	0	64.781.860.094	64.781.860.094
11	Kab. Pidie	28.043.000.000	0	38.831.000.000	38.831.000.000
12	Kab. Simeulue	1.000.000.000	0	4.419.000.000	4.419.000.000
13	Kota Banda Aceh	73.447.080.094	0	81.451.080.094	81.451.080.094
14	Kota Sabang	27.192.454.808	0	15.646.454.808	15.646.454.808
15	Kota Langsa	25.384.472.558	0	30.406.472.558	30.406.472.558
16	Kota Lhokseumawe	25.175.000.000	0	29.402.000.000	29.402.000.000
17	Kab. Nagan Raya	4.944.909.615	0	10.226.209.327	10.226.209.327
18	Kab. Aceh Jaya	59.692.959.132	0	63.436.959.132	63.436.959.132
19	Kab. Pidie Jaya	47.023.685.094	0	51.499.685.094	51.499.685.094
20	Kab. Aceh Barat Daya	15.955.500.000	0	20.881.500.000	20.881.500.000
21	Kab. Gayo Lues	39.968.411.056	0	43.880.411.056	43.880.411.056
22	Kab. Aceh Tamiang	28.493.000.000	0	34.775.000.000	34.775.000.000
23	Kab. Bener Meriah	55.517.959.132	0	55.219.163.218	55.219.163.218
24	Kota Subulussalam	34.791.633.338	0	37.272.633.338	37.272.633.338
25	Provinsi Sumatera Utara	40.301.602.000	0	39.508.527.000	39.508.527.000
26	Kab. Asahan	10.670.000.000	0	23.057.000.000	23.057.000.000
27	Kab. Dairi	31.136.274.038	0	39.984.986.538	39.984.986.538
28	Kab. Deli Serdang	15.595.000.000	0	40.780.500.000	40.780.500.000
29	Kab. Tanah Karo	13.511.000.000	0	23.340.900.000	23.340.900.000
30	Kab. Labuhan Batu	29.975.055.038	0	38.105.055.038	38.105.055.038
31	Kab. Langkat	13.493.000.000	0	34.277.000.000	34.277.000.000
32	Kab. Mandailing Natal	33.343.002.883	0	38.763.702.594	38.763.702.594
33	Kab. Nias	38.722.517.038	0	42.497.279.538	42.497.279.538
34	Kab. Simalungun	71.466.854.132	0	80.382.908.218	80.382.908.218
35	Kab. Tapanuli Selatan	35.517.959.132	0	40.375.163.218	40.375.163.218
36	Kab. Tapanuli Tengah	1.000.000.000	0	9.295.000.000	9.295.000.000
37	Kab. Tapanuli Utara	40.964.864.631	0	51.155.864.631	51.155.864.631
38	Kab. Toba Samosir	40.755.390.622	0	43.462.851.560	43.462.851.560
39	Kota Binjai	22.025.497.000	0	27.538.497.000	27.538.497.000
40	Kota Medan	1.000.000.000	0	17.835.000.000	17.835.000.000
41	Kota Pematang Siantar	38.385.959.132	0	46.527.959.132	46.527.959.132
42	Kota Sibolga	1.000.000.000	0	4.141.000.000	4.141.000.000
43	Kota Tanjung Balai	7.736.000.000	0	11.825.000.000	11.825.000.000
44	Kab. Batu Bara	23.208.000.000	0	30.771.000.000	30.771.000.000
45	Kab. Labuhan Batu Utara	1.000.000.000	0	7.395.000.000	7.395.000.000
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	1.000.000.000	0	2.481.037.500	2.481.037.500
47	Kab. Padang Lawas Utara	1.000.000.000	0	6.294.000.000	6.294.000.000
48	Kab. Padang Lawas	3.868.000.000	0	5.601.000.000	5.601.000.000
49	Kab. Nias Utara	1.000.000.000	0	3.278.575.000	3.278.575.000
50	Kab. Nias Barat	10.862.274.038	0	7.102.023.317	7.102.023.317
51	Kota Tebing Tinggi	20.394.000.000	0	22.387.600.000	22.387.600.000
52	Kota Padang Sidempuan	5.931.137.019	0	11.489.137.019	11.489.137.019
53	Kab. Pakpak Bharat	1.000.000.000	0	4.495.000.000	4.495.000.000
54	Kab. Nias Selatan	13.618.000.000	0	19.123.200.000	19.123.200.000
55	Kab. Humbang Hasundutan	21.427.819.230	0	29.095.819.230	29.095.819.230
56	Kab. Serdang Bedagai	43.220.959.132	0	54.083.959.132	54.083.959.132
57	Kab. Samosir	30.452.685.094	0	30.452.685.094	30.452.685.094
58	Kota Gunung sitoli	8.803.000.000	0	5.909.512.500	5.909.512.500
59	Provinsi Sumatera Barat	76.608.110.141	0	75.645.610.141	75.645.610.141
60	Kab. Limapuluh Kota	26.655.685.094	0	37.650.685.094	37.650.685.094
61	Kab. Agam	21.719.465.000	0	35.210.465.000	35.210.465.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	1.000.000.000	0	2.148.937.500	2.148.937.500
63	Kab. Padang Pariaman	30.393.411.056	0	41.421.411.056	41.421.411.056
64	Kab. Pasaman	2.000.000.000	0	8.568.000.000	8.568.000.000
65	Kab. Pesisir Selatan	48.185.959.132	0	60.602.959.132	60.602.959.132
66	Kab. Sijunjung	31.586.822.113	0	37.541.822.113	37.541.822.113
67	Kab. Solok	14.538.000.000	0	23.904.200.000	23.904.200.000
68	Kab. Tanah Datar	3.868.000.000	0	12.679.200.000	12.679.200.000
69	Kota Bukit Tinggi	4.868.000.000	0	7.744.200.000	7.744.200.000
70	Kota Padang Panjang	23.553.975.000	0	25.258.175.000	25.258.175.000
71	Kota Padang	48.326.043.095	0	62.089.074.586	62.089.074.586
72	Kota Payakumbuh	2.000.000.000	0	6.260.000.000	6.260.000.000
73	Kota Sawahlunto	36.133.411.056	0	35.476.069.950	35.476.069.950
74	Kota Solok	4.868.000.000	0	5.016.600.000	5.016.600.000
75	Kota Pariaman	28.305.500.000	0	31.569.500.000	31.569.500.000
76	Kab. Pasaman Barat	2.000.000.000	0	9.231.000.000	9.231.000.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6=4+5
77	Kab. Dharmasraya	57.629.822.113	0	57.245.639.902	57.245.639.902
78	Kab. Solok Selatan	24.592.548.075	0	19.899.046.634	19.899.046.634
79	Provinsi Riau	20.694.000.000	0	9.507.000.000	9.507.000.000
80	Kab. Bengkalis	20.724.548.075	0	10.242.000.000	10.242.000.000
81	Kab. Indragiri Hilir	24.756.815.000	0	35.157.415.000	35.157.415.000
82	Kab. Indragiri Hulu	1.000.000.000	0	10.582.000.000	10.582.000.000
83	Kab. Kampar	32.974.137.019	0	46.107.123.318	46.107.123.318
84	Kab. Kuantan Singingi	1.000.000.000	0	10.458.000.000	10.458.000.000
85	Kab. Pelalawan	4.161.125.000	0	9.251.725.000	9.251.725.000
86	Kab. Rokan Hilir	3.868.000.000	0	9.945.000.000	9.945.000.000
87	Kab. Rokan Hulu	3.868.000.000	0	11.568.600.000	11.568.600.000
88	Kab. Siak	3.868.000.000	0	10.252.200.000	10.252.200.000
89	Kota Dumai	16.558.000.000	0	23.695.000.000	23.695.000.000
90	Kota Pekanbaru	47.398.351.000	0	61.312.351.000	61.312.351.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	73.219.756.000	0	77.704.756.000	77.704.756.000
92	Provinsi Kepulauan Riau	21.790.151.000	0	20.790.151.000	20.790.151.000
93	Kab. Bintan	25.271.137.019	0	29.149.023.318	29.149.023.318
94	Kab. Natuna	1.000.000.000	0	3.399.000.000	3.399.000.000
95	Kab. Karimun	1.000.000.000	0	6.382.000.000	6.382.000.000
96	Kota Batam	51.399.874.000	0	54.363.874.000	54.363.874.000
97	Kab. Kepulauan Anambas	1.000.000.000	0	2.601.000.000	2.601.000.000
98	Kota Tanjung Pinang	1.000.000.000	0	5.118.000.000	5.118.000.000
99	Kab. Lingga	54.364.845.430	0	54.301.360.888	54.301.360.888
100	Provinsi Jambi	20.925.548.075	0	20.925.960.575	20.925.960.575
101	Kab. Batanghari	6.917.364.423	0	14.222.364.423	14.222.364.423
102	Kab. Bungo	51.494.802.056	0	58.783.802.056	58.783.802.056
103	Kab. Kerinci	28.252.472.558	0	33.746.025.302	33.746.025.302
104	Kab. Merangin	1.000.000.000	0	10.102.000.000	10.102.000.000
105	Kab. Muaro Jambi	45.376.979.566	0	56.770.979.566	56.770.979.566
106	Kab. Sarolangun	3.868.000.000	0	8.187.600.000	8.187.600.000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	25.299.774.038	0	30.689.774.038	30.689.774.038
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	23.127.842.547	0	27.670.058.292	27.670.058.292
109	Kab. Tebo	27.821.705.528	0	34.232.705.528	34.232.705.528
110	Kota Jambi	5.812.500.000	0	15.039.500.000	15.039.500.000
111	Kota Sungai Penuh	3.868.000.000	0	5.535.600.000	5.535.600.000
112	Provinsi Sumatera Selatan	39.115.641.342	0	17.503.488.604	17.503.488.604
113	Kab. Lahat	37.531.731.728	0	48.211.731.728	48.211.731.728
114	Kab. Musi Banyuasin	43.017.959.132	0	53.184.959.132	53.184.959.132
115	Kab. Musi Rawas	2.000.000.000	0	11.447.650.000	11.447.650.000
116	Kab. Muara Enim	12.876.046.634	0	26.730.046.634	26.730.046.634
117	Kab. Ogan Komering Ilir	1.000.000.000	0	14.973.000.000	14.973.000.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu	58.085.959.132	0	64.810.159.132	64.810.159.132
119	Kota Palembang	2.000.000.000	0	24.055.000.000	24.055.000.000
120	Kota Pagar Alam	25.175.000.000	0	29.378.000.000	29.378.000.000
121	Kota Lubuk Linggau	42.936.411.057	0	45.102.011.057	45.102.011.057
122	Kota Prabumulih	45.217.959.132	0	44.546.959.132	44.546.959.132
123	Kab. Empat Lawang	1.000.000.000	0	5.209.000.000	5.209.000.000
124	Kab. Banyuasin	35.421.822.113	0	46.589.322.113	46.589.322.113
125	Kab. Ogan Ilir	1.000.000.000	0	12.525.000.000	12.525.000.000
126	Kab. OKU Timur	57.785.959.132	0	68.000.959.132	68.000.959.132
127	Kab. OKU Selatan	25.655.685.094	0	32.831.685.094	32.831.685.094
128	Provinsi Bangka Belitung	1.162.000.000	0	614.512.500	614.512.500
129	Kab. Bangka	4.868.000.000	0	10.280.200.000	10.280.200.000
130	Kab. Belitung	3.868.000.000	0	5.628.600.000	5.628.600.000
131	Kota Pangkal Pinang	4.868.000.000	0	7.447.200.000	7.447.200.000
132	Kab. Bangka Selatan	3.868.000.000	0	6.625.200.000	6.625.200.000
133	Kab. Bangka Tengah	3.868.000.000	0	7.180.200.000	7.180.200.000
134	Kab. Bangka Barat	3.868.000.000	0	6.694.200.000	6.694.200.000
135	Kab. Belitung Timur	1.000.000.000	0	4.272.000.000	4.272.000.000
136	Provinsi Bengkulu	51.072.243.481	0	50.969.718.481	50.969.718.481
137	Kab. Bengkulu Selatan	13.730.274.038	0	19.796.274.038	19.796.274.038
138	Kab. Bengkulu Utara	44.235.959.132	0	51.759.959.132	51.759.959.132
139	Kab. Rejang Lebong	62.448.459.132	0	69.228.459.132	69.228.459.132
140	Kota Bengkulu	62.785.959.132	0	70.984.959.132	70.984.959.132
141	Kab. Kaur	13.923.749.038	0	17.556.749.038	17.556.749.038
142	Kab. Seluma	3.868.000.000	0	9.127.000.000	9.127.000.000
143	Kab. Mukomuko	53.593.881.348	0	57.481.881.348	57.481.881.348
144	Kab. Lebong	25.655.685.094	0	26.102.116.584	26.102.116.584
145	Kab. Bengkulu Tengah	35.920.390.622	0	39.544.390.622	39.544.390.622
146	Kab. Kepahiang	62.151.881.348	0	65.898.881.348	65.898.881.348
147	Provinsi Lampung	62.007.071.141	0	61.821.108.641	61.821.108.641
148	Kab. Lampung Barat	57.725.959.131	0	65.696.959.131	65.696.959.131
149	Kab. Lampung Selatan	2.000.000.000	0	16.746.000.000	16.746.000.000
150	Kab. Lampung Tengah	6.931.137.019	0	24.740.011.659	24.740.011.659
151	Kab. Lampung Utara	56.443.863.507	0	71.674.863.507	71.674.863.507
152	Kab. Lampung Timur	23.208.000.000	0	37.276.200.000	37.276.200.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6=4+5
153	Kab. Tanggamus	47.863.685.094	0	57.075.429.084	57.075.429.084
154	Kab. Tulang Bawang	22.538.000.000	0	29.702.750.000	29.702.750.000
155	Kab. Way Kanan	23.170.000.000	0	31.942.000.000	31.942.000.000
156	Kab. Pesawaran	25.250.000.000	0	33.143.000.000	33.143.000.000
157	Kab. Pringsewu	30.586.822.112	0	38.971.822.112	38.971.822.112
158	Kab. Mesuji	57.629.822.112	0	60.353.822.112	60.353.822.112
159	Kab. Tulang Bawang Barat	28.043.000.000	0	32.867.000.000	32.867.000.000
160	Kota Bandar Lampung	83.635.680.132	0	95.416.680.132	95.416.680.132
161	Kota Metro	60.071.934.132	0	63.546.134.132	63.546.134.132
162	Provinsi DKI Jakarta	68.890.000.000	0	67.890.000.000	67.890.000.000
163	Provinsi Jawa Barat	52.089.423.454	0	49.007.777.708	49.007.777.708
164	Kab. Bandung	2.000.000.000	0	34.698.000.000	34.698.000.000
165	Kab. Bekasi	21.985.287.000	0	43.293.287.000	43.293.287.000
166	Kab. Bogor	8.818.000.000	0	31.627.200.000	31.627.200.000
167	Kab. Ciamis	28.188.000.000	0	54.834.000.000	54.834.000.000
168	Kab. Cianjur	32.132.472.558	0	53.417.025.302	53.417.025.302
169	Kab. Cirebon	25.190.000.000	0	48.695.000.000	48.695.000.000
170	Kab. Garut	24.190.000.000	0	49.539.000.000	49.539.000.000
171	Kab. Indramayu	50.280.685.094	0	67.001.185.094	67.001.185.094
172	Kab. Karawang	23.208.000.000	0	41.344.200.000	41.344.200.000
173	Kab. Kuningan	33.277.548.076	0	53.608.548.076	53.608.548.076
174	Kab. Majalengka	48.467.966.729	0	68.309.966.729	68.309.966.729
175	Kab. Purwakarta	23.208.000.000	0	34.209.200.000	34.209.200.000
176	Kab. Subang	4.868.000.000	0	23.284.200.000	23.284.200.000
177	Kab. Sukabumi	19.710.744.000	0	40.050.744.000	40.050.744.000
178	Kab. Sumedang	15.460.000.000	0	33.691.000.000	33.691.000.000
179	Kab. Tasikmalaya	28.523.685.094	0	51.356.685.094	51.356.685.094
180	Kab. Bandung Barat	22.634.137.019	0	28.725.361.659	28.725.361.659
181	Kota Bandung	22.277.382.000	0	50.782.982.000	50.782.982.000
182	Kota Bekasi	22.367.475.000	0	35.642.675.000	35.642.675.000
183	Kota Bogor	3.868.000.000	0	8.805.600.000	8.805.600.000
184	Kota Cirebon	28.103.000.000	0	30.932.700.000	30.932.700.000
185	Kota Depok	25.034.186.000	0	33.777.186.000	33.777.186.000
186	Kota Sukabumi	22.832.800.000	0	27.775.800.000	27.775.800.000
187	Kota Cimahi	4.868.000.000	0	10.406.200.000	10.406.200.000
188	Kota Tasikmalaya	33.336.185.094	0	43.164.185.094	43.164.185.094
189	Kota Banjar	6.820.000.000	0	10.309.000.000	10.309.000.000
190	Provinsi Banten	831.000.000	0	511.987.500	511.987.500
191	Kab. Lebak	27.053.975.000	0	47.513.975.000	47.513.975.000
192	Kab. Pandeglang	18.388.000.000	0	38.158.000.000	38.158.000.000
193	Kab. Serang	1.000.000.000	0	17.428.000.000	17.428.000.000
194	Kab. Tangerang	2.000.000.000	0	24.611.000.000	24.611.000.000
195	Kota Cilegon	21.071.371.000	0	27.212.371.000	27.212.371.000
196	Kota Tangerang	32.937.388.000	0	41.749.388.000	41.749.388.000
197	Kota Serang	18.545.500.000	0	24.550.350.000	24.550.350.000
198	Kota Tangerang Selatan	28.523.685.094	0	33.773.885.094	33.773.885.094
199	Provinsi Jawa Tengah	27.207.163.000	0	26.657.163.000	26.657.163.000
200	Kab. Banjarnegara	37.190.274.038	0	49.508.274.038	49.508.274.038
201	Kab. Banyumas	3.868.000.000	0	22.027.000.000	22.027.000.000
202	Kab. Batang	1.000.000.000	0	11.244.000.000	11.244.000.000
203	Kab. Blora	1.000.000.000	0	14.023.000.000	14.023.000.000
204	Kab. Boyolali	20.724.548.075	0	32.479.093.268	32.479.093.268
205	Kab. Brebes	23.592.548.075	0	40.445.093.268	40.445.093.268
206	Kab. Cilacap	3.868.000.000	0	23.095.200.000	23.095.200.000
207	Kab. Demak	35.325.685.094	0	44.971.685.094	44.971.685.094
208	Kab. Grobogan	1.000.000.000	0	16.083.000.000	16.083.000.000
209	Kab. Jepara	3.868.000.000	0	17.656.000.000	17.656.000.000
210	Kab. Karanganyar	47.599.433.075	0	61.951.433.075	61.951.433.075
211	Kab. Kebumen	28.043.000.000	0	51.479.233.800	51.479.233.800
212	Kab. Kendal	4.868.000.000	0	18.007.200.000	18.007.200.000
213	Kab. Klaten	1.000.000.000	0	17.443.000.000	17.443.000.000
214	Kab. Kudus	3.868.000.000	0	17.197.000.000	17.197.000.000
215	Kab. Magelang	3.958.682.211	0	20.958.932.211	20.958.932.211
216	Kab. Pati	7.903.591.826	0	22.063.591.826	22.063.591.826
217	Kab. Pekalongan	1.000.000.000	0	14.910.000.000	14.910.000.000
218	Kab. Pemalang	7.769.000.000	0	28.813.000.000	28.813.000.000
219	Kab. Purbalingga	3.868.000.000	0	16.432.000.000	16.432.000.000
220	Kab. Purworejo	1.000.000.000	0	14.197.000.000	14.197.000.000
221	Kab. Rembang	25.175.000.000	0	34.649.000.000	34.649.000.000
222	Kab. Semarang	7.826.682.211	0	19.842.319.711	19.842.319.711
223	Kab. Sragen	18.087.160.336	0	34.404.160.336	34.404.160.336
224	Kab. Sukoharjo	1.000.000.000	0	18.652.000.000	18.652.000.000
225	Kab. Tegal	3.868.000.000	0	20.548.200.000	20.548.200.000
226	Kab. Temanggung	3.868.000.000	0	13.879.000.000	13.879.000.000
227	Kab. Wonogiri	52.843.685.094	0	68.266.285.094	68.266.285.094
228	Kab. Wonosobo	28.523.685.094	0	38.585.885.094	38.585.885.094

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6=4+5
229	Kota Magelang	3.868.000.000	0	7.591.000.000	7.591.000.000
230	Kota Pekalongan	1.000.000.000	0	4.218.000.000	4.218.000.000
231	Kota Salatiga	28.523.685.094	0	31.739.685.094	31.739.685.094
232	Kota Semarang	27.930.500.000	0	43.230.500.000	43.230.500.000
233	Kota Surakarta	49.872.000.112	0	60.150.000.112	60.150.000.112
234	Kota Tegal	10.689.684.242	0	14.793.684.242	14.793.684.242
235	Provinsi DI Yogyakarta	2.923.000.000	0	2.923.000.000	2.923.000.000
236	Kab. Bantul	52.728.685.094	0	61.786.385.094	61.786.385.094
237	Kab. Gunung Kidul	2.000.000.000	0	16.331.000.000	16.331.000.000
238	Kab. Kulon Progo	5.812.500.000	0	16.096.500.000	16.096.500.000
239	Kab. Sleman	2.000.000.000	0	15.772.000.000	15.772.000.000
240	Kota Yogyakarta	20.805.513.000	0	25.646.513.000	25.646.513.000
241	Provinsi Jawa Timur	28.540.541.000	0	28.542.116.000	28.542.116.000
242	Kab. Bangkalan	3.868.000.000	0	14.791.000.000	14.791.000.000
243	Kab. Banyuwangi	1.000.000.000	0	17.640.000.000	17.640.000.000
244	Kab. Blitar	52.886.185.094	0	69.884.385.094	69.884.385.094
245	Kab. Bojonegoro	3.868.000.000	0	17.500.200.000	17.500.200.000
246	Kab. Bondowoso	37.950.274.038	0	54.147.274.038	54.147.274.038
247	Kab. Gresik	26.921.453.000	0	35.601.453.000	35.601.453.000
248	Kab. Jember	29.199.920.011	0	49.526.420.011	49.526.420.011
249	Kab. Jombang	23.092.254.000	0	36.565.454.000	36.565.454.000
250	Kab. Kediri	20.790.500.000	0	38.463.500.000	38.463.500.000
251	Kab. Lamongan	1.000.000.000	0	13.249.000.000	13.249.000.000
252	Kab. Lumajang	2.000.000.000	0	13.557.000.000	13.557.000.000
253	Kab. Madiun	52.773.685.094	0	63.186.685.094	63.186.685.094
254	Kab. Magetan	18.350.500.000	0	33.320.500.000	33.320.500.000
255	Kab. Malang	15.418.000.000	0	35.149.200.000	35.149.200.000
256	Kab. Mojokerto	23.208.000.000	0	38.376.200.000	38.376.200.000
257	Kab. Nganjuk	1.000.000.000	0	17.652.000.000	17.652.000.000
258	Kab. Ngawi	18.478.000.000	0	26.832.600.000	26.832.600.000
259	Kab. Pacitan	1.000.000.000	0	15.544.000.000	15.544.000.000
260	Kab. Pamekasan	1.000.000.000	0	14.026.000.000	14.026.000.000
261	Kab. Pasuruan	1.000.000.000	0	16.092.000.000	16.092.000.000
262	Kab. Ponorogo	1.000.000.000	0	14.598.000.000	14.598.000.000
263	Kab. Probolinggo	3.868.000.000	0	15.724.000.000	15.724.000.000
264	Kab. Sampang	25.150.000.000	0	36.532.000.000	36.532.000.000
265	Kab. Sidoarjo	42.529.212.056	0	58.651.070.950	58.651.070.950
266	Kab. Situbondo	1.000.000.000	0	12.423.000.000	12.423.000.000
267	Kab. Sumenep	23.208.000.000	0	25.209.600.000	25.209.600.000
268	Kab. Trenggalek	13.718.000.000	0	26.072.000.000	26.072.000.000
269	Kab. Tuban	20.242.536.000	0	32.673.536.000	32.673.536.000
270	Kab. Tulungagung	52.743.685.094	0	73.278.685.094	73.278.685.094
271	Kota Blitar	13.730.274.038	0	16.820.474.038	16.820.474.038
272	Kota Kediri	20.828.000.000	0	25.838.000.000	25.838.000.000
273	Kota Madiun	54.138.337.132	0	59.784.337.132	59.784.337.132
274	Kota Malang	47.871.548.075	0	55.428.548.075	55.428.548.075
275	Kota Mojokerto	8.703.000.000	0	10.965.000.000	10.965.000.000
276	Kota Pasuruan	3.868.000.000	0	6.196.200.000	6.196.200.000
277	Kota Probolinggo	48.002.685.095	0	51.650.685.095	51.650.685.095
278	Kota Surabaya	28.800.152.000	0	41.184.352.000	41.184.352.000
279	Kota Batu	37.598.757.000	0	38.899.457.000	38.899.457.000
280	Provinsi Kalimantan Barat	63.942.096.150	0	63.820.558.650	63.820.558.650
281	Kab. Bengkayang	4.391.393.000	0	10.139.593.000	10.139.593.000
282	Kab. Landak	62.810.959.132	0	69.035.459.132	69.035.459.132
283	Kab. Kapuas Hulu	62.560.959.131	0	70.531.959.131	70.531.959.131
284	Kab. Ketapang	13.730.274.038	0	23.449.024.038	23.449.024.038
285	Kab. Pontianak	52.905.459.132	0	57.574.709.132	57.574.709.132
286	Kab. Sambas	62.166.881.347	0	75.051.881.347	75.051.881.347
287	Kab. Sanggau	28.540.294.000	0	38.245.294.000	38.245.294.000
288	Kab. Sintang	39.176.343.989	0	46.796.343.989	46.796.343.989
289	Kota Pontianak	61.884.459.132	0	70.707.459.132	70.707.459.132
290	Kota Singkawang	59.660.959.132	0	65.057.959.132	65.057.959.132
291	Kab. Kayong Utara	60.357.456.132	0	41.966.078.609	41.966.078.609
292	Kab. Kubu Raya	40.792.209.132	0	47.793.959.132	47.793.959.132
293	Kab. Sekadau	60.432.504.324	0	65.337.504.324	65.337.504.324
294	Kab. Melawi	21.636.055.019	0	21.896.529.659	21.896.529.659
295	Provinsi Kalimantan Tengah	91.875.817.141	0	89.459.629.641	89.459.629.641
296	Kab. Barito Selatan	1.000.000.000	0	5.718.000.000	5.718.000.000
297	Kab. Barito Utara	3.868.000.000	0	9.682.000.000	9.682.000.000
298	Kab. Kapuas	50.425.390.622	0	60.499.390.622	60.499.390.622
299	Kab. Kotawaringin Barat	35.384.818.432	0	40.669.818.432	40.669.818.432
300	Kab. Kotawaringin Timur	1.000.000.000	0	8.437.000.000	8.437.000.000
301	Kota Palangkaraya	39.385.959.132	0	42.071.363.218	42.071.363.218
302	Kab. Barito Timur	1.000.000.000	0	6.457.000.000	6.457.000.000
303	Kab. Murung Raya	1.000.000.000	0	5.904.000.000	5.904.000.000
304	Kab. Pulang Pisau	28.331.411.056	0	34.034.411.056	34.034.411.056

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6=4+5
305	Kab. Gunung Mas	35.517.959.132	0	40.758.959.132	40.758.959.132
306	Kab. Lamandau	13.493.000.000	0	16.787.500.000	16.787.500.000
307	Kab. Sukamara	20.724.548.075	0	22.280.548.075	22.280.548.075
308	Kab. Katingan	2.000.000.000	0	8.136.000.000	8.136.000.000
309	Kab. Seruyan	59.692.959.132	0	63.100.959.132	63.100.959.132
310	Provinsi Kalimantan Selatan	44.518.047.000	0	44.460.297.000	44.460.297.000
311	Kab. Banjar	56.444.902.281	0	66.438.102.281	66.438.102.281
312	Kab. Barito Kuala	62.560.959.132	0	68.266.959.132	68.266.959.132
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	15.793.411.056	0	23.302.411.056	23.302.411.056
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.000.000.000	0	7.605.000.000	7.605.000.000
315	Kab. Hulu Sungai Utara	23.796.646.438	0	28.767.981.794	28.767.981.794
316	Kab. Kotabaru	8.799.137.019	0	13.553.223.318	13.553.223.318
317	Kab. Tabalong	1.000.000.000	0	6.549.000.000	6.549.000.000
318	Kab. Tanah Laut	31.819.795.913	0	35.990.816.322	35.990.816.322
319	Kab. Tapin	28.058.000.000	0	30.496.000.000	30.496.000.000
320	Kota Banjarbaru	2.000.000.000	0	5.541.000.000	5.541.000.000
321	Kota Banjarmasin	57.785.959.132	0	65.142.159.132	65.142.159.132
322	Kab. Balangan	60.545.390.622	0	65.231.390.622	65.231.390.622
323	Kab. Tanah Bumbu	1.000.000.000	0	6.645.000.000	6.645.000.000
324	Provinsi Kalimantan Timur	330.000.000	0	164.512.500	164.512.500
325	Kab. Berau	26.837.623.019	0	33.329.623.019	33.329.623.019
326	Kab. Bulungan	1.734.037.000	0	5.876.037.000	5.876.037.000
327	Kab. Kutai Kartanegara	1.000.000.000	0	5.947.050.000	5.947.050.000
328	Kab. Kutai Barat	22.241.000.000	0	24.075.887.500	24.075.887.500
329	Kab. Kutai Timur	2.217.984.000	0	7.889.984.000	7.889.984.000
330	Kab. Malinau	43.498.800.000	0	46.158.800.000	46.158.800.000
331	Kab. Nunukan	1.000.000.000	0	2.351.887.500	2.351.887.500
332	Kab. Pasir	1.000.000.000	0	6.093.000.000	6.093.000.000
333	Kota Balikpapan	28.043.000.000	0	32.933.700.000	32.933.700.000
334	Kota Bontang	4.451.795.913	0	6.650.795.913	6.650.795.913
335	Kab. Tana Tidung	7.736.000.000	0	9.038.000.000	9.038.000.000
336	Kota Samarinda	42.742.845.430	0	54.397.845.430	54.397.845.430
337	Kota Tarakan	76.264.776.132	0	79.783.776.132	79.783.776.132
338	Kab. Penajam Paser Utara	28.043.000.000	0	32.081.000.000	32.081.000.000
339	Provinsi Sulawesi Utara	91.836.492.132	0	89.403.592.132	89.403.592.132
340	Kab. Bolaang Mongondow	59.786.580.132	0	65.663.780.132	65.663.780.132
341	Kab. Minahasa	72.995.189.113	0	81.458.189.113	81.458.189.113
342	Kab. Sangihe	84.677.990.728	0	89.423.990.728	89.423.990.728
343	Kota Bitung	75.818.671.901	0	79.289.671.901	79.289.671.901
344	Kota Manado	2.000.000.000	0	10.965.000.000	10.965.000.000
345	Kab. Kepulauan Talaud	13.974.360.000	0	18.852.360.000	18.852.360.000
346	Kab. Minahasa Selatan	23.400.274.038	0	29.094.274.038	29.094.274.038
347	Kab. Minahasa Tenggara	52.794.822.113	0	55.659.822.113	55.659.822.113
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	56.621.094.709	0	59.297.094.709	59.297.094.709
349	Kota Kotamubagu	77.490.010.113	0	80.265.010.113	80.265.010.113
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	50.022.959.132	0	50.263.459.132	50.263.459.132
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	22.538.000.000	0	22.321.000.000	22.321.000.000
352	Kota Tomohon	53.871.731.728	0	56.649.731.728	56.649.731.728
353	Kab. Minahasa Utara	15.482.500.000	0	20.519.500.000	20.519.500.000
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	54.761.822.113	0	57.551.822.113	57.551.822.113
355	Provinsi Gorontalo	21.930.000.000	0	21.848.025.000	21.848.025.000
356	Kab. Boalemo	45.831.492.665	0	45.229.343.398	45.229.343.398
357	Kab. Gorontalo	59.962.959.131	0	64.609.459.131	64.609.459.131
358	Kota Gorontalo	82.137.133.132	0	87.507.133.132	87.507.133.132
359	Kab. Pohuwato	35.517.959.132	0	40.773.959.132	40.773.959.132
360	Kab. Gorontalo Utara	58.701.959.132	0	61.431.959.132	61.431.959.132
361	Kab. Bone Bolango	1.000.000.000	0	4.317.000.000	4.317.000.000
362	Provinsi Sulawesi Tengah	4.812.500.000	0	4.551.112.500	4.551.112.500
363	Kab. Banggai	63.010.959.132	0	71.401.959.132	71.401.959.132
364	Kab. Banggai Kepulauan	54.857.959.131	0	60.221.959.131	60.221.959.131
365	Kab. Buol	35.517.959.131	0	40.757.959.131	40.757.959.131
366	Kab. Toli-Toli	3.868.000.000	0	9.220.000.000	9.220.000.000
367	Kab. Donggala	48.854.822.113	0	58.487.822.113	58.487.822.113
368	Kab. Morowali	59.710.959.132	0	67.870.959.132	67.870.959.132
369	Kab. Poso	38.385.959.132	0	47.824.159.131	47.824.159.131
370	Kota Palu	73.711.980.094	0	82.084.980.094	82.084.980.094
371	Kab. Parigi Moutong	37.860.274.038	0	46.452.274.038	46.452.274.038
372	Kab. Sigi	57.929.822.113	0	59.183.839.902	59.183.839.902
373	Kab. Tojo Una Una	27.971.252.883	0	33.212.252.883	33.212.252.883
374	Provinsi Sulawesi Selatan	57.736.731.728	0	58.543.731.728	58.543.731.728
375	Kab. Bantaeng	49.755.002.882	0	54.144.002.882	54.144.002.882
376	Kab. Barru	62.560.959.132	0	68.095.959.132	68.095.959.132
377	Kab. Bone	32.974.137.019	0	48.928.337.019	48.928.337.019
378	Kab. Bulukumba	54.761.822.113	0	64.622.822.113	64.622.822.113
379	Kab. Enrekang	61.571.934.131	0	68.306.934.131	68.306.934.131
380	Kab. Gowa	60.188.459.132	0	66.043.259.132	66.043.259.132

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6=4+5
381	Kab. Jeneponto	63.055.959.132	0	70.597.959.132	70.597.959.132
382	Kab. Luwu	51.917.367.894	0	59.468.367.894	59.468.367.894
383	Kab. Luwu Utara	38.385.959.132	0	40.739.363.218	40.739.363.218
384	Kab. Maros	2.934.000.000	0	9.459.000.000	9.459.000.000
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	61.885.959.132	0	69.949.959.132	69.949.959.132
386	Kab. Pinrang	60.647.856.348	0	68.573.856.348	68.573.856.348
387	Kab. Selayar	27.418.000.000	0	34.468.000.000	34.468.000.000
388	Kab. Sidenreng Rappang	61.147.856.348	0	61.171.070.714	61.171.070.714
389	Kab. Sinjai	49.043.959.132	0	56.411.959.132	56.411.959.132
390	Kab. Soppeng	33.570.160.009	0	41.061.160.009	41.061.160.009
391	Kab. Takalar	58.071.934.132	0	65.334.934.132	65.334.934.132
392	Kab. Tana Toraja	27.460.548.075	0	34.321.548.075	34.321.548.075
393	Kab. Wajo	61.571.934.132	0	70.322.934.132	70.322.934.132
394	Kota Pare-pare	52.055.959.132	0	43.326.263.218	43.326.263.218
395	Kab. Toraja Utara	38.385.959.132	0	42.759.959.132	42.759.959.132
396	Kota Makassar	88.571.935.132	0	104.147.935.132	104.147.935.132
397	Kota Palopo	38.160.274.038	0	42.624.274.038	42.624.274.038
398	Kab. Luwu Timur	35.969.701.992	0	36.914.731.792	36.914.731.792
399	Provinsi Sulawesi Barat	63.636.096.150	0	63.776.008.650	63.776.008.650
400	Kab. Majene	39.385.959.131	0	45.946.959.131	45.946.959.131
401	Kab. Mamuju	55.203.934.131	0	62.712.934.131	62.712.934.131
402	Kab. Polewali Mandar	54.927.276.921	0	62.931.276.921	62.931.276.921
403	Kab. Mamasa	59.670.459.131	0	64.101.459.131	64.101.459.131
404	Kab. Mamuju Utara	50.962.959.132	0	54.415.959.132	54.415.959.132
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	24.175.000.000	0	24.350.725.000	24.350.725.000
406	Kab. Buton	31.363.730.286	0	38.725.930.286	38.725.930.286
407	Kab. Konawe	2.000.000.000	0	9.234.000.000	9.234.000.000
408	Kab. Kolaka	59.124.163.218	0	66.297.163.218	66.297.163.218
409	Kab. Muna	35.517.959.132	0	41.650.163.218	41.650.163.218
410	Kota Kendari	67.168.212.459	0	75.856.212.459	75.856.212.459
411	Kota Bau-bau	4.798.498.000	0	10.131.498.000	10.131.498.000
412	Kab. Konawe Selatan	16.422.218.012	0	22.080.218.012	22.080.218.012
413	Kab. Bombana	1.000.000.000	0	6.537.000.000	6.537.000.000
414	Kab. Konawe Utara	25.265.000.000	0	27.932.000.000	27.932.000.000
415	Kab. Buton Utara	57.829.822.113	0	60.574.822.113	60.574.822.113
416	Kab. Wakatobi	62.538.459.132	0	67.530.459.132	67.530.459.132
417	Kab. Kolaka Utara	32.861.637.019	0	36.218.637.019	36.218.637.019
418	Provinsi Bali	30.977.744.100	0	18.404.644.100	18.404.644.100
419	Kab. Badung	30.121.612.019	0	37.934.498.318	37.934.498.318
420	Kab. Bangli	44.995.685.094	0	50.548.685.094	50.548.685.094
421	Kab. Buleleng	2.000.000.000	0	17.718.000.000	17.718.000.000
422	Kab. Gianyar	62.575.959.132	0	72.118.959.132	72.118.959.132
423	Kab. Jembrana	1.000.000.000	0	5.211.000.000	5.211.000.000
424	Kab. Karangasem	38.193.685.094	0	48.912.885.093	48.912.885.093
425	Kab. Klungkung	13.493.000.000	0	19.283.000.000	19.283.000.000
426	Kab. Tabanan	37.920.274.038	0	49.065.274.038	49.065.274.038
427	Kota Denpasar	28.694.597.000	0	36.334.597.000	36.334.597.000
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.000.000.000	0	620.662.500	620.662.500
429	Kab. Bima	55.203.934.132	0	67.954.934.132	67.954.934.132
430	Kab. Dompu	24.185.975.000	0	31.796.975.000	31.796.975.000
431	Kab. Lombok Barat	18.368.000.000	0	28.118.200.000	28.118.200.000
432	Kab. Lombok Tengah	2.000.000.000	0	15.617.000.000	15.617.000.000
433	Kab. Lombok Timur	25.650.000.000	0	43.866.000.000	43.866.000.000
434	Kab. Sumbawa	23.185.975.000	0	32.482.975.000	32.482.975.000
435	Kota Mataram	25.062.500.000	0	31.862.500.000	31.862.500.000
436	Kab. Lombok Utara	19.685.975.000	0	20.387.377.500	20.387.377.500
437	Kota Bima	35.793.411.057	0	40.767.411.057	40.767.411.057
438	Kab. Sumbawa Barat	10.870.000.000	0	14.317.000.000	14.317.000.000
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	17.908.463.864	0	16.264.102.278	16.264.102.278
440	Kab. Alor	1.280.783.000	0	8.381.783.000	8.381.783.000
441	Kab. Belu	23.208.000.000	0	34.947.000.000	34.947.000.000
442	Kab. Ende	38.032.774.038	0	40.899.396.634	40.899.396.634
443	Kab. Flores Timur	3.868.000.000	0	11.158.200.000	11.158.200.000
444	Kab. Kupang	5.835.000.000	0	13.491.000.000	13.491.000.000
445	Kab. Lembata	18.761.411.057	0	20.088.669.952	20.088.669.952
446	Kab. Manggarai	62.561.881.348	0	66.357.081.348	66.357.081.348
447	Kab. Ngada	56.791.959.132	0	62.377.959.132	62.377.959.132
448	Kab. Sikka	62.479.040.132	0	37.396.262.609	37.396.262.609
449	Kab. Sumba Barat	18.901.500.000	0	21.607.500.000	21.607.500.000
450	Kab. Sumba Timur	25.193.000.000	0	17.360.850.000	17.360.850.000
451	Kab. Timor Tengah Selatan	17.931.137.019	0	27.761.137.019	27.761.137.019
452	Kab. Timor Tengah Utara	24.225.655.359	0	32.030.655.359	32.030.655.359
453	Kota Kupang	54.685.601.056	0	62.587.601.056	62.587.601.056
454	Kab. Rote Ndao	27.165.052.019	0	29.304.752.019	29.304.752.019
455	Kab. Nagekeo	35.517.959.131	0	41.514.959.131	41.514.959.131
456	Kab. Sumba Tengah	35.517.959.132	0	38.799.959.132	38.799.959.132

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2010
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6=4+5
457	Kab. Sumba Barat Daya	23.208.000.000	0	30.939.200.000	30.939.200.000
458	Kab. Manggarai Timur	35.517.959.131	0	22.061.081.609	22.061.081.609
459	Kab. Sabu Raijua	1.000.000.000	0	2.511.000.000	2.511.000.000
460	Kab. Manggarai Barat	20.724.548.076	0	24.187.093.268	24.187.093.268
461	Provinsi Maluku	66.884.856.151	0	67.158.531.151	67.158.531.151
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	55.017.959.132	0	60.981.959.132	60.981.959.132
463	Kab. Maluku Tengah	35.517.959.132	0	53.414.959.132	53.414.959.132
464	Kab. Maluku Tenggara	62.725.959.132	0	68.071.959.132	68.071.959.132
465	Kab. Pulau Buru	62.462.336.392	0	67.151.536.392	67.151.536.392
466	Kota Ambon	36.517.959.132	0	47.569.959.132	47.569.959.132
467	Kab. Seram Bagian Barat	28.143.000.000	0	39.048.000.000	39.048.000.000
468	Kab. Seram Bagian Timur	61.147.856.348	0	65.479.856.348	65.479.856.348
469	Kab. Maluku Barat Daya	1.000.000.000	0	5.761.000.000	5.761.000.000
470	Kab. Buru Selatan	62.560.959.132	0	65.621.159.132	65.621.159.132
471	Kab. Kepulauan Aru	59.967.959.132	0	64.068.959.132	64.068.959.132
472	Kota Tual	62.560.959.132	0	64.513.959.132	64.513.959.132
473	Provinsi Maluku Utara	1.000.000.000	0	1.246.000.000	1.246.000.000
474	Kab. Halmahera Tengah	8.799.137.019	0	11.913.137.019	11.913.137.019
475	Kab. Halmahera Barat	8.000.000.000	0	15.013.512.500	15.013.512.500
476	Kota Ternate	44.916.672.000	0	51.432.672.000	51.432.672.000
477	Kab. Halmahera Timur	47.064.276.920	0	49.521.276.920	49.521.276.920
478	Kota Tidore Kepulauan	36.889.876.344	0	44.227.876.344	44.227.876.344
479	Kab. Kepulauan Sula	49.555.459.132	0	53.848.459.132	53.848.459.132
480	Kab. Pulau Morotai	34.531.731.728	0	36.715.731.728	36.715.731.728
481	Kab. Halmahera Selatan	1.000.000.000	0	8.130.000.000	8.130.000.000
482	Kab. Halmahera Utara	1.000.000.000	0	7.521.000.000	7.521.000.000
483	Kab. Yalimo	38.385.959.132	0	38.891.796.632	38.891.796.632
484	Kab. Lanny Jaya	62.583.459.132	0	63.837.459.132	63.837.459.132
485	Provinsi Papua	3.519.039.788.000	3.494.864.788.000	24.311.837.500	3.519.176.625.500
486	Kab. Biak Numfor	55.164.253.603	0	58.231.566.103	58.231.566.103
487	Kab. Jayapura	62.760.959.132	0	66.870.959.132	66.870.959.132
488	Kab. Jayawijaya	52.698.685.094	0	56.355.685.094	56.355.685.094
489	Kab. Merauke	28.523.685.094	0	31.401.316.584	31.401.316.584
490	Kab. Mimika	41.198.417.875	0	40.398.563.068	40.398.563.068
491	Kab. Nabire	62.560.959.131	0	66.670.959.131	66.670.959.131
492	Kab. Paniai	53.826.125.000	0	56.214.125.000	56.214.125.000
493	Kab. Puncak Jaya	57.629.822.113	0	58.991.822.113	58.991.822.113
494	Kab. Kepulauan Yapen	40.677.489.194	0	44.703.489.194	44.703.489.194
495	Kota Jayapura	87.390.363.132	0	92.763.363.132	92.763.363.132
496	Kab. Sarmi	62.560.959.132	0	63.853.959.132	63.853.959.132
497	Kab. Keerom	1.000.000.000	0	5.442.000.000	5.442.000.000
498	Kab. Yahukimo	35.427.276.920	0	37.056.276.920	37.056.276.920
499	Kab. Pegunungan Bintang	35.517.959.132	0	37.305.959.132	37.305.959.132
500	Kab. Tolikara	28.523.685.094	0	29.207.872.594	29.207.872.594
501	Kab. Boven Digoel	47.767.548.075	0	49.375.548.075	49.375.548.075
502	Kab. Mappi	23.185.500.000	0	24.486.225.000	24.486.225.000
503	Kab. Asmat	1.000.000.000	0	3.169.000.000	3.169.000.000
504	Kab. Waropen	26.238.000.000	0	26.579.962.500	26.579.962.500
505	Kab. Mamberamo Raya	25.645.000.000	0	23.356.200.000	23.356.200.000
506	Kab. Mamberamo Tengah	20.467.774.038	0	10.059.498.317	10.059.498.317
507	Kab. Nduga	23.592.548.075	0	24.112.223.075	24.112.223.075
508	Kab. Dogiyai	28.148.000.000	0	26.673.337.500	26.673.337.500
509	Kab. Intan Jaya	23.293.411.056	0	23.496.361.056	23.496.361.056
510	Kab. Puncak	1.000.000.000	0	1.511.925.000	1.511.925.000
511	Kab. Deiyai	1.000.000.000	0	1.171.087.500	1.171.087.500
512	Kab. Supiori	38.585.959.132	0	39.622.159.132	39.622.159.132
513	Provinsi Papua Barat	1.818.866.148.141	1.754.942.052.000	63.988.671.141	1.818.930.723.141
514	Kab. Sorong	61.793.959.132	0	65.057.959.132	65.057.959.132
515	Kab. Manokwari	46.885.959.132	0	49.765.159.132	49.765.159.132
516	Kab. Fak Fak	48.285.959.132	0	50.905.159.132	50.905.159.132
517	Kota Sorong	85.512.384.132	0	89.121.384.132	89.121.384.132
518	Kab. Sorong Selatan	106.235.115.094	0	107.879.115.094	107.879.115.094
519	Kab. Raja Ampat	55.710.959.132	0	57.690.959.132	57.690.959.132
520	Kab. Teluk Bintuni	29.454.938.000	0	30.720.938.000	30.720.938.000
521	Kab. Teluk Wondama	10.862.274.038	0	12.902.274.038	12.902.274.038
522	Kab. Tambrauw	53.654.878.224	0	54.137.878.224	54.137.878.224
523	Kab. Maybrat	25.500.000.000	0	26.390.000.000	26.390.000.000
524	Kab. Kaimana	38.385.959.132	0	36.515.363.218	36.515.363.218
524	Dana Cadangan	0	0	0	0
JUMLAH		24.538.392.680.000	9.099.613.680.000	18.916.705.121.311	28.016.318.801.311

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

NO	NO. REKSUS		NAMA REKSUS	BANK (CABANG)	31 DES 2010	31 DES 2009
1	510	000267	Reksus Depkeu (Rupiah) utk Monetisasi Non Project Type Grant Aid 2000	Bank Indonesia Pusat	0,00	0,00
2	510	000270	Reksus Depkeu (Rupiah) utk Monetisasi Non Project Type Grant Aid 2001	Bank Indonesia Pusat	120.706.463.171,00	120.706.463.171,17
3	510	000275	Non Project Grant Aid Tahun 2002	Bank Indonesia Pusat	160.575.085.837,00	160.575.085.837,48
4	510	000276	Non Project Grant Aid Tahun 2003	Bank Indonesia Pusat	77.218.454.364,00	77.218.454.364,00
5	519	000121	Penerimaan Hibah Jepang melalui Program Second Kennedy Round (SKR)	Bank Indonesia Pusat	42.342.180.057,00	2.666.435.020,00
6	601	001311	Reksus Depkeu u/ Const. of Junior Secondary School Facilities under The Basic Education Program, Loan AIRPD-L001	Bank Indonesia Pusat	22.804.173.390,00	21.031.448.605,21
7	601	002311	Reksus Depkeu untuk Loan Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP) AIRPD-L002	Bank Indonesia Pusat	222.563.068.780,00	180.914.838.429,94
8	601	041111	Reksus Depkeu u/ Proyek Gajah Mada University Dev. IP-494 OECF	Bank Indonesia Pusat	285.462.120,00	263.251.066,87
9	601	045111	Reksus Depkeu u/ Proy. Pengemb. Pras. Pedesaan (P2D) Rural Areas Infrac. Development Project (III) IP-506 JBIC dlm val. JPY	Bank Indonesia Pusat	2.482.649.214,00	2.289.480.838,99
10	601	048111	Reksus Depkeu u/ Professional Human Resource Development Project-III (Overseas Program), Project Loan JBIC-535-A	Bank Indonesia Pusat	9.443.515.222,00	8.864.932.480,89
11	601	049111	Reksus Depkeu u/ Professional Human Resource Development Project-III (Domestic Program), Project Loan JBIC-535-B	Bank Indonesia Pusat	28.954.504.630,00	42.874.028.385,17
12	601	050111	Reksus Depkeu untuk Proyek Pengembangan FKIK UIN Syarif Hidayatullah IP-530 JBIC	Bank Indonesia Pusat	3.650.945.006,00	1.696.663.026,79
13	601	053111	Reksus Depkeu untuk Proyek Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Loan JBIC IP-541 dlm val. JPY	Bank Indonesia Pusat	5.514.259.890,00	2.791.462.362,67
14	601	055111	Reksus Depkeu untuk Regional Infrastructure for Social and Economic Development Project, Loan JBIC IP-543 A dlm val. JPY	Bank Indonesia Pusat	237.074.227.157,00	170.899.952.147,97
15	601	056111	Reksus Depkeu untuk Regional Infrastructure for Social and Economic Development Project, Loan JBIC IP-543 B dlm val. JPY	Bank Indonesia Pusat	0,00	0,00
16	601	078411	Reksus Depkeu u/ Proyek Ozone Project Trust Fund TF 021982-IND IBRD	Bank Indonesia Pusat	8.093.003.106,00	10.053.378.866,00
17	601	205411	Reksus Depkeu u/ Pembiy. Second Water & Sanitation for Low Income Communities Project IDA-3382-IND	Bank Indonesia Pusat	1.491.803.803,00	14.387.298.310,00
18	601	206411	Reksus Depkeu u/ Proyek Community Empowerment for Rural Development Project ADB 1765-INO (SF)	Bank Indonesia Pusat	155.724,00	162.808,00
19	601	208411	Reksus Depkeu Participatory Integrated Dev. In Rainfed Areas Project PIDRA 539-ID IFAD	Bank Indonesia Pusat	32.817,00	34.310,00
20	601	209411	Reksus Depkeu u/ Proyek Decentralized Health Services 1810-IND ADB	Bank Indonesia Pusat	69.411,00	72.568,00
21	601	213411	Reksus Depkeu u/ Proyek: Technological and Professional Skills Develop. Sector Project 1792-INO ADB	Bank Indonesia Pusat	87.123,00	91.086,00
22	601	214411	Reksus Depkeu ADB No. 1770-INO dlm USD (Marine & Coastal Resources Management Project)	Bank Indonesia Pusat	15.315.809,00	13.336.720,00
23	601	219411	Reksus Depkeu Second Kecamatan Development Project Loan IBRD No. 4627-IND/IDA No. 3535-IND/GRANT TF-051369 dlm. val. USD-DLN	Bank Indonesia Pusat	308.212.829,00	284.221.314,00
24	601	221411	Reksus Depkeu ADB No.1863-INO (SF) Decentralized Basic Education Project	Bank Indonesia Pusat	363.686,00	380.230,00
25	601	224411	Reksus Depkeu u/ Second Urban Poverty Project Loan IBRD No. 4664-IND/Credit IDA 3658-IND dalam Valas USD	Bank Indonesia Pusat	23.539.345.372,00	314.574.241.966,00

**REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009**

NO	NO. REKSUS		NAMA REKSUS	BANK (CABANG)	31 DES 2010	31 DES 2009
26	601	229411	Reksus Depkeu u/ Poor Farmer Income Improvement Through Innovation Project (PF13P) Loan ADB 1909-INO (DLN) dlm valuta USD	Bank Indonesia Pusat	34.577.858,00	10.058,00
27	601	230411	Reksus Depkeu u/ Coral Reef Rehabilitation and Management Project Phase II (COREMAP II) - ADB No. 1962-INO (SF) dlm USD-DLN	Bank Indonesia Pusat	314.775,00	23.970,00
28	601	232411	Reksus Depkeu Government Finance Management Revenue Administration Project Loan No. 4762-IND/IDA Credit 4026	Bank Indonesia Pusat	141.976.115.596,00	30.606.762.370,00
29	601	233411	Reksus Depkeu Health Workforce and Services Project Loan IBRD 4702-IND/IDA Credit 3784-IND dlm valuta USD	Bank Indonesia Pusat	484.299.046,00	476.517.504,09
30	601	236411	Reksus Depkeu Land Management and Policy Development Project Loan/Credit No. 4731/3884-IND dlm val. USD	Bank Indonesia Pusat	113.288.578,00	35.764.642.010,00
31	601	238411	Reksus Depkeu Second Eastern Indonesia Transport Project (EIRTP-2) LA No. 4744-IND	Bank Indonesia Pusat	68.331.890.499,00	929.422.274,00
32	601	240411	Reksus Depkeu u/ Third Kecamatan Development Project-Loan IBRD No. 4710-IND/IDA Credit 3806-IND dalam valuta USD	Bank Indonesia Pusat	434.751.893,00	24.431.222.750,00
33	601	241411	Reksus Depkeu u/ The Improvement o/ Land & Irrigation System at Farm Level Project IDB No. IND-0080	Bank Indonesia Pusat	16.970.544.958,00	17.742.533.934,00
34	601	242411	Reksus Depkeu u/ Coral Reef Rehabilitation & Management Proj. Phase II (Coremap II) IBRD No. 4740-IND/IDA No. 3910-IND dlm USD	Bank Indonesia Pusat	40.334.100.815,00	12.611.007.100,00
35	601	243411	Reksus Depkeu u/ Second Decentralized Health Services Project Loan ADB No. 2074-INO dlm val USD	Bank Indonesia Pusat	427.882,00	2.068,00
36	601	244411	Reksus Depkeu u/ Second Decentralized Health Services Project Loan ADB No. 2075-INO dlm val. USD	Bank Indonesia Pusat	79.660,00	419.616,00
37	601	245411	Reksus Depkeu u/ State Audit Reform Sector Development Project Loan ADB No. 2127-INO dlm val. USD	Bank Indonesia Pusat	343.186,00	3.066.300.116,00
38	601	246411	Reksus Depkeu u/ Support for Poor and Disadvantaged Areas Project Loan IBRD No. 4788-IND/IDA No. 4076-IND dlm val USD	Bank Indonesia Pusat	41.245.343.700,00	55.840.391.398,00
39	601	247411	Reksus Depkeu u/ Indonesia Managing High Education F/ Relevance & Efficiency Proj. IBRD No. 4789-IND/IDA No. 4077-IND	Bank Indonesia Pusat	169.376.449.644,00	18.293.599.910,00
40	601	248411	Reksus Depkeu u/ Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project (NUSSP) Loan ADB 2072-INO	Bank Indonesia Pusat	0,00	6.250.884.662,00
41	601	251411	Reksus Depkeu u/ Third Kecamatan Development Project, Phase II Loan IBRD No. 4771-IND/IDA CR No. 4045-IND	Bank Indonesia Pusat	4.637.018,00	13.529.899.212,00
42	601	252411	Reksus Depkeu u/ Third Urban Poverty Project Loan IBRD No. 4779-IND/IDA CR 4063-IND	Bank Indonesia Pusat	13.213.276.817,00	4.374.948,00
43	601	254411	Reksus Depkeu u/ Local Government Finance and Governance Reform Sec. Dev. Program (LGFRSDP) Loan ADB No. 2193-INO	Bank Indonesia Pusat	0,00	0,00
44	601	255411	Reksus Depkeu u/ Initiatives for Local Governance Reform Project (ILGRP) Loan IBRD No. 4790-IND/IDA CR No. 4078-IND	Bank Indonesia Pusat	832.926,00	31.074.434.554,00
45	601	256411	Reksus Depkeu u/ Water Resources and Irrigation Sector Management PRJ-WISMP Loan IBRD No. 4711-IND/IDA CR No. 3807-IND	Bank Indonesia Pusat	13.799.403.523,00	55.623.515.538,00
46	601	257411	Reksus Depkeu u/ Community Water Services and Health Project Loan ADB No. 2163-INO	Bank Indonesia Pusat	609.770,00	444.244,00
47	601	258411	Reksus Depkeu u/ Community Water Services and Health Project Loan ADB No. 2164-INO (SF)	Bank Indonesia Pusat	137.382,00	3.299.682,00
48	601	259411	Reksus Depkeu u/ Urban Sector Development Reform Project Loan IBRD 4786-IND	Bank Indonesia Pusat	69.389.177.524,00	15.836.754.716,00

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

NO	NO. REKSUS		NAMA REKSUS	BANK (CABANG)	31 DES 2010	31 DES 2009
49	601	260411	Reksus Depkeu u/ Participatory Irrigation Sector Project (PISP), Loan ADB No. 2064 (SF)-IND	Bank Indonesia Pusat	20.140,00	32.054,00
50	601	261411	Reksus Depkeu u/ Participatory Irrigation Sector Project (PISP), Loan ADB No. 2065-IND	Bank Indonesia Pusat	1.888,00	10.998,00
51	601	264411	Reksus Depkeu u/ Early Childhood Education and Development Project (ECED), Loan IDA Credit No. 4205-IND	Bank Indonesia Pusat	52.621.838.517,00	428.452,00
52	601	268411	Reksus Depkeu u/ Proyek READ, Loan IFAD 645-ID	Bank Indonesia Pusat	15.284.742.707,00	1.087.862,00
53	601	269411	Reksus Depkeu u/ LA 2285-IND (SF) Sustainable Aquaculture Dev. For Food Security and Poverty Reduction Project	Bank Indonesia Pusat	3.633.443,00	6.133.218,00
54	601	270411	Reksus Depkeu u/ Loan Agreement 2294-IND (SF) Madrasah Education Development Project	Bank Indonesia Pusat	127.860.741,00	1.566.886,00
55	601	271411	Reksus Depkeu u/ P. Farmer Empowmt Through Agricultural Tech & Information Project Loan IBRD No. 7427-IND / IDA Cr No. 4260 IND	Bank Indonesia Pusat	27.777.303.392,00	7.614,00
56	601	274411	Reksus Depkeu Loan Strategic Roads Infrastructure Project / SRIP, Loan IBRD LN-4834-IND	Bank Indonesia Pusat	358.779.112,00	139.414.126,00
57	601	278411	Reksus Depkeu untuk Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading Project (BERMUTU) Loan IBRD 7476-IND	Bank Indonesia Pusat	26.378.922.642,00	150.400,00
58	601	279411	Reksus Depkeu untuk Nutrition Improvement Through Community Empowerment Project (NICE), Loan ADB No. 2348-IND	Bank Indonesia Pusat	223.105.821,00	41.390.561.468,00
59	601	280411	Reksus Depkeu untuk Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project - PAMSIMAS, Loan IDA Credit 4204-IND	Bank Indonesia Pusat	118.774.374.362,00	30.992.811.910,00
60	601	282411	Reksus Depkeu untuk National Program for Community Empowerment in Rural Areas Project, Loan IBRD No. 7505-ID/Cr No. 4385-ID	Bank Indonesia Pusat	246.421.415.297,00	2.108.935.969.948,00
61	601	283411	Reksus Depkeu u/ Loan IBRD No. 7504-ID/Credit IDA No. 4384-ID (National Program for Community Empowerment in Urban Areas Project)	Bank Indonesia Pusat	127.918.498.375,00	760.460,00
62	601	284411	Reksus Depkeu u/ Vocational Education Strengthening Project (INVEST), Loan ADB No. 2416-IND (SF)	Bank Indonesia Pusat	1.953.295,00	33.455.037.100,00
63	601	285411	Reksus Depkeu untuk Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri (RIS-PNPM), Loan ADB No. 2449-IND (SF) dalam valuta USD	Bank Indonesia Pusat	13.240.112.704,00	16.223.178,00
64	601	286411	Reksus Depkeu u/ National Programme for Community Empowerment in Rural Areas Project Loan No. 755-ID	Bank Indonesia Pusat	1.304.594.999,00	0,00
65	601	287411	Reksus Depkeu u/ Integrated Community-Driven Development Project IDB Loan No. IND-131(IST)/132(LN) val USD	Bank Indonesia Pusat	68.411.825.254,00	335.454.480.766,00
66	601	288411	Reksus Depkeu u/ Integrated Citarum Water Resources Mgt Investm Program-Project 1 (ICWRMIP), Loan ADB No. 2501-IND (SF)	Bank Indonesia Pusat	2.385.081.681,00	27.162.251.280,00
67	601	289411	Reksus Depkeu Loan IBRD 7669-ID (Dam Operational Improvement and Safety Project/DOISP)	Bank Indonesia Pusat	3.706.899,00	0,00
68	601	290411	Reksus Depkeu untuk Health Professional Education Quality Project Loan 7737-ID	Bank Indonesia Pusat	351.458,00	0,00
69	601	291411	Reksus Depkeu untuk Rural Infrastruktur Support to the PNPM Mandiri Project II (RIS PNPM II) Loan ADB.2075-IND dalam USD	Bank Indonesia Pusat	11.565.303,00	0,00
70	601	292411	Reksus Depkeu untuk Urban Water Supply and Sanitation Project (IBRD Loan No.7730-IND)	Bank Indonesia Pusat	13.486.500.000,00	0,00
71	601	293111	Reksus Depkeu untuk Development of Bandung Institut of Technology (III). Loan Jica No.IP-553 dalam Valuta JPY	Bank Indonesia Pusat	4.411.408.000,00	0,00

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

NO	NO. REKSUS		NAMA REKSUS	BANK (CABANG)	31 DES 2010	31 DES 2009
72	601	294411	REKSUS DEPKEU UTK INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT (IRSDP) LOAN ADB NO. 2264-INO(SF)	Bank Indonesia Pusat	0,00	0,00
73	601	295411	REKSUS DEPKEU U/ THIRD NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREAS - PNPB MANDIRI PEDESAAN (LOAN IBRD 7867-ID)	Bank Indonesia Pusat	5.662.712,00	0,00
74	601	296411	REKSUS KEMENTERIAN KEUANGAN UTK PROJECT FOR INDONESIAN TAX ADMINISTRATION REFORM LOAN IBRD NO. 7631-ID	Bank Indonesia Pusat	0,00	0,00
75	601	297411	REKSUS KEMENKEU U/TNP FOR COMM.EMPOW IN URBAN AREAS LOAN 7866-ID	Bank Indonesia Pusat	0,00	0,00
76	602	074411	Rekening Depkeu u/ Penampungan Hibah dari Luar Negeri dalam Rangka Bencana Alam Nasional dalam valuta USD	Bank Indonesia Pusat	0,00	2.666.435.020,00
77	602	079411	Reksus Depkeu u/ Coral Reef Rehabilitation & Management Proj. Phase II (COREMAP-II) Grant IBRD No. TF-053350 dlm USD	Bank Indonesia Pusat	5.215.692.587,00	1.443.301.098,00
78	602	080411	Reksus Depkeu u/ Government Financial Management & Revenue Administration Project Grant IBRD No. TF-053556 dlm val. USD	Bank Indonesia Pusat	1.655.708.384,00	961.359.714,00
79	602	082411	Reksus Depkeu u/ Earthquake and Tsunami Emergency Support Project Grant ADB No. 0002-INO dlm val. USD	Bank Indonesia Pusat	522.709.138,00	7.534.946,00
80	602	084411	Reksus Depkeu u/ Community Water Services and Health Aceh/Nias North Sumatera Project, Grant No. 0003-INO (SF)	Bank Indonesia Pusat	33.087,00	3.668.128.160,00
81	602	085411	Reksus Depkeu u/ State Audit Reform Sector Development Project Loan ADB No. 2127-INO	Bank Indonesia Pusat	3.997.039,00	15.994.382,00
82	602	086411	Reksus Depkeu u/ Initiatives for Local Governance Reform Project (ILGRP) IBRD Grant No. TF-055913	Bank Indonesia Pusat	24.025.951.778,00	10.767.739.198,00
83	602	087411	Reksus Depkeu u/ Water Resources and Irrigation Sector Management Project-WISMP IBRD Grant No. TF-052124	Bank Indonesia Pusat	40.370,00	1.000.224.296,00
84	602	089411	Reksus Depkeu u/ Earth and Tsunami Emergency Supp. Prj. D/ Hbh. Pem. Belanda Sec. Fdcry. Ovsght. Supp. Grant Agreement ADB No. 0002-INO	Bank Indonesia Pusat	305.726.727,00	319.634.216,00
85	602	090411	Reksus Depkeu u/ Earth and Tsunami Emergency Supp. Prj. D/ Hbh. Pem. Belanda Sec. Fdcry. Ovsght. Supp. Grant Agreement ADB No. 0002-INO	Bank Indonesia Pusat	0,00	0,00
86	602	091411	Reksus Depkeu u/ Urban Sector Development Reform Project, IBRD Grant No. TF-053555-IND	Bank Indonesia Pusat	4.053.342.850,00	1.663.424.752,00
87	602	092411	Reksus Depkeu u/ European Union Grant F/Nusa Tenggara. Brt. Wtr. Rsrc. Mng. Program Letter Agreement No. TF-055997	Bank Indonesia Pusat	252.557,00	8.788.524.454,00
88	602	095411	Reksus Depkeu u/ Participatory Irrigation Sector Project, Grant GON No. 4299-INO	Bank Indonesia Pusat	5.485,00	11.562,00
89	602	096411	Reksus Depkeu u/ Early Childhood Education and Development Project (ECED), IBRD Grant No. TF-056841	Bank Indonesia Pusat	8.631.967.882,00	1.491.780,00
90	602	097411	Reksus Depkeu u/ Seismically Upgraded Housing in Nanggroe Aceh Darussalam and North Sumatera, Grant JFPR 9074-INO	Bank Indonesia Pusat	61.752.256,00	64.561.362,00
91	602	098411	Reksus Depkeu u/ Proyek Dutch Grant, Grant 0047-INO	Bank Indonesia Pusat	1.393.719.276,00	2.799.692.146,00
92	602	099411	Reksus Depkeu u/ Proyek From Best Practices Policy Formulation Project IDF Grant TF-057276-IND	Bank Indonesia Pusat	9.007.184,00	216.723.862,00
93	602	100411	Reksus Depkeu u/ Proyek Kecamatan Based Reconstr and Rehabilitation Planning Project (KRRP) Grant IBRD TF-057307-IND	Bank Indonesia Pusat	52.034.637.206,00	43.762.190.492,00
94	602	102411	Reksus Depkeu u/ Strengthening Accountability for and Audit of Disaster Related Aid, IDF Grant No. No. TF-057426	Bank Indonesia Pusat	0,00	4.402.208,00

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

NO	NO. REKSUS		NAMA REKSUS	BANK (CABANG)	31 DES 2010	31 DES 2009
95	602	104411	Reksus Depkeu u/ Grant IDA No. TF-057955 (MDTF for Aceh and North Sumatera, Supp. For Poor and Disadvantage Areas Proj.)	Bank Indonesia Pusat	8.210.799.142,00	31.584.940.470,00
96	602	105411	Reksus Depkeu u/ Infrastructure Project Development Facility Imprest Account F/ Dutch Grant Agreement 0064-IND	Bank Indonesia Pusat	0,00	0,00
97	602	106411	Reksus Depkeu u/ Proyek READ, Grant IFAD 726-ID	Bank Indonesia Pusat	6.199.564,00	470.000.000,00
98	602	107411	Reksus Depkeu u/ Proyek MDTFANS-Infrastructure Reconstruction Financing Facility Grant TF-057657	Bank Indonesia Pusat	816.335.328,00	201.337.533,00
99	602	108411	Reksus Depkeu u/ Proy Java Reconstruction Fund (JRF) Grant IBRD TF 090014-IND	Bank Indonesia Pusat	30.293.817.578,00	29.832.964.710,00
100	602	109411	Reksus Depkeu Grant for Pilot Study on Teacher Certif., Employment and Deploy. Under The Dutch Educ. Supp. Prog. TF-057271	Bank Indonesia Pusat	0,00	28.117.750,00
101	602	110411	Reksus Depkeu u/ MDTF to Support Public Financial Management and Revenue Adm. Reform Project Grant TF-090047 IND	Bank Indonesia Pusat	14.841.893,00	2.512.560.780,00
102	602	112411	Reksus Depkeu untuk Kecamatan Development Project and Environment in Sulawesi Project, Grant IBRD TF-056890-IND	Bank Indonesia Pusat	6.131.323,00	5.752.802.365,75
103	602	114411	Reksus Depkeu u/ Third Kec. Dev. Proj. Phase II for Smallholder Agribus. Dev. Initiative (SADI), Grant IBRD TF-057097-IND	Bank Indonesia Pusat	0,00	1.906.354.592,00
104	602	115411	Reksus Depkeu Grant No. TF-057574 Streaming Data Flows From Region to The Center Under Decentralization Project	Bank Indonesia Pusat	0,00	435.337.500,00
105	602	116411	Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-057749/DGLS Indonesia Avian Influenza Surveillance and Control Project	Bank Indonesia Pusat	0,00	7.763.742,00
106	602	117411	Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-057749/DGLS Indonesia Avian Influenza Surveillance and Control Project	Bank Indonesia Pusat	0,00	2.805.931.678,00
107	602	118411	Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-057749/Komnas FBPI Indonesia Avian Influenza Surveillance and Control Project	Bank Indonesia Pusat	0,00	1.902.372.564,00
108	602	119411	Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-056895/DGLS Indonesia Avian Influenza Surveillance and Control Project	Bank Indonesia Pusat	0,00	1.498.165.138,00
109	602	120411	Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-056895/Komnas FBPI Indonesia Avian Influenza Surveillance and Control Project	Bank Indonesia Pusat	0,00	20.273.732,00
110	602	121411	Reksus Depkeu utk Netherlands Trust Fund for The Better Education Through Reformed Mgt and Univ. Teacher Upgrading Proj. (BERMUTU) TF-090794	Bank Indonesia Pusat	18.787.817.566,00	21.674.521.974,00
111	602	122411	Reksus Depkeu u/ Tech. Ass. To Ind. Nat. Sgl Window, Multi Donor Trust Fund to Sup. Publ. Fin. Mgt & Rev. Adm. Reform Prj Grant TF 091414	Bank Indonesia Pusat	9.348.212,00	148.042.762,00
112	602	123411	Reksus Depkeu u/ Basic Education Project-Trust Fund Grant Trust Fund TF-091895-IND	Bank Indonesia Pusat	3.016.581.829,00	10.610.469.114,00
113	602	124411	Reksus Depkeu u/p The Geothermal Power Generation Dev. Project Grant TF-092324-ID	Bank Indonesia Pusat	2.239.976.561,00	3.985.428.262,00
114	602	125411	Reksus Depkeu untuk IDF Grant No. TF-092618 for the Improving the Link between Government Financial Reports n' Sources	Bank Indonesia Pusat	359.640.000,00	376.000.000,00
115	602	126411	Reksus Depkeu untuk Dutch Education Support Program BOS-KITA	Bank Indonesia Pusat	0,00	40.649.360,00
116	602	127411	Reksus Depkeu untuk PHRD Grant for Project Implementation Third Kecamatan Development Project Second Phase Grant Number: TF090850	Bank Indonesia Pusat	0,00	211.332.774,00
117	602	129411	Multi-Donor Support Facility f/National Community Empowerment-Co-Financing Grant f/Decentralized Mgt o/Natural Rsrces & Renewable Energy TF-093076	Bank Indonesia Pusat	60.769.333.556,00	14.840.907.812,00
118	602	130411	Reksus Depkeu u/ Hibah TF093358 Aceh Economic Development Financing Facility (EDFF)	Bank Indonesia Pusat	105.019.528.617,00	43.471.226.088,00

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

NO	NO. REKSUS		NAMA REKSUS	BANK (CABANG)	31 DES 2010	31 DES 2009
119	602	131411	Reksus Depkeu u/ Global Partnership on Output Based Aid- Expanding Piped Water Supply to Surabaya's Urban Poor Project	Bank Indonesia Pusat	4.495.500.000,00	4.700.000.000,00
120	602	132411	Reksus Depkeu u/ National Programme for Community Empowerment in Rural Areas Project Grant No. 1053-ID	Bank Indonesia Pusat	0,00	0,00
121	602	133411	Reksus Depkeu untuk Hibah TF093092 (The Preparation of Strengthening the National Statistical System of Indonesia Project)	Bank Indonesia Pusat	1.238.919.520,00	1.831.861.378,00
122	602	134411	Reksus Depkeu untuk Proyek Multi Donor Trade and Investment Climate Facility TF094088	Bank Indonesia Pusat	357.158.124,00	940.000.000,00
123	602	135411	Reksus Depkeu u/Support for the third Water Supply & Sanitation for Low-income Communities Project - PAMSIMAS (Grant TF 094792)	Bank Indonesia Pusat	90.180,00	0,00
124	602	136411	Reksus Depkeu u/ Deceentralization Support Facility II Cpacity Strengthening Prog. For Local Government Legislature (TF 095584)	Bank Indonesia Pusat	534.208.627,00	0,00
125	602	137411	Reksus Depkeu untuk West Indonesia National Road Improvement Project Grant (TF 094760)	Bank Indonesia Pusat	1.095.358.155,00	0,00
126	602	138411	Reksus Depkeu u/ Indonesai Water and Sanitation Program Sub Program D-Sanitation Community & Municipal Pilots Project (TF 094270)	Bank Indonesia Pusat	3.596.400.000,00	0,00
127	602	139411	Rekening Depkeu Untuk Indonesia Water & Sanitation Program Sub Program J-Technical Assistance for Flood Mitigation Project (TF 092649)	Bank Indonesia Pusat	599.615.814,00	0,00
128	602	140411	Reksus Depkeu untuk JFPR Assistance for Rice Fortification for The Foor Grant ADB No.9132-INO dalam Valas USD	Bank Indonesia Pusat	1.168.423.157,00	0,00
129	602	141411	Reksus Depkeu untuk Decentralization Support facility II Govt Training and Education Center Dev.Int CBSIPSD (TF 095995)	Bank Indonesia Pusat	5.415.459,00	0,00
130	602	142311	Reksus Depkeu utk Urban Household Water Supply Sanitation Program dalam Valas AUD (Direct Funding Agree.No.54184)	Bank Indonesia Pusat	113.228.145.048,00	0,00
131	602	143411	Reksus Kemenkeu Utk Ind Tech Assistance To Ind Tax Adm Reform Under The Supp To Public Fin Mngmt N Rev Adm Multi Donor TF093998	Bank Indonesia Pusat	0,00	0,00
132	602	144411	SUPPORTING THE INDONESIAN CORRUPTION ERADICATION CORRUPTION PREVENTION STRATEGY TF - 094467	Bank Indonesia Pusat	222.629.657,00	0,00
133	602	145411	REKSUS DEPKEU UTK DSF II: NSPK FOR LOCAL GOVERNMENT SERVICE DELIVERY TF 096670	Bank Indonesia Pusat	0,00	0,00
134	602	146411	MDTF FOR ACEH AND NORTH SUMATRA TF 096865	Bank Indonesia Pusat	14.385.600.000,00	0,00
135	602	147411	REKSUS DEPKEU UNTUK IDF GRANT FOR SUPPORT TO BPK FOR PREPARATION OF NEW STRATEGIC PLAN PROJECT TF-096643	Bank Indonesia Pusat	59.284.946,00	0,00
136	602	148411	WATER AND SANITATION POLICY AND ACTION PLANNING FACILITY PROJECT (WASPOLA) TF-095502	Bank Indonesia Pusat	2.247.750.000,00	0,00
137	602	150411	REKSUS KEMENKEU UTK GRANT AGREEMENT PNPM SUPPORT FACILITY TRUST FUND (PSF)	Bank Indonesia Pusat	91.708.200.000,00	0,00
138	193	02000090305	MDTF-Community Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction for NAD and Nias TF-55825	BRI Keb.Baru	0,00	0,00
JUMLAH DALAM RUPIAH					2.824.334.833.970	3.930.523.401.603

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

Dalam Rupiah

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2010	2009
	I. ACEH		158.799.520.207	143.535.519.930
1	BANDA ACEH	001	69.279.610.531	64.228.287.530
2	LANGSA	002	11.636.293.800	10.173.124.500
3	MEULABOH	003	19.845.267.400	17.385.799.100
4	TAPAK TUAN	074	8.184.706.600	7.265.839.800
5	LHOKSEUMAWE	089	35.958.796.400	32.121.157.700
6	KUTACANE	105	7.310.669.100	6.587.497.800
7	TAKENGON	122	6.584.176.376	5.773.813.500
8	BANDA ACEH (KHUSUS)	175	-	-
	II. MEDAN		261.707.843.368	222.107.610.607
9	MEDAN I	004	82.788.363.062	63.165.237.785
10	PEMATANG SIANTAR	005	29.310.370.663	25.197.974.927
11	PADANG SIDEMPUAN	006	10.460.237.700	9.202.008.511
12	GUNUNG SITOLI	007	7.435.536.902	9.077.035.078
13	RANTAU PRAPAT	075	6.226.059.100	5.665.127.500
14	TANJUNG BALAI	076	8.090.398.700	7.196.782.000
15	SIBOLGA	106	13.958.146.065	13.171.406.894
16	SIDIKALANG	119	11.346.555.250	7.883.662.714
17	MEDAN II	123	70.098.119.603	62.376.417.200
18	TEBING TINGGI	124	13.019.053.200	12.093.660.268
19	BALIGE	125	8.975.003.123	7.078.297.730
	III. PADANG		120.930.980.543	107.349.446.068
20	PADANG	010	66.358.488.656	60.270.398.349
21	BUKIT TINGGI	011	30.543.225.150	25.647.990.209
22	SIJUNJUNG	077	5.604.746.300	4.977.450.700
23	SOLOK	090	8.641.479.178	6.742.593.253
24	LUBUK SIKAPING	091	5.540.324.974	6.209.302.357
25	PAINAN	142	4.242.716.285	3.501.711.200
	IV. PEKANBARU		139.676.345.121	125.388.150.526
26	PEKANBARU	008	70.689.678.308	68.280.519.141
27	TANJUNG PINANG	009	23.569.641.458	20.963.864.600
28	RENGAT	092	10.258.507.900	10.032.211.440
29	DUMAI	120	18.563.688.395	10.374.816.251
30	BATAM	137	16.594.829.060	15.736.739.094
	V. JAMBI		65.428.219.656	63.588.731.422
31	JAMBI	012	42.719.521.928	42.047.974.166
32	SUNGAI PENUH	013	6.679.261.435	5.001.379.862
33	MUARA BUNGO	078	5.867.042.500	6.215.308.078
34	KUALA TUNGKAL	143	4.618.757.700	4.377.907.992
35	BANGKO	159	5.543.636.093	5.946.161.324
	VI. PALEMBANG		131.414.215.424	120.782.361.188
36	PALEMBANG	014	89.250.270.202	82.923.714.581
37	LUBUK LINGGAU	070	6.114.924.700	5.659.609.100

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

Dalam Rupiah

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2010	2009
38	BATURAJA	109	8.239.070.900	7.554.071.300
39	LAHAT	144	20.714.164.122	18.236.639.807
40	SEKAYU	160	7.095.785.500	6.408.326.400
	VII. BANDAR LAMPUNG		120.854.023.068	89.933.465.339
41	BANDAR LAMPUNG	017	83.001.302.395	59.198.008.518
42	KOTABUMI	116	13.445.863.870	11.974.052.401
43	METRO	126	21.285.466.803	15.947.914.120
44	LIWA	145	3.121.390.000	2.813.490.300
	VIII. BENGKULU		52.805.218.171	39.467.338.600
45	BENGKULU	016	36.755.737.282	27.886.770.800
46	MANNA	121	5.828.997.186	4.651.420.600
47	CURUP	146	7.758.494.792	5.556.158.200
48	MUKO MUKO	181	2.461.988.911	1.372.989.000
	IX. PANGKAL PINANG		20.580.451.900	18.200.753.200
49	PANGKAL PINANG	015	16.891.877.000	14.927.665.000
50	TANJUNG PANDAN	107	3.688.574.900	3.273.088.200
	X. SERANG		109.766.370.199	97.193.702.926
51	SERANG	020	52.700.161.622	43.090.027.672
52	TANGERANG	127	51.094.486.119	48.082.741.721
53	RANGKASBITUNG	161	5.971.722.458	6.020.933.533
	XII. JAKARTA		4.865.355.613.664	4.429.463.768.972
54	JAKARTA I	018	138.565.085.870	134.171.346.205
55	JAKARTA II	019	4.044.192.732.452	3.661.123.884.332
56	JAKARTA III	088	298.109.352.538	268.501.168.303
57	JAKARTA IV	133	159.730.457.353	161.961.648.426
58	JAKARTA V	139	224.757.985.451	203.705.721.706
59	JAKARTA VI	140	0	-
	XII. BANDUNG		603.847.251.714	563.705.044.438
60	PURWAKARTA	021	37.769.941.508	31.854.872.424
61	BANDUNG I	022	105.043.047.169	112.667.809.144
62	BOGOR	023	96.708.402.566	87.911.667.066
63	CIREBON	024	45.978.090.542	37.854.990.162
64	TASIKMALAYA	025	37.160.758.682	31.941.182.861
65	KARAWANG	086	9.128.427.184	11.451.326.045
66	SUMEDANG	087	14.213.335.237	12.291.375.200
67	BANDUNG II	095	142.411.613.819	136.210.196.974
68	GARUT	096	22.212.816.861	23.946.760.218
69	SUKABUMI	128	36.702.180.462	31.822.449.835
70	KUNINGAN	147	14.209.302.830	12.797.344.900
71	BEKASI	171	42.309.334.854	32.955.069.609
	XIII. SEMARANG		445.130.621.281	408.600.974.828

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

Dalam Rupiah

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2010	2009
72	SEMARANG I	026	67.825.798.398	61.348.385.640
73	PURWOREJO	027	14.723.621.424	12.841.581.862
74	SURAKARTA	028	71.019.783.188	65.955.655.761
75	PURWOKERTO	029	39.061.760.300	36.241.206.942
76	PEKALONGAN	072	14.056.161.000	12.811.804.900
77	PATI	097	24.461.643.696	22.152.337.500
78	MAGELANG	115	40.099.444.652	36.663.743.400
79	TEGAL	118	31.596.568.009	29.449.556.452
80	KUDUS	129	19.050.357.720	15.431.022.600
81	CILACAP	130	11.084.024.200	9.997.302.200
82	SEMARANG II	134	57.238.358.580	53.954.354.350
83	KLATEN	148	18.554.550.600	16.747.837.591
84	SRAGEN	162	13.093.900.666	11.999.618.115
85	PURWODADI	163	12.033.276.600	10.641.913.500
86	BANJARNEGARA	164	11.231.372.248	12.364.654.015
	XIV. YOGYAKARTA		134.330.668.061	125.272.820.299
87	YOGYAKARTA	030	120.677.832.561	111.968.913.122
88	WONOSARI	149	6.824.425.300	7.068.392.977
89	WATES	176	6.828.410.200	6.235.514.200
	XV. SURABAYA		629.817.075.077	571.292.214.008
90	SURABAYA I	031	135.528.355.246	124.400.854.260
91	MALANG	032	108.359.385.704	98.805.209.245
92	MADIUN	033	55.721.588.206	49.529.835.200
93	KEDIRI	034	42.375.296.851	38.030.657.000
94	BONDOWOSO	035	18.345.195.902	16.203.830.580
95	PAMEKASAN	036	28.126.904.367	26.859.003.890
96	BOJONEGORO	073	14.506.923.979	13.943.735.405
97	MOJOKERTO	098	32.497.789.300	29.046.256.200
98	PACITAN	099	4.044.453.800	3.637.866.900
99	BANYUWANGI	100	8.489.909.891	8.844.966.737
100	JEMBER	131	40.414.869.300	38.856.317.610
101	SURABAYA II	135	86.276.671.818	79.740.133.500
102	BLITAR	150	16.741.989.635	14.907.523.300
103	SIDOARJO	165	25.466.827.100	23.105.690.000
104	TUBAN	166	12.920.913.978	5.380.334.181
	XVI. PONTIANAK		93.401.279.084	82.018.179.830
105	PONTIANAK	042	50.475.757.034	44.661.901.800
106	SINTANG	076	11.540.863.600	9.716.798.000
107	SINGKAWANG	093	15.799.036.550	13.717.213.330
108	KETAPANG	094	4.720.980.400	4.229.006.200
109	PUTUSSIBAU	117	3.412.686.100	2.976.993.900
110	SANGGAU	167	7.451.955.400	6.716.266.600
	XVII. PALANGKARAYA		49.123.077.600	46.375.633.799
111	PALANGKARAYA	043	30.257.493.700	28.949.340.799

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

Dalam Rupiah

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2010	2009
112	SAMPIT	044	6.832.070.400	6.234.857.100
113	BUNTOK	080	6.748.490.500	6.348.427.400
114	PANGKALAN BUN	102	5.285.023.000	4.843.008.500
	XVIII. BANJARMASIN		91.314.602.379	81.911.678.101
115	BANJARMASIN	045	59.009.472.267	54.785.826.401
116	KOTABARU	081	7.507.729.124	4.697.047.700
117	BARABAI	110	12.946.778.300	11.767.720.200
118	TANJUNG	151	8.499.710.400	7.641.455.800
119	PELAIHARI	168	3.350.912.288	3.019.628.000
	XIX. SAMARINDA		94.120.161.669	84.879.699.989
120	SAMARINDA	046	39.182.330.119	35.650.138.193
121	BALIKPAPAN	047	35.815.933.550	32.711.028.500
122	TARAKAN	048	14.147.366.600	12.056.192.500
123	NUNUKAN	152	2.253.634.800	1.987.852.096
124	TANJUNG REDEP	153	2.720.896.600	2.474.488.700
	XX. DENPASAR		118.202.483.000	108.373.585.082
125	DENPASAR	037	87.462.167.700	79.956.484.700
126	SINGARAJA	132	20.500.988.000	18.944.724.382
127	AMLAPURA	154	10.239.327.300	9.472.376.000
	XXI. MATARAM		71.924.511.673	61.740.246.990
128	MATARAM	038	49.728.708.702	42.029.620.981
129	BIMA	071	10.264.447.961	8.956.752.965
130	SUMBAWA BESAR	101	5.976.532.610	5.292.878.344
131	SELONG	169	5.954.822.400	5.460.994.700
	XXII. KUPANG		77.714.049.577	73.903.723.198
132	KUPANG	039	49.151.398.694	46.336.884.740
133	ENDE	040	8.225.288.084	7.730.921.858
134	WAINGAPU	041	5.311.214.999	4.906.204.300
135	RUTENG	111	6.535.062.000	6.001.950.600
136	ATAMBUA	172	5.990.826.800	5.437.395.200
137	LARANTUKA	174	2.500.259.000	3.490.366.500
	XXIII. MAKASAR		237.837.252.518	209.257.474.280
138	MAKASSAR I	054	88.297.347.212	73.225.929.148
139	WATAMPONE	055	19.244.963.263	17.244.268.200
140	BANTAENG	056	11.299.187.328	8.307.671.600
141	PARE-PARE	057	26.508.383.638	24.206.809.789
142	PALOPO	058	9.628.539.435	8.499.901.800
143	MAJENE	059	7.491.566.490	6.274.552.814
144	MAKASAR II	136	61.106.971.179	58.654.259.963
145	BENTENG	155	2.297.534.368	1.897.209.413
146	MAKALE	170	3.387.245.417	3.007.060.700
147	SINJAI	177	3.220.090.578	2.426.359.526

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

Dalam Rupiah

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2010	2009
148	MAMUJU	178	5.355.423.610	5.513.451.327
	XXIV. PALU		66.633.008.753	59.009.008.438
149	PALU	051	46.823.739.561	40.961.679.240
150	POSO	052	9.514.251.600	8.701.781.900
151	LUWUK	053	5.404.819.151	4.903.870.300
152	TOLI-TOLI	082	4.890.198.441	4.441.676.998
	XXV. KENDARI		52.202.420.524	47.849.401.860
153	KENDARI	060	37.224.833.064	33.564.410.989
154	BAU-BAU	103	6.729.208.900	6.001.925.700
155	KOLAKA	156	4.681.296.500	4.931.842.889
156	RAHA	157	3.567.082.060	3.351.222.282
	XXVI. GORONTALO		31.012.655.374	23.820.883.700
157	GORONTALO	050	27.357.048.274	20.526.055.200
158	MARISA	180	3.655.607.100	3.294.828.500
	XXVII. MANADO		77.048.916.819	70.181.785.748
159	MANADO	049	60.256.510.919	55.292.269.896
160	TAHUNA	083	3.213.286.300	2.974.050.800
161	KOTAMOBAGU	158	5.381.882.000	4.780.102.252
162	BITUNG	179	8.197.237.600	7.135.362.800
	XXVIII. TERNATE		29.349.664.300	28.997.746.057
163	TERNATE	062	26.992.122.600	25.714.999.157
164	TOBELO	112	2.357.541.700	3.282.746.900
	XXIX. AMBON		73.757.452.601	65.983.695.435
165	AMBON	061	58.164.122.147	50.754.251.335
166	TUAL	084	5.999.585.454	5.535.493.000
167	SAUMLAKI	104	2.511.079.200	2.554.222.400
168	MASOHI	173	7.082.665.800	7.139.728.700
	XXX. JAYAPURA		194.526.934.407	139.194.656.400
169	JAYAPURA	063	103.420.624.596	56.529.849.300
170	BIAK	064	15.171.341.200	13.865.929.900
171	MANOKWARI	065	14.002.759.725	12.556.723.200
172	SORONG	066	17.255.413.900	16.090.875.700
173	FAK-FAK	067	4.054.947.900	3.680.898.300
174	MERAUKE	068	16.517.788.700	14.804.298.200
175	NABIRE	085	4.923.921.100	4.556.810.800
176	WAMENA	113	5.461.425.300	4.979.439.900
177	SERUI	138	3.383.541.486	2.951.616.900
178	TIMIKA	141	10.335.170.500	9.178.214.200
	JUMLAH KPPN		9.218.612.887.732	8.309.379.301.258

**REKENING PEMERINTAH LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009**

Dalam Rupiah

NO	NO -- NAMA REKENING	31 DESEMBER 2010	31 DESEMBER 2009
REKENING PEMERINTAH LAINNYA YANG MASIH AKTIF			
A. REKENING DI BANK INDONESIA			
1	513000000 Rekening Dana Investasi	0,00	539.211.669.269,87
2	519000102 Rekening Pembangunan Daerah	0,00	130.971.378.622,20
3	607000111 RDI JPY	105,87	68.360.781.409,56
4	607000311 RDI AUD	0,00	18.903.383.450,17
5	607000411 RDI USD	0,00	428.116.312.652,00
6	607000511 RDI GBP	0,00	23.353.405.600,64
7	607000990 RDI SDR	0,00	605.122.491,56
8	607000991 RDI EUR	0,00	444.344.244.953,43
	JUMLAH RDI/RPD	106	1.653.866.298.449
1	508000071 Penerimaan Pertambangan dan Perikanan	61.921.102.334,71	154.525.021.417,75
2	508000084 Penerimaan Panas Bumi	208.604.971.388,00	190.638.768.899,49
3	500000001 Menkeu cq. Ditjen Perbendaharaan utk menampung Dana Talangan Reksus Kosong&Reimbursement dr Lender	0,00	0,00
4	500000003 Menkeu Penerimaan Penerbitan Surat Berharga Negara	0,00	0,00
5	500000004 Menkeu cq. Ditjen PBN utk menampung Pengembalian Dana Talangan & Pencairan Aset BPR	58.653.788.383,39	52.513.236.763,74
6	502000001 Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara	21.194.964.000,00	0,00
7	502000002 BUN utk Obligasi Dalam Rangka Penjamin	82.107.368.549,60	82.107.368.549,60
8	502000004 Rekening Dana Perimbangan	0	0
9	510000239 Reksus Menkeu Karena Penjualan Saham PT Telkom di Pasar Domestik	1.305.689.644,00	1.271.546.083,27
10	510000271 Rekening Pinjaman Luar Negeri utk Menampung Sisa saldo SPL XI INP 22 & SPL XII INP 23	0,00	0,00
11	519000119 Penerimaan Hasil Penjualan Cadangan Beras Pemerintah	0,00	0,00
12	609001991 Menkeu utk Penerimaan Hibah Educat.Sector Prog(ESSP)	0,00	0,00
13	602074411 Rek Depkeu utk Penampungan Hibah LN Dlm Rangka Bencana Alam Nas dalam USD	2.550.416.730,00	2.666.435.020,00
14	600500411 Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing	0,00	0,00
	JUMLAH REK PEMERINTAH LAINNYA	436.338.301.029,70	483.722.376.733,85
1	600000411 Depkeu K / Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing	7.308.488.402.783,01	8.718.692.283.486,00
	JUMLAH REK HASIL MINYAK PERJANJIAN KPS	7.308.488.402.783	8.718.692.283.486
	JUMLAH REK DI BANK INDONESIA	7.744.826.703.919	10.856.280.958.669

MONITORING PENERIMAAN SDA MIGAS TAHUN 2009

No.		KKKS	Tagihan Lifting Pemerintah ^{a)}						Setoran atas Tagihan Lifting Tahun 2009 ke ReK. 600.000411									
			Minyak Mentah			Gas Alam	Over / (Under) Lifting KKKS	Total	Periode Januari s.d. Desember 2009				Periode Januari s.d. Desember 2010					
			Ekspor	Inter Area					Total	Setoran atas Ekspor Minyak Mentah	Setoran atas Penjualan Gas	Setoran Overlifting KKKS	Total	Setoran atas Ekspor Minyak Mentah	Setoran atas Penjualan Gas	Setoran Overlifting KKKS	Total	
				US\$	US\$													Ekuv Rp
			(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5)	(6)	(8) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) + (8) + (9)	(11)	(12)	(13)	(14) = (11) + (12) + (13)	
A. REGION I																		
1	BOB PT.BSP-PERTAMINA HULU	CPP	-	299.053.818	3.026.593.636.850	299.053.818	-	(36.652)	299.017.166	-	-	-	-	-	-	-		
2	C P I	MFK - PSC	-	7.522.911	76.942.406.302	7.522.911	-	-	7.522.911	-	-	-	-	-	-	-		
3	C P I	SIAM - PSC	-	30.795.043	318.757.718.748	30.795.043	-	-	30.795.043	-	-	-	-	-	-	-		
4	C P I	ROKAN - PSC	461.851.768	4.483.052.945	45.601.186.246.502	4.944.904.713	237.149.273	5.182.053.986	391.388.529	-	181.843.223	573.231.752	70.463.239	-	55.306.049	125.789.289		
5	CONOCOPHILIPS	SOUTH NATUNA SEA - B	390.738.667	162.589.947	1.691.187.063.818	553.328.615	64.460.515	300.101.895	917.891.025	313.990.401	54.732.893	-	368.723.293	76.748.125	9.727.632	109.097.525		
6	EXXONMOBIL OIL	BEE	61.878.824	-	-	61.878.824	-	172.448.911	-	234.327.735	48.716.445	170.266.995	-	218.986.441	13.159.379	2.181.916		
7	EXXONMOBIL OIL	NSD	15.771.063	-	-	15.771.063	-	226.673.001	-	242.444.084	11.733.405	221.798.588	-	233.531.993	4.037.658	4.874.414		
8	EXXONMOBIL OIL	PASE	24.856	-	-	24.856	-	890.578	-	905.378	24.856	823.099	-	847.956	-	57.422		
9	KALILA (KORINCI BARU)	KORINCI	-	-	-	-	-	1.217.227	-	1.217.227	-	1.170.962	-	1.170.962	46.265	46.265		
10	KONDUR PETROLEUM	MALACCA STRAIT	-	115.562.482	1.157.515.629.312	115.562.482	-	10.145.289	125.707.771	-	-	-	-	-	5.890.201	5.890.201		
11	MEDCO E&P MALAKA	AREA "A" NORTH SUMATRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	PEARL OIL	TUNGKAL	-	1.837.276	18.485.973.214	1.837.276	-	-	1.837.276	-	-	-	-	-	-	-		
13	PETROCHINA INT'L LTD.	JABUNG	51.821.518	140.311.092	1.406.567.460.258	192.132.609	194.413.448	58.263.434	444.809.491	15.669.143	149.778.672	-	165.447.814	33.096.282	45.398.926	49.940.094		
14	PETROSELAT LTD.	SELAT PANJANG	-	1.123.021	11.391.407.876	1.123.021	-	-	1.123.021	-	-	-	-	-	-	-		
15	PREMIER OIL	NATUNA SEA "A"	-	15.580.833	146.381.923.780	15.580.833	168.644.620	2.659.227	166.884.980	-	145.289.315	-	145.289.315	-	23.355.605	25.482.256		
16	STAR ENERGY LTD.	KAKAP	-	53.836.156	550.782.208.426	53.836.156	47.683.395	(18.245.222)	83.274.329	-	41.142.116	-	41.142.116	-	6.541.279	6.541.279		
17	JOB (PSC) COSTA IGL	GEBANG	-	67.040	684.824.210	67.040	36.032	-	103.072	-	1.146	-	1.146	-	1.219	1.219		
18	PHE COSTA - JOB P COSTA INT'L	GEBANG	-	0	1.887	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
19	JOA (PSC) CONOCOPHILIPS	SOUTH JAMBI	-	741.327	7.686.709.524	741.327	4.005.006	-	4.746.332	-	3.745.797	-	3.745.797	-	-	-		
20	PHE SOUTH JAMBI - JOB P COPHI	SOUTH JAMBI	-	-	-	-	-	1.046.157	1.046.157	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL REGION I			982.086.688	5.312.073.891	54.014.143.210.705	6.294.160.588	880.462.977	591.083.400	7.765.706.965	781.525.779	788.749.584	181.843.223	1.752.118.586	197.504.683	92.184.677	222.360.520		
B. REGION II																		
1	BP WEST JAVA LTD. / PERTAMINA HULU ENER	DNWJ	-	245.390.318	2.450.945.054.840	245.390.318	53.701.901	58.180.845	357.253.064	-	44.110.874	-	44.110.874	-	9.591.027	20.029.086		
2	CAMAR RES. CANADA	BAWEAN	-	-	-	-	-	1.444.147	1,444.147	-	-	-	-	-	1,444.147	1,444.147		
3	CNOCQ SES LTD.	SE. SUMATRA	173.313.951	263.777.875	2.644.036.763.335	437.091.826	13.015.151	75.278.292	525.385.269	136.848.072	11.421.098	-	148.270.170	36.464.879	1.594.053	75.278.292		
4	CONOCOPHILIPS (GRISISKI)	CORRIDOR - PSC	-	177.594.315	1.802.436.453.128	177.594.315	566.132.762	71.604.285	815.331.362	-	233.598.549	-	233.598.549	-	102.640.045	20.818.015		
5	KANGEAN ENERGY INDONESIA	KANGEAN	358.494	3.499.036	34.535.487.294	3.857.530	2.036.393	2.203.622	8.097.545	358.490	-	1.830.445	-	205.948	2.203.622	2.408.570		
6	HESS PANGKAH LTD.	PANGKAH	-	13.311.211	135.404.367.969	13.311.211	4.886.936	255.990	18.454.137	-	3.851.328	-	3.851.328	-	965.721	255.990		
7	LAPINDO BRANTAS,INC.	BRANTAS	-	-	-	-	1.634.784	60.260	1.695.044	-	1.494.856	-	1.494.856	-	138.738	60.260		
8	MEDCO E&P INDONESIA	LEMATANG	-	45.079	461.118.878	45.079	-	45,079	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	MEDCO E&P INDONESIA	BARISAN RIMAU	-	290.233.458	2.957.841.000.864	290.233.458	554.151	8.288.820	290.078.528	-	374.892	-	374.892	-	179.259	8.288.820		
10	MEDCO E&P INDONESIA	S&C SUMATRA	-	106.067.824	1.096.566.640.483	106.067.824	17.793.043	15.782.724	139.843.392	-	11.698.126	-	11,698.126	-	6.094.918	15.782.724		
11	PETROCHINA LTD.	BANGKO	-	685.195	7.685.743.441	685.195	-	81	685.276	-	-	-	-	-	81	-		
12	SANTOS PTY LTD.	MADURA	-	-	-	-	7.589.075	7.589.075	6.835.517	-	583.346	-	6.835.517	-	853.559	653.559		
13	SANTOS PTY LTD.	SAMPANG	-	12.066.952	122.021.014.579	12.066.952	947.835	563.271	13.578.057	-	583.346	-	583.346	-	364.488	563.271		
14	JOB (PSC) HESS	JAMBI MERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	PHE JAMBI MERANG - JOB P HESS	JAMBI MERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	JOB (PSC) GOLDEN SPIKE	RAJA PENDOPO	-	3.260.049	32.967.993.016	3.260.049	306.487	1.527.416	5.093.953	-	11.622	-	11,622	-	13.371	13.371		
17	PHE RAJA TEMPIRAN - JOB P GSIL	RAJA BLOCK	-	688.290	7.065.367.922	688.290	232.868	3.923.639	4.844.797	-	9.003	-	9,003	-	17.250	17.250		
18	JOB (PSC) PETROCHINA E-JAVA	TUBAN	23.041.700	49.954.500	509.485.639.500	72.996.200	-	(3.121.022)	69.875.178	7.957.300	-	7,957.300	-	-	-	-		
19	PHE TUBAN E-JAVA - JOB P PEJ	TUBAN	30.572.384	16.891.920	169.983.167.867	47.464.304	-	(669.486)	46.794.808	12.042.226	-	12,042.226	-	26.891.055	-	26,891.055		
20	JOB (PSC) TALISMAN - OK	OGAN KOMERING	-	27.207.468	276.982.174.588	27.207.468	2.744.565	(33.632)	29.918.401	-	124.747	-	124,747	-	128.437	128.437		
21	PHE OGAN KOMERING - JOB P TOKI	OGAN KOMERING	-	19.185.450	189.697.208.978	19.185.450	2.126.041	318.749	21.628.240	-	96.633	-	96,633	-	99.492	99.492		
22	JOA (PSC) KODECO	WEST MADURA	-	94.169.232	933.668.785.228	94.169.232	10.248.948	18.141.340	122.556.520	-	7.169.520	-	7,169.520	-	2.863.368	20.144.670		
23	PHE W KODECO - JOA P W MADURA	WEST MADURA	13.078.055	59.793.098	585.157.809.276	72.871.153	12.558.134	2.116.519	87.545.808	6.651.788	577.890	-	7,229.678	6.428.287	2,371.411	8.797.677		
24	MOBIL CPU LTD.	CEPU BLOCK	-	11.944.693	-	11,944.693	-	11,944.693	4.864.937	-	4,864.937	-	4,864.937	-	7.079.754	7.079.754		
TOTAL REGION II			252.308.276	1.383.820.070	13.956.941.789.187	1.636.129.346	696.507.075	255.843.950	2.588.480.372	168.723.812	323.888.446	-	492.612.258	76.861.956	127.921.083	162.005.711		
C. REGION III																		
1	CHEVRON IND.	E. KALIMANTAN	301.858	236.876.685	2.423.304.711.519	237.178.523	72.833.789	1.269.881	311.282.192	(167.222)	60.081.107	-	59.913.885	469.080	6.589.581	1.269.881		
2	CHEVRON IND.	MAKASAR STRAIT	2.423.580	61.468.497	644.247.623.886	63.892.077	39.775.734	5.789.272	109.457.083	-	36.771.577	-	36,771.577	2.423.580	538.761	5.789.272		
3	CITIC SERAM ENERGY LTD.	SERAM NON BULA	-	3.094.850	-	3.094.850	-	3,094.850	2.179.218	-	-	-	-	915.617	-	915,617		
4	ENERGY EQUITY	SENGKANG	-	-	-	-	3.563.955	3,563.955	-	3.230.274	-	3,230.274	-	333.681	-	333,681		
5	I N P E X	E. KALIMANTAN	399.331.712	284.944.081	2.982.398.529.936	684.275.793	839.652.637	12.918.047	1.536.946.478	295.161.047	803.134.588	-	1.098.295.635	104.170.630	34.896.911	5.731.968		
6	KALIREZ PETROLEUM	BULA SERAM	-	1.187.720	12.128.007.891	1.187.720	-	1,187.720	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	MEDCO E&P INDONESIA	TARAKAN	-	25.856.300	249.900.717.272	25.856.300	712.579	9.013.250	35.582.129	-	581.864	-	581,864	-	130.719	6.109.645		
8	PETROCHINA INT'L (BERMUDA) LTD.	SALAWATI BASIN, PAPUA	-	70.947.958	714.488.663.216	70.947.958	631.121	3.155.120	74.734.199	-	470.957	-	470,957	-	160.164	3.155.105		
9	TOTAL E&P IND.	MAHAHAK	409.191.045	253.863.777	2.541.517.851.842	663.074.821	1.173.257.446	21.998.691	1.858.330.959	301.910.152	964.912.474	-	1.266.822.626	107.280.866	73.212.364	21.998.691		
10	V I C O	SANGA-SANGA	64.671.673	187.119.994	1.897.235.789.846	251.791.667	297.631.305	1.836.020	51.258.992	43.165.440	260.818.702	-	303.984.142	21.506.209	14.301.744	1.836.020		
11																		

MONITORING PENERIMAAN SDA MIGAS TAHUN 2009

No.	KKKS					Setoran atas Tagihan Lifting Tahun 2009 ke Rek. 600.502411 b)											
		Total (Periode Januari 2009 s.d. Desember 2010)				Periode Januari s.d. Desember 2009				Periode Januari s.d. Desember 2010				Total (Periode Januari 2009 s.d. Desember 2010)			
		Setoran atas Ekspor Minyak Mentah	Setoran atas Penjualan Gas	Setoran Overlifting KKKS	Total	Setoran atas Ekspor Minyak Mentah	Setoran atas Penjualan Gas	Setoran Overlifting KKKS	Total	Setoran atas Ekspor Minyak Mentah	Setoran atas Penjualan Gas	Setoran Overlifting KKKS	Total	Setoran atas Ekspor Minyak Mentah	Setoran atas Penjualan Gas	Setoran Overlifting KKKS	Total
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
		(15) = (7) + (11)	(16) = (8) + (12)	(17) = (9) + (13)	(18) = (15) + (16) + (17)	(18)	(20)	(21)	(22) = (18) + (20) + (21)	(23)	(24)	(25)	(26) = (23) + (24) + (25)	(27) = (18) + (23)	(28) = (20) + (24)	(29) = (21) + (25)	(30) = (27) + (28) + (29)
	A. REGION I						#REF!										
1	BOB PT.BSP-PERTAMINA HULU	CPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	C P I	MPK_PSC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	C P I	SIAM_PSC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	C P I	ROKAN_PSC	461.851.768	-	237.148.273	699.001.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	CONOCOPHILIPS	SOUTH NATUNA SEA - B	390.738.525	84.460.525	109.097.525	564.296.575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	EXXONMOBIL OIL	BEE	61.878.824	172.448.911	-	234.327.735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	EXXONMOBIL OIL	NSD	15.771.063	226.673.001	-	242.444.064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	EXXONMOBIL OIL	PASE	24.856	880.522	-	905.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KALILA (KORINCI BARU)	KORINCI	-	-	-	1.217.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KONDUR PETROLEUM	MALACCA STRAIT	-	-	5.890.201	5.890.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	MEDCO E&P MALAKA	AREA "A" NORTH SUMATRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PEARL OIL	TUNGGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PETROCHINA INT'L LTD.	JABUNG	48.765.425	195.177.598	49.940.094	293.883.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PETROSELAT LTD.	SELAT PANJANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PREMIER OIL	NATUNA SEA "A"	-	168.644.920	2.126.651	170.771.571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	STAR ENERGY LTD.	KAKAP	-	47.683.395	-	47.683.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	JOB (PSC) COSTA IGL	GEBAENG	-	2.385	-	2.385	-	33.667	33.667	-	-	-	-	-	33.667	-	33.667
18	PHE COSTA - JOB P COSTA INT'L	GEBAENG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	JOA (PSC) CONOCOPHILLIPS	SOUTH JAMBI	-	3.745.797	-	3.745.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PHE SOUTH JAMBI - JOB P CDPHI	SOUTH JAMBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL REGION I		979.030.463	880.934.261	404.203.744	2.264.168.467	-	33.667	33.667	-	-	-	-	-	33.667	-	33.667
	B. REGION II						#REF!										
1	BP WEST JAVA LTD. / PERTAMINA HULU ENER	ONWJ	-	53.701.901	20.029.086	73.730.987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CAMAR RES. CANADA	BAWEAN	-	-	-	1.444.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CNODC SES LTD.	SE. SUMATRA	173.313.951	13.015.151	75.278.292	261.607.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CONOCOPHILIPS (GRISIK)	CORRIDOR_PSC	-	336.238.594	20.818.015	357.056.609	229.665.168	-	229.665.168	-	-	-	-	-	229.665.168	-	229.665.168
5	KANGEAN ENERGY INDONESIA	KANGEAN	358.490	2.036.393	2.203.622	4.598.505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	HESS PANGKAH LTD.	PANGKAH	-	4.817.049	255.990	5.073.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	LAPINDO BRANTAS,INC.	BRANTAS	-	1.633.594	60.260	1.693.854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MEDCO E&P INDONESIA	LEMATANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	MEDCO E&P INDONESIA	BARISAN RIMAU	-	554.151	8.288.920	8.843.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	MEDCO E&P INDONESIA	S&C SUMATRA	-	17.793.043	15.782.724	33.575.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PETROCHINA LTD.	BANGKO	-	-	81	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SANTOS PTY LTD.	MADURA	-	7.589.075	-	7.589.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SANTOS PTY LTD.	SAMPANG	-	947.835	563.271	1.511.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	JOB (PSC) HESS	JAMBI MERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PHE JAMBI MERANG - JOB P HESS	JAMBI MERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	JOB (PSC) GOLDEN SPIKE	RAJA PENDOPO	-	24.993	-	24.993	281.495	-	281.495	-	-	-	-	-	281.495	-	281.495
17	PHE RAJA TEMPIRAI - JOB P GSIL	RAJA BLOCK	-	26.252	-	26.252	206.616	-	206.616	-	-	-	-	-	206.616	-	206.616
18	JOB (PSC) PETROCHINA E-JAVA	TUBAN	-	7.957.300	-	7.957.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PHE TUBAN E-JAVA - JOB P PEJ	TUBAN	-	38.933.281	-	38.933.281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	JOB (PSC) TALISMAN - OK	OGAN KOMERING	-	253.184	-	253.184	2.491.381	-	2.491.381	-	-	-	-	-	2.491.381	-	2.491.381
21	PHE OGAN KOMERING - JOB P TOKL	OGAN KOMERING	-	196.125	-	196.125	1.929.915	-	1.929.915	-	-	-	-	-	1.929.915	-	1.929.915
22	JOA (PSC) KODECO	WEST MADURA	-	10.032.867	17.281.303	27.314.190	214.093	-	214.093	-	-	-	-	-	214.093	-	214.093
23	PHE W KODECO - JOA P W MADURA	WEST MADURA	13.078.055	2.949.301	-	16.027.355	9.608.833	-	9.608.833	-	-	-	-	-	9.608.833	-	9.608.833
24	MOBIL CEPU LTD.	CEPU BLOCK	11.944.691	-	-	11.944.691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL REGION II		245.585.767	451.889.529	162.005.711	858.401.007	-	244.397.502	244.397.502	-	-	-	-	-	244.397.502	-	244.397.502
	C. REGION III						#REF!										
1	CHEVRON IND.	E. KALIMANTAN	301.858	66.670.689	1.269.881	68.242.427	6.163.100	-	6.163.100	-	-	-	-	-	6.163.100	-	6.163.100
2	CHEVRON IND.	MAKASSAR STRAIT	2.423.580	37.310.336	5.789.272	45.523.190	2.465.396	-	2.465.396	-	-	-	-	-	2.465.396	-	2.465.396
3	CITIC SERAM ENERGY LTD.	SERAM NON BULA	3.094.835	-	-	3.094.835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ENERGY EQUITY	SENGKANG	-	3.583.955	-	3.583.955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	I N P E X	E. KALIMANTAN	389.331.677	837.991.499	5.731.968	1.243.055.144	1.661.138	-	1.661.138	-	-	-	-	-	1.661.138	-	1.661.138
6	KALREZ PETROLEUM	BULA SERAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	MEDCO E&P INDONESIA	TARAKAN	-	712.583	6.109.645	6.822.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PETROCHINA INT'L (BERMUDA) LTD.	SALAWATI BASIN, PAPUA	-	631.121	3.155.105	3.786.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	TOTAL E&P IND.	MAHAKKAM	409.191.018	1.038.124.838	21.998.691	1.469.314.547	135.037.863	-	135.037.863	-	-	-	-	-	135.037.863	-	135.037.863
10	V I C O	SANGA-SANGA	64.671.648	275.120.447	1.836.020	341.628.115	22.510.854	-	22.510.854	-	-	-	-	-	22.510.854	-	22.510.854
11	JOB (PSC) MEDCO E&P TOMORI	SENORO TOILI, SULAWESI	-	-	2.633.649	2.633.649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PHE MEDCO TOMORI - JOB P MEDCO	SENORO TOILI, SULAWESI	2.495.459	-	-	2.495.459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	JOB (PSC) PETROCHINA SALAWATI	KEPALA BURUNG, PAPUA	-	-	6.451.034	6.451.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PHE SALAWATI - JOB P PS	KEPALA BURUNG, PAPUA	214.923	-	-	214.923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JOB (PSC) TOTAL TENGAH	TENGAH	-	-	8.456.490	8.456.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PHE TENGAH K - JOB P TENGAH	TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT PERTAMINA EP	INDONESIA	156.683.503	84.945.149	-	221.628.652	110.678.846	-	110.678.846	-	-	-	-	-	110.678.846	-	110.678.846
18	BENUO TAKA	WAILAWI BLOCK	-	185.915	-	185.915	256.162	-	256.162	-	-	-	-	-	256.162	-	256.162
19	BP BERAU LTD	TANGGUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	BP MUTURI	TANGGUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	BP WIRIAGAR	TANGGUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL REGION III		1.038.408.501	2.325.256.533	63.431.754	3.427.096.788	-	#REF!	278.773.358	-	-	-	-	-	278.773.358	-	278.773.358
	TOTAL REGION I, II, III		2.263.024.731	3.658.000.323	629.641.209	6.550.666.262	-	-	523.204.527	-	-	-	-	-	523.204.527	-	523.204.527
	KKKS NON PRODUCING		-	-	-	-	-	#REF!	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL REGION I, II, III + KKKS NON PRODUCING		2.263.024.731	3.658.000.323	629.641.209	6.550.666.262	-	#REF!	523.204.527	-	-	-	-	-	523.204.527	-	523.204.527
	Cross Check																
	Selish		2.263.024.731	3.658.000.323				#REF!									

Catatan :
a) Sumber data dari Laporan A-01, A-02, A-03, dan A-04 dari BPMIGAS
b) Setoran ke Rekening No. 600.502411 merupakan penyelesaian kewajiban PT Pertamina (Pers) ke Rekening No. 600.502411

MONITORING PENERIMAAN SDA MIGAS TAHUN 2009

		Total Setoran atas Tagihan Lifting Tahun 2009 ke Rek. 600.000411 dan Rek. 600.502411				Setoran atas Tagihan Lifting Tahun 2009 ke Rek. 502.000000 dari Pemakaian Minyak Mentah Dalam Negeri			Pembayaran Kewajiban Pemerintah Sektor Migas Tahun 2009 Melalui Rek. 600.000411 Yang Dilakukan Pada Periode Januari s.d. Desember 2009				
No.	KKKS	Setoran atas Ekspor Minyak Mentah	Setoran atas Penjualan Gas	Setoran Overlifting KKKS	Total	Periode Januari s.d. Desember 2009	Periode Januari s.d. Desember 2010	Total (Periode Januari 2009 s.d. Desember 2010)	PPN Migas	PBB Migas	PDRD Migas	Anggaran BPMIGAS	DMO Fee
		US\$ (31) = (15) + (27)	US\$ (32) = (16) + (28)	US\$ (33) = (17) + (29)	US\$ (34) = (31) + (32) + (33)	Rp (34)	Rp (35)	Rp (36) = (34) + (35)	Rp (37)	Rp (38)	Rp (39)	Rp (40)	US\$ (41)
A. REGION I													
1	BOB PT.BSP-PERTAMINA HULU	CPP	-	-	-	-	-	3.026.593.636.850	66.938.219.231	144.633.030.000	4.917.763.048	-	3.496.962
2	C P I	MFK - PSC	-	-	-	-	-	76.942.406.302	-	1.987.600.000	-	-	2.133
3	C P I	SIAM - PSC	-	-	-	-	-	318.757.718.748	-	56.133.570.000	-	-	8.639
4	C P I	ROKAN - PSC	461.851.788	-	237.149.273	699.001.041	-	45.601.166.246.502	703.190.015.596	996.026.780.000	44.126.290.353	-	49.568.664
5	CONOCOPHILIPS	SOUTH NATUNA SEA - B	390.738.525	64.460.525	109.097.525	564.296.575	-	1.691.187.063.818	457.789.129.288	808.381.910.000	906.343.581	-	51.543.468
6	EXXONMOBIL OIL	BEE	61.678.824	172.448.911	-	234.327.735	-	-	24.419.259.409	199.249.780.000	5.867.643.804	-	187.725
7	EXXONMOBIL OIL	NSD	15.771.063	226.674.064	-	242.444.064	-	-	16.782.431.004	166.819.390.000	7.516.933.300	-	-
8	EXXONMOBIL OIL	PAGE	24.856	880.522	-	905.378	-	-	50.867.171	14.498.360.000	21.377.103	-	-
9	KALILA (KORINCI BARU)	KORINCI	-	1.217.227	-	1.217.227	-	-	-	12.869.780.000	-	-	-
10	KONDUR PETROLEUM	MALACCA STRAIT	-	-	5.890.201	5.890.201	-	1.157.515.629.312	66.704.290.014	96.481.080.000	607.476.850	-	1.777.541
11	MEDCO E&P MALAKA	AREA "A" NORTH SUMATRA	-	-	-	-	-	-	-	8.157.810.000	-	-	-
12	PEARL OIL	TUNGKAL	-	-	-	-	-	18.485.973.214	16.003.546.889	32.139.700.000	-	-	-
13	PETROCHINA INT'L LTD.	JABUNG	48.765.425	195.177.598	49.940.094	293.883.117	-	1.406.567.460.258	251.734.822.098	133.517.600.000	-	-	3.753.861
14	PETROSELAT LTD.	SELAT PANJANG	-	-	-	-	-	11.391.407.876	16.074.582.115	12.369.690.000	-	-	-
15	PREMIER OIL	NATUNA SEA "A"	-	168.644.920	2.126.651	170.771.571	-	146.381.923.780	49.749.780.444	157.694.790.000	186.592.442	-	13.974
16	STAR ENERGY LTD.	KAKAP	-	47.683.395	-	47.683.395	-	550.782.208.426	34.429.532.507	80.141.680.000	189.461.916	-	-
17	JOB (PSC) COSTA IGL	GEBANG	-	36.032	-	36.032	-	694.824.210	1.514.451.955	40.618.020.000	-	-	-
18	PHE COSTA - JOB P COSTA INT'L	GEBANG	-	-	-	-	-	1.887	-	-	-	-	-
19	JOA (PSC) CONOCOPHILIPS	SOUTH JAMBI	-	3.745.797	-	3.745.797	-	7.686.709.524	3.897.096.139	62.571.570.000	-	-	64.888
20	PHE SOUTH JAMBI - JOB P CDPHI	SOUTH JAMBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REGION I		979.030.463	880.967.928	404.203.744	2.264.202.134	-	-	54.014.143.210.705	1.709.277.823.660	3.024.290.130.000	64.339.882.397	-	110.417.854
B. REGION II													
1	BP WEST JAVA, LTD. / PERTAMINA HULU ENER	ONWJ	-	53.701.901	20.029.086	73.730.987	-	2.450.945.054.840	216.783.799.952	553.706.370.000	-	-	176.900
2	CAMAR RES. CANADA	BAWANG	-	-	1.444.147	1.444.147	-	-	-	27.875.040.000	-	-	-
3	CNODC SES LTD.	SE SUMATRA	173.313.951	13.015.151	75.278.292	261.607.384	-	2.644.036.783.335	236.400.744.414	1.053.710.150.000	-	-	3.097.995
4	CONOCOPHILIPS (GRISIKI)	CORRIDOR - PSC	-	565.903.763	20.816.015	586.721.777	-	1.802.436.453.128	153.654.565.751	577.911.300.000	11.364.355	-	3.312.229
5	KANGEAN ENERGY INDONESIA	KANGKAN	358.490	2.036.393	2.203.622	4.598.505	-	34.535.487.294	109.421.441.418	96.256.080.000	-	-	-
6	HESS PANGKAH LTD.	PANGKAH	-	4.817.049	255.990	5.073.039	-	135.404.367.969	86.640.945.570	6.709.960.000	-	-	-
7	LAPINDO BRANTAS, INC.	BRANTAS	-	1.633.594	60.260	1.693.854	-	-	153.638.448	35.869.100.000	-	-	-
8	MEDCO E&P INDONESIA	LEMATANG	-	-	-	-	-	461.118.878	-	2.618.860.000	-	-	-
9	MEDCO E&P INDONESIA	BARISAN RIMAU	-	554.151	8.288.920	8.843.071	-	2.957.841.000.864	85.242.398.963	76.444.920.000	86.571.330	-	3.648.888
10	MEDCO E&P INDONESIA	S&C SUMATRA	-	17.793.043	15.782.724	33.575.767	-	1.096.566.640.483	70.827.892.482	121.601.790.000	374.369.714	-	637.988
11	PETROCHINA LTD.	BANGKO	-	-	81	81	-	7.685.743.441	-	6.575.710.000	-	-	-
12	SANTOS PTY LTD.	MADURA	-	7.589.075	-	7.589.075	-	-	95.040.316.896	284.275.520.000	-	-	-
13	SANTOS PTY LTD.	SAMPANG	-	947.835	563.271	1.511.106	-	122.021.014.579	163.719.660.733	10.662.900.000	-	-	-
14	JOB (PSC) HESS	JAMBI MERANG	-	-	-	-	-	-	-	85.899.710.000	-	-	-
15	PHE JAMBI MERANG - JOB P HESS	JAMBI MERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	JOB (PSC) GOLDEN SPIKE	RAJA PENDOP	-	306.487	-	306.487	-	32.967.993.016	3.190.633.997	74.163.050.000	-	-	-
17	PHE RAJA TEMPIRAI - JOB P GSIL	RAJA BLOCK	-	232.868	-	232.868	-	7.065.367.922	-	-	-	-	-
18	JOB (PSC) PETROCHINA E JAVA	TUBAN	-	7.957.300	-	7.957.300	-	509.485.639.500	66.896.822.607	27.284.730.000	-	-	18.990
19	PHE TUBAN E JAVA - JOB P PEJ	TUBAN	-	38.933.281	-	38.933.281	-	169.993.167.867	-	-	-	-	-
20	JOB (PSC) TALISMAN - OK	OGAN KOMERING	-	2.744.565	-	2.744.565	-	276.982.174.598	10.003.048.492	46.251.320.000	315.110.929	-	318.483
21	PHE OGAN KOMERING - JOB P TOKL	OGAN KOMERING	-	2.126.041	-	2.126.041	-	199.697.206.979	-	-	315.110.929	-	-
22	JOA (PSC) KODECO	WEST MADURA	-	10.246.981	17.281.303	27.528.283	-	833.696.785.228	176.014.830.760	120.804.760.000	-	-	5.357.066
23	PHE W KODECO - JOA P W MADURA	WEST MADURA	13.078.055	12.558.134	-	25.636.189	-	585.157.809.276	-	-	-	-	-
24	MOBIL CEPU LTD.	CEPU BLOCK	-	11.944.691	-	11.944.691	-	-	-	51.826.060.000	-	-	-
TOTAL REGION II		245.585.767	696.207.031	162.005.711	1.103.798.509	-	-	13.956.941.789.187	1.477.771.094.663	3.240.447.330.000	1.102.527.256	-	16.569.539
C. REGION III													
1	CHEVRON IND.	E. KALIMANTAN	301.858	72.833.789	1.269.881	74.405.527	-	2.423.304.711.519	254.929.891.714	148.920.000.000	220.015.692	-	1.015.985
2	CHEVRON IND.	MAKASAR STRAIT	2.423.580	39.775.734	5.789.272	47.988.585	-	644.247.623.886	66.846.396.256	91.922.900.000	139.695.186	-	5.535.059
3	CITIC SERAM ENERGY LTD.	SERAM NON BULA	3.094.835	-	-	3.094.835	-	-	43.563.680.331	50.562.080.000	-	-	-
4	ENERGY EQUITY	SENGKANG	-	3.563.955	-	3.563.955	-	-	2.769.875.501	83.703.120.000	-	-	-
5	I N P E X	E. KALIMANTAN	399.331.677	839.652.637	-	5.731.968	1.244.716.282	2.982.396.529.936	-	-	2.155.923.607	-	12.546.502
6	KALREZ PETROLEUM	BULA SERAM	-	-	-	-	-	12.129.007.891	4.490.382.638	2.442.890.000	-	-	132.421
7	MEDCO E&P INDONESIA	TARAKAN	-	712.583	6.109.645	6.822.228	-	249.900.717.272	13.520.639.195	8.281.930.000	65.026.328	-	218.555
8	PETROCHINA INT'L (BERMUDA) LTD.	SALAWATI BASIN, PAPUA	-	631.121	3.155.105	3.786.226	-	714.488.663.216	63.459.214.320	24.331.110.000	-	-	2.380.851
9	TOTAL E&P IND.	MAHAKKAN	409.191.018	1.173.162.701	21.996.691	1.604.352.410	-	2.541.517.851.842	1.328.562.832.238	960.633.170.000	4.892.345.686	-	12.530.095
10	V I C O	SANGA-SANGA	64.671.648	297.631.300	1.836.020	364.138.969	-	1.897.235.789.846	263.610.379.412	353.727.030.000	1.767.105.664	-	677.531
11	JOB (PSC) MEDCO E&P TOMORI	SENORO TOIL, SULAWESI	-	-	2.633.649	2.633.649	-	36.190.260.634	47.453.697.905	8.332.490.000	-	-	2.435.092
12	PHE MEDCO TOMORI - JOB P MEDCO	SENORO TOIL, SULAWESI	2.495.459	-	-	2.495.459	-	5.713.924.924	-	-	-	-	-
13	JOB (PSC) PETROCHINA SALAWATI	KEPALA BURUNG, PAPUA	-	-	6.451.034	6.451.034	-	119.852.998.500	36.511.286.945	103.073.580.000	-	-	710.980
14	PHE SALAWATI - JOB P PS	KEPALA BURUNG, PAPUA	214.923	-	214.923	-	-	128.707.102.214	-	-	-	-	-
15	JOB (PSC) TOTAL TENGAH	TENGAH	-	-	8.456.490	8.456.490	-	-	-	865.358.270.000	-	-	-
16	PHE TENGAH K - JOB P TENGAH	TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT PERTAMINA EP	INDONESIA	156.683.503	175.623.995	-	332.307.498	-	10.268.216.173.273	834.899.186.400	3.344.100.030.000	4.571.982.540	-	328.075.031
18	BENUO TAKA	WAILAWI BLOCK	-	442.077	-	442.077	-	-	-	1.427.680.000	-	-	-
19	BP BERAU LTD	TANGGUH	-	-	-	-	-	-	-	2.043.941.986	-	-	-
20	BP MUTURI	TANGGUH	-	-	-	-	-	-	-	582.211.121	-	-	-
21	BP WIRIAGAR	TANGGUH	-	-	-	-	-	-	-	195.576.893	-	-	-
TOTAL REGION III		1.038.408.501	2.604.029.891	63.431.754	3.705.870.146	-	-	22.023.902.354.953	2.959.917.562.855	6.049.638.010.000	13.812.104.704	-	366.257.213
TOTAL REGION I, II, III		2.263.024.731	4.181.204.850	629.641.209	7.073.870.789	-	-	89.994.987.354.845	6.146.9				

MONITORING PENERIMAAN SDA MIGAS TAHUN 2009

			Pembayaran Kewajiban Pemerintah Sektor Migas Tahun 2009 Melalui Rek. 600.000411 Yang Dilakukan Pada Periode Januari s.d. Desember 2010						
No.	KKKS		PPN Migas	PBB Migas	PDRD Migas	Anggaran BPMIGAS	Fee Penjualan Migas	DMO Fee	Underlifting KKKS
			Rp	Rp	Rp	Rp	US\$	US\$	US\$
			(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
A. REGION I									
1	BOB PT.BSP-PERTAMINA HULU	CPP	-	-	-	-	-	870.286	36.852
2	C P I	MFK - PSC	-	-	-	-	-	399	-
3	C P I	SIAM - PSC	-	-	-	-	-	1.356	-
4	C P I	ROKAN - PSC	-	-	-	-	-	12.904.716	-
5	CONOCOPHILLIPS	SOUTH NATUNA SEA - B	-	-	-	-	-	19.792.217	-
6	EXXONMOBIL OIL	BEE	-	-	-	-	-	-	-
7	EXXONMOBIL OIL	NSO	-	-	-	-	-	-	-
8	EXXONMOBIL OIL	PASE	-	-	-	-	-	95.989	-
9	KALILA (KORINCI BARU)	KORINCI	-	-	-	-	-	-	-
10	KONDUR PETROLEUM	MALACCA STRAIT	-	-	-	-	-	425.695	-
11	MEDCO E&P MALAKA	AREA "A" NORTH SUMATRA	-	-	-	-	-	-	-
12	PEARL OIL	TUNGKAL	-	-	-	-	-	-	-
13	PETROCHINA INT'L LTD.	JABUNG	-	-	-	-	-	1.245.282	-
14	PETROSELAT LTD.	SELAT PANJANG	-	-	-	-	-	-	-
15	PREMIER OIL	NATUNA SEA "A"	-	-	-	-	-	-	-
16	STAR ENERGY LTD.	KAKAP	-	-	-	-	-	-	18.245.222
17	JOB (PSC) COSTA IGL	GEBANG	-	-	-	-	-	-	-
18	PHE COSTA - JOB P COSTA INT'L	GEBANG	-	-	-	-	-	-	-
19	JOA (PSC) CONOCOPHILLIPS	SOUTH JAMBI	-	-	-	-	-	2.768	-
20	PHE SOUTH JAMBI - JOB P COPHI	SOUTH JAMBI	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REGION I			-	-	-	-	-	35.338.688	18.281.874
B. REGION II									
1	BP WEST JAVA LTD. / PERTAMINA HULU ENER	ONWJ	-	-	-	-	-	-	-
2	CAMAR RES. CANADA	BAWEAN	-	-	-	-	-	-	-
3	CNODC SES LTD.	SE. SUMATRA	-	-	-	-	-	824.404	-
4	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK)	CORRIDOR - PSC	-	-	-	-	-	696.061	-
5	KANGEAN ENERGY INDONESIA	KANGEAN	-	-	-	-	-	-	-
6	HESS PANGKAH LTD.	PANGKAH	-	-	-	-	-	-	-
7	LAPINDO BRANTAS,INC.	BRANTAS	-	-	-	-	-	-	-
8	MEDCO E&P INDONESIA	LEMATANG	-	-	-	-	-	-	-
9	MEDCO E&P INDONESIA	BARISAN RIMAU	-	-	-	-	-	912.554	-
10	MEDCO E&P INDONESIA	S&C SUMATRA	-	-	-	-	-	148.349	-
11	PETROCHINA LTD.	BANGKO	-	-	-	-	-	-	-
12	SANTOS PTY LTD.	MADURA	-	-	-	-	-	-	-
13	SANTOS PTY LTD.	SAMPANG	-	-	-	-	-	-	-
14	JOB (PSC) HESS	JAMBI MERANG	-	-	-	-	-	-	-
15	PHE JAMBI MERANG - JOB P HESS	JAMBI MERANG	-	-	-	-	-	-	-
16	JOB (PSC) GOLDEN SPIKE	RAJA PENDOPO	-	-	-	-	-	26.137	-
17	PHE RAJA TEMPIRAI - JOB P GSIL	RAJA BLOCK	-	-	-	-	-	-	-
18	JOB (PSC) PETROCHINA E.JAVA	TUBAN	-	-	-	-	-	5.089	-
19	PHE TUBAN E.JAVA - JOB P PEJ	TUBAN	-	-	-	-	-	46.226	-
20	JOB (PSC) TALISMAN - OK	OGAN KOMERING	-	-	-	-	-	90.971	33.632
21	PHE OGAN KOMERING - JOB P TOKL	OGAN KOMERING	-	-	-	-	-	-	-
22	JOA (PSC) KODECO	WEST MADURA	-	-	-	-	-	421.670	-
23	PHE W KODECO - JOA P W MADURA	WEST MADURA	-	-	-	-	-	-	-
24	MOBIL CEPU LTD.	CEPU BLOCK	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REGION II			-	-	-	-	-	3.171.440	33.632
C. REGION III									
1	CHEVRON IND.	E. KALIMANTAN	-	-	-	-	-	490.644	-
2	CHEVRON IND.	MAKASAR STRAIT	-	-	-	-	-	1.421.804	-
3	CITIC SERAM ENERGY LTD.	SERAM NON BULA	-	-	-	-	-	-	-
4	ENERGY EQUITY	SENGKANG	-	-	-	-	-	-	-
5	I N P E X	E. KALIMANTAN	-	-	-	-	-	1.755.108	-
6	KALREZ PETROLEUM	BULA SERAM	-	-	-	-	-	-	-
7	MEDCO E&P INDONESIA	TARAKAN	-	-	-	-	-	191.200	-
8	PETROCHINA INT'L (BERMUDA) LTD.	SALAWATI BASIN, PAPUA	-	-	-	-	-	314.574	-
9	TOTAL E&P IND.	MAHAKAM	-	-	-	-	-	1.753.960	-
10	V I C O	SANGA-SANGA	-	-	-	-	-	165.619	-
11	JOB (PSC) MEDCO E&P TOMORI	SENORO TOILI, SULAWESI	-	-	-	-	-	-	-
12	PHE MEDCO TOMORI - JOB P MEDCO	SENORO TOILI, SULAWESI	-	-	-	-	-	-	-
13	JOB (PSC) PETROCHINA SALAWATI	KEPALA BURUNG, PAPUA	-	-	-	-	-	-	-
14	PHE SALAWATI - JOB P PS	KEPALA BURUNG, PAPUA	-	-	-	-	-	-	-
15	JOB (PSC) TOTAL-TENGAH	TENGAH	-	-	-	-	-	-	-
16	PHE TENGAH K - JOB P TENGAH	TENGAH	-	-	-	-	-	-	-
17	PT PERTAMINA EP	INDONESIA	-	-	-	-	-	159.354.326	104.348.438
18	BENUO TAKA	WAILAWI BLOCK	-	-	-	-	-	-	-
19	BP BERAU LTD	TANGGUH	-	-	-	-	-	-	-
20	BP MUTURI	TANGGUH	-	-	-	-	-	-	-
21	BP WIRIAGAR	TANGGUH	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REGION III			-	-	-	-	-	165.447.234	104.348.438
TOTAL REGION I, II, III			-	-	-	-	-	203.957.362	122.663.944
KKKS NON PRODUCING			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REGION I, II, III + KKKS NON PRODUCING			-	-	-	-	147.363.664	203.957.362	122.663.944
Cross Check			-	-	-	-	-	203.957.362	123.261.709
Selfish			-	-	-	-	-	-	(587.765)

Catatan :
a) Sumber data dari Laporan A-01, A-02, A-03, dan A-04 dari BPMIGAS
b) Setoran ke Rekening No. 600.502411 merupakan penyelesaian kewajiban PT Pertamina (Persero

MONITORING HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS TAHUN 2010

			Tagihan Lifting Pemerintah ⁽⁴⁾				
No.	KKKS		Minyak Mentah			Total	
			Ekspor	Inter Area			
				US\$	US\$		Ekuv Rp
A. REGION I							
1	BOB PT BSP-PERTAMINA HULU	CPP	-	320.262.227	2.899.989.086.809	320.262.227	
2	C P I	MFK - PSC	-	-	2.687.600	2.687.600	
3	C P I	SIAG - PSC	-	-	42.117.806	42.117.806	
4	C P I	ROKAN - PSC	568.893.344	5.936.147.614	53.631.707.038.447	6.505.040.958	
5	CONOCOPHILLIPS	SOUTH NATUNA SEA - B	688.750.801	372.307.761	3.358.344.804.596	1.071.058.561	
6	EXXONMOBIL OIL	BEE	66.760.581	-	-	66.760.581	
7	EXXONMOBIL OIL	NSO	19.047.370	-	-	19.047.370	
8	EXXONMOBIL OIL/TRIANGLE	PASE	-	-	-	-	
9	KALILA (KORINCI BARU)	KORINCI	-	-	-	-	
10	KONDUR PETROLEUM	MALACCA STRAIT	-	-	895.213.277.916	99.000.063	
11	MEDCO E&P MALAKA	AREA "A" NORTH SUMATRA	-	-	-	-	
12	PEARL OIL	TUNGKAL	-	3.301.482	29.839.374.523	3.301.482	
13	PETROCHINA INT'L LTD.	JABUNG	135.199.473	185.637.654	1.673.932.904.488	320.837.122	
14	PETROSELAT LTD.	SELAT PANJANG	-	1.211.730	10.979.205.983	1.211.730	
15	PREMIER OIL	NATUNA SEA "A"	-	18.288.807	164.014.016.692	18.288.807	
16	STAR ENERGY LTD.	KAKAP	-	31.040.791	278.629.593.059	31.040.791	
17	JOB (PSCI) COSTA IGL	GEBANG	-	40.044	359.909.250	40.044	
18	PHE COSTA - JOB P COSTA INT'L	GEBANG	-	-	-	-	
19	JOA (PSCI) CONOCOPHILLIPS	SOUTH JAMBI	-	148.454	1.380.374.174	148.454	
20	PHE SOUTH JAMBI - JOB P CPHI	SOUTH JAMBI	-	19.750	177.248.122	19.750	
21	PT SELE RAYA MERANGIN DUA	TAMPI	-	859.642	5.919.179.804	859.642	
22	PT SPR LANGKAK	SLC / MFK	-	2.691.223	24.170.471.389	2.691.223	
TOTAL REGION I			1.488.651.568	7.015.563.446	63.378.540.210.027	8.594.215.015	
B. REGION II							
1	BP WEST JAVA, LTD.	DNWJ	-	376.731.378	3.400.993.300.513	376.731.378	
2	CAMAR RES. CANADA / GFP RESOURCES	BAWEAN	-	-	-	-	
3	CNOOC SES LTD.	SE. SUMATRA	224.834.697	382.545.385	3.450.549.993.638	607.380.082	
4	CONOCOPHILLIPS (GRISIK)	CORRIDOR - PSC	-	206.291.892	1.865.199.022.415	206.291.892	
5	KANGKANG ENERGY INDONESIA	KANGKANG	-	2.141.889	18.159.199.341	2.141.889	
6	HESS PANGKAH LTD.	PANGKAH	-	11.253.306	100.109.995.719	11.253.306	
7	LAPINDO BRANTAS,INC.	BRANTAS	-	-	-	-	
8	MEDCO E&P INDONESIA	LEMATANG	-	18.457	167.303.890	18.457	
9	MEDCO E&P INDONESIA	BARISAN RIMAU	-	305.168.740	2.769.413.860.057	305.168.740	
10	MEDCO E&P INDONESIA	S&C SUMATRA	-	161.281.141	1.450.727.487.035	161.281.141	
11	PETROCHINA LTD.	BANGKO	-	226.306	2.014.919.478	226.306	
12	SANTOS PTY LTD.	MADURA	-	-	-	-	
13	SANTOS PTY LTD.	SAMPANG	229.191	15.364.487	137.435.331.921	15.993.678	
14	JOB (PSCI) HESS	JAMBI MERANG	-	-	-	-	
15	PHE JAMBI MERANG - JOB P HESS	JAMBI MERANG	-	-	-	-	
16	JOB (PSCI) GOLDEN SPIKE	RAJA PENDOPPO	-	9.523.495	86.255.934.303	9.523.495	
17	PHE RAJA TEMPIRAI - JOB P GSIL	RAJA BLOCK	-	2.398.289	21.430.640.280	2.398.289	
18	JOB (PSCI) PETROCHINA L JAWA	TUBAN	(15.084.400)	109.572.606	985.283.538.553	94.488.206	
19	PHE TUBAN E JAWA - JOB P PEJ	TUBAN	55.440.986	25.956.877	233.367.534.090	81.397.862	
20	JOB (PSCI) TALISMAN - OK	OGAN KOMERING	-	38.334.775	346.423.251.712	38.334.775	
21	PHE OGAN KOMERING - JOB P TOKI	OGAN KOMERING	-	27.202.860	245.701.673.775	27.202.860	
22	JOA (PSCI) KODECO	WEST MADURA	-	174.907.282	1.577.915.099.445	174.907.282	
23	PHE W KODECO - JOA P W MADURA	WEST MADURA	33.696.384	107.186.925	965.982.494.880	140.883.310	
24	MOBIL CEPU LTD.	CEPU BLOCK	-	72.442.441	-	72.442.441	
TOTAL REGION II			371.559.298	1.956.107.092	17.658.130.591.026	2.327.686.391	
C. REGION III							
1	CHEVRON IND.	E. KALIMANTAN	(13.191.372)	361.714.790	3.267.016.367.843	348.523.419	
2	CHEVRON IND.	MAKASAR STRAIT	-	44.072.787	398.177.460.487	44.072.787	
3	CITIC SERAM ENERGY LTD.	SERAM NON BULA	1.341.354	-	-	1.341.354	
4	ENERGY EQUITY	SENGKANG	-	-	-	-	
5	INPEX	E. KALIMANTAN	499.006.989	311.970.862	2.823.525.151.154	810.977.852	
6	KALREZ PETROLEUM	BULA SERAM	-	1.415.059	12.773.683.820	1.415.059	
7	MEDCO E&P INDONESIA	TARAKAN	-	30.500.438	274.209.181.276	30.500.438	
8	PETROCHINA INT'L (BERMUDA) LTD.	SALAWATI BASIN, PAPUA	46.163.887	50.978.028	463.972.495.098	97.141.916	
9	TOTAL E&P IND.	MAHAKAM	509.459.260	287.898.171	2.598.023.591.744	797.357.430	
10	VICO	SANGA-SANGA	58.401.752	295.328.532	2.663.669.155.187	353.731.294	
11	JOB (PSCI) MEDCO E&P TOMORI	SENORO TOLL, SULAWESI	-	3.959.469	35.647.088.507	3.959.469	
12	PHE MEDCO TOMORI - JOB P MEDCO	SENORO TOLL, SULAWESI	6.178.695	-	-	6.178.695	
13	JOB (PSCI) PETROCHINA SALAWATI	KEPALA BURUNG, PAPUA	-	11.900.370	108.560.708.080	11.900.370	
14	PHE SALAWATI - JOB P PETROCHINA SALAWATI	KEPALA BURUNG, PAPUA	5.852.072	11.162.103	101.614.723.146	16.814.175	
15	JOB (PSCI) TOTAL TENGAH	TENGAH	-	-	-	-	
16	PHE TENGAH K - JOB P TENGAH	TENGAH	-	-	-	-	
17	PT PERTAMINA EP	INDONESIA	337.856.447	1.221.249.259	11.025.864.117.679	1.559.106.706	
18	BENUO TAKA	WAILAWI BLOCK	-	-	-	-	
19	BP BERAU LTD	TANGGUH	4.250.945	-	-	4.250.945	
20	BP MUTURI	TANGGUH	1.279.019	-	-	1.279.019	
21	BP WIRIAGAR	TANGGUH	909.880	-	-	909.880	
22	PEARL OIL SEBUKU	-	-	-	-	-	
TOTAL REGION III			1.457.308.928	2.632.150.869	23.773.053.733.801	4.089.458.797	
TOTAL REGION I, II, III			3.317.519.795	11.603.821.407	104.809.724.534.854	14.921.341.202	
KKKS NON LIFTING & PRODUCING							
TOTAL REGION I, II, III + KKKS NON LIFTING & PRODUCING			3.317.519.795	11.603.821.407	104.809.724.534.854	14.921.341.202	
Cross Check			3.317.519.795	11.603.821.407	104.809.724.534.854	14.921.341.202	
Selah			-	-	-	-	

Catatan :

a) Sumber data dari Laporan A-01, A-02, A-03, dan A-04 dari BPMIGAS

b) Setoran ke Rekening No. 600.502411 merupakan penyelesaian kewajiban PT Pertamina (Persero) yang dilakukan melalui offset pembayaran kewajiban-kewajiban Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero)

MONITORING HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS TAHUN 2010

			Setoran atas Tagihan Lifting Tahun 2010 ke Rek. 600.000411						
No.	KKKS		Gas Alam	Overlifting KKKS	Total	Setoran atas Ekspor Minyak Mentah	Setoran atas Penjualan Gas	Setoran Overlifting KKKS	Total
			US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
			(5)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) + (8) + (9)
A. REGION I									
1	BOB PT.BSP-PERTAMINA HULU	CPP	-	-	320.262.227	-	-	-	-
2	C P I	MFK - PSC	-	-	2.687.800	-	-	-	-
3	C P I	SIAG - PSC	-	-	42.117.808	-	-	-	-
4	C P I	ROKAN - PSC	-	50.301.658	6.555.342.616	457.267.316	-	50.301.658	507.568.974
5	CONOCOPHILLIPS	SOUTH NATUNA SEA - B	201.294.404	-	1.272.352.966	636.615.444	188.245.074	-	824.860.518
6	EXXONMOBIL OIL	BEE	235.318.657	-	302.079.238	50.143.777	221.980.816	-	272.124.592
7	EXXONMOBIL OIL	NSO	304.521.433.82	-	323.568.803	12.975.767	302.852.225.93	-	315.827.993
8	EXXONMOBIL OIL/TRIANGLE	PASE	6.743.909	-	6.743.909	-	6.626.803	-	6.626.803
9	KALILA (KORINCI BARU)	KORINCI	786.656	-	786.656	-	680.247	-	680.247
10	KONDUR PETROLEUM	MALACCA STRAIT	-	-	99.000.063	-	-	-	-
11	MEDCO E&P MALAKA	AREA "A" NORTH SUMATRA	-	-	-	-	-	-	-
12	PEARL OIL	TUNGKAL	-	-	3.301.482	-	-	-	-
13	PETROCHINA INT'L LTD.	JABUNG	263.561.930	-	584.399.057	115.810.914	220.407.654	-	336.218.568
14	PETROSELAT LTD.	SELAT PANJANG	-	-	1.211.730	-	-	-	-
15	PREMIER OIL	NATUNA SEA "A"	235.225.234	-	253.514.041	-	214.607.084	-	214.607.084
16	STAR ENERGY LTD.	KAKAP	82.212.930	-	113.253.722	-	74.779.637	-	74.779.637
17	JOB (PSCI) COSTA IGL	GEBANG	19.953	-	59.997	-	17.317	-	17.317
18	PHE COSTA - JOB P COSTA INT'L	GEBANG	-	-	-	-	-	-	-
19	JOA (PSCI) CONOCOPHILLIPS	SOUTH JAMBI	522.526	-	671.980	-	741.871	-	741.871
20	PHE SOUTH JAMBI - JOB P COPHI	SOUTH JAMBI	-	-	18.750	-	-	-	-
21	PT SELE RAYA MERANGIN DUA	TAMPI	-	-	659.642	-	-	-	-
22	PT SPR LANGGAK	SLC / MFK	-	-	2.691.223	-	-	-	-
TOTAL REGION I			1.330.207.634	50.301.658	9.884.724.307	1.272.813.217	1.230.938.729	50.301.658	2.554.053.604
B. REGION II									
1	BP WEST JAVA, LTD.	ONWJ	73.589.421	-	450.320.799	-	51.534.549	-	51.534.549
2	CAMAR RES. CANADA / GFP RESOURCES	BAWEAN	-	-	-	-	-	-	-
3	CNOOC SES LTD.	SE. SUMATRA	12.743.367	-	620.123.449	162.551.284	10.736.186	-	173.287.470
4	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK)	CORRIDOR - PSC	840.981.900	-	1.047.273.792	-	801.009.677	-	801.009.677
5	KANGKANG ENERGY INDONESIA	KANGKANG	1.523.620	-	3.665.509	-	1.117.145	-	1.117.145
6	HESS PANGKAH LTD.	PANGKAH	6.195.241	-	17.448.547	-	5.539.150	-	5.539.150
7	LAPINDO BRANTAS INC.	BRANTAS	1.236.206	-	1.236.206	-	1.164.911	-	1.164.911
8	MEDCO E&P INDONESIA	LEMATANG	1.533.739	-	1.552.196	-	772.536	-	772.536
9	MEDCO E&P INDONESIA	BARISAN RIMAU	762.615	-	305.932.354	-	598.479	-	598.479
10	MEDCO E&P INDONESIA	S&C SUMATRA	33.492.840	-	194.773.981	-	26.038.021	-	26.038.021
11	PETROCHINA LTD.	BANGKO	-	-	226.306	-	-	-	-
12	SANTOS PTY.LTD.	MADURA	7.774.862	-	7.774.862	-	7.111.997	-	7.111.997
13	SANTOS PTY.LTD.	SAMPANG	4.310.515	-	19.904.193	83.724	3.945.116	-	4.028.840
14	JOB (PSCI) HESS	JAMBI MERANG	-	-	-	-	-	-	-
15	PHE JAMBI MERANG - JOB P HESS	JAMBI MERANG	-	-	-	-	-	-	-
16	JOB (PSCI) GOLDEN SPIKE	RAJA PENDING	257.669	-	9.781.164	-	230.778	-	230.778
17	PHE RAJA TEMPIRAI - JOB P GSIL	RAJA BLOCK	199.908	-	2.598.199	-	179.077	-	179.077
18	JOB (PSCI) PETROCHINA E-JAVA	TUBAN	-	-	94.488.206	-	-	-	-
19	PHE TUBAN E-JAVA - JOB P PEJ	TUBAN	13.487	-	81.411.350	35.184.740	13.487	-	35.198.228
20	JOB (PSCI) TALISMAN - OK	OGAN KOMERING	1.234.114	-	39.568.889	-	1.051.298	-	1.051.298
21	PHE OGAN KOMERING - JOB P TOKL	OGAN KOMERING	955.990	-	28.158.950	-	814.374	-	814.374
22	JOA (PSCI) KODECO	WEST MADURA	22.105.151	-	197.012.433	-	17.252.121	-	17.252.121
23	PHE W KODECO - JOA P W MADURA	WEST MADURA	22.871.572	-	163.754.882	33.696.384	20.673.778	-	54.370.161
24	MOBIL CEPU LTD.	CEPU BLOCK	-	-	72.442.441	65.615.211	-	-	65.615.211
TOTAL REGION II			1.031.782.217	-	3.359.448.608	297.131.343	949.782.678	-	1.246.914.021
C. REGION III									
1	CHEVRON IND.	E. KALIMANTAN	328.715.488	-	677.238.905	1.761.130	214.212.876	-	215.974.007
2	CHEVRON IND.	MAKASAR STRAIT	41.011.071	-	85.083.858	-	27.577.285	-	27.577.285
3	CITIC SERAM ENERGY LTD.	SERAM NON BULA	-	-	1.341.354	1.341.354	-	-	1.341.354
4	ENERGY EQUITY	SENGKANG	5.947.213	-	5.947.213	-	5.053.903	-	5.053.903
5	INPEX	E. KALIMANTAN	1.045.138.092	-	1.856.115.944	383.182.414	1,042.487.964	-	1,425.670.378
6	KALREZ PETROLEUM	BULA SERAM	-	-	1,415.059	-	-	-	-
7	MEDCO E&P INDONESIA	TARAKAN	1,201.069	-	31,701.507	-	189.210	-	189.210
8	PETROCHINA INT'L (BERMUDA) LTD.	SALAWATI BASIN, PAPUA	830.785	-	97,972.700	44,119.417	686.035	-	44,805.452
9	TOTAL E&P IND.	MAHAKAM	1,402.259.997	-	2,199.617.429	382,560.795	1,393.609.345	-	1,776.170.140
10	V.I.C.O	SANGA-SANGA	263,909.998	-	617,541.282	53,512.513	263,451.830	-	316,964.342
11	JOB (PSCI) MEDCO E&P TOMORI	SENORO TOLL, SULAWESI	-	-	3,959.469	-	-	-	-
12	PHE MEDCO TOMORI - JOB P MEDCO	SENORO TOLL, SULAWESI	-	-	6,178.695	-	-	-	-
13	JOB (PSCI) PETROCHINA SALAWATI	KEPALA BURUNG, PAPUA	-	-	11,900.370	-	-	-	-
14	PHE SALAWATI - JOB P PETROCHINA SALAWATI	KEPALA BURUNG, PAPUA	-	-	16,814.175	2,253.208	-	-	2,253.208
15	JOB (PSCI) TOTAL TENGAH	TENGAH	-	-	-	-	-	-	-
16	PHE TENGAH K - JOB P TENGAH	TENGAH	-	-	-	-	-	-	-
17	PT PERTAMINA EP	INDONESIA	193.199.530	-	1.752.305.236	268.479.018	162.393.380	-	430.872.398
18	BENUO TAKA	WAILAWI BLOCK	643.521	-	643.521	-	555.440	-	555.440
19	BP BERAU LTD	TANGGUH	21.036.941	-	25.289.886	3.419.267	19.161.990	-	22.581.257
20	BP MUTURI	TANGGUH	6.330.229	-	7.609.248	1.131.372	5.765.489	-	6.896.861
21	BP WIRIAGAR	TANGGUH	2.126.464	-	3.036.344	804.769	1.936.756	-	2.741.524
22	PEARL OIL SEBUKU	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REGION III			3,312.252.397	-	7,401.712.193	1,142.565.257	3,137.081.503	-	4,279.646.760
TOTAL REGION I, II, III			5,674.242.248	50,301.658	20,645.885.109	2,712.509.817	5,317.802.909	50,301.658	8,080.614.384
KKKS NON LIFTING & PRODUCING			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REGION I, II, III + KKKS NON LIFTING & PRODUCING			5,674.242.248	50,301.658	20,645.885.109	2,712.509.817	5,317.802.909	50,301.658	8,080.614.384
Cross Check			5,674.242.248	50,301.658	20,645.885.109	2,712.509.817	5,317.802.909	50,301.658	8,080.614.384
Selah			-	-	-	-	-	-	-

Catatan :

a) Sumber data dari Laporan A-01, A-02, A-03, dan A-04 dari BPMIGAS

b) Setoran ke Rekening No. 600.502411 merupakan penyelesaian kewajiban PT Pertamina (Per

MONITORING HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS TAHUN 2010

No.	KKKS	Setoran atas Tagihan Lifting Tahun 2010 ke Rek. 600.502411 b)				Setoran atas Tagihan Lifting Tahun 2010 ke Rek. 502.000000 dari Pemakaian Minyak Mentah Dalam Negeri (Rp)	Pembayaran Kewajiban Pemerintah Sektor Migas Tahun 2010 Melalui Rek. 600.000411						
		Setoran atas Ekspor Minyak Mentah US\$	Setoran atas Penjualan Gas US\$	Setoran Overlifting KKKS US\$	Total US\$		PPN Migas Rp	PBB Migas Rp	PDRO Migas Rp	Anggaran BPMIGAS Rp	Fee Penjualan Migas US\$	DMO Fee US\$	Underlifting KKKS US\$
(11)	(12)	(13)	(14) = (11) + (12) + (13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
A. REGION I													
1	BOB PT.BSP-PERTAMINA HULU	CPP	-	-	-	62.845.952.475	175.878.300.000	3.486.495.709	-	-	-	3.969.777	-
2	C P I	MFK - PSC	-	-	-	-	1.660.990.000	-	-	-	-	736	-
3	C P I	SIK - PSC	-	-	-	-	46.233.730.000	13.217.722.370	-	-	-	8.596	-
4	C P I	ROKAN - PSC	-	-	-	1.211.145.745.344	1.313.561.080.000	34.048.655.909	-	-	-	80.056.109	1.535.601
5	CONOCOPHILLIPS	SOUTH NATUNA SEA - B	-	-	-	698.489.257.326	1.199.917.910.000	392.925.177	-	-	-	47.738.024	-
6	EXXONMOBIL OIL	BEE	-	-	-	22.437.253.267	284.216.685.744	2.338.942.342	-	-	-	-	-
7	EXXONMOBIL OIL	NSO	-	-	-	21.859.036.603	234.004.747.452	2.356.420.961	-	-	-	-	-
8	EXXONMOBIL OIL/TRIANGLE	PASE	-	-	-	-	11.327.666.803	47.214.803	-	-	-	264.754	-
9	KALULA (KORINCI BARU)	KORINCI	-	-	-	-	25.387.120.000	-	-	-	-	-	-
10	KONOUR PETROLEUM	MALACCA STRAIT	-	-	-	32.631.631.390	125.534.460.000	643.056.970	-	-	-	1.708.427	-
11	MEDCO E&P MALAKA	AREA "A" NORTH SUMATRA	-	-	-	-	7.206.620.000	-	-	-	-	-	-
12	PEARL OIL	TUNGKAL	-	-	-	27.385.527.789	41.073.280.000	-	-	-	-	-	-
13	PETROCHINA INT'L LTD.	JABUNG	-	-	-	302.008.720.122	300.544.990.000	32.338.920	-	-	-	2.942.819	-
14	PETROSELAT LTD.	SELAT PANJANG	-	-	-	10.252.431.232	15.302.430.000	-	-	-	-	-	-
15	PREMIER OIL	NATUNA SEA "A"	-	-	-	163.713.822.674	251.473.320.000	-	-	-	-	163.614	-
16	STAR ENERGY LTD.	KAKAP	-	-	-	83.999.357.360	119.920.980.000	-	-	-	-	870.818	-
17	JOB (PSCI) COSTA IGL	GEBANG	-	-	-	102.364.928	42.348.060.000	-	-	-	-	-	-
18	PHE COSTA - JOB P COSTA INT'L	GEBANG	-	-	-	102.364.928	-	-	-	-	-	-	-
19	JOA (PSCI) CONOCOPHILLIPS	SOUTH JAMBI	-	-	-	8.295.712.541	63.730.110.000	-	-	-	-	-	-
20	PHE SOUTH JAMBI - JOB P CPHI	SOUTH JAMBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	PT SELE RAYA MERANGIN DUA	TAMPI	-	-	-	-	22.747.110.000	-	-	-	-	-	-
22	PT SPR LANGGAK	SLC / MFK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REGION I						2.586.269.177.979	4.282.069.590.000	56.573.773.161	-	-	-	137.724.675	1.535.601
B. REGION II													
1	BP WEST JAVA, LTD.	ONWJ	-	-	-	420.309.037.939	775.610.200.000	-	-	-	-	-	-
2	CAMAR RES. CANADA / GFP RESOURCES	BAWEAN	-	-	-	14.721.011.759	35.778.340.000	-	-	-	-	-	-
3	CNOOC SES LTD.	SE. SUMATRA	-	-	-	335.513.822.469	1.362.129.720.000	-	-	-	-	3.311.403	-
4	CONOCOPHILLIPS (GRISIK)	CORRIDOR - PSC	-	-	-	187.491.627.013	858.006.140.000	477.724.493	-	-	-	2.485.096	-
5	KANGKANG ENERGY INDONESIA	KANGKANG	-	-	-	82.134.959.534	136.217.310.000	-	-	-	-	-	-
6	HESS PANGKAH LTD.	PANGKAH	-	-	-	57.188.127.947	114.848.810.000	563.480.906	-	-	-	-	-
7	LAPINDO BRANTAS INC.	BRANTAS	-	-	-	1.450.105.155	41.017.480.000	-	-	-	-	-	-
8	MEDCO E&P INDONESIA	LEMATANG	-	-	-	-	2.817.190.000	-	-	-	-	-	-
9	MEDCO E&P INDONESIA	BARISAN RIMAU	-	-	-	82.919.419.539	103.850.390.000	-	-	-	-	3.873.430	-
10	MEDCO E&P INDONESIA	S&C SUMATRA	-	-	-	103.157.705.172	153.854.850.000	594.783.583	-	-	-	655.831	-
11	PETROCHINA LTD.	BANGKO	-	-	-	7.055.634.013	8.494.710.000	-	-	-	-	-	-
12	SANTOS PTY.LTD.	MADURA	-	-	-	57.818.087.512	112.263.550.000	-	-	-	-	-	-
13	SANTOS PTY.LTD.	SAMPANG	-	-	-	79.136.877.232	34.858.760.000	-	-	-	-	-	-
14	JOB (PSCI) HESS	JAMBI MERANG	-	-	-	-	22.278.890.000	-	-	-	-	-	-
15	PHE JAMBI MERANG - JOB P HESS	JAMBI MERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	JOB (PSCI) GOLDEN SPIKE	RAJA PENDING	-	-	-	3.211.136.215	61.276.390.000	10.034.394	-	-	-	121.716	-
17	PHE RAJA TEMPIRAI - JOB P GSHL	RAJA BLOCK	-	-	-	3.211.136.215	-	-	-	-	-	-	-
18	JOB (PSCI) PETROCHINA E JAWA	TUBAN	-	-	-	55.581.917.518	42.312.160.000	-	-	-	-	20.763	-
19	PHE TUBAN E JAWA - JOB P PEJ	TUBAN	-	-	-	55.581.917.518	-	-	-	-	-	194.676	-
20	JOB (PSCI) TALISMAN - OK	OGAN KOMERING	-	-	-	12.095.200.269	29.788.610.000	360.792.345	-	-	-	492.807	-
21	PHE OGAN KOMERING - JOB P TOKL	OGAN KOMERING	-	-	-	12.095.200.269	-	-	-	-	-	-	-
22	JOA (PSCI) KODECO	WEST MADURA	-	-	-	151.808.069.494	182.886.450.000	-	-	-	-	-	-
23	PHE W KODECO - JOA P W MADURA	WEST MADURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	858.563	-
24	MOBIL CEPU LTD.	CEPU BLOCK	-	-	-	-	124.504.790.000	-	-	-	-	-	-
TOTAL REGION II						1.722.290.992.779	4.204.595.540.000	2.006.795.721	-	-	-	12.014.486	-
C. REGION III													
1	CHEVRON IND.	E. KALIMANTAN	-	-	-	222.127.529.600	365.067.961.755	434.941.584	-	-	-	1.232.741	-
2	CHEVRON IND.	MAKASAR STRAIT	-	-	-	25.401.704.064	83.241.371.637	43.858.484	-	-	-	4.338.095	-
3	CITIC SERAM ENERGY LTD.	SERAM NON BULA	-	-	-	18.839.161.768	52.049.390.000	-	-	-	-	-	-
4	ENERGY EQUITY	SENGKANG	-	-	-	11.920.089.747	42.158.560.000	-	-	-	-	-	-
5	INPEX	E. KALIMANTAN	-	-	-	-	772.415.654.992	2.294.885.780	-	-	-	18.160.429	-
6	KALREZ PETROLEUM	BULA SERAM	-	-	-	4.989.395.750	2.627.390.000	-	-	-	-	-	-
7	MEDCO E&P INDONESIA	TARAKAN	-	-	-	5.621.227.720	26.533.330.000	-	-	-	-	283.568	-
8	PETROCHINA INT'L (BERMUDA) LTD.	SALAWATI BASIN, PAPUA	-	-	-	59.648.651.763	36.760.020.000	-	-	-	-	1.362.851	-
9	TOTAL E&P IND.	MAHAKAM	-	-	-	1.244.359.209.589	773.439.700.161	3.326.623.307	-	-	-	16.146.332	-
10	VICO	SANGA-SANGA	-	-	-	271.194.728.631	538.508.171.454	1.718.303.550	-	-	-	528.282	-
11	JOB (PSCI) MEDCO E&P TOMORI	SENORO TOILI, SULAWESI	-	-	-	3.445.423.001	10.649.190.000	-	-	-	-	-	-
12	PHE MEDCO TOMORI - JOB P MEDCO	SENORO TOILI, SULAWESI	-	-	-	3.445.423.001	-	-	-	-	-	2.357.232	-
13	JOB (PSCI) PETROCHINA SALAWATI	KEPALA BURUNG, PAPUA	-	-	-	14.992.871.465	71.392.520.000	-	-	-	-	215.502	-
14	PHE SALAWATI - JOB P PETROCHINA SALAWATI	KEPALA BURUNG, PAPUA	-	-	-	14.992.871.465	-	-	-	-	-	-	-
15	JOB (PSCI) TOTAL-TENGGAH	TENGGAH	-	-	-	-	1.314.918.320.000	-	-	-	-	-	-
16	PHE TENGGAH K - JOB P TENGGAH	TENGGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT PERTAMINA EP	INDONESIA	-	-	-	1.345.209.800.918	2.908.207.660.000	2.101.947.432	-	-	-	452.926.445	-
18	BENUO TAKA	WAILAWI BLOCK	-	-	-	-	3.131.220.000	-	-	-	-	-	-
19	BP BERAU LTD	TANGGUNG	-	-	-	3.569.318.208	-	645.307.113	-	-	-	-	-
20	BP MUTURI	TANGGUH	-	-	-	-	-	194.161.734	-	-	-	-	-
21	BP WIRIAGAR	TANGGUH	-	-	-	-	3.560.520.000	78.435.872	-	-	-	-	-
22	PEARL OIL SEBUKU	-	-	-	-	-	59.144.150.000	-	-	-	-	-	-
TOTAL REGION III						3.249.757.406.689	7.064.805.130.000	10.838.464.857	-	-	-	499.553.486	-
TOTAL REGION I, II, III						7.558.317.577.447	15.551.470.260.000	69.419.033.738	-	-	-	649.292.647	1.535.601
KKKS NON LIFTING & PRODUCING						-	3.745.252.260.000	-	-	-	-	-	-
TOTAL REGION I, II, III + KKKS NON LIFTING & PRODUCING						94.157.279.735.830	19.296.722.520.000	69.419.033.738	1.100.419.704.945	-	-	649.292.647	1.535.601
Cross Check						94.157.279.735.830	7.558.317.577.447	19.296.722.520.000	69.419.033.738	1.100.419.704.945	-	649.292.648	1.535.601
Selah						-	-	-	-	-	-	(1)	-

Catatan :

a) Sumber data dari Laporan A-01, A-02, A-03, dan A-04 dari BPMIGAS

b) Setoran ke Rekening No. 600.502411 merupakan penyelesaian kewajiban PT Pertamina (Per

**SALDO REKENING DANA BERGULIR DI BANK UMUM
PER 31 DESEMBER 2010**

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Jumlah (Rp)
1	0000.280.06.42	Rekening Direktur Jenderal Perbendaharaan	0
2	0000026646800	Rekening Direktur Jenderal Perbendaharaan	0,00
3	001.01.02.000002.8	Rekening Direktur Jenderal Perbendaharaan	0,00
4	0011146855	Rekening Direktur Jenderal Perbendaharaan	0,00
5	00115398818	Rekening Direktur Jenderal Perbendaharaan	0,00
6	010.01.0000917.0	Rekening Direktur Jenderal Perbendaharaan	0,00
7	018.01.000036.30.3	Penampungan dana cadangan resiko KUT TP 1999/2000	10.757.981,98
8	0206.01.000002.30.9	Rekening induk dana lingkungan bergulir	19.704.684.185,78
9	0206.01.000006.30.3	Penampungan pengembalian pinjaman proyek pengembangan akuntansi (P2A)	7.666.191,91
10	0206.01.000008.30.5	Dana pembinaan dan pengembangan koperasi	0,00
11	0206.01.000010.30.2	Rekening kredit listrik pedesaan (KLP)	9.460.188.342,84
12	0206.01.000014.30.6	Proyek redistribusi ternak	13.726.478,70
13	0206.01.000015.30.2	Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali)	18.158.678,28
14	0206.01.000022.30.9	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP (5%)	206.509.783,58
15	0206.01.000023.30.5	Dirjen Perbendaharaan untuk menampung pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%)	3.683.810.522,11
16	0206.01.000032.30.4	Pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3%)	148.644.540,76
17	0206.01.000033.30.0	Rekening TIM pembenahan administrasi kredit program	0,00
18	0206.01.000034.30.6	Proyek P4K (Proyek peningkatan pendapatan petani kecil)	0,00
19	0329.01.000310.30.0	Penampungan recovery risiko KUT TP 1999/2000	14.491.152,28
20	0329.01.000510.30.8	Rekening penampungan pencairan dana surat utang pemerintah	760.788.981.475,43
21	1.034.12652.1	Rekening Direktur Jenderal Perbendaharaan	0,00
22	100.01.06.017300.0	Rekening Direktur Jenderal Perbendaharaan	0,00
23	1002000277	Rekening Direktur Jenderal Perbendaharaan	0,00
24	1008275.01.3	Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLK-KUD)	32.887.069,87
25	1008276.01.0	Rekening Direktur Jenderal Perbendaharaan	0,00
26	101.01.06320.5	Rekening Direktur Jenderal Perbendaharaan	0,00
27	116.00.9400983.5	Dirjen perbendaharaan untuk pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP/Perkebunan	56.297.199,03
28	116.00.9400984.3	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP	13.687.947,06
29	1.220.094.007.906	Dirjen perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP/Perkebunan	559.677.971,57
30	1.220.094.007.914	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP	40.917.019,04
31	20.01.9.00003.1	Rekening Direktur Jenderal Perbendaharaan	0,00
32	21.04405.00.5	Rekening Direktur Jenderal Perbendaharaan	0,00
33	301.00276.15	penampungan nisbah bagi hasil dalam rangka KKPA bagi hasil bank muamalat	13.372.133,71
		JUMLAH	794.774.458.673,93

**KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009**

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	78.652.646	16.164.481
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	4.925.873.263	2.494.260.282
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	12.861.631.482	7.458.701.688
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1.261.149.772	8.871.498.153
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	487.189.213	593.117.665
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	7.867.837.362	40.254.158.876
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4.260.025.153	2.637.147.693
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	355.550.551.237	784.195.224.999
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	-	-
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.820.431.927	2.531.405.703
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	2.253.756.843	4.021.141.586
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	7.105.679.699	10.179.760.939
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	532.773.094	1.442.597.050
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	142.416.490	5.286.716.648
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	854.093.528	905.181.222
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	27.089.509.578	25.631.598.340
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	15.037.882.568	10.692.302.347
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	9.723.647.912	2.922.817.411
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASRI	18.361.918.789	3.621.808.582
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL RI	304.696.345	1.644.480.659
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	7.967.015.361	6.933.415.084
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.623.498.421	3.206.726.823
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	462.337.441	2.452.048.797
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	199.701.548	615.263.432
27	040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	432.696.848	3.106.652.405
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	-	-
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	509.018.639	120.836.846
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	122.437.700	4.624.483
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	358.654.350	118.737.858
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.558.193.545	128.021.441
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	-	-
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.105.973.357	476.465.671
37	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	26.481.042	327.993.060
38	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3.468.773.330	11.090.106.234
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	26.260.717	162.407.656
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	713.714.893	262.225.702
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2.377.562.072	1.790.371.004
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	177.209.851	60.198.949
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	45.340.000
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	598.877.365	2.621.461.918
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	-	2.350.000
46	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	376.766.375	676.401.165
47	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.043.143.972	1.789.307.119
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	99.252.184
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	48.817.942	117.422.980
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.271.412.045	1.352.650.493
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	-	2.793.767.463
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	13.181.600	36.774.580
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	55.105.894	14.335.281
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	878.930.591	347.729.087
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	7.306.000	99.362
57	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	62.790.620	54.965.219
58	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	86
59	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	84.015.791	-
60	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	36.488.036	100.199.360

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
61	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	100.247.627	39.683.900
62	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	147.672.366	25.212.315
63	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	10.640.726.397	25.141.754.860
64	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	32.344.425	603.325.200
65	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	697.639.750	830.178.462
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	-
67	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS	-	-
68	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1.191.037.367	1.900.538.392
69	100	KOMISI YUDISIAL	-	-
70	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
71	104	BNP2TKI	254.342.352	8.671.616
72	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-
73	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	5.105.000	-
74	107	BADAN SAR	170.000	-
75	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-
76	999.06	BELANJA LAIN-LAIN	-	51.384.293.726
77	999.07	SUBSIDI	-	-
78	999.08	BELANJA LAINNYA	5.723.660.621	-
JUMLAH			518.919.028.152	1.036.241.894.537

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	44.689.875	10.950.000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	-	-
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1.195.839.643	7.178.348.618
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	332.202.990	195.675.800
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	4.404.766.934	3.078.072.299
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4.125.000	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	67.215.928.241	610.632.694.420
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	138.112.045	304.553.229
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	4.831.423.918	2.030.411.033
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	4.068.349.035	11.580.915.329
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	416.590.875	158.185.649
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	280.192.962	352.443.478
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.108.256.492	14.038.679.792
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	345.809.190.529	77.772.063.669
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	104.877.778.462	174.080.567.628
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.910.102.873	395.409.151
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	2.931.949.230	5.445.111.193
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASRI	11.228.028.167	6.663.289.688
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL RI	314.561	23.550.354
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	63.275.181.111	74.986.812.954
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	34.268.976	58.348.455
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	-	-
24	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-
25	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-
26	040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7.159.000	-
27	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	6.236	112.235.402
28	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	-	5.260.000
29	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-
30	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	35.420.000
31	054	BADAN PUSAT STATISTIK	612.697.408	29.625.428
32	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	6.897.324.937	41.739.747.570
33	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	23.975.577	84.490.000
34	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	68.380.000	23.343.000
35	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	3.091.348.924	3.981.374.786
	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	19.466.200	-
36	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	68.445.000	3.466.822
37	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	6.253	6.253
38	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	5.373.427	1.104.287
39	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	47.409.183	128.596.756
40	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.684.684	39.425
41	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	2.163.951.684	2.284.822.144
42	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	-	-
43	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	583.428.176	238.011.391
44	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	2.522.257	16.827.489
45	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	8.486.500	21.633.000
46	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	674.864.490	568.729.652
	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	25.919.389	-
47	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	-
48	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.618.905.402	1.782.213.526
49	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	194.453.600	157.166.300
50	104	BNP2TKI	-	-
51	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-
52	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-
53	107	BADAN SAR	121.254.000	-
54	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-
55	999.07	SUBSIDI	-	-
56	999.08	BELANJA LAINNYA	-	-
JUMLAH			632.344.354.246	1.040.200.195.970

KAS LAINNYA DAN SETARA KAS
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
1	001	001NON	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	1.925.258.480	743.787.727
2	004	004NON	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	389.630.542	144.388.643
3	005	005NON	MAHKAMAH AGUNG	717.937.978	4.779.502.460
4	006	006NON	KEJAKSAAN AGUNG	511.342.900	31.703.758
5	007	007NON	SEKRETARIAT NEGARA	7.739.337.498	7.440.862.919
6	010	010NON	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.635.543.096	1.916.394.023
7	011	011NON	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	114.058.152	109.216.491
8	012	012NON	KEMENTERIAN PERTAHANAN	4.145.785.970	-
9	013	013NON	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.392.378.886	2.549.161
10	015	015NON	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	2.149.709.968	1.487.211.062
11	018	018NON	KEMENTERIAN PERTANIAN	6.722.647.329	3.238.582.436
12	019	019NON	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	5.546.919.227	112.137.416
13	020	020NON	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.572.590.125	653.134.743
14	022	022NON	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	126.491.895	8.223.604.989
15	023	023NON	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	79.591.894.944	521.417.679.495
16	024	024NON	KEMENTERIAN KESEHATAN	772.403.090.194	203.511.656.783
17	025	025NON	KEMENTERIAN AGAMA	10.915.757.698	17.479.584.536
18	026	026NON	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASRI	9.673.275	1.922.902
19	027	027NON	KEMENTERIAN SOSIAL RI	72.418.176.820	19.554.472.152
20	029	029NON	KEMENTERIAN KEHUTANAN	18.374.300.494	20.688.257.961
21	032	032NON	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	367.815.807	1.060.439.361
22	033	033NON	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	34.970.061.983	53.227.349.828
23	034	034NON	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	-	108.579.114
24	035	035NON	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	403.403.516	-
25	036	036NON	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	207.397.138	216.616.705
26	040	040NON	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	46.560.341	270.955.726
27	041	041NON	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	-	56.931.874
28	042	042NON	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	15.177.075	414.667.083
29	043	043NON	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	3.348.760.932	1.030.397.469
30	044	044NON	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	2.650.797.179	14.352
31	047	047NON	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	163.628.069	2.470.124
32	050	050NON	BADAN INTELIJEN NEGARA	816.709	24.647.209
	051	051NON	LEMBAGA SANDI NEGARA	35.698.500	-
33	054	054NON	BADAN PUSAT STATISTIK	2.914.260.792	3.607.373.450
34	055	055NON	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	6.065.584.912	3.334.759.848
35	056	056NON	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	642.074.558	1.597.263.251
36	059	059NON	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	33.158.330	50.466.296
37	060	060NON	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	202.291.266.798	12.974.020.921
38	063	063NON	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.136.125.160	86.634.836
39	065	065NON	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	812.773.212	973.183.224
40	066	066NON	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.930.197.422	441.643.305
41	067	067NON	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	69.238	-
42	068	068NON	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1.418.702.072	1.000
43	074	074NON	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	2.916.856.432	7.548.814
44	075	075NON	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	3.390.424.469	4.217.708
45	076	076NON	KOMISI PEMILIHAN UMUM	18.637.727	61.008
46	079	079NON	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	98.754.014	31.784.042
47	080	080NON	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	-	457.235
48	081	081NON	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	50.212.959	82.015.993
49	082	082NON	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	50.477.125	8.688.486
50	083	083NON	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	-	17.290.258
51	085	085NON	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	27.838.639
52	086	086NON	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	15.389.000	3.630.000
	087	087NON		4.871.181	-
53	088	088NON	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	3.400
54	089	089NON	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	212.313.200	145.733.296
55	090	090NON	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	38.579.342	1.411.305
56	091	091NON	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	60.778	-
57	092	092NON	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.453.648.544	50.877.638

KAS LAINNYA DAN SETARA KAS
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
58	095	095NON	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1.621.474.226	413.347.000
59	100	100NON	KOMISI YUDISIAL	558.839	16.107.892
60	103	103NON	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	65.916.855.034	-
61	104	104NON	BNP2TKI	76.240.300	144.062.329
62	105	105NON	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	10.398.505
63	106	106NON	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	841.446.362	-
64	107	107NON	BADAN SAR	-	-
65	108	108NON	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-
66	999.06	999.06	BELANJA LAIN-LAIN	-	9.906.889.449
67	999.07	999.07	SUBSIDI	-	-
68	999.08	999.08	BELANJA LAINNYA	7.323.616.344.465	-
JUMLAH				8.652.179.999.211	901.887.427.630

**DAFTAR RINCIAN PIUTANG PAJAK
PER KANWIL DAN UMUR
PER 31 DESEMBER 2010**

(Dalam Rp)

NO	KANWIL DJP	S.D. 1 THN	> 1 S.D. 2 THN	> 2 S.D. 3 THN	> 3 S.D. 4 THN	> 4 S.D. 5 THN	> 5 TH	JUMLAH
1	NAD	94.425.041.683,00	42.928.996.546	76.739.642.235	28.181.158.073	16.391.039.151	106.638.400.566	365.304.278.254
2	SUMUT I		174.016.939.772	112.087.679.898	149.396.536.981	135.590.657.959	521.865.759.308	1.092.957.573.918
3	SUMUT II	62.679.436.056,00	41.634.436.269	31.704.695.351	19.006.046.323	27.109.795.502	85.042.715.195	267.177.124.696
4	RIAU DAN KEPRI		339.477.821.948	191.387.758.813	160.516.998.562	182.097.331.684	459.764.230.138	1.333.244.141.145
5	SUMBAR JAMBI		32.365.660.589	58.320.265.912	51.651.311.498	29.756.165.597	210.210.725.776	382.304.129.372
6	SUMSEL BABEL		94.089.630.419	145.497.048.742	124.367.460.544	75.389.126.887	267.858.905.362	707.202.171.954
7	BENGKULU	121.103.286.826,00	80.276.198.020	42.710.263.497	23.835.514.037	35.603.322.299	245.455.275.903	548.983.860.582
8	JKT PUSAT		503.604.417.032	214.401.349.157	746.957.042.249	268.851.696.115	1.823.316.783.954	3.557.131.288.507
9	JKT BARAT		278.321.222.846	135.728.493.508	87.286.428.888	105.886.222.116	749.568.584.522	1.356.790.951.880
10	JKT SELATAN		593.966.248.394	532.201.346.367	414.696.162.528	455.274.607.106	2.182.667.960.146	4.178.806.324.541
11	JKT TIMUR		251.427.775.000	185.094.784.000	124.016.115.000	101.254.543.000	571.895.689.000	1.233.688.906.000
12	JKT UTARA		95.871.793.472	134.880.502.120	110.802.681.448	134.228.469.538	954.577.689.458	1.430.361.136.036
13	JKT KHUSUS		1.026.639.765.285	438.725.914.341	123.727.074.971	752.356.111.598	2.313.375.388.768	4.654.824.254.963
14	BANTEN	338.241.699.161,00	315.281.116.930	158.192.414.576	127.436.301.215	79.070.160.781	304.524.802.444	1.322.746.495.107
15	JAWA BARAT I		278.030.019.861	216.240.040.807	209.030.573.387	174.416.855.607	768.258.307.971	1.645.975.797.633
16	JAWA BARAT II	383.449.905.967,00	312.265.441.083	205.637.949.459	376.318.504.977	179.005.301.347	1.288.263.790.185	2.744.940.893.018
17	JAWA TENGAH I	308.554.555.636,00	157.295.790.061	78.687.288.930	106.584.018.875	51.656.695.577	354.715.952.861	1.057.494.301.940
18	JAWA TENGAH II	122.476.575.438,00	65.912.876.624	50.428.952.567	37.712.512.554	39.743.599.028	223.610.535.924	539.885.052.135
19	DIY	84.220.693.124,00	37.636.336.734	36.244.447.049	20.422.971.813	15.088.611.825	75.848.095.557	269.461.156.102
20	JATIM I	205.194.961.314,00	153.237.988.097	183.097.055.915	157.469.870.569	125.737.891.593	505.246.723.267	1.329.984.490.755
21	JATIM II	166.353.027.062,00	68.504.504.496	125.106.241.910	56.960.711.665	37.601.264.190	236.574.258.805	691.100.008.128
22	JATIM III	137.580.984.618,00	73.100.855.190	85.162.575.096	62.938.420.995	56.107.274.946	246.512.888.686	661.402.999.531
23	KALBAR	64.011.697.280,00	29.630.415.613	39.469.160.564	11.173.183.935	11.814.404.557	143.085.520.764	299.184.382.713
24	KALSELTENG	338.654.485.988,00	158.903.253.892	172.346.598.729	87.588.657.430	62.234.427.471	543.297.854.765	1.363.025.278.275
25	KALTIM	603.771.152.599,00	218.409.922.223	151.402.651.160	121.879.291.370	183.768.687.432	355.698.492.795	1.634.930.197.579
26	SULSELBARTRA	169.781.513.117,00	95.087.168.319	79.116.280.754	48.211.765.731	45.253.583.733	173.448.141.381	610.898.453.035
27	SULUTTENG GORMALUT	56.823.221.769,00	52.919.303.764	40.841.631.254	37.097.885.476	28.354.384.546	177.870.807.627	393.907.234.436
28	BALI							-
29	NUSRA							
30	PAPUA DAN MALUKU	27.803.632.000,00	40.074.847.000	45.655.370.000	44.733.612.000	40.268.672.000	604.960.868.719	803.497.001.719
31	WAJIB PAJAK BESAR							-
	NASIONAL	17.268.606.805.699,00	6.637.701.928.585	4.452.057.145.021	3.905.814.619.076	3.519.530.401.484	18.224.349.640.774	54.008.060.540.639

*) terdapat selisih sebesar Rp214 dikarenakan pembulatan

DAFTAR RINCIAN PIUTANG PAJAK
DIUSULKAN PENGHAPUSAN, PENGHAPUSAN, DALUWARSA, DAN KEBERATAN/BANDING
PER 31 DESEMBER 2010

					dalam Rupiah
NO	NAMA KANWIL	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG DALUWARSA	PIUTANG DIHAPUSKAN	UPAYA HUKUM
1	Nanggroe Aceh Darussalam	107.250.910.000	91.723.557.000	6.887.103.000	37.702.030.760
2	Sumatera Utara I	276.685.706.959	67.765.590.378	-	221.324.126.427
3	Sumatera Utara II	25.299.471.109	10.742.568.749	-	76.448.674.976
4	Riau dan Kepulauan Riau	260.648.319.000	64.538.760.000	-	773.055.057.411
5	Sumatera Barat dan Jambi	1.620.756.890	1.620.756.890	284.988.525	60.912.851.771
6	Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	67.088.501.000	67.088.501.000	0	368.794.941.014
7	Bengkulu dan Lampung	11.990.968.300	11.990.968.300	0	45.991.408.510
8	Jakarta Pusat	1.081.091.818.677	468.279.939.018	6.648.248.304	2.855.325.209.227
9	Jakarta Barat	212.768.635.000	176.454.699.000	0	410.054.169.537
10	Jakarta Selatan	493.091.718.000	493.091.718.000	1.428.913.000	3.936.999.769.818
11	Jakarta Timur	227.890.351.000	176.977.738.000	0	345.838.888.913
12	Jakarta Utara	1.766.044.924.115	32.268.946.704	563.762.725	1.846.372.273.100
13	Jakarta Khusus	2.646.979.113.966	24.949.930.354	2.726.305.367	7.030.220.229.818
14	Banten	163.771.065.013	55.453.395.325	0	346.368.932.149
15	Jawa Barat I	371.532.098.267	175.592.121.677	0	1.178.795.954.660
16	Jawa Barat II	481.349.600.189	105.579.068.046	0	1.018.302.606.935
17	Jawa Tengah I	96.580.795.233	77.221.400.194	6.307.220.856	337.844.979.028
18	Jawa Tengah II	158.338.031.330	65.979.161.643	0	130.543.520.292
19	Daerah Istimewa Yogyakarta	1.201.055.541	1.201.055.541	414.502.992	26.781.505.862
20	Jawa Timur I	33.406.946.342	29.864.072.187	2.053.566.469	162.545.208.184
21	Jawa Timur II	66.570.320.627	33.534.132.932	0	307.956.396.295
22	Jawa Timur III	16.529.426.091	14.526.936.091	441.093.947	139.794.544.453
23	Kalimantan Barat	44.871.830.445	43.553.795.138	14.633.844.141	53.945.859.623
24	Kalimantan Selatan dan Tengah	63.533.975.402	56.062.861.182	0	285.975.287.699
25	Kalimantan Timur	114.850.808.956	94.269.049.662	0	494.874.189.531
26	Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	11.421.523.464	10.141.185.911	2.581.791.000	288.200.538.898
27	Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	37.833.806.487	32.617.263.945	38.678.161	35.290.392.082
28	Bali	49.158.596.641	32.402.442.588	170.912.351	122.538.390.228
29	Nusa Tenggara	37.437.862.861	33.146.024.861	537.743.290	13.037.269.118
30	Papua dan Maluku	47.136.341.118	47.136.341.118	83.835.887	75.668.444.600
31	Wajib Pajak Besar	429.815.671.831	541.006.231	0	21.197.228.814.014
		9.403.790.949.854	2.596.314.987.665	45.802.510.015	44.224.732.464.933
					\$1517345
	TOTAL	9.403.790.949.854	2.596.314.987.665	45.802.510.015	44.238.374.913.828

PIUTANG BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)				
NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
1	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	57.500.000
2	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	-	2.306.526
3	005	MAHKAMAH AGUNG	182.284.554	30.218.653
4	007	SEKRETARIAT NEGARA	469.161.461	-
5	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4.522.063.005	359.895.440
6	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	28.274.369.493	22.463.941.590
7	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	326.833.705.155	-
8	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.324.369.150	1.229.790.840
9	015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	59.128.826.922	87.368.486.446
10	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	2.438.724.455	27.258.257
11	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.430.521.116	3.846.754.221
12	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	564.507.846.259	503.860.759.697
13	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	222.641.909.452	574.528.376.904
14	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	324.800.000	324.800.000
15	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.580.617.575	697.338.201
16	025	KEMENTERIAN AGAMA	1.616.400.187	2.545.487.375
17	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASRI	755.710	-
18	027	KEMENTERIAN SOSIAL RI	678.240.191	15.222.275
19	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	470.256.773.173	773.414.358.662
20	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	463.047.926	14.807.696.550
21	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	15.441.951.115	-
22	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	266.890.646
23	040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3.910.950.685	-
24	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.304.894.000	493.311.000
25	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	73.747.500	39.016.800
26	054	BADAN PUSAT STATISTIK	28.747.675	112.706.168
27	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	8.351.640	-
28	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	42.349.532	1.330.772
29	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-
30	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.508.237.777.297	1.232.169.204.330
31	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2.486.761.230	-
32	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	370.000	-
33	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	448.583.873	-
34	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	747.484.481	-
35	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	6.080.431.968	19.670.000.000
36	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	2.000.000
37	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	12.269.295.826	10.260.534.429
38	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	71.221.620	-
39	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	1.715.120.293	-
40	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	242.829.992	1.730.000
41	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	406.679.500	343.570.000
42	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	18.121.996.244	13.837.438.320
43	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	167.624.107	341.675.990
44	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	63.631.230	-
45	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	2.407.550	-
46	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	819.037.500	454.405.000
47	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	4.068.700.000	6.000.000
48	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	936.917.625	936.917.625
49	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	75.440.000
50	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1.211.652.188	170.933.520.346
51	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	454.853.776	640.633.330
52	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	13.401.000	-
53	104	BNP2TKI	1.211.344.012	855.785.500
54	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	75.000.000	-
55	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-
56	107	BADAN SAR	563.492.600	-
57	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	173.026.011.105	-
JUMLAH			3.442.928.032.948	3.437.022.301.893

**PIUTANG PNBP
TERKAIT DENGAN
SUBDIT PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
PER 31 DESEMBER 2010**

Piutang	Saldo piutang per 31 Des 2009 setelah koreksi ¹⁾			Kewajiban Des 09 - Nov 10		Penyelesaian Jan - Des 10		Saldo per 31 Des 2010		
	dalam USD	dalam Rupiah	Ekivalen Rupiah 2)	dalam USD	dalam Rupiah	USD	Rupiah	USD	Rupiah	Ekivalen Rupiah 2)
a. Pertamina 2)	485.994.939	10.133.739.451.010	14.503.319.945.499	2.424.594.296	104.094.950.129.197	2.784.499.676	114.046.639.024.719	126.089.558	182.050.555.488	1.315.721.773.272
b. Non Pertamina 3)	169.322.966	-	1.522.382.790.913	6.818.338.944	-	6.658.145.980	-	329.515.930	-	2.962.677.728.686
Total Piutang	655.317.905	10.133.739.451.010	16.025.702.736.412	9.242.933.240	104.094.950.129.197	9.442.645.656	114.046.639.024.719	455.605.488	182.050.555.488	4.278.399.501.958

Catatan :

¹⁾ Saldo setelah koreksi adalah akibat adanya review ulang dengan pihak terkait khususnya BPMIGAS dan Pertamina

²⁾ Ekivalen rupiah menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp9.400/US\$

³⁾ Saldo piutang tersebut di atas termasuk piutang yang berasal dari:

- Saldo piutang tahun 2005 yang berasal dari penerimaan gas bagian Pemerintah yang pada mulanya tertahan di Bank of America sehubungan dengan Kasus Karaha Bodas Company (KBC). Namun demikian, dengan telah dilakukannya pencairan dana tersebut oleh Bank of America kepada KBC terkait putusan pengadilan Amerika Serikat, maka seluruh dana yang telah dicairkan kepada KBC tersebut menjadi kewajiban PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah sebesar \$318,7 juta
- Saldo piutang tahun 2005 yang berasal dari saldo kewajiban PT PIM atas transaksi swap gas ExxonMobil tahun 2005 sebesar \$19,5 juta

⁴⁾ Piutang tersebut di atas tidak termasuk piutang-piutang yang akan dimintakan audit khusus kepada instansi berwenang, sebagai berikut:

- Piutang atas saldo kewajiban operasi hulu PT Pertamina (Persero) tahun 2005 sebesar Rp2.770 miliar
- Piutang atas saldo kewajiban operasi TAC Ramba tahun 2005 sebesar Rp299 miliar
- Piutang atas overlifting PT Pertamina (Persero) tahun 2004 dan 2005 sebesar US\$604 juta

**PIUTANG PNB
TERKAIT DENGAN
SUBDIT PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
PER 31 DESEMBER 2010**

A. Piutang Pemerintah kepada Pertamina

No.	Piutang	Saldo piutang per 31 Des 2009 setelah koreksi		Kewajiban Des 2009 - Nov 2010		Penyelesaian Jan - Des 2010		Saldo piutang per 31 Des 2010	
		USD	Rupiah	USD	Rupiah	USD	Rupiah	USD	Rupiah
1.	Nilai Lawan	-	10.133.739.451.010	-	104.059.027.641.571	-	114.010.716.537.093	-	182.050.555.488
2.	Ekspor Minyak Mentah	120.935.849	-	1.597.137.867	-	1.594.603.017	-	123.470.699	-
3.	Natural Gas	42.526.821	-	662.312.939	-	701.850.401	-	2.989.359	-
4.	LPG	3.819.791	-	165.143.490	-	169.333.780	-	(370.499)	-
5.	Piutang Lain-lain	318.712.478	-	-	35.922.487.626	318.712.478	35.922.487.626	-	-
	- Piutang Terkait Kasus KBC 1)	318.712.478	-	-	-	318.712.478	-	-	-
	- Piutang Terkait PMN	-	-	-	35.922.487.626	-	353.922.487.626	-	-
	Total Piutang	485.994.939	10.133.739.451.010	2.424.594.296	104.094.950.129.197	2.784.499.676	114.046.639.024.719	126.089.559	182.050.555.488

Catatan :

- ¹⁾ Merupakan piutang yang berasal dari penerimaan gas bagian Pemerintah yang pada mulanya tertahan di Bank of America sehubungan dengan Kasus Karaha Bodas Company (KBC). Namun demikian, dengan telah dilakukannya pencairan dana tersebut oleh Bank of America kepada KBC terkait putusan pengadilan Amerika Serikat, maka seluruh dana yang telah dicairkan kepada KBC tersebut menjadi kewajiban PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah
- ²⁾ Merupakan piutang yang berasal dari koreksi cost recovery Dit. Hulu Pertamina PT Pertamina (Persero) tahun 2003 s.d. tahun 2007 hasil audit BPK -RI
- ³⁾ Dengan menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp9.400/USD maka saldo piutang tersebut adalah ekivalen Rp14.702.738.684.323
- ⁴⁾ Piutang tersebut di atas tidak termasuk piutang-piutang yang akan dimintakan audit khusus kepada instansi berwenang sebagai berikut:
 - Piutang atas saldo kewajiban operasi hulu PT Pertamina (Persero) tahun 2005 sebesar Rp2.770 miliar
 - Piutang atas saldo kewajiban operasi TAC Ramba tahun 2005 sebesar Rp299 miliar
 - Piutang atas overlifting PT Pertamina (Persero) tahun 2004 dan 2005 sebesar US\$604 juta

PIUTANG PNBP
TERKAIT DENGAN SUBDIT PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
PER 31 DESEMBER 2010

B. Piutang Pemerintah kepada KKKS lain selain Pertamina

(dalam USD)

No.	Piutang	Saldo piutang per 31 Desember 2009	Kewajiban Des 2009 - Nov 2010	Penyelesaian Jan - Des 2010	Saldo piutang per 31 Des 2010 ³⁾
1.	Penjualan Minyak bumi	85.711.998	1.767.311.316	1.643.190.891	209.832.423,00
2.	Penjualan Gas Alam	49.919.871	4.480.636.760	4.476.322.633	54.233.999
	<i>a. Melalui Trustee</i>	<i>26.704.506</i>	<i>4.260.968.933</i>	<i>4.258.433.061</i>	<i>29.240.378</i>
	- <i>Ekspor LNG</i>	-	<i>2.909.154.496</i>	<i>2.909.154.496</i>	-
	- <i>Ekspor Gas Alam</i>	<i>16.596.913</i>	<i>934.891.851</i>	<i>938.453.335</i>	<i>13.035.429,62</i>
	- <i>Domestik Gas Alam</i>	<i>10.107.593</i>	<i>364.023.280</i>	<i>357.925.924</i>	<i>16.204.948,47</i>
	- <i>Domestik LPG</i>	-	<i>52.899.306</i>	<i>52.899.306</i>	-
	<i>b. Melalui Non Trustee (Kewajiban KKKS)</i>	<i>23.215.365</i>	<i>219.667.827</i>	<i>217.889.572</i>	<i>24.993.621</i>
	- <i>Ekspor LPG</i>	<i>190.266</i>	-	<i>190.017</i>	<i>248,67</i>
	- <i>Domestik Gas Alam 1)</i>	<i>23.025.099</i>	<i>219.667.827</i>	<i>217.699.555</i>	<i>24.993.371,97</i>
3	Overlifting KKKS	33.691.097	570.390.867	538.632.456	65.449.508,36
	<i>a. Minyak Bumi</i>	<i>7.573.802</i>	<i>481.686.956</i>	<i>423.497.243</i>	<i>65.763.515,42</i>
	<i>b. Gas Alam</i>	<i>26.117.295</i>	<i>88.703.911</i>	<i>115.135.213</i>	<i>(314.007,06)</i>
	Total Piutang	169.322.966	6.818.338.943	6.658.145.980	329.515.930

Catatan :

- 1) Jumlah tersebut termasuk saldo kewajiban PT PIM atas transaksi swap gas ExxonMobil tahun 2005 sebesar \$19.5 juta
- 2) Saldo setelah adanya koreksi setelah adanya review ulang dengan pihakl terkait khususnya BPMIGAS dan Pertamina
- 3) Dengan menggunakan kurs beli BI tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp9.400/USD maka saldo piutang tersebut adalah ekivalen Rp1.731.540.999.274

**BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009**

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	16.969.500
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	35.597.037	26.162.037
4	005	MAHKAMAH AGUNG	179.153.600	9.525.000
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	-	-
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	49.067.350	62.413.850
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.504.614.365	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	413.350.307	721.340.524
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	4.914.880	13.271.580
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	327.204.855	228.062.418
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	2.087.042.347	4.211.952.378
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	7.200.000	7.200.000
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15.000.000	18.158.332
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	6.308.896.481	12.000.000
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	102.171.170	85.156.170
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	24.127.237	19.838.450
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	-	3.541.350
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASRI	-	3.000.000
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL RI	20.516.000	39.299.667
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	9.756.839.765	9.246.888.293
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	710.000	-
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	435.065.030	328.098.570
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	6.840.000	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	11.000.000	60.000.000
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-
27	040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	75.075.000	-
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	-	-
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	-	-
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	-	41.430.000
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	62.526.642	75.117.516
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	-	-
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	4.037.000	4.404.000
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	14.226.368.566	14.168.987.863
37	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	85.200.000	30.800.000
38	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	19.024.050	26.136.000
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	93.712.843	87.459.843
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	56.879.627	78.680.963
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.500.000	6.000.000
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	-	-
46	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	9.000.000	-
47	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	-	-
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	-	-
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	-	-
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	-	-

**BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009**

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	45.167.499	41.200.008
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	11.200.000	11.200.000
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	16.749.000	30.500.000
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	42.956.250	-
57	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	7.200.000	7.200.000
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	15.840.000	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	6.000.000	6.000.000
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	73.925.838	2.975.004
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	250.000	18.810.000
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	199.287.716	175.275.963
65	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	-	-
66	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	256.726.800
67	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	-
68	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS	-	-
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	-
70	100	KOMISI YUDISIAL	-	-
71	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
72	104	BNP2TKI	143.604.428	67.585.177
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-
74	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-
75	107	BADAN SAR	-	-
76	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-
77	999.06	BELANJA LAIN-LAIN	-	371.471.971
78	999.07	SUBSIDI	-	-
79	999.08	BELANJA LAINNYA	105.596.080	-
JUMLAH			38.591.410.963	30.620.839.227

KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN BERUPA HAK TAGIH PEMERINTAH KEPADA BDL

No.	ASAL BANK BDL	Tanggal BAST Aset	Jumlah Hak Tagih			Setoran Kas Ke Rekn. BUN. 502.000000							Saldo Hak Tagih 1 Januari 2011
			Dana Talangan *)	Giro Debet	Total (Saldo Awal)	Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Tahun 2007	Pengembalian Tahun 2008	x Pengembalian Tahun 2009	Koreksi 2009	Pengembalian Tahun 2009	Pengembalian Tahun 2010	
1	2		3	4	5=3+4	6	7	8	9		9	10	11=5-(6+7+8+9+10)
	BDL eks Dana Talangan												
1	PT. Bank Amrico	7-Jun-07	200.277.000.000,00	9.803.728.375,73	210.080.728.375,73	9.532.957.340,07	9.502.388.722,00	357.853.052,78	1.609.203.328,00	0,00	1.609.203.328,00	6.540.713.343,00	182.537.612.589,88
2	PT. Bank Guna Internasional	8-Mar-07	251.055.008.000,00	0,00	251.055.008.000,00	183.555.008.000,00	17.316.896.847,89	2.660.283.085,82	1.975.494.034,06	72.932.571,63	2.048.426.605,69	2.996.154.673,00	42.478.238.787,60
3	PT. Bank Harapan Sentosa	8-Mar-07	2.296.138.048.061,00	1.570.044.264.791,07	3.866.182.312.852,07	585.728.056.499,00	41.314.533.283,56	5.204.191.984,61	5.011.518.272,97	95.470.239,68	5.106.988.512,65	8.779.090.328,44	3.220.049.452.243,81
4	PT. Bank Citrahaasta Dhanamanungga	29-Mar-07	43.398.000.000,00	158.404.166.935,30	201.802.166.935,30	25.098.188.837,19	6.315.060.527,00	385.357.786,00	190.370.760,00	0,00	190.370.760,00	0,00	169.813.189.025,11
5	PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	8-Mar-07	46.872.202.071,00	154.940.412.220,48	201.812.614.291,48	46.872.202.071,00	30.746.092.410,83	7.878.883.538,00	2.046.975.489,00	0,00	2.046.975.489,00	3.296.914.583,00	110.971.546.199,65
6	PT. Bank Mataram Dhanarta	8-Mar-07	53.498.000.000,00	283.265.209.866,98	336.763.209.866,98	31.186.000.000,00	4.018.000.000,00	3.193.944.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.365.265.129,98
7	PT. Bank Pasific	8-Mar-07	290.023.076.268,00	1.843.343.358.571,63	2.133.366.434.839,63	332.023.076.267,80	29.347.497.898,00	111.657.561.420,00	14.675.177.662,50	0,00	14.675.177.662,50	19.726.988.659,30	1.625.936.132.932,03
8	PT. Sejahtera Bank Umum	8-Mar-07	1.483.617.626.147,00	203.731.889.225,53	1.687.349.515.372,53	857.387.217.393,65	550.081.483,46	66.997.186.362,78	29.687.774.331,00	0,00	29.687.774.331,00	37.982.436.510,76	694.744.819.290,88
9	PT. South East Asia Bank	8-Mar-07	166.082.000.000,00	733.317.023.305,98	899.399.023.305,98	98.302.719.380,89	28.197.078.896,79	134.453.227,00	3.489.512.824,00	0,00	3.489.512.824,00	230.736.340,00	768.044.622.637,31
10	PT. Bank Dwipa Semesta	17-Jan-08	6.970.134.589,81	103.135.862.541,06	110.105.997.130,87	6.970.134.600,00	0,00	27.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.835.862.530,87
11	PT. Astria Raya Bank	31-Mar-08	121.949.000.000,00	456.969.260.698,77	578.918.260.698,77	131.949.603.600,00	0,00	51.742.862.725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	395.225.794.373,35
12	PT. Bank Pinaesaa	5-Mar-08	269.966.000.000,00	411.118.490.919,58	681.084.490.919,58	18.456.680.100,11	745.723.907,00	24.308.490.543,00	3.590.996.621,00	0,00	3.590.996.621,00	4.534.212.586,00	629.448.387.162,47
13	PT. Bank Jakarta *	Belum BAST	210.994.000.000,00	0,00	210.994.000.000,00	120.959.930.061,67	60.000.000.000,00	21.323.394.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710.675.330,33
14	PT. Bank Industri	SUDAH BAST	279.124.000.000,00	232.346.229.326,68	511.470.229.326,68	279.124.000.000,00	0,00	0,00	78.318.742.617,00	0,00	78.318.742.617,00	88.420.788,00	153.939.065.921,68
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	TL Bubar Sebelum BAST	7.971.008.175,00	583.781.467,67	8.554.789.642,67	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054.789.642,67
	Total BDL Eks Dana Talangan		5.727.935.103.311,81	6.161.003.678.246,47	11.888.938.781.558,30	2.730.645.774.151,38	228.053.353.976,53	323.144.463.070,41	140.595.765.939,53	168.402.811,31	140.764.168.750,84	84.175.667.811,50	8.382.155.353.797,62

PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	3.101.970.083	2.448.249.173
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	10.382.651.284	5.984.150.938
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	16.727.245.089	8.424.141.957
4	005	MAHKAMAH AGUNG	12.917.870.065	11.416.949.549
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	81.193.453.787	47.178.941.337
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	181.989.406.735	220.193.767.829
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	73.746.641.748	450.434.936
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4.455.932.428	1.422.588.061
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	17.106.286.913	13.473.068.054
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	26.108.623.637.798	27.953.098.025.596
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	140.654.554.121	115.667.388.589
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	251.167.008.102	184.780.228.921
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN RI	1.553.923.824	1.176.823.767
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	48.571.333.053	53.328.456.728
15	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	5.221.091.691	5.077.295.793
16	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	268.850.939.683	244.580.625.109
17	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.050.708.835.328	865.577.968.522
18	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	768.924.273	30.322.590
19	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	178.683.176.335	273.542.895.245
20	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	73.995.442.441	60.920.190.134
21	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	366.468.047.766	545.366.900.936
22	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	297.390.991.519	238.965.054.448
23	025	KEMENTERIAN AGAMA	29.644.935.134	54.898.054.971
24	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	7.637.474.822	334.829.479
25	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASRI	78.926.962.435	77.309.033.803
26	026	BLU KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	225.618.224	500.933.232
27	027	KEMENTERIAN SOSIAL RI	262.998.966.476	89.441.265.027
28	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	25.588.067.792	8.623.166.109
29	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	81.005.152.652	60.298.112.897
30	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	775.314.675.138	84.524.911.056
31	033	BLU KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	6.244.300	-
32	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	199.172.256	152.837.240
33	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	915.223.607	1.107.857.880
34	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.196.417	1.053.521
35	040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	18.152.944.711	3.565.180.582
36	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	621.058.265	1.051.764.398
37	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	4.705.709.542	929.576.329
38	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	5.900.352.651	7.815.622.228
39	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	24.926.375	38.525.975
40	044	BLU KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	300.839.638	316.586.510
41	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	4.109.066.323	1.732.008.433
42	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	734.272.866	404.067.032
43	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.976.853.027	461.566.494
44	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.637.810.816	2.397.412.775
45	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	4.478.500	2.106.800
46	054	BADAN PUSAT STATISTIK	20.780.532.941	7.016.901.223
47	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	1.460.245.803	732.824.234
48	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	50.530.757.429	22.728.318.457
49	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1.087.908.645	50.445.935
50	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.587.577.953	14.037.384.138
51	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.973.840.750	338.175.700
52	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.322.552.761.774	969.753.442.010
53	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	48.524.016.300	145.011.477.531
54	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.105.022.789	15.400.550

PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
55	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	3.496.149.692	712.903.128
56	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	10.187.401.398	9.099.585.234
57	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1.247.413.144	48.676.234
58	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	531.437.671.466	429.187.268.605
59	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	93.236.760	151.762.555
60	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	35.350.514.442	40.769.072.529
61	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	425.220.524.572	89.055.537.468
62	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	1.704.525.837	945.314.000
63	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	475.657.120	248.149.712
64	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	3.514.057.270	1.987.986.150
65	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	42.368.394.773	48.046.454.142
66	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	18.446.804.488	3.135.302.431
67	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	13.315.172.819	11.285.874.754
68	082	BLU LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	83.087.650	54.195.950
69	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	78.726.946.004	73.570.256.127
70	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	121.289.820	121.348.630
71	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	460.332.070	459.456.032
72	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	1.181.661.329	1.150.696.824
73	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	251.889.901	87.542.411
74	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	34.970.696.413	8.510.041.133
75	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	4.406.684.636	4.564.777.230
76	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	5.205.950.840	5.021.321.256
77	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	100.839.988.733	17.359.367.123
78	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	7.219.753.815	1.847.070.114
79	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	16.911.868.460	14.313.265.949
80	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS	78.951.123.713	78.951.123.713
81	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1.550.517.677	1.174.380.261
82	100	KOMISI YUDISIAL	1.088.965.680	668.187.492
83	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	110.093.374.723	11.301.182.264
84	104	BNP2TKI	24.387.745.217	26.804.321.045
85	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	31.865.500	35.194.240
86	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	1.138.940.461	-
87	107	BADAN SAR	5.674.112.827	-
88	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	767.058.291	-
JUMLAH			33.529.437.407.958	33.289.362.925.497

**PIUTANG RDI/RPD/SLA
PER 31 DESEMBER 2010**

(dalam rupiah)

NO	SUMBER DANA	OUTSTANDING PER 31 DES 2009	PROYEKSI POKOK JATUH TEMPO TGL 1 JAN 2010 S.D 31 DES 2010	PROYEKSI POKOK JATUH TEMPO TGL 1 JAN 2011 S.D 31 DES 2011	PROYEKSI POKOK JATUH TEMPO TGL 1 JAN 2012 S.D 31 DES 2012	PROYEKSI POKOK JATUH TEMPO TGL 1 JAN 2013 S.D 31 DES 2013	PROYEKSI POKOK JATUH TEMPO TGL 1 JAN 2014 S.D selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	NON SLA	41.611.876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.611.876,55
2	RDI	4.916.206.896,13	525.999.678,29	519.424.104,00	511.915.837,00	488.229.688,00	2.838.995.729,30
3	RPD	348.348.729,67	78.088.844,76	63.458.768,00	54.055.071,00	37.686.564,00	105.132.312,92
4	SLA	44.494.204.959,81	4.484.405.952,07	4.561.808.848,00	4.137.072.286,00	3.991.651.987,00	27.381.700.220,39
	TOTAL	49.800.372.462,17	5.088.494.475,12	5.144.691.720,00	4.703.043.194,00	4.517.568.239,00	30.367.440.139,16

PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BUMN PER 31 DESEMBER 2010

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	AKTIVA LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12+13)	15	16=(14*15)
1	Perkebunan	PT Perkebunan Nusantara I	LK Audited 2010	111.250	60.329	661.058	374.126	235.450	609.576	-	120.000	-	-	-	(68.517)	51.483	100%	51.483
1		PT Perkebunan Nusantara II	LK Audited 2010	480.089	483.863	2.137.176	479.553	1.481.147	1.960.700	-	327.606	-	-	-	(151.130)	176.476	100%	176.476
2		PT Perkebunan Nusantara III	LK Audited 2010	1.736.665	43.331	7.241.415	1.407.889	2.251.023	3.658.912	6.392	315.000	-	-	(22.895)	3.284.007	3.576.112	100%	3.576.112
3		PT Perkebunan Nusantara IV	LK Audited 2010	1.491.308	324.760	6.777.521	1.234.738	2.240.592	3.475.330	10.137	975.000	235	-	-	2.316.817	3.292.053	100%	3.292.053
4		PT Perkebunan Nusantara V	LK Audited 2010	772.715	217.808	3.306.305	969.468	867.303	1.836.771	-	820.000	-	-	-	649.534	1.469.534	100%	1.469.534
5		PT Perkebunan Nusantara VI	LK Audited 2010	396.334	-	1.411.985	391.397	291.439	682.836	876	200.000	-	-	-	528.272	728.272	100%	728.272
6		PT Perkebunan Nusantara VII	LK Audited 2010	1.713.883	-	4.857.962	1.136.228	2.249.926	3.386.154	-	365.000	-	-	19.092	1.087.717	1.471.809	100%	1.471.809
7		PT Perkebunan Nusantara VIII	LK Audited 2010	647.029	94.076	2.199.800	713.146	528.779	1.241.925	8.495	270.000	-	-	363	679.018	949.381	100%	949.381
8		PT Perkebunan Nusantara IX	LK Audited 2010	847.884	41.092	1.830.941	1.186.892	120.005	1.306.898	37.564	165.000	-	-	-	321.479	486.479	100%	486.479
9		PT Perkebunan Nusantara X	LK Audited 2010	1.358.664	97.992	2.098.344	379.900	745.471	1.125.370	2.001	250.000	-	-	10.062	710.912	970.974	100%	970.974
10		PT Perkebunan Nusantara XI	LK Audited 2010	667.845	72.747	1.515.543	511.888	528.437	1.040.125	-	165.000	-	-	-	310.418	475.418	100%	475.418
11		PT Perkebunan Nusantara XII	LK Audited 2010	249.712	77.345	1.180.931	324.375	249.549	573.924	-	200.000	-	-	-	407.007	607.007	100%	607.007
12		PT Perkebunan Nusantara XIII	LK Audited 2010	618.224	227.359	2.848.163	863.701	797.462	1.661.163	27.532	460.000	-	-	-	699.468	1.159.468	100%	1.159.468
13		PT Perkebunan Nusantara XIV	LK Audited 2010	259.722	11.668	839.387	676.530	438.455	1.114.985	-	235.000	-	-	30.591	(541.189)	(275.598)	100%	(275.598)
14		PT Rajawali Nusantara Indonesia	LK Audited 2010	2.637.277	831.770	5.091.054	1.828.913	2.388.643	4.217.556	224.222	352.425	-	-	-	296.850	649.275	100%	649.275
15	Kehutanan	Perum Perhutani	LK Audited 2010	1.546.328	-	2.078.948	309.240	130.773	440.014	8.302	700.000	-	-	-	930.632	1.630.632	100%	1.630.632
16		PT Inhutani I	LK Audited 2010	89.888	-	237.260	125.873	67.691	193.563	-	445.333	16.001	-	-	(417.638)	43.697	100%	43.697
17		PT Inhutani II	LK Audited 2010	69.895	9.212	239.942	44.272	26.307	70.579	-	183.083	6.785	-	-	(20.504)	169.364	100%	169.364
18		PT Inhutani III	LK Audited 2010	33.288	-	176.901	9.378	6.012	15.390	-	324.120	-	-	2.405	(165.014)	161.511	100%	161.511
19		PT Inhutani IV	LK Audited 2010	43.408	7.625	66.339	9.032	4.786	13.818	-	92.253	-	-	2.301	(42.033)	52.521	100%	52.521
20		PT Inhutani V	LK Audited 2010	9.631	1.014	179.988	154.257	5.549	159.806	-	132.659	44.862	-	-	(157.339)	20.182	100%	20.182
21	Perikanan	PT Perikanan Nusantara	Unaudited 2010	36.172	14.421	96.007	18.766	173.026	191.792	-	110.895	6.074	-	49.582	(262.336)	(95.785)	100%	(95.785)
22		Perum PPS	LK Audited 2010	49.692	3.489	118.815	30.825	9.355	40.181	-	28.898	-	47.037	-	2.700	78.635	100%	78.635
23	Penunjang Pertanian	Perum Bulog	LK Audited 2010	11.113.169	1.044.738	14.981.238	10.170.925	68.633	10.239.558	-	6.847.136	-	751.619	-	(2.857.075)	4.741.680	100%	4.741.680
24		PT Sang Hyang Seri	LK Audited 2010	1.617.022	31.530	1.818.220	1.481.767	112.619	1.594.386	-	134.000	-	-	-	89.834	223.834	100%	223.834
25		PT Pertanian	LK Audited 2010	1.202.515	9.221	1.290.220	1.131.662	23.909	1.155.571	-	51.315	35.952	-	2.499	44.883	134.649	100%	134.649
26	Pupuk	PT Pusri	Unaudited 2010	18.970.784	1.412.741	34.658.522	8.411.983	9.644.231	18.056.214	58.844	10.610.006	-	-	-	5.933.458	16.543.464	100%	16.543.464
27	Jasa Pengairan	Perum Jasa Tirta I	LK Audited 2010	134.363	2.384	194.370	49.265	2.834	52.099	-	30.570	-	1.131	-	110.570	142.272	100%	142.272
28		Perum Jasa Tirta II	LK Audited 2010	238.024	20.891	488.919	84.334	18.791	103.126	-	164.548	-	-	-	221.246	385.793	100%	385.793
29	Pertambangan	PT Antam Tbk	LK Audited 2010	7.593.630	1.192.357	12.310.732	1.989.071	720.825	2.709.897	20.737	953.846	2.526	-	128.333	8.495.393	9.580.098	65%	6.227.064
30		PT Timah Tbk	LK Audited 2010	4.108.890	-	5.881.108	1.269.482	408.551	1.678.033	309	251.651	120.792	-	8.965	3.821.358	4.202.766	65%	2.731.798
31		PT Bukit Asam Tbk	LK Audited 2010	6.645.953	-	8.722.699	1.147.728	1.133.723	2.281.451	74.512	1.152.066	30.485	-	1.422	5.182.763	6.366.736	65,02%	4.139.489
32		PT Sarana Karya	Unaudited 2010	19.096	152	20.321	25.272	-	25.272	-	5.000	-	-	9.998	(19.948)	(4.950)	100%	(4.950)
33	Energi	PT Pertamina	LK Audited 2010	126.806.837	2.797.573	266.514.568	95.490.813	65.982.881	161.473.694	962.490	82.569.779	-	566.202	(22.435.612)	43.378.015	104.078.384	100%	104.078.384
34		PT PGN Tbk	LK Audited 2010	13.858.679	23.056	32.087.431	4.035.777	12.950.699	16.986.477	1.232.381	2.421.650	1.709.791	-	(580.194)	10.317.327	13.868.573	56,97%	7.900.926
35		PT Energy Management Indonesia	Unaudited 2010	38.666	3.248	49.232	35.897	1.025	36.922	-	9.100	6.455	-	3.379	(6.625)	12.309	100%	12.309
36		PT Batan Tek	LK Audited 2010	18.921	10	25.112	4.018	1.182	5.200	-	27.200	-	-	-	(7.288)	19.912	100%	19.912

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	AKTIVA LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12+13)	15	16=(14*15)
37	Industri semen	PT Semen Gresik Tbk	LK Audited 2010	7.343.605	17.202	15.562.999	2.517.519	905.727	3.423.246	133.314	593.152	1.458.258	-	5.458	9.949.571	12.006.439	51,01%	6.123.954
38		PT Semen Baturaja	LK Audited 2010	427.690		782.637	175.814	110.783	286.396		60.414	1			435.825	496.240	100,00%	496.240
39		PT Semen Kupang	Prognosa 2010	17.035	-	623.440	174.379	499.699	674.078		-	-	-	-	-	(50.638)	61,48%	(31.132)
40	Industri Pertahanan	PT Dirgantara Indonesia	Unaudited 2010	2.185.174	107.079	2.631.673	1.790.648	1.461.851	3.252.499	-	1.247.012	2.628.236	-	31.727	(4.527.803)	(620.828)	100%	(620.828)
41		PT PAL Indonesia	LK Audited 2010	2.309.596	29.323	3.038.870	2.335.719	271.807	2.607.526	12	1.137.331	-	-	16.545	(722.544)	431.332	100%	431.332
42		PT Pindad	LK Audited 2010	1.088.534	22.176	1.238.735	695.661	291.098	986.759	2	70.000	300.068	-	-	(118.093)	251.975	100%	251.975
43		PT Dahana	LK Audited 2010	342.415	35.312	490.106	143.759	16.627	160.385		76.090	6.398		8.083	239.150	329.721	100%	329.721
44	Ind. Baja, Manufaktur	PT Krakatau Steel Tbk	LK Audited 2010	12.287.724	266.381	17.584.059	6.930.713	1.227.801	8.158.514	131.630	7.887.500	1.015.514	-	18.468	372.433	9.293.915	80%	7.435.132
45		PT INKA	LK Audited 2010	607.342	27.073	698.509	386.800	16.934	403.534	-	251.843	8.083	-	-	35.047	294.973	100%	294.973
46		PT Barata Indonesia	LK Audited 2010	384.362	26.581	465.052	380.593	14.488	395.081	-	128.203	15.000		96.908	(170.140)	69.971	100%	69.971
47		PT Boma Bisma Indra	LK Audited 2010	114.815	42.177	178.486	268.501	15.892	284.393		295.372	13.245	-	10.429	(424.953)	(105.907)	100%	(105.907)
48	Industri Dok dan Perkapalan	PT Dok dan Kodja Bahari	LK Audited 2010	678.182	28.029	1.129.411	3.068.177	1.264	3.069.441	-	76.600	85	-	-	(2.016.714)	(1.940.030)	100%	(1.940.030)
49		PT Dok dan Perkapalan Surabaya	LK Audited 2010	400.946	11.552	539.137	297.690	150.181	447.871	3.385	40.535	402	-	2.145	44.799	87.880	100%	87.880
50		PT Industri Kapal Indonesia	Prognosa 2010	49.758	147.497	296.593	58.134	243.942	302.076	-	-	56.694	-	-	(62.177)	(5.483)	100%	(5.483)
51	Aneka Industri	PT Industri Sandang Nusantara	Unaudited 2010	15.789	1.256	265.160	517.146	64.140	581.286	-	197.500	1.369	-		(514.995)	(316.126)	100%	(316.126)
52		PT Garam	LK Audited 2010	84.208	11.594	281.274	56.036	54.833	110.869		200.000	-	-	-	(29.595)	170.405	100%	170.405
53		PT Primmisima	LK Audited 2010	42.151	335	53.149	49.095	7.634	56.729	-	13.000	121	-	1.756	(18.458)	(3.580)	52,79%	(1.890)
54		PT Iglas	Unaudited 2010	79.838	4.741	296.950	391.544	50.554	442.098	-	47.007	-	-	94.583	(286.738)	(145.148)	100%	(145.148)
55		PT Industri Soda Indonesia (dalam Perum Peruri)	Audited 2005	12.956	4.803	161.094	100.687	130.795	231.482	-	15.000	-	-	-	(85.388)	(70.388)	100,00%	(70.388)
56	Ind. Kertas, Percetakan	Perum Peruri	LK Audited 2010	1.277.892	161.534	2.577.308	642.427	776.966	1.419.393	-	363.573	-	-	-	794.341	1.157.914	100%	1.157.914
57		PT Balai Pustaka	Unaudited 2010	75.283	17.914	94.721	189.719	487	190.206	-	10.000	-	-	-	(105.485)	(95.485)	100%	(95.485)
58		Perum PNRI	LK Audited 2010	109.115	6.295	170.624	39.720	33.104	72.825		43.243	-	506	497	53.553	97.799	100%	97.799
59		PT Pradnya Paramita	LK Audited 2010	42.151	-	53.149	49.095	7.634	56.729	-	13.000	121	-	13.928	(30.629)	(3.580)	100%	(3.580)
60		PT Kertas Leces	LK Audited 2010	106.555	139.009	1.104.556	564.492	955.835	1.520.328	-	415.073	1.976		507.117	(1.339.938)	(415.771)	100%	(415.771)
61		PT Kertas Kraft Aceh	LK Audited 2010	78.809	108.454	411.749	767.152	-	767.152	-	798.994	-	-	-	(1.154.398)	(355.404)	96,50%	(342.965)
62	Industri Farmasi	PT Indofarma Tbk	LK Audited 2010	582.662	27.316	733.958	375.536	47.154	422.690	1	309.927	75.100			(73.760)	311.267	80,66%	251.068
63		PT Kimia Farma Tbk	LK Audited 2010	1.139.549	56.693	1.657.292	469.823	73.435	543.257	5	555.400	43.580	-	-	515.049	1.114.029	90,03%	1.002.960
64		PT Bio Farma	LK Audited 2010	856.606	40.538	1.570.969	243.499	107.912	351.411	-	450.000	-	-	33.251	736.307	1.219.558	100%	1.219.558
65	Telekomunikasi dan Media	PT Telkom Tbk	LK Audited 2010	18.730.627	-	99.758.447	20.472.898	22.870.766	43.343.664	11.996.041	5.040.000	1.073.333	-	(3.602.034)	41.907.443	44.418.742	52,47%	23.306.514
66		PT INTI	LK Audited 2010	579.792	5.215	637.941	180.307	41.662	221.969	3.039	350.000	-	-	62.932	-	412.932	100%	412.932
67		PT LEN Industri	LK Audited 2010	770.805	39.668	909.073	673.164	59.119	732.284	2.212	45.601	0	-	92.248	36.728	174.578	100%	174.578
68		Perum LKBN Antara	LK Audited 2010	58.180	-	102.309	46.280	8.017	54.297	-	9.116	-	25.928	-	12.968	48.012	100%	48.012
69		Perum Produksi Film Negara	Unaudited 2010	1.294	0	30.590	8.640	35	8.675	-	40.000		14.904		(32.989)	21.915	100%	21.915
70	Listrik	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	LK Audited 2010	45.143.194	-	369.560.490	55.319.746	164.655.176	219.974.922	-	46.107.154		36.029.023	1.093.073	66.356.318	149.585.568	100%	149.585.568
71	Pelabuhan	PT Pelabuhan Indonesia I	LK Audited 2010	490.691	207.947	2.005.180	488.723	112.510	601.234		455.059	0	56.901		891.986	1.403.946	100%	1.403.946
72		PT Pelabuhan Indonesia II	LK Audited 2010	2.140.862	117.947	7.735.809	915.466	735.888	1.651.154	47.070	1.009.958	0	7.653	26.826	4.993.149	6.037.586	100%	6.037.586
73		PT Pelabuhan Indonesia III	LK Audited 2010	1.466.943	523.589	4.870.334	682.033	477.093	1.159.126	289.263	809.222	209.843	209.731	1.627.106	566.043	3.421.944	100%	3.421.944
74		PT Pelabuhan Indonesia IV	LK Audited 2010	474.986	22.634	1.689.152	159.918	78.164	238.082	0	350.625	1.466	320.700	(3.429)	781.708	1.451.071	100%	1.451.071

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	AKTIVA LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12+13)	15	16=(14*15)
75	Bandar Udara	PT ANGKASA PURA I	LK Audited 2010	2.971.234	93.664	9.197.386	582.661	196.147	778.808	-	1.800.000	-	1.658.928	4.515.936	443.714	8.418.578	100%	8.418.578
76		PT ANGKASA PURA II	LK Audited 2010	3.022.946	438.365	9.149.163	526.888	320.534	847.422	-	1.900.000	-	2.065.258	201.976	4.134.507	8.301.741	100%	8.301.741
77	Angkutan Darat, Udara	PT Kereta Api Indonesia	LK Audited 2010	1.980.273	557.655	5.583.599	755.707	830.082	1.585.789	44.569	2.470.000	-	826.546	247.363	409.332	3.953.242	100%	3.953.242
78		PERUM PPD	Unaudited 2010	19.225	11.104	96.112	104.156	36.725	140.881	-	385.686	-	67.771	763	(498.989)	(44.769)	100%	(44.769)
79		PERUM DAMRI	LK Audited 2010	58.822	6.420	446.784	64.729	136.156	200.885	-	19.700	111.297	145.910	1.729	(32.737)	245.899	100%	245.899
80		PT MERPATI NUSANTARA AIRL	Unaudited 2010	337.001	-	1.907.247	2.315.698	1.610.155	3.925.853	-	1.403.556	1	-	-	(3.422.163)	(2.018.606)	95,38%	(1.925.346)
81		PT GARUDA INDONESIA	LK Audited 2010	3.897.022	404.131	13.666.018	5.241.275	4.955.286	10.196.562	12.194	9.120.498	8.402	-	1.159.251	(6.830.890)	3.457.262	85,81%	2.966.676
82		PT PELNI	LK Audited 2010	1.162.417	26.718	5.607.597	489.578	414.322	913.901	328	359.000	3.194.908	2.931.814	-	(1.792.353)	4.693.369	100%	4.693.369
83		PT ANGKUTAN SUNGAI DANAU	Unaudited 2010	664.092	15.745	1.888.445	137.287	21.060	158.347	-	405.753	7.742	1.047.256	140.236	129.111	1.730.098	100%	1.730.098
84		PT Djakarta Lloyd	Prognosa 2009	71.874	221.393	1.102.776	881.501	86.374	967.875	-	180.640	-	667.189	-	(712.928)	134.901	100%	134.901
85		Pelayaran Bahtera Adhiguna	LK Audited 2009	114.648	25.006	152.874	127.407	-	127.407	1	21.674	-	-	29.266	(25.474)	25.466	100%	25.466
86	Konstruksi	PT Amarta Karya	LK Audited 2010	96.166	1.650	116.679	60.310	50.066	110.376	-	11.250	886	-	4.477	(10.309)	6.304	100%	6.304
87		PT Adhi Karya Tbk	LK Audited 2010	3.943.833	8.387	4.927.696	3.450.703	609.238	4.059.941	6.641	170.382	19.144	-	3.232	668.355	861.113	52,28%	450.190
88		PT Istaka Karya	Unaudited 2010	595.646	50.350	764.346	463.261	293.838	757.099	-	50.000	-	-	(59.871)	17.119	7.248	100%	7.248
89		PT Pembangunan Perumahan Tbk	LK Audited 2010	5.229.927	-	5.444.074	3.729.102	453.129	4.182.231	-	484.244	462.166	-	-	315.433	1.261.843	51%	643.540
90		PT Nindya Karya	LK Audited 2010	1.124.888	37.836	1.243.457	1.021.254	128.478	1.149.733	(6)	59.500	-	-	28.499	5.731	93.730	100%	93.730
91		PT Hutama Karya	LK Audited 2010	2.865.552	46.057	3.050.611	2.205.546	338.432	2.543.978	15	200.000	-	-	-	306.617	506.617	100%	506.617
92		PT Wijaya Karya Tbk	LK Audited 2010	5.122.673	75.040	6.286.305	3.642.027	727.510	4.369.537	115.144	582.485	602.312	-	8.374	608.453	1.801.624	66,65%	1.200.782
93		Perum Perumnas	Unaudited 2010	1.528.438	23.308	1.830.467	587.758	629.832	1.217.590	198	1.000	469.901	5.068	130.704	6.005	612.679	100%	612.679
94		PT Brantas Abipraya	LK Audited 2010	403.575	2.599	647.273	329.916	181.873	511.788	-	10.000	-	-	151.554	(26.070)	135.484	100%	135.484
95	Konsultan Konstruksi	PT Bina Karya	Unaudited 2010	38.869	-	65.629	27.533	23.564	51.096	-	2.728	-	-	7.930	3.874	14.532	100%	14.532
96		PT Indah Karya	LK Audited 2010	15.349	1.975	22.938	20.300	1.363	21.663	-	7.000	-	-	2.052	(7.776)	1.276	100%	1.276
97		PT Yodya Karya	LK Audited 2010	56.373	150	62.364	35.680	7.208	42.888	-	8.000	-	-	-	11.476	19.476	100%	19.476
98		PT Indra Karya	Unaudited 2010	61.573	1.607	79.470	58.462	16.443	74.905	-	2.000	-	-	940	1.626	4.565	100%	4.565
99		PT Virama Karya	Unaudited 2010	48.761	-	51.058	31.346	4.977	36.323	-	10.000	4.169	-	-	567	14.736	100%	14.736
100	Kawasan	PT Kawasan Berikat Nusantara	LK Audited 2010	264.890	91.232	702.163	70.211	35.885	106.096	-	300.000	63.945	-	197.637	34.485	596.067	73,15%	436.023
101		PT Kawasan Industri Makassar	Unaudited 2010	46.228	1.316	68.459	6.854	3.042	9.897	-	40.000	12.146	-	(812)	7.229	58.563	60%	35.138
102		PT Kawasan Industri Medan	LK Audited 2010	102.629	5.692	142.453	29.788	4.378	34.166	-	30.000	-	-	55.817	22.470	108.287	60%	64.972
103		PT Kawasan Industri Wijayakus	LK Audited 2010	32.293	536	47.250	8.132	-	8.132	-	25.863	-	-	10.764	2.490	39.117	51,09%	19.985
104		PT PDIP Batam	LK Audited 2010	35.794	22.268	97.219	9.278	35.087	44.365	-	26.184	-	-	21.122	5.548	52.854	100%	52.854
105	Pergudangan	PT Varuna Tirta Prakasya	LK Audited 2010	52.135	15	68.337	74.744	-	74.744	-	11.000	-	-	-	(17.407)	(6.407)	100%	(6.407)
106		PT Bhandi Ghara Rek	LK Audited 2010	158.031	14.358	214.606	70.179	3.484	73.664	-	60.000	-	-	-	80.943	140.943	100%	140.943
107	Perbankan	PT Bank Mandiri Tbk	LK Audited 2010	384.622.928	5.384.797	449.774.551	394.435.830	13.268.685	407.704.515	527.228	10.498.247	6.960.680	-	(358.306)	24.442.187	41.542.808	60,00%	24.925.685
108		PT Bank BRI Tbk	LK Audited 2010	35.623.448	4.880.779	404.285.602	337.776.036	29.836.456	367.612.492	-	6.167.291	2.773.858	-	608.801	27.123.160	36.673.110	56,79%	20.826.659
109		PT Bank BNI Tbk	LK Audited 2010	220.730.294	4.162.883	248.580.529	215.431.004	-	215.431.004	29.899	9.054.807	14.568.468	-	(494.085)	9.990.436	33.119.626	60%	19.871.776
110	Asuransi	PT Bank BTN Tbk	LK Audited 2010	64.874.203	1.093.306	68.385.539	61.938.261	-	61.938.261	-	4.357.029	639.626	-	188.486	1.262.137	6.447.278	72,91%	4.700.710
111		PT JIWasRAYA	LK Audited 2010	6.499.056	389.080	7.195.068	81.579	6.154.536	6.236.115	425	235.000	-	-	519.057	204.470	958.528	100%	958.528
112		PT ASABRI	LK Audited 2010	273.645	6.043	6.926.646	38.611	5.661.736	5.700.347	-	200.000	-	-	780.170	246.128	1.226.298	100%	1.226.298

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	AKTIVA LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12+13)	15	16=(14*15)
113	Pembiayaan	PT JAMSOSTEK	LK Audited 2010	101.136.415	1.152.253	102.648.898	96.222.445	300.761	96.523.206	2	600.000	-	-	2.603.775	2.921.915	6.125.689	100%	6.125.689
114		PT TASPEN	LK Audited 2010	76.977.575	4.108	77.210.189	4.563.360	68.520.654	73.084.014	3.668	100.000	-	-	2.778.702	1.243.804	4.122.507	100%	4.122.507
115		PT ASKES	LK Audited 2010	6.032.944	3.078	10.980.943	355.179	3.473.379	3.828.558	8.308	1.000.000	-	-	4.338.723	1.805.353	7.144.076	100%	7.144.076
116		PT JASINDO	LK Audited 2010	2.547.689	38.004	2.996.969	1.520.787	389.972	1.910.759	4.140	425.000	-	-	462.818	194.252	1.082.070	100%	1.082.070
117		PT RUI	LK Audited 2010	981.574	2.414	1.021.824	628.090	359.004	987.094	5	40.000	-	-	196.509	(201.789)	34.720	100%	34.720
118		PT JASA RAHARJA	LK Audited 2010	5.224.898	5.057	5.505.472	1.898.788	51.996	1.950.784	66.405	800.000	1.429.587	-	143.724	1.114.973	3.488.284	100%	3.488.284
119		PT ASEI	LK Audited 2010	734.290	4.691	803.967	143.754	11.901	155.655	-	300.000	-	-	300.189	48.122	648.311	100%	648.311
120		PT ASKRINDO	LK Audited 2010	2.126.438	130.612	2.569.016	26.626	337.215	363.841	-	1.500.000	900.000	-	(750)	(194.075)	2.205.175	100%	2.205.175
121		PERUM JAMKRINDO	LK Audited 2010	2.880.123	11.748	2.993.023	929.336	167.640	1.096.976	-	1.849.733	-	-	458.906	(412.592)	1.896.047	100%	1.896.047
122		PT PPA	LK Audited 2010	6.026.695	28.026	6.874.032	3.504.563	247.455	3.752.018	1.276	2.801.359	-	-	(95.564)	414.943	3.120.738	100%	3.120.738
123	Perdagangan	PT Danareksa	LK Audited 2010	2.494.969	18.047	2.663.355	763.760	1.081.828	1.845.588	3	701.480	85.927	-	(10.768)	41.122	817.764	100%	817.764
124		PT Permodalan Nasional Madani	LK Audited 2010	3.260.964	8.841	3.346.970	94.754	2.755.901	2.850.656	627	300.000	-	-	31.509	164.178	495.687	100%	495.687
125		Perum Pegadaian	LK Audited 2010	19.621.785	117.275	20.283.043	13.845.160	3.141.680	16.986.840	-	205.000	46.252	-	-	3.044.951	3.296.203	100%	3.296.203
126		PT PANN Multi Finance	LK Audited 2010	643.758	318.804	2.926.089	266.557	5.660.102	5.926.859	-	45.997	-	-	192.066	(3.238.632)	(3.000.569)	100%	(3.000.569)
127		PT Bahana PUI	LK Audited 2010	2.829.420	51.055	3.101.400	2.886.633	64.034	2.950.667	338.276	22.500	-	-	169.044	(379.087)	(187.543)	100%	(187.543)
128		PT Perusahaan Perdagangan Indo	LK Audited 2010	529.241	119.287	927.533	782.029	574.610	1.356.638	903	156.200	86	-	19.269	(605.563)	(430.008)	100%	(430.008)
129		PT Sarinah	LK Audited 2010	125.714	3.656	238.811	96.746	28.607	125.353	18	46.850	-	-	57.512	9.078	113.440	100%	113.440
130	Sertifikasi	PT Surveyor Indonesia	LK Audited 2010	402.373	-	471.413	95.961	58.636	154.597	-	25.000	-	-	(1.036)	292.852	316.816	85,12%	269.674
131		PT Sucofindo	LK Audited 2010	464.712	-	761.459	216.895	64.428	281.322	785	300.000	-	-	139.185	40.187	479.372	95%	455.403
132	Perhotelan dan Pariwisata	PT BKI	LK Audited 2010	98.429	-	167.126	30.194	4.912	35.106	-	45.000	-	-	50.796	36.224	132.020	100%	132.020
133		PT Hotel Indonesia Natour	LK Audited 2010	443.384	35.106	631.044	74.044	466.012	540.056	-	101.700	82	-	12.704	(23.499)	90.988	100%	90.988
134		PT TWC PBR	LK Audited 2010	44.918	16.143	147.963	18.752	3.772	22.524	0	78.377	-	-	-	47.061	125.439	100%	125.439
135	Lain-lain	PT Pengembangan Pariwisata Ba	LK Audited 2010	204.327	28.979	891.888	16.496	49.695	66.190	-	707.660	148	-	-	117.889	825.697	100%	825.697
136		PT Berdikari	Unaudited 2010	667.638	10.283	787.354	533.281	49.672	582.952	-	75.000	-	-	19.752	109.649	204.402	100%	204.402
137		PT Jasa Marga Tbk	LK Audited 2010	4.090.141	259.058	18.952.129	2.478.279	8.114.384	10.592.663	619.453	3.400.000	2.335.525	-	(10.721)	2.015.210	7.740.014	70%	5.418.010
138		PT Pengerukan Indonesia	LK Audited 2010	114.003	30.321	514.760	164.344	60.879	225.223	-	482.923	-	58.699	-	(252.084)	289.537	100%	289.537
139		PT Pos Indonesia	LK Audited 2010	3.590.177	73.813	4.445.009	3.732.786	272.406	4.005.192	(31.068)	425.000	-	21.326	(1.115)	25.675	470.885	100%	470.885
140		PT Kliring Berjangka Indonesia	LK Audited 2010	648.137	-	672.665	476.908	4.851	481.759	-	102.000	-	-	(47)	88.954	190.907	100%	190.907
141		PT Survey Udara Panas	Unaudited 2010	673	-	5.069	10.583	970	11.553	-	13.000	-	-	154	(19.638)	(6.484)	100%	(6.484)
		SUB TOTAL		1.304.501.706	31.987.791	2.503.643.667	1.414.382.715	466.877.329	1.881.260.044	17.030.188	249.297.938	43.586.109	47.527.100	(2.673.693)	267.666.610	605.353.427		511.218.985
		Lemb.Pembiayaan Ekspor Indone	LK Audited 2010	20.413.117	-	20.638.602	96.971	14.039.803	14.136.774	-	6.321.586	-	-	(473)	180.715	6.501.828	100%	6.501.828
		PT. Sarana Multigriya Financial	LK Audited 2010	1.124.063	-	2.571.117	388.519	754.312	1.142.831	-	1.000.000	-	-	0	428.285	1.428.286	100%	1.428.286
		PT. Sarana Multi Infrastruktur	LK Audited 2010	1.409.973	-	2.120.868	21.319	1.187	22.507	-	1.000.000	1.000.000	-	-	98.361	2.098.361	100%	2.098.361
		PT. Penjaminan Infrastruktur Ind	LK Audited 2010	2.045.106	-	2.052.921	6.097	227	6.324	-	2.000.000	-	-	-	46.597	2.046.597	100%	2.046.597
		SUB TOTAL		24.992.259	-	27.383.508	512.906	14.795.529	15.308.436	-	10.321.586	1.000.000	-	(473)	753.958	12.075.072		12.075.071
		GRAND TOTAL		1.329.493.965	31.987.791	2.531.027.175	1.414.895.621	481.672.858	1.896.568.480	17.030.188	259.619.524	44.586.109	47.527.100	(2.674.166)	268.420.568	617.428.499		523.294.056

**Daftar BPYBDS pada BUMN
PER 31 Desember 2010**

(Rp Juta)

NO	BUMN	JUMLAH
1	Perum DAMRI	145.910.132.570
2	Perum PPD	67.770.841.819
3	PT Kereta Api Indonesia	826.546.294.645
4	PT Perusahaan Listrik Negara	36.029.022.757.584
5	Perum Jasa Tirta I	1.131.342.305
6	PT Angkasa Pura I	1.658.928.139.178
7	PT Angkasa Pura II	2.065.258.136.835
8	Perum BULOG	751.619.346.391
9	Pelindo I	56.900.915.000
10	Pelindo II	7.652.976.000
11	Pelindo III	209.730.528.118
12	Pelindo IV	320.700.155.600
13	PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan	1.047.255.575.783
14	Perum Percetakan Negara Indonesia	506.280.000
15	Perum Prasarana Perikanan Samudra	47.036.685.555
16	PT Djakarta Lloyd	667.188.771.346
17	PT Pelayaran Nasional Indonesia	2.931.814.461.210
18	PT Inhutani I	0
19	PT Dirgantara Indonesia	0
20	Perum Perumnas	5.068.434.600
21	PT Pos Indonesia	21.325.953.360
22	Perum LKBN Antara	25.927.671.602
23	PT Pengerukan Indonesia	58.698.972.481,05
24	Perum produksi film Negara (PFN)	14.903.777.061
25	Sarana Karya	0
26	PT Pertamina	566.201.837.308,47
JUMLAH		47.527.099.986.351

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PADA PERUSAHAAN NEGARA MINORITAS
PER 31 DESEMBER 2010**

(Dalam Rp)

Lampiran 11)						
No.	Nama Perusahaan	Sumber a)	% Saham Kepemilikan RI		Nilai Ekuitas	Kepemilikan Pemerintah Per 30 Desember 2010
1	PT Atmindo	Audited 2008	36,60%		16.035.110.111	5.868.850.301
2	PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM)	Audited 2009	41,12%		7.719.361.457.454	3.174.201.431.305
3	PT Surabaya Indah Estate Rungkut (SIER)	Audited 2010	50,00%		216.090.873.602	108.045.436.801
4	PT Jakarta Indah Estate Pulogadung (JIEP)	Audited 2010	50,00%		174.272.245.458	87.136.122.729
5	PT Kertas Padalarang	Audited 2010	40,77%		14.697.661.657	5.991.501.774
6	PT Asean Aceh Fertilizer	Proses Likuidasi				-
7	PT Asean Copper Product	n.a.				-
Jumlah I						3.381.243.342.910
No.	Nama Perusahaan	Sumber a)	Saham	% Saham Kepemilikan RI	Jumlah Saham	Kepemilikan Pemerintah
1	PT Bank Bukopin	Audited 2010	A	0,08%	4.736.255	47.362.550.000
		Audited 2010	B	18,11%	1.034.232.376	103.423.237.600
2	PT ReKayasa Industri (REKIND)	Audited 2010		4,97%	2.500	2.500.000.000
3	PT Freeport Indonesia	Audited 2009	Biasa	9,36%	21.300	19.150.830.000
4	PT Indosat, Tbk	Audited 2010	Seri B	14,29%	776.624.999	77.662.499.900
5	PT Kertas Basuki Rahmat	Audited 2008		0,44%	1.094	25.000.000.000
6	PT Waskita Karya	Prognosa 2010		1,00%	180.000	180.000.000.000
7	PT Jakarta International Hotel Development, Tbk.	Audited 2010		1,33%	12.834.760.680	12.834.760.680
8	PT Socfindo	Audited 2008	Seri B		1	265.000
		Audited 2008	Seri C		2.999	794.735.000
		Audited 2008	Seri D		2.000	3.430.000.000
		Audited 2008	Total	10%	42.250.000.000	
9	PT Prasadha pamunah Limbah Industri (PPLI)	Audited 2010		5%	49.578.225.000	2.478.911.250
10	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2010		13%	39.000	113.718.150.000
JUMLAH II						588.355.939.430
JUMLAH I + II						3.969.599.282.340

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PADA ORGANISASI/LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL/REGIONAL
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009**

NO	LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL	TOTAL PENYERTAAN MODAL				Penyertaan yang masih Berbentuk Promissory Notes (Rp)	31 Desember 2009	
		Mata Uang		USD	IDR ¹		Penyertaan yang telah Dibayar (Equiv Rp)	Penyertaan yang masih Berbentuk Promissory Notes (Rp)
1	Asian Development Bank	SDR	165.772.000,00	255.293.853,16	2.295.347.033.761,56		2.291.369.356.944,56	3.977.676.817,00
2	International Monetary Fund	SDR	2.079.300.000,00	3.202.184.379,00	28.790.839.751.589,00	25.329.806.542.486,00	-1.234.381.410.295,28	30.025.221.161.884,30
	World Bank Group							
3	International Bank for Reconstruction and Development	USD	110.275.770,97	110.275.770,97	991.489.456.791,27	79.174.191.965,20	819.979.997.530,27	171.509.459.261,00
4	International Development Association	USD	15.495.402,67	15.495.402,67	139.319.165.405,97	5.173.139.667,81	134.146.025.738,16	5.173.139.667,81
5	International Finance Corporation	USD	28.539.000,00	28.539.000,00	256.594.149.000,00		256.594.149.000,00	
6	Multilateral Investment Guarantee Agency	USD	3.797.820,00	3.797.820,00	34.146.199.620,00	10.204.946.838,00	23.477.030.420,00	10.669.169.200,00
7	Islamic Development Bank Group	ID	116.523.127,05	179.449.111,35	1.613.426.960.155,15		1.613.426.960.155,15	
8	International Islamic Trade Finance Corporation	USD	2.060.000,00	2.060.000,00	18.521.460.000,00		18.521.460.000,00	
9	Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credit	ID	125.000,00	192.503,75	1.730.801.216,25		1.730.801.216,25	
10	International Fund for Agricultural Development	USD	48.459.000,00	48.459.000,00	435.694.869.000,00		435.694.869.000,00	
11	Common Fund for Commodities	USD	1.303.097,30	1.502.855,10	13.512.170.240,06	2.668.004.800,20		
12	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector	USD	6.650.000,00	6.650.000,00	59.790.150.000,00		10.501.832.751,58	3.010.337.488,49
	Jumlah total			3.853.899.696,00	34.650.412.166.779,30	25.427.026.825.757,20	4.371.061.072.460,68	30.219.560.944.318,60

Catatan:

1. Kurs Special Drawing Right (SDR) IMF adalah kurs official IMF per 31 Desember 2010, SDR1 = USD 1.54003
2. Kurs USD adalah kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2010, yaitu USD 1 = Rp 8.991
3. Kurs Islamic Dinar (ID) sama dengan kurs Special Drawing Right (SDR) IMF pada tanggal 31 Desember 2010
4. Kurs franc Perancis ke Euro adalah tetap sebesar EUR 1 = 6.55957
5. Kurs Euro ke USD adalah kurs yang diterbitkan oleh the Federal Reserve per 31 Desember 2010, EUR1 = USD 1.328
6. Pada tahun 2011 Indonesia akan membayar hutang promissory note IBRD sebesar Rp 40.000.000.000
7. Hutang ke BI adalah dana talangan BI kepada Pemerintah ketika BI masih menjadi tanggungan dari Pemerintah (sebelum diberlakukan UU tentang Independensi BI tahun 2009). Kemenkeu dan BI sedang membahas proses penyelesaiannya

ASET TETAP - TANAH
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	95.441.090.000	95.441.090.000
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	184.836.337.000	184.836.337.000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	1.217.453.857.475	1.109.877.491.884
4	005	MAHKAMAH AGUNG	3.820.854.577.204	2.887.546.588.532
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	3.174.586.692.129	3.142.424.806.366
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	8.349.353.505.320	6.955.152.165.320
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	72.952.681.862.609	73.319.102.886.609
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.251.934.294.484	2.165.891.411.484
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	10.222.758.601.494	10.197.012.085.975
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	190.817.884.618.175	124.099.304.277.244
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	11.476.794.150.178	10.685.157.109.016
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	17.154.828.794.908	16.447.664.813.816
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN RI	545.192.062.827	543.228.844.000
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	8.221.039.099.372	7.950.497.613.530
15	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.133.790.142.988	2.018.325.287.988
16	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.848.899.218.882	2.816.604.035.923
17	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	14.677.800.582.743	12.669.599.948.704
18	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.065.197.712.958	562.380.517.600
19	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	31.225.416.010.125	32.539.069.035.232
20	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	20.298.034.270.461	11.865.052.413.707
21	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	3.092.105.645.535	3.694.717.492.827
22	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	9.487.543.713.744	8.459.889.686.477
23	025	KEMENTERIAN AGAMA	6.914.314.239.874	8.762.865.475.642
24	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	3.296.541.100.387	490.068.886.800
25	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASRI	1.439.521.993.796	1.130.087.860.965
26	026	BLU KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	312.602.531.000	295.688.570.000
27	027	KEMENTERIAN SOSIAL RI	3.269.993.944.109	3.256.324.077.296
28	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	2.145.764.770.462	2.013.961.641.426
29	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.526.867.505.817	1.423.545.918.294
30	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	59.584.188.616.541	48.669.876.915.077
31	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	1.591.595.600	-
32	040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.485.591.412.515	2.618.891.674.698
33	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	273.413.532.500	273.413.532.500
34	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	1.980.636.227.808	1.980.636.227.808
35	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	25.293.152.225	25.271.213.000
36	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	874.645.027.087	874.645.027.087
37	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	294.120.000	294.120.000
38	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	789.222.732.635	789.222.732.635
39	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	95.595.009.427	95.262.924.177
40	054	BADAN PUSAT STATISTIK	527.754.916.460	495.598.656.536
41	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	179.478.885.560	179.814.405.560
42	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.648.660.316.806	1.407.928.351.848
43	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	317.661.875.000	305.237.875.000
44	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	891.653.861.707	892.009.541.707
45	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	42.159.612.438.270	41.527.400.262.599
46	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	47.309.480.070	44.760.540.070
47	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	101.438.100.000	-
48	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	333.830.014.000	333.830.014.000
49	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	-	-
50	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	377.754.240.518	367.876.320.880
51	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	825.852.112.854	822.585.772.937
52	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	75.621.063.175	16.965.440.000
53	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	77.368.883.316	77.368.883.316
54	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	67.881.000.000	66.600.000.000

ASET TETAP - TANAH
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
55	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	6.008.416.115.737	5.994.569.577.778
56	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.789.067.482.420	1.789.120.050.283
57	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	734.771.352.600	743.654.126.740
58	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	273.294.510.777	359.769.340.777
59	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	27.226.540.000	1.208.140.000
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	20.484.294.000	20.484.294.000
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	489.104.858.729	489.104.858.729
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	215.109.462.000	212.542.662.000
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	379.070.092.400	379.070.092.400
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.092.258.728.440	1.067.420.319.338
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	617.612.554.202	607.737.359.026
66	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	9.238.075.100	9.238.075.100
67	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	119.363.101.000	-
68	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS	537.280.018.542	572.821.719.812
69	100	KOMISI YUDISIAL	47.188.389.400	47.188.389.400
70	104	BNP2TKI	7.591.566.550	5.406.551.350
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	667.424.782.404	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-
73	107	BADAN SAR	122.484.191.122	-
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-
75	999.06	BELANJA LAIN-LAIN	-	2.681.267.515.743
76	999.07	SUBSIDI	-	-
77	999.08	BELANJA LAINNYA	4.801.177.817.545	-
JUMLAH			565.920.545.473.098	468.627.411.873.568

ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	77.674.855.854	74.368.625.604
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	485.137.366.111	337.407.263.852
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	721.992.421.346	463.274.034.174
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1.363.007.357.428	1.204.876.210.358
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	1.224.826.489.872	884.954.690.184
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	1.461.319.582.715	1.083.524.059.134
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	85.574.599.493	76.696.148.010
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	831.299.723.018	674.137.659.619
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	924.700.930.594	837.413.103.427
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	48.928.608.344.467	57.922.314.692.379
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.565.364.111.324	1.317.988.988.036
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	7.306.062.037.508	6.424.420.868.487
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN RI	31.697.703.142	17.514.762.483
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	2.805.237.991.171	2.517.926.963.417
15	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.370.318.938.524	1.262.954.873.077
16	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.800.537.311.966	2.345.706.418.103
17	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	9.931.624.671.639	8.890.264.258.306
18	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	335.420.378.662	99.524.151.540
19	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	7.187.932.901.155	6.291.781.388.737
20	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	3.126.536.452.623	1.606.321.084.767
21	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	4.417.844.205.955	4.166.056.957.562
22	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	3.881.133.250.405	2.963.467.990.038
23	025	KEMENTERIAN AGAMA	2.046.077.682.947	2.141.301.790.132
24	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	862.468.281.043	97.666.987.358
25	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASRI	740.518.499.194	635.626.167.240
26	026	BLU KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	67.308.778.278	60.819.957.023
27	027	KEMENTERIAN SOSIAL RI	737.577.658.566	571.563.313.880
28	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	1.597.743.229.562	1.392.253.793.236
29	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.312.015.473.266	1.762.602.633.071
30	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	3.715.205.539.574	3.264.863.523.734
31	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	300.809.013.994	212.264.430.380
32	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	34.325.954.355	29.640.526.657
33	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	27.495.891.962	22.093.615.602
34	040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	281.464.696.953	228.809.351.996
35	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	87.678.870.475	72.885.854.674
36	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	434.152.395.539	363.632.209.068
37	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	204.483.814.008	185.715.658.473
38	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	102.997.025.474	160.889.024.471
39	044	BLU KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	81.856.646.239	14.457.813.149
40	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	27.589.644.516	26.565.395.521
41	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	38.923.968.526	37.474.988.577
42	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.556.381.620.144	1.376.689.708.637
43	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	3.717.468.101.997	3.290.666.333.237
44	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	14.153.447.735	12.621.970.617
45	054	BADAN PUSAT STATISTIK	702.284.104.795	355.116.032.165
46	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	79.513.344.036	72.082.929.452
47	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	984.199.709.854	567.826.662.570
48	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	156.970.930.820	140.788.569.531
49	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	926.434.328.729	786.049.217.386
50	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.807.583.920	29.118.496.510
51	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	13.856.436.749.046	12.429.600.807.469
52	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	654.113.762.113	539.449.555.601
53	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	83.929.831.869	71.744.142.945
54	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	138.622.058.531	122.355.896.858

ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
55	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	266.104.178.678	176.498.652.582
56	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	37.386.529.037	33.940.160.365
57	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	222.741.572.491	211.509.983.229
58	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	12.460.927.305	10.352.733.460
59	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	1.316.425.852.270	1.011.199.406.826
60	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	456.358.574.078	169.262.748.826
61	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	116.169.156.176	105.569.434.791
62	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	40.097.647.745	32.448.061.176
63	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	737.177.952.422	734.401.868.323
64	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	283.869.737.698	246.105.379.518
65	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.042.402.261.208	934.305.402.805
66	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	289.336.268.309	213.754.496.582
67	082	BLU LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	861.735.628	430.168.528
68	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	244.723.468.506	211.364.145.876
69	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	24.652.924.978	13.319.815.390
70	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	40.149.184.394	39.283.076.784
71	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	97.900.908.887	83.441.317.842
72	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	131.808.371.589	122.608.351.190
73	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	181.914.553.300	164.294.355.138
74	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	224.599.129.316	207.543.418.239
75	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	608.572.749.280	558.802.771.725
76	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	25.497.137.108	24.375.175.108
77	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	226.966.541.255	68.664.105.818
78	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	151.890.411.266	126.990.225.832
79	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS	1.218.014.961.326	1.538.503.845.802
80	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	63.958.257.587	56.107.946.188
81	100	KOMISI YUDISIAL	26.363.320.178	25.161.111.089
82	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	55.672.902.947	34.219.051.418
83	104	BNP2TKI	39.748.857.300	28.129.090.175
84	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	78.166.297.459	17.411.327.828
85	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	29.731.002.410	-
86	107	BADAN SAR	892.143.495.035	-
87	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	2.390.112.130	-
88	999.06	BELANJA LAIN-LAIN	-	6.024.612.174.153
89	999.07	SUBSIDI	15.440.232.672	-
90	999.08	BELANJA LAINNYA	4.214.115.720.411	-
JUMLAH			150.868.673.195.411	145.762.742.351.120

ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	195.159.011.611	194.327.547.831
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	798.622.129.057	754.895.770.472
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	1.248.902.204.243	843.997.855.246
4	005	MAHKAMAH AGUNG	3.434.423.786.252	2.823.988.419.881
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	1.851.740.606.447	1.580.399.066.232
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	1.210.951.202.419	1.172.718.807.886
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	1.078.682.720.520	1.123.532.904.697
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	1.529.506.671.405	1.178.833.159.084
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.146.185.714.216	5.618.699.963.079
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	21.221.693.072.813	20.549.264.435.691
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	4.539.090.311.256	3.818.450.431.930
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	9.880.476.902.813	9.173.928.261.053
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN RI	144.672.506.225	62.505.104.506
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	2.385.322.052.778	2.090.959.669.284
15	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	771.346.708.650	732.260.486.371
16	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.127.829.088.569	1.017.896.930.457
17	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	6.990.892.130.747	4.701.888.493.303
18	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	433.894.968.413	235.156.624.556
19	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	10.841.320.984.264	11.128.425.710.811
20	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	5.395.604.283.998	2.740.526.840.314
21	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	2.225.183.704.625	1.684.726.927.256
22	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	3.785.110.329.149	2.966.298.589.340
23	025	KEMENTERIAN AGAMA	9.638.800.689.872	8.710.481.351.109
24	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	1.593.320.149.429	389.056.731.000
25	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASRI	586.492.660.686	521.921.604.597
26	026	BLU KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	116.373.473.847	101.115.322.791
27	027	KEMENTERIAN SOSIAL RI	647.914.148.949	614.350.231.631
28	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	1.119.544.814.675	964.085.111.530
29	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.943.293.218.271	1.683.431.188.985
30	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	4.509.547.815.352	3.716.078.821.374
31	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	6.819.863.250	1.945.253.000
32	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	2.631.969.000	2.631.969.000
33	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	148.974.650	148.974.650
34	040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	768.536.829.751	648.080.512.825
35	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	173.061.604.631	157.320.258.626
36	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	236.560.749.208	230.637.787.203
37	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	53.313.130.647	53.165.161.430
38	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	185.344.965.690	418.957.432.314
39	044	BLU KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	535.660.599.784	257.925.376.684
40	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	240.425.660	240.425.660
41	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	11.560.018.437	11.560.018.437
42	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	204.517.671.912	204.517.671.912
43	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	93.462.666.842	86.597.857.118
44	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-
45	054	BADAN PUSAT STATISTIK	881.654.320.255	635.818.143.153
46	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	75.544.577.471	73.222.617.910
47	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	712.678.074.377	502.213.265.467
48	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	193.097.933.186	169.856.128.251
49	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	893.483.164.503	361.175.665.674
50	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
51	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	14.413.395.582.205	14.481.416.526.418
52	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	253.837.040.572	183.519.568.983
53	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	26.520.223.917	15.380.725.562
54	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	196.067.668.159	185.776.334.299
55	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	283.511.987.858	253.804.301.604
56	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	8.682.342.200	-

ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
57	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	216.952.721.703	209.818.916.379
58	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-
59	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	792.037.934.686	540.158.671.258
60	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	180.499.895.352	89.676.334.553
61	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	268.370.367.977	270.556.723.756
62	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	59.489.256.394	59.337.306.244
63	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	589.130.132.038	588.112.513.959
64	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	450.415.770.352	443.812.713.040
65	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	350.751.537.341	284.280.013.972
66	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	115.950.762.988	107.641.393.517
67	082	BLU LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	-	-
68	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	70.680.319.635	69.366.569.715
69	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-
70	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	19.320.949.144	19.102.501.281
71	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	325.171.202.605	263.182.526.515
72	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	122.050.456.259	122.050.456.259
73	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	389.363.990.641	337.936.677.090
74	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	607.674.094.200	600.651.042.689
75	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1.437.286.230.670	1.376.678.859.073
76	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	1.012.489.742.947	839.691.429.747
77	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	232.156.496.766	128.636.915.989
78	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	-
79	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS	1.883.717.025.421	3.351.099.589.510
80	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	-
81	100	KOMISI YUDISIAL	68.674.690.857	68.335.915.562
82	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	7.722.338.200	-
83	104	BNP2TKI	39.447.427.182	16.065.074.015
84	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	115.339.100	115.339.100
85	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-
86	107	BADAN SAR	279.638.267.299	-
87	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-
88	999.06	BELANJA LAIN-LAIN	-	1.581.094.650.180
89	999.07	SUBSIDI	-	-
90	999.08	BELANJA LAINNYA	921.583.657.732	-
JUMLAH			137.042.921.053.205	123.197.516.471.880

ASET TETAP - JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	9.790.961.500	9.790.961.500
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	60.118.130.781	31.745.471.220
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	173.304.414.775	93.830.418.324
4	005	MAHKAMAH AGUNG	134.548.320.088	47.388.152.052
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	27.564.441.991	24.937.758.141
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	107.097.177.165	104.629.053.485
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	453.353.096.735	452.876.068.735
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	180.194.376.169	82.757.724.075
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	42.103.666.012	41.712.839.525
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	3.777.717.286.675	198.602.817.716
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	100.886.330.673	70.386.003.479
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	316.775.657.845	194.929.862.012
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN RI	16.745.701.264	3.702.124.784
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	303.226.059.178	264.266.735.711
15	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	19.608.862.149	16.903.701.772
16	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.766.010.205.745	2.199.157.116.967
17	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	31.688.821.624.773	25.599.764.194.232
18	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	14.244.555.248	5.788.051.340
19	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	488.349.581.858	515.102.457.283
20	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	162.750.377.522	88.361.149.677
21	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	48.711.209.041	117.725.471.349
22	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	247.118.341.556	153.738.460.163
23	025	KEMENTERIAN AGAMA	109.254.023.572	107.192.057.710
24	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	67.171.209.469	1.499.429.500
25	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASRI	59.434.242.293	58.878.088.466
26	026	BLU KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.678.654.078	7.798.555.658
27	027	KEMENTERIAN SOSIAL RI	50.947.995.709	43.165.082.193
28	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	103.003.889.903	90.938.711.717
29	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.179.848.665.519	924.415.561.630
30	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	226.304.983.632.441	146.959.219.979.118
31	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	10.450.807.000	11.168.153.950
32	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	144.386.000	49.786.000
33	040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	58.516.600.369	48.182.341.428
34	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.136.035.090	2.687.630.000
35	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	29.100.508.511	28.595.661.186
36	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	2.143.104.120	1.887.162.520
37	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	6.185.246.507	6.185.246.507
38	044	BLU KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	152.808.500	103.622.000
39	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	255.108.000	255.108.000
40	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	1.395.216.550	1.283.366.550
41	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	104.426.463.812	103.253.563.812
42	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	35.381.263.963	24.234.891.539
43	054	BADAN PUSAT STATISTIK	16.591.773.811	14.589.126.500
44	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	1.650.191.639	1.039.424.195
45	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	10.572.314.012	5.399.094.061
46	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27.624.444.263	26.459.614.502
47	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	96.905.600	96.905.600
48	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	963.336.893.113	636.342.505.426
49	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	8.897.885.256	6.538.032.886
50	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.369.996.087	1.369.996.087
51	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	4.943.133.473	4.943.133.473
52	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	34.739.535.520	9.543.734.610
53	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	840.551.700	-
54	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	13.672.949.891	12.582.374.611

**ASET TETAP - JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009**

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
55	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	178.736.366.871	169.364.911.386
56	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	480.413.745	247.528.636
57	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	1.771.272.060	1.771.272.060
58	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	165.745.489.883	165.049.213.745
59	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	36.844.782.664	35.491.943.719
60	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	44.795.277.284	35.013.546.584
61	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	17.599.656.296	16.716.504.646
62	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	3.136.964.000	3.053.099.000
63	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	61.643.040	13.900.000
64	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1.907.099.635	1.782.225.446
65	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	11.364.027.362	10.988.055.571
66	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	6.153.735.214	4.849.774.764
67	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	10.273.361.270	8.851.387.520
68	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	9.910.113.891	9.785.328.941
69	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	19.323.097.392	19.373.918.440
70	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	75.108.572.930	13.347.072.500
71	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	7.581.978.136	7.186.444.836
72	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	52.273.044.234	40.749.350.665
73	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS	2.663.434.576.446	4.771.805.420.047
74	100	KOMISI YUDISIAL	3.421.134.028	3.421.134.028
75	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	784.107.913	-
76	104	BNP2TKI	3.632.757.300	567.970.000
77	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	11.797.549.538	11.636.467.338
78	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-
79	107	BADAN SAR	7.690.409.172	-
80	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-
81	999.06	BELANJA LAIN-LAIN	-	2.132.406.815.493
82	999.07	SUBSIDI	-	-
83	999.08	BELANJA LAINNYA	3.992.357.542.056	-
JUMLAH			276.682.171.786.874	186.921.467.820.342

ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	56.134.799.341	55.836.560.691
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	372.016.765.445	172.005.572.898
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	27.610.384.347	28.638.241.095
4	005	MAHKAMAH AGUNG	37.146.049.957	36.190.694.461
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	9.391.413.169	12.558.585.175
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	38.952.345.369	42.781.632.610
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	1.405.260.076	1.305.855.076
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	270.303.559.279	138.998.528.048
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	86.003.671.388	84.585.350.999
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	156.927.893.864	51.392.416.305
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	21.323.194.681	19.626.077.542
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	20.496.576.201	259.015.726.496
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN RI	7.486.585.860	5.621.511.860
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	224.637.262.937	211.730.306.646
15	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	17.015.229.531	16.458.706.114
16	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	260.593.519.492	135.252.528.807
17	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.904.414.529.788	928.859.141.120
18	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	4.861.299.540	2.401.064.511
19	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	446.872.192.775	463.776.103.913
20	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	281.603.063.590	191.934.807.139
21	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	54.281.456.400	59.090.191.263
22	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	69.541.822.334	60.531.204.369
23	025	KEMENTERIAN AGAMA	350.085.500.172	370.669.387.322
24	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	61.835.405.417	1.733.231.460
25	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASRI	22.560.437.529	30.231.852.435
26	026	BLU KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	377.267.941	500.446.341
27	027	KEMENTERIAN SOSIAL RI	24.703.699.379	21.996.898.785
28	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	41.315.376.482	40.004.886.809
29	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	37.981.353.565	30.229.258.883
30	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	1.714.849.041.723	1.398.431.150.377
31	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	22.978.931.922	19.483.539.015
32	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	67.526.925	3.460.615.000
33	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.174.263.571	17.201.343.540
34	040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	80.911.850.200	55.504.181.594
35	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	723.634.091	1.029.048.129
36	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	18.791.890.524	17.737.960.396
37	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	15.285.672.161	13.193.719.218
38	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	250.579.434	236.579.434
39	044	BLU KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	1.385.163.800	1.385.163.800
40	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3.894.825.586	3.707.025.926
41	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	5.195.506.280	5.171.434.980
42	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.093.245.445	2.009.245.445
43	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	3.439.849.181	2.925.350.120
44	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	499.995.704	607.401.067
45	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.152.226.428	334.254.872
46	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	1.359.505.238	1.079.869.273
47	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	36.534.631.889	32.274.468.141
48	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	210.607.542.496	213.994.483.359
49	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.261.694.400	13.713.738.388
50	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	504.433.662	504.433.662
51	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	46.467.496.426	35.844.108.768
52	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	83.750.843.347	55.798.368.149
53	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.490.995.672	1.263.544.108
54	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	966.453.038	787.709.080

ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
55	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	3.008.363.815	2.921.290.107
56	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	7.654.147.209	6.763.698.078
57	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4.003.175.122	3.980.731.814
58	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	8.318.411.170	8.275.548.600
59	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	3.575.995.790	8.258.760.645
60	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5.328.420.920	830.429.482
61	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	13.445.607.141	11.116.988.664
62	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	499.097.614	451.755.275
63	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	40.207.741.978	39.815.575.184
64	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	5.346.289.994	4.539.541.374
65	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	40.262.103.675	40.637.459.631
66	081	BLU BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	3.960.000	3.960.000
67	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	14.701.415.720	9.828.740.021
68	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	4.987.285.075	4.464.328.500
69	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	1.255.469.594	1.067.226.842
70	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.061.882.882	1.755.127.322
71	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	3.291.554.680	3.102.273.280
72	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	7.605.321.035	6.217.523.465
73	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1.768.701.246	542.334.541
74	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2.031.651.524	1.699.974.211
75	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	9.712.783.215	16.016.564.555
76	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	-	11.299.245.266
77	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	10.068.368.025	8.239.910.930
78	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	43.657.175.338	42.102.682.588
79	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS	17.462.905.274	27.483.007.111
80	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	30.875.049.643	22.999.562.486
81	100	KOMISI YUDISIAL	557.717.423	360.235.423
82	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	4.495.565.120	4.406.087.000
83	104	BNP2TKI	7.285.130.733	5.478.575.690
84	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	53.316.739.068	1.022.438.750
85	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	6.626.013.310	-
86	107	BADAN SAR	9.297.345.798	-
87	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	66.796.763	-
88	999.06	BELANJA LAIN-LAIN	-	218.574.285.989
82	999.07	SUBSIDI	-	-
83	999.08	BELANJA LAINNYA	187.834.278.027	-
JUMLAH			7.748.128.178.913	5.885.891.367.838

ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	24.821.740
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	5.387.810.163
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	55.799.339.600	76.734.532.247
4	005	MAHKAMAH AGUNG	233.491.355.808	316.461.978.884
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	157.670.458.765	71.987.815.595
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	-	441.161.200
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	6.531.033.650	6.223.530.850
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	168.770.483.598	65.671.089.344
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	6.273.484.779	3.077.189.714
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	786.608.641.965	216.453.998.780
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	640.218.339.326	410.319.486.752
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	615.651.377.375	629.408.676.151
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN RI	18.321.966.185	17.093.507.648
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	7.719.958.138	122.990.613.757
15	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	-	9.007.578.436
16	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9.318.323.470.330	8.557.957.218.917
17	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	9.879.614.271.189	8.576.843.274.297
18	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	21.285.498.700	-
19	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	1.972.761.351.913	848.949.126.330
20	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	1.660.123.076.403	660.760.837.777
21	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	526.654.490.141	511.403.168.481
22	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	400.956.585.194	167.867.030.235
23	025	KEMENTERIAN AGAMA	740.209.726.510	905.562.495.092
24	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	543.961.983.405	36.290.856.000
25	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASRI	58.176.345.043	24.505.768.180
26	027	KEMENTERIAN SOSIAL RI	270.591.000	1.117.579.455
27	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	13.190.754.294	10.362.083.390
28	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	299.765.530.352	428.990.707.238
29	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	12.501.431.679.958	18.330.576.476.968
30	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-
31	040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	117.692.684.857	13.006.907.778
32	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	-	49.720.000
33	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	22.471.807.900	29.812.416.850
34	054	BADAN PUSAT STATISTIK	22.216.671.367	73.911.850.774
35	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	13.214.916.095	2.763.975.470
36	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	5.046.278.010
37	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29.558.607.524	360.572.302.705
38	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.137.551.209.363	1.382.628.441.991
39	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	9.633.123.849	6.503.703.037
40	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	25.482.711.810	-
41	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-
42	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	79.975.000	-
43	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.348.845.000	1.014.950.000
44	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	985.804.100	82.580.091.150
45	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	7.970.879.088	400.000.000
46	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	18.663.547.569	-
47	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	7.016.842.600	1.260.000.000
48	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	-	-
49	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	25.117.976.000	15.174.719.996
50	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	697.549.000	-
51	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	106.100.000	106.100.000
52	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	24.164.828.173	36.414.962.368
53	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	20.558.247.650	13.783.861.225
54	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	14.572.245.389	42.264.184.578

ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
55	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	705.078.889	1.404.801.391
56	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	17.772.900.920	21.768.163.000
57	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	220.710.488.849	191.612.075.112
58	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	258.479.744.479	39.635.771.000
59	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS	926.854.586.811	1.049.831.238.560
60	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	3.364.786.512	-
61	100	KOMISI YUDISIAL	-	-
62	104	BNP2TKI	-	23.616.508.417
63	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	845.615.361.619	1.094.417.950.722
64	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-
65	107	BADAN SAR	6.979.772.646	-
66	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-
67	999.06	BELANJA LAIN-LAIN	-	3.103.175.838.321
68	999.07	SUBSIDI	-	-
69	999.08	BELANJA LAINNYA	1.624.358.631.404	-
JUMLAH			46.038.727.718.084	48.605.227.226.076

**TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009**

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
1	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-
2	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	9.435.000	18.870.000
3	005	MAHKAMAH AGUNG	1.438.766.353	-
4	006	KEJAKSAAN AGUNG	417.187.715	161.262.027
5	007	SEKRETARIAT NEGARA	4.194.000	23.680.000
6	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	-	-
7	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	243.145.278	1.249.599.036
8	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	4.159.604.528	4.198.133.940
9	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	755.434.799	507.599.583
10	015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	5.402.005.376	5.422.524.799
11	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	839.473.076	1.328.754.332
12	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	7.949.821	15.149.821
13	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	50.788.940	88.553.940
14	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	489.841.857	564.990.854
15	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	-	153.400.000
16	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	130.000.000	-
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	619.468.757	647.759.213
18	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	29.900.000	-
19	025	KEMENTERIAN AGAMA	4.099.200	-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL RI	7.304.000	2.333.333
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	34.960.481	218.068.454
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	56.866.672	-
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	13.836.900.470	24.124.026.855
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	46.372.620	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	11.000.000
26	040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	200.743.055	455.999.179
27	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	1.500.000.000	12.450.000
28	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	114.403.034	129.006.434
29	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	4.037.000
30	054	BADAN PUSAT STATISTIK	168.215.253	192.009.182
31	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	14.200.000	12.400.000
32	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.684.362.999	2.876.556.047
33	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	548.776.102	549.076.102
34	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	258.773.094	264.313.510
35	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	15.480.000	15.480.000
36	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	76.000.000	-
37	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	18.030.621	35.724.991
38	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	3.029.824.262	1.229.065.856
39	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	53.385.000	-
40	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	29.700.000	36.900.000
41	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	40.676.256	46.676.256
42	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.944.162	239.845.004
43	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	14.000.000	14.000.000
44	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	866.488.652	2.671.275.708
45	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-
46	999.07	SUBSIDI	-	-
47	999.08	BELANJA LAINNYA	14.477.928	-
JUMLAH			38.234.179.361	47.520.521.456

ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	797.032.440	754.971.190
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	9.074.295.579	7.677.422.039
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	24.641.047.711	14.220.947.090
4	005	MAHKAMAH AGUNG	10.770.367.358	7.579.897.999
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	2.118.506.877	1.719.311.960
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	10.424.156.289	6.966.770.171
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	140.981.500	3.850.000
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	209.441.563.034	97.687.158.350
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.498.699.711	3.006.652.023
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	141.059.729.324	91.901.755.950
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	154.267.912.424	100.352.991.047
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	360.495.002.682	312.417.249.310
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN RI	808.658.790	534.108.790
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	18.203.123.745	11.654.126.132
15	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	4.947.804.558	7.748.451.329
16	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.591.551.685.286	1.370.542.580.483
17	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.174.669.428.410	904.864.016.296
18	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	15.999.395.216	937.453.000
19	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	218.851.094.814	154.907.186.876
20	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	24.824.973.156	7.628.888.236
21	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	30.921.566.051	28.905.838.251
22	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	22.082.784.495	16.533.281.198
23	025	KEMENTERIAN AGAMA	27.180.911.757	14.399.571.036
24	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	10.743.020.664	-
25	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASRI	6.944.287.499	1.349.149.903
26	026	BLU KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.270.000	2.470.000
27	027	KEMENTERIAN SOSIAL RI	8.709.543.585	8.216.435.585
28	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	36.928.890.597	4.255.414.677
29	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.745.228.671	7.030.774.014
30	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	3.292.582.454.785	2.333.093.892.551
31	033	BLU KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	616.990.000	-
32	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	16.824.975.580	49.492.627.200
33	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	169.492.000	-
34	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	905.443.000	489.520.000
35	040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7.617.556.000	5.499.493.000
36	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	13.881.435.692	11.599.833.192
37	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	41.266.892.966	1.033.822.920
38	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	5.294.998.600	3.540.284.500
39	043	BLU KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	-	-
40	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	1.611.100.000	11.011.392.500
41	044	BLU KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	12.760.249.500	2.159.134.500
42	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	5.230.502.800	2.619.140.500
43	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	1.976.023.720	1.853.448.720
44	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	370.423.530.078	367.104.780.078
45	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	93.526.460.291	19.570.794.893
46	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	2.450.166.311	4.659.294.411
47	054	BADAN PUSAT STATISTIK	56.159.351.204	24.482.498.774
48	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	18.996.808.368	10.756.875.389
49	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	65.312.100.571	27.392.985.449
50	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	45.855.109.542	39.936.506.442
51	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	57.642.763.759	50.295.651.758

ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
52	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.374.290.800	3.571.070.800
53	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	85.907.403.165	38.983.477.641
54	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	3.969.278.825	1.335.485.000
55	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	75.497.112.203	64.633.364.288
56	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	76.127.693.978	61.730.999.373
57	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	11.815.378.208	10.385.197.808
58	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	14.000.000	14.000.000
59	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	10.714.523.000	9.202.474.988
60	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	1.359.577.089	1.187.777.089
61	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	54.981.080.131	28.460.590.011
62	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	150.634.295	6.580.200
63	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	3.625.357.250	3.625.357.250
64	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	8.430.829.231	6.241.520.945
65	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	8.472.678.875	7.461.331.217
66	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	18.145.375.230	11.562.487.650
67	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	28.068.832.367	7.592.006.680
68	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	992.304.847	364.024.598
69	082	BLU LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	3.362.000	1.562.000
70	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	342.561.778.731	276.304.474.271
71	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	1.031.162.750	898.502.750
72	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	103.330.820	81.980.000
73	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	2.642.111.800	2.259.321.400
74	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	9.319.902.575	9.069.759.725
75	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	10.352.359.050	9.330.053.550
76	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	9.708.080.615	9.593.955.615
77	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	50.116.365.597	20.673.652.084
78	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	20.785.952.253	9.130.601.700
79	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	17.057.839.900	4.500.858.900
80	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	11.169.779.728	10.448.377.032
81	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	2.353.628.580	1.986.566.500
82	100	KOMISI YUDISIAL	1.300.201.600	1.189.076.600
83	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	22.865.116.816	16.614.680.016
84	104	BNP2TKI	3.987.006.145	1.580.560.240
85	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	145.009.147	145.009.147
86	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	5.166.858.746	-
87	107	BADAN SAR	1.415.150.000	-
88	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	1.258.809.074	-
89	999.06	BELANJA LAIN-LAIN	-	252.486.965.611
90	999.07	SUBSIDI	215.379.000	-
91	999.08	BELANJA LAINNYA	195.292.149.235	-
JUMLAH			9.351.448.050.646	7.033.044.402.391

DAFTAR REKENING CADANGAN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

No	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening	Pemilik Rekening	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Pajak (Rp)	Biaya (Rp)	31 Desember 2010	31 DESEMBER 2009
A. REKENING CADANGAN DANA REBOISASI										
1	Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri	Menkeu-DJA Cadangan Reboisasi	070-00-0021024-0	Dirjen Perbendaharaan	167.860.809.595,00	1.104.892.041,00	0,00	0,00	0,00	168.965.701.636,00
2	Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri	Rekening Pembangunan Hutan	070-00-8887777-9	Dirjen Perbendaharaan	4.379.017.301.000,00	32.383.548.941,00	0,00	0,00	0,00	4.411.400.849.941,00
3	BNI KCU Pecenongan	Deposito Dana Cad Pemb.Hutan	PAA0200231	Dirjen Perbendaharaan					1.232.139.190.405,00	
4	BNI KCU Pecenongan	Deposito Dana Cad Pemb.Hutan	PAA0200230	Dirjen Perbendaharaan					167.860.809.595,00	
5	BTN Cab.Jakarta Harmoni	Deposito Dana Cad Pemb.Hutan	A1360133	Dirjen Perbendaharaan					2.000.000.000.000,00	
6	Mandiri Cab.Jakarta Plaza Mandiri	Deposito Dana Cad Pemb.Hutan	AC597930	Dirjen Perbendaharaan					573.439.055.297,00	
7	BRI Cab.Jakarta Veteran	Deposito Dana Cad Pemb.Hutan	DC0620315	Dirjen Perbendaharaan					573.439.055.298,00	
Subtotal					4.546.878.110.595,00	33.488.440.982,00	0,00	0,00	4.546.878.110.595,00	4.580.366.551.577,00
B. REKENING CADANGAN DANA SUBSIDI DAN PSO										
1	Bank BNI KCU Kramat Jakarta	Cadangan Subsidi Bulog QQ Dirjen Perbendaharaan	0094720712	Dirjen Perbendaharaan	14.032.115.059,00	29.794.217,00	0,00	0,00	14.061.909.276,00	14.061.909.276,00
2	Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Veteran	Rekening Dana Cadangan	0329-01-002814-30-0	Dirjen Perbendaharaan					25.748.971.762.318,00	0,00
3	Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri	Menkeu Cadangan Subsidi/PSO	070-00-0887766-9	Dirjen Perbendaharaan					0,00	0,00
4	Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Veteran	Menkeu Cadangan Subsidi/PSO	0329-01-002349-30-5	Dirjen Perbendaharaan					0,00	0,00
5	Bank BNI KCU Kramat Jakarta	Menkeu Cadangan Subsidi/PSO	0160881483	Dirjen Perbendaharaan	3.649.151.195.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649.151.195.837,00
6	Bank BTN Jakarta Harmoni	Menkeu Cadangan Subsidi/PSO	00014.01.30.222222.2	Dirjen Perbendaharaan	4.485.217.856.770,00	307.206.701,44	61.441.340,61	25.254,05	0,00	4.485.463.596.876,78
7	Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri	Menkeu Cadangan Subsidi/PSO	070-00-666777-0	Dirjen Perbendaharaan	2.143.174.865.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.174.865.781,00
8	BRI Kantor Cabang Jakarta Veteran	Menkeu Cadangan Subsidi/PSO	0329-01-002661-30-9	Dirjen Perbendaharaan	381.108.930.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.108.930.022,00
9	BNI Kantor Cabang Utama Pecenongan	Menkeu Cadangan Subsidi/PSO	0183876465	Dirjen Perbendaharaan					0,00	381.108.930.022,00
10	Bank Indonesia	Menkeu Cadangan Subsidi/PSO	565.026018	Dirjen Perbendaharaan					767.823.194.853,00	
Subtotal					10.672.684.963.469,00	337.000.918,44	61.441.340,61	25.254,05	26.530.856.866.447,00	10.672.960.497.792,80
C. REKENING CADANGAN DANA BAGI HASIL										
1	Bank BNI KCU Kramat Jakarta	Sub Account DAK DR	0013630358	Dirjen Perbendaharaan					0,00	0,00
2	Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri	Menkeu Cadangan DBH SDA	070-00-3332222-8	Dirjen Perbendaharaan					0,00	0,00
3	Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Veteran	Menkeu Cadangan DBH SDA	0329-01-002356-30-2	Dirjen Perbendaharaan					0,00	0,00
4	Bank BNI KCU Kramat Jakarta	Menkeu Cadangan DBH SDA	0161326224	Dirjen Perbendaharaan					0,00	0,00
5	Bank BTN Jakarta Harmoni	Menkeu Cadangan DBH	00014.01.30.222222.2	Dirjen Perbendaharaan	188.670.917.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.670.917.356,00
6	Bank Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri	Menkeu Cadangan DBH	070-00-666777-0	Dirjen Perbendaharaan	1.020.503.161.294,00	69.897.476,56	13.979.495,39	5.745,95	0,00	1.020.559.073.529,22
7	BRI Kantor Cabang Jakarta Veteran	Menkeu Cadangan DBH	0329-01-002661-30-9	Dirjen Perbendaharaan	4.101.202.161.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101.202.161.148,00
8	BNI Kantor Cabang Utama Pecenongan	Menkeu Cadangan DBH	0183876465	Dirjen Perbendaharaan	3.703.109.082.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703.109.082.486,00
Subtotal					9.013.485.322.284,00	69.897.476,56	13.979.495,39	5.745,95	0,00	9.013.541.234.519,22
C. REKENING CADANGAN DANA PENANAMAN MODAL NEGARA										
1	Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Veteran	Menkeu Cadangan PMN	0329-01-002360-30-1	Dirjen Perbendaharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAND TOTAL					24.233.048.396.348,00	33.895.339.377,00	75.420.836,00	31.000,00	31.077.734.977.042,00	24.266.868.283.889,00

REKENING RETUR
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

NO	NO -- NAMA REKENING		31 DESEMBER 2009	31 DESEMBER 2010	Koreksi (+/-)	31 Desember 2010 (Audited)
1	0188659184	Bank BNI Cabang Jakarta Pusat	0,00	12.432.337.620,00	-	12.432.337.620,00
2	0329-01-002685-30-3	Bank BRI Cabang Jakarta Veteran	0,00	0,00	-	0,00
3	119-00-0002345-5	Bank Mandiri Cabang Jakarta Gambir	0,00	62.841.009.232,00	(62.841.009.232)	0,00
4	001.01.03.03595-4	BPD Bengkulu Cabang Utama Bengkulu	0,00	615.351,00	-	615.351,00
5	1000000325	BPD Kalbar Cabang Utama Pontianak	0,00	0,00	-	0,00
6	0101005508	BPD Maluku Cabang Utama Ambon	0,00	4.083.356.105,00	(3.000.000)	4.080.356.105,00
7	130-002-000026718.8	BPD Sulsel Cabang Utama Makassar	0,00	0,00	191.712	191.712,00
8	100.01.06.019845-5	BPD Sumut Cabang Utama Medan	0,00	0,00	-	0,00
9	502.000.005	Bank Indonesia	0,00	373.326.198.859,00	-	373.326.198.859,00
10	501.001.000,00	Rekening rr KBI KPPN Banda Aceh	0,00	0,00	131.457.400	131.457.400,00
11	501.001.000,00	Rekening rr KBI KPPN Medan I	0,00	0,00	1.557.637.576	1.557.637.576,00
12	501.001.000,00	Rekening rr KBI KPPN PADANG	0,00	0,00	770.676.883	770.676.883,00
13	501.001.000,00	Rekening rr KBI KPPN Pekanbaru	0,00	0,00	53.000.000	53.000.000,00
14	501.001.000,00	Rekening rr KBI KPPN Bandar Lampung	0,00	0,00	11.000.000	11.000.000,00
15	501.001.000,00	Rekening rr KBI KPPN Pematangsiantar	0,00	0,00	24.400.000	24.400.000,00
16	501.001.000,00	Rekening rr KBI KPPN Pontianak	0,00	0,00	339.023.000	339.023.000,00
17	501.001.000,00	Rekening rr KBI KPPN Samarinda	0,00	0,00	18.191.539	18.191.539,00
18	501.001.000,00	Rekening rr KBI KPPN Manado	0,00	0,00	278.241.300	278.241.300,00
19	501.001.000,00	Rekening rr KBI KPPN Kendari	0,00	0,00	181.837.180	181.837.180,00
20	501.001.000,00	Rekening rr KBI KPPN Kupang	0,00	0,00	857.747.000	857.747.000,00
21	501.001.000,00	REKENING rr KBI KPPN Ambon	0,00	0,00	114.911.000	114.911.000,00
22	501.001.000,00	Rekening RR KPBI KPPN Jakarta I	0,00	0,00	937.280.000	937.280.000,00
23	501.001.002,00	Rekening RR KPBI KPPN Jakarta II	0,00	0,00	42.775.000	42.775.000,00
24	501.001.003,00	Rekening RR KPBI KPPN Jakarta III	0,00	0,00	4.137.848.864	4.137.848.864,00
25	501.001.004,00	Rekening RR KPBI KPPN Jakarta IV	0,00	0,00	2.124.025.060	2.124.025.060,00
26	501.001.005,00	REKENING RR KPBI KPPN JAKARTA V	0,00	0,00	7.115.858.650	7.115.858.650,00
27	501.001.006,00	REKENING RR KPBI KPPN JAKARTA VI	0,00	0,00	2.346.025.576	2.346.025.576,00
JUMLAH			0,00	452.683.517.167,00	-41.801.881.492,00	410.881.635.675,00

ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	204.743.200	411.216.700
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	27.486.408.656	23.181.872.136
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	15.128.960.140	15.930.221.477
4	005	MAHKAMAH AGUNG	12.307.983.577	6.660.003.919
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	11.746.951.479.945	10.987.488.399.891
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	2.022.784.610.814	1.985.280.400.992
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	683.753.623.846	632.750.000
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	20.965.348.383	18.731.186.014
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	302.743.716.598	167.967.860.250
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	3.098.320.272.974	2.290.217.165.981
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	5.174.124.353	1.379.122.595
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	548.617.378.647	386.815.398.044
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN RI	70.416.164.384	2.706.287.446
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	297.702.764.931	295.031.677.746
15	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	4.210.124.340	14.184.865.505
16	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.908.591.570.983	7.319.710.936.544
	020	BLU KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.993.187.600	
17	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	144.219.272.102	24.930.120.555
18	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	-	-
19	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	13.409.756.256.271	13.247.703.748.068
20	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	9.822.491.729	10.702.493.401
21	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	8.867.996.267.030	6.284.756.921.614
22	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	38.627.525.470	16.621.314.484
23	025	KEMENTERIAN AGAMA	24.247.056.900	11.355.594.381
24	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	2.573.328.963	-
25	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASRI	2.723.866.310.357	1.465.899.907.529
26	026	BLU KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	139.136.000	139.136.000
27	027	KEMENTERIAN SOSIAL RI	25.488.943.500	9.709.468.727
28	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	1.891.868.394.313	1.829.572.124.083
29	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	47.548.968.261	14.871.807.558
30	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	375.876.824.911	323.423.898.015
31	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	282.085.440	282.085.440
32	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-
33	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	207.104.000	207.104.000
34	040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	8.458.675.461	26.671.200
35	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	8.309.794.751	8.233.431.570
36	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	28.562.529.880	117.579.450.906
37	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	3.359.504.049	7.874.919.099
38	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	64.526.612.621	68.231.817.976
39	044	BLU KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	25.909.000	25.909.000
40	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.469.942.596	-
41	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	1.096.893.983	14.600.088
42	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	3.647.989.400
43	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	4.464.150.937	1.082.064.711
44	054	BADAN PUSAT STATISTIK	27.846.906.848	12.574.805.766
45	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	64.275.549.979	63.790.137.229
46	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	7.395.621.452	1.708.158.125
47	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	583.937.583	-
48	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	28.619.058.739	18.026.481.160
49	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	149.028.670.636	40.373.801.449
50	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	5.328.909.088	268.441.400
51	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	80.922.000	1.335.426.055
52	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	76.615.072	76.615.072
53	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	98.517.488.446	98.517.488.446

ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2.541.108.400	
54	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.410.165.506	1.724.463.868
55	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	15.130.688.435	4.912.604.474
56	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.788.308.577	-
57	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	3.005.724.467	5.625.125
58	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-
59	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	24.265.455.335	9.694.388.681
60	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	25.170.014.900	28.073.515.672
61	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	70.570.822.802	89.213.500.691
62	081	BLU BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	757.472.375	1.986.536.750
63	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	118.222.863	64.114.063
64	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	7.704.531.609	7.675.008.694
65	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	109.747.000	109.747.000
66	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1.422.982.940	211.741.000
67	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	1.397.949.748	2.054.013.402
68	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	8.282.196.849	3.359.211.031
69	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	120.240.933.031	65.872.230.709
70	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	48.732.344.172	53.938.406.709
71	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	804.372.852	301.982.472
72	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	544.253.548.508	489.227.207.952
73	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	122.200.656.654	50.534.104.259
74	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	378.996.590.651	188.612.622.680
75	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS	669.869.028.122	661.364.926.291
76	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	83.301.000	80.276.000
77	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	32.680.335.000	-
78	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	381.675.855	22.079.300
79	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-
80	107	BADAN SAR	51.688.284.109	-
81	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-
JUMLAH			56.966.506.583.499	48.858.931.604.569

RINGKASAN ASET NEGARA YANG DIKELOLA
PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
PERIODE 01 JANUARI 2010 S/D 31 DESEMBER 2010

NO.	JENIS ASET	SATUAN ASET	SALDO AWAL PERIODE (1 Januari 2010) *)			MUTASI PERIODE BERJALAN								SALDO AKHIR PERIODE BERJALAN (31 Desember 2010)			
			ITEM ASET	NILAI ASET		MUTASI SERAH KELOLA			MUTASI TRANSAKSI					ITEM ASET	NILAI ASET		
				Original CCY	Ekv. Rupiah	ITEM ASET	Original CCY	Ekv. Rupiah	ITEM ASET	Original CCY	Ekv. Rupiah	Original CCY	Ekv. Rupiah		Original CCY	Ekv. Rupiah **)	Ekv. Rupiah ***)
1	Saham Bank	PT Bank Maybank Indocorp	1	7.912.600.000,00	7.912.600.000,00									1	7.912.600.000,00	7.912.600.000,00	7.912.600.000,00
2	Saham Bank	Bank Panin, PT	1	199.401.132,00	199.401.132,00									1	199.401.132,00	199.401.132,00	199.401.132,00
3	Saham Bank	PT Bank Permata Tbk	1	4.424.712.345,00	4.424.712.345,00									1	4.424.712.345,00	4.424.712.345,00	4.424.712.345,00
Sub Total			3	12.536.713.477,00	12.536.713.477,00									3	12.536.713.477,00	12.536.713.477,00	12.536.713.477,00
4	Saham Non Bank	Sejahtera Eka Graha, PT	1	22.470.000.000,00	22.470.000.000,00									1	22.470.000.000,00	22.470.000.000,00	22.470.000.000,00
5	Saham Non Bank	PT Tugu Pratama Indonesia	1	132.347.220.000,00	132.347.220.000,00				1	98.680.000.000		-201.320.000.000	-201.320.000.000	0	0,00 ¹⁾	0,00	0,00
6	Saham Non Bank	PT Tugu ReAsuransi Indonesia	1	14.584.820.000,00	14.584.820.000,00									1	28.415.673.000,00 ²⁾	28.415.673.000,00	28.415.673.000,00
7	Saham Non Bank	PT Asia Grain International Tbk	1	194.895.066,00	194.895.066,00									1	194.895.066,00	194.895.066,00	194.895.066,00
8	Saham Non Bank	PT Jembo Cable Company Tbk	1	276.497.157,00	276.497.157,00									1	276.497.157,00	276.497.157,00	276.497.157,00
Sub Total			5	169.873.432.223,00	169.873.432.223,00									4	51.357.065.223,00	51.357.065.223,00	51.357.065.223,00
9	Hak Tagih	Polysindo Eka Perkasa, PT	1	459.555.536,00	459.555.536,00									1	459.555.536,00	459.555.536,00	459.555.536,00
	Hak Tagih	Polysindo Eka Perkasa, PT		\$ 960.092,00	-								(390.757.444)	\$	960.092,00	8.588.983.032,00	8.632.187.172,00
10	Hak Tagih	Texmaco Jaya, PT	1	365.572.613,00	365.572.613,00									1	365.572.613,00	365.572.613,00	365.572.613,00
	Hak Tagih	Texmaco Jaya, PT		\$ 2.435,00	-								(991.045)	\$	2.435,00	21.783.510,00	21.893.085,00
11	Hak Tagih	Wastra Indah, PT	1	10.493.948,00	10.493.948,00									1	10.493.948,00	10.493.948,00	10.493.948,00
12	Hak Tagih	Jaya Perkasa Engineering, PT	1	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00									1	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00
	Hak Tagih	Jaya Perkasa Engineering, PT		\$ 38.822.432,00	-								(15.800.729.824)	\$	38.822.432,00	347.305.476.672,00	349.052.486.112,00
Sub Total			4	152.202.696.847,00	152.202.696.847,00								(16.192.478.313)	4	152.202.696.847,00	508.118.940.061,00	509.909.263.216
				\$ 39.784.959,00										\$	39.784.959,00		
13	Saham & Kredit	Bina Prima Perdana, PT	1	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00									1	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00
	Saham & Kredit	Bina Prima Perdana, PT		\$ 25.540.008,00	-								(10.394.783.256)	\$	25.540.008,00	228.480.911.568,00	229.830.211.928,00
14	Saham & Kredit	Tuban Petrochemical Industries	1	1.425.578.773.902,64	1.425.578.773.902,64							-85.000.000.000		1	1.340.578.773.902,64 ³⁾	1.340.578.773.902,64	1.340.578.773.902,64
Sub Total			2	1.895.978.487.388,64	1.895.978.487.388,64								143.480.911.568	2	1.810.978.487.388,64	2.039.459.398.956,64	2.040.608.699.316,64
				\$ 25.540.008,00										\$	25.540.008,00		
Jumlah Total			14	2.230.591.329.935,64	2.230.591.329.935,64								(74.031.566.745)	13	2.027.074.962.935,64	2.611.472.117.717,64	2.614.411.741.232,64
				\$ 65.324.967,00										\$	65.324.967,00		

Catatan:
*) Menggunakan kurs transaksi beli BI tgl 31 Desember 2009 \$1= Rp9.353
**) Menggunakan kurs transaksi beli BI tgl 31 Desember 2010 \$1=Rp8.946
***) Menggunakan kurs transaksi beli BI tgl 31 Desember 2010 \$1= Rp8.991
¹⁾ Nilai aset PT Tugu Pratama Indonesia disesuaikan dengan KMK 192/KM.0/2010, dan sudah terjual pada 20 Desember 2010
²⁾ Nilai aset PT Tugu Reasuransi Indonesia disesuaikan dengan KMK 193/KM.0/2010
³⁾ Nilai Tuban Petrochemical Industries sudah di kurangkan dengan pembayaran obligasi jatuh tempo pada 19 Februari 2010 dan 27 Agustus 2010

**ASET EKS BPPN YANG DIKELOLA TIM KOORDINASI
PER 31 DESEMBER 2010**

No.	JENIS ASET	Per 31 Desember 2005*		Uraian	Per 31 Desember 2009**		Per 31 Desember 2010 **)		Koreksi +/-		Ket
		JUMLAH ASET	NILAI PENGALIHAN (Rp)		JUMLAH ASET	NILAI (Rp)	JUMLAH ASET	NILAI (Rp)	JUMLAH ASET	NILAI (Rp)	
1	Surat Berharga										
	- Surat Berharga Treasury	37	286.574.211.485								
	- Surat Berharga Non Treasury	121	169.269.366.213								
	- Surat Berharga terkait PKPS	2	18.100.848.909								
2	Penyertaan di Bank Lainnya	8	0								
3	Penyertaan Non Bank	21	25.321.044.355								
4	Pinjaman yang Diberikan										
	- Dikelola BPPN	11.785	2.129.067.262.645	Dalam Rupiah	16.244	4.102.210.168.567,07	16.051	4.083.423.025.982,22	(193)	(18.787.142.584,85)	1)
				Dalam USD		232.633.139,50		232.633.139,50			
				Dalam JPY		9.610.910,20		9.610.910,20			
				Dalam DM		500.000,00		500.000,00			
	- Dikelola BDI	1	19.489.668.884	***							
5	Aktiva Non Inti										
	- NCA Properti	365	31.594.228.599		264	381.519.605.272,00	1.128	1.462.099.189.630,00	864	1.080.579.584.358,00	2)
	- NCA Non Properti	7	293.510.290.511								
	- Inventaris	76.413	8.134.769.815		59.003	16.273.756.036,00	58.937	16.247.173.622,00	(66)	(26.582.414,00)	
6	Tagihan PKPS	17	2.235.982.000.000	Tagihan PKPS							
				1) Telah diserahkan kepada PUPN	10	13.279.190.684.854,00	8	12.967.404.025.762,90	(2)	(311.786.659.091,09)	3)
				2) Eks Kepolisian Negara RI ****	8	8.099.131.770.000,00	8	8.099.131.770.000,00			
				3) Eks Kejaksaan Agung RI *****	8		7	0,00	(1)	0,00	
7	Piutang Bank	13	1.249.659.000.000								
8	Piutang Non Bank	3	20.000.000								
9	Penempatan Antar Bank dan Nos	2	83.698.000.000			478.622.000.000,00		478.622.000.000,00			
10	Aktiva Lainnya	7	93.971.000.000								
	Jumlah	88.802	6.644.391.691.416		75.537	26.356.947.984.729,10	76.139	27.106.927.184.997,10	602	749.979.200.268,06	
					Dalam USD	232.633.139,50	Dalam USD	232.633.139,50			
					Dalam JPY	9.610.910,20	Dalam JPY	9.610.910,20			
					Dalam DM	500.000,00	Dalam DM	500.000,00			

Keterangan:

* Sumber data berasal dari Surat Tim Audit LKPP BPK RI No. 08/ST-6 LKPP/06/2006 tanggal 12 Juni 2006

** Hasil Inventarisasi dan Penilaian

*** Telah disatukan dalam pinjaman yang dikelola BPPN

**** Nilai JKPS versi APU dan saat ini masih dalam proses perhitungan dengan BPK-RI

Catatan

- Adanya pengurangan jumlah dan nilai aset kredit karena adanya pelunasan hutang oleh debitur di PUPN
- Pada tahun 2010 telah dilakukan reinventarisasi terhadap aset properti, sehingga jumlah aset mengalami penambahan. Total aset properti yang dikelola adalah hasil dari reinventarisasi ditambah dengan properti BJDA eks Griya Potenza (132 aset).
- Adanya pengurangan jumlah dan nilai aset kredit yang berasal dari PKPS karena adanya pelunasan hutang oleh obligor atas nama OP dan angsuran hutang dari hasil lelang underlying assets obligor atas nama KO, serta angsuran hutang oleh obligor atas nama BD
- Surat Berharga adalah Surat berharga yang dimiliki oleh BPPN yang diperoleh dari pengalihan aset milik BBO/BBKU, BTO, Bank rekap dan aktivitas penyelesaian kewajiban debitur kepada BPPN atau diterima BPPN dari pihak lain sebagai alat pembayaran kewajibannya kepada BPPN (*asset settlement*).
- Penyertaan di Bank Lainnya adalah penyertaan dimiliki BPPN di bank umum yang berasal dari penyertaan yang sebelumnya dimiliki oleh BBO/BBKU dan BTO.
- Penyertaan Non Bank adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang. Pinjaman yang Diberikan merupakan pinjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

- peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan
- 7 Aktiva Non Inti merupakan aktiva non inti berupa asset properti dan asset non properti milik BBO/BBKU, BTO, dan Bank Rekap yang dialihkan ke BPPN serta aktiva properti yang diserahkan oleh debitur dalam rangka pembayaran kewajibannya kepada BPPN ("Asset Settlement"). Aktiva non inti milik Bank yang dialihkan ke BPPN tersebut berasal dari aktiva non inti yang diterima Bank dari debitur untuk penyelesaian kewajibannya maupun barang jaminan diambil alih ("BJDA").
 - 8 Tagihan PKPS merupakan piutang BPPN yang timbul sehubungan dengan PKPS kepada perusahaan induk yang didirikan oleh eks PSP BTO dan BBO dalam rangka penyelesaian terhadap kewajiban eks PSP tersebut berdasarkan perjanjian MSAA, MRNIA, dan piutang BPPN kepada eks PSP BBKU dan BTO II dalam perjanjian APU.
 - 9 Piutang Bank adalah tagihan BPPN kepada 50 BBO/BBKU dan 2 BDL (Bank Ratu dan Bank Prasadha) yang timbul karena dilakukannya pengalihan *cessie*) Piutang BLBI dari BI kepada Negara RI c.q. BPPN dan/atau karena BPPN melakukan pembayaran talangan kewajiban bank yang termasuk dalam skema penjaminan, pembayaran talangan pesangon karyawan eks bank, atau talangan-talangan lainnya setelah dikurangi realisasi aktiva eks bank tersebut yang diterima BPPN.
 - 10 Penempatan Antar Bank merupakan penanaman dana BDP pada bank lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk *interbank call money*, tabungan, deposito berjangka, pinjaman antar bank, dan lain-lain yang sejenis dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan. Sedangkan Nostro merupakan saldo rekening giro BDP baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di BI dan bank lain
 - 11 Aktiva Lainnya merupakan aktiva yang dimiliki BPPN yang tidak termasuk dalam kelompok akun aktiva tersebut di atas.

ASET TANAH KKKS YANG DICATAT DI NERACA LKPP

No.	UNIT / KKKS	LOKASI/BLOCK	SALDO PER DESEMBER 2010	
			LUAS (M2)	NILAI WAJAR TANAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)
1	TOTAL INDONESIA E&P	BALIKPAPAN	9.705.925	546.054.937.372,00
2	VICO SANGA SANGA	SANGA-SANGA	1.154.632	44.075.198.000,00
3	PT. MEDCO E & P TARAKAN	TARAKAN	340.635	28.962.632.000,00
4	PT PERTAMINA EP AREA CEPU	AREA CEPU	42.055	6.392.360.000,00
5	PT. CHEVRON INDONESIA COMPANY	BALIKPAPAN	14.459.988	261.863.240.500,00
6	PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	ROKAN	437.675.097	10.592.439.949.130,00
7	PT. KONDUR PETROLEUM SA	PEKANBARU	6.981.158	230.121.681.000,00
8	PT. PETROSELAT LTD	SELAT PANJANG	411.388	10.602.840.000,00
9	PT. MEDCO E & P INDONESIA	PEKANBARU - PELALAWAN	6.195.852	84.653.336.280,00
10	PT. KALILA (BENTU) LTD.	PELALAWAN & PEKANBARU	361.235	1.945.175.000,00
11	PT. KALILA (KORINCI BARU) LTD.	PEKANBARU	464.088	7.592.592.400,00
12	PT. PETROCHINA INT. BERMUDA	SORONG	3.862.621	7.307.770.750,00
13	PT. PETROCHINA SALAWATI	SALAWATI	1.660.974	2.654.097.310,00
14	KANGEAN ENERGY	KANGEAN BLOCK	898.504	40.817.865.860,00
15	PT. MEDCO E & P RIMAU	RIMAU BLOCK	1.497.087	5.562.224.000,00
16	MOBIL CEPU LTD	BLORA & BOJONEGORO	587.573	49.679.658.000,00
17	EXXONMOBIL OIL INDONESIA	BLOCK B ACEH	504.273	10.501.230.000,00
18	PT PERTAMINA EP REGION SUMATERA	SUMATERA	12.540.916	932.092.427.000,00
19	CONOCOPHILLIPS SOUTH JAMBI LTD	JAMBI	25.887.874	3.400.038.160,00
20	VICO UNIT SEMBERAH	SEMBERAH	12.392.826	51.415.100.000,00
21	VICO UNIT MUTIARA	LAPANGAN PAMAGUAN	5.689.285	20.536.437.113,00
22	VICO UNIT MUTIARA	LAPANGAN MUTIARA	11.686.331	64.787.724.558,00
23	VICO UNIT BADAK & NILAM	BADAK DAN NILAM	79.897.257	186.273.424.543,00
24	PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO	BANGKO BLOCK	1.014.425	19.021.937.352,00
25	PT. MEDCO E & P INDONESIA	LEMATANG BLOCK	962.044	3.549.632.633,00
26	JOB HESS JAMBI MERANG	JAMBI	871.217	6.029.860.000,00
27	JOB PERTAMINA GOLDEN SPIKE - PENDOPO	PENDOPO	955.055	31.627.815.000,00
28	JOB PERTAMINA JAVA - TUBAN	TUBAN	569.945	66.459.346.700,00
29	CONOCOPHILLIPS GRISSIK LTD	GRISSIK - MUSI BANYUASIN	685.838	502.869.000,00
30	PT. MEDCO E & P INDONESIA	CENTRAL SUMATERA/MUSI RAWAS	289.342	2.112.767.000,00
31	JOB PERTAMINA TALISMAN	OGAN KOMERING	482.923	2.258.798.000,00
32	PT. BOB BUMI SIAK PUSAKO	SIAK - PEKANBARU	132.829	4.100.448.000,00
33	TAC PERTAMINA BWP MERUAP LTD	SAROLANGUN	301.743	3.657.675.075,00
34	PT. LAPINDO BRANTAS INC.	SIDOARJO	447.275	33.296.382.882,00
35	JOB PERTAMINA - MEDCO TOMORI	BLOCK TOILI- SULAWESI	343.689	3.274.558.000,00
36	PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA - SIAK	SIAK - PEKANBARU	4.254.516	9.403.683.400,00
37	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG)	SENGKANG	567.485	23.890.286.000,00
38	PEARL OIL TUNGKAL LTD	TUNGKAL BLOCK - JAMBI	353.137	1.041.880.133,00
39	PT. PETROCHINA INT JABUNG	JABUNG BLOCK - JAMBI	8.449.765	323.833.352.258,00
40	KODECO ENERGY LTD.	GRESIK	39.520	1.068.469.575,00
41	HESS INDONESIA PANGKAH	GRESIK	286.675	USD 6.755.000,00
	TOTAL		655.904.996	13.724.861.699.984,00 dan USD 6,755,000,00
				Ekuivalen : Rp.13.788.358.699.984,-

ASET NON TANAH KKKS YANG DICATAT DI NERACA LKPP

No.	KKKS	Block	DATA < 2005				Keterangan
			Aset KKKS (Berdasarkan LHP KOREKSI)			Nilai Wajar (Rp)	
			Jumlah	Nilai Perolehan			
				USD	Rp		
1	Chevron Indonesia Company (Cico)	East Kalimantan	606	561.400.207,00	5.048.653.943.349,00	2.443.580.122.951,00	telah koreksi kurs dan telah dikeluarkan nilai well tidak digunakan
2	Chevron Makassar Ltd.	Makassar Strait	26	418.340.192,00	3.769.245.129.920,00	2.223.886.390.751,00	telah koreksi kurs
3	CNOOC South East Sumatera Ltd.	Southeast Sumatera	3.958	1.064.603.786,00	8.462.327.556.044,00	3.763.034.645.833,00	telah dikeluarkan nilai well tidak digunakan
4	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	Corridor	786	615.336.164,00	4.623.418.700.170,00	2.487.958.740.133,97	telah dikeluarkan nilai well tidak digunakan
5	ExxonMobil Oil Indonesia Inc.	Block B	3.941	944.718.159,00	1.594.522.363.597,00	4.152.160.280.110,00	telah koreksi kurs, revisi penilaian aset, dan telah dikeluarkan nilai well tidak digunakan
6	Mobil Exploration Indonesia	North Sumatera Offshore	558	471.804.364,89	3.249.600.375.018,84	2.462.796.398.544,20	sudah sesuai
7	PetroChina International (Jabung) Ltd.	Tanjung Jabung	2.096	154.685.497,00	1.062.014.236.866,00	556.585.267.636,00	Sudah sesuai dan telah dikeluarkan nilai seluruh well
8	Premier Oil Natuna Sea BV	Natuna Sea Block A	383	249.243.968,82	1.438.322.756.336,47	1.399.292.522.121,23	Sudah sesuai
9	PT Chevron Pacific Indonesia	Rokan	23.874	1.785.613.736,00	9.501.288.147.382,00	4.542.226.160.534,00	telah koreksi kurs dan telah dikeluarkan nilai seluruh well
10	Total E&P Indonesia	Mahakam	4.349	3.426.530.938,16		24.975.361.711.724,60	telah dikeluarkan nilai well tidak digunakan
11	Vico Indonesia Co.	Sanga-sanga	2.734	877.906.616,04	1.895.836.623.494,50	3.690.325.530.143,65	telah dikeluarkan nilai seluruh well
	SUB TOTAL CRASH PROGRAM		43.311	10.570.183.628,91	40.645.229.832.177,80	52.697.207.770.482,70	
12	Kalila (Korinci Baru) Pty Ltd.	Korinci Baru	1	1.145,00	-	1.978.000,00	telah koreksi kurs
13	Kalila (Bentu) Ltd.	Bentu Block	3	6.685,00	61.574.885,00	34.250.000,00	Sudah sesuai
14	Kangean Energy Indonesia	Kangean	415	336.334.167,88	1.141.773.237.438,90	916.452.269.238,51	Koreksi karena adanya aset dengan tahun perolehan > 2004 yang ikut dinilai
15	Elnusa Bangkanai energy Ltd.	Bangkanai	8	7.261,00	-	29.019.574,00	Koreksi Penggunaan Kurs Tengah BI dan revisi penilaian aset nomor Harmoni 66110000001 -Electric Motor
16	PT. Medco E&P Tarakan	Tarakan	197	24.511.619,99		151.175.963.748,76	telah koreksi kurs dan revisi penilaian
17	JOB Pertamina-PetroChina East Java	Tuban	1061	88.458.389,00		522.441.015.152,62	telah koreksi kurs
18	ENI Krueng Mane Ltd.	Offshore North Aceh	55	295.281,00		597.876.016,07	Sudah sesuai
19	ENI Ambalat Ltd.	Ambalat	2	4.310,00		5.255.989,00	Sudah sesuai
	SUB TOTAL HASIL IP TAHUN 2010		1742	449.618.858,87	1.141.834.812.323,90	1.590.737.627.718,96	
20	Kodeco Energy Co. Ltd.	West Madura	189	43.152.487,00	382.589.949.742,00	148.026.228.805,00	telah koreksi kurs dan telah dikeluarkan nilai well tidak digunakan
	SUB TOTAL NON CRASH PROGRAM		189	43.152.487,00	382.589.949.742,00	148.026.228.805,00	
	TOTAL 20 KKKS		45.242	11.062.954.975	42.169.654.594.244	54.435.971.627.007	

CAT : 1. Hasil Perhitungan belum dilakukan rekonsiliasi dengan BPMIGAS, BPKP, dan KESDM.

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	1.094.198.831	399.455.400
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	1.158.505.750
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	2.191.341.392	1.879.498.566
4	005	MAHKAMAH AGUNG	3.517.543.774	1.272.816.137
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	1.845.635.750	-
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	36.845.718.358	53.333.141.877
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.250.629.696	9.807.873.733
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	6.144.858.402	580.631.870
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	848.472.444.569	-
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	10.271.046.636	18.849.899.054
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	202.674.045.731	47.132.934.883
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	5.681.134.174	1.317.675.732
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.076.418.319	586.321.321
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	18.855.590.946	27.842.523.431
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	139.725.858.192	8.944.418.112
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	68.560.459.557	492.507.114.811
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	480.417.525.175	356.667.363.759
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	334.119.122.227	53.951.846.030
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASRI	1.108.764.679	245.214.510.718
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL RI	2.844.045.420	19.008.799.293
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	20.076.067.215	21.621.016.834
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.077.645.469	1.304.073.301
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	129.943.580.652	53.500.787.326
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	34.792.984	114.372.219
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	472.555.219	67.898.306
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	65.173.284	13.555.970
27	040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.198.627.671	630.789.959
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	16.772.500	461.187.745
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	639.279.862	105.902.909
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	70.121.689	-
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	2.746.160.312	3.032.875.640
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	374.468.888	118.964.136
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	293.140	-
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	62.641.824.097	522.060.715
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	157.734.520	-
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.728.495.565	2.720.141.178
38	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	-	53.991.721
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3.945.776.871	1.926.879.831
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.146.033.884	251.635.109
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	198.832.881.549	79.054.118.184
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.895.860.838	870.675.368
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	355.247.980	477.825.010
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.005.568.234	310.668.789
47	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	157.424.221	19.779.843
48	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	399.336.993	14.629.459
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	37.005.485	-
50	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	4.578.579.279	324.234.934
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	860.777.048	485.222.297
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	93.870.566	-
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	19.320.000	19.011.620
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.681.937.825	123.358.072
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	2.485.122.018	2.052.948.292
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	7.851.174.147	791.301.164
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.343.557.271	854.586.512
58	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	-	-

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2009
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	19.620.196	17.023.730
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	235.049.038	139.525.037
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	308.592.561	527.948.412
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	15.794.775	23.685.610
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	678.208.678	-
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2.745.925.873	2.951.319.898
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	735.348.021	842.739.020
66	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	7.960.000	128.463.965
67	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	290.693.054	222.997.695
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	3.891.752.442	3.119.555.905
69	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD NIAS	-	-
70	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	417.038.789	561.457.589
71	100	KOMISI YUDISIAL	63.430.625	516.175.559
72	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	38.309.959.050	-
73	104	BNP2TKI	1.055.457.130	361.902.070
74	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	27.967.575
75	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	17.507.000	-
76	107	BADAN SAR	-	-
77	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	151.692.061	-
JUMLAH			2.671.573.478.397	1.521.740.584.985

**Surat Berharga Negara Jangka Pendek
Per 31 Desember 2010**

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
FIXED RATE BOND			22.570.875.000.000		(36.046.915.000)	22.534.828.085.000
1	FR0015	15/02/2011	5.478.938.000.000	13,40000%	-	7.264.938.000.000
2	FR0016	15/08/2011	4.098.937.000.000	13,45000%	-	7.264.937.000.000
3	FR0022	15/09/2011	6.587.000.000.000	12,00000%	(2.478.793.000)	8.986.521.207.000
4	FR0025	15/10/2011	6.406.000.000.000	10,00000%	(33.568.122.000)	8.770.431.878.000
VARIABLE RATE			6.031.666.000.000			6.031.666.000.000
1	VR0017	25/06/2011	1.031.666.000.000	6,63677%	-	1.031.666.000.000
2	VR0032	25/04/2011	5.000.000.000.000	6,63677%	-	5.000.000.000.000
SURAT UTANG PEMERINTAH			3.795.739.945.085		-	3.795.739.945.085
1	SU002	01/04/2011	311.613.254.148	0,10000%	-	311.613.254.148
2	SU002	01/10/2011	327.193.916.855	0,10000%	-	327.193.916.855
3	SU004	01/06/2011	787.421.255.343	0,10000%	-	787.421.255.343
4	SU004	01/12/2011	826.792.318.110	0,10000%	-	826.792.318.110
5	SU007	01/02/2011	752.545.951.526	0,10000%	-	752.545.951.526
6	SU007	01/08/2011	790.173.249.103	0,10000%	-	716.710.430.025
ORI0003			8.930.895.000	9,40000%	-	8.930.695.000
1	ORI0003		8.930.895.000		-	8.930.695.000
BAGIAN LANCAR SUN JK PJG (a)			41.328.975.945.085		(36.046.915.000)	41.292.929.030.085
SPN			29.795.000.000.000		(559.990.965.000)	29.235.009.035.000
2	SPN20110210	10/02/2011	3.600.000.000.000	-	(26.132.486.000)	3.573.867.514.000
3	SPN20110303	03/03/2011	4.800.000.000.000	-	(52.657.475.000)	4.747.342.525.000
4	SPN20110407	07/04/2011	5.470.000.000.000	-	(92.820.422.000)	5.377.179.578.000
5	SPN20110505	05/05/2011	4.625.000.000.000	-	(100.227.472.000)	4.524.772.528.000
6	SPN20110609	09/06/2011	3.300.000.000.000	-	(88.099.524.000)	3.211.900.476.000
7	SPN20110707	07/07/2011	3.200.000.000.000	-	(97.417.420.000)	3.102.582.580.000
8	SPN20110811	11/08/2011	1.150.000.000.000	-	(38.759.385.000)	1.111.240.615.000
9	SPN20110929	29/09/2011	1.000.000.000.000	-	(40.547.039.000)	959.452.961.000
JUMLAH SUN JANGKA PENDEK			29.795.000.000.000		(559.990.965.000)	29.235.009.035.000
TOTAL SBN JANGKA PENDEK			71.123.975.945.085		(596.037.880.000)	70.527.938.065.085

Utang Bunga/Imbalan (*Accrued Interest/Return*) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2010

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
FIXED RATE BOND			377.779.617.000.000		11.903.224.814.209
1	FR0015	15/02/2011	5.478.938.000.000	13,40000%	277.310.967.932
2	FR0016	15/08/2011	4.098.937.000.000	13,45000%	208.234.197.474
3	FR0017	15/01/2012	7.533.263.000.000	13,15000%	457.623.127.461
4	FR0018	15/07/2012	5.430.062.000.000	13,17500%	330.489.863.506
5	FR0019	15/06/2013	11.456.341.000.000	14,25000%	76.241.949.355
6	FR0020	15/12/2013	10.222.951.000.000	14,27500%	68.156.414.317
7	FR0022	15/09/2011	6.587.000.000.000	12,00000%	235.821.187.000
8	FR0023	15/12/2012	14.799.143.000.000	11,00000%	76.023.197.591
9	FR0025	15/10/2011	6.406.000.000.000	10,00000%	137.274.174.000
10	FR0026	15/10/2014	13.522.535.000.000	11,00000%	318.739.672.485
11	FR0027	15/06/2015	19.989.000.000.000	9,50000%	88.691.193.000
12	FR0028	15/07/2017	14.221.766.000.000	10,00000%	656.988.702.136
13	FR0030	15/05/2016	11.440.000.000.000	10,75000%	159.668.080.000
14	FR0031	15/11/2020	17.899.000.000.000	11,00000%	255.633.518.000
15	FR0032	15/07/2018	1.434.000.000.000	15,00000%	99.366.162.000
16	FR0033	15/03/2013	9.400.474.000.000	12,50000%	350.571.876.882
17	FR0034	15/06/2021	16.756.400.000.000	12,80000%	100.169.759.200
18	FR0035	15/06/2022	11.023.750.000.000	12,90000%	66.418.093.750
19	FR0036	15/09/2019	10.735.500.000.000	11,50000%	368.324.269.500
20	FR0037	15/09/2026	2.450.000.000.000	12,00000%	87.712.450.000
21	FR0038	15/08/2018	2.920.757.000.000	11,60000%	127.972.967.955
22	FR0039	15/08/2023	4.175.000.000.000	11,75000%	185.290.675.000
23	FR0040	15/09/2025	26.474.000.000.000	11,00000%	868.823.732.000
24	FR0042	15/07/2027	14.774.100.000.000	10,25000%	699.568.409.100
25	FR0043	15/07/2022	14.417.000.000.000	10,25000%	682.659.367.000
26	FR0044	15/09/2024	18.014.000.000.000	10,00000%	537.429.676.000
27	FR0045	15/05/2037	6.400.000.000.000	9,75000%	81.017.600.000
28	FR0046	15/07/2023	16.855.000.000.000	9,50000%	739.698.530.000
29	FR0047	15/02/2028	20.840.000.000.000	10,00000%	787.168.480.000
30	FR0048	15/09/2018	5.675.970.000.000	9,00000%	152.405.470.470
31	FR0049	15/09/2013	4.786.607.000.000	9,00000%	128.525.184.557
32	FR0050	15/07/2038	15.686.000.000.000	10,50000%	760.849.430.000
33	FR0051	15/05/2014	2.376.123.000.000	11,25000%	34.705.652.538
34	FR0052	15/08/2030	23.500.000.000.000	10,50000%	932.010.000.000
35	FR0053	15/07/2021	6.372.000.000.000	8,25000%	242.843.292.000
36	FR0054	15/07/2031	7.722.000.000.000	9,50000%	338.887.692.000
37	FR0055	15/09/2016	4.100.000.000.000	7,37500%	90.212.300.000
38	FR0056	15/09/2026	3.750.000.000.000	8,37500%	93.697.500.000

Utang Bunga/Imbalan (*Accrued Interest/Return*) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2010

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
ORI			32.672.065.000.000		188.952.890.315
1	ORI003	12/09/2011	8.930.695.000.000	9,40000%	45.135.732.530
2	ORI004	12/03/2012	12.855.765.000.000	9,50000%	65.667.247.620
3	ORI005	15/09/2013	2.678.875.000.000	11,45000%	14.018.552.875
4	ORI006	15/08/2012	8.206.730.000.000	9,35000%	35.067.357.290
5	ORI007	15/08/2013	8.000.000.000.000	7,95000%	29.064.000.000
VARIABLE RATE BOND			142.795.082.000.000		1.041.801.480.732
1	VR0017	25/06/2011	1.031.666.000.000	6,36967%	1.278.234.174
2	VR0018	25/10/2012	4.368.483.000.000	6,36967%	51.417.044.910
3	VR0019	25/12/2014	13.856.226.000.000	6,36967%	17.167.864.014
4	VR0020	25/04/2015	9.899.007.000.000	6,36967%	116.511.312.390
5	VR0021	25/11/2015	7.546.328.000.000	6,36967%	48.326.684.512
6	VR0022	25/03/2016	9.666.749.000.000	6,36967%	11.977.102.011
7	VR0023	25/10/2016	8.652.056.000.000	6,36967%	101.834.699.120
8	VR0024	25/02/2017	9.909.300.000.000	6,36967%	63.459.157.200
9	VR0025	25/09/2017	6.909.300.000.000	6,36967%	8.560.622.700
10	VR0026	25/01/2018	5.442.142.000.000	6,36967%	64.054.011.340
11	VR0027	25/07/2018	5.442.142.000.000	6,36967%	64.054.011.340
12	VR0028	25/08/2018	7.033.994.000.000	6,36967%	45.045.697.576
13	VR0029	25/08/2019	12.212.320.000.000	6,36967%	78.207.697.280
14	VR0030	25/12/2019	10.503.015.000.000	6,36967%	13.013.235.585
15	VR0031	25/07/2020	25.322.354.000.000	6,36967%	298.044.106.580
16	VR0032	25/04/2011	5.000.000.000.000	6,36967%	58.850.000.000
SU DAN SRBI			248.432.177.309.092		82.972.507.969
1	SU002	01/04/2025	19.420.583.064.850	0,10000%	4.895.051.074
2	SU004	01/12/2025	52.315.360.704.352	0,10000%	4.443.222.416
3	SU007	01/08/2025	49.998.285.712.461	0,10000%	20.958.185.518
4	SRBI01	01/08/2033	126.697.947.827.429	0,10000%	52.676.048.961
SBSN			38.499.850.000.000		559.492.461.220
1	IFR001	15/08/2033	2.714.700.000.000	11,80000%	120.996.893.700
2	IFR002	15/08/2018	1.985.000.000.000	11,95000%	89.596.945.000
3	IFR003	15/09/2015	2.632.000.000.000	9,25000%	72.635.304.000
4	IFR004	15/10/2013	550.000.000.000	9,00000%	10.607.300.000
5	IFR005	15/01/2017	561.000.000.000	9,00000%	23.324.136.000
6	IFR006	15/03/2030	2.175.000.000.000	10,25000%	66.511.500.000
7	IFR007	15/01/2025	1.257.000.000.000	10,25000%	59.520.207.000
8	IFR008	15/03/2020	252.000.000.000	8,80000%	6.616.008.000
10	SDHI2012A	03/03/2012	3.342.000.000.000	7,61000%	19.828.086.000
11	SDHI2013A	17/05/2013	4.250.000.000.000	7,55000%	12.937.000.000
12	SDHI2014A	09/08/2014	2.855.000.000.000	7,36000%	12.993.105.000

Utang Bunga/Imbalan (*Accrued Interest/Return*) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2010

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
13	SDHI2014B	25/08/2014	336.000.000.000	7,30000%	461.664.000
14	SDHI2014C	07/10/2014	2.000.000.000.000	7,13000%	9.584.000.000
12	SR-001	25/02/2012	5.556.290.000.000	12,00000%	12.546.102.820
13	SR-002	10/02/2013	8.033.860.000.000	8,70000%	41.334.209.700
INTERNATIONAL BOND			161.975.900.032.043		3.914.829.855.620
1	RI0014	10/03/2014	11.688.300.000.000	6,75000%	243.262.743.750
2	RI0015	20/04/2015	8.991.000.000.000	7,25000%	128.558.812.500
3	RI0016	15/01/2016	8.091.900.000.000	7,50000%	279.844.875.000
4	RI0017	09/03/2017	8.991.000.000.000	6,87500%	192.307.500.000
5	RI0018	17/01/2018	17.082.900.000.000	6,87500%	535.026.937.500
6	RI0035	12/10/2035	14.385.600.000.000	8,50000%	268.331.400.000
7	RI0037	17/02/2037	13.486.500.000.000	6,62500%	332.573.343.750
8	RI0038	17/01/2038	17.982.000.000.000	7,75000%	634.864.500.000
9	RI0320	13/03/2020	17.982.000.000.000	5,87500%	316.932.750.000
10	RI14-GMTN	04/05/2014	8.991.000.000.000	10,37500%	147.695.906.250
11	RI19-GMTN	04/03/2019	17.982.000.000.000	11,62500%	679.382.437.500
12	SNI14	23/04/2014	5.844.150.000.000	8,80000%	97.142.760.000
13	JPYSH1907	29/07/2019	3.860.150.032.043	2,73000%	44.494.662.703
14	JPYSB2010	12-Nov-20	6.617.400.000.000	1,60000%	14.411.226.667
TOTAL			1.002.154.691.341.130		17.691.274.010.065

** Kurs Tengah dollar BI pada tanggal pelaporan (31 Desember 2010) sebesar Rp8.991,-

** Kurs tengah JPY BI pada tanggal pelaporan (31 Desember 2010) sebesar Rp110.29

Surat Perbendaharaan Negara

dalam Rupiah

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
SPN			29.795.000.000.000		(559.990.965.000)	29.235.009.035.000
1	SPN20110113	13/01/2011	2.150.000.000.000	-	(4.903.420.000)	2.145.096.580.000
2	SPN20110210	10/02/2011	3.600.000.000.000	-	(26.132.486.000)	3.573.867.514.000
3	SPN20110303	03/03/2011	4.800.000.000.000	-	(52.657.475.000)	4.747.342.525.000
4	SPN20110407	07/04/2011	5.470.000.000.000	-	(92.820.422.000)	5.377.179.578.000
5	SPN20110505	05/05/2011	4.625.000.000.000	-	(100.227.472.000)	4.524.772.528.000
6	SPN20110609	09/06/2011	3.300.000.000.000	-	(88.099.524.000)	3.211.900.476.000
7	SPN20110707	07/07/2011	3.200.000.000.000	-	(97.417.420.000)	3.102.582.580.000
8	SPN20110811	11/08/2011	1.150.000.000.000	-	(38.759.385.000)	1.111.240.615.000
9	SPN20110929	29/09/2011	1.000.000.000.000	-	(40.547.039.000)	959.452.961.000
10	SPN20111110	10/11/2011	500.000.000.000	-	(18.426.322.000)	481.573.678.000
JUMLAH SUN JANGKA PENDEK			29.795.000.000.000		(559.990.965.000)	29.235.009.035.000

**PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2010**

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	290.014.900
4	005	MAHKAMAH AGUNG	-
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	-
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	10.681.239.117
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	49.633.994
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	-
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	-
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	45.840.000
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1.657.970.182
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	50.839.938
15	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	342.941.500
16	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	88.475.000
17	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	12.249.090
19	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	-
21	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	75.455.159.412
23	025	KEMENTERIAN AGAMA	2.962.989.081
25	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	474.281.346
27	027	KEMENTERIAN SOSIAL	-
28	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	-
29	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	-
30	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	924.648.291
31	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	52.500.000
32	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-
33	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	-
34	040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	38.333.333
35	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	-
36	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	-
37	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	12.000.000
38	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	7.530.870.448
39	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-
40	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	-
41	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-
42	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-
43	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-
44	054	BADAN PUSAT STATISTIK	-
45	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	-
46	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	14.515.577.014
47	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	15.000.000
48	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	46.533.667
49	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.417.354.316
50	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	30.940.000
51	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-
52	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-
53	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	-
54	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	-
55	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	-
56	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-
57	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI	-
58	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	-
59	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	93.108.000
60	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	2.500.000
61	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	-
62	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	6.875.000
63	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	-
64	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	-
65	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	-
66	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	466.190.000

**PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2010**

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010
67	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-
68	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	629.779.488
69	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-
70	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-
71	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	410.963.916
72	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	715.182.887
73	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	-
74	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	-
75	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-
76	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	-
77	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-
78	100	KOMISI YUDISIAL	9.798.000
79	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-
80	104	BNP2TKI	86.763.748
81	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-
82	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-
83	107	BADAN SAR	-
84	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-
JUMLAH			119.116.551.668

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Rupiah
Per 31 Desember 2010

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity	Principle	Rate	Unamortized	Book Value
		Date	Outstanding	(%)	Prem(+)/Disc(-)	
FIXED RATE BOND			377.152.742.000.000		(5.646.008.629.000)	371.506.733.371.000
1	FR0017	15/01/2012	7.533.263.000.000	13,15000%	8.947.737.000	7.542.210.737.000
2	FR0018	15/07/2012	5.430.062.000.000	13,17500%	-	5.430.062.000.000
3	FR0019	15/06/2013	11.456.341.000.000	14,25000%	-	11.456.341.000.000
4	FR0020	15/12/2013	10.222.951.000.000	14,27500%	-	10.222.951.000.000
5	FR0023	15/12/2012	14.799.143.000.000	11,00000%	(121.189.397.000)	14.677.953.603.000
6	FR0026	15/10/2014	13.522.535.000.000	11,00000%	(216.692.118.000)	13.305.842.882.000
7	FR0027	15/06/2015	19.989.000.000.000	9,50000%	111.881.307.000	20.100.881.307.000
8	FR0028	15/07/2017	14.221.766.000.000	10,00000%	319.277.924.000	14.541.043.924.000
9	FR0030	15/05/2016	11.440.000.000.000	10,75000%	(219.741.646.000)	11.220.258.354.000
10	FR0031	15/11/2020	17.899.000.000.000	11,00000%	(428.993.929.000)	17.470.006.071.000
11	FR0032	15/07/2018	1.434.000.000.000	15,00000%	(43.932.354.000)	1.390.067.646.000
12	FR0033	15/03/2013	9.400.474.000.000	12,50000%	(17.483.653.000)	9.382.990.347.000
13	FR0034	15/06/2021	16.756.400.000.000	12,80000%	227.261.443.000	16.983.661.443.000
14	FR0035	15/06/2022	11.023.750.000.000	12,90000%	(24.397.708.000)	10.999.352.292.000
15	FR0036	15/09/2019	10.735.500.000.000	11,50000%	(4.471.162.000)	10.731.028.838.000
16	FR0037	15/09/2026	2.450.000.000.000	12,00000%	(123.806.627.000)	2.326.193.373.000
17	FR0038	15/08/2018	2.920.757.000.000	11,60000%	(19.891.655.000)	2.900.865.345.000
18	FR0039	15/08/2023	4.175.000.000.000	11,75000%	(44.938.739.000)	4.130.061.261.000
19	FR0040	15/09/2025	26.474.000.000.000	11,00000%	1.308.921.479.000	27.782.921.479.000
20	FR0042	15/07/2027	14.774.100.000.000	10,25000%	(115.012.793.000)	14.659.087.207.000
21	FR0043	15/07/2022	14.417.000.000.000	10,25000%	(111.786.821.000)	14.305.213.179.000
22	FR0044	15/09/2024	18.014.000.000.000	10,00000%	(1.455.180.317.000)	16.558.819.683.000
23	FR0045	15/05/2037	6.400.000.000.000	9,75000%	(25.287.916.000)	6.374.712.084.000
24	FR0046	15/07/2023	16.855.000.000.000	9,50000%	(2.204.659.174.000)	14.650.340.826.000
25	FR0047	15/02/2028	20.840.000.000.000	10,00000%	(1.549.565.328.000)	19.290.434.672.000
26	FR0048	15/09/2018	5.675.970.000.000	9,00000%	(304.477.472.000)	5.371.492.528.000
27	FR0049	15/09/2013	4.786.607.000.000	9,00000%	(290.603.329.000)	4.496.003.671.000
28	FR0050	15/07/2038	15.686.000.000.000	10,50000%	(462.365.102.000)	15.223.634.898.000
29	FR0051	15/05/2014	2.376.123.000.000	11,25000%	(57.165.573.000)	2.318.957.427.000
30	FR0052	15/08/2030	23.500.000.000.000	10,50000%	(313.633.872.000)	23.186.366.128.000
31	FR0053	15/07/2021	6.372.000.000.000	8,25000%	137.415.643.000	6.509.415.643.000
32	FR0054	15/07/2031	7.722.000.000.000	9,50000%	304.250.997.000	8.026.250.997.000
33	FR0055	15/09/2016	4.100.000.000.000	7,37500%	51.502.468.000	4.151.502.468.000
34	FR0056	15/09/2026	3.750.000.000.000	8,37500%	39.809.058.000	3.789.809.058.000
ORI			31.741.370.000.000		-	31.741.370.000.000
1	ORI004	12/03/2012	12.855.765.000.000	9,50000%	-	12.855.765.000.000
2	ORI005	15/09/2013	2.678.875.000.000	11,45000%	-	2.678.875.000.000
3	ORI006	15/08/2012	8.206.730.000.000	9,35000%	-	8.206.730.000.000
4	ORI007	15/08/2013	8.000.000.000.000	7,95000%	-	8.000.000.000.000
ZERO COUPON			2.512.000.000.000		(373.721.119.000)	2.138.278.881.000
1	ZC0003	20/11/2012	1.249.000.000.000	-	(177.255.072.000)	1.071.744.928.000
2	ZC0005	20/02/2013	1.263.000.000.000	-	(196.466.047.000)	1.066.533.953.000

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Rupiah
Per 31 Desember 2010

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity	Principle	Rate	Unamortized	Book Value
		Date	Outstanding	(%)	Prem(+)/Disc(-)	
VARIABLE RATE BOND			136.763.416.000.000		-	136.763.416.000.000
1	VR0018	25/10/2012	4.368.483.000.000	6,63677%	-	4.368.483.000.000
2	VR0019	25/12/2014	13.856.226.000.000	6,63677%	-	13.856.226.000.000
3	VR0020	25/04/2015	9.899.007.000.000	6,63677%	-	9.899.007.000.000
4	VR0021	25/11/2015	7.546.328.000.000	6,63677%	-	7.546.328.000.000
5	VR0022	25/03/2016	9.666.749.000.000	6,63677%	-	9.666.749.000.000
6	VR0023	25/10/2016	8.652.056.000.000	6,63677%	-	8.652.056.000.000
7	VR0024	25/02/2017	9.909.300.000.000	6,63677%	-	9.909.300.000.000
8	VR0025	25/09/2017	6.909.300.000.000	6,63677%	-	6.909.300.000.000
9	VR0026	25/01/2018	5.442.142.000.000	6,63677%	-	5.442.142.000.000
10	VR0027	25/07/2018	5.442.142.000.000	6,63677%	-	5.442.142.000.000
11	VR0028	25/08/2018	7.033.994.000.000	6,63677%	-	7.033.994.000.000
12	VR0029	25/08/2019	12.212.320.000.000	6,63677%	-	12.212.320.000.000
13	VR0030	25/12/2019	10.503.015.000.000	6,63677%	-	10.503.015.000.000
14	VR0031	25/07/2020	25.322.354.000.000	6,63677%	-	25.322.354.000.000
SURAT UTANG PEMERINTAH			244.636.437.364.007		-	244.636.437.364.007
1	SU002	01/04/2025	18.781.775.893.847	0,10000%	-	18.781.775.893.847
2	SU004	01/12/2025	50.701.147.130.899	0,10000%	-	50.701.147.130.899
3	SU007	01/08/2025	48.455.566.511.832	0,10000%	-	48.455.566.511.832
4	SRBI01	01/08/2033	126.697.947.827.429	0,10000%	-	126.697.947.827.429
Total SUN Jangka Panjang (a)			792.805.965.364.007		(6.019.729.748.000)	786.786.235.616.007
SBSN			38.499.850.000.000		55.583.479.000	38.555.433.479.000
1	IFR0001	15/08/2015	2.714.700.000.000	11,80000%	-	2.714.700.000.000
2	IFR0002	15/08/2018	1.985.000.000.000	11,95000%	-	1.985.000.000.000
3	IFR0003	15/09/2015	2.632.000.000.000	9,25000%	54.647.601.000	2.686.647.601.000
4	IFR0004	15/10/2013	550.000.000.000	9,00000%	(5.194.635.000)	544.805.365.000
5	IFR0005	15/01/2017	561.000.000.000	9,00000%	10.881.654.000	571.881.654.000
6	IFR0006	15/03/2030	2.175.000.000.000	10,25000%	15.792.572.000	2.190.792.572.000
7	IFR0007	15/01/2025	1.257.000.000.000	10,25000%	(20.242.372.000)	1.236.757.628.000
8	IFR0008	15/03/2020	252.000.000.000	8,80000%	(301.341.000)	251.698.659.000
9	SDHI2012A	03/03/2012	3.342.000.000.000	7,61000%	-	3.342.000.000.000
10	SDHI2013A	17/05/2013	4.250.000.000.000	7,55000%	-	4.250.000.000.000
11	SDHI2014A	09/08/2014	2.855.000.000.000	7,36000%	-	2.855.000.000.000
12	SDHI2014B	25/08/2014	336.000.000.000	7,30000%	-	336.000.000.000
13	SDHI2014C	07/10/2014	2.000.000.000.000	7,13000%	-	2.000.000.000.000
14	SR-001	25/02/2012	5.556.290.000.000	12,00000%	-	5.556.290.000.000
15	SR-002	10/02/2013	8.033.860.000.000	8,70000%	-	8.033.860.000.000
Total SBSN Jangka Panjang (b)			38.499.850.000.000		55.583.479.000	38.555.433.479.000
TOTAL SBN Jangka Panjang (a + b)			831.305.815.364.007		(5.964.146.269.000)	825.341.669.095.007

**Surat Berharga Negara Jangka Panjang Luar Negeri (Valas)
Per 31 Desember 2010**

(Dalam Rp)

No.	Seri	Maturity	Issued Principle	Rate	Accrued	Indexed Principle	Unamortized	BookValue
		Date	Outstanding	(%)	Indexation	Outstanding	Prem(+)/Disc(-)	
SUN VALAS (USD)			Rp159.582.479.019.000		(13.928.279.019.000)	Rp145.654.200.000.000	(144.607.159.000)	145.509.592.841.000
1	RI0014	10/03/2014	Rp11.330.165.221.750	6,75000%	358.134.778.250	Rp11.688.300.000.000	(16.402.006.000)	11.671.897.994.000
2	RI0015	20/04/2015	Rp9.613.000.000.000	7,25000%	(622.000.000.000)	Rp8.991.000.000.000	(33.558.190.000)	8.957.441.810.000
3	RI0016	15/01/2016	Rp9.099.000.000.000	7,50000%	(1.007.100.000.000)	Rp8.091.900.000.000	(34.211.965.000)	8.057.688.035.000
4	RI0017	09/03/2017	Rp9.370.000.000.000	6,87500%	(379.000.000.000)	Rp8.991.000.000.000	(46.339.599.000)	8.944.660.401.000
5	RI0018	17/01/2018	Rp17.804.549.364.750	6,87500%	(721.649.364.750)	Rp17.082.900.000.000	(203.640.830.000)	16.879.259.170.000
6	RI0035	12/10/2035	Rp15.436.000.000.000	8,50000%	(1.050.400.000.000)	Rp14.385.600.000.000	942.522.405.000	15.328.122.405.000
7	RI0037	17/02/2037	Rp13.575.648.587.500	6,62500%	(89.148.587.500)	Rp13.486.500.000.000	(189.020.244.000)	13.297.479.756.000
8	RI0038	17/01/2038	Rp18.729.115.845.000	7,75000%	(747.115.845.000)	Rp17.982.000.000.000	(379.265.230.000)	17.602.734.770.000
9	RI0320	13/03/2020	Rp18.550.000.000.000	5,87500%	(568.000.000.000)	Rp17.982.000.000.000	-	17.982.000.000.000
10	RI 140504	04/05/2014	Rp12.025.000.000.000	10,37500%	(3.034.000.000.000)	Rp8.991.000.000.000	(42.371.079.000)	8.948.628.921.000
11	RI 190304	04/03/2019	Rp24.050.000.000.000	11,62500%	(6.068.000.000.000)	Rp17.982.000.000.000	(142.320.421.000)	17.839.679.579.000
SBSN VALAS (USD)			7.031.748.227.903		(1.187.598.227.903)	Rp5.844.150.000.000	-	5.844.150.000.000
12	SNI14	23/04/2014	Rp7.031.748.227.903	8,80000%	(1.187.598.227.903)	Rp5.844.150.000.000	-	5.844.150.000.000
SUN VALAS (JPY)			10.186.100.000.000		291.450.000.000	10.477.550.000.000	-	10.477.550.000.000
13	RIJPY0719	29/07/2019	Rp3.695.300.000.000	2,73000%	164.850.000.000	Rp3.860.150.000.000	-	3.860.150.000.000
14	RIJPY1120	20/11/2020	Rp6.490.800.000.000	1,60000%	126.600.000.000	Rp6.617.400.000.000	-	6.617.400.000.000
Jumlah SBSN Valas			7.031.748.227.903		(1.187.598.227.903)	5.844.150.000.000	-	5.844.150.000.000
Jumlah SUN Valas			169.768.579.019.000		(13.636.829.019.000)	156.131.750.000.000	(144.607.159.000)	155.987.142.841.000
TOTAL			176.800.327.246.903		(14.824.427.246.903)	161.975.900.000.000	(144.607.159.000)	161.831.292.841.000

* Kurs Tengah BI JPY pada tanggal pelaporan (31 Desember 2010) adalah

Rp110.29

* Kurs Tengah BI USD pada tanggal pelaporan (31 Des 2010) adalah

Rp8.991

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN TAHUN 2010
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

(Rp. Juta)																		
NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPKEU	KESIHATAN	PENDAPATAN USAHA	HPP - BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIH - LAIH	BEBAN LAIH - LAIH	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM HAK MINORITAS	HAK MINORITAS	LABA RUGI BERSIH
					1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = (10-11)	13	14 = (12-13)
1	Perkebunan	PT Perkebunan Nusantara I	LK Audited 2010		608.279	567.256	41.023	5.775	21.019	25.779	-	25.779	5.682	20.117	-	20.117	-	20.117
2		PT Perkebunan Nusantara II	LK Audited 2010		1.440.379	1.244.888	195.491	36.169	221.437	10.213	-	10.213	(3.807)	14.020	(5.048)	19.066	-	19.066
1		PT Perkebunan Nusantara III	LK Audited 2010		5.623.839	4.248.946	1.374.893	53.601	1.614	1.426.880	60.052	1.366.828	352.925	1.013.903	-	1.013.903	(447)	1.014.349
3		PT Perkebunan Nusantara IV	LK Audited 2010		5.442.078	4.182.809	1.259.269	85.589	80.950	1.263.908	163.297	1.100.611	307.272	793.339	-	793.339	2.980	790.359
4		PT Perkebunan Nusantara V	LK Audited 2010		4.103.185	3.656.089	447.095	10.417	19.031	438.481	81.133	357.349	96.309	261.041	-	261.041	-	261.041
5		PT Perkebunan Nusantara VI	LK Audited 2010		2.043.505	1.790.283	253.222	3.475	40.087	216.610	-	216.610	55.146	161.465	-	161.465	132	161.333
6		PT Perkebunan Nusantara VII	LK Audited 2010		3.832.934	3.342.365	490.569	41.013	186.586	344.996	-	344.996	91.752	253.244	-	253.244	-	253.244
7		PT Perkebunan Nusantara VIII	LK Audited 2010		1.949.944	1.457.891	3.792.535	51.280	353.181	(312.859)	10.503	(224.809)	47.209	(63.060)	-	(153.932)	(489)	(63.289)
8		PT Perkebunan Nusantara IX	LK Audited 2010		1.798.418,72	1.499.789,37	298.649,35	55.882,70	128.748,19	225.783,86	64.405,78	161.378,08	41.824,28	119.553,82	-	119.553,82	(37.564,20)	157.118,02
9		PT Perkebunan Nusantara X	LK Audited 2010		2.367.246,34	2.117.825,80	249.420,54	59.235,10	69.361,97	239.293,67	51.071,63	188.222,04	52.133,65	136.088,39	-	136.088,39	306,34	135.782,05
10		PT Perkebunan Nusantara XI	LK Audited 2010		2.423.450,97	2.329.228,88	94.222,09	59.239,11	51.068,75	102.392,44	30.849,00	71.543,44	31.085,67	40.457,77	-	40.457,77	-	40.457,77
11		PT Perkebunan Nusantara XII	LK Audited 2010		795.827,92	656.994,87	138.833,05	157.054,23	131.520,83	164.366,45	29.886,13	134.488,32	33.504,12	100.994,20	-	100.994,20	-	100.994,20
12		PT Perkebunan Nusantara XIII	LK Audited 2010		3.359.177	3.046.590	28.056	127.967	154.992	3.845	29.066	(3.123)	75.698	(3.189)	-	(3.156)	-	(3.156)
13		PT Perkebunan Nusantara XIV	LK Audited 2010		400.636	420.520	(106.703)	2.805	8.709	60.238	30.228	70.217	-	34.936	-	50.201	-	50.201
14	PT Rajawali Nusantara Indonesia	LK Audited 2010		4.417.851,73	4.105.193,23	312.658,51	(87.853,92)	-	224.804,59	-	224.804,59	70.872,46	153.932,13	-	153.932,13	45.321,68	108.610,45	
15	Kehutanan	Perum Perhutani	LK Audited 2010		2.787.176	2.529.038	258.138	89.701	22.392	325.447	-	325.447	49.688	275.759	-	275.759	8	275.751
16		PT Industri I	LK Audited 2010		170.722	185.542	(14.819)	31.838	12.131	4.887	-	4.887	1.177	3.710	-	3.710	-	3.710
17		PT Industri II	LK Audited 2010		46.246	54.181	2.417.414	15.773	3.875	(78.588)	-	(11.216)	(584)	(27.919)	533	(41.114)	-	(41.114)
18		PT Industri III	LK Audited 2010		11.202	18.815	(7.613)	24.526	4.330	12.584	136	12.448	2.874	9.574	-	9.574	-	9.574
19		PT Industri IV	LK Audited 2010		24.344	26.200	(1.856)	5.973	994	3.123	-	3.123	(33)	3.156	-	3.156	-	3.156
20		PT Industri V	LK Audited 2010		18.478	18.197	124.900	5.880	255	(54.104)	4.750	(65.467)	-	(34.936)	-	(50.201)	-	(50.201)
21		PT Perikanan Nusantara	Unaudited 2010		67.739	75.860	(8.121)	10.931	1.045	1.785	822	943	-	943	-	943	-	943
22		Perum PPS	LK Audited 2010		119.430	116.578	2.853	-	435	2.417	-	2.417	(222)	2.639	-	2.639	-	2.639
23		Perum Bulog	LK Audited 2010		20.724.977	19.144.953	1.580.014	927.878	795.613	1.712.079	853.628	858.451	(28.259)	886.749	-	886.749	-	886.749
24		PT Sang Hyang Seri	LK Audited 2010		2.803.529	2.510.471	83.058	11.579	7.235	97.402	43.083	54.309	13.195	41.114	-	41.114	-	41.114
25	PT Pantari	LK Audited 2010		2.466.254	2.370.600	95.653	12.842	55.800	52.496	-	52.496	11.553	40.942	-	40.942	-	40.942	
26	Pupuk	PT Puri	Unaudited 2010		33.383.280	28.927.279	4.436.001	994.463	689.326	4.761.138	788.149	3.972.989	689.230	3.312.759	165.552	3.147.207	8.422	3.138.785
27		Jasa Pengairan	LK Audited 2010		261.095	192.998	68.097	4.369	6.997	55.467	-	55.467	15.266	50.201	-	50.201	-	50.201
28	Pertambangan	Perum Jasa Tirta II	LK Audited 2010		402.481	269.309	133.172	19.549	73.381	79.340	-	79.340	16.116	63.224	2.450	60.773	-	60.773
29		PT Antam Tbk	LK Audited 2010		8.744.300	6.797.764	1.946.536	463.236	124.497	2.285.275	12.852	2.272.624	597.699	1.674.924	-	1.674.924	(8.476)	1.683.400
30		PT Timah Tbk	LK Audited 2010		8.339.254	7.028.474	1.310.780	20.728	188.572	1.142.936	15.809	1.127.327	179.369	947.958	-	947.958	22	947.936
31		PT Bukit Asam Tbk	LK Audited 2010		7.909.154	5.604.996	2.304.158	358.063	62.571	2.599.650	-	2.599.650	600.713	1.998.937	-	1.998.937	(9.954)	2.008.891
32		PT Sarana Karya	Unaudited 2010		7.236	11.286	(478.737)	2.035	1.504	(14.203)	-	24.535	-	4.404	-	4.135	-	4.135
33	Energi	PT Pertamina	LK Audited 2010		438.011.566	410.230.509	1.489.677	5.188.835	3.048.275	58.405	-	(8.964)	13.122.098	16.067	-	(6.778)	3.965	7.958
34		PT PGN Tbk	LK Audited 2010		19.785.716	10.729.992	9.035.725	331.010	931.830	8.434.805	371.832	8.063.174	1.599.774	6.463.400	-	6.463.400	224.038	6.239.361
35		PT Energy Management Indonesia	Unaudited 2010		33.413	29.117	4.296	16	556	3.756	1.979	1.777	-	1.777	-	1.777	-	1.777
36		PT Batan Tek	LK Audited 2010		27.284	26.809	475	1.550	1.124	902	0	902	87	815	-	815	-	815
37	Industri semen	PT Semen Gresik Tbk	LK Audited 2010		14.344.189	9.855.164	4.489.025	282.067	2.367	4.748.725	26.102	4.722.623	1.063.509	3.659.114	-	3.659.114	25.894	3.633.220
38		PT Semen Baturaja	LK Audited 2010		885.740	600.663	285.078	14.701	175	299.604	3.417	296.188	75.940	220.248	-	220.248	-	220.248
39		PT Semen Kupang	Prognosa 2010		3.237	4.137	482.874	969	-	15.172	25.558	823	-	(4.135)	-	(4.135)	-	(4.135)
40	Industri Pertahanan	PT Dirgantara Indonesia	Unaudited 2010		1.278.133	1.335.223	(154.454)	20.648	96.218	58.461	-	9.964	(5.863)	(21.730)	-	6.778	1.180	(6.778)
41		PT PAL Indonesia	LK Audited 2010		450.701	664.087	(213.386)	181.566	95.141	(126.980)	40.274	(167.234)	(40.670)	(126.564)	70.953	(197.517)	2	(197.519)
42		PT Pindad	LK Audited 2010		1.105.834	1.057.248	48.586	29.864	6.886	71.364	25.354	46.010	11.789	34.221	-	34.221	-	34.221
43		PT Dahana	LK Audited 2010		480.275	425.329	64.946	12.756	-	77.702	3.465	74.237	14.790	59.448	-	59.448	-	59.448
44	Ind. Baja, Manufaktur, & Rekayasa Rnc Bangun	PT Krakatau Steel Tbk	LK Audited 2010		14.856.156	13.863.227	992.929	649.777	-	1.642.706	255.558	1.387.148	326.281	1.060.867	-	1.060.867	(1.816)	1.062.683
45		PT INKA	LK Audited 2010		630.836	568.523	62.313	3.981	4.661	61.633	21.280	40.353	11.064	29.289	-	29.289	-	29.289
46		PT Barata Indonesia	LK Audited 2010		524.946	503.910	21.036	18.104	8.557	4.680	3.867	(268)	4.135	-	4.135	-	4.135	
47		PT Boma Bisma Indra	LK Audited 2010		115.996	117.544	271.998	4.240	2.377	(51.844)	5.854	(4.110)	(606)	21.124	-	(6.778)	-	(6.778)
48	Industri Dok dan Perkapalan	PT Dok dan Kodja Bahari	LK Audited 2010		507.096	508.143	(1.047)	17.991	-	16.944	-	16.944	(333)	17.277	-	17.277	-	17.277
49		PT Dok dan Perkapalan Surabaya	LK Audited 2010		344.659	327.074	17.586	21.140	17.699	21.027	-	21.027	7.295	13.733	-	13.733	543	13.190
50		PT Industri Kapal Indonesia	Prognosa 2010		54.938	54.480	458	180	-	638	1.450	(812)	-	(812)	-	(812)	-	(812)
51	Aneka Industri	PT Industri Sandang Nusantara	Unaudited 2010		75.045	133.888	(58.843)	4.754	101.522	(155.611)	-	(155.611)	4.340	(159.951)	-	(159.951)	-	(159.951)
52		PT Garam	LK Audited 2010		114.585	164.699	(50.114)	9.468	3.714	(44.360)	3.619	(47.979)	(111)	(47.868)	-	(47.868)	-	(47.868)
53		PT Prinsisma	LK Audited 2010		110.746	109.782	963	2.794	2.887	871	-	871	-	871	-	871	-	871
54		PT Iglas	Unaudited 2010		164.700	163.647	(89.351)	-	-	51.844	2.177	6.287	4.243	(16.881)	-	6.778	-	6.778
55		PT Industri Soda Indonesia (dalam Likuidasi)	Audited 2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</			

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPKEU	KESIHATAN	PENDAPATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM HAK MINORITAS	HAK MINORITAS	LABA RUGI BERSIH
					1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = (10-11)	13	14 = (12-13)
60		PT Kertas Lece	LK Audited 2010		341.163	415.281	18.929	11.237	37.950	(43.901)	8.364	(19.323)	(26.659)	(16.301)	-	(28.110)	-	(26.895)
61		PT Kertas Kraft Aceh	LK Audited 2010		5.063	39.490	127.841	8.916	40.826	(2.102)	-	(7.269)	-	(6.287)	-	(6.778)	-	(6.778)
62	Industri Farmasi	PT Indofarma Tbk	LK Audited 2010		1.047.918	991.470	56.448	2.524	38.563	20.409	-	20.409	7.862	12.547	-	12.547	0	12.547
63		PT Kimia Farma Tbk	LK Audited 2010		3.183.829	3.037.631	146.198	46.749	-	192.948	14.337	178.611	39.895	138.716	-	138.716	0	138.716
64		PT Bio Farma	LK Audited 2010		1.210.263	864.227	346.035	35.783	50.255	331.563	0	331.563	85.890	245.673	0	245.673	-	245.673
65	Telekomunikasi dan Media	PT Telkom Tbk	LK Audited 2010		68.629.181	46.138.061	22.491.120	866.888	13.622	23.344.386	1.928.035	21.416.351	5.546.039	15.870.312	-	15.870.312	4.333.313	11.536.999
66		PT INTI	Unaudited 2010		647.815	616.770	31.045	16.791	24.845	23.191	1.872	21.320	16.557	4.763	-	4.763	177	4.586
67		PT LEN Industri	LK Audited 2010		135.084	77.007	58.077	9.525	7.088	60.514	20.596	39.919	11.809	28.110	0	28.110	608	27.502
68		Perum LKBN Antara	LK Audited 2010		135.538	131.690	3.849	4.294	874	7.269	0	7.269	491	6.778	0	6.778	-	6.778
69		Perum Produksi Film Negara	Unaudited 2010		6.289	6.950	629.691	288	485	(1.011.376)	-	(1.379.590)	-	(691.624)	-	(1.035.607)	-	(1.035.607)
70	Listrik	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	LK Audited 2010		162.375.294	149.108.071	13.267.223	4.143.533	-	17.410.756	6.010.896	11.399.860	1.313.174	10.086.686	-	10.086.686	-	10.086.686
71		PT Pelabuhan Indonesia I	LK Audited 2010		988.429	756.262	232.167	28.733	66.810	194.090	-	194.090	55.463	138.628	-	138.628	-	138.628
72		PT Pelabuhan Indonesia II	LK Audited 2010		3.013.312	1.988.505	988.978	607.291	157.915	(95.260)	-	(95.260)	203.949	(27.080)	-	(27.080)	14.057	(62.389)
73		PT Pelabuhan Indonesia III	LK Audited 2010		2.859.237	1.851.009	1.008.228	133.096	93.299	1.048.026	1.457	1.046.568	267.156	779.413	-	779.413	213.370	566.043
74		PT Pelabuhan Indonesia IV	LK Audited 2010		889.141	557.985	331.156	34.730	34.916	330.970	-	330.970	86.137	244.833	-	244.833	-	244.833
75	Bandar Udara	PT ANGKASA PURA I	LK Audited 2010		2.234.133	1.697.079	537.054	239.702	217.053	559.703	-	559.703	115.998	443.714	-	443.714	-	443.714
76		PT ANGKASA PURA II	LK Audited 2010		3.106.370	1.868.030	1.238.340	254.731	113.482	1.379.580	343.983	1.379.580	343.983	1.035.607	-	1.035.607	-	1.035.607
77		Angkutan Darat, Udara dan Laut	PT Kereta Api Indonesia	LK Audited 2010		5.191.554	5.065.518	126.035	156.762	-	282.798	-	282.798	66.698	216.099	-	216.099	237
78		PERUM PPD	Unaudited 2010		98.558	98.472	86	5.504	2.130	3.460	-	3.460	-	3.460	-	3.460	-	3.460
79		PERUM DAMRI	LK Audited 2010		583.526	579.103	(409.874)	13.967	982	110.210	-	40.717	15.596	42.676	-	42.676	-	62.389
80		PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES	Unaudited 2010		1.783.639	1.783.395	244	159.413	344.016	(184.359)	8.333	(192.692)	-	(192.692)	-	(192.692)	-	(192.692)
81		PT GARUDA INDONESIA	LK Audited 2010		19.534.331	19.601.491	(67.159)	422.725	279.721	75.845	-	75.845	(217.262)	293.107	(225.044)	518.151	2.629	515.522
82		PT PELNI	LK Audited 2010		2.037.014	2.275.962	(238.977)	84.516	0	(154.462)	0	(154.462)	42.155	(196.617)	0	(196.617)	52	(196.669)
83		PT ANGKUTAN SUNGAI DANAU PENYEBERANG	Unaudited 2010		921.660	866.577	53.083	33.475	6.757	79.801	-	79.801	6.412	73.389	-	73.389	-	73.389
84		PT Djakarta Lloyd	Progress 2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85		Pelayaran Bahitera Adiguna	LK Audited 2009		125.006	123.663	5.107.857	-	6.599	(294.814)	-	(463.715)	1.928	(149.156)	-	(311.241)	1	(258.603)
86	Konstruksi	PT Amarta Karya	LK Audited 2010		194.112	186.019	595.894	1.900	904	(107.406)	584	(40.134)	5.124	(37.552)	-	(62.478)	-	(62.389)
87		PT Adhi Karya Tbk	LK Audited 2010		5.733.459	5.182.624	560.834	13.327	136.029	428.133	107.312	320.820	130.627	190.194	-	190.194	710	189.484
88		PT Istaka Karya	Unaudited 2010		406.225	384.444	21.781	6.076	295	27.562	20.131	7.431	5.430	2.001	-	2.001	-	2.001
89		PT Pembangunan Perumahan Tbk	LK Audited 2010		4.497.856	4.105.661	392.194	-	65.528	326.686	-	326.686	125.018	201.648	-	201.648	-	201.648
90		PT Nindya Karya	LK Audited 2010		1.182.171	1.069.005	113.165	(6.076)	85.440	21.649	-	21.649	28.071	(6.421)	-	(6.421)	(0)	(6.421)
91		PT Hutama Karya	LK Audited 2010		2.574.609	2.444.846	129.763	7.207	233.563	57.415	-	176.148	68.415	106.733	-	106.733	2	106.731
92		PT Wijaya Karya Tbk	LK Audited 2010		6.063.080	5.585.469	477.611	96.725	91.398	482.937	9.611	473.326	162.085	311.241	-	311.241	26.319	284.922
93			Perum Perumnas	Unaudited 2010		858.868	727.381	131.487	15.220	12.041	134.666	47.266	24.924	62.476	-	62.476	44	62.433
94			PT Brantas Abipraya	LK Audited 2010		532.629	477.279	55.350	11.082	9.359	57.083	30.743	26.340	9.351	16.989	-	16.989	-
95	Konsultan Konstruksi	PT Bina Karya	Unaudited 2010		41.399	40.315	1.084	8.600	3.888	1.171	1.171	4.625	751	3.874	-	3.874	-	3.874
96		PT Indah Karya	LK Audited 2010		21.279	20.328	7.056	620	502	(2.682)	689	(3.094)	229	(1.577)	-	(2.490)	-	(2.490)
97		PT Yodya Karya	LK Audited 2010		102.709	91.128	(3.756.340)	4.589	213.368	167.553	1.846	205.247	4.046	204.544	-	204.544	-	204.442
98		PT Indra Karya	Unaudited 2010		81.265	75.355	5.911	1.266	1.304	5.873	1.073	4.799	2.631	2.168	-	2.168	-	2.168
99		PT Virama Karya	Unaudited 2010		64.140	58.045	6.094	11	1.648	4.458	2.890	1.578	1.340	237	-	237	-	237
100	Kawasan	PT Kawasan Berikat Nusantara	LK Audited 2010		208.233	176.096	17.053.369	23.798	6.704	(13.734.386)	-	(13.972.162)	14.775	(4.786.290)	-	(9.389.226)	-	(9.871.062)
101		PT Kawasan Industri Makassar	Unaudited 2010		15.394	12.048	3.346	3.883	-	7.229	-	7.229	1.807	5.422	-	5.422	-	5.422
102		PT Kawasan Industri Medan	LK Audited 2010		38.375	14.659	14.880.414	1.746	266	(5.461.902)	-	(5.485.460)	2.727	(2.720.936)	-	(4.103.198)	-	(4.106.182)
103		PT Kawasan Industri Wijayakusuma	LK Audited 2010		12.519	9.788	2.731	1.007	25	3.713	310	3.403	913	2.490	-	2.490	-	2.490
104		PT PDIP Batam	LK Audited 2010		84.809	78.737	3.835.077	2.639	2.488	(162.426)	-	(205.247)	794	(203.750)	-	(204.498)	-	(204.442)
105	Pergudangan	PT Varuna Tirta Prakarya	LK Audited 2010		203.950	199.141	4.809	374	4.806	377	-	377	(67)	444	-	444	-	444
106		PT Bhandia Ghara Raksa	LK Audited 2010		422.856	376.174	46.682	2.364	3.691	45.354	-	45.354	16.023	29.332	-	29.332	-	29.332
107		PT Bank Mandiri Tbk	LK Audited 2010		44.537.409	30.795.389	13.742.020	233.959	3.817	13.972.162	-	13.972.162	4.602.936	9.369.226	-	9.369.226	(150.928)	9.520.154
108	Perbankan	PT Bank BRI Tbk	LK Audited 2010		38.441.451	24.039.450	14.402.001	506.229	-	14.908.230	-	14.908.230	3.435.845	11.472.385	-	11.472.385	-	11.472.385
109		PT Bank BNI Tbk	LK Audited 2010		25.898.450	20.389.432	5.508.018	-	23.558	5.485.460	-	5.485.460	1.382.262	4.103.198	-	4.103.198	(1.492)	4.104.690
110		PT Bank BTN Tbk	LK Audited 2010		7.001.920	5.738.203	1.263.717	-	13.495	1.250.222	-	1.250.222	334.284	915.938	-	915.938	-	915.938
111		PT JIWA SRAJA	LK Audited 2010		4.174.098	4.004.587	169.511	39.279	3.543	205.247	-	205.247	748	204.499	-	204.499	28	204.470
112	Asuransi	PT ASABRI	LK Audited 2010		1.312.684	1.070.017	242.667	3.895	-	246.562	-	246.562	433	246.128	-	246.128	-	246.128
113		PT JAMSOSTEK	LK Audited 2010		11.388.017	1.299.390	10.088.627	18.096	8.370.617	1.736.107	-	1.736.107	203.816	1.532.291	-	1.532.291	0	1.532.291
114		PT TASPEN	LK Audited 2010		11.605.500	8.629.798	2.975.702	-	2.392.984	582.718								

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPKEU	KESIHATAN	PENDAPATAN USAHA	HPP- BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN- LAIN	BEBAN LAIN- LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM HAK MINORITAS	HAK MINORITAS	LABA RUGI BERSIH
					1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = (10-11)	13	14 = (12-13)
123		PT Danareksa	LK Audited 2010		484.057	238.338	245.719	12.235	3.097	254.856	161.046	93.811	34.923	58.888	-	58.888	2	58.886
124		PT Permodalan Nasional Madani	LK Audited 2010		479.530	454.066	25.464	14.765	365	39.864	-	39.864	18.925	20.939	-	20.939	264	20.675
125		Perum Pegadaian	LK Audited 2010		5.378.293	3.827.785	1.550.508	68.123	1.904	1.616.727	-	1.616.727	436.938	1.179.788	-	1.179.788	-	1.179.788
126		PT PANIN Multi Finance	LK Audited 2010		290.866	184.343	106.523	197.196	10.347	293.372	-	293.372	(563)	293.935	-	293.935	-	293.935
127		PT Bahana PUI	LK Audited 2010		603.706	360.953	242.753	7.303	3.586	246.470	60.518	185.952	48.282	137.670	-	137.670	35.765	101.904
128	Perdagangan	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	LK Audited 2010		2.023.547	1.972.489	51.058	-	22.104	28.954	-	28.954	7.322	21.632	-	21.632	166	21.464
129		PT Sarinah	LK Audited 2010		355.450	349.992	5.458	13.854	8.290	11.022	-	11.022	1.942	9.080	-	9.080	2	9.078
130	Sertifikasi	PT Surveyor Indonesia	LK Audited 2010		528.892	471.581	57.311	15.605	12.488	60.428	-	60.428	19.227	41.201	-	41.201	-	41.201
131		PT Sucofindo	LK Audited 2010		1.202.022	1.111.677	90.345	-	19.465	70.980	8.479	62.401	21.713	40.688	354	40.333	146	40.187
132		PT BKI	LK Audited 2010		282.226	234.517	47.709	2.104	1.353	46.460	-	46.460	12.236	36.224	-	36.224	-	36.224
133	Perhotelan dan Pariwisata	PT Hotel Indonesia Natour	LK Audited 2010		300.262	275.678	24.584	17.544	8.524	33.604	-	33.604	5.861	27.744	-	27.744	-	27.744
134		PT TWC PBR	LK Audited 2010		103.136	84.647	18.489	2.246	3.430	17.304	-	17.304	4.478	12.826	-	12.826	-	12.826
135		PT Pengembangan Pariwisata Bali	LK Audited 2010		74.895	45.812	29.073	18.165	8.817	38.421	-	38.421	(105)	38.526	-	38.526	-	38.526
136	Lain-lain	PT Bertikari	Unaudited 2010		693.115	654.165	38.949	7.561	7.089	39.421	6.671	32.751	8.618	24.133	5.000	19.133	-	19.133
137		PT Jasa Marga Tbk	LK Audited 2010		4.378.584	2.390.392	1.988.192	252.002	-	2.240.194	763.845	1.476.349	291.854	1.184.496	-	1.184.496	(8.991)	1.193.487
138		PT Pengerukan Indonesia	LK Audited 2010		183.293	159.553	28.330	6.968	17.389	17.929	5.090	12.840	2.272	10.568	-	10.568	-	10.568
139		PT Pos Indonesia	LK Audited 2010		2.562.882	2.530.411	32.470	123.371	110.171	45.670	-	45.670	326	45.344	-	45.344	(155)	45.499
140		PT Klining Berjangka Indonesia	LK Audited 2010		39.681	23.399	16.282	23.918	383	39.797	-	39.797	5.340	34.457	-	34.457	-	34.457
141		PT Survey Udara Panas	Unaudited 2010		500	2.198	-	-	19	468	-	-	647	-	-	-	-	-
GRAND TOTAL					1.114.470.119	955.472.985	42.955.960	21.595.999	21.518.021	159.282.226	12.358.239	146.922.987	39.769.800	107.161.673	(22.147)	107.110.020	4.733.122	102.376.732

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN TAHUN 2010

AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
				2	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12+13)	15	16=(14*15)
1	Perkebunan	PT Perkebunan Nusantara I	LK Audited 2010	489.479	60.329	661.058	374.126	235.450	609.576	-	120.000	-	-	-	(68.517)	51.483	100%	51.483
2		PT Perkebunan Nusantara II	LK Audited 2010	1.173.224	483.863	2.137.176	1.481.147	1.960.700	327.606	-	327.606	-	-	-	(151.130)	176.476	100%	176.476
3		PT Perkebunan Nusantara III	LK Audited 2010	5.461.419	43.331	7.241.415	1.407.889	2.251.023	3.658.912	6.392	315.000	-	-	(22.895)	3.284.007	3.576.112	100%	3.576.112
4		PT Perkebunan Nusantara IV	LK Audited 2010	4.961.452	324.760	6.777.521	1.234.738	2.240.592	3.475.330	10.137	975.000	235	-	-	2.316.817	3.292.053	100%	3.292.053
5		PT Perkebunan Nusantara V	LK Audited 2010	2.315.782	217.808	3.306.305	969.468	867.303	1.836.771	-	820.000	-	-	-	649.534	1.469.534	100%	1.469.534
6		PT Perkebunan Nusantara VI	LK Audited 2010	1.015.651	-	1.411.985	391.397	291.439	682.836	876	200.000	-	-	-	528.272	728.272	100%	728.272
7		PT Perkebunan Nusantara VII	LK Audited 2010	3.144.079	-	4.857.962	1.136.228	2.249.926	3.386.154	-	365.000	-	-	19.092	1.087.717	1.471.809	100%	1.471.809
8		PT Perkebunan Nusantara VIII	LK Audited 2010	1.458.696	94.076	2.199.800	713.146	528.779	1.241.925	8.495	270.000	-	-	363	679.018	949.381	100%	949.381
9		PT Perkebunan Nusantara IX	LK Audited 2010	941.965	41.092	1.830.941	1.186.892	120.005	1.306.898	37.564	165.000	-	-	-	321.479	486.479	100%	486.479
10		PT Perkebunan Nusantara X	LK Audited 2010	641.689	97.992	2.098.344	379.900	745.471	1.125.370	2.001	250.000	-	-	10.062	710.912	970.974	100%	970.974
11		PT Perkebunan Nusantara XI	LK Audited 2010	774.951	72.747	1.515.543	511.688	528.437	1.040.125	-	165.000	-	-	-	310.418	475.418	100%	475.418
12		PT Perkebunan Nusantara XII	LK Audited 2010	853.874	77.345	1.180.931	324.375	249.549	573.924	-	200.000	-	-	-	407.007	607.007	100%	607.007
13		PT Perkebunan Nusantara XIII	LK Audited 2010	2.002.580	227.359	2.848.163	863.701	797.462	1.661.163	27.532	460.000	-	-	-	699.468	1.159.468	100%	1.159.468
14		PT Perkebunan Nusantara XIV	LK Audited 2010	567.997	11.668	839.387	676.530	438.455	1.114.985	-	235.000	-	-	30.591	(541.189)	(275.598)	100%	(275.598)
15		PT Rajawali Nusantara Indonesia	LK Audited 2010	1.622.008	831.770	5.091.054	1.828.913	2.388.643	4.217.556	224.222	352.425	-	-	-	298.850	649.275	100%	649.275
16	Kehutanan	Perum Perhutani	LK Audited 2010	532.620	-	2.078.948	309.240	130.773	440.014	8.302	700.000	-	-	-	930.632	1.630.632	100%	1.630.632
17		PT Inhutani I	LK Audited 2010	147.372	-	237.260	125.873	67.691	193.563	-	445.333	16.001	-	-	(417.638)	43.697	100%	43.697
18		PT Inhutani II	LK Audited 2010	160.836	9.212	239.942	44.272	26.307	70.579	-	183.083	6.785	-	-	(20.504)	169.364	100%	169.364
19		PT Inhutani III	LK Audited 2010	143.613	-	176.901	9.378	6.012	15.390	-	324.120	-	-	2.405	(165.014)	161.511	100%	161.511
20		PT Inhutani IV	LK Audited 2010	15.306	7.625	66.339	9.032	4.786	13.818	-	92.253	-	-	2.301	(42.033)	52.521	100%	52.521
21		PT Inhutani V	LK Audited 2010	169.343	1.014	179.988	154.257	5.549	159.806	-	132.659	44.862	-	-	(157.339)	20.182	100%	20.182
22	Perikanan	PT Perikanan Nusantara	Unaudited 2010	45.414	14.421	96.007	18.766	173.026	191.792	-	110.895	6.074	-	49.582	(262.336)	(95.785)	100%	(95.785)
23		Perum PPS	LK Audited 2010	65.635	3.489	118.815	30.825	9.355	40.181	-	28.898	-	47.037	-	2.700	78.635	100%	78.635
24	Penunjang Pertanian	Perum Bulog	LK Audited 2010	2.823.332	1.044.738	14.981.238	10.170.925	68.633	10.239.558	-	6.847.136	-	751.619	-	(2.857.075)	4.741.680	100%	4.741.680
25		PT Sang Hyang Seri	LK Audited 2010	169.668	31.530	1.818.220	1.481.787	112.619	1.594.386	-	134.000	-	-	-	89.834	223.834	100%	223.834
26		PT Perti	LK Audited 2010	78.484	9.221	1.290.220	1.31.662	23.909	1.555.571	-	51.315	35.952	-	2.499	44.883	134.649	100%	134.649
27	Pupuk	PT Puzi	Unaudited 2010	14.275.017	1.412.741	34.658.522	8.411.963	9.644.231	18.056.214	58.844	10.610.008	-	-	-	5.933.458	16.543.464	100%	16.543.464
28	Jasa Pengairan	Perum Jasa Tirta I	LK Audited 2010	57.523	2.394	194.370	49.265	2.834	52.099	-	30.570	-	1.131	-	110.570	142.272	100%	142.272
29		Perum Jasa Tirta II	LK Audited 2010	84.300	20.891	200.003	18.791	19.534	199.548	-	199.548	-	-	-	221.246	389.393	100%	389.393
30	Pertambangan	PT Antam Tbk	LK Audited 2010	3.524.744	1.192.357	12.310.732	1.989.071	720.825	2.709.897	20.737	953.948	2.526	-	128.333	8.496.389	9.580.088	65%	8.227.064
31		PT Timah Tbk	LK Audited 2010	1.772.218	-	5.881.106	1.269.482	408.551	1.678.033	309	251.651	120.792	-	-	3.221.358	4.202.766	65%	2.731.798
32		PT Bukit Asam Tbk	LK Audited 2010	2.076.746	-	8.722.699	1.147.728	1.133.723	1.221.451	74.512	1.152.066	30.485	-	1.422	5.182.763	6.386.736	65.02%	4.139.489
33		PT Sarana Karya	Unaudited 2010	1.073	152	20.321	25.272	-	25.272	-	5.000	-	-	9.988	(19.948)	(4.950)	100%	(4.950)
34	Energi	PT Pertamina	LK Audited 2010	136.910.158	2.797.573	266.514.568	95.490.813	65.982.881	161.473.694	962.490	82.569.779	-	566.202	(22.435.612)	43.378.015	104.078.384	100%	104.078.384
35		PT PGN Tbk	LK Audited 2010	18.205.695	23.056	32.087.431	4.035.777	12.950.689	16.986.477	1.232.381	2.421.650	1.709.791	-	(580.194)	10.317.327	13.868.573	56.97%	7.900.926
36		PT Energi Management Indonesia	Unaudited 2010	7.318	3.248	49.232	35.897	1.025	36.922	-	9.100	6.455	-	-	(6.625)	12.309	100%	12.309
37		PT Batan Tbk	LK Audited 2010	6.181	10	25.112	4.018	1.182	5.200	-	27.200	-	-	-	(7.288)	19.912	100%	19.912
38	Industri semen	PT Semen Gresik Tbk	LK Audited 2010	8.202.192	17.202	15.562.999	2.517.519	905.727	3.423.246	133.314	593.152	1.458.258	-	5.458	9.949.571	12.006.439	51.01%	6.123.954
39		PT Semen Baturaja	LK Audited 2010	354.947	-	782.637	175.614	110.783	286.396	-	60.414	1	-	-	435.825	496.240	100.00%	496.240
40		PT Semen Kupa	Prognosa 2010	606.405	-	623.440	174.379	499.689	674.078	-	-	-	-	-	(50.638)	61.488	100%	(31.132)
41	Industri Pertahanan	PT Dirgantara Indonesia	Unaudited 2010	339.420	107.079	2.631.673	1.790.468	1.461.851	3.252.499	-	1.247.012	2.628.236	-	31.727	(4.527.803)	(620.828)	100%	(620.828)
42		PT PAL Indonesia	LK Audited 2010	699.951	29.323	3.038.870	2.335.719	271.807	2.607.526	12	1.137.331	-	-	16.545	(722.544)	431.332	100%	431.332
43		PT Pindad	LK Audited 2010	148.025	22.176	1.238.735	695.661	291.098	986.759	2	70.000	300.068	-	-	(118.093)	251.975	100%	251.975
44		PT Dahana	LK Audited 2010	112.379	35.312	490.106	143.759	16.627	160.385	-	76.090	6.398	-	8.083	239.150	329.721	100%	329.721
45	Ind. Baja, Manufaktur, & Rekayasa	PT Krakatau Steel Tbk	LK Audited 2010	5.029.954	266.381	17.584.059	6.930.713	1.227.801	8.158.514	131.630	7.887.500	1.015.514	-	18.468	372.433	9.293.915	80%	7.435.132
46		PT INKA	LK Audited 2010	64.094	27.073	698.509	386.600	16.934	403.534	-	251.843	8.083	-	-	35.047	294.973	100%	294.973
47		PT Barata Indonesia	LK Audited 2010	54.109	26.581	465.052	380.593	14.488	395.081	-	128.203	15.000	-	96.908	(170.140)	69.971	100%	69.971
48		PT Buma Bisma Indra	LK Audited 2010	21.494	42.177	178.486	268.501	15.892	284.393	-	295.372	13.245	-	10.429	(424.953)	(105.907)	100%	(105.907)
49	Industri Dok dan Perkapalan	PT Dok dan Kapal Bahari	LK Audited 2010	423.200	28.025	1.123.411	3.058.177	1.264	3.059.441	-	78.600	85	-	-	(2.016.714)	(1.940.030)	100%	(1.940.030)
50		PT Dok dan Perkapalan Surabaya	LK Audited 2010	126.839	11.552	539.137	297.690	150.181	447.871	3.385	40.535	-	2.145	-	44.789	87.880	100%	87.880
51		PT Industri Kapal Indonesia	Prognosa 2010	99.338	147.497	296.593	58.134	243.942	302.076	-	-	56.694	-	(62.177)	(5.483)	100%	(5.483)	
52	Aneka Industri	PT Industri Sandang Nusantara	Unaudited 2010	248.116	1.256	265.180	517.146	84.140	591.286	-	197.500	1.369	-	-	(514.995)	(316.126)	100%	(316.126)
53		PT Garam	LK Audited 2010	185.472	11.594	281.274	56.036	54.833	110.869	-	200.000	-	-	-	(29.595)	170.405	100%	170.405
54		PT Primmisima	LK Audited 2010	10.693	335	53.148	49.095	7.634	56.729	-	13.000	121	-	1.756	(18.458)	(3.580)	52.79%	(1.890)
55		PT Iglas	Unaudited 2010	212.371	4.741	296.950	391.544	50.554	442.098	-	47.007	-	-	94.583	(286.738)	(145.148)	100%	(145.148)
56		PT Industri Soda Indonesia (dalam Likuidasi)	Audited 2005	143.335	4.803	161.094	100.687	130.795	231.482	-	15.000	-	-	-	(85.388)	(70.388)	100.00%	(70.388)
57	Ind. Kertas, Percetakan dan Kemasan	Perum Peruri	LK Audited 2010	1.137.882	161.534	2.577.308	642.427	776.966	1.419.393	-	363.573	-	-	-	794.341	1.157.914	100%	1.157.914
58		PT Balai Pustaka	Unaudited 2010	1.524	17.914	94.721	189.719	487	190.206	-	10.000	-	-	-	(105.485)	(95.485)	100%	(95.485)
59		Perum PNRI	LK Audited 2010	55.214	6.295	170.624	39.720	33.104	72.825	-	43.243	506	497	53.553	97.799	97.799	100%	97.799
60		PT Pradnya Paramita	LK Audited 2010	10.998	-	53.149	49.095	7.634	56.729	-	13.000	121	-	13.828	(30.629)	(3.580)	100%	(3.580)
61																		

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN TAHUN 2010

AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA	
				2	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12+13)	15	16=(14*15)	
72	Pelabuhan	PT Pelabuhan Indonesia I	LK Audited 2010	1.306.541	207.947	2.005.180	488.723	112.510	601.234	-	455.059	0	56.901	-	891.986	1.403.946	100%	1.403.946	
73		PT Pelabuhan Indonesia II	LK Audited 2010	5.477.000	117.947	7.735.809	151.466	735.688	1.651.154	47.070	1.009.958	0	7.853	26.826	4.993.149	6.037.586	100%	6.037.586	
74		PT Pelabuhan Indonesia III	LK Audited 2010	2.879.802	523.589	4.870.334	682.033	477.093	1.159.126	289.263	809.222	209.843	209.731	1.627.106	566.043	3.421.944	100%	3.421.944	
75		PT Pelabuhan Indonesia IV	LK Audited 2010	1.191.532	22.634	1.689.152	159.918	78.164	238.082	-	350.625	1.466	320.700	3.429	781.708	1.451.071	100%	1.451.071	
76	Bandar Udara	PT ANGKASA PURA I	LK Audited 2010	6.132.488	93.664	9.197.386	562.661	196.147	778.808	-	1.800.000	-	1.858.928	4.515.936	443.714	8.418.578	100%	8.418.578	
77		PT ANGKASA PURA II	LK Audited 2010	5.667.852	438.365	9.149.163	526.885	320.534	847.422	-	1.900.000	-	2.085.258	201.976	4.134.507	8.301.741	100%	8.301.741	
78	Angkutan Darat, Udara dan Laut	PT Karetas Api Indonesia	LK Audited 2010	3.045.871	557.855	5.583.589	755.707	830.032	1.585.739	44.569	2.470.000	-	826.546	409.322	3.853.242	3.953.242	100%	3.953.242	
79		PERUM PRO	Unaudited 2010	65.783	11.104	96.112	104.156	140.881	-	-	385.686	-	67.771	763	(44.768)	(44.768)	100%	(44.768)	
80		PERUM DAMRI	LK Audited 2010	381.542	6.420	448.784	64.729	136.156	200.885	-	19.700	111.297	-	145.910	1.729	(32.737)	245.899	100%	245.899
81		PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES	Unaudited 2010	1.570.246	-	1.907.247	2.315.698	1.610.155	3.925.853	-	1.403.556	1	-	-	(3.422.163)	(2.018.606)	95,38%	(1.925.346)	
82		PT GARUDA INDONESIA	LK Audited 2010	9.364.865	404.131	13.866.018	5.241.275	4.955.286	10.196.562	12.194	9.120.498	8.402	-	1.159.251	(6.830.890)	3.457.262	85,81%	2.966.676	
83		PT PELNI	LK Audited 2010	4.418.462	26.718	5.607.597	499.578	414.322	913.901	328	359.000	3.194.908	2.931.814	-	(1.792.353)	4.693.369	100%	4.693.369	
84		PT ANGKUTAN SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN	Unaudited 2010	1.208.608	15.745	1.888.445	137.287	21.060	158.347	-	405.753	7.742	-	140.236	129.111	1.730.098	100%	1.730.098	
85		PT Djakarta Lloyd	Prognosa 2009	809.509	221.393	1.102.776	881.501	86.374	967.875	-	180.640	-	667.189	-	(712.928)	134.901	100%	134.901	
86		Pelayaran Bahtera Adhiguna	LK Audited 2009	13.219	25.066	152.874	127.407	-	127.407	1	21.674	-	-	29.266	(25.474)	25.466	100%	25.466	
87	Konstruksi	PT Amarta Karya	LK Audited 2010	18.864	1.650	116.679	60.310	50.066	110.376	-	11.250	886	-	4.477	(10.308)	6.304	100%	6.304	
88		PT Adhi Karya Tbk	LK Audited 2010	975.477	8.387	4.927.696	3.450.703	609.238	4.059.941	6.841	170.382	19.144	-	3.232	688.355	861.113	52,28%	450.190	
89		PT Istaka Karya	Unaudited 2010	118.351	50.350	764.346	463.261	293.838	757.099	-	50.000	-	-	(59.871)	17.119	7.248	100%	7.248	
90		PT Pembangunan Perumahan Tbk	LK Audited 2010	214.147	-	5.444.074	3.729.102	453.129	4.182.231	-	484.244	462.166	-	-	315.433	1.261.843	51%	643.540	
91		PT Nindya Karya	LK Audited 2010	80.733	37.836	1.243.457	1.021.254	128.478	1.149.733	(6)	59.500	-	-	28.499	5.731	93.730	100%	93.730	
92		PT Hutama Karya	LK Audited 2010	139.002	46.057	3.050.611	2.205.546	338.432	2.543.978	15	200.000	-	-	-	306.617	506.617	100%	506.617	
93		PT Wijaya Karya Tbk	LK Audited 2010	1.088.582	75.040	6.286.305	3.842.027	727.510	4.569.537	115.144	582.485	602.312	-	8.374	608.453	1.801.624	66,85%	1.200.782	
94		Perum Perumnas	Unaudited 2010	278.721	23.308	1.830.467	587.758	629.832	1.217.590	198	1.000	499.901	5.068	-	6.005	612.679	100%	612.679	
95		PT Brantas Abipraya	LK Audited 2010	241.098	2.598	647.273	329.815	181.873	511.788	-	10.000	-	-	151.554	(26.070)	135.484	100%	135.484	
96	Konsultansi Konstruksi	PT Bina Karya	Unaudited 2010	26.760	-	22.538	27.533	51.596	-	-	2.728	-	-	7.830	3.874	14.574	100%	14.574	
97		PT Indehi Karya	LK Audited 2010	5.614	1.975	22.636	20.363	21.663	-	-	7.000	-	-	2.052	(7.768)	1.276	100%	1.276	
98		PT Yodya Karya	LK Audited 2010	5.840	150	62.364	35.680	7.208	42.888	-	8.000	-	-	-	11.476	19.476	100%	19.476	
99		PT Indra Karya	Unaudited 2010	16.290	1.607	79.470	58.462	16.443	74.905	-	2.000	-	-	-	940	1.626	4,56%	4.565	
100		PT Virama Karya	Unaudited 2010	2.298	-	51.058	31.346	4.977	36.323	-	10.000	-	-	-	567	14.736	100%	14.736	
101	Kawasan	PT Kawasan Berikat Nusantara	LK Audited 2010	346.041	91.232	702.163	70.211	35.885	106.096	-	300.000	63.945	-	197.637	34.485	596.067	73,15%	436.023	
102		PT Kawasan Industri Makassar	Unaudited 2010	20.816	1.316	88.458	6.854	3.042	9.897	-	40.000	12.146	-	(812)	7.229	58.563	60%	35.138	
103		PT Kawasan Industri Medan	LK Audited 2010	34.132	5.692	142.453	29.788	4.378	34.166	-	30.000	-	-	55.817	22.470	108.287	60%	64.972	
104		PT Kawasan Industri Wijayakusuma	LK Audited 2010	14.421	536	47.250	8.132	-	8.132	-	25.863	-	-	-	2.490	39.117	51,08%	19.985	
105		PT PDIP Batam	LK Audited 2010	39.157	22.268	97.219	9.278	35.087	44.365	-	26.184	-	-	21.122	5.548	52.854	100%	52.854	
106	Pergudangan	PT Varuna Tirta Prakasya	LK Audited 2010	16.186	15	68.337	74.744	-	74.744	-	11.000	-	-	-	(17.407)	(6.407)	100%	(6.407)	
107		PT Bhandha Ghara Reksa	LK Audited 2010	42.217	14.358	214.606	70.179	3.484	73.664	-	60.000	-	-	-	80.943	140.943	100%	140.943	
108	Perbankan	PT Bank Mandiri Tbk	LK Audited 2010	59.766.826	5.384.797	449.774.551	394.435.830	13.268.685	407.704.515	527.228	10.498.247	6.960.680	-	(358.306)	24.442.187	41.542.808	60,00%	24.925.685	
109		PT Bank BRI Tbk	LK Audited 2010	363.781.375	4.880.779	4.880.779	202.850.602	29.836.456	367.612.492	-	6.167.291	2.773.858	-	608.801	27.123.160	36.673.110	56,79%	20.826.659	
110		PT Bank BNI Tbk	LK Audited 2010	23.687.352	4.162.883	248.580.529	215.431.004	-	215.431.004	29.899	9.054.807	14.568.468	-	(494.085)	9.990.436	33.119.626	60%	19.871.776	
111		PT Bank BTN Tbk	LK Audited 2010	2.418.030	1.093.306	68.385.539	61.938.261	-	61.938.261	-	4.357.029	639.626	-	188.486	1.262.137	6.447.278	72,91%	4.700.710	
112	Asuransi	PT JIWA SRA	LK Audited 2010	306.931	389.080	7.195.068	81.579	6.154.536	6.236.115	425	235.000	-	-	519.057	204.470	958.528	100%	958.528	
113		PT ASABRI	LK Audited 2010	6.646.958	6.043	6.926.646	38.611	5.661.738	5.700.347	-	200.000	-	-	780.170	246.128	1.226.298	100%	1.226.298	
114		PT JAMSOSTEK	LK Audited 2010	360.230	1.152.253	102.648.898	96.222.445	300.761	96.523.206	2	600.000	-	-	2.603.775	2.821.915	6.125.689	100%	6.125.689	
115		PT TASPEN	LK Audited 2010	228.506	4.108	77.210.189	4.563.360	68.520.654	73.084.014	3.668	100.000	-	-	2.778.702	1.243.804	4.122.507	100%	4.122.507	
116		PT ASKES	LK Audited 2010	4.944.921	3.076	10.980.945	356.179	3.473.379	3.828.558	8.308	1.000.000	-	-	4.338.723	1.805.353	7.144.076	100%	7.144.076	
117		PT JASINDO	LK Audited 2010	411.276	38.004	2.996.899	1.520.307	399.972	1.910.759	4.140	425.000	-	-	462.818	194.252	1.082.070	100%	1.082.070	
118		PT RUI	LK Audited 2010	37.836	2.414	1.021.824	628.080	359.004	987.084	5	40.000	-	-	196.509	(201.789)	34.720	100%	34.720	
119		PT JASA RAHARJA	LK Audited 2010	275.517	5.057	5.505.472	1.898.788	51.996	1.950.784	66.405	800.000	1.429.587	-	143.724	1.114.973	3.488.284	100%	3.488.284	
120		PT ASEI	LK Audited 2010	64.986	4.691	803.967	143.754	11.901	155.655	-	300.000	-	-	300.189	48.122	648.311	100%	648.311	
121		PT ASKRINDO	LK Audited 2010	311.866	130.612	2.569.016	26.626	337.215	363.841	-	1.500.000	900.000	-	(750)	(194.075)	2.205.175	100%	2.205.175	
122	Pembiayaan	PERUM JAMKRINDO	LK Audited 2010	101.152	11.748	2.993.023	928.336	167.640	1.096.976	-	1.849.733	-	-	458.906	(412.592)	1.896.047	100%	1.896.047	
123		PT PPA	LK Audited 2010	819.311	28.026	6.874.032	3.504.563	247.455	3.752.018	1.276	2.801.359	-	-	(95.564)	414.943	3.120.738	100%	3.120.738	
124		PT Danareksa	LK Audited 2010	150.339	18.047	2.463.355	763.760	1.081.828	1.845.588	3	701.480	85.927	-	(10.766)	41.122	817.764	100%	817.764	
125		PT Permodalan Nasional Madan	LK Audited 2010	77.165	8.841	3.346.970	94.754	2.755.901	2.850.656	627	300.000	-	-	31.509	164.178	495.687	100%	495.687	
126		Perum Pegadaian	LK Audited 2010	543.982	117.275	20.283.043	13.845.160	3.141.680	16.986.840	-	205.000	46.252	-	-	3.044.951	3.296.203	100%	3.296.203	
127		PT PANN Multi Finance	LK Audited 2010	1.963.528	318.804	2.926.089	266.557	5.680.102	5.926.659	-	45.997	-	-	192.066	(3.238.632)	(3.000.569)	100%	(3.000.569)	
128		PT Bahana PUI	LK Audited 2010	220.825	51.055	3.101.400	2.886.633	84.034	2.950.667	338.276	22.500	-	-	169.044	(379.087)	(187.543)	100%	(187.543)	
129	Perdagangan	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	LK Audited 2010	279.005	119.287	927.533	782.029	574.610	1.356.638	903	156.200	86	-	19.269	(605.563)	(430.008)	100%	(430.008)	
130		PT Sarnah	LK Audited 2010	108.441	3.656														

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA MINORITAS AUDITED TAHUN 2010
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
 (Rp. Juta)

No	PERUSAHAAN NEGARA	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM HAK MINORITAS	HAK MINORITAS	LABA RUGI BERSIH
				1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8=(6-7)	9	10=(8-9)	11	12=(10+11)	13	14=(12-13)
1	PT Freeport Indonesia	LK Audited 2009		55.538.850	17.543.342	37.995.308	241.364	-	38.236.671	-	38.236.671	13.350.811	24.885.861	-	24.885.861	-	24.885.861
2	PT Socfindo																
3	PT Asean Bintulu Fertilizer **)	LK Audited 2010		2.042.226	1.477.724	564.503	70.135	779	633.859	-	633.859	154.934	478.925	-	478.925	-	478.925
4	PT Indosat, Tbk	LK Audited 2010		19.796.515	16.322.571	3.473.944	635.803	3.027.930	1.081.817	-	1.081.817	357.798	724.019	-	724.019	76.845	647.174
5	PT INALUM	Prognosa 2009		4.411.241	3.106.766	1.304.476	25.314	-	1.329.790	-	1.329.790	372.343	957.446	-	957.446	-	957.446
6	PT Kertas Padalarang	LK Audited 2010		57.543	62.990	(5.447)	604	9.457	(14.300)	895	(15.195)	(2.472)	(12.724)	-	(12.724)	-	(12.724)
7	PT Kertas Basuki Rahmat																
7	PT Atmindo	LK Audited 2008		89.788	91.757	(1.969)	2.670	-	701	-	701	409	292	-	292	-	292
8	PT SIER	LK Audited 2010		189.448	130.286	59.162	9.857	9.027	59.992	-	59.992	7.637	52.355	-	52.355	0	52.355
9	PT JIEP	LK Audited 2010		91.908	46.784	45.124	5.948	-	51.072	-	51.072	9.366	41.706	-	41.706	-	41.706
10	PT Waskita Karya	Prognosa 2010		6.074.410	5.654.010	420.400	1.940	630	421.710	148.680	273.030	152.080	120.950	-	120.950	-	120.950
11	PT Rekayasa Industri	LK Audited 2010		2.559.524	2.380.453	179.071	4.344	40.907	142.508	16.982	125.526	85.793	39.734	-	39.734	1.064	38.670
12	PT JIHD Tbk	LK Audited 2010		1.352.105	1.140.451	211.654	119.699	48.279	283.074	-	283.074	69.611	213.463	-	213.463	152.046	61.417
13	PT Bank Bukopin Tbk	LK Audited 2010		2.317.300	1.681.029	636.271	30.794	-	667.065	-	667.065	174.304	492.761	-	492.761	162	492.599
14	PT PPLI*)	LK Audited 2010		204.966	167.301	37.665	8.737	1.010	45.393	4.321	41.071	11.541	29.531	-	29.531	-	29.531
	Grand Total			94.725.624	49.805.464	44.920.160	1.157.211	3.138.019	42.939.352	170.879	42.768.473	14.744.155	28.024.318	-	28.024.318	230.117	27.794.201

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA MINORITAS AUDITED TAHUN 2010
NERACA
(Rp. Juta)

NO	NON BUMN	SUMBER	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS
			1	2	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12+13)
1	PT Freeport Indonesia	LK Audited 2009	16.296.536	28.824.846	5.147.506	50.268.888	10.050.057	11.360.821	21.410.878	-	213.841	2.297.623	-	300.800	26.045.746	28.858.009
2	PT Socfindo															
3	PT Asean Bintulu Fertilizer	LK Audited 2010	3.860.577	1.954.704	-	5.815.281	2.978.669	211.457	3.190.127	-	874.755	-	-	-	1.750.399	2.625.154
4	PT Indosat, Tbk	LK Audited 2010	6.158.854	46.859.333	-	52.818.187	11.946.853	22.634.848	34.581.701	385.840	543.393	-	-	1.947.964	15.359.289	17.850.846
5	PT INALUM	Prognosa 2009	4.241.083	5.524.549	-	9.765.632	1.642.537	151.829	1.794.366	-	8.652.474	-	-	-	(681.218)	7.971.256
6	PT Kertas Padalarang	LK Audited 2010	35.638	22.252	3.062	60.953	45.879	376	46.255	-	124.016	-	-	-	(109.318)	14.698
7	PT Kertas Basuki Rahmat															
8	PT Atmindo	LK Audited 2008	63.120	10.370	-	73.490	51.590	5.864	57.455	-	2.324	-	-	2.978	10.734	16.035
9	PT SIER	LK Audited 2010	98.987	169.354	1.291	269.632	27.310	26.218	53.528	13	100.000	-	-	438	115.652	216.091
10	PT JIEP	LK Audited 2010	126.739	68.141	16.245	211.124	35.752	1.100	36.852	-	80.000	-	-	3	94.269	174.272
11	PT Waskita Karya	Prognosa 2010	2.849.848	603.600	2.126	3.455.574	2.751.421	251.233	3.002.654	-	180.000	474.992	-	2.401	(204.673)	452.720
12	PT Rekayasa Industri	LK Audited 2010	1.321.855	326.694	46.536	1.695.086	1.117.563	10.389	1.127.951	9.228	50.300	-	-	-	507.607	557.907
13	PT Jakarta Internasional Hotel & Develop	LK Audited 2010	2.037.669	2.423.485	315.147	4.776.301	1.626.570	404.583	2.031.153	1.192.748	965.020	1.219.437	-	(474.066)	(157.991)	1.552.400
14	PT Bank Bukopin Tbk	LK Audited 2010	3.578.715	43.403.748	506.903	47.489.366	224.522	44.372.886	44.597.408	5.011	826.656	359.629	-	(2.326)	1.702.988	2.886.947
15	PT PPLI*)	LK Audited 2010	170.088	188.963	-	359.051	43.879	53.314	97.193	-	211.963	-	-	(21.757)	71.652	261.858
16	Asean Copper Product															
17	Asean Aceh Fertilizer															
	Grand Total		40.839.509	130.180.039	6.038.816	177.058.364	32.542.602	79.484.919	112.027.521	1.592.840	12.824.741	4.351.681	-	1.756.435	44.505.136	63.437.994

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH
PER 31 DESEMBER 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Badan Hukum Milik Negara	Sumber a)	Pendapatan Operasional	Pendapatan Non Operasional	Total Pendapatan	Beban Operasional	Beban Non Operasional	Total Beban	Surplus (Defisit)	Selisih Kurs	Saldo Dana Setelah Selisih Kurs	Saldo Dana Awal	Koreksi Periode Lalu	Saldo Dana Setelah Koreksi	Total Saldo Dana Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(6)-(9)	(11)	(12)=(10) ± (11)	(13)	(14)	(15)=(13)+(14)	(16)=(12)+(15)
1	Universitas Indonesia	1	292.059	-	292.059	(179.010)	-	(179.010)	471.069	-	471.069	757.223	933.919	1.691.142	2.162.211
2	Universitas Gadjah Mada	1	1.568.821	-	1.568.821	1.414.566	-	1.414.566	154.255	-	154.255	-	-	-	154.255
3	Institut Teknologi Bandung	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Institut Pertanian Bogor	1	637.007	-	637.007	742.544	-	742.544	(105.537)	-	(105.537)	1.207.033	-	1.207.033	1.101.496
5	Universitas Sumatra Utara	1	621.529	-	621.529	429.798	-	429.798	191.731	-	187.103	2.403.901	2.702	2.406.603	2.593.706
6	Universitas Pendidikan Indonesia	2	1	9.484	9.485	190.237	-	190.237	(180.752)	-	(180.752)	-	-	-	(180.752)
7	Universitas Airlangga	1	993.538	44.510	1.038.048	484.957	-	484.957	553.091	-	553.091	679.845	-	679.845	1.232.936
8	Universitas Pertahanan Indonesia	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas	2	757.072	-	757.072	253.705	418.127	671.832	85.240	-	85.240	-	-	-	85.240
TOTAL			4.870.027	53.994	4.924.021	3.336.797	418.127	3.754.924	1.169.097	-	1.164.469	5.048.002	936.621	5.984.623	7.149.092

Keterangan:

a) 1) Telah diaudit (*audited*); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan III;

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA

PER 31 DESEMBER 2010

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	BADAN HUKUM MILIK NEGARA	Sumber a)	Total Aktiva	Total Kewajiban	Aktiva Bersih	Ekuitas Dana Lancar Tidak Terikat	Ekuitas Dana Lancar Terikat Temporer	Ekuitas Dana Lancar Terikat Permanen			Ekuitas Dana Lancar	Ekuitas Dana Tidak Lancar	Ekuitas Dana Cadangan	Saldo Perubahan Modal	Total Ekuitas
								PMP*	Lain-lain	Total					
(1)	(2)	(3)	(9)=(4)+...+(8)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(17)	(19)	(18)	(19)
1	Universitas Indonesia	1	1.956.198	153.926	1.802.272	1.764.562	19.209	18.499	-	-	-	-	-	-	1.802.272
2	Universitas Gadjah Mada	1	8.442.845	165.745	8.277.100	1.120.326	7.111.773	-	-	-	-	20.868	-	-	8.277.100
3	Institut Teknologi Bandung	2	1.156.176	88.841	1.067.335	442.150	175.420	23.589	-	-	641.159	-	-	-	1.067.335
4	Institut Pertanian Bogor	1	1.190.624	89.127	1.101.497	1.099.797	-	1.700	-	-	-	-	-	-	1.101.497
5	Universitas Sumatra Utara	1	2.594.068	362	2.593.706	2.593.705	-	-	-	-	-	-	-	-	2.593.706
6	Universitas Pendidikan Indonesia	2	1.439.125	3.059	1.436.066	387.946	-	510.805	-	-	-	-	-	-	1.436.066
7	Universitas Airlangga	1	1.227.566	39.135	1.188.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.188.431
8	Universitas Pertahanan Indonesia	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Badan Pelaksana Keg. Usaha Hulu Migas	2	1.991.294	1.974.686	16.608	16.608	-	-	-	-	-	-	-	-	16.608
TOTAL			19.997.896	2.514.881	17.483.015	7.425.094	7.306.402	554.593	-	-	641.159	20.868	-	-	17.483.015

Keterangan:

a)

1) Telah diaudit (*audited*); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan III;

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
APBN / NON APBN DAN TOTAL ASET
Per 31 Desember 2010
(dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	TOTAL ASET	NON APBN	KETERANGAN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	4.933.116	624.000	2.703.465	60.375	-	3.387.840	1.545.276	776.006	-	31 Desember 2010	Satker	007
2	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	266.165.099	9.332.400	208.888.012	9.371.761	-	227.592.173	38.572.926	699.818.134	-	31 Desember 2010	Satker	020
3	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas SABANG (BPKS)	-	-	-	-	-	-	-	1.203.381.442	-	31 Desember 2010	Satker	999,08
4	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)	-	-	-	-	-	-	-	1.682.577.124	1.682.577.124	31 Desember 2010	Non APBN	025
5	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	56.360.133	-	-	-	38.545.545	38.545.545	17.814.588	21.142.282	36.008.458	31 Desember 2010	Non APBN	025
6	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	363.706.759	-	-	-	-	-	-	6.124.645.008	-	31 Desember 2010	Non APBN	091
7	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	1.635.185	441.670	251.473	500.016	382.822	1.575.981	59.204	500.016	-	31 Desember 2010	Kegiatan	088
8	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Non Aktif	024
9	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	25.000.000	888.554	22.489.665	595.825	-	23.974.044	1.025.956	7.230.820	-	Semester I 2010	Satker	033
10	Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Non Aktif	033
11	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	7.500.000.000	-	7.360.500.000	139.500.000	-	7.500.000.000	-	679.728.988	-	31 Desember 2010	Kegiatan	090
12	Badan Pengelola KAPET Bandar Aceh Darussalam - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.500.000	-	2.349.699	-	-	2.349.699	150.301	902.461	-	TA. 2009	Satker	033
13	Badan Pengelola KAPET Khatulistiwa - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Satker	033
14	Badan Pengelola KAPET DAS KAKAB - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.023.228.000	454.115.000	1.390.752.103	-	-	1.844.867.103	178.360.897	-	-	31 Desember 2010	Satker	033
15	Badan Pengelola KAPET Sasamba - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	4.473.692	-	4.245.148	-	-	4.245.148	228.544	2.978.973	-	31 Desember 2010	Satker	033
16	Badan Pengelola KAPET Batulicin - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	4.350.438	-	3.430.819	-	-	3.430.819	919.619	2.428.331	-	31 Desember 2010	Satker	033
17	Badan Pengelola KAPET Parepare - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.227.460	-	1.213.365	-	-	1.213.365	14.095	-	-	TA. 2009	Satker	033
18	Badan Pengelola KAPET Bukari - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.000.000	-	211.917	-	-	211.917	788.083	-	-	SEMESTER I 2009	Satker	033
19	Badan Pengelola KAPET Batu - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.400.000	-	1.389.997	-	-	1.389.997	10.003	-	-	SEMESTER I 2008	Satker	033
20	Badan Pengelola KAPET Manado - Bitung Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.850.000	-	2.787.244	-	-	2.787.244	62.756	1.394.988	-	TA. 2009	Satker	033
21	Badan Pengelola KAPET Bima - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.300.000	-	1.057.123	-	-	1.057.123	242.877	-	-	TA.2008	Satker	033
22	Badan Pengelola KAPET Mbay - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.000.000	-	-	-	982.970	982.970	17.030	-	-	31 Desember 2010	Satker	033
23	Badan Pengelola KAPET Seram - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.500.000	690.000	679.384	-	-	1.369.384	130.616	-	-	TA. 2009	Satker	033
24	Badan Pengelola KAPET Biak - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2009	Satker	033
25	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	28.260.545	2.413.430	18.258.053	1.598.373	-	22.269.856	5.990.689	5.479.291	-	TA. 2009	Satker	026
26	Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKOR KAMLA)	94.600.000	3.257.849	38.609.206	47.034.542	-	88.901.597	5.698.403	269.547.445	-	31 Desember 2010	Satker	034 /999,06
27	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	4.000.052	-	-	-	2.499.421	2.499.421	1.500.631	1.673.993	168.460	31 Desember 2010	APBN dan Non	025
28	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BPPN)	1.000.000	-	949.600	-	-	949.600	50.400	-	-	TA. 2009	Kegiatan	040
29	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	15.000.000	7.027.913	4.108.800	3.838.287	25.000	15.000.000	-	57.279.268	-	31 Desember 2010	Kegiatan	025
30	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	48.395.876	-	-	-	47.795.485	47.795.485	590.391	8.455.326	-	31 Desember 2010	Satker	999,08
31	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura (Badan Pengembangan Suramadu)	10.000.000	-	8.044.550	319.884	-	8.364.434	1.635.566	2.206.894	-	31 Desember 2010	Kegiatan	033
32	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)	5.043.000	246.000	1.253.812	-	-	1.499.812	188	1.500.000	-	31 Desember 2010	Kegiatan	055
33	Badan Intelijen Negara (BOTASUPAL)	2.939.711.000	-	2.939.711.000	-	-	2.939.711.000	-	-	-	31 Desember 2010	Kegiatan	050
34	Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Belum Aktif	
35	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Belum Aktif	
36	Dewan Pers	14.768.826	1.109.924	12.027.353	93.453	-	13.230.730	1.538.096	3.688.654	-	31 Desember 2010	Satker	059
37	Dewan Gula Indonesia (DGI)	1.568.800	-	-	-	1.231.201	1.231.201	337.599	-	-	31 Desember 2010	Satker	018
38	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	57.862.899	-	-	-	57.342.152	57.342.152	520.747	42.670	-	31 Desember 2010	Kegiatan	007
39	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	5.043.000	-	4.141.892	67.904	-	4.209.796	833.204	164.304	-	31 Desember 2010	Kegiatan	018
40	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	3.000.000	766.200	710.585	-	-	1.476.785	1.523.215	-	-	31 Desember 2010	Kegiatan	010
41	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	34.500.000	2.806.204	21.372.308	974.802	-	25.153.314	9.346.686	8.476.934	-	31 Desember 2010	Satker	007/999,06

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
APBN / NON APBN DAN TOTAL ASET
Per 31 Desember 2010
(dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	TOTAL ASET	NON APBN	KETERANGAN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN- LAIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	Dewan Riset Nasional (DRN)	5.040.008	153.414	4.604.174	150.453	-	4.908.041	131.967	191.391	-	31 Desember 2010	Satker	042
43	Dewan Buku Nasional (DBN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tdk ada dana	023
44	Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)	9.685.300	-	9.045.462	315.900	-	9.361.362	323.938	1.264.531	-	31 Desember 2010	Satker	032
45	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS)	3.000.000	-	-	-	2.102.417	2.102.417	897.583	-	-	31 Desember 2010	Kegiatan	059
46	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)	354.180	303.000	27.680	-	21.000	351.680	2.500	-	-	31 Desember 2010	Kegiatan	026
47	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	7.500.000	162.440	6.267.496	318.740	-	6.748.676	751.324	1.377.990	-	31 Desember 2010	Kegiatan	033
48	Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Nasional)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Belum Aktif	-
49	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Blm dpt dana dr APBN	-
50	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Blm dpt dana dr APBN	-
51	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Blm dpt dana dr APBN	-
52	Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)	29.999.999	-	25.069.896	1.939.750	-	27.009.646	2.990.353	6.230.047	-	31 Desember 2010	Kegiatan	043
53	Dewan Energi Nasional (DEN)	51.148.800	6.264.864	26.985.151	3.955.692	-	37.205.707	13.943.093	11.890.794	-	31 Desember 2010	Satker 2010	020
54	Dewan Penerbangan Antariksa Nasional RI (DEPANRI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Belum Aktif	-
55	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Belum Aktif	-
56	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DPKTI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Belum Aktif	-
57	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	9.404.264	2.167.200	5.791.477	367.265	-	8.325.942	1.078.322	367.265	5.359.937	31 Desember 2010	Kegiatan	074
58	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	6.246.541	380.983	1.527.634	377.795	-	2.286.412	3.960.129	3.287.196	-	31 Desember 2010	Satker	006
59	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Non Aktif	090
60	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	22.380.488	3.231.775	16.001.749	394.298	-	19.627.822	2.752.666	7.529.777	-	31 Desember 2010	Satker	069
61	Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lanjut Usia)	3.522.705	-	3.321.125	-	-	3.321.125	201.580	602.792	-	TA. 2009	Kegiatan	027 / 999.06
62	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	8.623.359	1.414.000	6.206.923	78.400	-	7.699.323	924.036	3.955.005	-	31 Desember 2010	Satker	047
63	Komisi Banding Merek	313.450	-	123.564	-	-	123.564	189.886	-	-	31 Desember 2010	Kegiatan	013
64	Komisi Banding Paten	24.530	-	-	-	24.530	24.530	-	-	-	Semester I 2010	Kegiatan	013
65	Komisi Hukum Nasional (KHN)	11.147.029	778.500	7.625.570	86.597	-	8.490.667	2.656.362	1.559.686	-	31 Desember 2010	Satker	007
66	Komisi Informasi Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Belum Aktif	059
67	Komisi Kepolisian Nasional (Kempolnas)	15.390.114	3.146.515	9.010.462	3.044.652	-	15.201.629	188.485	7.438.688	-	31 Desember 2010	Satker	060
68	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)	22.976.289	-	-	-	17.726.146	17.726.146	5.250.143	35.110.433	68.449.771	31 Desember 2010	Kegiatan	036
69	Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Belum Aktif	025
70	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Belum Aktif	-
71	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)	228.029	-	185.411	-	-	185.411	42.618	-	-	31 Desember 2010	Kegiatan	084
72	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	5.863.872	-	5.375.254	-	-	5.375.254	488.618	-	-	31 Desember 2010	Kegiatan	084
73	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	4.575.393	-	3.960.865	186.276	-	4.147.141	428.252	742.603	-	31 Desember 2010	Satker	015
74	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	12.600.000	5.200.637	1.038.960	-	3.563.635	9.803.232	2.796.768	4.959.653	-	31 Desember 2010	Kegiatan	092
75	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak (KAN-PBPTA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Kegiatan (Tdk ada dana)	026
76	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	22.952.340	-	12.240.116	9.153.247	-	21.393.363	1.558.977	25.030.681	-	31 Desember 2010	Satker	022
77	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)	675.000	349.081	181.683	-	75.240	606.004	68.996	1.961.670	-	TA. 2009	Kegiatan	055
78	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)	396.200	-	-	-	190.625	190.625	205.575	-	-	31 Desember 2010	Kegiatan	041
79	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (KOMNAS FBPI)	2.106.166	-	-	-	1.440.203	1.440.203	665.963	-	-	31 Desember 2010	Kegiatan	036
80	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Non Aktif	029
81	Komite Ekonomi Nasional (KEN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Belum Aktif	-
82	Komite Inovasi Nasional (KIN)	3.824.834.000	-	-	-	3.527.232.260	3.527.232.260	297.601.740	604.332.900	-	31 Desember 2010	Kegiatan	999

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
APBN / NON APBN DAN TOTAL ASET
Per 31 Desember 2010
(dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	TOTAL ASET	NON APBN	KETERANGAN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN- LAIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Belum Aktif	
84	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Blm Aktif (blm dialokasikan)	
85	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	23.624.155	2.560.649	18.854.606	404.382	-	21.819.637	1.804.518	8.778.553	-	31 Desember 2010	Satker	024
86	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	1.999.625.000	1.327.559.500	47.072.100	-	541.949.262	1.916.580.862	83.044.138	-	168.858.900	31 Desember 2010	Satker	999,06
87	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Non Aktif	024
88	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	11.430.645.300	-	-	-	-	-	-	22.548.912.836	-	31 Desember 2010	Non APBN	-
89	Lembaga Sensor Film (LSF)	20.710.103	2.449.842	10.424.084	4.962.526	-	17.836.452	2.873.651	22.414.822	-	31 Desember 2010	Satker	040
90	Lembaga Penyiaran Publik TVRI (LPP TVRI)	498.190.725	-	-	-	491.740.656	491.740.656	6.450.069	3.501.663.568	124.499.157	31 Desember 2010	Satker	999,06
91	Lembaga Penyiaran Publik RRI (LPP RRI)	600.000.000	-	-	-	558.912.123	558.912.123	41.087.877	3.756.571.090	-	31 Desember 2010	Satker	999,08
92	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (LKP2KS Paca)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Non Aktif	027
93	Lembaga Kerjasama Tripartit (LKT)	2.122.592	-	1.762.487	-	-	1.762.487	360.105	-	-	31 Desember 2010	Kegiatan	026
94	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	789.190	-	523.790	-	252.000	775.790	13.400	-	-	31 Desember 2010	Kegiatan	026
95	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 Desember 2010	Belum Aktif	013
96	Ombudsman Republik Indonesia (ORI)	20.000.000	4.509.724	7.932.801	1.211.825	-	13.654.350	6.345.650	4.703.581	-	31 Desember 2010	Satker	007
97	Otorita Asahan	76.628.308	7.283.709	18.926.425	696.422	33.541	26.940.097	49.688.211	76.628.308	660.611.926	31 Desember 2010	Non APBN	-
98	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	140.000.000	-	-	-	134.391.250	134.391.250	5.608.750	14.744.622.748	-	31 Desember 2010	Satker	007/999,06
99	Sekretariat Pengadilan Pajak	78.391.280	18.499.834	5.047.785	1.519.283	-	25.066.902	53.324.378	11.567.397	-	31 Desember 2010	Satker	015
100	Staf Khusus Presiden	4.280.971	-	1.553.601	-	-	1.553.601	2.727.370	-	-	TA. 2009	Kegiatan	007
101	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP)	49.412.309	7.148.646	12.404.735	5.225.604	-	24.778.985	24.633.324	8.457.975	-	31 Desember 2010	Satker	007
	J U M L A H	32.547.238.869	1.877.283.457	12.321.229.639	238.344.329	5.428.459.484	19.865.316.909	887.569.901	56.188.173.332	2.746.533.733			

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN YAYASAN MILIK NEGARA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH
PER 31 DESEMBER 2010
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA YAYASAN	Kementerian/ Lembaga	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Investasi	TOTAL Aset	Kewajiban Jk Pendek	Kewajiban Jk Panjang	TOTAL Kewajiban	TOTAL Ekuitas Dana	Total Kewajiban & Ekuitas Dana	KET
1	2	2a	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11	12=(10+11)	14
1	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola	Sekretariat Negara	24.704.340	22.901.186	2.261.521		49.867.047	4.137.465	11.916.804	16.054.269	33.812.778	49.867.047	TA. 2010
2	Yayasan Sarana Wana Jaya/ Badan Pengelola	Departemen Kehutanan	38.926.539	11.328.603	181.324		50.436.466	23.663.043	14.578.330	38.241.373	12.195.093	50.436.466	TA. 2010
3	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	Sekretariat Negara	9.373.914	169.709			9.543.623	17.837		17.837	9.525.786	9.543.623	T.A 2009
4	Yayasan Bhumi Bhakti Adiguna	BPN	7.074.511	608.082			7.682.593			7.682.593	-	7.682.593	T.A 2008
5	Yayasan Gedung Arsip Nasional RI	Arsip Nasional RI									-		
6	Yayasan Yustisia Dharmayukti Karini	MA									-		
7	Yayasan Purna Bhakti (YARNATI)	Depdagri	49.326.792	44.126.923	3.288.080	16.786.650	113.528.445	455.788	40.473.915	40.929.703	72.598.742	113.528.445	T.A 2008
8	Yayasan Pengembangan BUMN	Meneg BUMN	14.117.777	12.854			14.130.631				14.130.631	14.130.631	T.A 2008
TOTAL			143.523.873	79.147.357	5.730.925	16.786.650	245.188.805	28.274.133	66.969.049	102.925.775	142.263.030	245.188.805	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN YAYASAN
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
Per 31 Desember 2010
(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Badan Hukum Milik Negara	Pendapatan Operasional	Pendapatan Non Operasional	Total Pendapatan	Beban Operasional	Beban Non Operasional	Total Beban	Surplus (Defisit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(5)-(8)
1	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	49.815.441	-	49.815.441	45.224.448	-	45.224.448	4.590.993
2	Yayasan Sarana Wana Jaya/ Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti	48.734.200	-	48.734.200	45.844.853	-	45.844.853	2.889.347
3	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	4.633.504	-	4.633.504	3.195.078	-	3.195.078	1.438.426
4	Yayasan Bhumi Bhakti Adiguna	185.502	-	185.502	1.202.467	2.024.511	3.226.978	(3.041.476)
5	Yayasan Gedung Arsip Nasional RI	-	-	-	-	-	-	-
6	Yayasan Yustisia Dharmayukti Karini	-	-	-	-	-	-	-
7	Yayasan Purna Bhakti (YARNATI)	-	-	-	-	-	-	-
8	Yayasan Pengembangan BUMN	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		103.368.647	-	103.368.647	95.466.846	2.024.511	97.491.357	5.877.290

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS (DEFISIT)
Periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010
BERDASARKAN SAK

No	Jenis Layanan	KEMENTERIAN/SATKER	Pendapatan dan Sumbangan Tidak Terikat				Total Pendapatan 8 = 4+5+6+7	Beban Usaha 8 = 4+5+6+7	Surplus (Defisit) Solm Disort ke Kas Negara 10=8-9	Setor Ke Kas Negara 11	Surplus (Defisit) dengan APBN 12	Surplus (Defisit) tanpa APBN 13	Keterangan 14
			Operasional 4	Non Operasional 5	APBN 6	Hibah 7							
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7	8 = 4+5+6+7	10=8-9	11	12	13	14
1	Pengadaan Barang dan/atau Jasa	KEMENTERIAN KESEHATAN (024)											
		1 RS. Cipto Mangunkusumo, Jakarta	528.559.133.621	26.183.817.716	354.273.165.541		909.016.116.878	743.002.645.744	166.013.471.134		166.013.471.134	(188.259.694.407)	
		2 RSUP Fatmawati, Jakarta	275.905.723.202	2.860.102.949	123.860.708.666	381.519.283	403.008.054.100	403.315.883.724	(307.829.624)	-	(307.829.624)	(124.168.538.290)	
		3 RSUP Persahabatan, Jakarta	137.094.912.366	37.625.858.291	71.924.577.871	-	246.645.148.528	250.978.672.882	(4.333.524.354)	-	(4.333.524.354)	(76.258.102.225)	
		4 RS JPD Harapan Kita, Jakarta	499.899.983.860	-	51.774.254.291	9.511.136.632	561.185.374.783	528.951.087.995	32.234.286.788		32.234.286.788	(19.539.967.503)	
		5 RSAB Harapan Kita, Jakarta	134.635.481.000	8.235.037.000	75.022.985.000	-	217.893.503.000	220.652.339.000	(2.758.836.000)	-	(2.758.836.000)	(76.905.348.000)	
		6 RS Kanker Dharmas, Jakarta	238.362.445.358	7.749.431.937	51.406.548.167	-	297.518.425.462	289.257.585.830	28.260.839.632	-	28.260.839.632	(23.145.708.535)	
		7 RS. Hasan Sadikin, Bandung	293.585.741.914	490.927.465.722	110.789.004.163	4.500.000.000	899.802.211.799	453.326.784.110	446.475.427.689		446.475.427.689	(137.433.304.176)	
		8 RS Kariadi, Semarang	274.011.262.184	8.247.603.679	100.765.427.333	-	383.024.293.196	331.762.679.416	51.261.613.780	-	51.261.613.780	(49.503.813.553)	Audited
		9 RS Sardjito, Yogyakarta	244.475.770.358	1.770.601.207	95.432.730.421	-	341.679.101.987	523.309.901.373	(181.630.799.386)		(181.630.799.386)	(277.063.529.807)	
		10 RSUP Sanglah, Denpasar	232.695.821.459	3.703.854.601	101.846.751.779	6.530.123.500	344.776.351.339	310.570.227.602	34.206.123.737		34.206.123.737	(67.640.628.042)	
		11 RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar	211.042.247.540	13.705.156.573	108.174.613.365	-	332.922.017.478	239.350.010.741	93.572.006.737		93.572.006.737	(14.602.606.628)	
		12 RS Djamil, Padang	108.462.576.044	3.220.607.058	78.690.990.650	664.230.000	191.038.403.752	248.961.489.786	(57.923.086.034)		(57.923.086.034)	(136.614.076.684)	
		13 RS Muhammad Hoesin, Palembang	232.534.101.535	7.196.382.027	86.091.040.168	-	325.821.523.730	282.707.379.932	43.114.143.798	-	43.114.143.798	(42.976.896.370)	
		14 RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso, Jakarta	17.276.831.139	321.223.537	60.018.459.574	-	77.616.514.250	68.032.312.085	9.584.202.165		9.584.202.165	(60.434.257.409)	
		15 RSD Prof.Dr.R.Soeharso, Surakarta	62.306.492.151	300.065.065	71.559.834.094	-	134.166.391.310	137.587.537.283	(3.421.145.973)		(3.421.145.973)	(74.980.080.087)	Berdasar SAP
		16 RSU Prof.Dr.R.D. Kandow, Manado	58.427.769.111	5.744.599.275	83.539.865.000	11.222.256.000	158.934.499.386	133.957.538.362	24.976.951.024		24.976.951.024	(58.562.913.976)	
		17 RSU Dr. Soeradij Tirtonegoro, Klaten	56.134.999.922	19.800.553.551	47.748.612.149	5.866.585.671	129.550.751.293	117.510.152.606	12.040.598.687		12.040.598.687	(35.708.013.462)	
		18 RS Paru Ario Wirawan, Salatiga	19.428.854.439	-	18.801.809.521	-	38.230.663.960	34.125.678.484	4.104.985.476		4.104.985.476	(14.696.824.045)	
		19 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung	13.663.150.586	264.158.817	16.385.997.233	-	30.313.306.636	25.058.140.956	5.255.165.680		5.255.165.680	(11.130.831.553)	
		20 RS Mata Cicendo, Bandung	42.642.813.114	6.772.077.938	25.168.516.267	-	74.583.407.319	71.591.249.959	2.992.157.360		2.992.157.360	(22.176.356.907)	
		21 RSJ Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta	15.235.619.396	-	31.931.278.270	-	47.166.897.666	39.948.478.949	7.218.418.717	-	7.218.418.717	(24.12.859.553)	
		22 RS Jiwa Dr. Soeroyo, Magelang	28.107.671.145	116.990.166	46.325.977.331	-	74.550.638.642	74.443.894.533	106.744.109		106.744.109	(46.219.233.222)	Berdasar SAP
		23 RS. DR. H. Marzuki Mahdi, Bogor	72.942.838.561	2.762.527.365	49.532.971.779	-	125.238.337.705	126.465.448.051	(3.227.110.346)		(3.227.110.346)	(52.760.082.125)	
		24 RS Adam Malik, Medan	264.989.718.027	169.610.713.147	217.124.661.055	-	651.725.092.229	358.964.420.661	292.760.671.568		292.760.671.568	75.836.010.513	
		25 RS Ketergantungan Obat, Jakarta	7.456.360.991	186.736.599	24.070.672.420	-	31.713.770.010	37.193.349.283	(5.479.579.273)		(5.479.579.273)	(29.550.251.693)	
		26 RS Paru Dr. M. Cumanan, Cisarua Bogor	15.322.951.183	7.106.807.689	24.733.169.062	-	47.162.727.944	47.974.560.049	(811.832.105)		(811.832.105)	(25.645.001.167)	Audited
		27 RSUP Rujukan Stroke Nasional, Bukittinggi	18.200.602.848	398.679.515	30.266.517.639	17.612.500	48.883.412.302	39.910.019.204	8.973.393.098	8.900.000	8.964.493.098	(21.302.024.541)	
		28 RS Jiwa Radjiman W., Lawang	25.760.919.602	180.853.387	49.663.062.423	-	75.604.835.412	69.411.243.802	6.193.391.610		6.193.391.610	(43.469.670.813)	
		29 RS Kusta Dr.Tajuddin Chalid Makassar	6.716.885.527	130.161.000	17.708.775.263	-	24.555.821.790	26.389.382.857	(1.833.561.067)		(1.833.561.067)	(19.542.336.330)	
		30 RS Kusta Dr. Rivali Abdullah Palembang	5.322.865.736	201.690.081	23.299.282.758	-	28.823.838.575	23.442.200.123	5.381.638.452	4.625.940.383	755.698.069	(22.543.584.689)	SAP
		31 RS Kusta Sitanela Tangerang	10.714.271.769	70.410.381	21.495.723.000	-	32.280.405.150	28.616.842.425	3.663.562.725		3.663.562.725	(17.832.160.275)	
		32 Politeknik Kesehatan Jakarta III	15.500.492.383	-	43.337.703.966	86.000.004	58.924.196.353	25.464.045.417	33.460.150.936	969.327.262	32.490.823.674	(10.846.880.292)	
		33 Politeknik Kesehatan Bandung	27.522.856.850	-	-	-	27.522.856.850	16.867.907.594	10.654.949.256		10.654.949.256	10.654.949.256	
		34 Politeknik Kesehatan Medan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		35 Politeknik Kesehatan Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		36 Politeknik Kesehatan Makassar	10.902.307.271	-	27.067.821.567	-	37.970.128.838	35.234.461.427	2.735.667.411		2.735.667.411	(24.332.154.156)	
		37 Politeknik Kesehatan Jakarta II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		38 Balai Besar Labkes Palembang	2.183.045.890	100.504.300	-	-	2.283.550.190	8.316.367.628	(6.032.817.438)		(6.032.817.438)	(6.032.817.438)	Sesuai SAP
		39 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	1.035.000.500	-	11.206.257.243	-	12.241.257.743	7.358.071.143	4.883.186.600		4.883.186.600	(6.323.070.643)	
		40 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makasar	1.686.903.120	14.246.271	6.696.404.559	-	8.397.553.950	10.400.970.100	(2.003.416.150)	209.016.250	(2.212.432.400)	(8.908.836.959)	
		41 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	3.554.729.920	523.398.806	9.138.733.385	-	13.216.862.111	11.225.455.685	1.991.406.426		1.991.406.426	(7.147.326.959)	SAP
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)											
		1 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta	23.528.029.547	1.289.707.581	76.724.778.715	2.924.608.622	104.467.124.465	63.513.970.515	40.953.153.950	3.986.893.617	36.966.260.333	(39.758.518.382)	
		KEMENTERIAN PERTANIAN (018)											
		1 Pusat Veterinaria Farma Surabaya	2.979.868.036	63.897.100	988.168.980	-	4.031.934.116	988.168.980	3.043.765.136		3.043.765.136	2.055.596.156	
		2 Balai Besar Inseminasi Buatan Simposari Malang	1.212.135.000	100.186.275	9.921.809.586	-	11.234.130.861	10.409.977.786	824.153.075	1.312.321.275	(488.168.200)	(10.409.977.786)	SAP
		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)											
		1 Akademi Kimia Analis (AKA), Bogor	5.803.075.000	388.689.125	6.686.466.772	-	12.878.230.897	16.002.882.687	(3.124.651.790)	4.900.000	(3.129.551.790)	(9.816.018.562)	biaya 243.408.146 ~ pelepasan Ativa tetap, setoran 4.900.000 ~ PNBP hasil lelang
		2 Balai Besar Industri Agro	17.273.949.200	-	15.190.209.271	-	32.464.158.471	28.024.679.459	4.439.479.012		4.439.479.012	(10.750.730.259)	
		3 Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung	11.287.662.648	39.882.597	9.709.078.378	-	21.036.623.623	20.137.379.739	899.243.884		899.243.884	(8.809.834.494)	
		4 Balai Besar Tek Pencegahan & Pencemaran Industri	6.647.630.514	21.549.260	8.278.796.729	-	14.947.976.503	12.851.342.739.00	2.096.633.764	115.591.444	1.981.042.320	(6.297.754.409)	
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)											
		1 Universitas Diponegoro, Semarang	322.543.738.799	8.185.464.533	350.206.460.131	-	680.935.663.463	645.960.285.530	34.975.377.933		34.975.377.933	(315.231.082.198)	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS (DEFISIT)
Periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010
BERDASARKAN SAK

2 Universitas Padjadjaran, Bandung	436.559.931.547	18.461.558.334	256.162.843.334	-	711.184.333.215	826.574.238.382	(115.389.905.167)	(115.389.905.167)	(371.552.748.501)
3 Universitas Negeri Malang, Malang	115.534.633.344	95.784.982.629	198.301.228.390	1.296.278.500	410.917.122.863	288.122.703.167	122.794.419.696	122.794.419.696	(75.608.808.694)
4 Universitas Hasanuddin, Makassar	176.704.273.064	48.671.248.958	458.565.045.167	5.354.195.048	689.294.762.237	728.293.987.395	(38.999.225.158)	(38.999.225.158)	(497.564.270.325)
5 Universitas Brawijaya, Malang	333.867.051.594	83.144.806.225	347.366.495.046	992.093.089	765.370.245.954	522.154.947.828	243.215.298.126	243.215.298.126	(104.151.196.920)
6 Universitas Negeri Semarang, Semarang	128.696.249.553	2.217.265.643	227.614.115.023	-	358.527.630.219	241.888.612.955	116.639.017.264	116.639.017.264	(110.975.097.759)
7 Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	205.140.521.358	16.304.773.136	255.511.334.919	9.000.000	476.965.629.413	431.906.555.636	45.059.073.777	45.059.073.777	(210.452.261.142)
8 Universitas Mulawarman Samarinda	86.437.224.175	3.005.973.331	218.768.953.765	83.972.367	308.296.123.638	582.439.907.155	(274.143.783.518)	(274.143.783.518)	(492.912.737.283)
9 Universitas Sebelas Maret Surakarta	180.508.895.189	4.629.996.817	244.734.002.610	-	429.872.894.616	428.549.649.225	1.323.245.391	1.323.245.391	(243.410.757.219)
10 Universitas Lampung	81.695.144.609	286.370.569	177.483.221.095	-	259.464.736.273	255.018.636.975	4.446.099.298	4.446.099.298	(173.037.121.797)
11 Universitas Negeri Yogyakarta	178.656.962.704	9.662.979.148	185.890.842.201	-	374.210.784.053	323.516.709.839	50.694.074.214	50.694.074.214	(135.196.767.987)
12 Universitas Negeri Surabaya	89.520.941.500	68.399.506.712	172.215.442.938	925.000.000	331.060.891.150	250.832.375.850	80.228.515.300	80.228.515.300	(91.986.927.638)
13 Universitas Negeri Gorontalo	36.058.465.500	-	99.316.027.075	4.713.044.298	140.088.536.873	142.310.104.434	(2.221.567.561)	(2.221.567.561)	(101.537.594.636)
14 Universitas Bengkulu	55.702.252.500	510.810.088	111.074.569.156	-	167.287.431.744	142.912.870.901	24.374.560.843	24.374.560.843	(86.700.008.319)
15 Universitas Sriwijaya	149.171.156.153	22.667.154.042	254.384.209.190	1.500.000.000	427.722.519.385	323.791.185.967	103.931.333.418	103.931.333.418	(150.452.875.772)
16 Universitas Negeri Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Universitas Andalas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Universitas Jenderal Soedirman	122.120.619.248	1.786.245.383	203.286.568.292	18.872.032.845	346.065.465.768	251.479.283.154	94.586.182.614	94.586.182.614	(108.700.385.678)
19 Universitas Haluoleo Kendari	51.776.306.820	2.733.186.680	134.113.635.330	-	188.623.128.830	182.540.478.120	6.082.650.710	6.082.650.710	(128.030.984.620)
20 Universitas Riau	108.044.033.020	608.118.636	195.541.564.242	-	304.193.716.098	299.093.585.483	5.100.130.615	5.100.130.615	(190.441.433.627)
KEMENTERIAN AGAMA (025)									
1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	38.093.408.044	11.851.339.768	102.073.238.031	-	152.017.985.843	109.996.139.918	42.021.845.925	42.021.845.925	(60.051.392.106)
2 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	98.034.189.047	7.388.779.657	223.404.809.535	144.000.000	328.981.578.239	236.504.855.720	92.476.722.519	92.476.722.519	(130.927.887.016)
3 UIN Malang	30.904.135.020	286.695.242	102.237.162.686	-	133.427.992.948	136.311.599.324	(2.883.606.376)	(2.883.606.376)	(105.120.769.062)
4 UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	27.786.316.675	55.238.570	110.704.967.508	-	138.546.522.753	136.152.292.896	2.394.229.857	2.394.229.857	(108.310.737.651)
5 UIN Alauddin, Makassar	29.723.028.329	292.859.551	260.892.753.623	-	290.908.641.503	97.005.390.061	193.903.251.442	193.903.251.442	(66.989.502.181)
6 IAIN Sumatera Utara	14.167.968.598	694.564.891	60.001.272.887	-	74.863.806.376	74.168.787.067	695.019.309	695.019.309	(59.306.253.578)
7 UIN Walisongo Semarang	16.704.091.623	-	71.168.464.363	6.351.931.695	94.224.487.681	68.795.057.728.00	25.429.429.953	25.429.429.953	(45.739.034.410)
8 UIN Sultan Syarif Kasim Riau	41.473.253.000	-	71.933.941.000	-	113.407.194.000	110.014.153.746	3.393.040.254	3.393.040.254	(68.540.900.746)
9 IAIN Sulthan Thoha Saifudin	15.226.506.744	32.530.000	43.836.385.719	-	59.095.422.463	10.541.197.337	48.554.225.126	48.554.225.126	4.717.639.407
10 IAIN Sunan Ampel	29.047.174.904	960.118.357	171.779.046.418	-	201.786.339.679	192.518.864.994	9.267.474.685	9.267.474.685	(162.511.571.733)
11 IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	11.066.108.375	137.250.000	43.798.557.631	-	55.001.915.906	51.715.744.506	3.286.171.400	3.286.171.400	(40.512.386.131)
12 IAIN Raden Intan Lampung	6.944.580.030	34.480.347	51.921.136.910	480.791.750	59.380.989.037	41.782.539.972	17.598.449.065	17.598.449.065	(34.322.687.845)
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (026)									
1 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri	2.835.429.835	25.412.175	18.925.672.212	-	21.786.514.222	17.833.334.832	3.953.179.390	184.993.161	3.768.186.229
2 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri	2.260.069.170	-	20.767.853.427	-	23.027.922.597	22.941.505.518	86.417.079	86.417.079	(20.681.436.348)
3 Balai Besar Latihan Kerja Industri, Serang	417.631.764	112.089.000	14.474.441.473	-	15.004.162.237	14.839.863.073	164.299.164	139.731.236	24.567.928
KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI (042)									
1 PP IPTK	4.752.682.350	266.059.333	3.523.923.876	-	8.542.665.559	8.537.059.228	5.608.331	-	5.608.331
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)									
1 Lembaga Layanan Pemasaran - KUKM	21.870.897.815	355.714.483	19.175.085.217	-	41.401.697.515	33.723.333.076	7.678.364.439	-	7.678.364.439
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (059)									
1 Balai Telekomunikasi dan Informasi Pedesaan (BTIP)	1.366.551.545.147	163.934.554.029	1.295.847.809	-	1.531.781.946.985	331.484.585.521	1.200.297.361.464	-	1.200.297.361.464
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (060)									
1. RS. Bhayangkara R. Said Sukanto Jak-Tim	25.906.747.566	677.725.279	-	-	26.584.472.845	24.796.114.600	1.788.358.245	-	1.788.358.245
2. RS. Bhayangkara Tk.III Kediri	19.461.034.498	4.885.410.537	-	-	24.346.445.035	21.535.129.832	2.811.315.203	-	2.811.315.203
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI									
1. BPPT Enjiniring	56.993.527.832	796.331.902	1.131.722.306	-	58.921.582.040	55.659.676.503	3.261.905.537	-	3.261.905.537
LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKASA NASIONAL (082)									
1 Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (FATEKGAN)	5.931.225.948	70.565.681	499.546.500	-	6.501.338.129	5.994.794.985	506.543.144	-	506.543.144
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN									
1 Balai Besar Pendidikan Penyelenggaraan & Peningkatan Ilmu	38.355.099.000	1.478.604.678	16.721.525.475	22.000.000	56.577.229.153	45.951.042.837	10.626.186.316	-	10.626.186.316
2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	48.658.571.950	2.081.009.293	52.739.068.606	-	103.488.849.849	99.149.513.598	4.339.136.251	-	4.339.136.251
3 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	23.357.358.600	187.592.800	52.953.236.408	-	76.498.187.808	40.547.443.783	35.950.744.025	1.672.093.000	34.278.851.025
4 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	18.484.870.897	-	130.430.155.932	-	148.915.026.829	48.352.979.935	100.562.046.894	-	100.562.046.894
5 Badan Diklat Transportasi Darat (BPPTD) Tegal	2.239.295.469	218.600.000	21.730.566.891	-	24.188.462.360	15.869.209.835	8.319.252.525	-	8.319.252.525
KEMENTERIAN ESDM									
1 Puslitbang Teknologi Minyak & Gas Bumi	17.842.929.724	19.560.803.171	316.866.635.372	-	354.270.368.267	322.956.032.422	31.314.335.845	-	31.314.335.845
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT (091)									
1 Pusat Pembiayaan Perumahan Jakarta	16.051.711.499	-	-	-	16.051.711.499	-	16.051.711.499	-	16.051.711.499
TOTAL PER DEPARTEMEN									
KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	23.528.029.547	1.289.707.581	76.724.778.715	2.924.608.622	104.467.124.465	63.513.970.515	40.953.153.950	3.986.893.617	36.966.260.333

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS (DEFISIT)
Periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010
BERDASARKAN SAK

		KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	2.979.868.036	63.897.100	988.168.980	-	4.031.934.116	988.168.980	3.043.765.136	-	3.043.765.136	2.055.596.156
		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)	41.012.317.362	450.120.982	39.864.551.150	-	81.326.989.494	77.016.284.624	4.310.704.870	120.491.444	4.190.213.426	(35.674.337.724)
		KEMENTERIAN KESEHATAN (024)	4.214.302.151.422	826.031.515.660	2.366.874.902.973	38.779.463.590	7.445.988.033.646	6.383.636.416.801	1.062.351.616.845	5.813.183.895	1.066.538.432.950	(1.782.579.724.725)
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)	2.858.739.400.677	387.080.041.064	4.090.536.557.904	33.745.616.147	7.370.081.615.792	6.867.386.117.996	502.695.497.795	-	502.695.497.795	(3.587.841.060.109)
		KEMENTERIAN AGAMA (025)	359.170.760.389	21.743.856.383	1.313.751.536.211	6.976.723.445	1.701.642.876.428	1.265.506.623.289	436.136.253.159	-	436.136.253.159	(877.615.283.052)
		KEMENTERIAN NEGARA RISTEK (042)	4.752.682.350	266.059.333	3.523.923.876	-	8.542.685.559	8.537.059.228	5.606.331	-	5.606.331	(3.518.317.545)
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)	21.870.897.815	355.714.483	19.175.085.217	-	41.401.697.515	33.723.333.076	7.678.364.439	-	7.678.364.439	(11.496.720.778)
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN	1.366.551.545.147	163.934.554.029	1.295.847.809	-	1.531.781.946.985	331.484.585.521	1.200.297.361.464	-	1.200.297.361.464	1.199.001.513.655
		POLISI REPUBLIK INDONESIA (060)	45.367.782.064	5.563.135.816	-	-	50.930.917.880	46.331.244.432	4.599.673.448	-	4.599.673.448	4.599.673.448
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN	56.993.527.832	796.331.902	1.131.722.306	-	58.921.582.040	55.659.676.503	3.261.905.537	-	3.261.905.537	2.130.183.231
		LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL	5.931.225.948	70.565.681	499.546.500	-	6.501.338.129	5.994.794.985	506.543.144	-	506.543.144	6.996.644
		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	131.085.195.916	3.975.806.771	274.574.553.312	22.000.000	409.667.555.999	249.870.189.988	159.797.366.011	1.672.093.000	158.125.273.011	(116.449.280.301)
		KEMENTERIAN ESDM	17.842.929.724	19.560.803.171	316.866.635.372	-	354.270.368.267	322.956.032.422	31.314.335.845	-	31.314.335.845	(285.552.299.527)
		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	16.051.711.499	-	-	-	16.051.711.499	-	16.051.711.499	-	16.051.711.499	16.051.711.499
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENYEDIAAN BARANG DAN	9.139.682.128.145	1.429.808.505.275	8.428.094.862.630	79.523.803.182	19.077.109.299.232	15.648.102.358.845	3.429.006.940.387	7.605.768.339	3.421.401.172.048	(5.478.936.945.284)
2	Pengelolaan Wilayah Kawasan	SEKRETARIAT NEGARA (007)										
		1. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno PPK	101.082.937.595	13.216.439.270	-	-	114.299.376.865	144.014.394.868	(29.715.018.003)	15.967.158.495	(45.682.176.498)	(45.682.176.498)
		2. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), Jakarta	112.206.949.746	26.686.159.324	-	-	138.893.109.070	108.355.649.100	30.537.459.970	-	30.537.459.970	30.537.459.970
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN WILAYAH/KAW	213.289.887.341	39.902.598.594	-	-	253.192.485.935	252.370.043.968	822.441.967	15.967.158.495	(15.144.716.528)	(15.144.716.528)
3	Pengelolaan Dana Khusus	KEMENTERIAN KEUANGAN (015)										
		1. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	52.915.962.417	304.978.185.250	3.728.350.388	525.000.000	362.147.498.055	12.561.684.698	349.585.813.357	17.870.403	349.567.942.954	345.839.592.566
		KEMENTERIAN KEHUTANAN (029)										
		1. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	2.432.957	112.709.592.659	6.045.456.722	-	118.757.482.338	6.294.096.454	112.463.385.884	112.709.592.659	(246.206.775)	(6.291.663.497)
		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (033)										
		1. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	109.185.657.381	25.267.693.877	-	-	134.453.351.259	42.545.707.725	91.907.643.534	-	91.907.643.534	91.907.643.534
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)										
		1. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	19.690.803.337	50.120.109.023	2.534.736.687	-	72.345.649.047	17.895.531.313	54.450.117.734	-	54.450.117.734	51.915.381.047
		TOTAL PER DEPARTEMEN										
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	52.915.962.417	304.978.185.250	3.728.350.388	525.000.000	362.147.498.055	12.561.684.698	349.585.813.357	17.870.403	349.567.942.954	345.839.592.566
		KEMENTERIAN KEHUTANAN (029)	2.432.957	112.709.592.659	6.045.456.722	-	118.757.482.338	6.294.096.454	112.463.385.884	112.709.592.659	(246.206.775)	(6.291.663.497)
		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (033)	109.185.657.381	25.267.693.877	-	-	134.453.351.259	42.545.707.725	91.907.643.534	-	91.907.643.534	91.907.643.534
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)	19.690.803.337	50.120.109.023	2.534.736.687	-	72.345.649.047	17.895.531.313	54.450.117.734	-	54.450.117.734	51.915.381.047
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN DANA	181.794.856.092	493.075.580.809	12.308.543.797	525.000.000	687.703.980.699	79.297.020.190	608.406.960.509	112.727.463.062	495.679.497.447	483.370.953.650
		TOTAL SELURUH JENIS PELAYANAN	9.534.766.871.578	1.962.786.684.679	8.440.403.406.427	80.048.803.182	20.018.005.765.866	15.979.769.423.003	4.038.236.342.863	136.300.389.896	3.901.935.952.967	(5.010.710.708.162)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

Per 31 Desember 2010

BERDASARKAN SAK

No	JENIS LAYANAN	BIDANG/ESEKON I/SATKER	ASET											
			Aset Lancar			Aset Tetap								
			Kas & Setara Kas	Piutang	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(Akumulasi Penyusutan Aset Tetap)	Total Aset Tetap	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
1	Penyediaan Barang	KEMENTERIAN KESEHATAN												
		1 RS. Cipto Mangunkusumo, Jakarta	209.381.144.049	86.636.564.687	40.517.446.658	822.019.863.330	488.122.116.281	610.988.877.613	11.840.526.585	91.744.945.925	12.837.432.705	349.278.571.418	1.688.275.191.021	
		2 RSUP Fatmawati, Jakarta	22.246.823.279	17.877.060.571	7.747.189.004	104.330.980.000	190.968.288.208	92.250.426.440	-	39.416.040.883	-	155.540.137.769	271.425.597.762	
		3 RSUP Persahabatan, Jakarta	32.428.432.728	27.810.414.674	11.643.880.651	3.717.751.330	84.242.057.946	52.938.864.463	-	-	-	64.831.500.877	76.067.172.862	
		4 RS JPD Harapan Kita, Jakarta	120.122.317.794	53.159.063.377	23.260.526.012	11.060.000.000	277.812.035.242	99.836.756.304	24.952.908.543	131.097.600	0	184.522.953.979	229.269.843.710	
		5 RSAB Harapan Kita, Jakarta	18.946.147.000	7.583.220.000	11.715.884.000	983.956.516.000	100.013.125.000	189.868.708.000	317.525.000	-	2.936.536.000	35.914.118.000	1.241.178.292.000	
		6 RS Kanker Dharmas, Jakarta	41.647.309.716	41.730.261.312	7.588.378.228	505.675.440.000	154.268.083.527	348.093.449.986	-	848.444.046	37.038.111.434	135.284.507.313	910.639.021.680	
		7 RS. Hasan Sadikin, Bandung	47.384.961.094	35.013.406.675	16.166.202.922	439.787.149.120	318.435.637.612	257.050.352.893	-	-	-	260.543.824.015	754.729.315.610	
		8 RS Kariadi, Semarang	174.922.810.158	31.927.036.887	15.446.274.056	700.546.782.400	225.226.962.278	158.992.072.841	-	293.637.200	-	205.718.810.371	879.340.644.348	
		9 RS Sardjito, Yogyakarta	91.030.947.680	22.831.366.178	20.665.366.946	-	333.221.567.745	208.755.596.001	245.928.079	17.539.663.500	16.517.812.032	209.383.352.066	366.897.215.291	
		10 RSUP Sanglah, Denpasar	39.784.270.489	50.486.506.781	6.034.075.892	246.885.258.000	200.809.111.544	155.401.565.949	113.712.002	8.676.721.453	-	167.981.367.190	443.905.001.758	
		11 RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar	30.593.766.729	35.880.545.868	9.480.647.214	85.777.504.000	144.593.145.400	215.027.601.155	-	48.003.223.954	15.418.702.170	64.115.642.490	444.704.534.189	
		12 RS Djamil, Padang	5.712.230.442	9.133.511.309	15.612.256.923	8.813.797.910	343.119.979.234	56.972.196.166	1.820.831.995	23.282.413.900	11.701.000.000	315.683.971.533	130.026.247.672	
		13 RS Muhammad Hoesin, Palembang	71.412.766.360	60.277.737.010	4.818.566.518	691.718.562.500	121.395.654.363	143.942.976.115	153.691.936	17.252.035.549	4.572.934.845	133.908.472.128	845.127.383.180	
		14 RSPI Prof.DR. Suliarti Saroso, Jakarta	5.855.171.678	1.975.904.377	3.308.255.151	-	65.753.152.614	58.936.907.686	257.581.445	-	341.322.960	8.598.220.938	116.690.743.767	
		15 RSD Prof.DR.R.Soeharso, Surakarta	31.108.710.739	5.049.883.677	3.864.185.785	201.089.570.000	103.712.811.990	57.622.215.000	58.672.000	935.777.800	2.161.584.676	-	365.580.611.466	
		16 RSU Prof.Dr.R.D. Kandow, Manado	31.723.339.840	3.721.060.939	1.323.936.986	12.076.257.878	97.086.631.918	75.817.175.830	-	43.976.439.385	14.790.058.450	71.524.597.566	172.221.965.895	
		17 RSU Dr. Soerodji Tirtonegoro, Klaten	35.521.522.099	26.333.362.164	11.459.615.215	82.391.025.000	92.500.550.040	45.420.479.312	5.592.195.120	-	-	62.229.626.953	163.674.622.519	
		18 RS Paru Arie Wirawan, Salatiga	23.604.863.945	2.758.604.262	8.155.147.913	35.893.000.000	27.768.380.914	17.750.567.682	995.468.970	-	-	15.822.803.287	66.584.614.259	
		19 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung	12.966.728.046	587.557.585	2.508.512.772	176.280.000.000	14.225.470.865	27.943.763.000	1.285.201.641	-	-	22.610.352.517	197.124.082.989	
		20 RS Mata Cicendo, Bandung	14.429.360.712	1.839.340.121	8.675.156.843	35.097.950.000	63.007.933.543	23.517.417.446	11.530.650	192.398.000	105.025.460	43.776.437.704	78.155.817.395	
		21 RSJ Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta	4.319.073.461	2.389.755.042	13.749.030.696	335.598.750.000	19.391.566.975	18.502.206.382	325.497.750	-	2.761.330.700	25.223.769.802	351.355.582.005	
		22 RS Jiwa Dr. Soeroyo, Magelang	4.947.632.967	16.292.804.899	499.151.066	555.024.500.000	26.148.859.789	42.732.326.856	31.441.685	2.359.327.750	3.917.047.330	-	630.213.503.410	
		23 RS. DR. H. Marzuki Mahdi, Bogor	6.845.453.553	9.911.291.300	3.784.386.651	387.952.507.620	54.183.606.006	56.551.485.960	535.615.300	-	6.495.530.890	31.135.403.712	474.583.342.064	
		24 RS Adam Malik, Medan	106.171.981.995	61.036.457.156	22.706.095.823	44.387.714.000	216.351.388.893	246.242.741.042	48.864.187.730	31.529.728.500	-	178.492.731.301	408.883.028.864	
		25 RS Ketergantungan Obat, Jakarta	1.201.361.550	308.057.336	2.917.028.900	0	32.164.782.171	26.801.609.125	0	0	5.747.605.862	38.348.497.423	26.165.499.735	
		26 RS Paru Dr. M. Gunawan, Cisarua Bogor	11.809.304.840	1.842.291.734	2.791.162.957	17.051.953.000	37.876.882.287	23.575.184.143	0	0	2.410.448.925	26.027.426.677	54.887.041.678	
		27 RSUP Rujukan Stroke Nasional, Bukittinggi	3.773.718.269	1.021.772.391	2.819.819.241	12.380.712.000	35.491.976.126	15.091.433.575	-	-	3.451.790.987	8.954.973.150	57.460.939.538	
		28 RS Jiwa Radjiman W., Lawang	7.655.217.632	2.950.075.401	4.937.424.364	668.796.800	44.755.653.105	21.374.221.305	6.852.082.087	0	15.000.000	34.109.441.810	39.556.311.487	
		29 RS Kusta Dr.Tadjuddin Chalid Makassar	283.323.265	175.975.215	724.525.145	43.053.220.000	18.838.233.559	21.576.621.150	2.806.059.500	-	-	17.700.080.868	68.574.053.341	
		30 RS Kusta Dr. Rival Abdullah Palembang	5.069.545.208	43.634.330	1.290.101.925	7.772.630.400	16.286.644.178	13.496.351.227	49.700.000	-	890.590.251	-	38.495.916.056	
		31 RS Kusta Sitanala Tangerang	5.817.400.702	4.789.581.171	3.602.871.544	315.174.345.000	30.920.290.000	23.299.615.896	25.285.000	-	79.258.000	17.524.023.912	351.974.769.984	
		32 Politeknik Kesehatan Jakarta III	8.866.162.604	1.165.878.004	371.668.945	38.343.206.000	25.854.845.779	14.573.300.000	345.965.642	71.746.073.268	220.069.700	-	151.083.460.389	
		33 Politeknik Kesehatan Bandung	10.654.949.256	-	229.316.166	293.471.167.707	32.516.816.463	99.359.044.267	1.734.598.570	-	1.268.755.679	-	428.350.382.686	
		34 Politeknik Kesehatan Medan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		35 Politeknik Kesehatan Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		36 Politeknik Kesehatan Makassar	2.735.667.411	43.200.000	47.635.550	70.503.899.860	22.166.546.433	55.551.671.053	572.683.512	44.194.278.221	40.023.665	0	193.029.102.744	
		37 Politeknik Kesehatan Jakarta II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		38 Balai Besar Labkes Palembang	365.918.690	137.015.500	236.107.756	-	11.435.791.462	3.019.958.693	-	-	696.028.000	-	15.151.778.155	
		39 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	212.279.600	134.875.000	4.300.000	-	13.620.201.281	1.231.748.000	286.203.920	5.548.533.000	-	-	20.686.686.201	
		40 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makasar	597.267.439	10.954.100	716.149.357	4.840.000.000	9.463.657.430	6.641.244.700	595.802.000	-	-	4.912.347.982	16.628.356.148	
		41 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	719.938.947	-	586.919.125	-	13.991.330.069	2.314.000.000	-	-	-	-	16.305.330.069	
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)												
		1	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta	14.934.545.649	634.969.263	1.246.384.388	545.192.062.827	25.188.119.684	144.602.362.963	8.709.761.480	18.325.236.185	16.489.183.360	42.575.622.692	715.931.103.807
		KEMENTERIAN PERTANIAN (018)												
		1	Pusat Veterinaria Farma Surabaya	2.055.596.156	-	129.763.500	613.309.599.926	32.851.018.445	19.760.555.230	18.784.000	-	1.192.340.753	-	667.132.298.354
		2	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Malang	90.965.640	-	1.425.138.500	33.873.500.000	7.573.580.860	8.879.949.696	394.865.040	-	6.911.433.240	-	57.633.328.836
		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)												
		1	Akademi Kimia Analis (AKA), Bogor	4.249.431.317	15.045.000	1.713.254.215	8.129.283.130	13.458.655.757	14.809.401.752	723.172.497	-	156.602.045	7.896.618.817	29.380.496.364
		2	Balai Besar Industri Agro	7.957.080.865	324.356.400	388.160.393	40.851.149.958	38.074.213.169	20.025.395.550	628.090.570	-	112.279.800	4.841.741.831	94.849.387.216
		3	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung	2.846.724.746	415.786.426	63.326.450	48.824.400.000	82.149.541.576	39.960.066.000	679.220.243	-	52.269.195	-	171.765.497.014
		4	Balai Besar Tek Pencegahan & Pencemaran Industri Semarang	372.858.807	1.078.493.883	237.355.343	15.178.000.000	12.240.213.062	2.998.044.100	35.825.000	-	21.893.500	-	30.473.975.662
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)												
		1	Universitas Diponegoro, Semarang	265.396.234.251	81.260.984.666	2.854.678.719	1.424.264.539.295	254.792.081.903	270.453.442.068	18.065.065.053	377.849.398.496	8.575.425.583	79.753.572.138	2.274.246.380.260
		2	Universitas Padjadjaran, Bandung	100.087.347.471	3.183.049.047	6.228.486.817	1.323.213.797.006	290.579.994.501	477.439.927.756	24.132.233.720	45.519.502.550	9.501.000.176	544.478.852.147	1.625.907.603.562
		3	Universitas Negeri Malang, Malang	66.263.707.475	19.838.846.264	1.083.466.224	332.727.245.000	101.893.087.012	179.901.811.333	10.961.939.340	66.732.643.000	-	-	692.216.725.685

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

Per 31 Desember 2010

BERDASARKAN SAK

No	JENIS LAYANAN	BIDANG/ESEKON I/SATKER	ASET										
			Aset Lancar			Aset Tetap							
			Kas & Setara Kas	Piutang	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(Akumulasi Penyusutan Aset Tetap)	Total Aset Tetap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
		4 Universitas Hasanuddin, Makassar	66.302.030.096	1.524.968.940	3.473.454.654	1.660.515.630.625	205.456.207.400	260.607.782.217	6.164.371.885	381.942.288.404	1.393.850.001	165.178.884.820	2.350.901.245.712
		5 Universitas Brawijaya, Malang	18.305.849.589	27.960.594.936	35.973.142.452	1.932.738.621.949	234.636.841.025	569.228.887.388	61.240.232.838	94.166.469.560	10.312.945.461		2.902.323.998.221
		6 Universitas Negeri Semarang, Semarang	76.207.714.918	1.399.579.962	2.504.995.671	444.273.087.300	95.170.483.534	204.882.941.362	16.714.402.031		10.719.531.183		771.760.445.410
		7 Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	39.048.171.949	5.232.028.091	4.161.039.694	1.413.714.589.200	73.225.185.475	152.809.750.674	4.663.236.733	56.672.119.862	19.215.284.052		1.720.300.165.996
		8 Universitas Mulawarman Samarinda	49.175.802.030	1.321.830.519	170.341.931	3.921.662.790	72.498.102.210	376.795.170.500	7.091.351.897	7.262.210.060	2.853.053.702	274.532.146.018	195.889.405.141
		9 Universitas Sebelas Maret Surakarta	81.740.774.024	1.570.083.400	4.815.844.670	1.835.395.615.000	189.742.987.225	232.199.128.630	12.398.876.723	11.229.638.650	3.549.631.300	156.268.412.070	2.128.247.465.458
		10 Universitas Lampung	29.092.928.559	334.055.625	549.390.390	197.055.395.400	122.519.949.588	145.133.370.450	3.524.298.607	20.915.399.500	2.664.630.882		491.813.044.427
		11 Universitas Negeri Yogyakarta	89.271.303.173	1.914.375.300	1.008.814.500	1.384.338.400.685	87.168.982.399	189.778.720.444	39.397.456.132	62.285.532.400	5.007.998.100	12.696.323.102	1.755.280.767.068
		12 Universitas Negeri Surabaya	41.229.760.177	11.230.314.187	791.822.915	1.232.597.105.382	75.538.383.953	182.991.326.108	11.251.620.272	40.433.589.754	15.163.424.885		1.557.975.450.354
		13 Universitas Negeri Gorontalo	9.431.686.815	-	39.431.750	60.839.934.000	76.843.870.307	78.545.286.425	8.077.548.593		8.683.487.115	2.373.912.599	230.616.213.841
		14 Universitas Bengkulu	24.724.613.613	-	981.694.030	62.845.809.000	50.066.340.532	105.024.394.990	7.048.766.580	22.101.865.160	10.068.765.260		257.156.941.522
		15 Universitas Sriwijaya	154.695.458.230	2.678.640.015	1.452.635.243	1.729.717.590.000	193.601.102.544	404.160.944.002	4.677.236.104		4.106.243.550	69.047.496.819	2.267.215.619.381
		16 Universitas Negeri Jakarta	11.221.315.924	-	1.481.342.856	1.264.777.948.301	123.863.721.106	256.922.380.575	11.966.481.884		389.942.330		1.657.920.474.196
		17 Universitas Andalas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18 Universitas Jenderal Soedirman	68.446.944.102	11.021.918.860	1.653.555.525	1.444.726.028.280	127.460.504.298	157.541.473.944	4.278.042.543	1.765.864.450	4.054.603.392	44.411.829.272	1.695.414.687.635
		19 Universitas Haluoleo Kendari	4.051.363.510	2.486.703.989	-	140.500.573.000	77.610.213.724	230.211.079.589	3.703.549.401	125.849.424.555	5.277.368.975		583.152.209.244
		20 Universitas Riau	5.100.130.615	-	40.846.921	1.408.787.132.400	74.086.451.628	121.295.728.045	4.222.526.411	25.050.685.886	15.610.722.929		1.649.053.247.299
		KEMENTERIAN AGAMA (025)											
		1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	26.083.384.687	-	122.193.161	490.068.886.800	106.534.173.069	319.418.862.920	3.035.164.535	62.101.807.049	1.520.571.500		982.679.465.873
		2 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	34.234.778.555	1.322.236.736	511.698.766	593.758.743.000	111.247.844.626	273.600.060.375	18.763.299.465	161.646.484.608	3.222.217.420	141.437.116.425	1.020.801.533.069
		3 UIN Malang	5.921.429.006	1.216.972.952	-	10.984.758.362	-	986.024.000	-	-	-	4.464.035.771	7.506.746.591
		4 UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	9.161.588.899	2.529.612.500	915.090.377	238.940.610.949	17.366.551.572	47.486.350.686	1.694.113.426	-	778.012.925	-	306.265.639.558
		5 UIN Alauddin, Makassar	14.777.513.560	25.501.292	8.931.500	299.802.740.000	356.454.639.492	58.130.126.714	3.911.739.629	285.677.172.463	24.929.748.800	-	1.028.906.167.098
		6 IAIN Sumatera Utara	2.214.694.428	33.785.000	124.203.753	177.405.012.307	13.440.511.992	65.675.086.886	1.390.995.750	54.791.000	4.476.194.500	-	262.442.592.435
		7 UIN Walisongo Semarang	7.364.792.302	-	17.521.509	236.003.145.308	16.073.835.217	42.545.924.700	2.504.183.293	-	4.464.858.770	-	301.591.947.288
		8 UIN Sultan Syarif Kasim Riau	15.457.592.876	-	37.107.993	339.700.371.575	95.105.687.266	196.751.268.222	4.298.797.990	25.484.762.462	5.540.150.000	-	666.881.017.515
		9 IAIN Sulthan Thoha Saifudin	1.519.176.407	-	23.883.000	-	2.338.651.000	442.708.000	371.233.000	-	56.280.000	-	3.208.872.000
		10 IAIN Sunan Ampel	9.787.463.579	-	316.549.006	389.329.832.391	23.010.788.017	51.227.321.720	2.364.578.533	31.237.056.450	3.818.399.384	-	500.987.976.495
		11 IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	3.295.506.734	-	823.029.466	114.910.613.000	8.077.577.320	29.210.599.225	644.679.710	-	442.151.000	-	153.285.620.255
		12 IAIN Raden Intan Lampung	2.625.111.246	-	304.315.988	144.793.343.950	15.847.573.066	42.648.351.511	2.759.464.540	-	1.500.833.100	31.332.122.001	176.217.444.166
		KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (026)											
		1 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri, Bandung	395.322.429	-	11.779.741	185.434.370.000	30.536.116.726	27.554.338.803	196.929.941	-	1.927.646.883	-	245.649.402.353
		2 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri, Bekasi	86.417.079	-	-	96.627.603.000	24.466.770.200	53.806.580.288	60.388.000	0	3.347.114.840	0	178.308.456.328
		3 Balai Besar Latihan Kerja Industri, Serang	33.304.615	116.498.580	213.840.085	13.924.200.000	10.254.043.513	18.697.829.800	114.950.000	-	655.256.500	-	43.646.279.813
		KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI (042)											
		1 PP IPTK	734.444.972	92.820.000	263.681.547	-	7.651.075.836	-	475.252.500	-	-	-	8.126.328.336
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)											
		1 Lembaga Layanan Pemasaran - KUKM	20.105.411.940	2.099.040.018	52.058.200	-	75.123.661.680	535.660.599.784	1.330.859.000	-	55.322.000	5.352.710.224	606.817.732.250
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (059)											
		1. Balai Telekomunikasi dan Informasi Perdesaan (BTIP)	3.716.639.149.586	867.395.484	202.950.000	-	23.232.224.504	-	-	-	-	8.874.756.765	14.357.467.739
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)											
		1. BPPT Enjiniring	8.007.901.172	1.786.469.370	15.484.050	-	697.924.600	-	-	-	-	181.498.229	516.426.371

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

Per 31 Desember 2010

BERDASARKAN SAK

No	JENIS LAYANAN	BIDANG/ESELOK I/SATKER	ASET										
			Aset Lancar			Aset Tetap							
			Kas & Setara Kas	Piutang	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(Akumulasi Penyusutan Aset Tetap)	Total Aset Tetap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
		KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (060)											
		1. RS. Bhayangkara R. Said Sukanto Jak-Tim	3.262.229.374	1.973.875.852	4.119.467.860	-	51.532.335.420	25.628.527.049	160.780.082	-	5.383.395.420	-	82.705.037.971
		2. RS Bhayangkara Tk.III Kediri	6.334.614.816	2.349.323.887	2.849.078.057	-	6.007.288.557	15.304.974.746	-	-	-	-	21.312.263.303
		LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL (082)											
		1 Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (FATEKGAN)	2.222.789.025	168.899.487	83.087.650	-	862.975.628	-	-	-	-	175.875.388	687.100.240
		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN											
		1 Balai Besar Pendidikan Penyebaran & Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)	42.833.281.555	-	588.270.198	47.005.835.800	46.295.380.891	28.261.778.810	391.550.900	1.003.811.600	40.799.170	24.737.236.987	98.261.920.184
		2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	22.710.082.374	283.392.000	60.974.425	515.471.409.600	60.313.136.204	208.767.548.786	2.578.171.460	1.188.198.700	8.927.916.820	53.060.513.697	744.185.867.873
		3 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	9.890.857.450	26.850.000	119.663.900	165.739.495.358	93.848.205.299	37.714.265.891	1.309.914.880	-	3.434.332.358	-	302.046.213.786
		4 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	7.948.716.285	-	209.558.375	321.772.500.000	99.853.142.960	137.678.431.068	269.164.800	-	152.870.000	-	559.726.108.828
		5 Badan Diklat Transportasi Darat (BPPTD) Tegal	670.693.119	-	-	35.402.500.000	26.719.867.097	19.873.243.255	465.947.500	-	1.686.751.000	-	84.148.308.852
		KEMENTERIAN ESDM											
		1 Puslitbang Teknologi Minyak & Gas Bumi	15.443.187.078	12.177.738.747	1.848.240.297	933.355.384.971	560.467.798.455	244.211.538.237	6.939.661.750	-	14.097.399.356	-	1.759.071.782.769
		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT (091)											
		1 Pusat Pembiayaan Perumahan Jakarta	2.444.497.916.031	7.769.980.832	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL PER KEMENTERIAN											
		KEMENTERIAN KEUANGAN	14.934.545.649	634.969.263	1.246.384.388	545.192.062.827	25.188.119.684	144.602.362.963	8.709.761.480	18.325.236.185	16.489.183.360	42.575.622.692	715.931.103.807
		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	15.426.095.735	1.833.681.709	2.402.096.401	113.082.833.088	145.922.623.564	77.792.907.402	2.066.308.310	-	343.044.540	12.738.360.648	326.469.356.256
		KEMENTERIAN KESEHATAN	1.242.869.821.967	624.866.027.033	292.005.200.900	7.273.340.809.855	4.107.741.768.270	3.588.862.733.236	110.670.896.662	447.670.779.934	146.413.980.721	2.889.697.964.751	12.785.003.003.927
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	1.199.793.136.521	172.957.973.791	69.265.984.962	19.296.950.704.613	2.526.754.490.364	4.595.923.546.500	259.579.236.747	1.339.776.632.287	137.148.908.876	1.348.741.428.985	26.807.392.090.402
		KEMENTERIAN AGAMA	132.443.032.279	5.128.108.480	3.204.524.519	3.024.713.299.280	776.482.570.999	1.128.122.684.959	41.738.249.871	566.202.074.032	50.749.417.399	177.233.274.197	5.410.775.022.343
		KEMENTERIAN NEGARA RISTEK	734.444.972	92.820.000	263.681.547	-	7.651.075.836	-	475.252.500	-	-	-	8.126.328.336
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	20.105.411.940	2.099.040.018	52.058.200	-	75.123.661.690	535.660.599.784	1.330.859.000	-	55.322.000	5.352.710.224	606.817.732.250
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.716.639.149.586	867.395.484	202.950.000	-	23.232.224.504	-	-	-	-	8.874.756.765	14.357.467.739
		KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	9.596.844.190	4.323.199.739	6.968.545.917	-	57.539.623.977	40.933.501.795	160.780.082	-	5.383.395.420	-	104.017.301.274
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	8.007.901.172	1.786.469.370	15.484.050	-	697.924.600	-	-	-	-	181.498.229	516.426.371
		LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL	2.222.789.025	168.899.487	83.087.650	-	862.975.628	-	-	-	-	175.875.388	687.100.240
		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	84.053.630.783	310.242.000	978.466.898	1.085.391.740.758	327.029.732.451	432.295.267.810	5.014.749.540	2.192.010.300	14.242.669.348	77.797.750.684	1.788.368.419.523
		KEMENTERIAN ESDM	15.443.187.078	12.177.738.747	1.848.240.297	933.355.384.971	560.467.798.455	244.211.538.237	6.939.661.750	-	14.097.399.356	-	1.759.071.782.769
		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	2.444.497.916.031	7.769.980.832	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENYEDIAAN BARANG DAN JASA	8.906.767.906.927	835.016.545.953	378.536.705.729	32.272.026.835.392	8.634.694.590.022	10.788.405.142.686	436.685.755.942	2.374.166.732.738	384.923.321.020	4.563.369.242.563	50.327.533.135.237
2	Pengelolaan Wilayah/Kawasan	SEKRETARIAT NEGARA											
		1. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno PPK GBK), Jakarta	109.660.424.680	6.685.714.014	477.377.149	49.126.014.145.300	54.723.944.322	920.857.087.923	-	6.531.033.650	52.257.057.883	138.474.792.548	50.021.908.476.530
		2. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), Jakarta	383.265.121.583	898.603.423.902	-	23.897.917.717.309	33.540.792.452	209.986.908.252	-	7.680.000.000	398.014.343.016	37.533.099.751	24.509.606.661.278
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN WILAYAH/KAWASAN	492.925.546.263	905.289.137.916	477.377.149	73.023.931.862.609	88.264.736.774	1.130.843.996.175	-	14.211.033.650	450.271.400.899	176.007.892.299	74.531.515.137.808
3	Pengelolaan Dana Khusus	KEMENTERIAN KEUANGAN											
		1. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	13.949.244.238.059	25.541.686.289	74.536.850	-	5.929.992.198	-	327.192.880	-	218.174.500	1.930.199.738	4.545.159.840
		KEMENTERIAN KEHUTANAN											
		1. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	2.046.783.155.580	466.591.360	1.094.000	-	1.535.873.416	-	4.652.548.640	-	-	-	6.188.422.056
		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM											
		1. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	967.303.774.558	1.499.911.333.834	6.244.300	-	2.027.310.323	-	-	-	114.810.954	1.912.499.369	
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM											
		1. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	1.076.632.064.200	528.707.766.071	240.235.978	-	6.884.775.849	-	-	-	2.231.293.873	4.653.481.976	
		TOTAL PER KEMENTERIAN											
		KEMENTERIAN KEUANGAN	13.949.244.238.059	25.541.686.289	74.536.850	-	5.929.992.198	-	327.192.880	-	218.174.500	1.930.199.738	4.545.159.840
		KEMENTERIAN KEHUTANAN	2.046.783.155.580	466.591.360	1.094.000	-	1.535.873.416	-	4.652.548.640	-	-	-	6.188.422.056
		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	967.303.774.558	1.499.911.333.834	6.244.300	-	2.027.310.323	-	-	-	114.810.954	1.912.499.369	
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1.076.632.064.200	528.707.766.071	240.235.978	-	6.884.775.849	-	-	-	2.231.293.873	4.653.481.976	
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN DANA KHUSUS	18.039.963.232.397	2.054.627.377.554	322.111.128	-	16.377.951.786	-	4.979.741.520	-	218.174.500	4.276.304.565	17.299.563.241
TOTAL SELURUH JENIS PELAYANAN			27.439.656.685.587	3.794.933.061.423	378.336.194.006	105.295.958.698.001	8.739.337.278.582	11.919.249.138.861	441.665.497.462	2.388.377.766.388	835.412.896.419	4.743.653.439.427	124.876.347.836.286

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

Per 31 Desember 2010

BERDASARKAN SAK

No	JENIS LAYANAN	BIDANG/ESELON I/SATKER	Aset Lainnya		Kewajiban			Ekuitas Dana		Keterangan			
			Aset tak Berwujud	Aset Lain-lain	Pihak Ke-3	Utang Jk. Pendek Lainnya	Utang Jk. Panjang		Ekuitas Dana Lancar		Ekuitas Dana Investasi		
							Utang Jk. Panjang	Utang Lainnya					
(1)	(2)	(3)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
1	Penyediaan Barang	KEMENTERIAN KESEHATAN											
		1 RS. Cipto Mangunkusumo, Jakarta	30.740.667	2.534.736.639	110.572.898.040		471.209.049		225.962.257.354	1.690.369.459.278			
		2 RSUP Fatmawati, Jakarta			20.249.401.060	688.356.247	-		26.933.315.547	271.425.597.762			
		3 RSUP Persahabatan, Jakarta		326.903.832	8.315.040.961	11.135.158.523			52.432.528.570	76.394.076.694			
		4 RS JPD Harapan Kita, Jakarta	5.451.392.141	0	45.951.596.163	279.202.964	0	0	150.311.108.056	234.721.235.851			
		5 RSAB Harapan Kita, Jakarta	250.550.000			20.039.481.000			18.205.770.000	1.241.428.842.000			
		6 RS Kanker Dharmas, Jakarta		16.481.690	28.697.728.193				62.268.221.063	910.655.503.370			
		7 RS. Hasan Sadikin, Bandung	256.985.830		42.947.530.828				55.617.039.863	754.986.301.440			
		8 RS Kariadi, Semarang		127.502.290	1.790.915.178				220.505.205.923	879.468.146.638			
		9 RS Sardjito, Yogyakarta		1.196.722.076		91.974.428.235			42.553.252.568	368.093.937.367			
		10 RSUP Sanglah, Denpasar			92.203.257.414				4.101.595.748	443.905.001.758			
		11 RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar			21.485.751.702				54.469.208.109	444.704.534.189			
		12 RS Djamil, Padang			7.443.750.519				23.014.248.155	130.026.247.672			
		13 RS Muhammad Hoesin, Palembang	1.040.141.291		17.941.078.771	51.582.794.329			66.985.196.788	846.167.524.471			
		14 RSPI Prof.DR. Sulianti Saroso, Jakarta		390.862.944		86.666.664			11.052.664.542	117.081.606.711			
		15 RSO Prof.DR.R.Soeharso, Surakarta		1.384.874.400	394.377.705				39.628.402.498	366.965.485.866	Berdasar SAP		
		16 RSU Prof.Dr.R.D. Kandow, Manado			2.072.069.540	7.940.996.722			26.755.271.503	172.221.965.895	utanglainnya – jamkesmas		
		17 RSU Dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten		645.371.197	22.242.847.687				51.071.651.791	164.319.993.716			
		18 RS Paru Ario Wirawan, Salatiga	255.718.400		4.215.922.313				30.302.693.807	66.840.332.659			
		19 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung	61.966.666	65.141.240		1.484.089.157			14.578.709.246	197.251.190.895			
		20 RS Mata Cicendo, Bandung	38.408.792		823.154.418	1.080.448			24.119.622.810	78.194.226.187			
		21 RSJ Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta			1.501.011.916				18.956.847.283	351.355.582.005			
		22 RS Jiwa Dr. Soeroyo, Magelang			952.831.453				20.786.757.479	630.213.503.410	Berdasar SAP		
		23 RS. DR. H. Marzuki Mahdi, Bogor	5.550.000	938.756.371	3.314.184.738				17.226.946.766	475.527.648.435			
		24 RS Adam Malik, Medan	487.020.598	889.911.051	46.379.788.677	95.199.973.046	889.911.051		48.334.773.251	409.370.049.462			
		25 RS Ketergantungan Obat, Jakarta			410.841.055				4.015.606.731	26.165.499.735			
		26 RS Paru Dr. M. Gunawan, Cisarua Bogor	633.421.993	0	0	5.460.444.250	0	0	10.982.315.281	55.520.463.671			
		27 RSUP Rujukan Stroke Nasional, Bukittinggi	501.611.260	102.800	7.140.000	781.437.914			6.826.731.987	57.962.653.598			
		28 RS Jiwa Radjiman W., Lawang	0	187.678.600	0	2.026.357.974	0	0	13.516.359.423	39.743.990.087			
		29 RS Kusta Dr.Tadjuddin Chalid Makassar			890.798.454				293.025.171	68.574.053.341			
		30 RS Kusta Dr. Rival Abdullah Palembang	3.450.000	21.235.000	4.322.530.875				2.080.750.588	38.520.601.056			
		31 RS Kusta Sitanala Tangerang	53.161.367		236.873.869				13.972.979.548	352.027.931.351			
		32 Politeknik Kesehatan Jakarta III	126.050.000		3.175.848.667	255.428.962			6.972.431.924	151.209.510.389			
		33 Politeknik Kesehatan Bandung							10.884.265.422	428.350.382.686			
		34 Politeknik Kesehatan Medan									0		
		35 Politeknik Kesehatan Semarang									0		
		36 Politeknik Kesehatan Makassar		0	0	1.398.780.000	8.112.741	0	0	1.419.610.220	193.029.102.744		
		37 Politeknik Kesehatan Jakarta II									0		
		38 Balai Besar Labkes Palembang		53.350.000		14.077.499			724.964.451	15.205.128.155		Sesuai SAP	
		39 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta		88.862.000					351.454.600	20.775.548.201			
		40 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makasar							1.324.370.898	16.628.356.148			
		41 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	187.000.000	2.554.000	20.149.240				1.286.708.832	16.494.884.069		LK SAP	
				KEMENTERIAN KEUANGAN (015)									
				1 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta		150.569.000	704.973.558				16.110.925.742	716.081.672.807	
				KEMENTERIAN PERTANIAN (018)									
				1 Pusat Veterinaria Farma Surabaya			734.816.610			1.450.543.048	667.132.298.354		
				2 Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Malang		192.575.834	41.331.600	90.965.640		1.383.806.900	57.825.904.670		SAP
		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)											
		1 Akademi Kimia Analis (AKA), Bogor	84.250.000	26.300.000	1.723.400			5.976.007.132	29.491.046.364				
		2 Balai Besar Industri Agro				416.828.900		8.252.768.758	94.849.387.216				
		3 Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung	15.500.000			181.631.450		3.144.206.172	171.780.997.014				
		4 Balai Besar Tek Pencegahan & Pencemaran Industri Semarang		61.000.000	54.221.901			1.634.486.132	30.534.975.662				
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)											
		1 Universitas Diponegoro, Semarang	770.833.500	1.568.229.200	2.877.537.652			346.634.359.974	2.276.585.442.960				
		2 Universitas Padjadjaran, Bandung	1.945.332.564		33.868.905.754			75.629.977.581	1.627.852.936.126				
		3 Universitas Negeri Malang, Malang	2.555.155.551					87.186.019.963	694.771.881.236				

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

Per 31 Desember 2010

BERDASARKAN SAK

No	JENIS LAYANAN	BIDANG/ESELON I/SATKER	Aset Lainnya		Kewajiban				Ekuitas Dana		Keterangan
			Aset tak Berwujud	Aset Lain-lain	Pihak Ke-3	Utang Jk. Pendek Lainnya	Utang Jk. Panjang	Utang Lainnya	Ekuitas Dana Lancar	Ekuitas Dana Investasi	
(1)	(2)	(3)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4 Universitas Hasanuddin, Makassar	1.202.855.000	16.050.887.068	-	714.000.000	11.848.494.366	-	70.586.453.690	2.356.306.293.412	
		5 Universitas Brawijaya, Malang	1.336.976.600	80.903.000	3.142.700	1.113.710.400	-	-	81.122.733.877	2.903.741.877.821	
		6 Universitas Negeri Semarang, Semarang	126.320.000	1.526.173.491	-	-	-	-	80.112.290.551	773.412.938.901	
		7 Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	1.890.214.104	-	17.342.420.510	-	-	-	31.098.819.224	1.722.190.380.100	
		8 Universitas Mulawarman Samarinda	992.863.321	-	-	14.093.945.148	-	-	36.574.029.332	196.882.268.462	
		9 Universitas Sebelas Maret Surakarta	-	1.664.589.016	609.292.960	-	-	-	87.517.409.134	2.129.912.054.474	
		10 Universitas Lampung	88.245.250	-	6.319.857.071	-	-	-	23.656.517.503	491.901.289.677	
		11 Universitas Negeri Yogyakarta	742.607.200	112.087.000	-	26.612.980.098	-	-	65.582.512.875	1.756.135.461.258	
		12 Universitas Negeri Surabaya	629.380.400	176.317.512	533.149.003	-	-	-	52.718.748.276	1.558.781.148.266	
		13 Universitas Negeri Gorontalo	63.631.700	-	5.757.775.094	-	-	-	3.713.343.471	230.679.845.541	
		14 Universitas Bengkulu	568.102.000	234.503.588	212.937.939	-	-	-	25.493.369.704	257.959.547.110	
		15 Universitas Sriwijaya	1.239.973.556	-	597.016.140	17.859.645.962	-	-	140.370.071.388	2.268.455.592.937	
		16 Universitas Negeri Jakarta	6.898.237.900	274.447.602	717.156.261	3.623.109.279	-	-	8.362.393.240	1.665.093.159.698	LK SAP
		17 Universitas Andalas	-	-	-	-	-	-	-	0	
		18 Universitas Jenderal Soedirman	353.500.000	-	-	1.507.231.368	-	-	79.615.187.119	1.695.768.187.635	
		19 Universitas Haluoleo Kendari	-	38.650.000	-	6.538.067.576	-	-	(77)	583.190.859.244	
		20 Universitas Riau	104.079.000	-	-	-	-	-	5.140.977.536	1.649.157.326.299	
		KEMENTERIAN AGAMA (025)									
		1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	256.750.000	39.445.000	245.864.500	7.027.532.750	-	-	18.932.180.598	982.975.660.873	
		2 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	1.967.592.104	-	-	2.935.169.898	-	-	33.133.544.158	1.022.768.125.173	
		3 UIN Malang	-	-	-	1.650.000	-	-	7.136.751.958	7.506.746.591	
		4 UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	197.191.000	5.180.200.000	(30.693.955)	-	-	-	12.636.985.731	311.643.030.558	SAP
		5 UIN Alauddin, Makassar	1.897.885.600	-	672.982.809	-	-	-	14.138.963.543	1.030.804.052.698	
		6 IAIN Sumatera Utara	34.000.000	-	12.977.371	244.260	-	-	2.359.461.550	262.476.592.435	SAP
		7 UIN Walisongo Semarang	85.587.550	343.164.000	-	-	-	-	7.382.313.811	302.020.698.838	
		8 UIN Sultan Syarif Kasim Riau	187.988.845	17.821.000	555.055.500	-	-	-	14.939.645.368	667.086.827.360	
		9 IAIN Sulthan Thoha Saifudin	-	-	-	10.209.000	-	-	1.532.850.407	3.208.872.000	
		10 IAIN Sunan Ampel	-	-	228.131.876	1.677.384	-	-	9.874.203.325	500.987.976.495	
		11 IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	744.385.000	2.331.000	-	9.335.334	-	-	4.109.200.868	154.032.336.255	
		12 IAIN Raden Intan Lampung	-	-	-	-	-	-	2.929.427.234	176.217.444.166	
		KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (026)									
		1 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri, Bandung	-	-	-	-	-	-	407.102.170	245.649.402.353	
		2 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri, Bekasi	0	0	0	0	0	0	86.417.079	178.308.456.328	
		3 Balai Besar Latihan Kerja Industri, Serang	4.270.000	-	-	-	-	-	363.643.280	43.650.549.813	
		KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI (042)									
		1 PP IPTK	57.475.000	30.714.830	-	-	-	-	1.090.946.519	8.214.518.166	
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)									
		1 Lembaga Layanan Pemasaran - KUKM	10.595.370.625	25.909.000	10.540.336.864	-	-	-	11.716.173.294	617.439.011.875	
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (059)									
		1. Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP)	-	-	845.682.200	878.958.636	-	-	3.715.984.853.234	14.357.467.739	
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)									
		1. BPPT Enjiniring	17.363.502	2.593.519.105	-	1.605.423.684	-	-	8.204.430.926	3.127.308.978	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

Per 31 Desember 2010

BERDASARKAN SAK

No	JENIS LAYANAN	BIDANG/ESELOK I/SATKER	Aset Lainnya		Kewajiban				Ekuitas Dana		Keterangan	
			Aset tak Berwujud	Aset Lain-lain	Pihak Ke-3	Utang Jk. Pendek Lainnya	Utang Jk. Panjang	Utang Lainnya	Ekuitas Dana Lancar	Ekuitas Dana Investasi		
(1)	(2)	(3)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (060)										
		1. RS. Bhayangkara R. Said Sukanto Jak-Tim		115.875.000	636.445.900				-	8.719.127.186	82.820.912.971	
		2. RS Bhayangkara Tk.III Kediri			1.672.033.220			175.590.000	-	9.860.983.540	21.136.673.303	
		LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL (082)										
		1 Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (FATEKGAN)	2.707.200		615.730.956				-	1.859.045.206	689.807.440	
		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN										
		1 Balai Besar Pendidikan Penyegaran & Peningkatan Ilmu Pelayaran (B		259.347.000		8.412.100.000		-	35.009.451.753	98.521.267.184		
		2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	2.003.702.646	1.185.107.000		1.737.901.000		-	21.316.547.799	747.374.677.519		
		3 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	12.715.553.900		5.710.532.050			-	4.326.839.300	314.761.767.686		
		4 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	722.391.255		102.154.443			-	8.056.120.217	560.448.500.083		
		5 Badan Diklat Transportasi Darat (BPPTD) Tegal	160.772.500		82.683.472			-	588.009.647	84.309.081.352		
		KEMENTERIAN ESDM										
		1 Puslitbang Teknologi Minyak & Gas Bumi	35.358.543.650		11.753.532.674			-	17.715.633.448	1.794.430.326.419	SAP	
		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT (091)										
		1 Pusat Pembiayaan Perumahan Jakarta						-	2.452.267.896.863	0		
		TOTAL PER KEMENTERIAN										
		KEMENTERIAN KEUANGAN		150.569.000	704.973.558			-	16.110.925.742	716.081.672.807		
		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	99.750.000	87.300.000	55.945.301	598.460.350		-	19.007.468.194	326.656.406.256		
		KEMENTERIAN KESEHATAN	9.383.169.005	8.871.046.130	489.958.099.436	288.958.086.671	471.209.049	889.911.051	1.380.824.863.792	12.801.896.098.962		
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	21.508.107.646	21.726.787.475	68.839.191.084	72.062.689.831	11.848.494.366	-	1.301.115.214.359	26.838.778.491.157		
		KEMENTERIAN AGAMA	5.371.380.099	5.582.961.000	1.684.318.101	9.985.818.626		-	129.105.528.551	5.421.729.363.442		
		KEMENTERIAN NEGARA RISTEK	57.475.000	30.714.830				-	1.090.946.519	8.214.518.166		
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	10.595.370.625	25.909.000	10.540.336.864			-	11.716.173.294	617.439.011.875		
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			845.682.200	878.959.636		-	3.715.984.853.234	14.357.467.739		
		KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA		115.875.000	2.308.479.120		175.590.000	-	18.580.110.726	103.957.586.274		
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKHNOLOGI	17.363.502	2.593.519.105		1.605.423.664		-	8.204.430.928	3.127.308.978		
		LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL	2.707.200		615.730.956			-	1.859.045.206	689.807.440		
		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	15.602.420.301	1.444.454.000	5.895.369.965	10.150.001.000		-	69.296.968.716	1.805.415.293.824		
		KEMENTERIAN ESDM	35.358.543.650		11.753.532.674			-	17.715.633.448	1.794.430.326.419		
		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT						-	2.452.267.896.863			
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENYEDIAAN BARANG DAN JASA	97.996.287.028	40.629.135.540	593.201.659.259	384.239.439.778	12.495.293.415	889.911.051	9.142.880.059.572	50.452.773.353.339		
2	Pengelolaan Wilayah/Ka- wasan	SEKRETARIAT NEGARA										
		1. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno PPK GBK), Jakarta		6.637.194.500	23.406.591.342			-	93.416.924.501	50.028.545.671.030	Aset lainnya - Inv penyertaan	
		2. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), Jakarta	126.131.500	51.959.828.814	20.614.160.489			-	1.261.254.384.998	24.561.692.621.592		
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN WILAYAH/KAWASAN	126.131.500	58.597.023.314	44.020.751.831			-	1.354.671.309.497	74.590.238.292.622		
3	Pengelolaan Dana Khusus	KEMENTERIAN KEUANGAN										
		1. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	506.343.638	1.099.126.164.384		17.995.447	1.070.416.164.384	-	13.974.842.465.751	33.761.503.478	Aset lainnya - Inv jangka panjang 28.710.000.000	
		KEMENTERIAN KEHUTANAN										
		1. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan			37.317.163.623			-	2.009.933.677.317	6.188.422.056		
		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM										
		1. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	616.990.000					-	2.467.221.352.691	2.529.489.369		
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM										
		1. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	1.557.387.490					-	1.605.580.066.249	6.210.869.466		
		TOTAL PER KEMENTERIAN										
		KEMENTERIAN KEUANGAN	506.343.638	1.099.126.164.384		17.995.447	1.070.416.164.384	-	13.974.842.465.751	33.761.503.478		
		KEMENTERIAN KEHUTANAN			37.317.163.623			-	2.009.933.677.317	6.188.422.056		
		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	616.990.000					-	2.467.221.352.691	2.529.489.369		
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1.557.387.490					-	1.605.580.066.249	6.210.869.466		
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN DANA KHUSUS	2.680.721.128	1.099.126.164.384	37.317.163.623	17.995.447	1.070.416.164.384	-	20.057.577.562.008	48.690.284.369		
TOTAL SELURUH JENIS PI			100.803.139.656	1.198.352.323.238	674.539.574.713	384.257.435.225	1.082.911.457.799	889.911.051	30.555.128.931.077	125.091.701.930.330		

IKHTISAR LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BMN PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2010

No.	Kode BA	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NILAI BMN		Koreksi	Input Koreksi pada LBP / LK/KL				SELISIH
			SEBELUM IP	SETELAH IP		Nilai Koreksi Dalam Rupiah				
						Koreksi Pada SIMAK		Jurnal Aset	JUMLAH	
				'205'	selain '205'					
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	338.603.269.235	379.361.201.541	40.757.932.306	63.334.182.919	(22.576.250.613)		40.757.932.306	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	876.914.092.100	1.163.023.870.978	286.109.778.878	288.519.001.532	(2.409.222.654)		286.109.778.878	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.089.942.578.442	1.633.774.137.734	543.831.559.292	378.378.589.755	103.411.887.662		481.790.477.417	62.041.081.875
4	005	MAHKAMAH AGUNG	2.677.161.390.875	6.704.661.034.197	4.027.499.643.322	3.237.310.012.601	-		3.237.310.012.601	790.189.630.721
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	1.539.997.765.879	4.454.583.094.951	2.914.585.329.072	2.738.575.155.040	-		2.738.575.155.040	176.010.174.032
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	2.239.340.629.482	10.967.416.458.125	8.728.075.828.643	8.731.179.295.942	-		8.731.179.295.942	(3.103.467.299)
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	1.050.930.028.404	3.236.363.354.717	2.185.433.326.313	2.179.843.288.078	-		2.179.843.288.078	5.590.038.235
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	4.203.057.344.367	16.090.345.912.046	11.887.288.567.679	6.910.300.041.789	5.036.779.882.037		11.947.079.923.826	(69.791.356.147)
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	128.739.648.454.460	221.094.539.593.926	92.354.891.139.466	522.897.037.498	91.831.994.101.968		92.354.891.139.466	-
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	4.155.004.986.451	13.653.125.763.253	9.498.120.776.802	6.119.075.822.596	3.097.184.904.408		9.216.260.727.004	281.860.049.798
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	9.404.959.519.389	24.020.007.958.389	14.615.048.439.000	15.745.466.732.785	-		15.745.466.732.785	(1.130.418.293.785)
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	3.808.168.752.914	11.683.497.944.061	7.875.329.191.147	7.475.998.969.883	-		7.475.998.969.883	399.330.221.264
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.652.565.487.098	3.293.907.088.394	1.641.341.801.296	1.237.979.132.607	10.296.471.338		1.248.275.603.945	393.065.997.351
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.506.601.567.662	5.608.897.018.885	2.102.295.451.223	1.844.989.826.815	(1.248.055.759)		1.843.741.771.056	258.553.680.167
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	20.071.825.347.797	37.785.892.475.462	17.714.067.127.665	15.358.629.054.162	2.221.811.949.215		17.580.441.003.377	133.626.124.288
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	22.705.169.165.183	70.833.200.547.092	48.128.031.381.909	46.959.722.240.542	2.047.930.524.947		49.007.652.765.489	(879.621.383.580)
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	2.943.754.538.025	12.407.036.907.970	9.463.282.369.945	11.180.017.572.667	-		11.180.017.572.667	(1.716.735.202.722)
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	13.060.672.913.112	20.307.301.547.435	7.246.628.634.323	5.794.507.043.861	1.464.426.998.114		7.258.934.041.975	(12.305.407.652)
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	944.423.693.992	1.937.097.930.046	992.674.236.054	1.514.009.611.998	-		1.514.009.611.998	(521.335.375.944)
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	855.429.552.309	4.072.351.101.026	3.216.921.548.717	1.695.594.288.231	1.524.704.588.467		3.220.298.876.698	(3.377.327.981)
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	3.209.449.861.664	4.004.341.774.522	794.891.912.858	2.154.749.415.470	-		2.154.749.415.470	(1.359.857.502.612)
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.008.559.975.126	4.207.917.302.578	1.199.357.327.452	1.243.856.160.753	-		1.243.856.160.753	(44.498.833.301)
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	69.144.861.097.855	186.635.341.387.607	117.490.480.289.752	115.429.997.014.301	(51.771.597.130)		115.378.225.417.171	2.112.254.872.581
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	105.923.176.499	98.490.438.328	(7.432.738.171)	-	-		-	(7.432.738.171)
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	12.067.618.467	8.012.043.163	(4.055.575.304)	(4.225.575.304)	170.000.000		(4.055.575.304)	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.024.289.633	5.143.820.900	(4.880.468.733)	(4.880.468.733)	-		(4.880.468.733)	-
27	040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.192.753.898.242	3.405.549.007.576	2.212.795.309.334	1.670.562.274.942	62.530.051.088		1.733.092.326.030	479.702.983.304
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	39.260.584.041	34.848.513.148	(4.412.070.893)	(364.740.692)	-		(364.740.692)	(4.047.330.201)
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	689.759.169.732	2.690.388.817.492	2.000.629.647.760	2.049.252.096.091	4.563.027.909		2.053.815.124.000	(53.185.476.240)
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	261.696.093.117	255.747.539.207	(5.948.553.910)	(6.308.335.742)	92.254.000		(6.216.081.742)	267.527.832
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	562.980.760.410	1.390.043.472.230	827.062.711.820	825.540.818.693	344.438.750		825.885.257.443	1.177.454.377
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	25.919.398.345	23.054.136.664	(2.865.261.681)	-	(2.742.261.681)		(2.742.261.681)	(123.000.000)
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	41.514.703.978	41.612.830.228	98.126.250	(6.675.989.752)	98.126.250		(6.577.863.502)	6.675.989.752
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.030.995.005.206	1.753.130.728.869	722.135.723.663	-	722.179.567.356		722.179.567.356	(43.843.693)
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	2.523.196.942.948	2.564.925.025.317	41.728.082.369	36.929.127.943	-		36.929.127.943	4.798.954.426
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	13.203.402.184	17.164.586.446	3.961.184.262	-	-		-	3.961.184.262
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	542.752.769.949	1.077.164.204.840	534.411.434.891	470.232.263.060	25.073.514.986		495.305.778.046	39.105.656.845
38	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	129.381.839.791	451.587.824.628	322.205.984.837	322.205.984.837	-		322.205.984.837	-
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.179.709.754.550	2.642.712.717.318	1.463.002.962.768	1.255.868.208.174	202.831.899.025		1.458.700.107.199	4.302.855.569
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	241.952.220.086	534.287.128.934	292.334.908.848	287.871.600.315	-		287.871.600.315	4.463.308.533
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.638.953.291.765	1.979.747.756.308	340.794.464.543	289.225.123.202	-		289.225.123.202	51.569.341.341
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	47.052.267.943.451	65.168.826.390.619	18.116.568.447.168	15.075.003.923.712	3.076.386.386.974		18.151.390.310.686	(34.831.863.518)
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	382.167.029.499	379.176.736.703	(2.990.292.796)	(42.156.236.569)	24.436.203.551		(17.720.033.018)	14.729.740.222
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	81.155.290.771	71.500.320.290	(9.654.970.481)	(756.000)	(12.011.567.504)		(12.012.323.504)	2.357.353.023
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	181.017.837.993	510.485.183.768	329.467.545.775	330.239.133.333	(771.587.500)		329.467.545.833	(58)
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	335.280.726.918	295.444.578.827	(39.836.148.091)	(42.445.901.754)	-		(42.445.901.754)	2.609.753.663
47	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	31.625.002.337	3.835.395.000	(27.789.607.337)	(4.135.062.494)	-		(4.135.062.494)	(23.654.544.843)
48	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	309.919.455.477	736.942.307.822	427.022.852.345	407.852.803.337	17.934.415.121		425.787.018.458	1.235.833.887
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	13.100.806.117	12.759.398.304	(341.407.813)	(284.257.663)	-		(284.257.663)	(57.150.150)
50	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI	1.201.621.318.258	1.899.884.590.526	698.263.272.268	587.440.158.525	156.428.026.269		743.868.184.794	(45.604.912.526)
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	397.389.382.962	452.408.480.619	55.019.097.657	50.587.362.063	17.278.663.921		67.866.025.984	(12.846.928.327)
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	351.317.272.824	344.695.344.906	(6.621.927.918)	(6.372.331.758)	-		(6.372.331.758)	(249.586.160)
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	81.986.765.871	148.076.953.415	66.090.187.544	66.090.187.544	-		66.090.187.544	-
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.268.274.038.331	7.384.437.360.221	6.116.163.321.890	6.032.597.202.846	4.641.541.240		6.037.238.744.086	78.924.577.804

**IKHTISAR LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BMN PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2010**

No.	Kode BA	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NILAI BMN		Koreksi	Input Koreksi pada LBP / LK/KL				SELISIH
			SEBELUM IP	SETELAH IP		Nilai Koreksi Dalam Rupiah				
						Koreksi Pada SIMAK		Jurnal Aset	JUMLAH	
						'205'	selain '205'			
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	657.032.301.598	2.442.201.060.040	1.785.168.758.442	1.785.158.316.442	10.442.000		1.785.168.758.442	
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.140.749.608.535	1.460.159.298.947	319.409.690.412	696.451.996.771	182.939.746.721		879.391.743.492	(559.982.053.080)
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	313.378.951.485	651.757.509.060	338.378.557.575	310.892.229.271	-		310.892.229.271	27.486.328.304
58	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	300.683.924.158	206.688.553.218	(93.995.370.940)	(93.995.370.940)	-		(93.995.370.940)	-
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	13.514.871.505	10.995.099.252	(2.519.772.253)	(2.892.839.039)	373.066.786		(2.519.772.253)	-
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	84.095.526.677	84.209.545.904	114.019.227	(16.701.815.248)	-		(16.701.815.248)	16.815.834.475
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	428.418.424.879	772.640.938.137	344.222.513.258	-	344.222.513.258		344.222.513.258	-
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	160.114.022.668	423.625.124.640	263.511.101.972	228.563.560.230	-		228.563.560.230	34.947.541.742
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	457.887.932.567	819.011.939.366	361.124.006.799	320.031.263.182	87.080.382.104		407.111.645.286	(45.987.638.487)
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	656.071.852.491	1.886.847.516.416	1.230.775.663.925	6.737.777.566	1.188.240.812.278		1.194.978.589.844	35.797.074.081
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	969.039.031.485	1.383.749.329.849	414.710.298.364	411.977.141.781	(8.238.089.073)		403.739.052.708	10.971.245.656
66	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	348.334.778.645	348.334.778.645	-	-	-		-	-
67	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	89.269.715.394	156.750.882.197	67.481.166.803	67.575.084.826	-		67.575.084.826	(93.918.023)
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	82.128.926.177	75.631.002.302	(6.497.923.875)	-	(6.497.926.970)		(6.497.926.970)	3.095
69	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	2.435.090.402.612	8.325.290.488.367	5.890.200.085.755	-	5.890.200.085.755		5.890.200.085.755	-
70	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	40.145.282.841	35.899.929.220	(4.245.353.621)	(4.245.353.621)	-		(4.245.353.621)	-
71	100	KOMISI YUDISIAL	54.814.047.750	54.792.303.750	(21.744.000)	16.748.000	-		16.748.000	(38.492.000)
72	103	BAKORNAS PB	6.312.574.953	4.207.797.000	(2.104.777.953)	(2.104.777.953)	-		(2.104.777.953)	-
73	104	BNP2TKI	17.666.038.480	30.105.664.881	12.439.626.401	-	-		-	12.439.626.401
74	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	-	-		-	-
75	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-		-	-
76	107	BADAN SAR	272.767.041.816	249.365.882.740	(23.401.159.076)	(22.712.883.222)	37.866.290		(22.675.016.932)	(726.142.144)
77	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-	-	-		-	-
Total			371.683.724.658.289	781.978.333.681.481	410.294.609.023.193	292.129.328.982.027	113.348.167.695.149	5.890.200.085.755	411.367.696.762.931	(1.073.087.739.739)

**REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010**

KANWIL DJKN		NILAI	Tahun Penilaian
I BANDA ACEH		15.134.350.000	
1	Jl. Persada (Jl. Perdagangan) Kel. Keude Siblah Kec. Blang Pidie, Kab. Aceh Selatan	524.100.000	2008
2	Jl. Merdeka Kel. Kampung Belakang Meulaboh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Bara	1.578.950.000	2008
3	Jl. Merdeka Blangbengkell Kel Blang Paseh Kec. Kota Sigli Kab. Pidie	619.400.000	2008
4	SD/SMP Muhammadiyah Pantan Labu, Jl. Mesjid Kel. Keude, Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara	1.169.000.000	2009
5	SKKP Negeri Samalanga, Desa Keude Kec. Samalanga	256.800.000	2009
6	STM dan SMP Kosgoro, Jl. Perdagangan Lhokseumawe Kel. Peusong Baru Kec. Banda Sakti Lhokseumaw	6.264.200.000	2009
7	Eks SDN No. 4,5,6, Kantor/Rumah Tinggal, Lap Basket, Jl Jend A. Yani Kuala Simpang	2.810.800.000	2009
8	SMEAN KANDEPDIKBUDCAM, PEMDA, Tempat Tinggal, Jl MT Zen Langsa Pekan Langsa	1.911.100.000	2009
II MEDAN		84.875.778.916	
1	Jl. Besar, Simpang Dolok Kel. Simpang Dolok Kec. Simpang Dolok Kab. Batubara	202.840.000	2008
2	Jl. Ahmad Yani (dahulu Jl. Merdeka) Kel. Pangkalan Dodek Kec. Medan Deras Kab. Batubara	242.500.000	2008
3	Jl. Cokroaminoto No. 73 Kel Kisaran Kec. Kota Kisaran Barat Kab Asahar	648.700.000	2008
4	Jl. Rivai No. 48 Kisaran, sekarang menjadi Jl. Rivai No.39 Kisaran	4.272.050.000	2008
5	Jl. Rivai No. 67 dahulu 60 kel.. Kisaran Kota, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahar	779.690.000	2008
6	Jl. Sudirman (Jl. Besar Indrapura) dahulu Jl. Merdeka Kel. Indrapura Kota Kec. Air Putih, Kab. Batubara	6.762.200.000	2008
7	Jl. Merdeka, Tanjung Tiram	1.541.301.000	2008
8	Jl. Sudirman (Jl. Besar Indrapura) dahulu Jl. Merdeka Kel. Indrapura Kota Kec. Air Putih, Kab. Batubara	232.100.000	2008
9	Jl. Merdeka, Tanjung Tiram	1.827.820.000	2008
10	Kel. Tanjung Leidong Kec Kualuh Hilir	184.370.000	2008
11	Jl. Besar Simandulang, Desa Simandulang, Kec. Kualuh Leidong, dahulu Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Bat	150.100.000	2008
12	Jl. Jenderal Sudirman dahulu Jl. Besar Kota Pinang No.33 Kel. Kota Pinang Kec. Kota Pinang, Kab. Labuhan Bat	234.800.000	2008
13	Jl. Raya Binjai Serbangan Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman, Kab. Asahar	695.800.000	2008
14	Jl. Pulau Rakyat Gunting Saga Kel. Bandar Pulau Pekan, Kec. Bandar Pulau, Kab. Asahar	110.300.000	2008
15	Jl. Besar Gunung Melayu-Bandar Pulau, Kel. Bandar Pulau Pekan Kec. Bandar Pulau, Kab. Asahar	38.700.000	2008
16	Jl. Asahan No. 23 Kel. Indra Sakti Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai	398.600.000	2008
17	Jl. Imam Bonjol No. 70 Tanjung Balai, Kel. Karya, Kec. Tg. Balai Selatan, Kota Tanjung Balai	628.100.000	2008
18	Jl. Veteran No. 82 Kel. Indra Sakti Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Bala	297.300.000	2008
19	Jl. Mesjid No. 28 Kel. Tg. Balai Kota II Kec Tg. Balai Selatan Kota Tg. Bala	346.430.000	2008
20	Jl. Sukaramai No. 30 Dusun I desa Bagan Asahan Pekan Kec. Tg. Balai Kab. Asahar	397.125.000	2008
21	Jl. Sukaramai Desa Bagan Asahan Kec. Tg. Balai Kab. Asahar	484.310.000	2008
22	Jl. Pajak Pagil/Balai Desa, Desa Pulau Rakyat Pekan Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahar	143.300.000	2008
23	Jl. Prof. HM Yamin/M. Said, Kel. Sigambal, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Bat	623.540.000	2008
24	Jl. Jenderall Ahmad Yani Kel. Kota Pinang, Kec. Kota Pinang Kab. Labuhan Bat	699.160.000	2008
25	Jl. Kampung Loteng (dahulu Gang Kampung Lorong Tengah) Kel. Langga Payung, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhan Bat	458.836.000	2008
26	Jl. Jend Ahmad Yani Kel. Sungai Berambang, Kec. Panei Hilir, Kab. Labuhan Bat	1.079.046.000	2008
27	Jl. Jend Ahmad Yani Kel. Sungai Berambang, Kec. Panei Hilir, Kab. Labuhan Bat	1.159.070.000	2008
28	Jl. Mesjid Kel. Tanung Leidong Kec. Kualuh Leidong, Kab. Labuhan Bat	967.400.000	2008
29	SMA Kuala ex SMA Swasta Gotong Royong, Jl. Antara No. 18 Kel. Pekan Keuala Kec. Kuala Kab. Langka	147.323.000	2009
30	Pertokoan/Ruko, Jl. Mesjid Pangkalan Brandan Kec. Babalan Kab. Langka	675.607.000	2009
31	SMA Persiapan STABAT, Jl. Perniagaan Stabat Kec. Stabat Kab. Langka	1.463.910.800	2009
32	SMP PGRI Pulau Kampai, Jl. Pelabuhan Desa Pulau Kampai Kec. Pangkalan Susu Kab. Langka	6.500.000	2009
33	Pertokoan/Ruko, Jl. KH Zainal Arifin Kab. Langkat	645.700.000	2009
34	SD Filial Gajah Mada, Jl. Anggur Bandar Sinembah Kec. Binjai Barat Kab. Binjai	285.206.430	2009
35	Pertokoan, Jl. MH Thamrin d/h Jl. Binjai Kel. Binjai Kota Kec. Pekan Binjai Kab. Binja	3.440.907.300	2009
36	Pertokoan, Jl. Belitung Kel. Binjai Kota Kec. Pekan Binjai Kab. Binja	1.101.073.500	2009
37	Perguruan Setia Budi Abadi, Jl. Serdang No. 157 Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedaga	1.720.000.000	2009
38	Balai Pertemuan Desa, Jl. Besar Rantau Panjang Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang	27.700.000	2009
39	SMA Negeri I Lubuk Pakam, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang	4.890.140.000	2009
40	SMP Negeri I Sei Rampah, Jl. Sudirman Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedaga	2.023.266.000	2009
41	SD Negeri 102037, Dusun XII Kebun Sayur Desa Sei Baman Kec. Sei Bamar	49.000.000	2009
42	SMP Perbaungan (SMA 2 Perbaungan), Jl. Cempaka No. 25 Kel. Simpang III Kec. Perbaungan Kab. Deli Serdang	1.192.005.900	2009
43	Perg.Nas. Budi Basa I (Yay. Tuanku Tambusai), Jl. Dusun 7 Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai	38.684.000	2009
44	Perg.Nas. Budi Basa II (Gdg. P'temuan Sos. Sehati), Jl. Dusun 3 Kota Pari Pantai Cermin Kab. Serdang Bedaga	151.706.000	2009
45	SD Harapan, Jl. Dusun IV Desa Sarang Burung Kec. Pantai Labu Kab. Serdang Bedaga	60.413.000	2009
46	Rumah Kosong, Jl. Jend. Sudirman Pekan Dolok Masihol Kab. Serdang Bedaga	36.495.000	2009
47	SD Negeri (Tanah Kosong), Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Pantai Labu Pekan Kab. Deli Serdang	309.279.000	2009
48	Yayasan Perguruan Widyasana Utama dan Yayasan Perguruan Swadaya, Jl. Jose Rizal No. 3A Medan	1.952.770.000	2009
49	Gedung SD dan STM, Jl. Cut Nyak Din No. 1 Lingkungan VII Kel. Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langka	199.889.300	2009
50	SMA Negeri I Tanjung Pura, Jl. Jenderal Sudirman No. 52 Kel. Pekan Kec. Tanjung Pura Kab. Langka	1.637.121.296	2009
51	Kantor Veteran RI, Jl. Dr Wahidin No. 124 Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar	1.106.700.000	2009
52	Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Jl. Merdeka No. 230 Dwikora Kec. Siantar Barat Kab. Pematang Sianta	5.454.400.000	2009
53	SD/SMP Yayasan Taman Asuhan, Jl. Kapt MH Sitorus Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kab. Pematang Sianta	15.226.300.000	2009
54	SMPN 3, STM YPD, Jl. MH Thamrin No. 50-52 Tebing Tinggi	9.443.100.000	2009
55	Kantor Depdikbud, Jl. Veteran No. 38 Tebing Tinggi	1.947.000.000	2009
56	Kantor Primkopad 0204, Jl. Dr Sutomo Tebing Tinggi	830.100.000	2009
57	Sebidang Tanah, Jl. Balai Kota d/h Jl Gereja No. 14 atau Jl Mesjid S. Parman Kec. Tebing Tinggi Kot	764.256.000	2009
58	Rumah Tinggal/Gereja GP, Jl. Pekan Pematang Bandar/Jl. Gereja Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungu	142.100.000	2009
59	TK Aisyiyah, Dusun Tiga Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungu	156.622.000	2009
60	Bangunan Pos Polisi Huta Sei Langgai Bandar Maasilam Kec. Bandar Kab. Simalungu	124.700.000	2009
61	Klenteng, Desa Bandar Tinggi Kec. Bandar Maasilam Kab. Simalungu	32.695.390	2009
62	Bangunan Rumah Toko sbg sarang walet, Jl Diponegoro Perdagangan Kab. Simalungu	412.000.000	2009
63	Tanah dan Bangunan SDN No. 7, Jl. Kampung Melayu Kel. Tanah Jawa Kab. Simalungu	815.700.000	2009
64	SD Al Wasliyah dan SMA Teladan, Jl. Asahan Km. 17 Desa Bangun Kec. Gunung Malela Kab. Simalungu	505.620.000	2009
65	Kedai Kopi, Desa Ujung Padang Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun	264.300.000	2009

**REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010**

KANWIL DJKN		NILAI	Tahun Penilaian
III PEKANBARU		176.885.951.000	
1	Jl. Ahmad Karim No. 12 Kel. Benteng Pasar Atas Kec. Guguk Panjang Bukit Tinggi	3.935.000.000	2008
2	Jl. Raya Soekarno Hatta No. 35 Kel. Parit Rantang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh	1.100.000.000	2008
3	Jl. Lundang Kel. Parit Rantang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh	780.000.000	2008
4	Jl. Niaga No. 156 Kel. Belakang Pondok, Kec. Padang Selatan, Padang	432.530.000	2008
5	Jl. HOS Cokroaminoto No. 12 Kel. Ranah Kongsu Kec. Padang Barat, Padang	432.530.000	2008
6	Jl. Plaua Karam No. 82 Kel. Kp. Pondok Kec. Padang Barat, Padang	6.576.750.000	2008
7	Jl. AR Hakim No. 4 Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan, Padang (Jl. Kampung Nias	2.559.130.000	2008
8	Jl. Sudirman No. 50 Padang Kel. Jatibaru Padang	133.590.000.000	2008
9	Jl. Nipah No. 33 Kel. Berop Nipah Kec. Padang Barat, Padang	10.984.950.000	2008
10	Jl. Kienteng No. 319 Padang Kel. Berok Kec. Padang Timur Padang	242.425.000	2008
11	Jl. Kampung Nias V Kel. Belakang Pondok, Kec. Padang Selatan, Padang	1.791.505.000	2008
12	Jl. Besar Sanglang Kel. Urung Barat Kec. Kundur Utara , Tanjung Batu Kab. Karimur	118.394.000	2008
13	Jl. Kienteng (Sekarang Jl. Usman Harun) Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur Tanjung Batu Kab. Karimur	683.909.000	2008
14	Jl. Kienteng (Sekarang Jl. Usman Harun No. 51) Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur Tanjung Batu Kab. Karimur	347.769.000	2008
15	Jl. Kienteng (Sekarang Jl. Usman Harun) Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur Tanjung Batu Kab. Karimur	2.797.248.000	2008
16	Jl. Raya Sungai Ungar Desa Sungai Ungar Kec. Undur Kab. Karimun	163.231.000	2008
17	Jl. Besar Urung Kota Kel. Urung Kec. Kundur Utara , Kab. Karimun	377.534.000	2008
18	Jl. Besar Tanjung Pinang (Sekarang jl. Jend. Sudirman) Kel. Tanjung Batu Kota , Kec. Kundur Tanjung Batu, Kab. Karimu	2.344.828.000	2008
19	Jl. Nusantara No. 05 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimur	891.987.000	2008
20	Jl. Trikora No. 43 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimur	204.783.000	2008
21	Jl. Trikora Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimur	3.371.495.000	2008
22	Jl. A. Yani Meral Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab. karimur	340.741.000	2008
23	Jl. Pegadaian No. 45 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun, Kab. Karimur	602.030.000	2008
24	Jl. Gang SD Cahay Meral Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab. karimur	826.490.000	2008
25	Jl. Besar Sawang, Kel. Sawang Kota Kec. Kundur Barat, Kab. Karimur	150.351.000	2008
26	Jl. RA Kartini Kel. Pasar Taluk, Kec. Kuantan Tengan, Kab. Kuantan Singing	770.500.000	2008
27	Jl. Pasar (Jl. Katib Sutan) Kel. Pasar Cerenti Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singing	80.080.000	2008
28	Jl. Sudirman No. 109 Baserah, Kel. Pasar Usang Kec. Kauntan Singingi (Jl. Raya Teluk Kuantan	389.761.000	2008
IV PALEMBANG		383.870.355.814	
1	Jl. Kapten Zen Ali Kel. Pasar Lama Kec. Lahat Kab. Lahat	2.261.648.000	2008
2	Jl. Garuda Hitam (dh Jl. Dharmapala) Kel. Pasar Pemiri Kec. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggai	5.226.531.800	2008
3	Jl. Pembangunan Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. Muara Enim	12.540.000	2008
4	Jl. Letnan M. Akip Kel. Pasar II Kec. Muara enim, Kab. Muara Enim	820.000.000	2008
5	Jl. Cut Nyak Dien (dh Jl. Tanjung Priuk) Kel. Tungkal Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim	417.500.000	2008
6	Jl. Garuda Hitam (dh Jl. Dharmapala) Kel. Pasar Pemiri Kec. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggai	5.381.539.500	2008
7	Kel. 15 Ulu Kec. Seb. Ulu I-Palembang	139.270.000	2007
8	Jl. Remiva Rt. 11, Komplek NV Remiva, Kel. Organ Baru Kec. Seb. Ulu I, Palembang (Bekas TK Melati	44.977.200	2007
9	Jl. Letkol. Iskandar No. 708 Kel. 15 Iir Timur I, Palembang	38.632.498.000	2007
10	Jl. Veteran No. 7085 Kel. 20 Iir I, Kec. Iir Timur I, Palembang	1.466.055.000	2007
11	Jl. Jend. Sudirman No. 31/2 Kel. 20 Iir, Kec. Iir Timur I, Palembang	129.965.635.000	2007
12	Jl. Padang Sela Kel. Bukit Lama, Kec. Iir Barat I Palembang	3.982.200.000	2007
13	Jl. Jen. Sudirman KM 3,5 No. 74 Palembang	39.753.525.000	2007
14	Jl. Letkol. Iskandar No. 452 Kel. 15 Iir Timur I, Palembang	3.820.300.000	2007
15	Jl. Rawakasih Kel. Duku Iir Timur II Palembang	4.551.900.000	2007
16	Jl. DI Panjaitan Kel. Plaju Hulu, Kec. Seb. Ulu II, Palembang	1.123.706.578	2007
17	Jl. Bukit Intan Kec. Bukit Intan Pangkal Pinang	2.397.600.000	2007
18	Kel. Semabung Baru II Pangkal Pinang	376.483.000	2007
19	Jl. Mayor H. Muhidin Kel. Masjid Jamik Kec. Rangkui Pangkal Pinang	2.253.372.173	2007
20	Jl. Mesjid Jamik Kec. Rangkui, Pangkal Pinang	1.891.968.000	2007
21	Jl. Mesjid Jamik No. 26 Kel. Mesjid Jamik, Kec. Rangkui, Pangkal Pinang	2.141.958.000	2007
22	Jl. Mayor H. Muhidin Kec. Rangkui, Pangkal Pinang	14.431.964.463	2007
23	Jl. Bukit Intan No. 121, Kel. Bukit Intan Kec. Bukit Intan Pangkal Pinang	32.954.760.000	2007
24	Jl. Jend. A. Yani Kel. Kacang Pedang Pangkal Pinang	3.166.140.000	2007
25	Jl. Mayor Syafri Rachman Kel. Semabung Baru, Kec. Bukit Intan, Pangka	37.879.25.400.00	2007
26	Jl. Yos Sudarso No. 90, Pangkal Pinang	2.399.778.700	2007
27	Jl. Gudang Padi No. 16, Kel. Gudang Padi, Pangkal Pinang	8.227.460.000	2007
28	Jl. Pasir Putih Kel. Pasir Putih, Pangkal Pinang	34.130.620.000	2007
29	Jl. Moh Yamin, Jambi	2.198.500.000	2007
30	Jl. Panglima Polim Jambi Kel. Kasang Jaya	1.820.000.000	2007
31	aset yang dinilai sebelum tahun 2007	37.879.925.400	sebelum tahun 2007
V BANDAR LAMPUNG		1.615.040.000	
1	Jl. WR Supratman No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung	1.615.040.000	2008
VI SERANG		28.533.055.000	
1	Jl. Juhdi No. Kel. Cimunjang, Kec. Serang, Kota Serang, Propins	9.490.600.000	2007
2	Jl. Ki Samaun, Gang Babakan Ledeng No. 06 RT 01 RW 07, Kel. Sukasari,	4.274.000.000	2007
3	Tangerang Kota, Kota Tangerang, Propinsi Banter		2007
4	Jl. Ki. Samaun No. 171 Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	9.099.536.000	2007
5	Jl. Syekh Yusuf RT 005 RW 06 No. 20, Kel. Sujasari, Kec. Tangerang Kota, Kota Tangerang	2.714.000.000	2007
6	Jl. A. Dimiyati No. 52/KH. Sholeh Ali Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	948.000.000	2007
7	Jl. Raya Curug RT 001/007 Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Kab. Banten,	1.171.919.000	2007
8	Tangerang, Banten	835.000.000	2007
9	Jl. Raya Kedaung Barat RT 002/01 Desa Kedaung Barat Kec. Sepatan Timur, Tangerang Banten		2007
VII JAKARTA		Belum Dinilai	

**REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010**

KANWIL DJKN		NILAI	Tahun Penilaian
VIII	BANDUNG	3.926.481.000	2008
1	Jl. A. Yani No. 7 Kel. Nagri Tengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta	3.926.481.000	
IX	SEMARANG	50.782.163.775	
1	Jl. Raya Wonogiri Kel. Giritirto Kec. Wonogiri Kota sekarang Jl. Sudirman No. 147A Kel. Giritirto Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri	1.276.920.000	2008
2	Jl. Bioskop Sena Kel. Kalirang Kec. Bumiayu Kab. Brebes	1.115.205.000	2008
3	Jl. Cendrawasih No. 37 Ds. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes	712.800.000	2008
4	Jl. Brebes Ds. Klampok Kec. Wanasari	5.263.440.000	2008
5	Desa. Dukuh Turi Kec. Bumiayu Kab. Brebes	1.956.475.000	2008
6	Ds. Paguyangan Kec. Paguyangan	33.325.000	2008
7	Jl. Tegal Purwokerto Ds. Linggapura Kec. Tonjong Kab. Brebes	157.500.000	2008
8	Jl. Tegal Purwokerto Ds. Tonjong Kec. Tonjong Kab. Brebes	209.712.000	2008
9	Jl. Koonel Sugiri No. 10 Krenj Banyumas	1.829.578.700	2008
10	Jl. MT Haryono Purworejo	1.678.315.800	2008
11	Jl. A. Yani No. 33 Kebumen Kab. Kebumen	1.144.720.300	2008
12	Pusat Keterampilan Pemuda, Jl. Beskalan No. 13, 15, 17 Yogyakarta	6.161.523.000	2009
13	SMEA Negeri II, Jl. Kemitiran Kidul No. 47 A Yogyakarta	12.946.820.000	2009
14	TK, SD, SMP Bhineka Tunggal Ika, Jl. Poncowinatan No. 16 Yogyakarta	2.328.700.000	2009
15	DPD Pepabri, Jl Dagen No. 44 Yogyakarta	1.281.422.000	2009
16	Sukowati No. 378 Sragen	3.969.600.000	2007
17	Jl. Gondang Winong, Gondang Sragen	396.340.000	2007
18	Jl. Diponegoro No. 23 Kel. Tasik Aging, Kec. Kota, Kab. Rembang	1.570.200.000	2007
19	Jl. Petungi No. 23 Adiwerna, Tegal 52194	2.087.900.000	2007
20	Jl. Dr. Wahidin No. 2, Kel. Temanggung II, Kec/Kab. Temanggung	2.375.200.000	2007
21	Jl. Stasiun No. 5, Kutowinangun, Kabumer	921.466.975	2007
22	Jl. Jeruk No. 18 Kota Pekalongan	1.365.000.000	2007
X	SURABAYA	461.020.708.298	
1	Jl. Kampung Baru, Kel. Gitik, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi(sekarang menjadi Jl. Ki Hajar Dewantoro	5.086.848.000	2008
2	Jl. Genteng Ds. Gendoh Kec. Singojuruh (Skrng Menjadi Jl. Raya No. 155 Ds. Gendoh Kec. Sempu) Kab. Banyuwangi	2.568.685.000	2008
3	Jl. Karyawan No. 4 Mojokerto	3.017.509.000	2008
4	Jl. PB Sudirman No. 40 Mojokerto	1.805.153.000	2008
5	Jl. Kabupaten No. 3 Kel. Mangkujayan, Kec/Kab. Ponorogo	5.471.400.000	2008
6	Jl. Jenderal Sudirman No. 102 dan 105 Kel. Pakunden, Kec/Kab Ponorogo	17.169.205.886	2008
7	Jl. Aris Munandar No. 2-4 Kel. Kidul Dalam Kec. Klojen Kotamadya Malang	8.601.830.000	2008
8	Jl. Madukoro No. 14 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Lawang	2.939.000.000	2008
9	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Lamongan (Dahulu Jl. Ki Sarmidi Mangunsarkoro 16 Kel. Tetis, Kec/Kab. Lamongan	3.187.529.000	2008
10	Jl. Pramuka No. 3 Sendangharjo, Kec/Kab. Tuban	6.436.995.000	2008
11	Jl. Stasiun Sepanjang, Wonocolo, Taman, Sidoarjo	4.857.359.000	2008
12	Jl. Wonocolo, Sepanjang, Sidoarjo	2.121.384.000	2008
13	Jl. KH. Marzuki No. 27 Desa Mindi Kec. Porong Kab. Sidoarjo	5.178.803.000	2008
14	Jl. Hasanuddin No. 12 Kel. Karanganyar, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan	13.399.258.000	2008
15	Jl. Pacet mojosari, Desa Seduri, Mojoasri, Kab. Mojokerto	2.958.371.000	2008
16	Jl. Tanimbar No. 24 Malang	42.402.000.000	2008
17	Jl. Mujair No. 10 Desa Tawang Kec. Wates Kab. Kediri	2.678.000.000	2008
18	Jl. Yulius Usman No. 58 Malang	19.585.000.000	2008
19	Jl. Kartini No. 5 Kediri	10.321.034.000	2008
20	Jl. Wahidin No. 8 Kediri	2.900.491.527	2008
21	Jl. Erlangga No. 22/26 Kediri	6.511.962.000	2008
22	Jl. Basuki Rachmad No. 96 Tulung Agung	7.481.022.000	2008
23	Jl. Arjuno Malang	16.201.000.000	2008
24	Jl. Lawu No.12 Malang	13.511.000.000	2008
25	Jl. Brawijaya No. 20 Kel. Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kediri	18.825.251.000	2008
26	Jl. Monginsidi No. 24 Kel. Setonogedong Kec. Kota Kediri Kodya Kediri	2.117.520.000	2008
27	Jl. Prof. Buya Hamka No. 1A Desa Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang	1.241.971.000	2008
28	Jl. Basuki Rachmat No. 6 Kel. Baliwerti Kota Kediri	9.630.340.000	2008
29	Tanah dan Bangunan Rumah Sakit TK.IV.05.07.02 Kediri	83.555.571.000	2008
30	Tanah dan Bangunan Tempat Perbekalan V-44-02-A Kediri	24.887.683.000	2008
31	Jl. Ki Hajar Dewantoro 18 Ds. Kalibaru Kec. Kalibaru Banyuwangi (Dh Jl. Saleh No.1 Kab. Banyuwangi	751.313.000	2008
32	Jl. Pattimura Desa. Sepanjang Kec. Glenmore Banyuwang	486.089.000	2008
33	Jl. Gajahmada Desa. Genteng Kulon, Kec. Genteng Banyuwang	4.088.161.000	2008
34	Jl. Suprpto Kec. Pesanggrahan Kab. Banyuwang	570.562.000	2008
35	Desa Kebondalem, Kec. Bangotejo Banyuwang	873.530.000	2008
36	Jl. A. Yani Ds./Kec. Purwoharjo Kab. Banyuwang	904.142.000	2008
37	Jl. Muncar, Ds. Kebamen Kec. Srono Banyuwang	1.112.389.000	2008
38	Jl. Ikan Cakalang Kec. Kapatihan Kab. Banyuwang	995.491.000	2008
39	Jl. Kalipahit Desa/Kec. Tegaldimo Kab. Banyuwang	690.140.000	2008
40	Jl. Wijaya Kusuma No.2 Sampang	5.489.396.538	2008
41	Jl. PB Sudirman No. 19 Sampang	562.126.173	2008
42	Jl. Veteran No. 385 Sumenep	843.546.144	2008
43	Jl. Letjen Sunarto No. 15 Bangkalan	2.231.248.871	2008
44	Jl. Niaga No. 21 Pamekasan (dh No 19)	3.007.393.125	2008
45	Jl. Bunguran No. 31-33 Kel. Bongkaran, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya	15.298.000.000	2007
46	Jl. Bunguran No. 63 Kel. Bongkaran, kec. Pabean Cantikan, Surabaya	17.853.750.000	2007
47	Jl. Pekulan, Sekarang Jl. Sultan Iskandar Muda No. 42 Kel. Ujung, Kec	10.519.110.000	2007
48	Jl. Gentengkali 43-45 Kel. Genteng, Kec. Genteng, Surabaya	6.215.625.000	2007
49	Jl. Darmokali 69 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya	3.292.800.000	2007

**REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010**

KANWIL DJKN		NILAI	Tahun Penilaian
50	Jl. Darmokali 69 Kel. Darmo, Kac. Wonokromo, Surabaya	4.599.479.000	2007
51	Jl. Gentengkali 10 Kel. Genteng, Kec. Genteng, Surabaya	6.442.968.000	2007
52	Jl. Gembong Cantikan No. 48-50 Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Surabaya	11.313.400.000	2007
53	Jl. Waspada No. 94-96 Kel. Bongkaran, Kec., Pabeanan Cantikar	10.553.692.500	2007
54	Jl. Sidodadi No. 27 Kel. Sawahan, Surabaya	2.434.000.000	2007
55	Jl. Argopuro No. 27 Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya	806.949.000	2007
56	Jl. Wahid Hasim (dlh Jl. Let. Jend. Panjaitan No. 4) Jember Kidul, Kal	1.511.677.939	2007
57	Jl. Raya A. Yani 89, Bangsalsari, Jember	924.561.595.00	2007
58	Aset yang dinilai sebelum tahun 2007	924.561.595	sebelum tahun 2007
XI PONTIANAK		8.086.895.780	2009
1	SDN 2,4, Jl. Kopol Mahmud, Kel. Pasiran, Kec. Pasiran (sekarang Singkawang Barat	5.173.568.000	2009
2	SDN VII dan lapangan basket Jl. Gereja, Kel. Pemangkat kota, Kec. Pemangkat	293.760.000	2009
3	SDN 2 Jl. Raya Sambas-Pemangkat Desa Makrampai B, Kec. Tebas	72.549.000	2009
4	SDN No.2 Desa Parit Baru, Kec. Selakau	146.232.000	2009
5	SDN No.4 Jl. Raya Sei Duri I, Desa Sei Duri I, Kec. Sei Kunyit	10.280.000	2009
6	SDN No.2 dan SDN No.3 (inpres) Jl. Raya Sei Kunyit, Desa Sei Kunyit Laut, Kec. Sei Kunyit	28.290.000	2009
7	SD Inpres No.6 Nusapati Jl. Saliong dalam, Desa Selung/Nusapati, Kec. Sei Pinyuh	1.446.900	2009
8	SDN No.6 Pak Bulu Jl. Raya Mandor Desa Kepayang, Kec. Sei Pinyuh	29.113.000	2009
9	SDN No. 2 Anjungan Jl. Raya Toho, Desa Anjungan Dalam, Kec. Sei Pinyuh	58.320.000	2009
10	SDN Terap Jl. Raya Toho- Karangn, Desa Terap, Kec. Tohe	12.183.500	2009
11	SDN Sei Purun Besar Jl. Swadaya Sei Purun Besar Desa Sei Purun Besar, Kec. Siantar	4.836.500	2009
12	SD Santo Yosef (YP3 GK) Kampung Sinam, Kec. Pemangkat	71.928.000	2009
13	Tanah/Bangunan Kosong Desa yohandung, Kec. Salamantar	12.500.000	2009
14	Tempat Tinggal Kepala Sekolah dan Guru SD, Jl. Raya Pontianak-Singkawang, Desa Sei Purun Kecil, Kec. Sei Puyu	2.209.350	2009
15	Rumah Tinggal Guru SDN I dan Penyuluh Pertanian Jl. Raya Sei Bakau Kecil Desa Sei Bakau Kecil, Kec. Menpawah Hili	10.674.950	2009
16	Madrasah Islamiyah Jl. Raya Panibungan Desa. Manibungan Kec. Menpawah Hili	62.600.000	2009
17	Gedung Generasi Muda Jl. Raya Sei Pinyuh Kel. Sei pinyuh, Kec. Sei Pinyul	79.980.000	2009
18	SMPN 8 Jl. Dr. Setia Budi Desa Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatar	312.460.000	2009
19	Bekas KUD Nanga pinoh Jl. Merak, Kompleks Pasar Nanga Pinoh Kab. Melaw	32.400.000	2009
20	Perumahan PPL Desa Mensere Kec. Tebas	34.480.000	2009
21	Asrama Guru/Karyawan Penda Jl. Merdeka Ketapang, Desa Kampung-Kantor, Kec. Matan Hilir Utara	1.618.896.000	2009
22	Perumahan Guru SD Jl. Raya Pontianak-Singkawang Desa Sei Bakau Kecil Laut Kec. Sei Pinyul	668.580	2009
23	Bekas Kantor depdikbudcam nanga pinoh Jl. Melati Kompleks Pasar Nanga pinoh Kab. Melaw	17.520.000	2009
XII BANJARMASIN		151.777.333.000	
1	Jl. H.M. Nurung Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu	1.546.416.000	2008
2	Jl. Lambung Mangkurat No. 10 Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	15.032.368.000	2008
3	Jl. Jend. Sudirman No. 18 Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	3.196.085.000	2008
4	Jl. DI Panjaitan No. 6 Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	4.736.905.000	2008
5	Jl. Lambung Mangkurat No. 9 Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	22.557.091.000	2008
6	Jl. Surya Gandamana Desa Sebatung, Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru	-	
7	Jl. P. Samudera No. 95 Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	16.770.000.000	2007
8	Jl. P. Samudera No. 97-99 Kel. Kertak Baru Uli, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	9.277.500.000	2007
9	Jl. P. Samudera Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota	3.600.000.000	2007
10	Jl. Brigjen Katamdo Kel. Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota	6.305.250.000	2007
11	Jl. Jend. A. Yani Km 2,5 No. 180 Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	12.312.465.000	2007
12	Jl. Kapt. Pierre Tendean No. 22 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	14.438.580.000	2007
13	Jl. Veteran Kel. Kampung Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	38.879.950.000	2007
14	Jl. K.S Tubun No. 122 Kel. Kelayan Barat, Kec. Banjarmasin, Kota Banjarmasin	3.124.723.000	2007
XIII SAMARINDA		74.200.602.000	2008
1.	Jl. Mulawarman (P. Hidayattullah) Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	2.718.363.000	2008
2.	Jl. Nakhoda No.30-32 Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	3.601.252.000	2008
3.	Jl. P. Hidayattullah 64 Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	2.846.480.000	2008
4.	Jl. Pangeran Diponegoro 9 Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	2.355.675.000	2008
5.	Jl. Yos Sudarso Kel. Karang Mumus Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	20.679.099.000	2008
6.	Jl. Mulawarman Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	3.906.875.000	2008
7.	Jl. KH Moh Khalid No. 19 Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	2.250.388.000	2008
8.	Jl. Mulawarman Kel. Karang Mumus Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	9.428.370.000	2008
9.	Jl. Bukit Niaga No. 43 Kel. Kelandaran Ilir, Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan	17.724.000.000	2008
10.	Jl. Sunoi, Rt Kel. Kampung Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan	2.791.200.000	2008
11.	Jl. Letjen Suprpto No. 1 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan	5.898.900.000	2008
XIV DENPASAR		Belum Dinilai	
XV MAKASSAR		5.454.511.000	
1	Jl. Sangir Lr. 223 No. 9 (153) Kel. Melayu Kec Wajo, Makassar	151.672.000	2007
2	Jl. G. Latimojo No. 54 A (No. 124A) Kel. Lariangbangi, Makassar	755.860.000	2007
3	Jl. Ranggong Daeng Romo No. No. 7 Kel. Molaku Kec. Ujung Pandang	499.494.000	2007
4	Jl. Lembuh No. 63 Kel. Melayu Kec. Wajo, Makassar	728.068.000	2007
5	Jl. Jend. Sudirman No. 52 Kel. Parang Kec. Mamajang (No.42), Makassar	2.186.911.000	2007
6	Jl. Serui No. 18 Kel. Pattunuang, Kec Wajo, Kota Makassar	456.758.000	2007
7	Jl. Sumba No. 44 Kel. Pattunuang, Kec Wajo, Makassar	675.748.000	2007
XVI MANADO		3.053.000.000	
1.	Jl. Sultan Hasanuddin No. 22 Kel. Biawao Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo	3.053.000.000	2008
XVII JAYAPURA		720.789.000	
1	Jl. Macan Tutul No. 137 RT.03/RW.01 Dooim	720.789.000	2007
TOTAL		1.449.937.014.583	

JUMLAH ASET BEKAS MILIK ASING/CINA YANG TELAH DINILAI

Posisi per 31 Desember 2010

NO	KANWIL DJKN	Data Awal		Cek Fisik		Penilaian		NILAI (Rupiah)
		(aset)	(%)	(aset)	(%)	(aset)	(%)	
1	I BANDA ACEH	16	100	16	100	8	50	15.134.350.000,00
2	II MEDAN	139	100	127	91	65	47	84.875.778.916,00
3	III PEKANBARU	76	100	76	100	28	37	176.885.951.000,00
4	IV PALEMBANG	84	100	43	51	30	36	383.870.355.814,00
5	V LAMPUNG	16	100	11	69	1	6	1.615.040.000,00
6	VI SERANG	9	100	8	89	7	78	28.533.055.000,00
7	VII JAKARTA	48	100	10	21	0	0	0,00
8	VIII BANDUNG	104	100	45	43	1	1	3.926.481.000,00
9	IX SEMARANG	58	100	54	93	22	38	50.782.163.775,00
10	X SURABAYA	170	100	144	85	57	34	461.020.708.298,00
11	XI PONTIANAK	159	100	39	25	23	14	8.086.895.780,00
12	XII BANJARMASIN	13	100	13	100	13	100	151.777.333.000,00
13	XIII SAMARINDA	17	100	13	76	11	65	74.200.602.000,00
14	XIV DENPASAR	23	100	20	87	0	0	0,00
15	XV MAKASSAR	40	100	21	53	7	18	5.454.511.000,00
16	XVI MANADO	22	100	4	18	1	5	3.053.000.000,00
17	XVII JAYAPURA	15	100	1	7	1	7	720.789.000,00
JUMLAH		1009	100	645	64	275	27	1.449.937.014.583,00

Ket:

Selama semester II tahun 2009 tidak ada peningkatan jumlah ABMA/C yang telah dinilai, karena adanya hambatan dari pihak penghuni, serta prioritas pekerjaan saat ini adalah ditujukan untuk penyelesaian status hukum ABMA/C sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.

188/PMK.06/2008. Hambatan dari pihak penghuni dalam pelaksanaan penilaian di lapangan menyebabkan Penilai DJKN tidak dapat melaksanakan survei fisik atas aset (penghuni/penguasa/pihak ketiga yang menempati tidak memperkenalkan Penilai DJKN masuk ke objek yang akan dinilai). Dalam rangka penilaian aset, jika survei fisik aset tidak dapat dilakukan maka dengan sendirinya penilaian tidak dapat dilaksanakan.

**DAFTAR ASET BEKAS MILIK ASING/CINA YANG BELUM SELESAI
BERDASARKAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.06/2008
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010**

NO	KANWIL	PROPINSI	PETUNJUK PENYELESAIAN									JUMLAH
			Disertifikatkan a.n. Pemerintah RI	Disertifikatkan a.n. Pemda	Kompensasi	Ditukar	Hibah	Dikembalikan	Dikeluarkan	Beberapa Alternatif Petunjuk	Penelitian	
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
1	I BANDA ACEH	NAD		3	3	5				5		16
2	II MEDAN	SUMATERA UTARA	11	48	48					24	6	137
3	III PEKANBARU	SUMATERA BARAT	1	2	1					3	4	11
4		RIAU		5						2		7
5		KEPULAUAN RIAU	3	47						6	2	58
6	IV PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	2	16	5	2				6	10	41
7		BANGKA BELITUNG	4	10	1	2				12	1	30
8		JAMBI	2	9	1							12
9	V BDR LAMPUNG	LAMPUNG	1	9	1					4	1	16
10		BENGKULU										
11	VI SERANG	BANTEN		5	1					1	2	9
12	VII JAKARTA	DKI JAKARTA	3	17	13					1	13	47
13	VIII BANDUNG	JAWA BARAT	7	50	34					1	1	93
14	IX SEMARANG	JAWA TENGAH	7	16	16					10		49
15		D.I. YOGYAKARTA	1	2	3						3	9
16	X SURABAYA	JAWA TIMUR	27	75	26	3				25	11	167
17	XI PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	16	75	45					6	17	159
18	XII BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	4	3	6							13
19		KALIMANTAN TENGAH										
20	XIII SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR		5	5						4	14
21	XIV DENPASAR	BALI	0	4		1				0		5
22		NTB	2	1		1				2		6
23		NTT		3	4	1				2		10
24	XV MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	3	10	13					7	3	36
25		SULAWESI TENGGARA		1	1					2		4
26		SULAWESI BARAT										
27	XVI MANADO	SULAWESI TENGAH	1	4	1							6
28		GORONTALO		1								1
29		MALUKU UTARA	1	1						1		3
30		SULAWESI UTARA		2	1		1			6	2	12
31	XVII JAYAPURA	PAPUA		3								3
32		MALUKU		6						5		11
33		IRIAN JAYA BARAT			1							1
JUMLAH			96	433	230	15	1	0	0	131	80	986

Ket:

Dari total aset sebanyak 1.010 dalam Lampiran PMK No. 188/PMK.06/2009, tersisa 986 karena selama Tahun 2009 dan 2010 telah diselesaikan ABMA/C sebanyak 24 aset, yaitu:

- 1 Pemantapan status hukum ABMA/C menjadi BMN sebanyak 1 aset di Prov. DKI Jakarta, 4 aset di Prov. Jawa Barat, 1 aset di Prov. Jawa Timur, dan 2 aset di Prov. Bali.
- 2 Pemantapan status hukum ABMA/C menjadi BMD sebanyak 2 aset di Sumatera Utara, 7 aset di Jawa Barat, 1 aset di Jawa Tengah, 2 aset di Jawa Timur, dan 1 aset di Kalimantan Timur.
- 3 Pelepasan ABMA/C kepada pihak ketiga dengan pembayaran kompensasi sebanyak 1 aset di Provinsi Bangka Belitung.
- 4 Pengeluaran ABMA/C dari daftar lampiran PMK 188/2008 sebanyak 2 aset di Provinsi Kalimantan Timur.

Tidak Ada Kompensasi Penjualan ABMA/C pada Tahun 2010 :

Terdapat 19 Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) yang diselesaikan status hukum/kepemilikannya pada semester I tahun 2010, namun tidak ada yang dilepaskan kepada pihak ketiga dengan pembayaran kompensasi, melainkan dengan cara dimantapkan status hukumnya menjadi BMN/D.

ABMA/C yang selesai diproses setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tanggal 20 November 2008 berjumlah 24 aset sebagaimana daftar terlampir (termasuk ABMA/C luas 947,47 m2 di Jl.S.Parman (Klenteng 178) yang dilepaskan kepada Yayasan Budi Dharma "Hok Tek" Tanjung Pandan dengan pembayaran kompensasi sebesar Rp346.407.500,00 pada tanggal 8 April 2009 dan 29 April 2009.

**MONITORING TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2009**

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT
			1	2	3		
I	TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN						
1	Pendapatan dan Hibah						
1.1	Penerimaan Perpajakan menurut SAU senilai Rp1,26 triliun belum dapat direkonsiliasi dengan penerimaan menurut SAI dan data penerimaan menurut MPN sebesar Rp1,59 triliun yang tercatat pada Bank Persepsi belum dapat dijelaskan	1. Terdapat perbedaan pencatatan penerimaan perpajakan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kas Negara yaitu: a. Sebanyak 179.195 transaksi senilai Rp1,08 triliun tercatat sebagai penerimaan di Kas Negara tetapi tidak tercatat di DJP. b. Sebanyak 189.494 transaksi senilai Rp1,21 triliun tercatat sebagai penerimaan di DJP tetapi tidak tercatat di Kas Negara. 2. Terdapat selisih sebesar Rp178,44 miliar antara data penerimaan menurut Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dengan data Kas Negara yang belum dapat dijelaskan. 3. Terdapat penerimaan pajak lainnya yang tercatat berdasarkan data penerimaan di bank sebesar Rp1,60 triliun yang belum dapat dijelaskan. Hal tersebut di atas terjadi karena adanya kelemahan aplikasi MPN.	X			Pemerintah telah dan sedang melakukan upaya-upaya: 1. Pengkajian dalam rangka penyempurnaan pola penatausahaan penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi 2 (MPN G.2) yang berbasis sistem billing (<i>billing sytem</i>). Melalui pola ini, wajib pajak diarahkan untuk melakukan proses <i>billing</i> (<i>create billing</i>) dengan tujuan memberi kepastian tentang konten setoran penerimaan negara, sehingga memudahkan untuk dilakukan rekonsiliasi. Dalam rangka peningkatan kualitas data, untuk menjembatani antara penatausahaan yang masih menggunakan MPN G.1, saat ini sedang dikaji pemberlakuan sistem <i>billing</i> dalam masa transisi yang diharapkan dapat dimulai (<i>running well</i>) pada penatausahaan penerimaan negara tahun 2011 (dimulai uji coba pada Januari 2011). Dari kajian yang masih dalam proses kesepakatan, masa transisi akan dimulai dengan <i>piloting</i> yang akan di-<i>launch</i> pada Oktober 2010 mendatang. 2. Pengkajian mengenai metode rekonsiliasi, dengan alternatif penggunaan kombinasi elemen data MPN sebagai <i>primary key</i> dalam proses rekonsiliasi. Dari kajian tersebut, hingga saat ini	1. Terkait dengan pengkajian penyempurnaan pola penatausahaan MPN, saat ini sedang dirancang pelaksanaan setoran penerimaan negara melalui <i>billing system</i>. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik (<i>Billing System</i>) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara, yang saat ini sedang dalam proses uji coba dan diharapkan bulan Juni 2011 sudah beroperasi. 2. Terkait dengan metode rekonsiliasi, saat ini sedang dilakukan finalisasi metode rekonsiliasi dengan kombinasi 2 (dua) elemen data. 3. Terkait dengan pelaksanaan rekonsiliasi, saat ini rekonsiliasi sudah dilakukan secara periodik oleh Ditjen Perbendaharaan. Rekonsiliasi antara SAI (MPN) dengan data KPPN telah dilakukan <i>by system</i>. 4. Terkait dengan pemantauan data <i>unmatch</i> MPN/SAI dengan data SAU di KPPN, saat ini pemantauan data tersebut sudah dilakukan dengan cukup baik, dan atas hal tersebut juga dilakukan monitoring oleh Ditjen Perbendaharaan.

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT
			1	2	3		
						masih dilakukan pendalaman mengenai kemungkinan penggunaan ID <i>messaging</i> P7 (tanggal transaksi) dan P11 (nomor transaksi). Kombinasi kedua elemen data tersebut hingga saat ini diidentifikasi sebagai faktor MPN <i>unique</i> per transaksi. Melalui kajian tersebut, proses penyempurnaan pola rekonsiliasi masih terus dilakukan. 3. Pengintensifan rekonsiliasi penerimaan perpajakan antara data SAI/MPN dengan data Kas Negara. 4. KPPN secara mandiri melakukan pemantauan data <i>unmatch</i> MPN/SAI dengan data SAU di KPPN masing-masing melalui intranet Ditjen Perbendaharaan dan selanjutnya melakukan konfirmasi ke Bank Persepsi mitra kerja KPPN bersangkutan.	5. Dirjen Perbendaharaan telah menyampaikan surat kepada Bank/Pos Persepsi Nomor 4277/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reversal, yang berisi bahwa, dalam rangka monitoring atas pelaksanaan reversel, Bank/Pos Persepsi menyampaikan setiap hari kerja daftar setoran penerimaan Negara yang telah mendapatkan NTPN yang direversal dan rekening koran harian. 6. Telah dilakukan <i>User Acceptance Test (UAT)</i> ulang sistem MPN pada Bank/Pos Persepsi untuk melihat kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam melakukan layanan penerimaan negara. UAT ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam menjalankan SOP Penerimaan Negara sehingga diharapkan data penerimaan negara yang dilaporkan ke Kementerian Keuangan lebih akurat.
1.2	Pemerintah belum memiliki pengaturan yang jelas atas mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)	Pemerintah tidak memiliki pengaturan mengenai jenis transaksi apa saja yang dapat dilunasi dengan mekanisme DTP, mekanisme pengendalian, dan mekanisme pertanggungjawabannya.		X		Kebijakan Pajak DTP pada prinsipnya adalah untuk memberikan insentif bagi investor untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan membantu meringankan beban masyarakat dengan tetap memenuhi ketentuan perpajakannya. Pemerintah akan menyusun ketentuan yang mengatur jenis transaksi Pajak DTP, termasuk mekanisme pengendalian dan pertanggungjawaban Pajak DTP.	1. Pemerintah telah melakukan koreksi terhadap Pajak DTP tahun 2009 sebesar Rp21,46 triliun. Koreksi tersebut ditindaklanjuti dengan pembatalan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-368/PJ/2010, dan pembatalan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KM.05/2010 atas belanja subsidi PPN BBM Bersubsidi. 2. Penyelesaian PPN DTP atas BBM Bersubsidi diselesaikan dalam TA 2010 sesuai amanat Pasal 9E UU No. 2 Tahun 2010 tentang APBN-P TA 2010 yang menyatakan bahwa belanja subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan kewajiban Pemerintah atas subsidi pajak DTP, termasuk kekurangan subsidi pajak DTP pada tahun-tahun sebelumnya berdasarkan kemampuan keuangan negara. Hal ini telah

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT
			1	2	3		
							dibahas oleh Pemerintah dan disetujui oleh DPR pada Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR RI tanggal 6 Desember 2010. 3. Telah ditetapkan PMK Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak DTP.
1.3	Sistem koordinasi, pencatatan, dan penagihan atas PPh Migas tidak dapat memastikan kelengkapan dan keakuratan Penerimaan PPh Migas yang menjadi hak Pemerintah	1. Bagian Pemerintah berupa PPh Migas dari kontraktor tidak dapat diyakini seluruhnya akan dibayar oleh para kontraktor. 2. Terdapat tunggakan pajak dari kekurangan pembayaran Pajak Perseroan (PPs) dan Pajak Dividen, Bunga dan Royalti (PBDR) untuk periode tahun 2005 s.d. Desember 2009 yang belum dicatat sehingga nilai piutang yang seharusnya belum tercermin. 3. Realisasi penerimaan negara dari PPh Migas sebesar Rp4.445.799,92 juta per 31 Desember 2009 tertunda karena atas penerimaan tersebut belum dapat diidentifikasi jenis dan wajib pajaknya.		X		Pemerintah akan dan terus melakukan upaya-upaya: 1. Memperbaiki sistem administrasi PPh Migas. Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait administrasi <i>Production Sharing Contract</i>, dan tata cara pelaporan dan perhitungan bagian negara untuk operator sekaligus untuk <i>partner</i> terkait PPh Migas. Saat ini sudah dilakukan koordinasi dengan BPMIGAS, Ditjen Pajak, dan Kementerian ESDM untuk menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyampaian dan Laporan Bagian Pemerintah dan Pajak dari Migas. 2. Meningkatkan koordinasi antar unit terkait, yaitu DJP, DJA, Kementerian ESDM, dan BPMIGAS.	1. Terhadap penyusunan PMK tentang Tata Cara Pembayaran Bagian Negara dan Pajak Penghasilan Migas oleh Kontraktor Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, saat ini sedang proses pembahasan draft PMK dimaksud. 2. Koordinasi antar unit terkait terus ditingkatkan dengan penyampaian laporan bulanan realisasi penerimaan PPh Migas dari Ditjen Anggaran kepada Ditjen Pajak dan Ditjen Perbendaharaan. Laporan bulanan ini digunakan oleh Ditjen Pajak sebagai alat monitoring penerimaan PPh Migas.
1.4	Penerimaan hibah yang dilaporkan dalam LKPP belum dapat diyakini kelengkapan dan keakuratannya	1. Perbedaan pencatatan nilai penerimaan hibah berupa kas dan non kas yang disebabkan perbedaan penggunaan dokumen sumber oleh DJPU dan DJPB masih terjadi. 2. K/L yang menerima hibah secara langsung belum seluruhnya melaporkan penerimaan hibahnya kepada Kementerian Keuangan baik DJPB dalam hal hibah berupa kas, maupun kepada DJPU dalam hal hibah berupa barang/jasa.	X			Pemerintah akan dan terus melakukan upaya-upaya: 1. Mengintensifkan pelaksanaan Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor Per-10/PB/2010 dan Nomor Per-01/PU/2010 tentang Mekanisme Penggunaan Dokumen Sumber, Pencatatan dan Rekonsiliasi Realisasi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang mengatur penggunaan dokumen sumber <i>Notice of Disbursement</i> (NoD) sebagai dasar pencatatan hibah luar negeri. Dengan peraturan bersama ini, perbedaan waktu	1. Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor Per-10/PB/2010 dan Nomor Per-01/PU/2010 tentang Mekanisme Penggunaan Dokumen Sumber, Pencatatan dan Rekonsiliasi Realisasi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri telah dilaksanakan sejak Juni 2010. 2. Terhadap pelaksanaan PMK Nomor 40/PMK.05/2009, sosialisasi dan diseminasi

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT
			1	2	3		
		3. Perbedaan pencatatan penerimaan hibah juga disebabkan tidak konsistennya perlakuan akuntansi atas penerimaan hibah non kas. 4. Penerimaan hibah secara langsung pada 16 K/L minimal senilai Rp778.692,64 miliar dan USD362.54 ribu belum dilaporkan kepada BUN sehingga tidak dilaporkan sebagai penerimaan hibah dalam LKPP Tahun 2009				pencatatan hibah luar negeri dapat dihilangkan. 2. Mengintensifkan pelaksanaan PMK Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah. 3. Meningkatkan koordinasi antar K/L dan unit terkait mengenai bentuk dan format peraturan teknis tentang rekonsiliasi penerimaan hibah. Rekonsiliasi secara rutin dilaksanakan pada tahun 2010 dan tahun-tahun mendatang secara triwulanan. 4. Mengidentifikasi seluruh hibah yang diterima langsung oleh K/L dan membuat register dan revisi DIPA atas hibah langsung yang teridentifikasi. 5. Membuat mekanisme dan SOP internal K/L terkait dengan proses penerimaan hibah, pelaporan, dan monitoring.	kepada seluruh K/L telah dan terus dilakukan. 3. Koordinasi antar unit di Kementerian Keuangan dan seluruh K/L telah dan terus dilakukan. Rekonsiliasi juga telah dilakukan secara rutin setiap triwulanan. 4. Terhadap revisi DIPA atas hibah langsung terutama hibah dalam negeri, Telah ditetapkan PMK Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Hibah Luar/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam Bentuk Uang. 5. Terhadap penyusunan mekanisme dan SOP internal K/L, beberapa K/L telah menyusun SOP dimaksud.
2	Sistem Pengendalian Belanja						
2.1	Pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran tidak sesuai kegiatan yang dilakukan minimal sebesar Rp27,67 triliun.	1. Terdapat belanja barang habis pakai (persediaan) dan Belanja Bantuan Sosial minimal sebesar Rp434.796,68 juta yang dianggarkan pada Belanja Modal, sehingga dalam Neraca K/L, barang habis pakai tersebut dicatat sebagai perolehan Aset Tetap. 2. Terdapat Aset Tetap minimal sebesar Rp164.818,83 juta yang diperoleh bukan dari anggaran Belanja Modal (AKun 53). 3. Terdapat Belanja Modal dan Belanja Barang di 3 K/L sebesar Rp188.108,77 juta dianggarkan dari Belanja Bantuan Sosial. 4. Terdapat Belanja Bantuan Sosial di 3 K/L minimal sebesar Rp4.615,90 juta	X			Pemerintah akan dan terus melakukan upaya-upaya: 1. Lebih tegas menegakkan peraturan agar penyusun dan pengguna anggaran menerapkan Bagan Akun Standar secara konsisten. 2. Mengoptimalkan penelaahan dan verifikasi terhadap RKA-KL, melakukan pembinaan kepada K/L dalam penyusunan anggaran, menyusun prosedur dan kriteria dalam pengajuan kegiatan, dan melakukan inventarisasi aset tetap yang dihasilkan dari non belanja modal. 3. Mengatur penggunaan Belanja Lain-lain, yaitu dengan memindahkan belanja lain-lain dari Bagian Anggaran Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain ke Bagian Anggaran K/L, sebagaimana diamanatkan UU No. 2 Tahun 2010 tentang APBN-P TA 2010.	1. Sosialisasi dan diseminasi kepada para penyusun dan pengguna anggaran dalam rangka penerapan Bagan Akun Standar telah dan akan terus dilakukan. 2. Penelaahan dan verifikasi RKA-KL telah dilakukan secara optimal, pembinaan kepada K/L juga telah dan akan terus dilakukan. Inventarisasi aset tetap yang dihasilkan dari belanja non modal telah dilakukan. 3. Terhadap realokasi belanja lain-lain, Pasal 16 ayat (1) huruf a UU APBN-P TA 2010 telah mengatur bahwa dalam tahun 2010 dapat dilakukan pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran (BA) Belanja Lain-lain (BA 999.06/999.08) ke BA K/L. Saat ini telah ditetapkan PMK Nomor 187/PMK.02/2010

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT
			1	2	3		
		yang dianggarkan dari Belanja Barang. Prosedur penganggaran dan alokasi anggaran Belanja Lain-lain tidak sesuai ketentuan dan klasifikasi penyajian realisasi belanja lain-lain minimal tidak tepat.				4. Meningkatkan pengawasan, pemantauan dan koordinasi antar unit terkait dalam pembahasan dan penyusunan anggaran. 5. Memberikan sanksi bagi satuan kerja K/L yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pengklasifikasian anggaran.	tentang Tata Cara Realokasi Anggaran dari BA Belanja Lain-lain ke BA K/L. 4. Peningkatan pengawasan, pemantauan, dan koordinasi antar unit terkait dalam pembahasan dan penyusunan anggaran telah dan akan terus dilakukan. 5. Terhadap satker yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pengklasifikasian anggaran telah diberikan surat teguran/peringatan dari masing-masing K/L.
3	Sistem Pengendalian Pembiayaan						
3.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri yang dilaporkan LKPP belum sepenuhnya menggambarkan jumlah dan saat dana yang ditarik oleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri	Seharusnya penarikan PLN yang disajikan dalam LKPP didasarkan pada data yang valid dan mutakhir sesuai dengan periode dan besar dana yang ditarik Pemerintah dari pemberi pinjaman, serta menggunakan kurs yang sama baik oleh DJPB maupun DJPU. Kondisi tersebut mengakibatkan penarikan pinjaman yang dilaporkan dalam LKPP belum mencerminkan realisasi penarikan yang wajar.	X			Pemerintah akan dan terus melakukan upaya-upaya: 1. Mengintensifkan pelaksanaan Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor Per-10/PB/2010 dan Nomor Per-01/PU/2010 tentang Mekanisme Penggunaan Dokumen Sumber, Pencatatan dan Rekonsiliasi Realisasi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang mengatur penggunaan dokumen sumber <i>Notice of Disbursement</i> (NoD) sebagai dasar pencatatan penarikan pinjaman luar negeri. Dengan peraturan bersama ini, perbedaan waktu pencatatan pinjaman luar negeri dapat dihilangkan. 2. Menyempurnakan proses bisnis dalam tata cara penarikan PHLN serta pengakuan penerimaan pembiayaan/ utang atau penerimaan hibah.	1. Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor Per-10/PB/2010 dan Nomor Per-01/PU/2010 tentang Mekanisme Penggunaan Dokumen Sumber, Pencatatan dan Rekonsiliasi Realisasi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri telah dilaksanakan sejak Juni 2010. 2. Penyempurnaan proses bisnis dalam tata cara penarikan PHLN dan struktur rekening serta konsep akuntansi pengelolaan reksus dan dana talangan karena Reksus kosong sedang dilaksanakan. 3. Revisi PMK No.143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Pencairan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. sedang dalam tahap finalisasi. Revisi tersebut menegaskan pengakuan pembiayaan dan penerimaan hibah diakui berdasarkan NoD, sementara pengakuan belanja didasarkan pada SP2D/SP3.
3.2	Pemerintah belum menerapkan kebijakan akuntansi atas pengakuan selisih kurs.	1. Pemerintah belum memiliki sistem yang memadai untuk menghitung selisih kurs atas seluruh aset dan kewajiban moneter yang dimiliki, sehingga selisih	X			Pemerintah telah melakukan identifikasi transaksi-transaksi dalam mata uang asing yang berpotensi menimbulkan selisih kurs. Berdasarkan hasil kajian, Pemerintah sedang merumuskan <i>business process</i>	1. Kajian terkait selisih kurs telah dilakukan dan telah ditetapkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 71/PB/2010 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT
			1	2	3		
		kurs yang dihitung hanya mencakup selisih kurs dari Rekening Kas BUN di BI (RKUN dan Rekening Penempatan). Sementara itu, selisih kurs yang berasal dari rekening pemerintah dalam valuta asing lainnya masih belum disajikan. Selain Rekening Kas BUN di BI. 2. Pemerintah juga belum menetapkan kebijakan apakah selisih kurs tersebut seluruhnya direalisasikan (<i>realized</i>) atau sebagian belum direalisasikan (<i>unrealized</i>).				dan akuntansi atas perlakuan selisih kurs.	Umum Negara pada tanggal 31 Desember 2010. 2. Saat ini sedang dikembangkan aplikasinya untuk pelaporan di LRA dan LAK. 3. Konsep Buletin Teknis SAP tentang Selisih Kurs sedang dalam proses finalisasi.
4	Sistem Pengendalian Aset						
4.1	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilaporkan di Neraca LKPP tidak mencerminkan saldo kas yang sebenarnya.	1. Penerimaan dan pengeluaran transito serta saldo akun Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan di Neraca KPPN tidak dapat digunakan sebagai alat monitoring Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilaporkan oleh K/L; 2. Pembukuan oleh Bendahara Pengeluaran pada beberapa satker di 17 K/L tidak dibuat secara tertib. 3. Sulitnya melakukan penelusuran pada BKU karena tidak tertibnya pencatatan dan tidak adanya buku pembantu; 4. Kas di Bendahara Pengeluaran rawan penyalahgunaan karena tidak adanya <i>cash opname</i> dan pencatatan yang tidak tertib; dan 5. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan di neraca tidak sesuai dengan saldo kas fisik yang ada dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.	X			Pemerintah akan dan terus melakukan upaya-upaya: 1. Mengintensifkan pelaksanaan PMK Nomor: 73/PKM.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L/Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-47/PB/2009 tanggal 10 Nopember 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L/Kantor/Satuan Kerja. 2. Menerbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 61/PB/2009 tentang Penyelesaian Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan (UP). 3. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan kepada Bendahara Pengeluaran satuan kerja. 4. Meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengelolaan pertanggungjawaban dan pelaporan uang persediaan pada seluruh satuan kerja.	1. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PMK Nomor: 73/PKM.05/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-47/PB/2009, telah disiapkan aplikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ Bendahara Pengeluaran). Saat ini aplikasi tersebut telah dilakukan <i>User Acceptance Test (UAT)</i>. Aplikasi LPJ akan segera diterapkan/digunakan oleh para Bendahara Pengeluaran/Satker, KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN). 2. Pembinaan dan pelatihan kepada Bendahara Pengeluaran satuan kerja telah dan akan terus dilaksanakan. 3. Dalam rangka pertanggungjawaban dan pelaporan uang persediaan, koordinasi telah dan akan terus dilakukan, seperti: - Direktorat PKN mengingatkan kepada para Kepala Kanwil Ditjen untuk menyampaikan Rekapitulasi LPJ Bendahara di wilayah kerja

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT
			1	2	3		
							masing-masing sesuai ketentuan, guna dikompilasi dan untuk selanjutnya dilakukan rekonsiliasi pada tingkat pusat. - Penegasan kembali kepada para kepala KPPN di seluruh Indonesia untuk melakukan rekonsiliasi internal pada KPPN dan tata cara penyelesaian pengembalian sisa UP. - Akan dilakukan inventarisasi permasalahan selisih fisik kas dengan buku di bendahara pengeluaran untuk memformulasikan tata cara penyelesaiannya.
4.2	Pencatatan dan pelaporan persediaan per 31 Desember 2009 tidak berdasarkan <i>stock opname</i> dan tidak didukung penatausahaan yang memadai	1. Pemeriksaan secara uji petik atas satker-satker di lingkungan K/L menunjukkan tidak seluruh satker melakukan <i>stock opname</i> persediaan pada akhir tahun. 2. Sebagian satker di 48 K/L tidak menatausahakan pencatatan persediaannya dengan tertib di antaranya tidak memiliki administrasi mutasi persediaan yang lengkap sehingga hasil <i>stock opname</i> tidak dapat dibandingkan dengan persediaan yang seharusnya ada di akhir tahun, serta hasil <i>stock opname</i> tidak digunakan dalam pelaporan. 3. Terdapat 8 K/L yang masih belum memiliki regulasi internal berupa SOP yang mengatur tentang kebutuhan persediaan, pencatatan dan pelaporan 4. Terdapat barang usang/tidak terpakai yang masih tercatat sebagai persediaan K/L per 31 Desember 2009 dan belum diminta penghapusannya. 5. Beberapa K/L mengalami kesulitan	X			Pemerintah akan dan terus melakukan upaya-upaya: 1. Memerintahkan para kepala satker K/L agar melakukan <i>stock opname</i> setiap menjelang akhir periode pelaporan, sehingga data yang tersaji merupakan hasil pemutakhiran, menyelenggarakan kartu persediaan untuk mencatat saldo dan mutasi persediaan, dan menyelenggarakan akuntansi persediaan secara cermat dan tepat waktu. 2. Meningkatkan pembinaan, pelatihan, dan sosialisasi kepada satker dalam rangka pengelolaan persediaan yang tertib sesuai dengan ketentuan. 3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan persediaan. 4. Menyusun SOP internal K/L mengenai penatausahaan persediaan yang mencakup kebijakan akuntansi, prosedur pembukuan, tata cara <i>stock opname</i> dan prosedur pelaporan persediaan.	1. Beberapa K/L telah menyampaikan kepada satker yang berada di lingkungannya untuk melakukan perhitungan fisik (<i>stock opname</i>) atas jumlah persediaan pada saat tanggal pelaporan. 2. Pemerintah (dhi. DJKN) telah mengadakan sosialisasi-sosialisasi peraturan-peraturan baru terkait kebijakan penatausahaan BMN, berikut pembinaan, bimbingan teknis, dan asistensi pengoperasian aplikasi persediaan pada tingkat pusat K/L untuk dapat diimplementasikan secara menyeluruh kepada unit kerja vertikal yang berada di bawahnya. 3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan persediaan telah dan akan terus dilaksanakan. 4. Terhadap penyusunan SOP internal K/L mengenai penatausahaan persediaan, sebagian K/L telah melaksanakannya dan sebagian sedang dalam proses penyusunan.

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT
			1	2	3		
		untuk melakukan penilaian atas barang persediaan di akhir tahun baik karena pada dokumen pengiriman barang tidak mencantumkan harga barang dan atau kesulitan menaksir stock persediaan yang diterima, dan satu K/L tidak mencatat persediaan yang dimilikinya yaitu KPU senilai Rp414.679,28 juta berupa kotak dan bilik suara.					
4.3	Aset Tetap yang dilaporkan dalam Neraca LKPP Tahun 2009 belum mencerminkan seluruh hasil inventarisasi dan penilaian serta metodologi dan proses penilaiannya masih mengandung kelemahan	Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian (IP) aset tetap, yaitu: 1. Hasil IP Rp55,39 triliun menurut DJKN belum dapat direkonsiliasi dengan catatan hasil IP pada K/L, 2. Hasil IP Rp11,51 triliun belum dibukukan, dan 3. Aset tetap dengan nilai perolehan minimal Rp6,63 triliun belum dilakukan IP.	X			Pemerintah akan dan terus melakukan upaya-upaya: 1. Menyelesaikan rekonsiliasi data hasil IP, terutama pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial RI; 2. Melakukan rekonsiliasi hasil IP dimaksud dengan seluruh K/L berdasarkan PMK No.102/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan LKPP. 3. Melanjutkan penyelesaian IP terhadap 2 (dua) K/L yaitu Kementerian Pertanian dan Kelautan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan melakukan penginputan hasil IP pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan BMN (SIMAK-BMN); 4. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Kanwil DJKN/KPKNL terkait tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan atas aset tetap.	1. Rekonsiliasi data hasil IP pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial RI telah dilaksanakan. 2. Telah dilaksanakan pertemuan antara DJKN dengan seluruh K/L pada 13 Oktober 2010 terkait tindak lanjut selisih data hasil IP dan data hasil IP yang belum dapat direkonsiliasi dengan data pada K/L. 3. Terkait dengan penyelesaian IP dan hasilnya: - Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang melakukan identifikasi atas aset-aset eks Deptan. - Telah dilakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan PT KAI untuk penyelesaian IP pada Kementerian Perhubungan dan pelaksanaan IP dimulai pada tanggal 16 Oktober 2010. - Telah dilaksanakan verifikasi dan validasi koreksi hasil penertiban BMN pada seluruh satker K/L ke dalam Aplikasi SIMAK BMN sehingga diperoleh gambaran nilai Aset Tetap yang akurat di dalam Neraca. - Telah disampaikan pemberitahuan kepada

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT
			1	2	3		
							seluruh K/L pada tanggal 22 Oktober 2010 terkait verifikasi dan validasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN sebagai bahan verifikasi lebih lanjut untuk dapat menyajikan nilai koreksi BMN per satker yang akurat ke neraca. - Khusus mengenai IP pada Kementerian Pertahanan, Menteri Keuangan telah menyampaikan kepada Menteri Pertahanan dalam rangka penyelesaian IP di seluruh satker oleh KPKNL dan untuk melakukan rekonsiliasi dan koreksi nilai SIMAK BMN bersama KPKNL. - Progres IP secara keseluruhan telah selesai 99,87% per 31 Maret 2011. 4. Koordinasi dengan seluruh Kanwil DJKN/KPKNL terkait tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan atas aset tetap telah dan akan terus ditingkatkan.
4.4	Pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Negara belum dilakukan secara tertib	1. Aset tetap tidak memiliki bukti legal formal sebagai aset K/L dan berpotensi menjadi sengketa/ bermasalah di masa mendatang. 2. Terdapat aset tetap senilai Rp13.791.436,81 juta pada 15 K/L yang digunakan untuk kepentingan pihak ketiga/pribadi yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) K/L. 3. Terdapat aset tetap minimal senilai Rp3.355.740,37 juta pada 18 K/L yang belum bersertifikat/belum didukung bukti kepemilikan. 4. Terdapat Aset Tetap minimal senilai Rp565.119,74 juta dalam status sengketa dan/atau bermasalah dengan	X			Pemerintah akan dan terus melakukan upaya-upaya: 1. Mengintensifkan rekonsiliasi BMN secara berjenjang pada K/L dan Pengelola Barang sesuai PMK No.102/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan LKPP dan Perdirjen Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009. 2. Sedang menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dirjen Kekayaan Negara dan Dirjen Perbendaharaan terkait peneraan sanksi untuk satker yang tidak melaksanakan rekonsiliasi BMN. 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam percepatan proses sertifikasi tanah dan penyelesaian permasalahan pemanfaatan tanah-tanah yang belum dimanfaatkan sesuai dengan	1. Rekonsiliasi BMN secara berjenjang telah dan akan terus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 2. Telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama dimaksud Nomor KEP-57/KN/2010 dan KEP-174/PB/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara, Penyampaian Data Realisasi Belanja Modal, dan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Pengelolaan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peneraan sanksi untuk satker yang tidak melaksanakan rekonsiliasi BMN telah diatur dalam Nomor PER-07/KN/2009.

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT
			1	2	3		
		pihak ketiga				tupoksi. 4. Menghimbau kepada seluruh K/L agar menyusun dan menetapkan prosedur internal mengenai pengendalian dan pengamanan aset tetap. 5. Melakukan identifikasi BMN yang ada dalam penguasaan pihak lain dan/atau dalam sengketa. 6. Melakukan pengamatan aset untuk mensertifikasikan aset tanah. 7. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi peraturan pengelolaan BMN.	3. Telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala BPN Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa tanah terkait penyelesaian penertiban pemanfaatan dan legalitas BMN pada seluruh K/L. 4. Sertifikasi aset berupa tanah masih terus dilaksanakan. Penyusunan dan penetapan prosedur internal K/L mengenai pengendalian dan pengamanan aset tetap sedang dalam proses. 5. Pada tanggal 14 Oktober 2010 telah dilaksanakan pembahasan dengan 27 K/L guna pengumpulan dan pembahasan data BMN berupa tanah dan/atau bangunan bermasalah dalam rangka penyelesaiannya. 6. Telah dilaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data IP sekaligus pemetaan aset bermasalah. 7. Pembinaan dan sosialisasi peraturan pengelolaan BMN telah dan akan terus ditingkatkan.
4.5	Pemerintah belum menetapkan kebijakan akuntansi untuk Aset KKKS yang menjadi milik negara	Pemerintah belum mengidentifikasi aset-aset KKKS sehingga tidak dapat diketahui secara pasti aset-aset mana yang masih dapat digunakan dan mana yang sudah rusak; dan belum ditetapkannya kebijakan akuntansi atas Aset KKKS dimaksud.	X			Pemerintah akan dan terus melakukan upaya-upaya: 1. Mengkaji pengelolaan dan akuntansi khusus untuk aset KKKS. Berdasarkan kajian tersebut, akan dirumuskan kebijakan akuntansi atas aset KKKS. 2. Meningkatkan koordinasi antar unit yang terkait dengan pengelolaan aset KKKS.	1. Telah ditetapkan PMK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset KKKS pada tanggal 4 Januari 2011. 2. Koordinasi telah dilakukan, dengan membentuk tim yang menangani terkait Aset KKKS yang melibatkan Kem. Keuangan, Kem. ESDM, BPKP, dan BP MIGAS. 3. Telah dilakukan inventarisasi dan penilaian aset pada 14 KKKS pada tahun 2010, dan 13 KKKS pada tahun 2011 (s.d Maret 2011), sedangkan sisanya direncanakan diselesaikan pada bulan september tahun 2011.
4.6	Terdapat sejumlah Aset Eks BPPN berupa surat-surat berharga senilai Rp2,14 triliun	1. Inventarisasi yang dilakukan menggunakan saldo awal aset tahun	X			Pemerintah akan dan terus melakukan upaya-upaya:	1. Permintaan keterangan kepada karyawan eks

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT
			1	2	3		
	yang tidak ditemukan dokumen pendukungnya dan saldo awal tahun 2009 sebesar Rp715,68 miliar yang belum dapat ditelusuri	2005; 2. Terdapat penurunan jumlah aktiva non inti berupa properti dan inventaris setelah dilakukan inventarisasi pada tahun 2009; 3. Berdasarkan inventarisasi juga ditemukan adanya sejumlah aset berupa surat-surat berharga kurang lebih senilai Rp2.136.425,76 juta yang tidak ditemukan keberadaannya; 4. Terdapat aset penyerahan dari Kejaksaan Agung yang belum diketahui nilainya.				1. Meminta keterangan kepada karyawan eks BPPN sebagai narasumber. 2. Meningkatkan koordinasi dengan PT PPA (Persero). 3. Melanjutkan inventarisasi dan penilaian aset properti. 4. Melakukan penelusuran atas data dan dokumentasi yang ada terkait aset berupa surat-surat berharga. 5. Terhadap aset penyerahan dari Kejaksaan Agung RI yang belum diketahui nilainya, Pemerintah sedang melakukan pembahasan teknis terkait lingkup pemeriksaan dan metodologi perhitungan.	BPPN telah dilaksanakan, dan hasilnya akan di-<i>cross check</i> dengan klarifikasi dari BPK. 2. Koordinasi dengan PT PPA mengenai permintaan informasi atas aset eks BPPN terus ditingkatkan. 3. Verifikasi fisik aset properti dilaksanakan pada mulai November 2010 dan direncanakan selesai pada akhir Desember 2010. 4. Untuk mendukung penelusuran data dan dokumentasi aset berupa surat-surat berharga telah disampaikan surat kepada Auditama II BPK RI untuk mengklarifikasi dan meminta rincian sisa aset eks BPPN dimaksud. 5. Ruang lingkup pemeriksaan dan metodologi perhitungan atas aset penyerahan dari Kejaksaan Agung RI (PKPS eks Kejaksaan) masih dalam pembahasan antara Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung dan BPK RI terakhir dilaksanakan per Oktober 2010. Penyusunan lebih lanjut <i>Agreed Upon Procedures</i> (AUP), perhitungan tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan BPK RI.
5	Sistem Pengendalian Ekuitas						
5.1	Terdapat selisih antara fisik dan catatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2009 sebesar Rp261,78 miliar	Pada LKPP Tahun 2009 masih menunjukkan adanya perbedaan antara SAL menurut fisik kas dengan saldo pembukuan, yaitu sebesar Rp261.781,09 juta.	X			Pemerintah akan dan terus melakukan upaya-upaya: 1. Mendefinisikan rekening-rekening yang digunakan untuk menampung dana SAL pada akhir tahun anggaran. 2. Menyusun PMK tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih. 3. Memperbaiki pencatatan kiriman uang antar Rekening Milik BUN yang dikelola oleh Kuasa BUN Pusat dengan Kuasa BUN di daerah, baik dari segi legalitas maupun aplikasi. Dari segi legalitas, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, antara lain:	1. Ditjen Perbendaharaan bersama dengan Itjen Kementerian Keuangan telah melakukan kajian dan kemudian mendefinisikan rekening-rekening yang digunakan untuk menampung dana SAL pada akhir tahun anggaran. 2. Telah diterbitkan PMK Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL). 3. Terkait pencatatan kiriman uang, dari segi aplikasi, mulai Tahun 2010, Sub Rekening Kas Umum Negara Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (Rekening Nomor 500.000000) yang

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT
			1	2	3		
						- Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat. - Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Sub Rekening Kas Umum Negara Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat. - Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Pengeluaran Penempatan di Bank Indonesia. Dari segi aplikasi, mulai Tahun 2010 Sub Rekening Kas Umum Negara Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (Rekening Nomor 500.000000) yang digunakan untuk menampung kiriman uang dalam rangka TSA penerimaan telah diakuntansikan dan dilaporkan dalam LKPP.	digunakan untuk menampung kiriman uang dalam rangka TSA penerimaan telah diakuntansikan dan dilaporkan dalam LKPP. 4. Telah dilakukan restrukturisasi dan penyesuaian atas pos-pos Kiriman Uang yang sudah tidak dipakai atau tidak sesuai.
II	TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN						
1	Pendapatan Negara dan Hibah						
1.1	Terdapat Pendapatan SDA Migas dari kegiatan usaha hulu migas tahun 2009 sebesar Rp1,90 triliun dan tahun 2008 sebesar USD530.97 juta yang belum diperhitungkan dalam bagi hasil	Terdapat Pendapatan SDA Migas dari kegiatan usaha hulu migas tahun 2009 sebesar Rp1,90 triliun dan tahun 2008 sebesar USD530.97 juta yang diklasifikasikan sebagai Pendapatan Lainnya, sehingga tidak diperhitungkan dalam bagi hasil ke daerah.	X			Sesuai dengan kesimpulan Panitia Anggaran DPR yang hasilnya dituangkan dalam UU No.16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.45 Tahun 2007 tentang APBN TA 2008, koreksi depresiasi aset <i>Cost Recovery</i> tersebut diklasifikasikan sebagai PNPB Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Usaha Hulu Migas, bukan sebagai PNPB SDA Migas, sehingga tidak dibagikan ke daerah. Pemerintah akan membahas kembali bersama dengan DPR mengenai pengklasifikasian pendapatan tersebut.	Pendapatan SDA Migas dari kegiatan usaha hulu migas tahun 2009 sebesar Rp1,90 triliun dan tahun 2008 sebesar USD530.97 juta telah diklarifikasikan dengan DPR dan telah disetujui sesuai Pasal 3 ayat (9) UU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2009
1.2	PNBP pada 19 K/L minimal sebesar	1. Terdapat PNPB yang belum dan/atau	X			1. Pemerintah telah meminta K/L untuk	1. Pemantauan dan monitoring atas pelaksanaan

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT
			1	2	3		
	Rp793,38 miliar belum dan/atau terlambat disetor ke Kas Negara dan Sebesar Rp70,31 miliar digunakan langsung di luar mekanisme APBN	terlambat disetor ke Kas Negara yang terjadi pada 18 K/L. 2. Terdapat PNBPN sebesar Rp70.307,32 juta pada Kementerian Pendidikan Nasional yang berasal dari 11 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang belum berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN				menertibkan pengelolaan PNBPN-nya melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.2/2010 tanggal 1 Juni 2010. 2. Pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah agar pengelolaan PNBPN lebih tertib. 3. Pemerintah sedang mengkaji bentuk sanksi kepada K/L yang tidak mengelola PNBPN secara tertib.	Surat Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.2/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang pengelolaan PNBPN terus dilaksanakan. 2. Dalam rangka penertiban pengelolaan PNBPN, sedang disiapkan draft PMK mengenai pengenaan sanksi terhadap K/L yang tidak mengelola PNBPN secara tertib. 3. Pemerintah saat ini sedang menyiapkan perubahan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, di mana salah satu materi perubahan adalah untuk menyelaraskan dengan UU bidang Keuangan Negara, perkembangan kegiatan pelayanan, dan pengaturan mengenai pengenaan sanksi atas pengelolaan PNBPN yang tidak tertib.
1.3	Pungutan pada 13 K/L minimal senilai Rp186,44 miliar tidak ada dasar hukumnya dan senilai Rp137,86 miliar di antaranya digunakan langsung di luar mekanisme APBN	Pungutan pada 13 K/L dengan nilai minimal sebesar Rp186.436,65 juta yang belum memiliki dasar hukum dan sebesar Rp137.858,98 juta di antaranya digunakan langsung tanpa ijin Menteri Keuangan	X			1. Pemerintah telah meminta K/L untuk menertibkan pengelolaan PNBPN-nya melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.2/2010 tanggal 1 Juni 2010. 2. Pemerintah akan melaksanakan penertiban PNBPN yang ada di K/L dengan langkah-langkah yang lebih konkret, yaitu melakukan revisi PP dan mempercepat proses penyusunannya, serta menginventarisasi pungutan-pungutan yang belum diatur dalam PP, agar segera ditetapkan dalam PP.	1. Dalam rangka penertiban pengelolaan PNBPN, sedang disiapkan draft PMK mengenai pengenaan sanksi terhadap K/L yang tidak mengelola PNBPN secara tertib. 2. Telah dilaksanakan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Negara untuk membahas kemungkinan pendelegasian penetapan jenis dan tarif PNBPN kepada Menteri Keuangan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, namun disimpulkan bahwa pendelegasian kewenangan dimaksud tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Hal yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan PNBPN adalah dengan mempercepat revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN.
2	Kewajiban						
2.1	Pemerintah belum mengakui kewajiban pemerintah terhadap kekurangan pendanaan atas perhitungan aktuarial Program THT tahun 2007, 2008, dan	Saldo Kewajiban Pemerintah terhadap THT kurang saja sebesar: • Pokok saldo <i>unfunded liability</i>		X		1. Pemerintah bersama-sama dengan PT Taspen (Persero) sedang melakukan verifikasi dan perhitungan ulang guna memperoleh besaran kekurangan pendanaan cadangan Program THT	1. Pemerintah telah melakukan pembahasan dengan PT Taspen mengenai perhitungan ulang guna memperoleh besaran kekurangan pendanaan cadangan Program THT.

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT
			1	2	3		
	2009 sebesar Rp7,34 Triliun	Rp7.117.924,81 juta; • Perubahan bunga tahun 2008 sebesar Rp93.946,23 juta; • Perubahan bunga tahun 2009 sebesar Rp128.761,76 juta.				yang wajar. 2. Dalam rangka perbaikan atas sustainabilitas program THT PNS, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 245/KMK/2010 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Desain Program Pensiun dan Program Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri yang bertujuan untuk merumuskan perbaikan sistem Program Pensiun dan Program THT PNS khususnya mengenai pola pendanaan (APBN) dapat dikelola dengan baik tanpa mengurangi kualitas manfaat peserta.	2. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 245/KMK/2010 telah melakukan pengkajian mengenai pola Program THT. 3. Sedang dilakukan verifikasi ulang atas jumlah <i>unfunded liability</i> . 4. Pemerintah juga sedang melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap program THT untuk menjamin penyelenggaraan yang berkelanjutan berdasarkan best practices yang berkeadilan dan akuntabel 5. Telah disusun RPKM tentang Tata Cara Pengakuan, Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban <i>Unfunded Past Service Liability</i> , dan saat ini sedang dalam proses penetapan.

Keterangan:

Klasifikasi 1: Temuan Pemeriksaan BPK diselesaikan paling lambat dalam tahun anggaran berjalan;

Klasifikasi 2: Temuan Pemeriksaan BPK diselesaikan paling lambat dalam tahun anggaran berikutnya;

Klasifikasi 3: Temuan Pemeriksaan BPK diselesaikan paling lambat dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya.

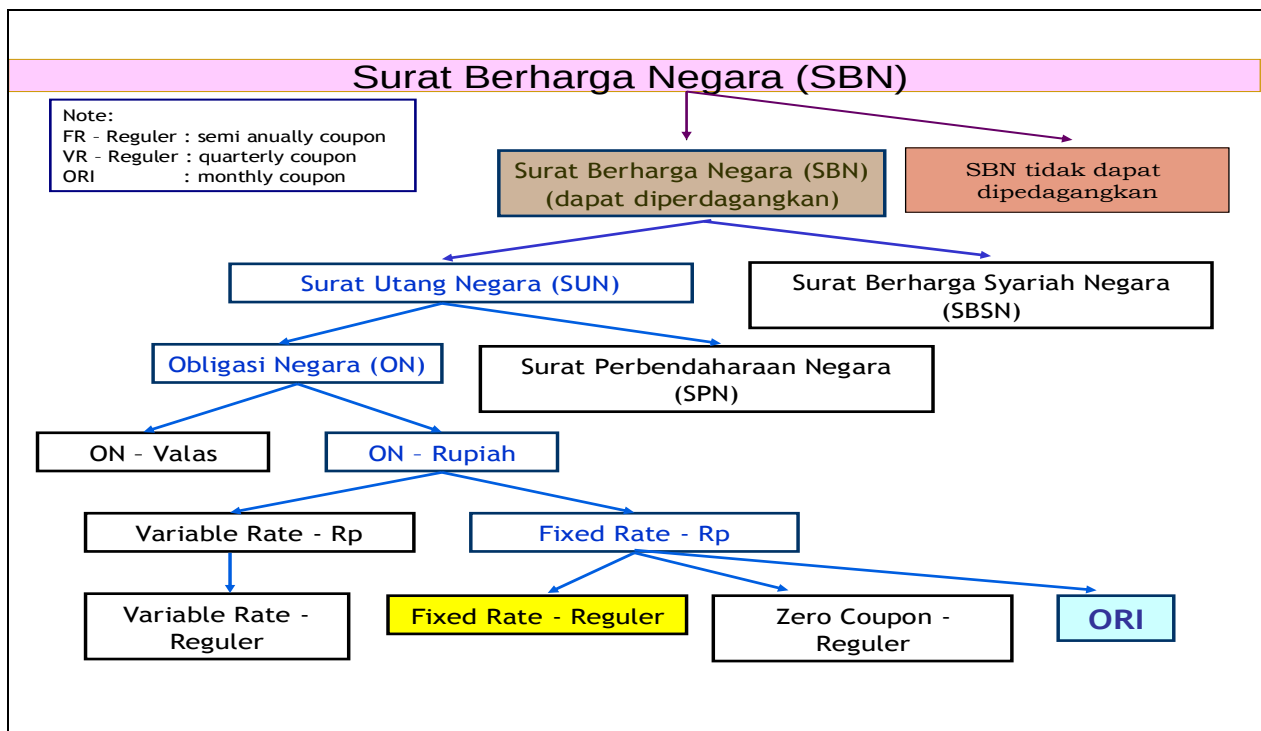
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENDAHULUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara ini disusun untuk memenuhi amanat Pasal 16 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Pasal 27 UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Selain itu, laporan ini juga disusun agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara transparan, profesional dan bertanggung jawab. Seluruh angka dan data yang digunakan dalam laporan ini meliputi realisasi selama satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2010 dan berakhir 31 Desember 2010, kecuali secara jelas dinyatakan lain.

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Secara umum, SUN dapat dibedakan atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dan Obligasi Negara (ON) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Menurut denominasi mata uangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan ON berdenominasi valuta asing. Menurut jenis tingkat bunganya, ON dapat dikelompokkan ke dalam ON dengan tingkat bunga tetap dan ON dengan tingkat bunga mengambang. Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan ON tanpa bunga yaitu *Zero Coupon* (ZC). Sementara itu, Surat Berharga Syariah Negara mulai diterbitkan pada tahun 2008 dengan denominasi Rupiah dan tingkat imbalan tetap (*Fixed Rate*).

Berikut ini adalah gambaran struktur utang pemerintah secara umum pada tahun 2010:



Grafik 43: Struktur Utang Pemerintah

II. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2010

Sebelum dilakukan penyesuaian melalui APBN-Perubahan tahun 2010, target pembiayaan dari SBN Neto ditetapkan sebesar Rp91,6 triliun. Dalam perkembangannya, target tersebut kemudian direvisi menjadi Rp99,25 triliun. Jumlah nominal tersebut merupakan target neto, yaitu jumlah penerbitan SUN baru setelah dikurangi dengan jumlah SUN yang jatuh tempo maupun dibeli kembali oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo (*buyback*). Untuk melaksanakan hal tersebut, dalam rangka pengelolaan portofolio SUN dilakukan kegiatan:

A. Penerbitan Obligasi Negara dalam Rupiah

Obligasi Negara (ON) dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2010 dilelang sebanyak 23 kali, yang dilakukan sejak bulan Januari sampai Desember 2010. Penerbitan Obligasi Negara secara reguler dilakukan dengan cara lelang di pasar perdana. Pada setiap penerbitan, jumlah penawaran yang memenangkan lebih rendah dari jumlah penawaran yang masuk dengan *bid to cover ratio* berkisar dari 1 kali sampai 11,87 kali.

Total nilai net nominal ON dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap (*Fixed Rate*) adalah sebesar Rp46,33 triliun, ON dengan tingkat bunga mengambang (*Variable Rate*) sebesar Rp522 miliar sedangkan ON dengan pembayaran bunga secara diskonto (*Zero Coupon*) tidak diterbitkan pada tahun 2010, serta ORI diterbitkan sebesar Rp8 triliun. Penerbitan ON dalam denominasi Rupiah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: (i) struktur jatuh tempo utang yang sudah ada, (ii) pengembangan pasar sekunder SUN, dan (iii) *cost of borrowing*.

Penjualan Obligasi Negara Ritel (ORI) yang dilakukan sebanyak 1 kali penerbitan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperluas basis investor SUN dan ditujukan untuk investor cara *bookbuilding* melalui Agen Penjual yang diseleksi oleh Panitia Seleksi. Penerbitan ORI007 tersebut mendapat sambutan yang cukup positif dari masyarakat, terbukti dengan jumlah penawaran yang masuk mencapai Rp8,54 triliun.

Mengantisipasi minat investor yang cenderung bergeser dari instrumen jangka panjang ke instrumen jangka pendek sehubungan dengan kondisi ketidakpastian pasar karena adanya krisis keuangan global, pemerintah mengambil inisiatif untuk tidak hanya menerbitkan instrumen ON jangka panjang dan menengah, tetapi juga ON jangka pendek. Instrumen jangka pendek yang diterbitkan oleh Pemerintah adalah ON dengan tingkat bunga mengambang (*Variable Rate*), yaitu Obligasi Negara yang memberikan bunga sesuai dengan Sertifikat Bank Indonesia tenor 3 bulan, dan ON jenis *Zero Coupon*.

B. Penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN adalah Surat Utang Negara yang jangka waktu jatuh temponya sampai dengan 12 bulan. Pada tahun 2010, Pemerintah menerbitkan 10 seri SPN, yaitu SPN 20110113, SPN 20110210, SPN 20110303, SPN 20110407, SPN 20110505, SPN 20110609, SPN 20110707, SPN 20110811, SPN20110929 dan SPN 20111110 dengan total penerbitan SPN mencapai Rp29,7 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17
Jenis dan Outstanding SPN Tahun 2010

No	Seri	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Kupon	Face Value (Rp)
1	SPN20110113	14 Januari 2010	13 Januari 2011	-	2.150.000.000.000
2	SPN20110210	11 Februari 2010	10 Februari 2011	-	3.600.000.000.000
3	SPN20110303	04 Maret 2010	03 Maret 2011	-	4.800.000.000.000
4	SPN20110407	08 April 2010	07 April 2011	-	5.470.000.000.000
5	SPN20110505	06 Mei 2010	05 Mei 2011	-	4.625.000.000.000
6	SPN20110609	10 Juni 2010	9 Juni 2011	-	3.300.000.000.000
7	SPN20110707	08 Juli 2010	07 Juli 2011	-	3.200.000.000.000
8	SPN20110811	12 Agustus 2010	11 Agustus 2011	-	1.150.000.000.000
9	SPN20110929	30 September 2010	29 September 2011	-	1.000.000.000.000
10	SPN20111110	11 Nopember 2010	10 Nopember 2011	-	500.000.000.000
JUMLAH					29.795.000.000.000

Untuk meningkatkan minat investor atas instrumen SPN dan mendorong perkembangan pasar SPN, Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap PP Nomor 11 Tahun 2006 dengan menerbitkan PP Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas diskonto SPN, dimana pemungutan pajak atas diskonto SPN dilakukan di pasar sekunder dan pada saat jatuh tempo dengan tarif sebesar 20% final.

C. Penerbitan Obligasi Negara dalam Valuta Asing (*International Bonds*)

Total penerbitan *International Bonds* dalam tahun 2010 mencapai USD2,0 miliar atau setara dengan Rp17,98 triliun dan JP¥60,0 miliar atau setara Rp6,62 triliun. Mempertimbangkan daya serap pasar SBN domestik, pada tahun 2010 dilaksanakan 1 kali penerbitan *International Bonds* yaitu pada bulan Januari 2010, yaitu seri RI0320 dengan tingkat yield 5,875% dan seri RIJPY1120 dengan tingkat yield 1,60%.

Penerbitan Obligasi Negara di pasar internasional pada tahun 2010 ini adalah untuk kesebelas kalinya sejak penerbitan pertama pada tahun 2004 lalu. Sebagaimana penerbitan sebelumnya, penerbitan pada tahun 2010 ini juga mendapatkan sambutan yang baik di pasar internasional. Hasil penerbitan ini menunjukkan kepercayaan investor internasional terhadap manajemen fiskal dan prospek ekonomi Indonesia jangka panjang.

Sehubungan dengan kinerja penerbitan *International Bonds* pada tahun 2008, telah diperoleh penghargaan internasional, yaitu The Assets Triple A Deal of The Year 2008 untuk kategori sebagai berikut:

1. *Best Issuer*;
2. *Best Sovereign Bond* untuk penerbitan Obligasi Negara dalam valuta asing seri INDO-18 dan INDO-38;
3. *Best Deal in Indonesia* untuk penerbitan Obligasi Negara dalam valuta asing seri INDO-18 dan INDO-38.

Tahun 2010 Pemerintah Indonesia kembali menerbitkan obligasi dengan denominasi Yen Jepang yang disebut Samurai Bond dengan seri RIJPY1120 sebesar JP¥60 miliar setara Rp6,62 triliun dengan tingkat kupon 1,60% dan jatuh tempo tahun 2020.

The Asset sebagai salah satu media keuangan internasional memberikan penghargaan tersebut karena menilai Indonesia telah berhasil dalam menerbitkan Obligasi Negara dalam valuta asing dengan tenor 10 dan 30 tahun di tengah-tengah krisis keuangan global yang penuh tantangan.

D. Pelaksanaan *Debt Switching/Buyback*

Total pelaksanaan *debt switching* pada tahun 2010 adalah sebanyak 6 kali dengan jumlah nominal SUN yang ditukar sebesar Rp3,92 triliun.

Tabel 18
Debtswitch Tahun 2010
(dalam Juta Rupiah)

No	Tanggal Debtswitch	Penawaran yang Masuk	Jumlah Dimenangkan
1	08 April 2010	3.273.000	2.296.000
2	24 Juni 2010	751.000	80.000
3	29 Juli 2010	2.846.000	1.272.000
4	31 Agustus 2010	190.000	0
5	01 Desember 2010	692.000	0
6	27 Desember 2010	597.000	272.000
JUMLAH		8.349.000	3.920.000

Selain itu juga telah dilakukan *cash buyback* sebanyak 13 kali yang dilakukan dengan mekanisme lelang dan pembelian langsung (*direct payment*) dengan jumlah yang telah dibeli pemerintah sebanyak Rp3,2 triliun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 19
Transaksi *Buyback* Tahun 2010 (dalam miliar rupiah)

No	Tanggal	Seri	Jatuh Tempo	Volume
1	12 Agustus 2010	ZC0003	20-Nop-12	168
	Sub total			168
2	25 Oktober 2010	FR0017	15-Jan-12	105
		FR0049	15-Sep-13	50
		FR0020	15-Des-13	15
	Sub total			170
3	28 Oktober 2010	FR0017	15-Jan-12	2
		FR0023	15-Des-12	4
		FR0019	15-Jun-13	150
		FR0049	15-Sep-13	131
		FR0020	15-Des-13	105
	Sub total			391
4	02 Nopember 2010	FR0023	15-Des-12	16
		FR0033	15-Mar-13	47
		FR0049	15-Sep-13	32
		FR0020	15-Des-13	260
	Sub total			355
5	04 Nopember 2010	ORI003	12-Sep-11	15
		FR0025	15-Okt-11	20
		ORI004	12-Mar-12	32
		ORI006	15-Agust-12	2
		ORI005	15-Sep-13	1
	Sub total			70
6	10 Nopember 2010	FR0051	15-Mei-14	38
		FR0026	15-Okt-14	59,465
	Sub total			97,465
7	16 Nopember 2010	FR0042	15-Jul-27	101,90
		FR0044	15-Sep-24	40
		FR0035	15-Jun-22	1,25
		FR0034	15-Jun-21	2,60
		FR0036	15-Sep-19	124,50
	Sub total			270,25
8	18 Nopember 2010	FR0028	15-Jul-17	101
	Sub total			101,234
9	26 Nopember 2010	FR0020	15-Des-13	105
		FR0051	15-Mei-14	99
	Sub total			204,27
10	30 Nopember 2010	FR0033	15-Mar-13	252
		FR0049	15-Sep-13	109
	Sub total			360,78
11	16 Desember 2010	FR0018	15-Jul-12	35
		FR0051	15-Mei-14	9
		FR0032	15-Jul-18	126
		FR0038	15-Agust-18	162,24
	Sub total			332,24
12	20 Desember 2010	FR0017	15-Des-12	22
		FR0048	15-Sep-18	15,03
	Sub total			37,03
13	22 Desember 2010	FR0016	15-Agust-11	10
		ORI003	12-Sep-11	23
		FR0022	15-Sep-11	75
		FR0017	15-Jan-12	5
		ORI004	12-Mar-12	178
		ORI006	15-Agust-12	145
		FR0023	15-Des-12	23
		FR0019	15-Jun-13	57
		ORI005	15-Sep-13	29
		FR0020	15-Des-13	95
	Sub total			643
	TOTAL 2010			3.201

Pada akhir tahun 2010, profil jatuh tempo SUN terkonsentrasi dengan jumlah cukup besar pada kurun waktu 2011-2014. Dalam rangka mengurangi risiko pelunasan pokok SUN pada kurun tahun 2011-2014 tersebut, Pemerintah berupaya untuk menata ulang struktur jatuh tempo SUN melalui *debt switching*, yaitu dengan membeli seri-seri Obligasi Negara jangka pendek dan menukarkannya dengan Obligasi Negara yang mempunyai jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Jumlah SUN yang jatuh tempo pada kurun tahun 2011-2014, yang berada pada kisaran di atas Rp32,79 triliun, digeser ke jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang. Kondisi ini juga memberikan keleluasaan bagi Pemerintah untuk menerbitkan instrumen SUN jangka pendek, baik berupa Obligasi Negara Ritel maupun Surat Perbendaharaan Negara. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi refinancing risk adalah dengan memberikan prioritas penerbitan Obligasi Negara jangka menengah dan panjang.

Disamping *debt switch*, Pemerintah juga melakukan kegiatan *cash buyback* yang merupakan salah satu strategi pengelolaan portofolio SUN dengan cara melaksanakan pembelian Obligasi Negara yang belum jatuh tempo di pasar sekunder. Dalam periode tahun anggaran 2010, *cash buyback* sebanyak 13 kali. Buyback dilakukan secara lelang dan pembelian langsung dengan jumlah nominal sebesar Rp3,20 triliun dari target sebesar Rp3 triliun. Obligasi Negara yang telah dibeli tersebut kemudian dinyatakan lunas atau jatuh tempo, sehingga mengurangi total *outstanding* SUN. Pada saat pasar mengalami *bearish*, dimana harga SUN cenderung diskon, penerapan strategi *cash buyback* ini akan lebih menguntungkan Pemerintah, dibanding jika harus membayar pelunasan pokok pada saat jatuh tempo nantinya. Disamping itu pelaksanaan *cash buyback* oleh Pemerintah pada saat kondisi pasar *bearish* ini juga dapat menahan penurunan harga yang makin dalam dan melakukan stabilisasi pasar SUN.

III. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2010

Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri, Pemerintah telah menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan *sukuk*, serta adanya *aqad* atau perjanjian antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut, juga dengan mempertimbangkan adanya kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, pada 7 Mei 2008 telah disahkan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diajukan oleh pemerintah oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Secara garis besar UU tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Transparansi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan.
- b. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit yang dibentuk oleh Menteri.
- c. Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (*underlying asset*).
- d. Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara;
- e. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
- f. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar

pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman.

Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SBSN pada Agustus 2008 melalui metode *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri. Pada tahun anggaran 2010 pemerintah Indonesia menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara sebanyak 16 kali dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20
Rekapitulasi Hasil Lelang SBSN Tahun 2010

No	Seri	Tanggal Lelang	Tanggal Jatuh Tempo	Kupon	Nilai Lelang (Rp)
1	IFR 0003 (reopening)	21 Januari 2010	15 September 2015	9,25 %	55.000.000.000
	IFR0005 (new issuance)		15 Januari 2017	9 %	105.000.000.000
	IFR0007 (new issuance)		15 Januari 2025	10,25 %	790.000.000.000
2	SR002	10 Februari 2010	10 Februari 2013	8,70 %	8.033.860.000.000
3	SDHI 2012A	22 Februari 2010	03 Maret 2012	7,61 %	3.342.000.000.000
4	IFR0003 (reopening)	11 Maret 2010	15 September 2015	9,25%	525.000.000.000
	IFR0005 (reopening)		15 Januari 2017	9 %	14.000.000.000
	IFR0007 (reopening)		15 Januari 2025	10,25 %	460.000.000.000
5	IFR0003 (reopening)	30 Maret 2010	15 September 2015	9,25 %	300.000.000.000
	IFR0006 (new issuance)		15 Maret 2030	10,25 %	320.000.000.000
6	IFR0003 (reopening)	13 April 2010	15 September 2015	9,25 %	150.000.000.000
	IFR0006 (reopening)		15 Maret 2030	10,25 %	675.000.000.000
	IFR0008 (new issuance)		15 Maret 2020	8,80 %	100.000.000.000
7	IFR0003 (reopening)	27 April 2010	15 September 2015	9,25 %	200.000.000.000
8	IFR0003 (reopening)	11 Mei 2010	15 September 2015	9,25 %	395.000.000.000
	IFR0005 (reopening)		15 Januari 2017	9 %	255.000.000.000
	IFR0008 (reopening)		15 Maret 2020	8,80 %	100.000.000.000
9	SDHI2013A	17 Mei 2010	17 Mei 2013	7,55 %	4.250.000.000.000
10	IFR0005 (reopening)	15 Juni 2010	15 Januari 2017	9 %	57.000.000.000
	IFR0006 (reopening)		15 Maret 2030	10,25 %	417.000.000.000
11	IFR0006 (reopening)	13 Juli 2010	15 Maret 2030	10,25 %	239.000.000.000
	IFR0007 (reopening)		15 Januari 2025	10,25 %	7.000.000.000
12	IFR0003 (reopening)	27 Juli 2010	15 September 2015	9,25 %	80.000.000.000
	IFR0006 (reopening)		15 Maret 2030	10,25 %	524.000.000.000
13	SDHI2014A	02 Agustus 2010	9 Agustus 2014	7,36 %	2.855.000.000.000
14	SDHI2014B	20 Agustus 2010	25 Agustus 2010	7,30 %	336.000.000.000
15	SDHI2014C	04 Oktober 2010	07 Oktober 2010	7,13 %	2.000.000.000.000
16	IFR0003 (reopening)	05 Oktober 2010	15 September 2015	9,25 %	200.000.000.000
	IFR0005 (reopening)		15 Januari 2017	9 %	130.000.000.000
	IFR0008 (reopening)		15 Maret 2020	8,80 %	52.000.000.000

TOTAL PENERBITAN 2010	26.966.860.000.000

IV. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA SELAMA TAHUN 2010

A. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah

Surat Berharga Negara berdenominasi Rupiah dapat dipisahkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

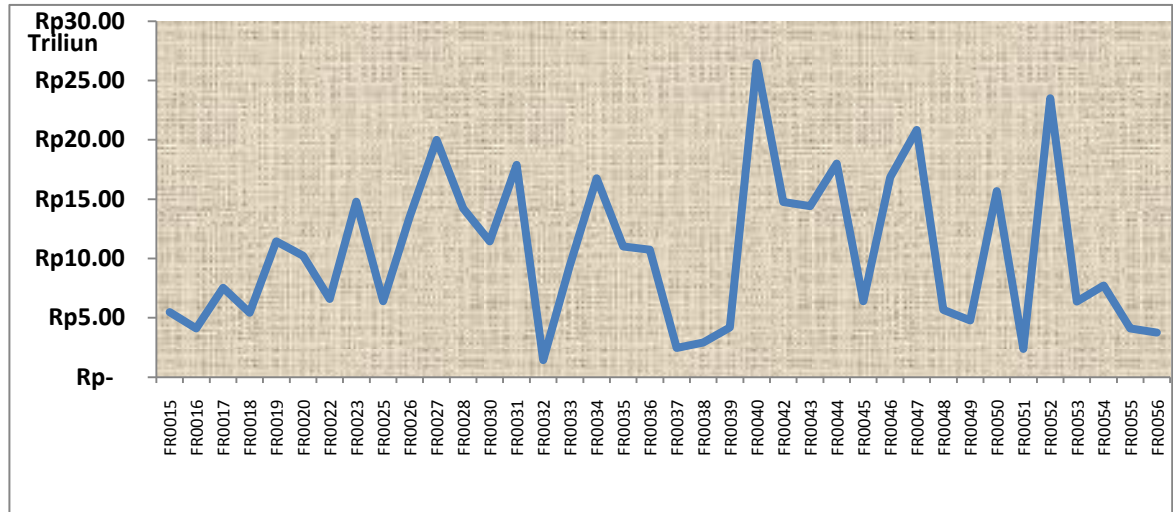
a. Obligasi berbunga tetap (*fixed rate bonds* – FR)

Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon obligasi berbunga tetap seri FR (*Fixed Rate*) dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annually*). Berdasarkan posisi akhir tahun 2010, terdapat 38 seri FR dengan tingkat kupon berkisar antara 7,375% sampai dengan 15% dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2038. Obligasi jenis FR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Tabel 21

Nilai Outstanding SBN Seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2010

No	Seri	Outstanding (Rp)	No	Seri	Outstanding (Rp)
1	FR0015	5.478.938.000.000	20	FR0037	2.450.000.000.000
2	FR0016	4.098.937.000.000	21	FR0038	2.920.757.000.000
3	FR0017	7.533.263.000.000	22	FR0039	4.175.000.000.000
4	FR0018	5.430.062.000.000	23	FR0040	26.474.000.000.000
5	FR0019	11.456.341.000.000	24	FR0042	14.774.100.000.000
6	FR0020	10.222.951.000.000	25	FR0043	14.417.000.000.000
7	FR0022	6.587.000.000.000	26	FR0044	18.014.000.000.000
8	FR0023	14.799.143.000.000	27	FR0045	6.400.000.000.000
9	FR0025	6.406.000.000.000	28	FR0046	16.855.000.000.000
10	FR0026	13.522.535.000.000	29	FR0047	20.840.000.000.000
11	FR0027	19.989.000.000.000	30	FR0048	5.675.970.000.000
12	FR0028	14.221.766.000.000	31	FR0049	4.786.607.000.000
13	FR0030	11.440.000.000.000	32	FR0050	15.686.000.000.000
14	FR0031	17.899.000.000.000	33	FR0051	2.376.123.000.000
15	FR0032	1.434.000.000.000	34	FR0052	23.500.000.000.000
16	FR0033	9.400.474.000.000	35	FR0053	6.372.000.000.000
17	FR0034	16.756.400.000.000	36	FR0054	7.722.000.000.000
18	FR0035	11.023.750.000.000	37	FR0055	4.100.000.000.000
19	FR0036	10.735.500.000.000	38	FR0056	3.750.000.000.000



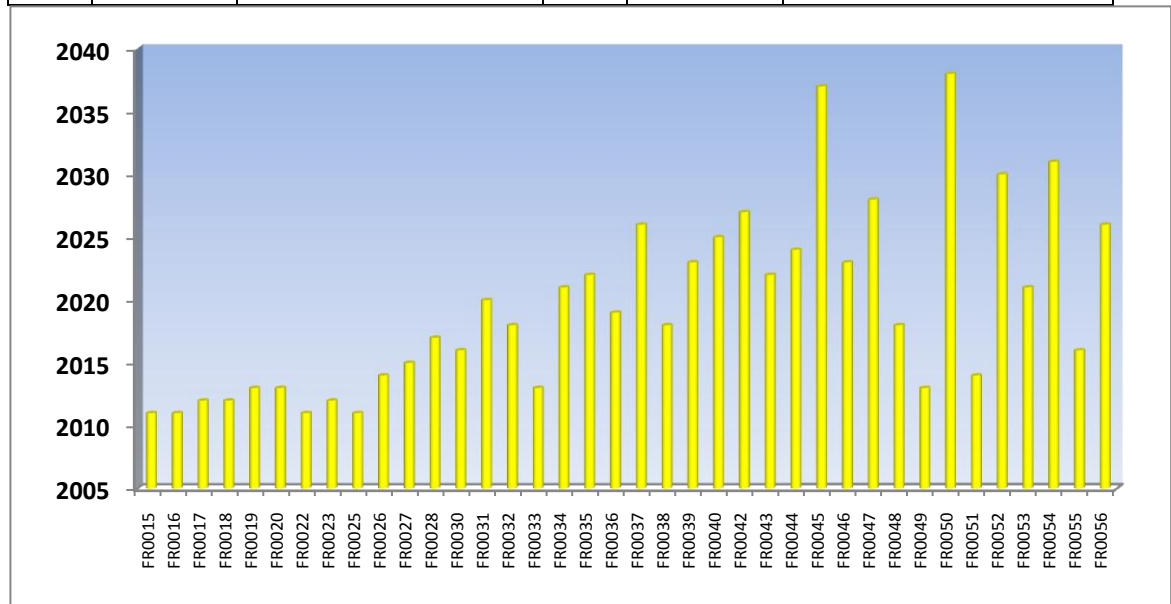
Grafik 44: Struktur *Outstanding ON* Rupiah seri FR per 31 Desember 2010

Tabel 22

Jatuh Tempo SBN Seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2010

No	Seri	Jatuh Tempo	No	Seri	Jatuh Tempo
1	FR0015	15 Februari 2011	20	FR0037	15 September 2026
2	FR0016	15 Agustus 2011	21	FR0038	15 Agustus 2018
3	FR0017	15 Januari 2012	22	FR0039	15 Agustus 2023
4	FR0018	15 Juli 2012	23	FR0040	15 September 2025
5	FR0019	15 Juni 2013	24	FR0042	15 Juli 2027
6	FR0020	15 Desember 2013	25	FR0043	15 Juli 2022
7	FR0022	15 September 2011	26	FR0044	15 September 2024
8	FR0023	15 Desember 2012	27	FR0045	15 Mei 2037
9	FR0025	15 Oktober 2011	28	FR0046	15 Juli 2023
10	FR0026	15 Oktober 2014	29	FR0047	15 Februari 2028
11	FR0027	15 Juni 2015	30	FR0048	15 September 2018
12	FR0028	15 Juli 2017	31	FR0049	15 September 2013
13	FR0030	15 Mei 2016	32	FR0050	15 Juli 2038
14	FR0031	15 Nopember 2020	33	FR0051	15 Mei 2014
15	FR0032	15 Juli 2018	34	FR0052	15 Agustus 2030
16	FR0033	15 Maret 2013	35	FR0053	15 Juli 2021
17	FR0034	15 Juni 2021	36	FR0054	15 Juli 2031

18	FR0035	15 Juni 2022	37	FR0055	15 September 2016
19	FR0036	15 September 2019	38	FR0056	15 September 2026

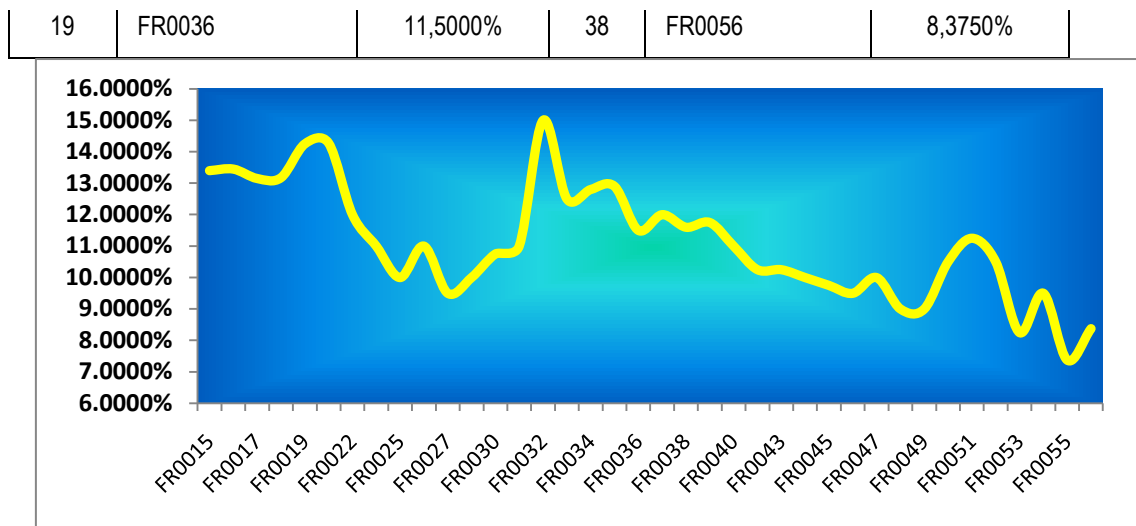


Grafik 45: Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah Seri FR per 31 Desember 2010.

Tabel 23

Kupon SBN Seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2010

No	Seri	Kupon	No	Seri	Kupon
1	FR0015	13,4000%	20	FR0037	1200%
2	FR0016	13,4500%	21	FR0038	11,6000%
3	FR0017	13,1500%	22	FR0039	11,7500%
4	FR0018	13,1750%	23	FR0040	1100%
5	FR0019	14,2500%	24	FR0042	10,2500%
6	FR0020	14,2750%	25	FR0043	10,2500%
7	FR0022	1200%	26	FR0044	1000%
8	FR0023	1100%	27	FR0045	9,7500%
9	FR0025	1000%	28	FR0046	9,5000%
10	FR0026	1100%	29	FR0047	1000%
11	FR0027	9,5000%	30	FR0048	900%
12	FR0028	1000%	31	FR0049	900%
13	FR0030	10,7500%	32	FR0050	10,5000%
14	FR0031	1100%	33	FR0051	11,2500%
15	FR0032	1500%	34	FR0052	10,5000%
16	FR0033	12,5000%	35	FR0053	8,2500%
17	FR0034	12,8000%	36	FR0054	9,5000%
18	FR0035	12,9000%	37	FR0055	7,3750%



Grafik 46: Tingkat kupon Seri FR per 31 Desember 2010

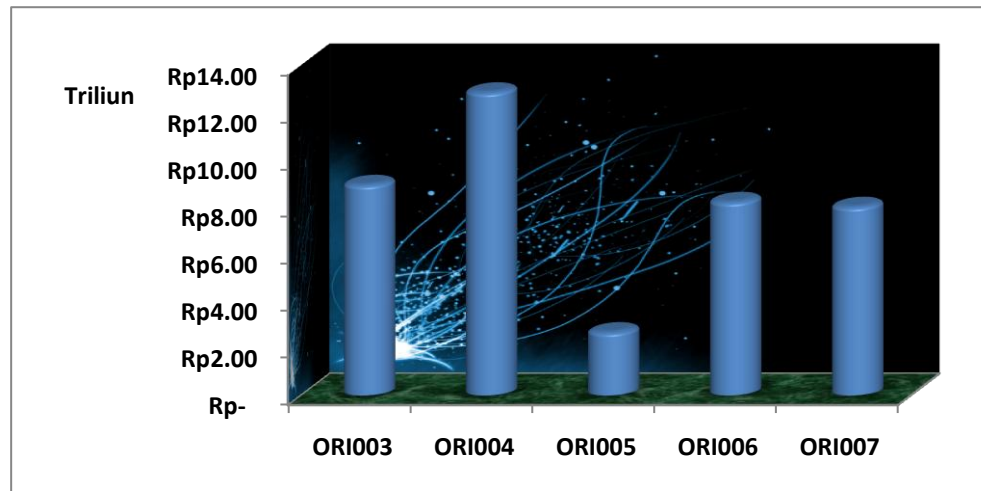
b. Obligasi Negara Ritel (ORI)

ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

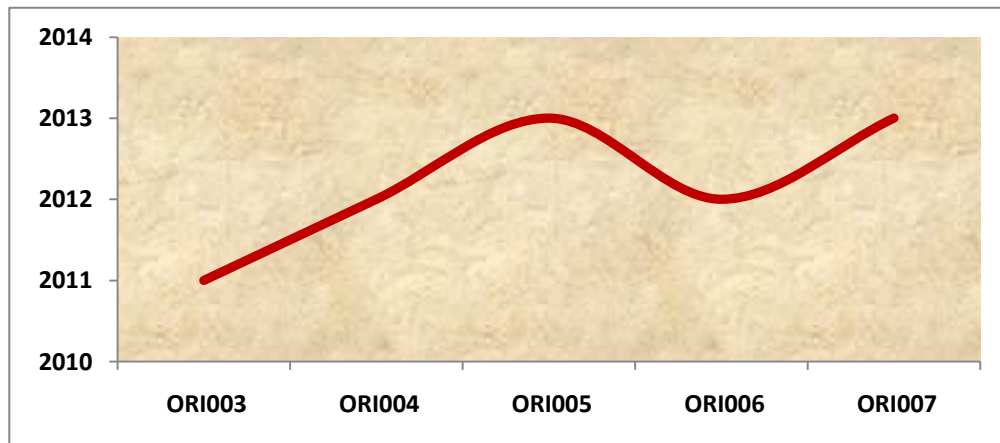
Penerbitan ORI merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Strategi Pengelolaan Utang Negara tahun 2005 – 2009 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 447/KMK.06/2005. Di dalam dokumen strategi dimaksud ditetapkan bahwa pengembangan pasar sekunder SUN dilakukan antara lain dengan melakukan diversifikasi instrumen SUN melalui SUN Ritel yang mana hal ini sejalan pula dengan upaya memperluas basis investor. Penerbitan ORI merupakan langkah nyata Pemerintah dalam melaksanakan strategi dimaksud. Selain itu, ORI diterbitkan juga dalam rangka memberikan alternatif investasi yang cukup menguntungkan dan aman bagi investor individu, serta memberikan unsur pendidikan bagi investor individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal seperti ORI. Selama ini investor individu umumnya menyimpan dananya pada instrumen investasi berupa tabungan atau deposito yang notabene instrumen pasar uang. Terlebih dengan belum pulihnya kepercayaan masyarakat umum pada industri reksadana. Selain itu, keberadaan ORI dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito. Tahun 2010 pemerintah menerbitkan satu seri ORI baru yaitu ORI007 dengan tingkat kupon 7,95% dan mampu menghimpun dana investor sebesar Rp8 triliun dan melakukan pelunasan (*redemption*) atas ORI002, sehingga posisi pada akhir 2010 menunjukkan ada 5 seri ORI yang masih *outstanding* dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dengan nilai *outstanding* berkisar antara Rp2,68 triliun sampai dengan Rp12,86 triliun.

Tabel 24
Nilai dan Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2010

No	Seri	Outstanding (Rp)	Jatuh Tempo
1	ORI003	8.930.695.000.000	12 September 2011
2	ORI004	12.855.765.000.000	12 Maret 2012
3	ORI005	2.678.875.000.000	15 September 2013
4	ORI006	8.206.730.000.000	15 Agustus 2012
5	ORI007	8.000.000.000.000	15 Agustus 2013
	Jumlah	40.672.065.000.000	



Grafik 47: Struktur Outstanding ORI per 31 Desember 2010



Grafik 48: Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2010

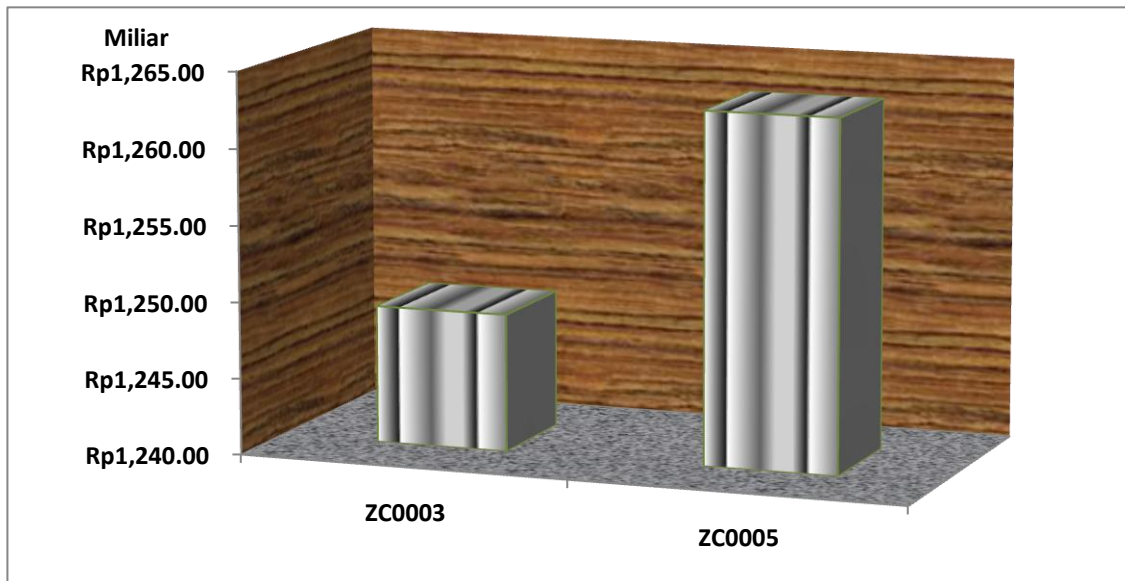
c. Obligasi tanpa bunga (zero coupon – ZC)

Zero coupon adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. Berdasarkan posisi akhir tahun 2010, terdapat 2 seri ZC dengan *outstanding* berkisar dari Rp1,25 triliun dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. *Zero coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. ZC0004 telah dilakukan pelunasan seluruhnya pada tahun 2010.

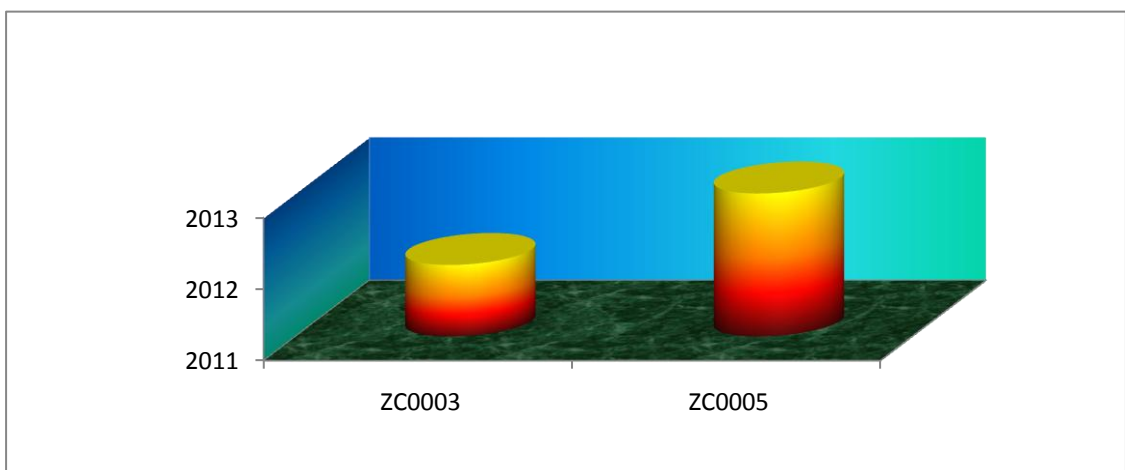
Tabel 25

Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBN seri Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2010

No	Seri	Nilai Outstanding (Rp)	Jatuh Tempo
1	ZC0003	1.249.000.000.000	20 Nopember 2012
2	ZC0005	1.263.000.000.000	20 Februari 2013



Grafik 49: Struktur *Outstanding* Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2010



Grafik 50: Struktur Jatuh Tempo Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2010

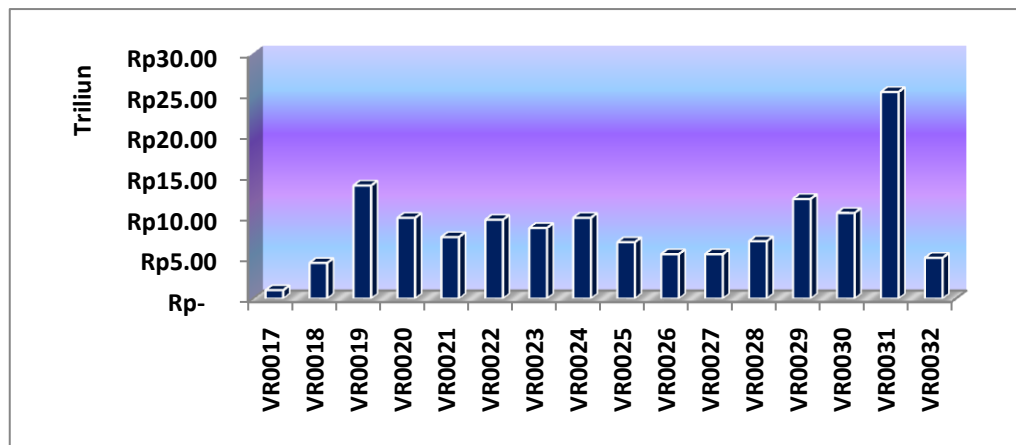
d. Obligasi berbunga mengambang (variable rate bonds – VR)

Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) berjangka 3 bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Sampai akhir tahun 2010, terdapat 16 seri VR dengan *outstanding* berkisar dari Rp1,03 triliun sampai dengan Rp25 triliun dengan masa jatuh temponya berkisar antara tahun 2011 sampai dengan 2020. Obligasi jenis VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

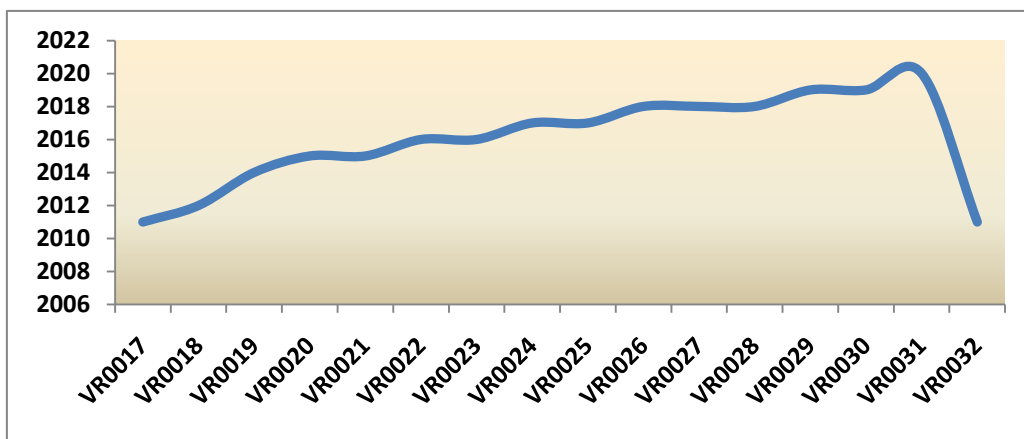
Tabel 26

Nilai dan Jatuh Tempo SBN Seri Variable Rate (VR) per 31 Desember 2010

No	Seri	Nilai Outstanding (Rp)	Jatuh Tempo
1	VR0017	1.031.666.000.000	25 Juni 2011
2	VR0018	4.368.483.000.000	25 Oktober 2012
3	VR0019	13.856.226.000.000	25 Desember 2014
4	VR0020	9.899.007.000.000	25 April 2015
5	VR0021	7.546.328.000.000	25 Nopember 2015
6	VR0022	9.666.749.000.000	25 Maret 2016
7	VR0023	8.652.056.000.000	25 Oktober 2016
8	VR0024	9.909.300.000.000	25 Februari 2017
9	VR0025	6.909.300.000.000	25 September 2017
10	VR0026	5.442.142.000.000	25 Januari 2018
11	VR0027	5.442.142.000.000	25 Juli 2018
12	VR0028	7.033.994.000.000	25 Agustus 2018
13	VR0029	12.212.320.000.000	25 Agustus 2019
14	VR0030	10.503.015.000.000	25 Desember 2019
15	VR0031	25.322.354.000.000	25 Juli 2020
16	VR0032	5.000.000.000.000	25 April 2011
JUMLAH		142.795.082.000.000	



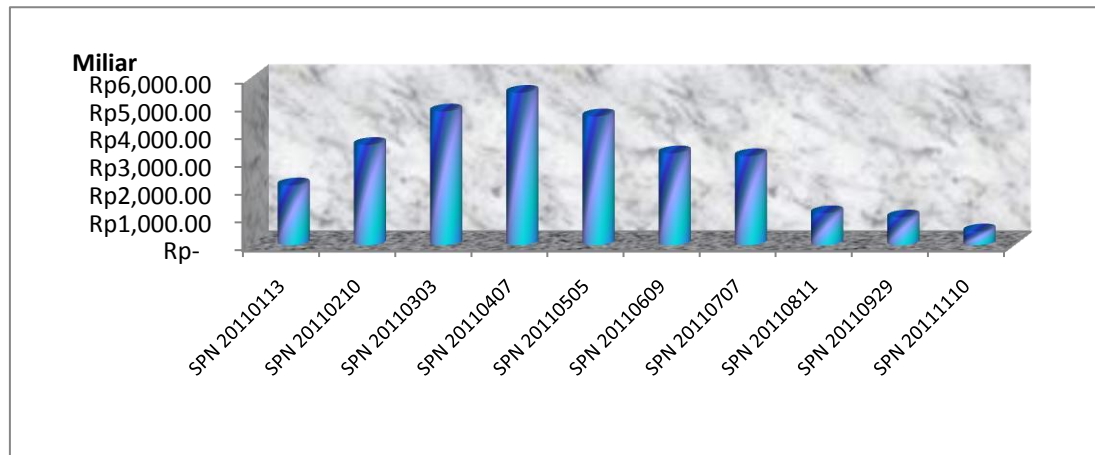
Grafik 51: Struktur Outstanding VR per 31 Desember 2010



Grafik 52: Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2010

e. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto. Sampai akhir tahun 2010, terdapat 10 seri SPN yaitu SPN 20110113, SPN 20110210, SPN 20110303, SPN 20110407, SPN 20110505, SPN 20110609, SPN 20110707, SPN 20110811, SPN20110929 dan SPN 20111110 dengan *outstanding* berkisar Rp500 miliar dan Rp5,5 triliun yang akan jatuh tempo pada tahun 2011. SPN dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.



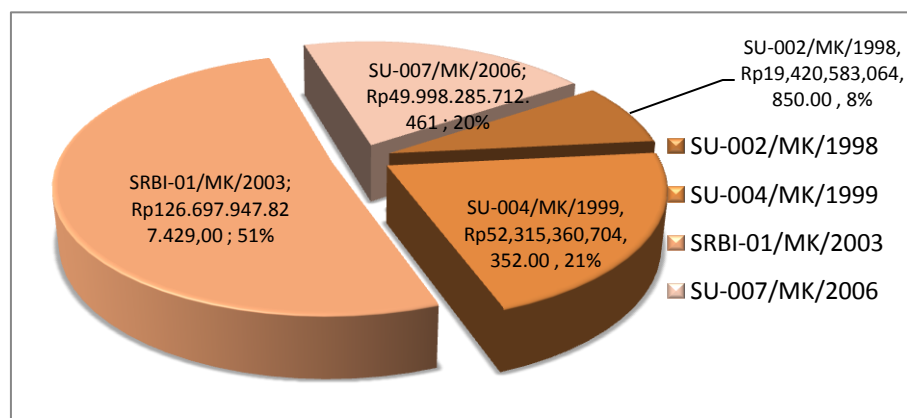
Grafik 53: Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2010

f. Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI

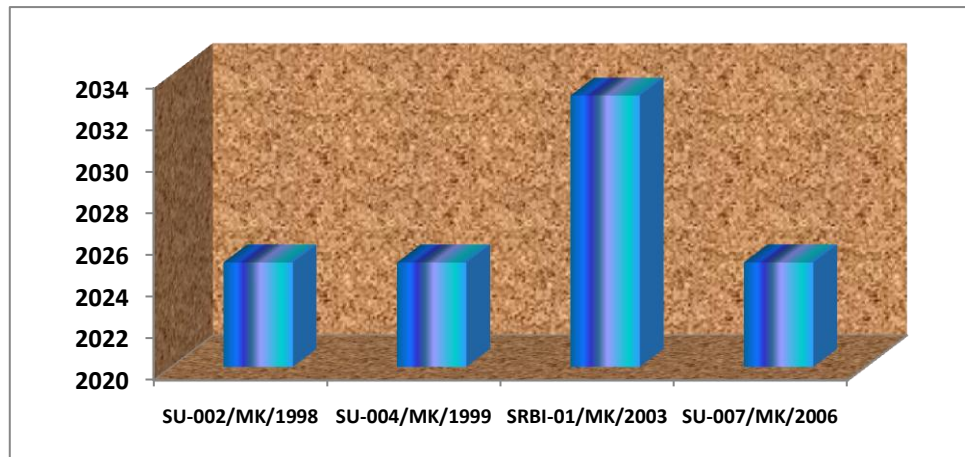
Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia terdiri dari lima seri yaitu SU002, SU004, SU007, dan *Special Rate Bank Indonesia* (SRBI01). Kupon SUP dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Pembayaran cicilan pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga.

Tabel 27
Nilai dan *Outstanding* Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia per 31 Desember 2010

No	Nama	Outstanding (Rp)	Jatuh Tempo
1	SU-002/MK/1998	19.420.583.064.850	01 April 2025
2	SU-004/MK/1999	52.315.360.704.352	01 Desember 2025
3	SRBI-01/MK/2003	126.697.947.827.429	01 Agustus 2033
4	SU-007/MK/2006	49.998.285.712.461	01 Agustus 2025
JUMLAH		248.432.177.309.092	



Grafik 54: Struktur *Outstanding* SUP per 31 Desember 2010



Grafik 55: Struktur Jatuh Tempo SUP Per 31 Desember 2010

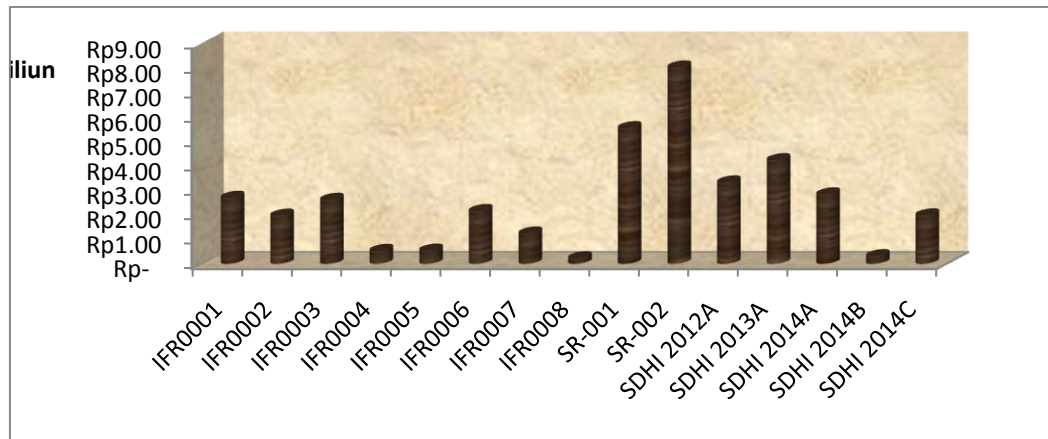
g. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Pada akhir tahun 2010, terdapat 10 seri *fixed rate* SBSN yaitu IFR0001, IFR0002, IFR0003, IFR0004, IFR0005, IFR0006, IFR0007, IFR0008, SR-001 dan SR-002 dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2030 dengan tingkat imbalan antara 8,70% sampai dengan 12%. Selain itu terdapat 5 seri SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia) yaitu SDHI 2012A, SDHI 2013A, SDHI 2014A, SDHI 2014B, dan SDHI 2014C dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2014 dan tingkat imbalan antara 7,13 % sampai dengan 7,55%.

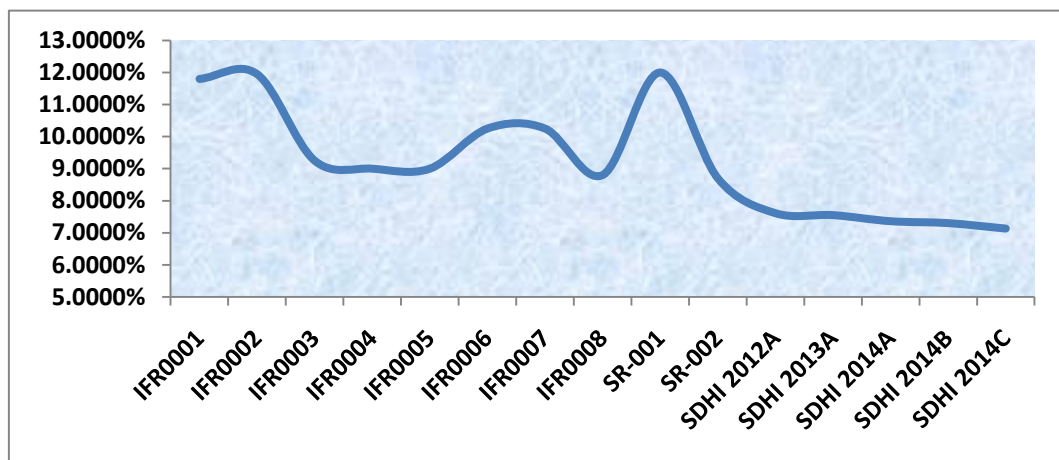
Tabel 28

Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBSN Rupiah per 31 Desember 2010

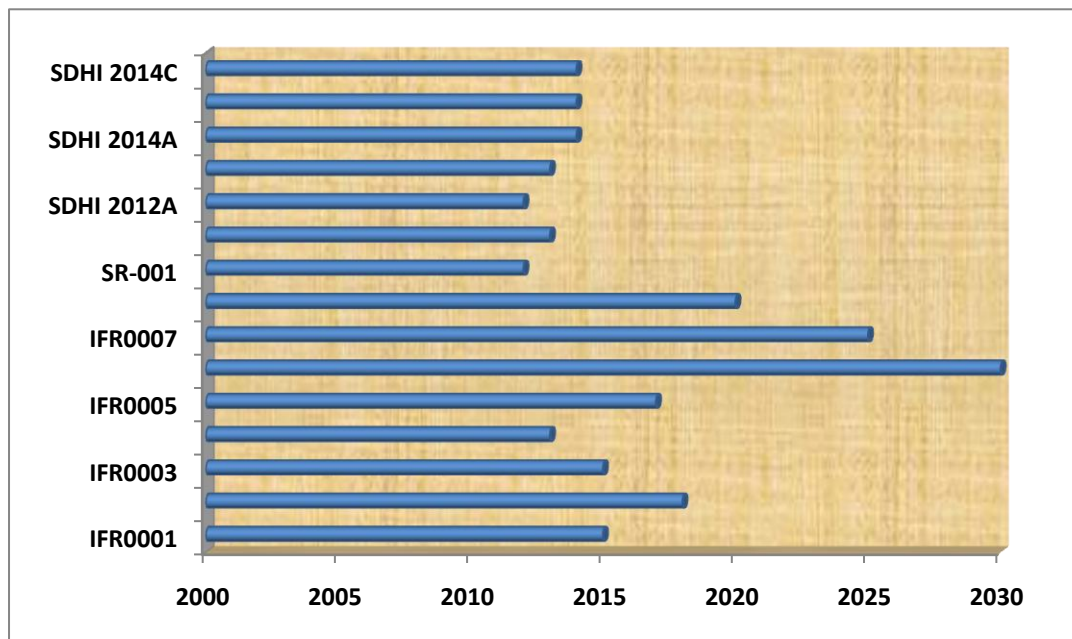
No	Seri	Outstanding (Rp)	Imbalan	Jatuh Tempo
1	IFR0001	2.714.700.000.000	11,8000%	15 Agustus 2015
2	IFR0002	1.985.000.000.000	11,9500%	15 Agustus 2018
3	IFR0003	2.632.000.000.000	9,2500%	15 September 2015
4	IFR0004	550.000.000.000	900%	15 Oktober 2013
5	IFR0005	561.000.000.000	900%	15 Januari 2017
6	IFR0006	2.175.000.000.000	10,2500%	15 Maret 2030
7	IFR0007	1.257.000.000.000	10,2500%	15 Januari 2025
8	IFR0008	252.000.000.000	8,8000%	15 Maret 2020
9	SR-001	5.556.290.000.000	1200%	25 Februari 2012
10	SR-002	8.033.860.000.000	8,7000%	10 Februari 2013
11	SDHI 2012A	3.342.000.000.000	7,6100%	03 Maret 2012
12	SDHI 2013A	4.250.000.000.000	7,5500%	17 Mei 2013
13	SDHI 2014A	2.855.000.000.000	7,3600%	09 Agustus 2014
14	SDHI 2014B	336.000.000.000	7,3000%	25 Agustus 2014
15	SDHI 2014C	2.000.000.000.000	7,1300%	07 Oktober 2014



Grafik 56: Struktur Outstanding Fixed Rate SBSN per 31 Desember 2010



Grafik 57: Tingkat Imbalan SBSN per 31 Desember 2010



Grafik 58: Struktur Jatuh Tempo SBSN per 31 Desember 2010

B. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valas

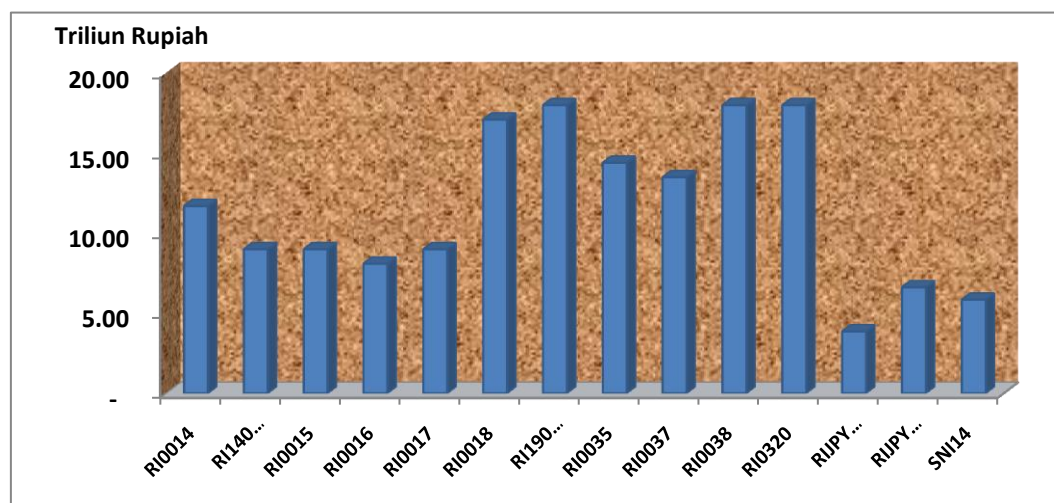
Surat Berharga Negara (SBN) saat ini telah menjadi sumber utama dalam pemenuhan target pembiayaan dalam APBN karena mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam rangka pemenuhan target tersebut pemerintah semaksimal mungkin berusaha terus menggali potensi sumber pembiayaan dari dalam negeri, yaitu dengan menerbitkan SBN berdenominasi Rupiah di pasar domestik. Namun, dengan pertimbangan beberapa hal seperti daya serap pasar obligasi dalam negeri yang masih terbatas dan kebutuhan untuk pemenuhan *benchmark* atas obligasi Indonesia dalam denominasi USD, maka Pemerintah memutuskan untuk melakukan penerbitan obligasi negara dalam valuta asing di pasar internasional mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Sampai dengan akhir tahun 2010, terdapat 13 seri SUN Valas dengan 11 seri memiliki denominasi USD dan 2 seri dengan denominasi JP¥ yaitu seri RIJPY0719 dan RIJPY1120. SUN valas tersebut memiliki tingkat kupon mulai dari 1,600% sampai dengan 11,625% dengan masa jatuh tempo mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2038. Selain itu, terdapat 1 seri SBSN Valas yaitu seri SNI14 sebesar USD650.000.000 setara Rp5,8 Triliun.

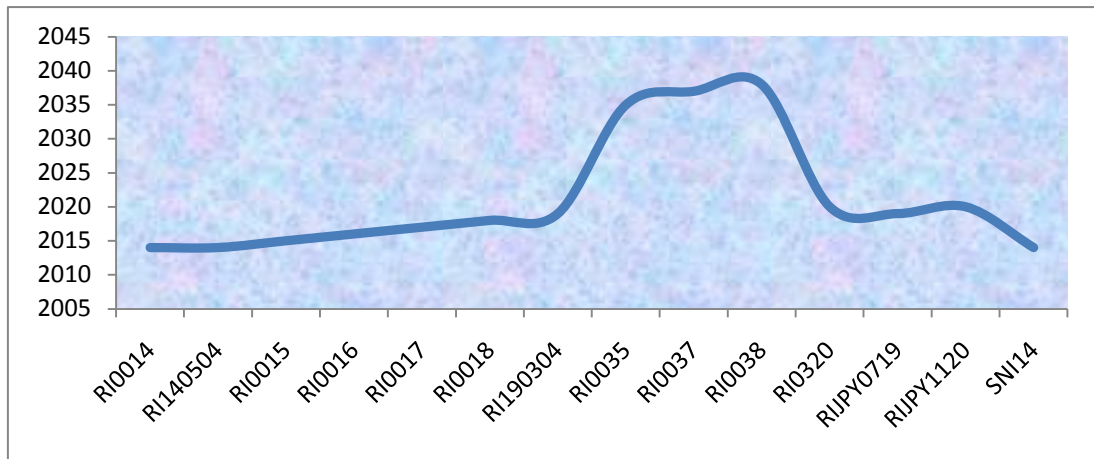
Tabel 29

Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBN Valas dalam rupiah per 31 Desember 2010

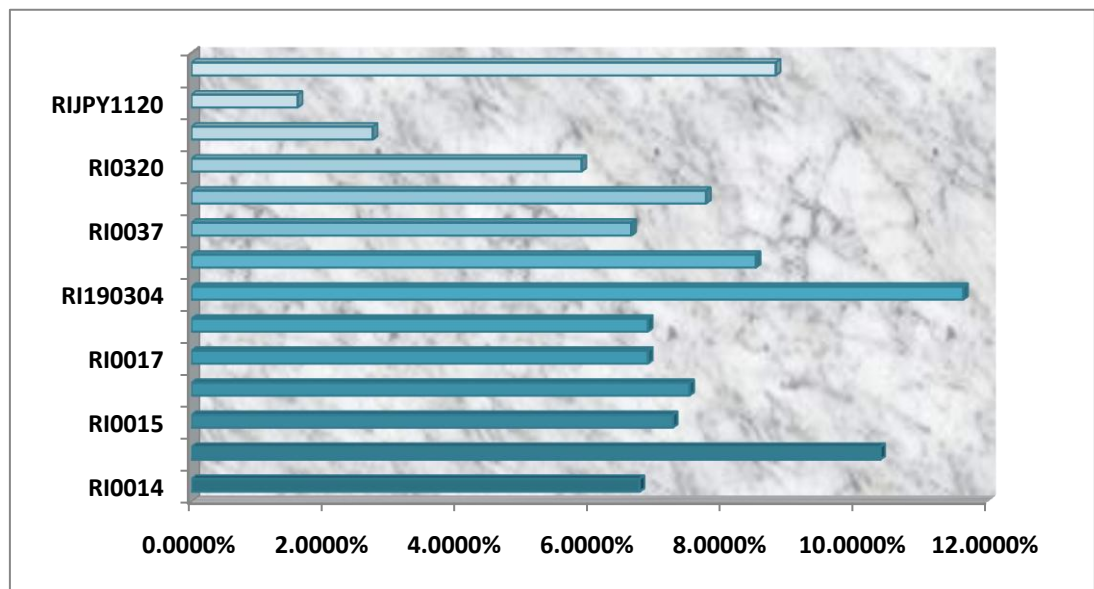
No	Seri	Outstanding (Rp)	Kupon	Jatuh Tempo
1	RI0014	11.688.300.000.000	6,7500%	10 Maret 2014
2	RI140504	8.991.000.000.000	10,3750%	04 Mei 2014
3	RI0015	8.991.000.000.000	7,2500%	20 April 2015
4	RI0016	8.091.900.000.000	7,5000%	15 Januari 2016
5	RI0017	8.991.000.000.000	6,8750%	09 Maret 2017
6	RI0018	17.082.900.000.000	6,8750%	17 Januari 2018
7	RI190304	17.982.000.000.000	11,6250%	04 Maret 2019
8	RI0035	14.385.600.000.000	8,5000%	12 Oktober 2035
9	RI0037	13.486.500.000.000	6,6250%	17 Februari 2037
10	RI0038	17.982.000.000.000	7,7500%	17 Januari 2038
11	RI0320	17.982.000.000.000	5,8750%	13 Maret 2020
12	RIJPY0719	3.860.150.000.000	2,7300%	29 Juli 2019
13	RIJPY1120	6.617.400.000.000	1,6000%	12 Nopember 2020
14	SNI14	5.844.150.000.000	8,8000%	23 April 2014



Grafik 59: Struktur Outstanding SBN Valas per 31 Desember 2010 (dalam rupiah)

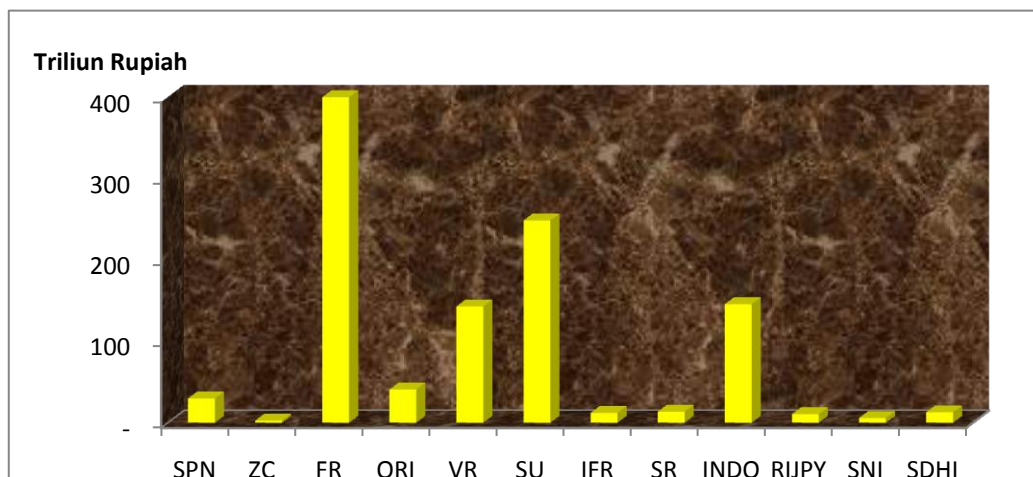


Grafik 60: Struktur Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2010



Grafik 61: Tingkat Kupon/Imbalan SBN Valas per 31 Desember 2010

Secara umum, struktur Surat Berharga Negara pada akhir tahun 2010 dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 62: Struktur Outstanding SUN dan SBSN Rupiah per 31 Desember 2010

V. MUTASI SURAT BERHARGA NEGARA SELAMA TAHUN 2010

Surat Berharga Negara dapat berubah saldonya akibat adanya penerbitan baru, pelunasan, pembelian kembali atau oleh sebab lainnya. Adapun ringkasan perubahan posisi SBN tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Mutasi *Principle Outstanding* SBN Tahun 2010

Jenis SBN (1)	31 Des 2010 (Rp) (2)	31 Des 2009 (Rp) (3)	Mutasi (Rp) (4=2-3)
A. SBN Rupiah			
FR	399.723.617.000.000	353.393.549.000.000	46.330.068.000.000
ORI	40.672.065.000.000	40.149.265.000.000	522.800.000.000
ZC	2.512.000.000.000	8.686.000.000.000	(6.174.000.000.000)
SPN	29.795.000.000.000	24.700.000.000.000	5.275.000.000.000
VR	142.795.082.000.000	143.286.082.000.000	(491.000.000.000)
SUP	248.432.177.309.092	251.875.025.331.844	(3.442.848.022.752)
SBSN	38.499.850.000.000	11.532.990.000.000	29.966.860.000.000
Total SBN Rupiah	902.609.791.309.092	833.622.911.331.844	68.986.879.977.248
B. SBN Valas			
Rupiah	151.498.350.000.000	133.480.000.000.000	18.018.350.000.000
USD	16.850.000.000	14.200.000.000	2.650.000.000
Rupiah	10.477.550.000.000	3.559.500.000.000	6.918.050.000.000
JPY	95.000.000.000	35.000.000.000	60.000.000.000
Total SUN Valas	161.975.900.000	137.039.500.000.000	24.936.400.000.000
Grand Total SBN (A+B)	1.064.585.691.309.090	970.662.411.331.844	93.923.279.977.248

Memperhatikan tabel di atas, dapat dilihat adanya perubahan yang cukup signifikan berupa meningkatnya porsi SBN berbunga tetap (FR) dan menurunnya porsi SBN berbunga mengambang (VR) serta menurunnya porsi Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menurunkan risiko tingkat bunga dengan meningkatkan porsi *fixed rate bonds* dalam portofolio SBN.

VI. PENCAPAIAN TARGET APBN TA 2010

Target APBN atas pengelolaan SUN ditetapkan dalam dua pos yaitu pos Bunga Utang SBN (SUN + SBSN) dan Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri yang menjadi fungsi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang (999.01).

A. Bunga Utang Surat Berharga Negara

Berdasarkan APBN-P TA 2010, total pagu Bunga dan Biaya Utang SBN Dalam Negeri ditetapkan sebesar Rp61,68 triliun sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SBN Dalam Negeri mencapai Rp60,23 triliun, sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp1,45 triliun.

Pagu Bunga Utang SUN Valas ditetapkan sebesar Rp14,47 triliun sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SUN valas mencapai Rp12,32 triliun, sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp0,73 triliun.

B. Surat Berharga Negara Neto

Surat Berharga Neto adalah selisih antara SBN yang diterbitkan dengan SBN yang jatuh tempo dan yang dibeli kembali. Mengingat target pembiayaan SBN dalam APBN ditetapkan dalam bentuk penerbitan SBN Neto, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SBN dan jumlah pembelian kembali, asalkan jumlah SBN Neto tidak melebihi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Untuk tahun 2010, SBN Neto dalam APBN-P ditetapkan sebesar Rp107,50 triliun, sedangkan realisasi SBN Neto mencapai Rp91,16 triliun, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp16,34 triliun dengan rincian sebagai terlampir di bawah ini.

	Target APBN-P	Realisasi (ao 28 Des 2010)	% realisasi (Target APBN-P)
SBN jatuh tempo 2010	67.540.415	67.540.415	100,00%
<i>SBN Netto (APBN)</i>	107.500.400	91.162.520	84,80%
<i>Rencana Buyback</i>	2.362.685	3.200.565	135,46%
Kebutuhan Penerbitan 2010	177.403.500	161.903.500	91,26%
SUN	134.936.640	134.936.640	100,00%
SUN Domestik	109.895.000	109.895.000	
- ON	72.100.000	72.100.000	
- ZC	-	-	
- SPN	29.795.000	29.795.000	
- ORI	8.000.000	8.000.000	
SUN Valas	25.041.640	25.041.640	
SBSN	26.966.860	26.966.860	100,00%
IFR	6.150.000	6.150.000	
SBSN Ritel	8.033.860	8.033.860	
SDHI	12.783.000	12.783.000	
SBSN Valas	-	-	

